# BUPATI TAPANULI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. | Pendapatan..... | Rp 1.437.280.040.724,40 |
| b. | Belanja ..... | Rp 1.375.858.189.855,41 |
| | ***Surplus/(Defisit)*** ..... | **Rp 61.421.850.868,99** |
| d. | Pembiayaan : | |
| | - Penerimaan ..... | Rp 18.264.856.637,87 |
| | - Pengeluaran ..... | Rp 69.282.056.597,00 |
| | ***Pembiayaan Netto*** ..... | **Rp (51.017.199.959,13)** |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp56.319.730.543,60 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan ..... | Rp 1.493.599.771.268,00 |
| b. | Realisasi ..... | Rp 1.437.280.040.724,40 |
| | ***Selisih*** ..... | **Rp 56.319.730.543,60** |

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp66.703.604.628,59 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Anggaran belanja setelah perubahan ..... | Rp | 1.442.561.794.484,00 |
| b. | Realisasi ..... | Rp | 1.375.858.189.855,41 |
| | ***Selisih ..... | **Rp** | **66.703.604.628,59** |

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp10.383.874.084,99) dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp | 51.037.976.784,00 |
| b. | Realisasi surplus (defisit) ..... | Rp | 61.421.850.868,99 |
| | ***Selisih ..... | **Rp** | **(10.383.874.084,99)** |

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.094.219,13 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan . | Rp | 18.272.950.857,00 |
| b. | Realisasi ..... | Rp | 18.264.856.637,87 |
| | ***Selisih ..... | **Rp** | **8.094.219,13** |

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp28.871.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan . | Rp | 69.310.927.641,00 |
| b. | Realisasi ..... | Rp | 69.282.056.597,00 |
| | ***Selisih .. ..... | **Rp** | **28.871.044,00** |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal ..... | Rp | 18.272.950.856,00 |
| b. | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan..... | Rp | 18.264.856.637,87 |
| | Sub total..... | Rp | 8.094.218,13 |
| c. | Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) ..... | Rp | 10.404.650.909,86 |
| d. | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya ..... | Rp | (8.094.218,13) |
| d. | Lain-lain..... | Rp | 0,00 |
| e. | Saldo Anggaran Lebih Akhir ..... | Rp | 10.404.650.909,86 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah aset ..... | Rp | 2.584.660.729.547,97 |
| b. | Jumlah kewajiban ..... | Rp | 312.940.298.062,80 |
| c. | Ekuitas ..... | Rp | 2.271.720.431.485,17 |
| d. | Jumlah kewajiban dan ekuitas dana ..... | Rp | 2.584.660.729.547,97 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan-LO ..... | Rp | 1.296.265.579.561,53 |
| b. | Beban ..... | Rp | 1.282.134.240.898,08 |
| c. | Surplus/ defisit dari kegiatan Operasional..... | Rp | 14.131.338.663,45 |
| d. | Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional ..... | Rp | (31.957.177,00) |
| e. | Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa ..... | Rp | 14.099.381.486,45 |
| f. | Surplus/ defisit dari pos luar biasa | Rp | 0,00 |
| g. | Surplus/ Defisit –LO..... | Rp | 14.099.381.486,45 |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari 2024 | Rp | 18.272.950.856,00 |
| b. | Arus kas bersih dari aktivitas operasi ..... | Rp | 160.117.432.424,93 |
| c. | Arus kas bersih dari aktivitas investasi ..... | Rp | (98.695.581.555,94) |
| d. | Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ..... | Rp | (69.282.056.597,00) |
| e. | Arus kas bersih dari aktivitas transitoris ..... | Rp | 9.943.018,92 |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 ..... | Rp | 10.683.462.109,98 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Ekuitas Awal ..... | Rp | 2.331.755.925.727,85 |
| b. | Surplus / defisit – LO ..... | Rp | 14.099.381.486,46 |
| c. | Koreksi ekuitas lainnya ..... | Rp | (74.134.875.729,14) |
| d. | Ekuitas Akhir ..... | Rp | 2.271.720.431.485,17 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. | Lampiran II | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. | Lampiran III | : | Laporan Operasional; |
| d. | Lampiran IV | : | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. | Lampiran V | : | Neraca; |
| f. | Lampiran VI | : | Laporan arus kas; |
| g. | Lampiran VII | : | Catatan atas laporan keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | : | Daftar piutang daerah; |
| i. | Lampiran IX | : | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; |
| j. | Lampiran X | : | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; |
| k. | Lampiran XI | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| l. | Lampiran XII | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| m. | Lampiran XIII | : | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| n. | Lampiran XIV | : | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; |
| o. | Lampiran XV | : | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. | Lampiran XVI | : | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. | Lampiran XVII | : | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. | Lampiran XVIII | : | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah (BUMD).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 08 - 09 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 08 - 09 - 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (2-118/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV.a)
NIP. 197709102006042004

# DAFTAR ISI


| NO | KETERANGAN | | Hal. |
|---|---|---|---|
| I | **LAMPIRAN I** | **: LAPORAN REALISASI ANGGARAN** | 1 |
| | **Lampiran I.1** | **: RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI** | 4 |
| | **Lampiran I.2** | **: RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN** | 25 |
| | **Lampiran I.3** | **: RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN** | |
| | | 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 50 |
| | | 2 DINAS KESEHATAN | 53 |
| | | 3 RSU DAERAH TARUTUNG | 68 |
| | | 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 69 |
| | | 5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 71 |
| | | 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 73 |
| | | 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 75 |
| | | 8 DINAS SOSIAL | 77 |
| | | 9 DINAS KETENAGAKERJAAN | 79 |
| | | 10 DINAS KETAHANAN PANGAN | 81 |
| | | 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 83 |
| | | 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 85 |
| | | 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 87 |
| | | 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 89 |
| | | 15 DINAS PERHUBUNGAN | 92 |
| | | 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 94 |
| | | 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 96 |
| | | 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 99 |
| | | 19 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 101 |
| | | 20 DINAS PERPUSTAKAAN | 103 |
| | | 21 DINAS PARIWISATA | 105 |
| | | 22 DINAS PERTANIAN | 107 |
| | | 23 SEKRETARIAT DAERAH | 109 |
| | | 24 SEKRETARIAT DPRD | 111 |
| | | 25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 113 |
| | | 26 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 115 |
| | | 27 BADAN PENDAPATAN DAERAH | 117 |
| | | 28 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 119 |
| | | 29 INSPEKTORAT | 121 |
| | | 30 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 123 |
| | | 31 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 126 |
| | | 32 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 128 |
| | | 33 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 130 |
| | | 34 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 132 |
| | | 35 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 133 |
| | | 36 KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 135 |
| | | 37 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 136 |
| | | 38 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 138 |

| NO | KETERANGAN | Hal. |
|---|---|---|
| | 39 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 140 |
| | 40 KANTOR KECAMATAN GAROGA | 142 |
| | 41 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 144 |
| | 42 KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 146 |
| | 43 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 148 |
| | 44 KANTOR KECAMATAN MUARA | 149 |
| | 45 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 151 |
| | **Lampiran I.4 : REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN** | 153 |
| **II** | **LAMPIRAN II : LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH** | 217 |
| **III** | **LAMPIRAN III : LAPORAN OPERASIONAL** | 218 |
| **IV** | **LAMPIRAN IV : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS** | 219 |
| **V** | **LAMPIRAN V : NERACA** | 220 |
| **VI** | **LAMPIRAN VI : LAPORAN ARUS KAS** | 224 |
| **VII** | **LAMPIRAN VII : CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | 226 |
| **VIII** | **LAMPIRAN VIII : DAFTAR PIUTANG DAERAH** | 460 |
| **IX** | **LAMPIRAN IX : DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH** | 461 |
| **X** | **LAMPIRAN X : DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR** | 462 |
| **XI** | **LAMPIRAN XI : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH** | 463 |
| **XII** | **LAMPIRAN XII : DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH** | 464 |
| **XIII** | **LAMPIRAN XIII : DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH** | 470 |
| **XIV** | **LAMPIRAN XIV : DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN** | 471 |
| **XV** | **LAMPIRAN XV : DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA** | 472 |
| **XVI** | **LAMPIRAN XVI : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH** | 473 |
| **XVII** | **LAMPIRAN XVII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | 474 |
| **XVIII** | **LAMPIRAN XVIII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | 475 |
| **XIX** | **LAMPIRAN XIX : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA** | 476 |
| **XX** | **LAMPIRAN XX : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH** | 477 |

Lampiran I Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)**
**TAHUN ANGGARAN 2024**
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | | | | | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.493.599.771.268,00** | **1.437.280.040.724,40** | **96,23** | **1.400.956.430.711,00** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **141.556.738.834,00** | **133.655.052.931,40** | **94,42** | **134.848.617.519,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 30.050.000.000,00 | 27.663.738.746,01 | 92,06 | 27.612.663.867,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 86.317.290.000,00 | 93.784.976.878,78 | 108,65 | 5.536.938.005,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.211.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 63,97 | 8.139.637.407,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.977.581.535,00 | 3.754.826.999,61 | 31,35 | 93.559.378.240,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **141.556.738.834,00** | **133.655.052.931,40** | **94,42** | **134.848.617.519,00** |
| | | | | | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.324.579.290.597,00** | **1.281.410.872.862,00** | **96,74** | **1.242.025.117.323,00** |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824.467.000,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.028.851.584.000,00 | 1.029.717.245.029,00 | 100,08 | 977.754.608.950,00 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 64.448.095.000,00 | 64.628.799.000,00 | 100,28 | 61.985.236.033,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 677.223.717.000,00 | 681.275.700.613,00 | 100,60 | 627.696.920.000,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 96.683.043.000,00 | 92.466.086.003,00 | 95,64 | 103.496.236.437,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 190.496.729.000,00 | 191.346.659.413,00 | 100,45 | 184.576.216.480,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN** | **1.028.851.584.000,00** | **1.029.717.245.029,00** | **100,08** | **977.754.608.950,00** |
| | | | | | |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 199.823.835.000,00 | 199.129.952.200,00 | 99,65 | 198.733.682.000,00 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | 6.867.270.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -** | **206.691.105.000,00** | **205.997.222.200,00** | **199,65** | **198.733.682.000,00** |
| | | | | | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 89.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 51,32 | 54.712.359.373,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 87.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 52,50 | 53.068.727.947,00 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.631.426,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH** | **89.036.601.597,00** | **45.696.405.633,00** | **51,32** | **54.712.359.373,00** |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER** | **1.324.579.290.597,00** | **1.281.410.872.862,00** | **96,74** | **1.242.025.117.323,00** |
| | | | | | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |
| | **JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |
| | | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.493.599.771.268,00** | **1.437.280.040.724,40** | **96,23** | **1.400.956.430.711,00** |
| | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.062.938.481.200,00** | **1.014.674.115.403,47** | **95,46** | **927.720.435.846,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 669.005.440.000,00 | 621.410.779.418,00 | 92,89 | 550.561.006.379,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 317.934.829.606,00 | 318.291.641.973,47 | 100,11 | 351.521.956.695,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 72.093.912.994,00 | 71.990.363.892,00 | 99,86 | 19.735.718.872,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 807.644.700,00 | 773.494.700,00 | 95,77 | 2.805.100.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA OPERASI** | **1.062.938.481.200,00** | **1.014.674.115.403,47** | **95,46** | **927.720.435.846,00** |
| | | | | | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **102.975.845.013,00** | **99.079.324.655,94** | **96,22** | **168.342.205.859,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.198.460.613,00 | 26.958.423.144,00 | 111,41 | 44.530.761.080,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.765.583.800,00 | 14.949.241.861,74 | 94,82 | 31.062.611.625,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62.693.955.540,00 | 56.854.991.209,34 | 90,69 | 92.684.156.254,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 64.676.900,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |
| | **JUMLAH BELANJA MODAL** | **102.975.845.013,00** | **99.079.324.655,94** | **96,22** | **168.342.205.859,00** |
| | | | | | |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **3.531.157.371,00** | **3.454.947.220,00** | **97,84** | **11.814.457.310,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| | **JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA** | **3.531.157.371,00** | **3.454.947.220,00** | **97,84** | **11.814.457.310,00** |
| | | | | | |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **273.116.310.900,00** | **258.649.802.576,00** | **94,70** | **265.473.294.238,00** |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 265.473.294.238,00 |
| | **JUMLAH BELANJA TRANSFER** | **273.116.310.900,00** | **258.649.802.576,00** | **94,70** | **265.473.294.238,00** |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **51.037.976.784,00** | **61.421.850.868,99** | **120,35** | **27.606.037.458,00** |
| | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **(51.037.976.784,00)** | **(51.017.199.959,13)** | **99,96** | **(9.333.086.602,00)** |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **18.272.950.857,00** | **18.264.856.637,87** | **99,96** | **63.076.262.956,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 18.272.950.857,00 | 18.264.856.637,87 | 99,96 | 63.076.262.956,00 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **18.272.950.857,00** | **18.264.856.637,87** | **99,96** | **63.076.262.956,00** |
| | | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **69.310.927.641,00** | **69.282.056.597,00** | **99,96** | **72.409.349.558,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.03.04 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **69.310.927.641,00** | **69.282.056.597,00** | **99,96** | **72.409.349.558,00** |
| | | | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **(51.037.976.784,00)** | **(51.017.199.959,13)** | **99,96** | **(9.333.086.602,00)** |
| | | | | | |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **0,00** | **10.404.650.909,86** | **0,00** | **18.272.950.856,00** |

**BUPATI TAPANULI UTARA**

**JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT**

Lampiran I.1 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4 | Pendapatan | 1.493.599.771.268 | 1.437.280.040.724,40 | (56.319.730.543,60) | 96,23 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 92.025.508.378 | 102.396.221.594,00 | 10.370.713.216,00 | 111,27 |
| 1.01 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 0 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 0 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 0 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | 0,00 |
| 1.02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 91.625.508.378 | 101.800.338.487,00 | 10.174.830.109,00 | 111,10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS KESEHATAN | 14.175.508.378 | 13.526.031.423,00 | (649.476.955,00) | 95,42 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 14.175.508.378 | 13.526.031.423,00 | (649.476.955,00) | 95,42 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 175.000.000 | 129.744.500,00 | (45.255.500,00) | 74,14 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 175.000.000 | 129.744.500,00 | (45.255.500,00) | 74,14 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 0 | 250.121,00 | 250.121,00 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 0 | 250.121,00 | 250.121,00 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 14.000.508.378 | 13.396.036.802,00 | (604.471.576,00) | 95,68 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.000.508.378 | 13.396.036.802,00 | (604.471.576,00) | 95,68 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | RSU DAERAH TARUTUNG | 77.450.000.000 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 77.450.000.000 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 77.450.000.000 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 77.450.000.000 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,98 |
| 1.03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 400.000.000 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,14 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 400.000.000 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,14 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 400.000.000 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,14 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 400.000.000 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,14 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 400.000.000 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,14 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 5.130.000.000 | 4.151.441.674,00 | (978.558.326,00) | 80,92 |
| 2.09 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 60.000.000 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,09 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 60.000.000 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,09 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 60.000.000 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,09 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 60.000.000 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,09 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 60.000.000 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,09 |
| 2.17 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1.280.000.000 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,69 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.280.000.000 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,69 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.280.000.000 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,69 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.280.000.000 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,69 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.280.000.000 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,69 |
| 2.07 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 160.000.000 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,88 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 160.000.000 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,88 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 160.000.000 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,88 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 160.000.000 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,88 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 160.000.000 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,88 |
| 2.11 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 250.000.000 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,98 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 250.000.000 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,98 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 250.000.000 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,98 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 250.000.000 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,98 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 250.000.000 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,98 |
| 2.15 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 340.000.000 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PERHUBUNGAN | 340.000.000 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 340.000.000 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 340.000.000 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 340.000.000 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 |
| 2.18 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 3.000.000.000 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.000.000.000 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 3.000.000.000 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.000.000.000 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.000.000.000 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 |
| 2.19 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 40.000.000 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 40.000.000 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 40.000.000 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 40.000.000 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 40.000.000 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 1.540.600.000 | 516.731.603,00 | (1.023.868.397,00) | 33,54 |
| 3.26 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 1.156.600.000 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 29,66 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PARIWISATA | 1.156.600.000 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 29,66 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.156.600.000 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 29,66 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.156.600.000 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 29,66 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.156.600.000 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 29,66 |
| 3.27 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 384.000.000 | 173.700.640,00 | (210.299.360,00) | 45,23 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PERTANIAN | 384.000.000 | 173.700.640,00 | (210.299.360,00) | 45,23 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 384.000.000 | 173.700.640,00 | (210.299.360,00) | 45,23 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 384.000.000 | 173.700.640,00 | (210.299.360,00) | 45,23 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 164.000.000 | 69.823.000,00 | (94.177.000,00) | 42,58 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 220.000.000 | 103.877.640,00 | (116.122.360,00) | 47,22 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 700.000.000 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 |
| 4.01 | | | SEKRETARIAT DAERAH | 700.000.000 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | | SEKRETARIAT DAERAH | 700.000.000 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 700.000.000 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 700.000.000 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 700.000.000 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 1.393.061.972.890 | 1.329.823.566.175,62 | (63.238.406.714,38) | 95,46 |
| 5.02 | | | KEUANGAN | 1.393.061.972.890 | 1.329.823.566.175,62 | (63.238.406.714,38) | 95,46 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.393.061.972.890 | 1.329.823.566.175,62 | (63.238.406.714,38) | 95,46 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.393.061.972.890 | 1.329.823.566.175,62 | (63.238.406.714,38) | 95,46 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 55.019.448.834 | 39.594.865.305,62 | (15.424.583.528,38) | 71,97 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.1.01 | Pajak Daerah | 30.050.000.000 | 27.663.738.746,01 | (2.386.261.253,99) | 92,06 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.211.867.299 | 8.451.510.307,00 | (4.760.356.992,00) | 63,97 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.757.581.535 | 3.479.616.252,61 | (8.277.965.282,39) | 29,59 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.324.579.290.597 | 1.281.410.622.741,00 | (43.168.667.856,00) | 96,74 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.235.542.689.000 | 1.235.714.217.108,00 | 171.528.108,00 | 100,01 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 89.036.601.597 | 45.696.405.633,00 | (43.340.195.964,00) | 51,32 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 13.463.233.459 | 8.818.078.129,00 | (4.645.155.330,00) | 65,50 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459 | 8.818.078.129,00 | (4.645.155.330,00) | 65,50 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 1.141.690.000 | 199.970.674,78 | (941.719.325,22) | 17,52 |
| 7.01 | | | KECAMATAN | 1.141.690.000 | 199.970.674,78 | (941.719.325,22) | 17,52 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 519.295.687 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 519.295.687 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 519.295.687 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 519.295.687 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 1.610.753 | 0,00 | (1.610.753,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.610.753 | 0,00 | (1.610.753,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.610.753 | 0,00 | (1.610.753,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.610.753 | 0,00 | (1.610.753,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.674.560 | 0,00 | (2.674.560,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.674.560 | 0,00 | (2.674.560,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.674.560 | 0,00 | (2.674.560,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 2.674.560 | 0,00 | (2.674.560,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 6.419.000 | 0,00 | (6.419.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 6.419.000 | 0,00 | (6.419.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.419.000 | 0,00 | (6.419.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 6.419.000 | 0,00 | (6.419.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 601.690.000 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,64 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 601.690.000 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,64 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 601.690.000 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,64 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 601.690.000 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,64 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 10.000.000 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 10.000.000 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10.000.000 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 10.000.000 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
| | | 5 | Belanja | 1.442.561.794.484 | 1.375.858.189.855,41 | (66.703.604.628,59) | 95,38 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 849.520.287.421 | 811.880.156.899,85 | (37.640.130.521,15) | 95,57 |
| 1.01 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 442.953.394.327 | 414.578.202.221,50 | (28.375.192.105,50) | 93,59 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 442.953.394.327 | 414.578.202.221,50 | (28.375.192.105,50) | 93,59 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 442.953.394.327 | 414.578.202.221,50 | (28.375.192.105,50) | 93,59 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 415.430.223.287 | 384.347.918.749,00 | (31.082.304.538,00) | 92,52 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 365.016.870.054 | 337.903.372.229,00 | (27.113.497.825,00) | 92,57 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.094.098.308 | 36.158.840.695,00 | (3.935.257.613,00) | 90,18 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 10.319.254.925 | 10.285.705.825,00 | (33.549.100,00) | 99,67 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 27.523.171.040 | 30.230.283.472,50 | 2.707.112.432,50 | 109,84 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.387.014.040 | 19.097.688.225,00 | 2.710.674.185,00 | 116,54 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.057.407.000 | 11.054.995.247,50 | (2.411.752,50) | 99,98 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 78.750.000 | 77.600.000,00 | (1.150.000,00) | 98,54 |
| 1.02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 282.254.226.936 | 279.330.449.413,00 | (2.923.777.523,00) | 98,96 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS KESEHATAN | 142.484.760.911 | 134.749.838.598,00 | (7.734.922.313,00) | 94,57 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 142.484.760.911 | 134.749.838.598,00 | (7.734.922.313,00) | 94,57 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 138.310.527.911 | 131.798.140.598,00 | (6.512.387.313,00) | 95,29 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 93.036.573.824 | 88.435.653.602,00 | (4.600.920.222,00) | 95,05 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.273.954.087 | 43.362.486.996,00 | (1.911.467.091,00) | 95,78 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 4.174.233.000 | 2.951.698.000,00 | (1.222.535.000,00) | 70,71 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.527.846.699 | 573.698.000,00 | (954.148.699,00) | 37,55 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.646.386.301 | 2.378.000.000,00 | (268.386.301,00) | 89,86 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | RSU DAERAH TARUTUNG | 118.979.589.025 | 124.452.786.004,00 | 5.473.196.979,00 | 104,60 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 118.979.589.025 | 124.452.786.004,00 | 5.473.196.979,00 | 104,60 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 114.954.457.025 | 120.030.440.515,00 | 5.075.983.490,00 | 104,42 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 45.858.457.025 | 38.777.954.526,00 | (7.080.502.499,00) | 84,56 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.096.000.000 | 81.252.485.989,00 | 12.156.485.989,00 | 117,59 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 4.025.132.000 | 4.422.345.489,00 | 397.213.489,00 | 109,87 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.025.132.000 | 4.119.144.489,00 | 1.094.012.489,00 | 136,16 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.000.000.000 | 303.201.000,00 | (696.799.000,00) | 30,32 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | | PUSKESMAS AEK RAJA | 868.928.000 | 832.559.110,00 | (36.368.890,00) | 95,81 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 5 | BELANJA DAERAH | 868.928.000 | 832.559.110,00 | (36.368.890,00) | 95,81 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 868.928.000 | 832.559.110,00 | (36.368.890,00) | 95,81 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 139.000.000 | 131.051.110,00 | (7.948.890,00) | 94,28 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 729.928.000 | 701.508.000,00 | (28.420.000,00) | 96,11 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | | PUSKESMAS BUTAR | 870.283.000 | 830.219.191,00 | (40.063.809,00) | 95,40 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 5 | BELANJA DAERAH | 870.283.000 | 830.219.191,00 | (40.063.809,00) | 95,40 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 870.283.000 | 830.219.191,00 | (40.063.809,00) | 95,40 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 141.000.000 | 131.976.191,00 | (9.023.809,00) | 93,60 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 729.283.000 | 698.243.000,00 | (31.040.000,00) | 95,74 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | | PUSKESMAS GAROGA | 1.101.226.000 | 1.073.673.397,00 | (27.552.603,00) | 97,50 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.101.226.000 | 1.073.673.397,00 | (27.552.603,00) | 97,50 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.101.226.000 | 1.073.673.397,00 | (27.552.603,00) | 97,50 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 177.000.000 | 185.952.397,00 | 8.952.397,00 | 105,06 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 924.226.000 | 887.721.000,00 | (36.505.000,00) | 96,05 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | | PUSKESMAS HUTABAGINDA | 1.189.960.000 | 1.137.279.581,00 | (52.680.419,00) | 95,57 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.189.960.000 | 1.137.279.581,00 | (52.680.419,00) | 95,57 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.189.960.000 | 1.137.279.581,00 | (52.680.419,00) | 95,57 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 189.000.000 | 167.128.455,00 | (21.871.545,00) | 88,43 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.960.000 | 970.151.126,00 | (30.808.874,00) | 96,92 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | | PUSKESMAS JANJI ANGKOLA | 929.873.000 | 910.014.390,00 | (19.858.610,00) | 97,86 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 5 | BELANJA DAERAH | 929.873.000 | 910.014.390,00 | (19.858.610,00) | 97,86 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 929.873.000 | 910.014.390,00 | (19.858.610,00) | 97,86 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 150.000.000 | 161.391.390,00 | 11.391.390,00 | 107,59 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 779.873.000 | 748.623.000,00 | (31.250.000,00) | 95,99 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | | PUSKESMAS LUMBAN SINAGA | 1.015.380.000 | 1.005.060.684,00 | (10.319.316,00) | 98,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.015.380.000 | 1.005.060.684,00 | (10.319.316,00) | 98,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.015.380.000 | 1.005.060.684,00 | (10.319.316,00) | 98,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 160.000.000 | 189.640.684,00 | 29.640.684,00 | 118,53 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 855.380.000 | 815.420.000,00 | (39.960.000,00) | 95,33 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | | PUSKESMAS MUARA | 1.049.563.000 | 1.034.700.830,00 | (14.862.170,00) | 98,58 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.049.563.000 | 1.034.700.830,00 | (14.862.170,00) | 98,58 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.049.563.000 | 1.034.700.830,00 | (14.862.170,00) | 98,58 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 170.000.000 | 169.797.210,00 | (202.790,00) | 99,88 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 879.563.000 | 864.903.620,00 | (14.659.380,00) | 98,33 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | | PUSKESMAS ONAN HASANG | 1.014.180.000 | 1.001.752.433,00 | (12.427.567,00) | 98,77 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.014.180.000 | 1.001.752.433,00 | (12.427.567,00) | 98,77 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.014.180.000 | 1.001.752.433,00 | (12.427.567,00) | 98,77 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 164.000.000 | 154.572.433,00 | (9.427.567,00) | 94,25 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 850.180.000 | 847.180.000,00 | (3.000.000,00) | 99,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | | PUSKESMAS PANGARIBUAN | 1.011.890.000 | 998.211.604,00 | (13.678.396,00) | 98,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.011.890.000 | 998.211.604,00 | (13.678.396,00) | 98,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.011.890.000 | 998.211.604,00 | (13.678.396,00) | 98,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 164.000.000 | 153.571.604,00 | (10.428.396,00) | 93,64 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 847.890.000 | 844.640.000,00 | (3.250.000,00) | 99,62 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | | PUSKESMAS PANIARAN | 865.989.000 | 856.703.499,00 | (9.285.501,00) | 98,93 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 5 | BELANJA DAERAH | 865.989.000 | 856.703.499,00 | (9.285.501,00) | 98,93 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 865.989.000 | 856.703.499,00 | (9.285.501,00) | 98,93 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 140.000.000 | 159.124.499,00 | 19.124.499,00 | 113,66 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 725.989.000 | 697.579.000,00 | (28.410.000,00) | 96,09 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | | PUSKESMAS PARMONANGAN | 1.118.824.000 | 958.381.999,00 | (160.442.001,00) | 85,66 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.118.824.000 | 958.381.999,00 | (160.442.001,00) | 85,66 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.118.824.000 | 958.381.999,00 | (160.442.001,00) | 85,66 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 162.000.000 | 152.521.499,00 | (9.478.501,00) | 94,15 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 956.824.000 | 805.860.500,00 | (150.963.500,00) | 84,22 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | | PUSKESMAS PARSINGKAMAN | 1.048.530.000 | 1.016.908.619,00 | (31.621.381,00) | 96,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.048.530.000 | 1.016.908.619,00 | (31.621.381,00) | 96,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.048.530.000 | 1.016.908.619,00 | (31.621.381,00) | 96,98 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 169.000.000 | 170.178.619,00 | 1.178.619,00 | 100,70 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 879.530.000 | 846.730.000,00 | (32.800.000,00) | 96,27 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | | PUSKESMAS SARULLA | 1.012.215.000 | 1.009.128.099,00 | (3.086.901,00) | 99,70 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.012.215.000 | 1.009.128.099,00 | (3.086.901,00) | 99,70 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.012.215.000 | 1.009.128.099,00 | (3.086.901,00) | 99,70 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 162.000.000 | 161.913.099,00 | (86.901,00) | 99,95 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 850.215.000 | 847.215.000,00 | (3.000.000,00) | 99,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | | PUSKESMAS SIATAS BARITA | 981.188.000 | 948.361.915,00 | (32.826.085,00) | 96,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 5 | BELANJA DAERAH | 981.188.000 | 948.361.915,00 | (32.826.085,00) | 96,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 981.188.000 | 948.361.915,00 | (32.826.085,00) | 96,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 158.000.000 | 158.943.915,00 | 943.915,00 | 100,60 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 823.188.000 | 789.418.000,00 | (33.770.000,00) | 95,90 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | | PUSKESMAS SIBORONGBORONG | 1.078.385.000 | 1.070.259.528,00 | (8.125.472,00) | 99,25 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.078.385.000 | 1.070.259.528,00 | (8.125.472,00) | 99,25 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.078.385.000 | 1.070.259.528,00 | (8.125.472,00) | 99,25 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 172.000.000 | 166.874.528,00 | (5.125.472,00) | 97,02 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 906.385.000 | 903.385.000,00 | (3.000.000,00) | 99,67 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | | PUSKESMAS SILANGIT | 874.454.000 | 849.987.100,00 | (24.466.900,00) | 97,20 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 5 | BELANJA DAERAH | 874.454.000 | 849.987.100,00 | (24.466.900,00) | 97,20 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 874.454.000 | 849.987.100,00 | (24.466.900,00) | 97,20 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 139.000.000 | 118.688.350,00 | (20.311.650,00) | 85,39 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 735.454.000 | 731.298.750,00 | (4.155.250,00) | 99,44 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | | PUSKESMAS SIMANGUMBAN | 921.936.000 | 918.196.035,00 | (3.739.965,00) | 99,59 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 5 | BELANJA DAERAH | 921.936.000 | 918.196.035,00 | (3.739.965,00) | 99,59 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 921.936.000 | 918.196.035,00 | (3.739.965,00) | 99,59 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 149.000.000 | 148.560.035,00 | (439.965,00) | 99,70 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 772.936.000 | 769.636.000,00 | (3.300.000,00) | 99,57 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | | PUSKESMAS SIPAHUTAR | 1.107.579.000 | 1.092.324.725,00 | (15.254.275,00) | 98,62 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.107.579.000 | 1.092.324.725,00 | (15.254.275,00) | 98,62 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.107.579.000 | 1.092.324.725,00 | (15.254.275,00) | 98,62 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 178.000.000 | 166.195.725,00 | (11.804.275,00) | 93,37 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 929.579.000 | 926.129.000,00 | (3.450.000,00) | 99,63 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | | PUSKESMAS SIPULTAK | 869.428.000 | 814.814.800,00 | (54.613.200,00) | 93,72 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 5 | BELANJA DAERAH | 869.428.000 | 814.814.800,00 | (54.613.200,00) | 93,72 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 869.428.000 | 814.814.800,00 | (54.613.200,00) | 93,72 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 141.000.000 | 102.006.800,00 | (38.993.200,00) | 72,35 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 728.428.000 | 712.808.000,00 | (15.620.000,00) | 97,86 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | | PUSKESMAS SITADATADA | 879.242.000 | 821.316.571,00 | (57.925.429,00) | 93,41 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 5 | BELANJA DAERAH | 879.242.000 | 821.316.571,00 | (57.925.429,00) | 93,41 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 879.242.000 | 821.316.571,00 | (57.925.429,00) | 93,41 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 143.000.000 | 133.067.071,00 | (9.932.929,00) | 93,05 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 736.242.000 | 688.249.500,00 | (47.992.500,00) | 93,48 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | | PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN | 980.824.000 | 947.970.701,00 | (32.853.299,00) | 96,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 5 | BELANJA DAERAH | 980.824.000 | 947.970.701,00 | (32.853.299,00) | 96,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 980.824.000 | 947.970.701,00 | (32.853.299,00) | 96,65 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 158.000.000 | 157.266.701,00 | (733.299,00) | 99,54 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 822.824.000 | 790.704.000,00 | (32.120.000,00) | 96,10 |
| 1.03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 89.141.362.251 | 83.787.074.947,47 | (5.354.287.303,53) | 93,99 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 64.334.663.531 | 59.276.808.323,00 | (5.057.855.208,00) | 92,14 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 64.334.663.531 | 59.276.808.323,00 | (5.057.855.208,00) | 92,14 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 10.836.082.598 | 10.547.671.196,00 | (288.411.402,00) | 97,34 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.542.514.153 | 7.284.257.368,00 | (258.256.785,00) | 96,58 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.293.568.445 | 3.263.413.828,00 | (30.154.617,00) | 99,08 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 53.498.580.933 | 48.729.137.127,00 | (4.769.443.806,00) | 91,08 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 53.498.580.933 | 48.729.137.127,00 | (4.769.443.806,00) | 91,08 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 24.806.698.720 | 24.510.266.624,47 | (296.432.095,53) | 98,81 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 24.806.698.720 | 24.510.266.624,47 | (296.432.095,53) | 98,81 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 24.718.908.220 | 24.423.208.714,47 | (295.699.505,53) | 98,80 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 113.530.000 | 113.510.000,00 | (20.000,00) | 99,98 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.605.378.220 | 24.309.698.714,47 | (295.679.505,53) | 98,80 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 87.790.500 | 87.057.910,00 | (732.590,00) | 99,17 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 87.790.500 | 87.057.910,00 | (732.590,00) | 99,17 |
| 1.04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 11.857.675.962 | 11.694.730.752,88 | (162.945.209,12) | 98,63 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 11.857.675.962 | 11.694.730.752,88 | (162.945.209,12) | 98,63 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 11.857.675.962 | 11.694.730.752,88 | (162.945.209,12) | 98,63 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 10.277.675.962 | 10.117.780.752,00 | (159.895.210,00) | 98,44 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.361.214.668 | 3.256.566.823,00 | (104.647.845,00) | 96,89 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.826.461.294 | 6.775.963.929,00 | (50.497.365,00) | 99,26 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 90.000.000 | 85.250.000,00 | (4.750.000,00) | 94,72 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | (3.049.999,12) | 99,81 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | (3.049.999,12) | 99,81 |
| 1.05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA P | 20.237.210.710 | 19.677.451.834,00 | (559.758.876,00) | 97,23 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16.693.310.712 | 16.340.153.958,00 | (353.156.754,00) | 97,88 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 16.693.310.712 | 16.340.153.958,00 | (353.156.754,00) | 97,88 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 16.692.806.712 | 16.339.649.958,00 | (353.156.754,00) | 97,88 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.410.474.156 | 5.112.268.741,00 | (298.205.415,00) | 94,49 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.282.332.556 | 6.227.381.217,00 | (54.951.339,00) | 99,13 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 5.000.000.000 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 504.000 | 504.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 504.000 | 504.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.543.899.998 | 3.337.297.876,00 | (206.602.122,00) | 94,17 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.543.899.998 | 3.337.297.876,00 | (206.602.122,00) | 94,17 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.537.553.998 | 3.330.951.876,00 | (206.602.122,00) | 94,16 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.612.742.092 | 2.433.000.726,00 | (179.741.366,00) | 93,12 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 924.811.906 | 897.951.150,00 | (26.860.756,00) | 97,10 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 6.346.000 | 6.346.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.346.000 | 6.346.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.06 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 3.076.417.235 | 2.812.247.731,00 | (264.169.504,00) | 91,41 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS SOSIAL | 3.076.417.235 | 2.812.247.731,00 | (264.169.504,00) | 91,41 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.076.417.235 | 2.812.247.731,00 | (264.169.504,00) | 91,41 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.061.691.235 | 2.797.521.731,00 | (264.169.504,00) | 91,37 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.241.782.469 | 2.055.397.930,00 | (186.384.539,00) | 91,69 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 632.264.066 | 568.879.101,00 | (63.384.965,00) | 89,97 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 157.644.700 | 143.244.700,00 | (14.400.000,00) | 90,87 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA | 65.143.817.463 | 61.549.307.162,10 | (3.594.510.300,90) | 94,48 |
| 2.07 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 3.472.593.537 | 2.518.590.398,00 | (954.003.139,00) | 72,53 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 3.472.593.537 | 2.518.590.398,00 | (954.003.139,00) | 72,53 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.472.593.537 | 2.518.590.398,00 | (954.003.139,00) | 72,53 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.472.593.537 | 2.518.590.398,00 | (954.003.139,00) | 72,53 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.630.779.687 | 1.903.942.603,00 | (726.837.084,00) | 72,37 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 841.813.850 | 614.647.795,00 | (227.166.055,00) | 73,01 |
| 2.08 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA | 480.000.000 | 455.052.504,00 | (24.947.496,00) | 94,80 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREM | 480.000.000 | 455.052.504,00 | (24.947.496,00) | 94,80 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 480.000.000 | 455.052.504,00 | (24.947.496,00) | 94,80 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 480.000.000 | 455.052.504,00 | (24.947.496,00) | 94,80 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.900.000 | 1.874.404,00 | (3.025.596,00) | 38,25 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 435.100.000 | 413.178.100,00 | (21.921.900,00) | 94,96 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.09 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 4.963.707.513 | 4.676.360.331,00 | (287.347.182,00) | 94,21 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.963.707.513 | 4.676.360.331,00 | (287.347.182,00) | 94,21 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 4.963.707.513 | 4.676.360.331,00 | (287.347.182,00) | 94,21 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.963.707.513 | 4.676.360.331,00 | (287.347.182,00) | 94,21 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.831.606.637 | 3.646.678.640,00 | (184.927.997,00) | 95,17 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.132.100.876 | 1.029.681.691,00 | (102.419.185,00) | 90,95 |
| 2.10 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 209.761.810 | 194.440.500,00 | (15.321.310,00) | 92,70 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 209.761.810 | 194.440.500,00 | (15.321.310,00) | 92,70 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 209.761.810 | 194.440.500,00 | (15.321.310,00) | 92,70 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 45.761.750 | 30.440.500,00 | (15.321.250,00) | 66,52 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.761.750 | 30.440.500,00 | (15.321.250,00) | 66,52 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 164.000.060 | 164.000.000,00 | (60,00) | 100,00 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060 | 164.000.000,00 | (60,00) | 100,00 |
| 2.11 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 9.961.346.240 | 9.788.028.988,24 | (173.317.251,76) | 98,26 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9.961.346.240 | 9.788.028.988,24 | (173.317.251,76) | 98,26 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 9.961.346.240 | 9.788.028.988,24 | (173.317.251,76) | 98,26 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 7.465.565.340 | 7.317.182.763,00 | (148.382.577,00) | 98,01 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.746.608.628 | 2.657.429.408,00 | (89.179.220,00) | 96,75 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.718.956.712 | 4.659.753.355,00 | (59.203.357,00) | 98,75 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 2.495.780.900 | 2.470.846.225,24 | (24.934.674,76) | 99,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.635.780.900 | 1.628.745.000,00 | (7.035.900,00) | 99,57 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 860.000.000 | 842.101.225,24 | (17.898.774,76) | 97,92 |
| 2.12 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN | 3.656.608.145 | 3.560.227.160,00 | (96.380.985,00) | 97,36 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.656.608.145 | 3.560.227.160,00 | (96.380.985,00) | 97,36 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.656.608.145 | 3.560.227.160,00 | (96.380.985,00) | 97,36 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.603.858.145 | 3.507.727.160,00 | (96.130.985,00) | 97,33 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.548.276.066 | 2.480.598.851,00 | (67.677.215,00) | 97,34 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.055.582.079 | 1.027.128.309,00 | (28.453.770,00) | 97,30 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 52.750.000 | 52.500.000,00 | (250.000,00) | 99,53 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.750.000 | 52.500.000,00 | (250.000,00) | 99,53 |
| 2.13 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.597.556.853 | 3.443.612.337,00 | (153.944.516,00) | 95,72 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.597.556.853 | 3.443.612.337,00 | (153.944.516,00) | 95,72 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.597.556.853 | 3.443.612.337,00 | (153.944.516,00) | 95,72 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.566.556.853 | 3.414.062.335,00 | (152.494.518,00) | 95,72 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.981.338.423 | 2.886.916.616,00 | (94.421.807,00) | 96,83 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 560.218.430 | 502.145.719,00 | (58.072.711,00) | 89,63 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 31.000.000 | 29.550.002,00 | (1.449.998,00) | 95,32 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.000.000 | 29.550.002,00 | (1.449.998,00) | 95,32 |
| 2.14 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN | 11.730.230.241 | 11.345.619.199,00 | (384.611.042,00) | 96,72 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREM | 11.730.230.241 | 11.345.619.199,00 | (384.611.042,00) | 96,72 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 11.730.230.241 | 11.345.619.199,00 | (384.611.042,00) | 96,72 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 11.702.725.041 | 11.318.919.199,00 | (383.805.842,00) | 96,72 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.700.994.841 | 4.586.862.573,00 | (114.132.268,00) | 97,57 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.001.730.200 | 6.732.056.626,00 | (269.673.574,00) | 96,15 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 27.505.200 | 26.700.000,00 | (805.200,00) | 97,07 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.505.200 | 26.700.000,00 | (805.200,00) | 97,07 |
| 2.15 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 4.560.650.769 | 4.396.662.343,00 | (163.988.426,00) | 96,40 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PERHUBUNGAN | 4.560.650.769 | 4.396.662.343,00 | (163.988.426,00) | 96,40 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 4.560.650.769 | 4.396.662.343,00 | (163.988.426,00) | 96,40 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.560.650.769 | 4.396.662.343,00 | (163.988.426,00) | 96,40 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.748.837.425 | 3.659.776.271,00 | (89.061.154,00) | 97,62 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 811.813.344 | 736.886.072,00 | (74.927.272,00) | 90,77 |
| 2.16 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.822.298.541 | 3.669.439.527,00 | (152.859.014,00) | 96,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.822.298.541 | 3.669.439.527,00 | (152.859.014,00) | 96,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.822.298.541 | 3.669.439.527,00 | (152.859.014,00) | 96,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.822.298.541 | 3.669.439.527,00 | (152.859.014,00) | 96,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.538.510.741 | 2.434.387.272,00 | (104.123.469,00) | 95,90 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.233.787.800 | 1.185.052.255,00 | (48.735.545,00) | 96,05 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.17 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 8.305.748.708 | 7.789.402.496,00 | (516.346.212,00) | 93,78 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 8.305.748.708 | 7.789.402.496,00 | (516.346.212,00) | 93,78 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 8.305.748.708 | 7.789.402.496,00 | (516.346.212,00) | 93,78 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 8.305.748.708 | 7.789.402.496,00 | (516.346.212,00) | 93,78 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.648.492.040 | 5.210.226.895,00 | (438.265.145,00) | 92,24 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.657.256.668 | 2.579.175.601,00 | (78.081.067,00) | 97,06 |
| 2.18 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 3.398.135.281 | 3.204.509.564,00 | (193.625.717,00) | 94,30 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.398.135.281 | 3.204.509.564,00 | (193.625.717,00) | 94,30 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.398.135.281 | 3.204.509.564,00 | (193.625.717,00) | 94,30 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.398.135.281 | 3.204.509.564,00 | (193.625.717,00) | 94,30 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.302.940.565 | 2.245.294.984,00 | (57.645.581,00) | 97,50 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.095.194.716 | 959.214.580,00 | (135.980.136,00) | 87,58 |
| 2.19 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3.344.338.761 | 3.091.300.500,00 | (253.038.261,00) | 92,43 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3.344.338.761 | 3.091.300.500,00 | (253.038.261,00) | 92,43 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.344.338.761 | 3.091.300.500,00 | (253.038.261,00) | 92,43 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.344.338.761 | 3.091.300.500,00 | (253.038.261,00) | 92,43 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.070.264.745 | 1.971.527.442,00 | (98.737.303,00) | 95,23 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 954.074.016 | 869.773.058,00 | (84.300.958,00) | 91,16 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 320.000.000 | 250.000.000,00 | (70.000.000,00) | 78,13 |
| 2.20 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 69.936.050 | 66.977.800,00 | (2.958.250,00) | 95,77 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 69.936.050 | 66.977.800,00 | (2.958.250,00) | 95,77 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 69.936.050 | 66.977.800,00 | (2.958.250,00) | 95,77 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 69.936.050 | 66.977.800,00 | (2.958.250,00) | 95,77 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.936.050 | 66.977.800,00 | (2.958.250,00) | 95,77 |
| 2.22 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 130.000.000 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 130.000.000 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 130.000.000 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 130.000.000 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000 | 79.735.600,00 | (264.400,00) | 99,67 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.23 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3.420.905.014 | 3.201.536.814,86 | (219.368.199,14) | 93,59 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | DINAS PERPUSTAKAAN | 3.420.905.014 | 3.201.536.814,86 | (219.368.199,14) | 93,59 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.420.905.014 | 3.201.536.814,86 | (219.368.199,14) | 93,59 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.334.875.814 | 3.117.268.374,00 | (217.607.440,00) | 93,47 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.793.926.371 | 2.642.382.116,00 | (151.544.255,00) | 94,58 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 540.949.443 | 474.886.258,00 | (66.063.185,00) | 87,79 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 86.029.200 | 84.268.440,86 | (1.760.759,14) | 97,95 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.934.200 | 9.200.000,00 | (1.734.200,00) | 84,14 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 33.885.000 | 33.869.430,00 | (15.570,00) | 99,95 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 41.210.000 | 41.199.010,86 | (10.989,14) | 99,97 |
| 2.24 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 20.000.000 | 17.811.100,00 | (2.188.900,00) | 89,06 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | DINAS PERPUSTAKAAN | 20.000.000 | 17.811.100,00 | (2.188.900,00) | 89,06 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 20.000.000 | 17.811.100,00 | (2.188.900,00) | 89,06 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000 | 17.811.100,00 | (2.188.900,00) | 89,06 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 17.811.100,00 | (2.188.900,00) | 89,06 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 51.102.362.376 | 48.326.339.593,10 | (2.776.022.782,90) | 94,57 |
| 3.25 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 795.193.648 | 790.877.400,00 | (4.316.248,00) | 99,46 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 795.193.648 | 790.877.400,00 | (4.316.248,00) | 99,46 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 795.193.648 | 790.877.400,00 | (4.316.248,00) | 99,46 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 795.193.648 | 790.877.400,00 | (4.316.248,00) | 99,46 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 795.193.648 | 790.877.400,00 | (4.316.248,00) | 99,46 |
| 3.26 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 14.738.235.372 | 13.491.623.929,00 | (1.246.611.443,00) | 91,54 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PARIWISATA | 14.738.235.372 | 13.491.623.929,00 | (1.246.611.443,00) | 91,54 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 14.738.235.372 | 13.491.623.929,00 | (1.246.611.443,00) | 91,54 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 7.146.503.172 | 6.819.583.256,00 | (326.919.916,00) | 95,43 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.781.757.613 | 3.535.004.964,00 | (246.752.649,00) | 93,48 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.364.745.559 | 3.284.578.292,00 | (80.167.267,00) | 97,62 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 7.591.732.200 | 6.672.040.673,00 | (919.691.527,00) | 87,89 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 469.894.000 | 445.291.918,00 | (24.602.082,00) | 94,76 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.771.838.200 | 2.673.489.389,00 | (98.348.811,00) | 96,45 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.350.000.000 | 3.553.259.366,00 | (796.740.634,00) | 81,68 |
| 3.27 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 35.245.909.106 | 33.732.595.164,10 | (1.513.313.941,90) | 95,71 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.970.000.000 | 1.928.256.715,00 | (41.743.285,00) | 97,88 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.970.000.000 | 1.928.256.715,00 | (41.743.285,00) | 97,88 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.970.000.000 | 1.928.256.715,00 | (41.743.285,00) | 97,88 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.970.000.000 | 1.928.256.715,00 | (41.743.285,00) | 97,88 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PERTANIAN | 33.275.909.106 | 31.804.338.449,10 | (1.471.570.656,90) | 95,58 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 33.275.909.106 | 31.804.338.449,10 | (1.471.570.656,90) | 95,58 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 33.201.909.106 | 31.732.618.649,10 | (1.469.290.456,90) | 95,57 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 15.631.901.085 | 14.640.900.465,00 | (991.000.620,00) | 93,66 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.570.008.021 | 17.091.718.184,10 | (478.289.836,90) | 97,28 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 74.000.000 | 71.719.800,00 | (2.280.200,00) | 96,92 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 74.000.000 | 71.719.800,00 | (2.280.200,00) | 96,92 |
| 3.30 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 183.024.300 | 172.121.000,00 | (10.903.300,00) | 94,04 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 183.024.300 | 172.121.000,00 | (10.903.300,00) | 94,04 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 183.024.300 | 172.121.000,00 | (10.903.300,00) | 94,04 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 183.024.300 | 172.121.000,00 | (10.903.300,00) | 94,04 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 183.024.300 | 172.121.000,00 | (10.903.300,00) | 94,04 |
| 3.31 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 139.999.950 | 139.122.100,00 | (877.850,00) | 99,37 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 139.999.950 | 139.122.100,00 | (877.850,00) | 99,37 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 139.999.950 | 139.122.100,00 | (877.850,00) | 99,37 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 139.999.950 | 139.122.100,00 | (877.850,00) | 99,37 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.999.950 | 39.122.100,00 | (877.850,00) | 97,81 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 70.116.001.110 | 67.127.183.984,00 | (2.988.817.126,00) | 95,74 |
| 4.01 | | | SEKRETARIAT DAERAH | 27.445.588.098 | 26.251.306.390,00 | (1.194.281.708,00) | 95,65 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | | SEKRETARIAT DAERAH | 27.445.588.098 | 26.251.306.390,00 | (1.194.281.708,00) | 95,65 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 27.445.588.098 | 26.251.306.390,00 | (1.194.281.708,00) | 95,65 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 27.226.595.699 | 26.039.606.390,00 | (1.186.989.309,00) | 95,64 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.298.198.097 | 12.263.553.018,00 | (1.034.645.079,00) | 92,22 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.608.397.602 | 12.471.053.372,00 | (137.344.230,00) | 98,91 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 760.000.000 | 760.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 560.000.000 | 545.000.000,00 | (15.000.000,00) | 97,32 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 218.992.399 | 211.700.000,00 | (7.292.399,00) | 96,67 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 218.992.399 | 211.700.000,00 | (7.292.399,00) | 96,67 |
| 4.02 | | | SEKRETARIAT DPRD | 42.670.413.012 | 40.875.877.594,00 | (1.794.535.418,00) | 95,79 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | | SEKRETARIAT DPRD | 42.670.413.012 | 40.875.877.594,00 | (1.794.535.418,00) | 95,79 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 42.670.413.012 | 40.875.877.594,00 | (1.794.535.418,00) | 95,79 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 42.596.063.012 | 40.801.692.594,00 | (1.794.370.418,00) | 95,79 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 16.501.427.001 | 16.263.735.145,00 | (237.691.856,00) | 98,56 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.094.636.011 | 24.537.957.449,00 | (1.556.678.562,00) | 94,03 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 74.350.000 | 74.185.000,00 | (165.000,00) | 99,78 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 74.350.000 | 74.185.000,00 | (165.000,00) | 99,78 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 302.744.794.233 | 285.475.302.564,90 | (17.269.491.668,10) | 94,30 |
| 5.01 | | | PERENCANAAN | 5.413.758.576 | 5.079.511.449,00 | (334.247.127,00) | 93,83 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.413.758.576 | 5.079.511.449,00 | (334.247.127,00) | 93,83 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 5.413.758.576 | 5.079.511.449,00 | (334.247.127,00) | 93,83 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 5.413.758.576 | 5.079.511.449,00 | (334.247.127,00) | 93,83 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.962.697.735 | 3.713.055.864,00 | (249.641.871,00) | 93,70 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.451.060.841 | 1.366.455.585,00 | (84.605.256,00) | 94,17 |
| 5.02 | | | KEUANGAN | 293.377.131.634 | 276.633.700.184,90 | (16.743.431.449,10) | 94,29 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 288.384.067.508 | 271.924.529.582,90 | (16.459.537.925,10) | 94,29 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 288.384.067.508 | 271.924.529.582,90 | (16.459.537.925,10) | 94,29 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 11.713.026.237 | 9.799.579.786,90 | (1.913.446.450,10) | 83,66 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.076.879.332 | 4.211.972.831,00 | (864.906.501,00) | 82,96 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.539.493.005 | 3.379.771.535,90 | (159.721.469,10) | 95,49 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900 | 2.207.835.420,00 | (888.818.480,00) | 71,30 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 23.573.000 | 20.200.000,00 | (3.373.000,00) | 85,69 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.573.000 | 20.200.000,00 | (3.373.000,00) | 85,69 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | (76.210.151,00) | 97,84 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | (76.210.151,00) | 97,84 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.4 | BELANJA TRANSFER | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 | (14.466.508.324,00) | 94,70 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 | (14.466.508.324,00) | 94,70 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4.993.064.126 | 4.709.170.602,00 | (283.893.524,00) | 94,31 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 4.993.064.126 | 4.709.170.602,00 | (283.893.524,00) | 94,31 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.990.789.126 | 4.706.895.602,00 | (283.893.524,00) | 94,31 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.534.542.394 | 3.376.183.581,00 | (158.358.813,00) | 95,52 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.456.246.732 | 1.330.712.021,00 | (125.534.711,00) | 91,38 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 2.275.000 | 2.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.275.000 | 2.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.03 | | | KEPEGAWAIAN | 3.881.538.123 | 3.698.452.531,00 | (183.085.592,00) | 95,28 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.881.538.123 | 3.698.452.531,00 | (183.085.592,00) | 95,28 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.881.538.123 | 3.698.452.531,00 | (183.085.592,00) | 95,28 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.467.539.523 | 3.290.832.531,00 | (176.706.992,00) | 94,90 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.688.375.034 | 2.590.129.840,00 | (98.245.194,00) | 96,35 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 749.164.489 | 670.702.691,00 | (78.461.798,00) | 89,53 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 413.998.600 | 407.620.000,00 | (6.378.600,00) | 98,46 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 411.100.000 | 405.435.000,00 | (5.665.000,00) | 98,62 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.898.600 | 2.185.000,00 | (713.600,00) | 75,38 |
| 5.04 | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 32.510.900 | 31.744.900,00 | (766.000,00) | 97,64 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32.510.900 | 31.744.900,00 | (766.000,00) | 97,64 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 32.510.900 | 31.744.900,00 | (766.000,00) | 97,64 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 32.510.900 | 31.744.900,00 | (766.000,00) | 97,64 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.510.900 | 31.744.900,00 | (766.000,00) | 97,64 |
| 5.05 | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 39.855.000 | 31.893.500,00 | (7.961.500,00) | 80,02 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 39.855.000 | 31.893.500,00 | (7.961.500,00) | 80,02 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 39.855.000 | 31.893.500,00 | (7.961.500,00) | 80,02 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 39.855.000 | 31.893.500,00 | (7.961.500,00) | 80,02 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.855.000 | 31.893.500,00 | (7.961.500,00) | 80,02 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| 6.01 | | | INSPEKTORAT DAERAH | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | | INSPEKTORAT | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.191.894.825 | 5.955.364.343,00 | (236.530.482,00) | 96,18 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.370.274.400 | 3.230.380.574,00 | (139.893.826,00) | 95,85 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 35.347.477.041 | 33.406.306.903,46 | (1.941.170.137,54) | 94,51 |
| 7.01 | | | KECAMATAN | 35.347.477.041 | 33.406.306.903,46 | (1.941.170.137,54) | 94,51 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 6.641.514.703 | 6.483.899.800,00 | (157.614.903,00) | 97,63 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 6.641.514.703 | 6.483.899.800,00 | (157.614.903,00) | 97,63 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 6.641.514.703 | 6.483.899.800,00 | (157.614.903,00) | 97,63 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.230.542.551 | 6.113.878.178,00 | (116.664.373,00) | 98,13 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 410.972.152 | 370.021.622,00 | (40.950.530,00) | 90,04 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 2.336.161.542 | 1.789.117.501,00 | (547.044.041,00) | 76,58 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 2.336.161.542 | 1.789.117.501,00 | (547.044.041,00) | 76,58 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.316.424.842 | 1.769.717.501,00 | (546.707.341,00) | 76,40 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.049.408.828 | 1.547.861.391,00 | (501.547.437,00) | 75,53 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 267.016.014 | 221.856.110,00 | (45.159.904,00) | 83,09 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 19.736.700 | 19.400.000,00 | (336.700,00) | 98,29 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.736.700 | 19.400.000,00 | (336.700,00) | 98,29 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 1.376.687.050 | 1.294.372.491,00 | (82.314.559,00) | 94,02 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.376.687.050 | 1.294.372.491,00 | (82.314.559,00) | 94,02 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.376.687.050 | 1.294.372.491,00 | (82.314.559,00) | 94,02 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.098.590.086 | 1.061.293.486,00 | (37.296.600,00) | 96,61 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.096.964 | 233.079.005,00 | (45.017.959,00) | 83,81 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 2.087.942.161 | 1.966.895.903,00 | (121.046.258,00) | 94,20 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 2.087.942.161 | 1.966.895.903,00 | (121.046.258,00) | 94,20 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.073.693.786 | 1.966.759.103,00 | (106.934.683,00) | 94,84 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.829.188.711 | 1.758.022.822,00 | (71.165.889,00) | 96,11 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.505.075 | 208.736.281,00 | (35.768.794,00) | 85,37 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 14.248.375 | 136.800,00 | (14.111.575,00) | 0,96 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.248.375 | 136.800,00 | (14.111.575,00) | 0,96 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 2.652.367.975 | 2.575.705.527,00 | (76.662.448,00) | 97,11 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 2.652.367.975 | 2.575.705.527,00 | (76.662.448,00) | 97,11 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.652.367.975 | 2.575.705.527,00 | (76.662.448,00) | 97,11 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.374.287.061 | 2.307.113.577,00 | (67.173.484,00) | 97,17 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.080.914 | 268.591.950,00 | (9.488.964,00) | 96,59 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 2.035.155.441 | 1.993.490.144,00 | (41.665.297,00) | 97,95 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 2.035.155.441 | 1.993.490.144,00 | (41.665.297,00) | 97,95 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.035.155.441 | 1.993.490.144,00 | (41.665.297,00) | 97,95 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.770.942.777 | 1.732.319.554,00 | (38.623.223,00) | 97,82 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.212.664 | 261.170.590,00 | (3.042.074,00) | 98,85 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 1.208.808.221 | 1.149.357.030,00 | (59.451.191,00) | 95,08 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.208.808.221 | 1.149.357.030,00 | (59.451.191,00) | 95,08 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.188.643.821 | 1.149.357.030,00 | (39.286.791,00) | 96,69 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 942.307.532 | 920.591.880,00 | (21.715.652,00) | 97,70 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 246.336.289 | 228.765.150,00 | (17.571.139,00) | 92,87 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 20.164.400 | 0,00 | (20.164.400,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.164.400 | 0,00 | (20.164.400,00) | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 1.158.164.913 | 1.122.522.647,00 | (35.642.266,00) | 96,92 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.158.164.913 | 1.122.522.647,00 | (35.642.266,00) | 96,92 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.158.164.913 | 1.122.522.647,00 | (35.642.266,00) | 96,92 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 878.127.100 | 855.313.220,00 | (22.813.880,00) | 97,40 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 280.037.813 | 267.209.427,00 | (12.828.386,00) | 95,42 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.141.612.433 | 2.030.177.874,00 | (111.434.559,00) | 94,80 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 2.141.612.433 | 2.030.177.874,00 | (111.434.559,00) | 94,80 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.133.162.433 | 2.021.777.874,00 | (111.384.559,00) | 94,78 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.854.801.683 | 1.797.799.477,00 | (57.002.206,00) | 96,93 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.360.750 | 223.978.397,00 | (54.382.353,00) | 80,46 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 8.450.000 | 8.400.000,00 | (50.000,00) | 99,41 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.450.000 | 8.400.000,00 | (50.000,00) | 99,41 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 1.597.008.386 | 1.551.995.433,00 | (45.012.953,00) | 97,18 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.597.008.386 | 1.551.995.433,00 | (45.012.953,00) | 97,18 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.597.008.386 | 1.551.995.433,00 | (45.012.953,00) | 97,18 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.312.920.972 | 1.278.242.813,00 | (34.678.159,00) | 97,36 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 284.087.414 | 273.752.620,00 | (10.334.794,00) | 96,36 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 1.729.563.399 | 1.657.367.257,00 | (72.196.142,00) | 95,83 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.729.563.399 | 1.657.367.257,00 | (72.196.142,00) | 95,83 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.729.563.399 | 1.657.367.257,00 | (72.196.142,00) | 95,83 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.317.172.709 | 1.284.800.654,00 | (32.372.055,00) | 97,54 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 412.390.690 | 372.566.603,00 | (39.824.087,00) | 90,34 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 3.381.540.466 | 3.249.616.192,00 | (131.924.274,00) | 96,10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 3.381.540.466 | 3.249.616.192,00 | (131.924.274,00) | 96,10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.364.980.466 | 3.233.056.192,00 | (131.924.274,00) | 96,08 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.043.118.501 | 2.981.844.507,00 | (61.273.994,00) | 97,99 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 321.861.965 | 251.211.685,00 | (70.650.280,00) | 78,05 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 16.560.000 | 16.560.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.560.000 | 16.560.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 1.582.291.946 | 1.536.670.903,00 | (45.621.043,00) | 97,12 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.582.291.946 | 1.536.670.903,00 | (45.621.043,00) | 97,12 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.560.291.946 | 1.515.010.903,00 | (45.281.043,00) | 97,10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.307.083.196 | 1.272.528.519,00 | (34.554.677,00) | 97,36 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 253.208.750 | 242.482.384,00 | (10.726.366,00) | 95,76 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 22.000.000 | 21.660.000,00 | (340.000,00) | 98,45 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.000.000 | 21.660.000,00 | (340.000,00) | 98,45 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 1.232.457.895 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.232.457.895 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.232.457.895 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 957.067.395 | 905.750.210,00 | (51.317.185,00) | 94,64 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 275.390.500 | 258.429.040,00 | (16.961.460,00) | 93,84 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 1.896.347.309 | 1.669.580.640,00 | (226.766.669,00) | 88,04 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 1.896.347.309 | 1.669.580.640,00 | (226.766.669,00) | 88,04 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.896.347.309 | 1.669.580.640,00 | (226.766.669,00) | 88,04 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.593.727.190 | 1.470.325.549,00 | (123.401.641,00) | 92,26 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 302.620.119 | 199.255.091,00 | (103.365.028,00) | 65,84 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | | KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG | 200.000.000 | 176.109.238,00 | (23.890.762,00) | 88,05 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 5 | BELANJA DAERAH | 200.000.000 | 176.109.238,00 | (23.890.762,00) | 88,05 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 200.000.000 | 176.109.238,00 | (23.890.762,00) | 88,05 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.162.000 | 12.162.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 187.838.000 | 163.947.238,00 | (23.890.762,00) | 87,28 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | | KELURAHAN HUTATORUAN V | 200.000.000 | 190.963.100,00 | (9.036.900,00) | 95,48 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 5 | BELANJA DAERAH | 200.000.000 | 190.963.100,00 | (9.036.900,00) | 95,48 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 200.000.000 | 190.963.100,00 | (9.036.900,00) | 95,48 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 14.258.000 | 10.548.000,00 | (3.710.000,00) | 73,98 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 185.742.000 | 180.415.100,00 | (5.326.900,00) | 97,13 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | | KELURAHAN HUTATORUAN VI | 191.592.550 | 176.630.014,00 | (14.962.536,00) | 92,19 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 5 | BELANJA DAERAH | 191.592.550 | 176.630.014,00 | (14.962.536,00) | 92,19 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 191.592.550 | 176.630.014,00 | (14.962.536,00) | 92,19 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 15.328.000 | 13.278.000,00 | (2.050.000,00) | 86,63 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 176.264.550 | 163.352.014,00 | (12.912.536,00) | 92,67 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | | KELURAHAN HUTATORUAN VII | 292.350.262 | 281.389.225,00 | (10.961.037,00) | 96,25 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 5 | BELANJA DAERAH | 292.350.262 | 281.389.225,00 | (10.961.037,00) | 96,25 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 137.253.456 | 126.659.225,00 | (10.594.231,00) | 92,28 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 30.948.000 | 30.948.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.305.456 | 95.711.225,00 | (10.594.231,00) | 90,03 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 5.2 | BELANJA MODAL | 155.096.806 | 154.730.000,00 | (366.806,00) | 99,76 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 155.096.806 | 154.730.000,00 | (366.806,00) | 99,76 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | | KELURAHAN HUTATORUAN IX | 202.009.535 | 175.305.161,00 | (26.704.374,00) | 86,78 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 5 | BELANJA DAERAH | 202.009.535 | 175.305.161,00 | (26.704.374,00) | 86,78 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 108.903.535 | 82.375.161,00 | (26.528.374,00) | 75,64 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 15.988.000 | 15.308.000,00 | (680.000,00) | 95,75 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.915.535 | 67.067.161,00 | (25.848.374,00) | 72,18 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 5.2 | BELANJA MODAL | 93.106.000 | 92.930.000,00 | (176.000,00) | 99,81 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 93.106.000 | 92.930.000,00 | (176.000,00) | 99,81 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | | KELURAHAN HUTATORUAN X | 199.970.325 | 195.582.430,00 | (4.387.895,00) | 97,81 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 5 | BELANJA DAERAH | 199.970.325 | 195.582.430,00 | (4.387.895,00) | 97,81 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 126.530.325 | 122.312.430,00 | (4.217.895,00) | 96,67 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.958.600 | 13.688.000,00 | (270.600,00) | 98,06 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.571.725 | 108.624.430,00 | (3.947.295,00) | 96,49 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 5.2 | BELANJA MODAL | 73.440.000 | 73.270.000,00 | (170.000,00) | 99,77 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 73.440.000 | 73.270.000,00 | (170.000,00) | 99,77 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | | KELURAHAN HUTATORUAN XI | 200.005.865 | 198.741.615,46 | (1.264.249,54) | 99,37 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 5 | BELANJA DAERAH | 200.005.865 | 198.741.615,46 | (1.264.249,54) | 99,37 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 100.005.865 | 98.906.900,00 | (1.098.965,00) | 98,90 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.648.000 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.357.865 | 85.258.900,00 | (1.098.965,00) | 98,73 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 5.2 | BELANJA MODAL | 100.000.000 | 99.834.715,46 | (165.284,54) | 99,83 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 100.000.000 | 99.834.715,46 | (165.284,54) | 99,83 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | | KELURAHAN PARTALI TORUAN | 199.998.450 | 193.054.528,00 | (6.943.922,00) | 96,53 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 5 | BELANJA DAERAH | 199.998.450 | 193.054.528,00 | (6.943.922,00) | 96,53 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 127.050.450 | 120.254.528,00 | (6.795.922,00) | 94,65 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 28.502.000 | 28.502.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.548.450 | 91.752.528,00 | (6.795.922,00) | 93,10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 5.2 | BELANJA MODAL | 72.948.000 | 72.800.000,00 | (148.000,00) | 99,80 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 72.948.000 | 72.800.000,00 | (148.000,00) | 99,80 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | | KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN | 200.003.300 | 192.467.100,00 | (7.536.200,00) | 96,23 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 5 | BELANJA DAERAH | 200.003.300 | 192.467.100,00 | (7.536.200,00) | 96,23 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 97.153.300 | 89.867.100,00 | (7.286.200,00) | 92,50 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.482.000 | 11.482.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.671.300 | 78.385.100,00 | (7.286.200,00) | 91,50 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 5.2 | BELANJA MODAL | 102.850.000 | 102.600.000,00 | (250.000,00) | 99,76 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 102.850.000 | 102.600.000,00 | (250.000,00) | 99,76 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | | KELURAHAN PASAR SARULLA | 203.923.314 | 202.584.700,00 | (1.338.614,00) | 99,34 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 5 | BELANJA DAERAH | 203.923.314 | 202.584.700,00 | (1.338.614,00) | 99,34 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 108.935.814 | 107.834.700,00 | (1.101.114,00) | 98,99 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 14.570.000 | 14.570.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.365.814 | 93.264.700,00 | (1.101.114,00) | 98,83 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 5.2 | BELANJA MODAL | 94.987.500 | 94.750.000,00 | (237.500,00) | 99,75 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 94.987.500 | 94.750.000,00 | (237.500,00) | 99,75 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | | KELURAHAN ONAN HASANG | 199.999.600 | 188.531.200,00 | (11.468.400,00) | 94,27 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 5 | BELANJA DAERAH | 199.999.600 | 188.531.200,00 | (11.468.400,00) | 94,27 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 199.999.600 | 188.531.200,00 | (11.468.400,00) | 94,27 |

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | Rp | % |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 14.898.000 | 14.898.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 185.101.600 | 173.633.200,00 | (11.468.400,00) | 93,80 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 59.024.885.615 | 58.907.847.831,00 | (117.037.784,00) | 99,80 |
| 8.01 | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 59.024.885.615 | 58.907.847.831,00 | (117.037.784,00) | 99,80 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 59.024.885.615 | 58.907.847.831,00 | (117.037.784,00) | 99,80 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5 | BELANJA DAERAH | 59.024.885.615 | 58.907.847.831,00 | (117.037.784,00) | 99,80 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1 | BELANJA OPERASI | 59.009.098.415 | 58.892.247.831,00 | (116.850.584,00) | 99,80 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.526.103.382 | 2.453.859.195,00 | (72.244.187,00) | 97,14 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.113.336.964 | 1.068.730.569,00 | (44.606.395,00) | 95,99 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 55.369.658.069 | 55.369.658.067,00 | (2,00) | 100,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.2 | BELANJA MODAL | 15.787.200 | 15.600.000,00 | (187.200,00) | 98,81 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.787.200 | 15.600.000,00 | (187.200,00) | 98,81 |
| | | | Jumlah | 51.037.976.784 | 61.421.850.868,99 | 10.383.874.084,99 | 120,35 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.2 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)**
**TAHUN ANGGARAN 2024**
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | | | | | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.493.599.771.268,00** | **1.437.280.040.724,40** | **96,23** | **1.400.956.430.711,00** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **141.556.738.834,00** | **133.655.052.931,40** | **94,42** | **134.848.617.519,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 30.050.000.000,00 | 27.663.738.746,01 | 92,06 | 27.612.663.867,00 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.917.020,00 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.917.020,00 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.917.020,00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259.332.203,00 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.633.276,00 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.633.276,00 |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.037.627,00 |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.037.627,00 |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.661.300,00 |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.661.300,00 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.180.000,00 |
| 4.1.01.08.05 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.730.000,00 |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.730.000,00 |
| 4.1.01.08.07 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850.000,00 |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850.000,00 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 1.000.000.000,00 | 788.145.744,00 | 78,81 | 886.248.536,00 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 800.000.000,00 | 686.563.242,00 | 85,82 | 688.011.347,00 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 800.000.000,00 | 686.563.242,00 | 85,82 | 688.011.347,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 150.000.000,00 | 90.242.502,00 | 60,16 | 167.097.189,00 |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 150.000.000,00 | 90.242.502,00 | 60,16 | 167.097.189,00 |
| 4.1.01.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 50.000.000,00 | 11.340.000,00 | 22,68 | 0,00 |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 50.000.000,00 | 11.340.000,00 | 22,68 | 0,00 |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.140.000,00 |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.140.000,00 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462.511.569,00 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462.511.569,00 |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462.511.569,00 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.444.750,00 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.444.750,00 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.444.750,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 200.000.000,00 | 159.604.485,00 | 79,80 | 197.532.800,00 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 200.000.000,00 | 159.604.485,00 | 79,80 | 197.532.800,00 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 200.000.000,00 | 159.604.485,00 | 79,80 | 197.532.800,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 3.500.000.000,00 | 3.245.750.707,81 | 92,74 | 3.834.602.534,00 |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 3.500.000.000,00 | 3.245.750.707,81 | 92,74 | 3.834.602.534,00 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 3.500.000.000,00 | 3.245.750.707,81 | 92,74 | 3.834.602.534,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 5.500.000.000,00 | 4.275.385.912,00 | 77,73 | 4.228.251.755,00 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 5.500.000.000,00 | 4.275.385.912,00 | 77,73 | 4.228.251.755,00 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 5.500.000.000,00 | 4.275.385.912,00 | 77,73 | 4.228.251.755,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 5.500.000.000,00 | 5.788.319.950,00 | 105,24 | 4.923.642.700,00 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 5.500.000.000,00 | 5.788.319.950,00 | 105,24 | 0,00 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 5.500.000.000,00 | 5.788.319.950,00 | 105,24 | 0,00 |
| 4.1.01.16.02 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923.642.700,00 |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923.642.700,00 |
| 4.1.01.19 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 14.350.000.000,00 | 13.406.531.947,20 | 93,43 | 0,00 |
| 4.1.01.19.01 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 3.900.000.000,00 | 4.125.201.556,20 | 105,77 | 0,00 |
| 4.1.01.19.01.0001 | PBJT-Restoran | 3.000.000.000,00 | 3.568.676.556,20 | 118,96 | 0,00 |
| 4.1.01.19.01.0002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering | 900.000.000,00 | 556.525.000,00 | 61,84 | 0,00 |
| 4.1.01.19.02 | PBJT-Tenaga Listrik | 9.700.000.000,00 | 8.574.206.432,00 | 88,39 | 0,00 |
| 4.1.01.19.02.0001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 9.700.000.000,00 | 8.574.206.432,00 | 88,39 | 0,00 |
| 4.1.01.19.03 | PBJT-Jasa Perhotelan | 350.000.000,00 | 344.434.609,00 | 98,41 | 0,00 |
| 4.1.01.19.03.0001 | PBJT-Hotel | 350.000.000,00 | 344.434.609,00 | 98,41 | 0,00 |
| 4.1.01.19.04 | PBJT-Jasa Parkir | 300.000.000,00 | 314.230.450,00 | 104,74 | 0,00 |
| 4.1.01.19.04.0001 | PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir | 300.000.000,00 | 314.230.450,00 | 104,74 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1.01.19.05 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 100.000.000,00 | 48.458.900,00 | 48,46 | 0,00 |
| 4.1.01.19.05.0006 | PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.19.05.0007 | PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | 6.000.000,00 | 5.900.000,00 | 98,33 | 0,00 |
| 4.1.01.19.05.0008 | PBJT-Permainan Ketangkasan | 10.000.000,00 | 500.000,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4.1.01.19.05.0009 | PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau | 7.000.000,00 | 3.734.900,00 | 53,36 | 0,00 |
| 4.1.01.19.05.0010 | PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana | 17.000.000,00 | 20.324.000,00 | 119,55 | 0,00 |
| 4.1.01.19.05.0012 | PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa | 50.000.000,00 | 18.000.000,00 | 36,00 | 0,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 86.317.290.000,00 | 93.784.976.878,78 | 108,65 | 5.536.938.005,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 79.275.000.000,00 | 89.762.296.464,00 | 113,23 | 2.248.943.300,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 77.625.000.000,00 | 88.404.051.564,00 | 113,89 | 67.141.500,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 175.000.000,00 | 129.744.500,00 | 74,14 | 67.141.500,00 |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 77.450.000.000,00 | 88.274.307.064,00 | 113,98 | 0,00 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.688.800,00 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.688.800,00 |
| 4.1.02.01.03 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.340.000,00 |
| 4.1.02.01.03.0001 | Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.340.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 300.000.000,00 | 36.100.000,00 | 12,03 | 73.588.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 300.000.000,00 | 36.100.000,00 | 12,03 | 73.588.000,00 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.000.000.000,00 | 932.934.000,00 | 93,29 | 887.261.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 226.024.000,00 | 234.723.000,00 | 103,85 | 0,00 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 524.192.000,00 | 465.175.000,00 | 88,74 | 876.271.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 249.784.000,00 | 233.036.000,00 | 93,30 | 10.990.000,00 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.104.000,00 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.104.000,00 |
| 4.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.320.000,00 |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.320.000,00 |
| 4.1.02.01.14 | Retribusi Pelayanan Kebersihan | 350.000.000,00 | 389.210.900,00 | 111,20 | 0,00 |
| 4.1.02.01.14.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan | 300.000.000,00 | 375.710.900,00 | 125,24 | 0,00 |
| 4.1.02.01.14.0002 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 50.000.000,00 | 13.500.000,00 | 27,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.882.290.000,00 | 1.417.771.591,78 | 36,52 | 1.452.448.549,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.469.049,00 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.589.049,00 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.750.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.850.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280.000,00 |
| 4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.000,00 |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.000,00 |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.219.000,00 |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.219.000,00 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.928.500,00 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.928.500,00 |
| 4.1.02.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 30.000.000,00 | 12.639.003,00 | 42,13 | 21.700.000,00 |
| 4.1.02.02.06.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 30.000.000,00 | 12.639.003,00 | 42,13 | 21.700.000,00 |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020.000,00 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020.000,00 |
| 4.1.02.02.08 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.495.000,00 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.495.000,00 |
| 4.1.02.02.12 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertok | 101.600.000,00 | 35.543.000,00 | 34,98 | 0,00 |
| 4.1.02.02.12.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertok | 101.600.000,00 | 35.543.000,00 | 34,98 | 0,00 |
| 4.1.02.02.14 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 210.000.000,00 | 102.404.000,00 | 48,76 | 0,00 |
| 4.1.02.02.14.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 210.000.000,00 | 102.404.000,00 | 48,76 | 0,00 |
| 4.1.02.02.15 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 15.000.000,00 | 12.750.000,00 | 85,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.15.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 15.000.000,00 | 12.750.000,00 | 85,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.17 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 1.000.000.000,00 | 298.016.963,00 | 29,80 | 0,00 |
| 4.1.02.02.17.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 1.000.000.000,00 | 298.016.963,00 | 29,80 | 0,00 |
| 4.1.02.02.20 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2.525.690.000,00 | 956.418.625,78 | 37,87 | 0,00 |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2.525.690.000,00 | 956.418.625,78 | 37,87 | 0,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 3.160.000.000,00 | 2.604.908.823,00 | 82,43 | 1.835.546.156,00 |
| 4.1.02.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.655.500,00 |
| 4.1.02.03.02.0001 | Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.655.500,00 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 3.000.000.000,00 | 2.510.704.563,00 | 83,69 | 1.818.090.656,00 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 3.000.000.000,00 | 2.510.704.563,00 | 83,69 | 1.818.090.656,00 |
| 4.1.02.03.08 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 160.000.000,00 | 94.204.260,00 | 58,88 | 0,00 |
| 4.1.02.03.08.0001 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 160.000.000,00 | 94.204.260,00 | 58,88 | 0,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.211.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 63,97 | 8.139.637.407,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Per | 13.211.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 63,97 | 8.139.637.407,00 |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Per | 12.711.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 66,49 | 8.139.637.407,00 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Per | 12.711.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 66,49 | 8.139.637.407,00 |
| 4.1.03.02.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Per | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Per | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.977.581.535,00 | 3.754.826.999,61 | 31,35 | 93.559.378.240,00 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.061.545.120,00 | 383.743.100,00 | 36,15 | 1.191.938.600,00 |
| 4.1.04.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 690.000.000,00 | 340.713.000,00 | 49,38 | 1.025.967.500,00 |
| 4.1.04.01.02.0001 | Hasil Penjualan Alat Besar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.797.100,00 |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.170.400,00 |
| 4.1.04.01.02.0054 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan D | 690.000.000,00 | 340.713.000,00 | 49,38 | 0,00 |
| 4.1.04.01.06 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.971.100,00 |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.971.100,00 |
| 4.1.04.01.08 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain | 371.545.120,00 | 43.030.100,00 | 11,58 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08.0001 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang | 371.545.120,00 | 43.030.100,00 | 11,58 | 0,00 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.100.000.000,00 | 512.389.735,00 | 46,58 | 151.467.221,00 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 1.100.000.000,00 | 1.543.875,00 | 0,14 | 0,00 |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 1.100.000.000,00 | 1.543.875,00 | 0,14 | 0,00 |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 0,00 | 510.845.860,00 | 0,00 | 151.467.221,00 |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 0,00 | 510.845.860,00 | 0,00 | 151.467.221,00 |
| 4.1.04.04 | Hasil Kerja Sama Daerah | 220.000.000,00 | 103.877.640,00 | 47,22 | 96.928.793,00 |
| 4.1.04.04.01 | Hasil Kerja Sama Daerah | 220.000.000,00 | 103.877.640,00 | 47,22 | 96.928.793,00 |
| 4.1.04.04.01.0001 | Hasil Kerja Sama Daerah | 220.000.000,00 | 103.877.640,00 | 47,22 | 96.928.793,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 600.000.000,00 | 377.327.454,00 | 62,89 | 378.786.395,00 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 600.000.000,00 | 377.327.454,00 | 62,89 | 378.786.395,00 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 600.000.000,00 | 377.327.454,00 | 62,89 | 378.786.395,00 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 1.143.415.747,00 | 188.803.053,00 | 16,51 | 1.143.415.747,00 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.143.415.747,00 | 188.803.053,00 | 16,51 | 1.143.415.747,00 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.143.415.747,00 | 188.803.053,00 | 16,51 | 1.143.415.747,00 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 3.596.859.430,00 | 842.476.529,61 | 23,42 | 1.596.836.727,30 |
| 4.1.04.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 3.596.859.430,00 | 842.476.529,61 | 23,42 | 1.596.836.727,30 |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 3.596.859.430,00 | 842.476.529,61 | 23,42 | 1.596.836.727,30 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 4.255.761.238,00 | 1.346.209.488,00 | 31,63 | 2.755.726.140,70 |
| 4.1.04.15.03 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.726.140,70 |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.726.140,70 |
| 4.1.04.15.15 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang | 4.255.761.238,00 | 1.346.209.488,00 | 31,63 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1.04.15.15.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pak | 4.255.761.238,00 | 1.346.209.488,00 | 31,63 | 0,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.244.278.616,00 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.244.278.616,00 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.244.278.616,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **141.556.738.834,00** | **133.655.052.931,40** | **94,42** | **134.848.617.519,00** |
| | | | | | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.324.579.290.597,00** | **1.281.410.872.862,00** | **96,74** | **1.242.025.117.323,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.235.542.689.000,00 | 1.235.714.467.229,00 | 100,01 | 1.187.312.757.950,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824.467.000,00 |
| 4.2.01.02.01 | DID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824.467.000,00 |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824.467.000,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.028.851.584.000,00 | 1.029.717.245.029,00 | 100,08 | 977.754.608.950,00 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 64.448.095.000,00 | 64.628.799.000,00 | 100,28 | 61.985.236.033,00 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 36.960.795.000,00 | 36.960.795.000,00 | 100,00 | 35.237.627.287,00 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 8.286.008.000,00 | 7.912.909.000,00 | 95,50 | 8.011.841.185,00 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 373.099.000,00 | 0,00 | 479.912.094,00 |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1.809.438.000,00 | 1.990.142.000,00 | 109,99 | 1.963.575.253,00 |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 251.303.000,00 | 244.802.000,00 | 97,41 | 13.604.238,00 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 0,00 | 5.200.800,00 | 0,00 | 17.506.741,00 |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 112.622.000,00 | 113.922.200,00 | 101,15 | 109.464.576,00 |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 8.694.415.000,00 | 1.595.527.000,00 | 18,35 | 4.446.985.686,00 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Roy | 0,00 | 7.098.888.000,00 | 0,00 | 1.952.863.500,00 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PS | 228.713.000,00 | 228.713.000,00 | 100,00 | 8.280.161.262,00 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.167.186.000,00 | 1.167.186.000,00 | 100,00 | 1.471.694.211,00 |
| 4.2.01.01.01.0014 | DBH Sawit | 6.937.615.000,00 | 6.937.615.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 677.223.717.000,00 | 681.275.700.613,00 | 100,60 | 627.696.920.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 525.531.008.000,00 | 538.826.478.000,00 | 102,53 | 627.696.920.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 2.200.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai | 37.146.357.000,00 | 27.902.870.613,00 | 75,12 | 0,00 |
| 4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 64.436.601.000,00 | 64.436.601.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 31.021.365.000,00 | 31.021.365.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 16.888.386.000,00 | 16.888.386.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 96.683.043.000,00 | 92.466.086.003,00 | 95,64 | 103.496.236.437,00 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 5.660.603.000,00 | 5.659.153.000,00 | 99,97 | 5.513.208.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 6.333.529.000,00 | 6.333.273.000,00 | 100,00 | 2.815.502.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 871.280.000,00 | 4.340.947.000,00 | 498,23 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.2.01.01.03.0030 | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.537.680,00 |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana da | 11.388.826.000,00 | 11.381.127.800,00 | 99,93 | 2.087.448.300,00 |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 7.930.356.000,00 | 10.962.553.472,00 | 138,24 | 14.932.273.920,00 |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 25.127.017.000,00 | 20.810.625.201,00 | 82,82 | 41.303.404.644,00 |
| 4.2.01.01.03.0039 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | 14.930.517.000,00 | 14.784.764.802,00 | 99,02 | 1.436.266.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0042 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 7.912.400.000,00 | 7.912.400.000,00 | 100,00 | 7.003.317.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 9.231.175.000,00 | 7.013.439.253,00 | 75,98 | 8.320.440.152,00 |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungar | 2.495.435.000,00 | 2.470.502.475,00 | 99,00 | 645.000.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0055 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.086.960,00 |
| 4.2.01.01.03.0057 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.716.832.940,00 |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876.266.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 4.801.905.000,00 | 797.300.000,00 | 16,60 | 4.619.652.841,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 190.496.729.000,00 | 191.346.659.413,00 | 100,45 | 184.576.216.480,00 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 62.030.290.000,00 | 62.028.805.449,00 | 100,00 | 63.393.504.829,00 |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 2.445.000.000,00 | 2.445.000.000,00 | 100,00 | 2.587.500.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 76.497.749.000,00 | 73.626.365.000,00 | 96,25 | 72.164.648.120,00 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 0,00 | 4.323.930.000,00 | 0,00 | 1.835.170.824,00 |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 851.648.000,00 | 849.553.000,00 | 99,75 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 4.890.330.000,00 | 4.770.039.475,00 | 97,54 | 5.082.183.200,00 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 693.680.000,00 | 661.880.000,00 | 95,42 | 409.240.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 33.060.730.000,00 | 12.541.988.000,00 | 37,94 | 27.402.841.861,00 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 477.620.000,00 | 477.620.000,00 | 100,00 | 410.170.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan | 1.763.418.000,00 | 1.763.418.000,00 | 100,00 | 1.375.764.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 569.981.000,00 | 509.993.496,00 | 89,48 | 353.605.646,00 |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 6.249.954.000,00 | 6.249.954.000,00 | 100,00 | 6.939.093.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 100,00 | 698.075.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0024 | DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.420.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0034 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 316.329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04.0035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 0,00 | 20.448.112.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN** | **1.028.851.584.000,00** | **1.029.717.245.029,00** | **100,08** | **977.754.608.950,00** |
| | | | | | |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 199.823.835.000,00 | 199.129.952.200,00 | 99,65 | 198.733.682.000,00 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 199.823.835.000,00 | 199.129.952.200,00 | 99,65 | 198.733.682.000,00 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 199.823.835.000,00 | 199.129.952.200,00 | 99,65 | 198.733.682.000,00 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | 6.867.270.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.06.01 | Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | 6.867.270.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.2.01.06.01.0001 | Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | 6.867.270.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | **206.691.105.000,00** | **205.997.222.200,00** | **199,65** | **198.733.682.000,00** |
| | | | | | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 89.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 51,32 | 54.712.359.373,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 87.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 52,50 | 53.068.727.947,00 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 87.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 52,50 | 53.068.727.947,00 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 17.503.229.126,00 | 6.172.615.706,00 | 35,27 | 12.786.530.071,00 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11.410.827.710,00 | 5.027.236.960,00 | 44,06 | 7.405.035.637,00 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 28.856.179.264,00 | 11.896.457.190,00 | 41,23 | 14.193.988.722,00 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 1.780.657.346,00 | 890.328.673,00 | 50,00 | 1.000.746.562,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.485.708.151,00 | 21.709.767.104,00 | 78,99 | 17.682.426.955,00 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.631.426,00 |
| 4.2.02.02.01 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.631.426,00 |
| 4.2.02.02.01.0001 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.631.426,00 |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH** | **89.036.601.597,00** | **45.696.405.633,00** | **51,32** | **54.712.359.373,00** |
| | | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER** | **1.324.579.290.597,00** | **1.281.410.872.862,00** | **96,74** | **1.242.025.117.323,00** |
| | | | | | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Und | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilita | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |
| | **JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |
| | | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.493.599.771.268,00** | **1.437.280.040.724,40** | **96,23** | **1.400.956.430.711,00** |
| | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.062.938.481.200,00** | **1.014.674.115.403,47** | **95,46** | **927.720.435.846,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 669.005.440.000,00 | 621.410.779.418,00 | 92,89 | 550.561.006.379,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 478.237.133.859,00 | 457.180.855.720,00 | 95,60 | 373.039.157.193,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 369.790.028.770,00 | 351.263.474.430,00 | 94,99 | 282.588.079.048,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 239.016.666.351,00 | 234.854.197.164,00 | 98,26 | 229.819.049.648,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 130.773.362.419,00 | 116.409.277.266,00 | 89,02 | 52.769.029.400,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 32.548.526.378,00 | 32.209.432.885,00 | 98,96 | 26.158.929.395,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 22.042.173.778,00 | 21.762.100.099,00 | 98,73 | 21.142.969.787,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 10.506.352.600,00 | 10.447.332.786,00 | 99,44 | 5.015.959.608,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 6.645.892.876,00 | 6.580.005.000,00 | 99,01 | 6.721.275.950,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 6.645.892.876,00 | 6.580.005.000,00 | 99,01 | 6.721.275.950,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 15.196.701.025,00 | 15.101.403.000,00 | 99,37 | 15.335.793.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 15.189.726.025,00 | 15.094.428.000,00 | 99,37 | 15.334.508.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 6.975.000,00 | 6.975.000,00 | 100,00 | 1.285.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 9.236.387.747,00 | 9.156.910.000,00 | 99,14 | 5.958.529.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 2.300.271.372,00 | 2.269.070.000,00 | 98,64 | 2.602.789.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 6.936.116.375,00 | 6.887.840.000,00 | 99,30 | 3.355.740.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 20.136.538.829,00 | 19.985.478.829,00 | 99,25 | 16.997.335.740,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 12.602.449.042,00 | 12.497.323.249,00 | 99,17 | 13.178.774.340,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 7.534.089.787,00 | 7.488.155.580,00 | 99,39 | 3.818.561.400,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 559.631.270,00 | 528.760.707,00 | 94,48 | 305.173.717,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 559.631.270,00 | 528.760.707,00 | 94,48 | 305.173.717,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 6.029.682,00 | 5.537.507,00 | 91,84 | 4.364.245,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 3.279.991,00 | 2.959.614,00 | 90,23 | 3.297.182,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 2.749.691,00 | 2.577.893,00 | 93,75 | 1.067.063,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 21.186.497.380,00 | 19.455.986.556,00 | 91,83 | 16.616.735.189,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 16.148.949.631,00 | 14.567.974.552,00 | 90,21 | 13.427.464.651,00 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 5.037.547.749,00 | 4.888.012.004,00 | 97,03 | 3.189.270.538,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 737.029.493,00 | 724.427.760,00 | 98,29 | 588.237.811,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 488.308.881,00 | 483.404.512,00 | 99,00 | 471.226.040,00 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 248.720.612,00 | 241.023.248,00 | 96,91 | 117.011.771,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 2.193.870.409,00 | 2.169.439.046,00 | 98,89 | 1.764.704.098,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1.461.294.814,00 | 1.446.455.377,00 | 98,98 | 1.413.677.084,00 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 732.575.595,00 | 722.983.669,00 | 98,69 | 351.027.014,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 67.204.147.830,00 | 57.818.593.212,00 | 86,03 | 64.611.679.190,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 66.204.147.830,00 | 56.952.613.212,00 | 86,03 | 64.061.437.190,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 66.204.147.830,00 | 56.952.613.212,00 | 86,03 | 58.886.808.780,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174.628.410,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.01.02.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | 1.000.000.000,00 | 865.980.000,00 | 86,60 | 550.242.000,00 |
| 5.1.01.02.02.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 1.000.000.000,00 | 865.980.000,00 | 86,60 | 0,00 |
| 5.1.01.02.02.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.242.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 93.279.053.000,00 | 76.034.826.413,00 | 81,51 | 76.305.707.892,00 |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.416.153,00 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995.450,00 |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.035.877,00 |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.250,00 |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.639.959,00 |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591.509,00 |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.527.959,00 |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Ped | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.760.051,00 |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.584.098,00 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.017.201,00 |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916.917,00 |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.280.333,00 |
| 5.1.01.03.02.0003 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.910,00 |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.375,00 |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.551.062,00 |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676.375,00 |
| 5.1.01.03.02.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyedia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.375,00 |
| 5.1.01.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760.460,00 |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.486.984,00 |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.563,00 |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0019 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.500,00 |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Pe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.625,00 |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027.500,00 |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Iz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.707.222,00 |
| 5.1.01.03.02.0026 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Iz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.875,00 |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Iz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.125,00 |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 73.518.797.000,00 | 59.996.620.724,00 | 81,61 | 67.825.532.780,00 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 73.518.797.000,00 | 59.996.620.724,00 | 81,61 | 67.825.532.780,00 |
| 5.1.01.03.04 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 2.355.347.200,00 | 1.706.447.400,00 | 72,45 | 943.413.600,00 |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD | 2.355.347.200,00 | 1.706.447.400,00 | 72,45 | 943.413.600,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 1.000.000.000,00 | 508.000.000,00 | 50,80 | 2.244.000.000,00 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 1.000.000.000,00 | 508.000.000,00 | 50,80 | 2.244.000.000,00 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 3.329.900.000,00 | 3.242.296.719,00 | 97,37 | 0,00 |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 3.329.900.000,00 | 3.242.296.719,00 | 97,37 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 3.759.825.800,00 | 3.698.248.970,00 | 98,36 | 4.386.624.958,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.129.095.200,00 | 3.098.098.970,00 | 99,01 | 3.165.737.370,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 508.330.600,00 | 477.770.000,00 | 93,99 | 843.467.588,00 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UK | 122.400.000,00 | 122.380.000,00 | 99,98 | 377.420.000,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.703.200,00 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.703.200,00 |
| 5.1.01.03.09 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK | 6.343.128.000,00 | 4.901.295.000,00 | 77,27 | 0,00 |
| 5.1.01.03.09.0001 | Belanja TPG PPPK | 6.343.128.000,00 | 4.901.295.000,00 | 77,27 | 0,00 |
| 5.1.01.03.10 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK | 1.000.000.000,00 | 634.917.600,00 | 63,49 | 0,00 |
| 5.1.01.03.10.0001 | Belanja TKG PPPK | 1.000.000.000,00 | 634.917.600,00 | 63,49 | 0,00 |
| 5.1.01.03.11 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK | 1.972.055.000,00 | 1.347.000.000,00 | 68,30 | 0,00 |
| 5.1.01.03.11.0001 | Belanja Tamsil Guru PPPK | 1.972.055.000,00 | 1.347.000.000,00 | 68,30 | 0,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 13.560.521.912,00 | 13.442.643.929,00 | 99,13 | 13.286.095.446,00 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 782.040.000,00 | 779.835.000,00 | 99,72 | 780.465.000,00 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 782.040.000,00 | 779.835.000,00 | 99,72 | 780.465.000,00 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 83.267.800,00 | 78.244.200,00 | 93,97 | 79.954.000,00 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 83.267.800,00 | 78.244.200,00 | 93,97 | 79.954.000,00 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 110.512.920,00 | 87.193.680,00 | 78,90 | 94.870.200,00 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 110.512.920,00 | 87.193.680,00 | 78,90 | 94.870.200,00 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000,00 | 66.811.500,00 | 99,67 | 67.032.000,00 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000,00 | 66.811.500,00 | 99,67 | 67.032.000,00 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.133.958.000,00 | 1.130.760.750,00 | 99,72 | 1.131.674.250,00 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.133.958.000,00 | 1.130.760.750,00 | 99,72 | 1.131.674.250,00 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 118.572.300,00 | 86.949.976,00 | 73,33 | 116.623.500,00 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 118.572.300,00 | 86.949.976,00 | 73,33 | 116.623.500,00 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 16.500.000,00 | 10.002.825,00 | 60,62 | 5.846.400,00 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 16.500.000,00 | 10.002.825,00 | 60,62 | 5.846.400,00 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.646.000.000,00 | 2.646.000.000,00 | 100,00 | 2.646.000.000,00 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.646.000.000,00 | 2.646.000.000,00 | 100,00 | 2.646.000.000,00 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 441.000.000,00 | 424.935.000,00 | 96,36 | 655.200.000,00 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 441.000.000,00 | 424.935.000,00 | 96,36 | 655.200.000,00 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 348.947.564,00 | 335.969.689,00 | 96,28 | 340.560.872,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 348.947.564,00 | 335.969.689,00 | 96,28 | 340.560.872,00 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.806.981.328,00 | 2.800.206.309,00 | 99,76 | 2.759.869.224,00 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 68.546.256,00 | 68.114.646,00 | 99,37 | 68.283.516,00 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 1.608.768,00 | 929.626,00 | 57,78 | 1.593.645,00 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 4.826.304,00 | 1.162.037,00 | 24,08 | 1.992.063,00 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 2.732.000.000,00 | 2.730.000.000,00 | 99,93 | 2.688.000.000,00 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.680.000.000,00 | 4.680.000.000,00 | 100,00 | 4.608.000.000,00 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.680.000.000,00 | 4.680.000.000,00 | 100,00 | 4.608.000.000,00 |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 325.710.000,00 | 315.735.000,00 | 96,94 | 0,00 |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 325.710.000,00 | 315.735.000,00 | 96,94 | 0,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 61.323.399,00 | 61.323.399,00 | 100,00 | 329.771.953,00 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 100,00 | 54.600.000,00 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 100,00 | 54.600.000,00 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 100,00 | 6.636.000,00 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 100,00 | 6.636.000,00 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 100,00 | 98.280.000,00 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 100,00 | 98.280.000,00 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 2.172.600,00 | 2.172.600,00 | 100,00 | 5.214.240,00 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 2.172.600,00 | 2.172.600,00 | 100,00 | 5.214.240,00 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 207.359,00 | 207.359,00 | 100,00 | 590.014,00 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 207.359,00 | 207.359,00 | 100,00 | 590.014,00 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 640,00 | 640,00 | 100,00 | 1.680,00 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 640,00 | 640,00 | 100,00 | 1.680,00 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 1.823.040,00 | 1.823.040,00 | 100,00 | 5.469.120,00 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 1.823.040,00 | 1.823.040,00 | 100,00 | 5.469.120,00 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 37.440,00 | 37.440,00 | 100,00 | 112.320,00 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 37.440,00 | 37.440,00 | 100,00 | 112.320,00 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 112.320,00 | 112.320,00 | 100,00 | 336.960,00 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 112.320,00 | 112.320,00 | 100,00 | 336.960,00 |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.544.476,00 |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.550,00 |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.933.588,00 |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.750,00 |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094.166,00 |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.528,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Lo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.811.230,00 |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.788.391,00 |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak ata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.243.273,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.987.143,00 |
| 5.1.01.05.11.0001 | Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.208,00 |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.347,00 |
| 5.1.01.05.11.0003 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.090,00 |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.625,00 |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.063,00 |
| 5.1.01.05.11.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.625,00 |
| 5.1.01.05.11.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.625,00 |
| 5.1.01.05.11.0013 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787.540,00 |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980.804,00 |
| 5.1.01.05.11.0017 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Te | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.938,00 |
| 5.1.01.05.11.0018 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Te | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 5.1.01.05.11.0019 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Te | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Ru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.375,00 |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Te | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.500,00 |
| 5.1.01.05.11.0025 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Ter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.110.903,00 |
| 5.1.01.05.11.0026 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Ter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.125,00 |
| 5.1.01.05.11.0027 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Ter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 550.880.000,00 | 532.400.000,00 | 96,65 | 710.880.000,00 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000,00 | 92.400.000,00 | 83,33 | 110.880.000,00 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000,00 | 92.400.000,00 | 83,33 | 110.880.000,00 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 | 100,00 | 600.000.000,00 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 | 100,00 | 600.000.000,00 |
| 5.1.01.88 | Belanja Pegawai BOS | 10.258.380.000,00 | 11.579.689.400,00 | 112,88 | 14.169.698.050,00 |
| 5.1.01.88.88 | Belanja Pegawai BOS | 10.258.380.000,00 | 11.579.689.400,00 | 112,88 | 14.169.698.050,00 |
| 5.1.01.88.88.8888 | Belanja Pegawai BOS | 10.258.380.000,00 | 11.579.689.400,00 | 112,88 | 14.169.698.050,00 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 5.854.000.000,00 | 4.760.447.345,00 | 81,32 | 8.108.016.655,00 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 5.854.000.000,00 | 4.760.447.345,00 | 81,32 | 8.108.016.655,00 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 5.854.000.000,00 | 4.760.447.345,00 | 81,32 | 8.108.016.655,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 317.934.829.606,00 | 318.291.641.973,47 | 100,11 | 351.521.956.695,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 72.605.501.111,00 | 70.372.129.584,47 | 96,92 | 89.697.739.821,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 72.273.179.991,00 | 70.040.379.584,47 | 96,91 | 89.689.898.021,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 439.100.800,00 | 396.708.100,00 | 90,35 | 1.317.991.805,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.556.740,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.664.586.599,00 | 4.571.620.578,00 | 98,01 | 7.426.440.518,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 363.639.000,00 | 353.858.500,00 | 97,31 | 304.229.150,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 8.053.000,00 | 8.033.000,00 | 99,75 | 9.762.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 641.737.000,00 | 638.236.000,00 | 99,45 | 1.084.050.550,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 2.228.517.462,00 | 1.880.589.170,00 | 84,39 | 5.583.161.268,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 549.052.350,00 | 526.362.380,00 | 95,87 | 1.343.937.652,00 |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 40.500.000,00 | 40.305.600,00 | 99,52 | 101.818.140,00 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 259.024.900,00 | 247.650.900,00 | 95,61 | 88.022.681,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.701.252.629,00 | 2.312.270.284,90 | 85,60 | 4.332.822.891,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.740.250.441,00 | 3.565.635.485,00 | 95,33 | 5.274.922.946,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 108.550.000,00 | 105.739.000,00 | 97,41 | 146.115.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 26.172.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 154.082.900,00 | 153.127.500,00 | 99,38 | 627.914.520,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 604.184.635,00 | 599.022.834,00 | 99,15 | 1.413.244.150,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 254.867.500,00 | 248.644.000,00 | 97,56 | 450.989.300,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah | 262.477.200,00 | 259.658.100,00 | 98,93 | 428.628.385,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan | 1.151.904.360,00 | 1.128.534.400,00 | 97,97 | 2.035.669.515,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 6.869.097.234,00 | 6.855.191.936,00 | 99,80 | 708.714.795,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1.940.600,00 | 1.940.600,00 | 100,00 | 2.134.548.635,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diser | 34.386.984.746,00 | 34.180.041.916,57 | 99,40 | 27.270.106.143,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diser | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 781.760.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 12.229.012.035,00 | 11.356.587.700,00 | 92,87 | 23.301.947.226,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 95.965.000,00 | 95.963.000,00 | 100,00 | 223.869.830,00 |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 39.382.000,00 | 39.382.000,00 | 100,00 | 1.983.840.081,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.152.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 137.350.000,00 | 135.850.000,00 | 98,91 | 377.543.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 | 12.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 43.718.400,00 | 43.091.000,00 | 98,56 | 179.618.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 63.875.000,00 | 63.700.000,00 | 99,73 | 48.125.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 13.670.800,00 | 13.220.000,00 | 96,70 | 42.728.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakaian Teknik | 3.322.600,00 | 3.322.600,00 | 100,00 | 16.105.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | 81.550.000,00 | 81.153.000,00 | 99,51 | 33.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | 5.730.800,00 | 5.140.000,00 | 89,69 | 19.948.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 100,00 | 101.000.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 100,00 | 26.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 100,00 | 28.000.000,00 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 302.000,00 | 300.000,00 | 99,34 | 7.841.800,00 |
| 5.1.02.01.02.0013 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya | 302.000,00 | 300.000,00 | 99,34 | 7.841.800,00 |
| 5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 332.019.120,00 | 331.450.000,00 | 99,83 | 0,00 |
| 5.1.02.01.04.0411 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Ko | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.04.0576 | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupa | 304.019.120,00 | 303.450.000,00 | 99,81 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 62.577.497.644,00 | 59.683.262.876,00 | 95,37 | 79.673.618.823,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 41.436.862.098,00 | 39.342.939.276,00 | 94,95 | 58.270.425.337,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, da | 632.250.000,00 | 551.850.000,00 | 87,28 | 1.218.330.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiat | 915.385.000,00 | 879.080.000,00 | 96,03 | 2.186.286.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 | 315.976.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 107.400.000,00 | 107.400.000,00 | 100,00 | 149.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100,00 | 8.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknolog | 7.650.000,00 | 7.415.850,00 | 96,94 | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 594.800.000,00 | 593.100.000,00 | 99,71 | 638.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 3.594.351.248,00 | 3.240.000.000,00 | 90,14 | 4.762.830.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 476.236.800,00 | 460.002.300,00 | 96,59 | 8.379.117.196,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 586.073.800,00 | 572.092.600,00 | 97,61 | 703.037.437,00 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan M | 1.233.085.800,00 | 1.230.153.400,00 | 99,76 | 1.923.149.600,00 |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 369.000.000,00 | 345.000.000,00 | 93,50 | 317.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 6.000.000,00 | 5.800.000,00 | 96,67 | 74.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 17.881.828.700,00 | 17.323.891.900,00 | 96,88 | 19.531.544.400,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.256.900.000,00 | 1.158.775.000,00 | 92,19 | 1.683.013.400,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.017.000.000,00 | 1.012.000.000,00 | 99,51 | 1.236.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 54.496.000,00 | 53.076.000,00 | 97,39 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | 100,00 | 519.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 7.385.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 1.800.000,00 | 1.430.000,00 | 79,44 | 1.560.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0044 | Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan | 172.800.000,00 | 158.400.000,00 | 91,67 | 190.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 31.938.000,00 | 31.938.000,00 | 100,00 | 288.495.250,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 99.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.548.300,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 200.739.000,00 | 199.705.000,00 | 99,48 | 776.614.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 3.700.000,00 | 1.496.354,00 | 40,44 | 23.766.585,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 721.181.115,00 | 651.240.669,00 | 90,30 | 568.567.849,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 7.402.079.030,00 | 7.147.141.566,00 | 96,56 | 8.231.405.294,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 160.916.400,00 | 142.605.975,00 | 88,62 | 481.278.800,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 2.435.936.276,00 | 2.193.752.610,00 | 90,06 | 2.081.312.433,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 21.940.600,00 | 11.030.795,00 | 50,28 | 51.949.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 80.850.000,00 | 54.299.000,00 | 67,16 | 809.770.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 335.062.329,00 | 208.851.447,00 | 62,33 | 262.593.926,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 117.195.000,00 | 112.647.000,00 | 96,12 | 620.989.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 291.200.000,00 | 261.563.810,00 | 89,82 | 44.805.367,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 16.644.709.570,00 | 16.369.320.753,00 | 98,35 | 13.391.153.629,00 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.659.948,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 14.350.000.000,00 | 14.350.000.000,00 | 100,00 | 15.349.923.400,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas | 1.895.267.000,00 | 1.883.876.600,00 | 99,40 | ( 2.713.285.138,00 ) |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 203.815.172,00 | 58.022.324,00 | 28,47 | 122.154.271,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 183.387.398,00 | 71.301.829,00 | 38,88 | 152.191.398,00 |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.509.750,00 |
| 5.1.02.02.02.0009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS | 12.240.000,00 | 6.120.000,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1.290.671.976,00 | 1.110.952.447,00 | 86,08 | 1.807.758.825,00 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | 1.037.286.977,00 | 911.666.447,00 | 87,89 | 1.092.227.144,00 |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 105.899.000,00 | 70.810.000,00 | 66,87 | 228.340.800,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 16.340.000,00 | 11.180.000,00 | 68,42 | 5.160.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0043 | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 20.200.000,00 | 13.550.000,00 | 67,08 | 80.890.800,00 |
| 5.1.02.02.04.0052 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0056 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 64.195.999,00 | 56.996.000,00 | 88,78 | 339.740.081,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0134 | Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0232 | Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0465 | Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0494 | Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0507 | Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 100,00 | 7.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0508 | Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 826.639.000,00 | 754.329.900,00 | 91,25 | 1.960.136.399,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 100,00 | 62.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 131.500.000,00 | 130.891.900,00 | 99,54 | 730.202.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 84.200.000,00 | 81.368.000,00 | 96,64 | 277.960.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 536.339.000,00 | 467.470.000,00 | 87,16 | 889.974.399,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 1.484.750.000,00 | 1.449.407.000,00 | 97,62 | 1.919.981.680,00 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 499.300.000,00 | 498.094.000,00 | 99,76 | 77.388.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untu | 80.000.000,00 | 79.920.000,00 | 99,90 | 209.129.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untu | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 585.570.680,00 |
| 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lain | 515.000.000,00 | 512.820.000,00 | 99,58 | 34.909.500,00 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 229.950.000,00 | 198.450.000,00 | 86,30 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan I | 155.000.000,00 | 154.623.000,00 | 99,76 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan I | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 295.799.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.793.500,00 |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.392.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 60.000.000,00 | 59.884.500,00 | 99,81 | 725.859.450,00 |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 60.000.000,00 | 59.884.500,00 | 99,81 | 59.250.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Peneliti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.609.450,00 |
| 5.1.02.02.11 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100,00 | 60.000.000,00 |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 5.1.02.02.11.0003 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan d | 763.865.000,00 | 526.429.000,00 | 68,92 | 1.538.303.503,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 440.000.000,00 | 258.000.000,00 | 58,64 | 1.340.029.503,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 300.920.000,00 | 245.484.000,00 | 81,58 | 39.224.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 22.945.000,00 | 22.945.000,00 | 100,00 | 159.050.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 2.590.647.200,00 | 2.531.560.577,00 | 97,72 | 4.072.838.763,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.540.522.200,00 | 2.494.746.827,00 | 98,20 | 3.761.641.621,00 |
| 5.1.02.03.02.0001 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | 460.035.000,00 | 460.023.928,00 | 100,00 | 512.907.895,00 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 60.500.000,00 | 60.395.000,00 | 99,83 | 82.500.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 756.000.000,00 | 755.988.132,00 | 100,00 | 1.343.878.072,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kenda | 902.009.900,00 | 896.747.067,00 | 99,42 | 967.727.954,00 |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat A | 57.800.000,00 | 53.508.000,00 | 92,57 | 57.175.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-A | 7.722.000,00 | 7.722.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji K | 35.000.000,00 | 34.965.000,00 | 99,90 | 30.913.500,00 |
| 5.1.02.03.02.0105 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.549.200,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kar | 190.605.300,00 | 165.537.700,00 | 86,85 | 543.606.600,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- | 11.500.000,00 | 2.000.000,00 | 17,39 | 61.723.400,00 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 49.350.000,00 | 47.860.000,00 | 96,98 | 116.710.500,00 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.949.500,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 50.125.000,00 | 36.813.750,00 | 73,44 | 311.197.142,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50.125.000,00 | 36.813.750,00 | 73,44 | 254.157.842,00 |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.039.300,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 36.823.991.712,00 | 35.435.071.275,00 | 96,23 | 42.870.151.990,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 36.823.991.712,00 | 35.435.071.275,00 | 96,23 | 42.870.151.990,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30.448.310.316,00 | 29.565.591.175,00 | 97,10 | 32.889.208.157,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.375.681.396,00 | 5.869.480.100,00 | 92,06 | 9.881.343.833,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600.000,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak La | 22.742.623.979,00 | 21.425.817.718,00 | 94,21 | 29.615.095.701,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.946.753.600,00 | 1.941.466.465,00 | 99,73 | 1.371.977.885,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 100,00 | 211.976.700,00 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.404.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 1.922.253.600,00 | 1.916.966.465,00 | 99,72 | 829.597.185,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 20.795.870.379,00 | 19.484.351.253,00 | 93,69 | 28.243.117.816,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 19.828.170.379,00 | 18.523.551.253,00 | 93,42 | 28.084.319.234,00 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 967.700.000,00 | 960.800.000,00 | 99,29 | 158.798.582,00 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 34.187.050.960,00 | 30.855.196.458,00 | 90,25 | 32.110.810.520,00 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 34.187.050.960,00 | 30.855.196.458,00 | 90,25 | 32.110.810.520,00 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 34.187.050.960,00 | 30.855.196.458,00 | 90,25 | 32.110.810.520,00 |
| 5.1.02.90 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 17.311.517.000,00 | 16.736.117.496,00 | 96,68 | 0,00 |
| 5.1.02.90.01 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 17.311.517.000,00 | 16.736.117.496,00 | 96,68 | 0,00 |
| 5.1.02.90.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 17.311.517.000,00 | 16.736.117.496,00 | 96,68 | 0,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 69.096.000.000,00 | 81.252.485.989,00 | 117,59 | 73.481.701.077,00 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 69.096.000.000,00 | 81.252.485.989,00 | 117,59 | 73.481.701.077,00 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 69.096.000.000,00 | 81.252.485.989,00 | 117,59 | 73.481.701.077,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.03.03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.03.03.01 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUI | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.03.03.01.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUI | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 72.093.912.994,00 | 71.990.363.892,00 | 99,86 | 19.735.718.872,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 54.476.486.500,00 | 54.476.486.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 54.476.486.500,00 | 54.476.486.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 54.476.486.500,00 | 54.476.486.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.05.02 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |
| 5.1.05.02.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |
| 5.1.05.02.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang B | 6.405.000.000,00 | 6.335.000.000,00 | 98,91 | 18.789.479.809,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela | 5.530.000.000,00 | 5.460.000.000,00 | 98,73 | 8.507.410.000,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Suk | 5.530.000.000,00 | 5.460.000.000,00 | 98,73 | 8.507.410.000,00 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yar | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 100,00 | 6.130.542.300,00 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sos | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 100,00 | 6.130.542.300,00 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosia | 785.000.000,00 | 785.000.000,00 | 100,00 | 3.951.527.509,00 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat | 785.000.000,00 | 785.000.000,00 | 100,00 | 3.951.527.509,00 |
| 5.1.05.05.06 | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 5.1.05.05.06.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 4.703.620.000,00 | 4.853.620.000,00 | 103,19 | 0,00 |
| 5.1.05.06.02 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 4.703.620.000,00 | 4.853.620.000,00 | 103,19 | 0,00 |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 4.703.620.000,00 | 4.853.620.000,00 | 103,19 | 0,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 893.171.569,00 | 893.171.567,00 | 100,00 | 871.239.063,00 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 893.171.569,00 | 893.171.567,00 | 100,00 | 871.239.063,00 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 893.171.569,00 | 893.171.567,00 | 100,00 | 871.239.063,00 |
| 5.1.05.08 | Belanja Hibah Dana BOSP | 5.615.634.925,00 | 5.432.085.825,00 | 96,73 | 0,00 |
| 5.1.05.08.02 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 4.921.954.925,00 | 4.770.205.825,00 | 96,92 | 0,00 |
| 5.1.05.08.02.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 4.921.954.925,00 | 4.770.205.825,00 | 96,92 | 0,00 |
| 5.1.05.08.03 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 693.680.000,00 | 661.880.000,00 | 95,42 | 0,00 |
| 5.1.05.08.03.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 693.680.000,00 | 661.880.000,00 | 95,42 | 0,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 807.644.700,00 | 773.494.700,00 | 95,77 | 2.805.100.000,00 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 114.700.000,00 | 100.300.000,00 | 87,45 | 330.330.000,00 |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 42.000.000,00 | 28.000.000,00 | 66,67 | 330.330.000,00 |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 42.000.000,00 | 28.000.000,00 | 66,67 | 330.330.000,00 |
| 5.1.06.01.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 72.700.000,00 | 72.300.000,00 | 99,45 | 0,00 |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 72.700.000,00 | 72.300.000,00 | 99,45 | 0,00 |
| 5.1.06.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 132.944.700,00 | 128.194.700,00 | 96,43 | 364.770.000,00 |
| 5.1.06.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga | 90.000.000,00 | 85.250.000,00 | 94,72 | 297.500.000,00 |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 90.000.000,00 | 85.250.000,00 | 94,72 | 297.500.000,00 |
| 5.1.06.02.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 42.944.700,00 | 42.944.700,00 | 100,00 | 67.270.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.1.06.02.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 42.944.700,00 | 42.944.700,00 | 100,00 | 67.270.000,00 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 560.000.000,00 | 545.000.000,00 | 97,32 | 2.110.000.000,00 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyar | 560.000.000,00 | 545.000.000,00 | 97,32 | 2.110.000.000,00 |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyar | 560.000.000,00 | 545.000.000,00 | 97,32 | 2.110.000.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA OPERASI** | **1.062.938.481.200,00** | **1.014.674.115.403,47** | **95,46** | **927.720.435.846,00** |
| | | | | | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **102.975.845.013,00** | **99.079.324.655,94** | **96,22** | **168.342.205.859,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.198.460.613,00 | 26.958.423.144,00 | 111,41 | 44.530.761.080,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.661.800,00 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.800,00 |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.800,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0007 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 1.510.118.699,00 | 1.313.225.000,00 | 86,96 | 1.631.701.850,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.510.118.699,00 | 1.313.225.000,00 | 86,96 | 1.631.701.850,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 670.600.000,00 | 654.825.000,00 | 97,65 | 1.631.701.850,00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 475.518.699,00 | 475.000.000,00 | 99,89 | 0,00 |
| 5.2.02.02.01.0009 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 184.000.000,00 | 183.400.000,00 | 99,67 | 0,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 1.451.435.000,00 | 1.445.000.000,00 | 99,56 | 484.744.500,00 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.02.03.01.0004 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 1.451.435.000,00 | 1.445.000.000,00 | 99,56 | 482.744.500,00 |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 1.451.435.000,00 | 1.445.000.000,00 | 99,56 | 482.744.500,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468.800,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468.800,00 |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468.800,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.448.927.374,00 | 1.396.312.110,00 | 96,37 | 2.485.755.129,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 1.183.889.574,00 | 1.137.179.710,00 | 96,05 | 1.920.407.429,00 |
| 5.2.02.05.01.0001 | Belanja Modal Mesin Ketik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.796.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.183.889.574,00 | 1.137.179.710,00 | 96,05 | 1.903.611.429,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 265.037.800,00 | 259.132.400,00 | 97,77 | 565.347.700,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 257.000.000,00 | 251.570.000,00 | 97,89 | 429.598.900,00 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 2.063.300,00 | 2.062.400,00 | 99,96 | 900.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.848.800,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 5.974.500,00 | 5.500.000,00 | 92,06 | 0,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 105.422.200,00 | 104.160.000,00 | 98,80 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 7.965.400,00 | 7.700.000,00 | 96,67 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 7.965.400,00 | 7.700.000,00 | 96,67 | 0,00 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 97.456.800,00 | 96.460.000,00 | 98,98 | 0,00 |
| 5.2.02.06.02.0005 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF | 97.456.800,00 | 96.460.000,00 | 98,98 | 0,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 2.396.412.000,00 | 1.610.729.000,00 | 67,21 | 17.898.882.981,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080.348.756,00 |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888.900.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.448.756,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 2.396.412.000,00 | 1.610.729.000,00 | 67,21 | 10.818.534.225,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 2.396.412.000,00 | 1.610.729.000,00 | 67,21 | 10.818.534.225,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 172.275.000,00 | 172.019.000,00 | 99,85 | 49.956.000,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 170.775.000,00 | 170.519.000,00 | 99,85 | 49.956.000,00 |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 170.775.000,00 | 170.519.000,00 | 99,85 | 0,00 |
| 5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.416.000,00 |
| 5.2.02.08.01.0064 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.540.000,00 |
| 5.2.02.08.08 | Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.08.08.0006 | Belanja Modal Peralatan Umum | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 197.588.100,00 | 195.300.002,00 | 98,84 | 3.666.871.740,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.465.980,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.465.980,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 197.588.100,00 | 195.300.002,00 | 98,84 | 3.359.405.760,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.300.000,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 197.588.100,00 | 195.300.002,00 | 98,84 | 3.211.105.760,00 |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.02.16.01 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.02.16.01.0001 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 100.043.200,00 | 86.813.318,00 | 86,78 | 33.876.000,00 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 100.043.200,00 | 86.813.318,00 | 86,78 | 33.876.000,00 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 100.043.200,00 | 86.813.318,00 | 86,78 | 33.876.000,00 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 9.262.251.040,00 | 18.028.799.225,00 | 194,65 | 14.542.577.739,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 9.262.251.040,00 | 18.028.799.225,00 | 194,65 | 14.542.577.739,00 |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 9.262.251.040,00 | 18.028.799.225,00 | 194,65 | 14.542.577.739,00 |
| 5.2.02.89 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 6.053.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.89.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS | 6.053.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.89.01.0001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler | 6.053.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.500.000.000,00 | 2.606.065.489,00 | 173,74 | 3.690.264.541,00 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.500.000.000,00 | 2.606.065.489,00 | 173,74 | 3.690.264.541,00 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.500.000.000,00 | 2.606.065.489,00 | 173,74 | 3.690.264.541,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.765.583.800,00 | 14.949.241.861,74 | 94,82 | 31.062.611.625,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 14.765.583.800,00 | 14.646.040.861,74 | 99,19 | 29.696.569.625,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 14.765.583.800,00 | 14.646.040.861,74 | 99,19 | 29.040.949.665,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.043.046,00 |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 12.254.893.800,00 | 12.184.536.167,50 | 99,43 | 22.356.287.422,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 350.690.000,00 | 344.903.400,00 | 98,35 | 753.027.830,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 1.300.000.000,00 | 1.274.500.069,00 | 98,04 | 293.622.600,00 |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 860.000.000,00 | 842.101.225,24 | 97,92 | 4.143.968.767,00 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.619.960,00 |
| 5.2.03.01.02.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.619.960,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980.000,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980.000,00 |
| 5.2.03.04.01.0003 | Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980.000,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 | 303.201.000,00 | 30,32 | 1.318.062.000,00 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 | 303.201.000,00 | 30,32 | 1.318.062.000,00 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 | 303.201.000,00 | 30,32 | 1.318.062.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62.693.955.540,00 | 56.854.991.209,34 | 90,69 | 92.684.156.254,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 49.198.239.439,00 | 45.169.608.351,88 | 91,81 | 81.567.015.705,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 48.198.239.439,00 | 44.171.658.797,88 | 91,65 | 70.295.648.331,00 |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 46.475.943.439,00 | 42.452.708.797,00 | 91,34 | 67.900.392.964,00 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.932.006,00 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 1.722.296.000,00 | 1.718.950.000,88 | 99,81 | 2.174.758.578,00 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.564.783,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 1.000.000.000,00 | 997.949.554,00 | 99,79 | 11.271.367.374,00 |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 1.000.000.000,00 | 997.949.554,00 | 99,79 | 11.271.367.374,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 10.849.329.800,00 | 9.307.382.857,46 | 85,79 | 10.809.227.049,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 10.756.223.800,00 | 9.214.452.857,46 | 85,67 | 10.468.320.692,00 |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 10.756.223.800,00 | 9.214.452.857,46 | 85,67 | 10.468.320.692,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan B | 93.106.000,00 | 92.930.000,00 | 99,81 | 340.906.357,00 |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan B | 93.106.000,00 | 92.930.000,00 | 99,81 | 340.906.357,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 2.646.386.301,00 | 2.378.000.000,00 | 89,86 | 0,00 |
| 5.2.04.03.05 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 2.646.386.301,00 | 2.378.000.000,00 | 89,86 | 0,00 |
| 5.2.04.03.05.0012 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya | 2.646.386.301,00 | 2.378.000.000,00 | 89,86 | 0,00 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.913.500,00 |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.913.500,00 |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.913.500,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 64.676.900,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 0,00 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 0,00 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 0,00 |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.676.900,00 |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.676.900,00 |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.676.900,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |
| | **JUMLAH BELANJA MODAL** | **102.975.845.013,00** | **99.079.324.655,94** | **96,22** | **168.342.205.859,00** |
| | | | | | |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **3.531.157.371,00** | **3.454.947.220,00** | **97,84** | **11.814.457.310,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| | **JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA** | **3.531.157.371,00** | **3.454.947.220,00** | **97,84** | **11.814.457.310,00** |
| | | | | | |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **273.116.310.900,00** | **258.649.802.576,00** | **94,70** | **265.473.294.238,00** |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 265.473.294.238,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada I | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 265.473.294.238,00 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.473.294.238,00 |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.473.294.238,00 |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota k | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 0,00 |
| 5.4.02.05.02.0004 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang ber | 199.823.835.000,00 | 199.129.952.200,00 | 99,65 | 0,00 |
| 5.4.02.05.02.0005 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang ber | 73.292.475.900,00 | 59.519.850.376,00 | 81,21 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | **JUMLAH BELANJA TRANSFER** | **273.116.310.900,00** | **258.649.802.576,00** | **94,70** | **265.473.294.238,00** |
| | | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **51.037.976.784,00** | **61.421.850.868,99** | **120,35** | **27.606.037.458,00** |
| | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **( 51.037.976.784,00 )** | **( 51.017.199.959,13 )** | **99,96** | **( 9.333.086.602,00 )** |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **18.272.950.857,00** | **18.264.856.637,87** | **99,96** | **63.076.262.956,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 18.272.950.857,00 | 18.264.856.637,87 | 99,96 | 63.076.262.956,00 |
| 6.1.01.05 | Penghematan Belanja | 15.209.725.567,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.01.05.01 | Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 15.209.725.567,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN | 14.927.814.099,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang | 236.717.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.01.05.01.0039 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 45.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana F | 0,00 | 15.209.725.566,87 | 0,00 | 60.272.706.789,20 |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 0,00 | 15.209.725.566,87 | 0,00 | 60.272.706.789,20 |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 0,00 | 15.209.725.566,87 | 0,00 | 60.272.706.789,20 |
| 6.1.01.08 | Sisa Belanja Lainnya | 3.063.225.289,13 | 3.055.131.071,00 | 99,74 | 2.803.556.166,80 |
| 6.1.01.08.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 1.453.300.175,00 | 1.453.300.175,00 | 100,00 | 1.807.065.832,00 |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 1.453.300.175,00 | 1.453.300.175,00 | 100,00 | 1.807.065.832,00 |
| 6.1.01.08.02 | Sisa Dana BOS | 1.117.116.850,93 | 1.111.838.600,80 | 99,53 | 963.867.626,80 |
| 6.1.01.08.02.0001 | Sisa Dana BOS | 1.117.116.850,93 | 1.111.838.600,80 | 99,53 | 963.867.626,80 |
| 6.1.01.08.03 | Sisa Dana Kapitasi | 492.808.263,20 | 489.992.295,20 | 99,43 | 32.622.708,00 |
| 6.1.01.08.03.0001 | Sisa Dana Kapitasi | 492.808.263,20 | 489.992.295,20 | 99,43 | 32.622.708,00 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **18.272.950.857,00** | **18.264.856.637,87** | **99,96** | **63.076.262.956,00** |
| | | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **69.310.927.641,00** | **69.282.056.597,00** | **99,96** | **72.409.349.558,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |
| 6.2.03.04 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |
| 6.2.03.04.01 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |
| 6.2.03.04.01.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **69.310.927.641,00** | **69.282.056.597,00** | **99,96** | **72.409.349.558,00** |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | ( 51.037.976.784,00 ) | ( 51.017.199.959,13 ) | 99,96 | ( 9.333.086.602,00 ) |
| | | | | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 10.404.650.909,86 | 0,00 | 18.272.950.856,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | - | |
| | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0,00 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | - | |
| | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 171.333.107,00 | 171.333.107,00 | - | |
| 1.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 1.01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 442.953.394.327,00 | 414.578.202.221,50 | (28.375.192.105,50) | 93,59% | |
| 1.01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 442.953.394.327,00 | 414.578.202.221,50 | (28.375.192.105,50) | 93,59% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 442.953.394.327,00 | 414.578.202.221,50 | (28.375.192.105,50) | 93,59% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 355.940.802.854,00 | 327.450.013.570,00 | (28.490.789.284,00) | 92,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *35.132.400,00* | *34.418.400,00* | *(714.000,00)* | *97,97%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *5.142.600,00* | *5.088.100,00* | *(54.500,00)* | *98,94%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.142.600,00 | 5.088.100,00 | (54.500,00) | 98,94% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.999.800,00* | *4.340.300,00* | *(659.500,00)* | *86,81%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.800,00 | 4.340.300,00 | (659.500,00) | 86,81% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *24.990.000,00* | *24.990.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.990.000,00 | 24.990.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *354.721.410.054,00* | *326.286.602.829,00* | *(28.434.807.225,00)* | *91,98%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *354.503.935.254,00* | *326.077.113.629,00* | *(28.426.821.625,00)* | *91,98%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 354.503.935.254,00 | 326.077.113.629,00 | (28.426.821.625,00) | 91,98% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.02.0002* | | *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | *217.474.800,00* | *209.489.200,00* | *(7.985.600,00)* | *96,33%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 217.474.800,00 | 209.489.200,00 | (7.985.600,00) | 96,33% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *488.144.950,00* | *469.188.374,00* | *(18.956.576,00)* | *96,12%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *4.982.100,00* | *4.890.500,00* | *(91.600,00)* | *98,16%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.982.100,00 | 4.890.500,00 | (91.600,00) | 98,16% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *188.206.850,00* | *169.998.700,00* | *(18.208.150,00)* | *90,33%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 188.206.850,00 | 169.998.700,00 | (18.208.150,00) | 90,33% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *10.000.000,00* | *9.971.000,00* | *(29.000,00)* | *99,71%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.971.000,00 | (29.000,00) | 99,71% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *95.000.000,00* | *94.590.000,00* | *(410.000,00)* | *99,57%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.000.000,00 | 94.590.000,00 | (410.000,00) | 99,57% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06.0008* | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *35.000.000,00* | *35.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *154.956.000,00* | *154.738.174,00* | *(217.826,00)* | *99,86%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.956.000,00 | 154.738.174,00 | (217.826,00) | 99,86% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *501.749.700,00* | *493.074.780,00* | *(8.674.920,00)* | *98,27%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *250.000,00* | *250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *103.500.000,00* | *94.954.280,00* | *(8.545.720,00)* | *91,74%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.500.000,00 | 94.954.280,00 | (8.545.720,00) | 91,74% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.08.0003* | | *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *19.999.700,00* | *19.870.500,00* | *(129.200,00)* | *99,35%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.700,00 | 19.870.500,00 | (129.200,00) | 99,35% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *378.000.000,00* | *378.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 378.000.000,00 | 378.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *194.365.750,00* | *166.729.187,00* | *(27.636.563,00)* | *85,78%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *194.365.750,00* | *166.729.187,00* | *(27.636.563,00)* | *85,78%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 194.365.750,00 | 166.729.187,00 | (27.636.563,00) | 85,78% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 87.012.591.473,00 | 87.128.188.651,50 | 115.597.178,50 | 100,13% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01* | | *Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar* | *47.256.637.948,00* | *47.687.332.121,98* | *430.694.173,98* | *100,91%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0004* | | *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* | *503.986.000,00* | *492.130.000,00* | *(11.856.000,00)* | *97,65%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.986.000,00 | 12.130.000,00 | (11.856.000,00) | 50,57% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0004 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 480.000.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0005* | | *Pembangunan Perpustakaan Sekolah* | *422.860.000,00* | *422.860.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0005 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0009* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* | *285.970.000,00* | *285.970.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0009 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 283.000.000,00 | 283.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0016* | | *Pengadaan Perlengkapan Sekolah* | *79.570.000,00* | *78.420.000,00* | *(1.150.000,00)* | *98,55%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0016 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0016 | 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 78.750.000,00 | 77.600.000,00 | (1.150.000,00) | 98,54% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0022* | | *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* | *842.773.000,00* | *801.800.000,00* | *(40.973.000,00)* | *95,14%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0022 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.773.000,00 | 2.100.000,00 | (40.673.000,00) | 4,91% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0022 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000.000,00 | 799.700.000,00 | (300.000,00) | 99,96% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0027* | | *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | *1.686.981.248,00* | *1.580.400.000,00* | *(106.581.248,00)* | *93,68%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0027 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.686.981.248,00 | 1.580.400.000,00 | (106.581.248,00) | 93,68% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0028* | | *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah* | *149.999.900,00* | *138.190.900,00* | *(11.809.000,00)* | *92,13%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0028 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.999.900,00 | 138.190.900,00 | (11.809.000,00) | 92,13% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0029* | | *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | *39.174.013.800,00* | *39.832.241.493,00* | *658.227.693,00* | *101,68%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0029 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.669.525.000,00 | 7.190.469.000,00 | 520.944.000,00 | 107,81% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0029 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.785.537.760,00 | 19.168.485.268,00 | (1.617.052.492,00) | 92,22% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0029 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 2.456.700.000,00 | 2.501.700.000,00 | 45.000.000,00 | 101,83% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0029 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.262.251.040,00 | 10.971.587.225,00 | 1.709.336.185,00 | 118,45% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0031* | | *Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar* | *1.000.050.000,00* | *990.194.000,00* | *(9.856.000,00)* | *99,01%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0031 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.050.000,00 | 30.194.000,00 | (9.856.000,00) | 75,39% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0031 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0048* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* | *97.363.000,00* | *97.363.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0048 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0048 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 95.823.000,00 | 95.823.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.01.0051* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah* | *3.013.071.000,00* | *2.967.762.728,98* | *(45.308.271,02)* | *98,50%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0051 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 35.040.000,00 | 35.040.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0051 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.531.000,00 | 152.134.482,00 | (43.396.518,00) | 77,81% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0051 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.782.500.000,00 | 2.780.588.246,98 | (1.911.753,02) | 99,93% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02* | | *Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | *32.046.369.000,00* | *32.183.700.540,52* | *137.331.540,52* | *100,43%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0003* | | *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* | *186.540.000,00* | *186.540.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0003 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0004* | | *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* | *532.311.000,00* | *527.633.000,00* | *(4.678.000,00)* | *99,12%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.311.000,00 | 7.633.000,00 | (4.678.000,00) | 62,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0004 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0006* | | *Pembangunan Laboratorium* | *1.287.993.000,00* | *1.285.410.000,00* | *(2.583.000,00)* | *99,80%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.993.000,00 | 5.410.000,00 | (2.583.000,00) | 67,68% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0006 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.280.000.000,00 | 1.280.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0014* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah* | *2.689.666.000,00* | *2.684.580.650,00* | *(5.085.350,00)* | *99,81%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0014 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0014 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 288.306.000,00 | 283.220.650,00 | (5.085.350,00) | 98,24% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0014 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0017* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah* | *180.000.000,00* | *180.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0017 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0018* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium* | *719.895.000,00* | *719.895.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0018 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0018 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 716.815.000,00 | 716.815.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0024* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* | *192.834.000,00* | *192.834.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0024 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0024 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 191.294.000,00 | 191.294.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0025* | | *Pengadaan Mebel Sekolah* | *100.000.000,00* | *98.670.000,00* | *(1.330.000,00)* | *98,67%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0025 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000,00 | 98.670.000,00 | (1.330.000,00) | 98,67% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0035* | | *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* | *171.315.000,00* | *171.059.000,00* | *(256.000,00)* | *99,85%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0035 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0035 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 170.775.000,00 | 170.519.000,00 | (256.000,00) | 99,85% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0042* | | *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | *25.412.840.000,00* | *25.564.605.890,00* | *151.765.890,00* | *100,60%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0042 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.588.855.000,00 | 4.389.220.400,00 | 800.365.400,00 | 122,30% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0042 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.523.077.000,00 | 11.766.253.490,00 | (1.756.823.510,00) | 87,01% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0042 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 2.246.920.000,00 | 2.351.920.000,00 | 105.000.000,00 | 104,67% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0042 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.053.988.000,00 | 7.057.212.000,00 | 1.003.224.000,00 | 116,57% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0044* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU* | *173.245.000,00* | *173.245.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0044 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 173.245.000,00 | 173.245.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0045* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah* | *49.730.000,00* | *49.730.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0045 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 49.730.000,00 | 49.730.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0059* | | *Pembangunan Ruang Kelas Baru* | *200.000.000,00* | *199.498.000,52* | *(501.999,48)* | *99,75%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0059 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0059 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.320.000,00 | 9.318.000,00 | (2.000,00) | 99,98% | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0059 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 190.000.000,00 | 189.500.000,52 | (499.999,48) | 99,74% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.02.0064* | | *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* | *150.000.000,00* | *150.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0064 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.03* | | *Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* | *7.015.904.525,00* | *6.595.275.989,00* | *(420.628.536,00)* | *94,00%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.03.0016* | | *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD* | *1.853.950.000,00* | *1.630.800.000,00* | *(223.150.000,00)* | *87,96%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0016 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.853.950.000,00 | 1.630.800.000,00 | (223.150.000,00) | 87,96% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.03.0017* | | *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD* | *189.999.800,00* | *145.565.264,00* | *(44.434.536,00)* | *76,61%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.999.800,00 | 145.565.264,00 | (44.434.536,00) | 76,61% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.03.0018* | | *Pengelolaan Dana BOP PAUD* | *4.921.954.925,00* | *4.770.205.825,00* | *(151.749.100,00)* | *96,92%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0018 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 4.921.954.925,00 | 4.770.205.825,00 | (151.749.100,00) | 96,92% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.03.0025* | | *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | *49.999.800,00* | *48.704.900,00* | *(1.294.900,00)* | *97,41%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.800,00 | 48.704.900,00 | (1.294.900,00) | 97,41% | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.04* | | *Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | *693.680.000,00* | *661.880.000,00* | *(31.800.000,00)* | *95,42%* | |
| *1.01* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *1.01.02.2.04.0017* | | *Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | *693.680.000,00* | *661.880.000,00* | *(31.800.000,00)* | *95,42%* | |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.04.0017 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 693.680.000,00 | 661.880.000,00 | (31.800.000,00) | 95,42% | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 130.000.000,00 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80% | |
| 2.22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 130.000.000,00 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 130.000.000,00 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80% | |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 130.000.000,00 | 129.735.600,00 | (264.400,00) | 99,80% | |
| *2.22* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *2.22.02.2.02* | | *Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *130.000.000,00* | *129.735.600,00* | *(264.400,00)* | *99,80%* | |
| *2.22* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *2.22.02.2.02.0001* | | *Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya* | *80.000.000,00* | *79.735.600,00* | *(264.400,00)* | *99,67%* | |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 79.735.600,00 | (264.400,00) | 99,67% | |
| *2.22* | *1.01.2.22.0.00.01.0000* | *2.22.02.2.02.0003* | | *Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan* | *50.000.000,00* | *50.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02.2.02.0003 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 0,00 | 1.111.838.600,80 | 1.111.838.600,80 | 0,00% | |
| | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 1.111.838.600,80 | 1.111.838.600,80 | 0,00% | |
| | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 | 1.111.838.600,80 | 1.111.838.600,80 | 0,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : DINAS KESEHATAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 14.175.508.378,00 | 13.526.031.423,00 | (649.476.955,00) | 95,41 | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 175.000.000,00 | 129.744.500,00 | (45.255.500,00) | 74,13 | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 175.000.000,00 | 129.744.500,00 | (45.255.500,00) | 74,13 | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 0,00 | 250.121,00 | 250.121,00 | - | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 250.121,00 | 250.121,00 | - | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | (604.471.576,00) | 95,68 | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | (604.471.576,00) | 95,68 | |
| *1.02* | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *1.02* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *163.274.637.911,00* | *154.877.663.409,00* | *(8.396.974.502,00)* | *94,86%* | |
| *1.02* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN* | *163.274.637.911,00* | *154.877.663.409,00* | *(8.396.974.502,00)* | *94,86%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS KESEHATAN* | *142.484.760.911,00* | *134.749.838.598,00* | *(7.734.922.313,00)* | *94,57%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *97.717.051.182,00* | *92.553.415.834,00* | *(5.163.635.348,00)* | *94,72%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *236.005.000,00* | *228.424.500,00* | *(7.580.500,00)* | *96,79%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *75.000.000,00* | *69.570.800,00* | *(5.429.200,00)* | *92,76%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000,00 | 69.570.800,00 | (5.429.200,00) | 92,76% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.000.000,00* | *3.808.700,00* | *(191.300,00)* | *95,22%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.808.700,00 | (191.300,00) | 95,22% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *157.005.000,00* | *155.045.000,00* | *(1.960.000,00)* | *98,75%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.005.000,00 | 155.045.000,00 | (1.960.000,00) | 98,75% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *93.040.573.824,00* | *88.435.653.602,00* | *(4.604.920.222,00)* | *95,05%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *92.778.049.424,00* | *88.177.129.232,00* | *(4.600.920.192,00)* | *95,04%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 92.778.049.424,00 | 88.177.129.232,00 | (4.600.920.192,00) | 95,04% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *258.524.400,00* | *258.524.370,00* | *(30,00)* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 258.524.400,00 | 258.524.370,00 | (30,00) | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.000.000,00* | *0,00* | *(4.000.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | 0,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *260.000.000,00* | *250.530.253,00* | *(9.469.747,00)* | *96,36%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *60.000.000,00* | *58.643.100,00* | *(1.356.900,00)* | *97,74%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 58.643.100,00 | (1.356.900,00) | 97,74% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *20.000.000,00* | *15.476.000,00* | *(4.524.000,00)* | *77,38%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 15.476.000,00 | (4.524.000,00) | 77,38% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *170.000.000,00* | *166.411.153,00* | *(3.588.847,00)* | *97,89%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | 166.411.153,00 | (3.588.847,00) | 97,89% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *3.316.312.500,00* | *2.867.387.500,00* | *(448.925.000,00)* | *86,46%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.07.0011* | | *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *3.316.312.500,00* | *2.867.387.500,00* | *(448.925.000,00)* | *86,46%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.07.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.407.500,00 | 14.387.500,00 | (20.000,00) | 99,86% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.07.0011 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 655.518.699,00 | 475.000.000,00 | (180.518.699,00) | 72,46% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.07.0011 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.646.386.301,00 | 2.378.000.000,00 | (268.386.301,00) | 89,86% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *549.604.858,00* | *463.773.842,00* | *(85.831.016,00)* | *84,38%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *140.000.000,00* | *60.870.784,00* | *(79.129.216,00)* | *43,48%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000,00 | 60.870.784,00 | (79.129.216,00) | 43,48% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *409.604.858,00* | *402.903.058,00* | *(6.701.800,00)* | *98,36%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 409.604.858,00 | 402.903.058,00 | (6.701.800,00) | 98,36% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *314.555.000,00* | *307.646.137,00* | *(6.908.863,00)* | *97,80%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *314.555.000,00* | *307.646.137,00* | *(6.908.863,00)* | *97,80%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 314.555.000,00 | 307.646.137,00 | (6.908.863,00) | 97,80% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *42.512.965.779,00* | *40.160.392.034,00* | *(2.352.573.745,00)* | *94,47%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.01* | | *Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *7.358.919.500,00* | *6.473.103.408,00* | *(885.816.092,00)* | *87,96%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.01.0014* | | *Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | *881.280.000,00* | *107.619.600,00* | *(773.660.400,00)* | *12,21%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0014 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.969.600,00 | (30.400,00) | 99,70% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0014 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 871.280.000,00 | 97.650.000,00 | (773.630.000,00) | 11,21% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.01.0020* | | *Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | *99.867.000,00* | *0,00* | *(99.867.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.867.000,00 | 0,00 | (99.867.000,00) | 0,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.01.0023* | | *Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan* | *6.212.472.500,00* | *6.211.907.558,00* | *(564.942,00)* | *99,99%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0023 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.212.472.500,00 | 6.211.907.558,00 | (564.942,00) | 99,99% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.01.0026* | | *Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan* | *165.300.000,00* | *153.576.250,00* | *(11.723.750,00)* | *92,91%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0026 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 165.300.000,00 | 153.576.250,00 | (11.723.750,00) | 92,91% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *35.038.860.279,00* | *33.575.181.826,00* | *(1.463.678.453,00)* | *95,82%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0003* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir* | *299.485.916,00* | *72.546.053,00* | *(226.939.863,00)* | *24,22%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 299.485.916,00 | 72.546.053,00 | (226.939.863,00) | 24,22% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0009* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus* | *514.006.534,00* | *502.650.000,00* | *(11.356.534,00)* | *97,79%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 514.006.534,00 | 502.650.000,00 | (11.356.534,00) | 97,79% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0010* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat* | *150.000.000,00* | *143.271.490,00* | *(6.728.510,00)* | *95,51%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 143.271.490,00 | (6.728.510,00) | 95,51% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *663.119.600,00* | *655.167.000,00* | *(7.952.600,00)* | *98,80%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 663.119.600,00 | 655.167.000,00 | (7.952.600,00) | 98,80% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *43.142.800,00* | *42.423.200,00* | *(719.600,00)* | *98,33%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.142.800,00 | 42.423.200,00 | (719.600,00) | 98,33% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *576.297.750,00* | *567.724.830,00* | *(8.572.920,00)* | *98,51%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 575.249.750,00 | 566.676.830,00 | (8.572.920,00) | 98,51% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0018* | | *Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | *485.310.700,00* | *480.297.700,00* | *(5.013.000,00)* | *98,97%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0018 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 485.310.700,00 | 480.297.700,00 | (5.013.000,00) | 98,97% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *92.220.000,00* | *88.970.000,00* | *(3.250.000,00)* | *96,48%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.220.000,00 | 88.970.000,00 | (3.250.000,00) | 96,48% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0022* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA* | *40.258.000,00* | *38.848.000,00* | *(1.410.000,00)* | *96,50%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0022 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.258.000,00 | 38.848.000,00 | (1.410.000,00) | 96,50% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *987.590.000,00* | *539.369.928,00* | *(448.220.072,00)* | *54,61%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 987.590.000,00 | 539.369.928,00 | (448.220.072,00) | 54,61% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0026* | | *Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | *30.234.384.979,00* | *29.728.117.180,00* | *(506.267.799,00)* | *98,33%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0026 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.234.384.979,00 | 29.728.117.180,00 | (506.267.799,00) | 98,33% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0028* | | *Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional* | *144.988.000,00* | *73.536.295,00* | *(71.451.705,00)* | *50,72%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0028 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.988.000,00 | 73.536.295,00 | (71.451.705,00) | 50,72% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0034* | | *Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | *23.904.000,00* | *23.904.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0034 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.904.000,00 | 23.904.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0035* | | *Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota* | *358.814.000,00* | *342.119.000,00* | *(16.695.000,00)* | *95,35%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0035 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 358.814.000,00 | 342.119.000,00 | (16.695.000,00) | 95,35% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *28.500.000,00* | *28.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0042* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria* | *24.282.900,00* | *21.111.050,00* | *(3.171.850,00)* | *86,94%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0042 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.282.900,00 | 21.111.050,00 | (3.171.850,00) | 86,94% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *372.555.100,00* | *226.626.100,00* | *(145.929.000,00)* | *60,83%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 372.555.100,00 | 226.626.100,00 | (145.929.000,00) | 60,83% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *115.186.000,00* | *112.106.800,00* | *(3.079.200,00)* | *97,33%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *115.186.000,00* | *112.106.800,00* | *(3.079.200,00)* | *97,33%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.186.000,00 | 112.106.800,00 | (3.079.200,00) | 97,33% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.03* | | *PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN* | *1.898.900.950,00* | *1.762.861.730,00* | *(136.039.220,00)* | *92,84%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.03.2.02* | | *Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota* | *173.342.000,00* | *172.006.000,00* | *(1.336.000,00)* | *99,23%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.03.2.02.0003* | | *Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | *173.342.000,00* | *172.006.000,00* | *(1.336.000,00)* | *99,23%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 173.342.000,00 | 172.006.000,00 | (1.336.000,00) | 99,23% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.03.2.03* | | *Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *1.725.558.950,00* | *1.590.855.730,00* | *(134.703.220,00)* | *92,19%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.03.2.03.0001* | | *Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *1.725.558.950,00* | *1.590.855.730,00* | *(134.703.220,00)* | *92,19%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.725.558.950,00 | 1.590.855.730,00 | (134.703.220,00) | 92,19% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04* | | *PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN* | *316.329.000,00* | *239.205.000,00* | *(77.124.000,00)* | *75,62%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04.2.01* | | *Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | *63.730.000,00* | *53.263.500,00* | *(10.466.500,00)* | *83,58%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04.2.01.0001* | | *Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | *63.730.000,00* | *53.263.500,00* | *(10.466.500,00)* | *83,58%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.730.000,00 | 53.263.500,00 | (10.466.500,00) | 83,58% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04.2.03* | | *Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | *85.387.000,00* | *70.928.000,00* | *(14.459.000,00)* | *83,07%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04.2.03.0001* | | *Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | *85.387.000,00* | *70.928.000,00* | *(14.459.000,00)* | *83,07%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.387.000,00 | 70.928.000,00 | (14.459.000,00) | 83,07% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04.2.06* | | *Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga* | *167.212.000,00* | *115.013.500,00* | *(52.198.500,00)* | *68,78%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.04.2.06.0001* | | *Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan* | *167.212.000,00* | *115.013.500,00* | *(52.198.500,00)* | *68,78%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 167.212.000,00 | 115.013.500,00 | (52.198.500,00) | 68,78% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *39.514.000,00* | *33.964.000,00* | *(5.550.000,00)* | *85,95%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *39.514.000,00* | *33.964.000,00* | *(5.550.000,00)* | *85,95%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0000* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *39.514.000,00* | *33.964.000,00* | *(5.550.000,00)* | *85,95%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.514.000,00 | 33.964.000,00 | (5.550.000,00) | 85,95% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | | | *PUSKESMAS AEK RAJA* | *868.928.000,00* | *832.559.110,00* | *(36.368.890,00)* | *95,81%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *813.278.000,00* | *776.909.110,00* | *(36.368.890,00)* | *95,53%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *801.278.000,00* | *767.909.110,00* | *(33.368.890,00)* | *95,84%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *34.000.000,00* | *34.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *59.650.000,00* | *59.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.650.000,00 | 59.650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *11.560.000,00* | *11.560.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.560.000,00 | 11.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *13.600.000,00* | *13.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *5.100.000,00* | *5.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *226.308.000,00* | *226.308.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.308.000,00 | 226.308.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *19.870.000,00* | *19.870.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.870.000,00 | 19.870.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *30.610.000,00* | *30.610.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.610.000,00 | 30.610.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *106.650.000,00* | *106.590.000,00* | *(60.000,00)* | *99,94%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.650.000,00 | 106.590.000,00 | (60.000,00) | 99,94% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *194.980.000,00* | *161.731.110,00* | *(33.248.890,00)* | *82,95%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 139.000.000,00 | 131.051.110,00 | (7.948.890,00) | 94,28% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.980.000,00 | 30.680.000,00 | (25.300.000,00) | 54,81% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.680.000,00* | *1.680.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *15.000.000,00* | *14.975.000,00* | *(25.000,00)* | *99,83%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.975.000,00 | (25.000,00) | 99,83% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *7.710.000,00* | *7.675.000,00* | *(35.000,00)* | *99,55%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.710.000,00 | 7.675.000,00 | (35.000,00) | 99,55% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *72.960.000,00* | *72.960.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.960.000,00 | 72.960.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *55.650.000,00* | *55.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *55.650.000,00* | *55.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0001* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *55.650.000,00* | *55.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.650.000,00 | 55.650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | | | *PUSKESMAS BUTAR* | *870.283.000,00* | *830.219.191,00* | *(40.063.809,00)* | *95,40%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *778.033.000,00* | *737.969.191,00* | *(40.063.809,00)* | *94,85%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *766.033.000,00* | *728.969.191,00* | *(37.063.809,00)* | *95,16%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *24.920.000,00* | *24.920.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.920.000,00 | 24.920.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *42.800.000,00* | *42.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *14.350.000,00* | *14.350.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.350.000,00 | 14.350.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *10.300.000,00* | *10.300.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *100.000,00* | *100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *233.102.000,00* | *233.102.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 233.102.000,00 | 233.102.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *10.870.000,00* | *10.870.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.870.000,00 | 10.870.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *26.290.000,00* | *25.660.000,00* | *(630.000,00)* | *97,60%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.290.000,00 | 25.660.000,00 | (630.000,00) | 97,60% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *89.485.000,00* | *87.275.000,00* | *(2.210.000,00)* | *97,53%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.485.000,00 | 87.275.000,00 | (2.210.000,00) | 97,53% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *196.900.000,00* | *162.776.191,00* | *(34.123.809,00)* | *82,67%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 141.000.000,00 | 131.976.191,00 | (9.023.809,00) | 93,60% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.900.000,00 | 30.800.000,00 | (25.100.000,00) | 55,10% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *210.000,00* | *210.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *19.530.000,00* | *19.530.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.530.000,00 | 19.530.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *100.000,00* | *0,00* | *(100.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | 0,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *7.140.000,00* | *7.140.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *89.936.000,00* | *89.936.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.936.000,00 | 89.936.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *92.250.000,00* | *92.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *92.250.000,00* | *92.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0002* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *92.250.000,00* | *92.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.250.000,00 | 92.250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | | | *PUSKESMAS GAROGA* | *1.101.226.000,00* | *1.073.673.397,00* | *(27.552.603,00)* | *97,50%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *982.216.000,00* | *954.763.397,00* | *(27.452.603,00)* | *97,21%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *970.216.000,00* | *945.763.397,00* | *(24.452.603,00)* | *97,48%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *148.850.000,00* | *148.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 148.850.000,00 | 148.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *37.260.000,00* | *37.260.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.260.000,00 | 37.260.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *19.140.000,00* | *19.140.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.140.000,00 | 19.140.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *9.600.000,00* | *9.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *3.840.000,00* | *3.640.000,00* | *(200.000,00)* | *94,79%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.840.000,00 | 3.640.000,00 | (200.000,00) | 94,79% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *302.226.000,00* | *301.826.000,00* | *(400.000,00)* | *99,87%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 302.226.000,00 | 301.826.000,00 | (400.000,00) | 99,87% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *5.000.000,00* | *4.900.000,00* | *(100.000,00)* | *98,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.900.000,00 | (100.000,00) | 98,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *19.760.000,00* | *19.760.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.760.000,00 | 19.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *124.440.000,00* | *123.975.000,00* | *(465.000,00)* | *99,63%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.440.000,00 | 123.975.000,00 | (465.000,00) | 99,63% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *251.220.000,00* | *228.072.397,00* | *(23.147.603,00)* | *90,79%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 177.000.000,00 | 185.952.397,00 | 8.952.397,00 | 105,06% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.220.000,00 | 42.120.000,00 | (32.100.000,00) | 56,75% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.560.000,00* | *1.560.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *16.200.000,00* | *16.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *2.560.000,00* | *2.560.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *4.860.000,00* | *4.860.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *23.700.000,00* | *23.560.000,00* | *(140.000,00)* | *99,41%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.700.000,00 | 23.560.000,00 | (140.000,00) | 99,41% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *119.010.000,00* | *118.910.000,00* | *(100.000,00)* | *99,92%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *119.010.000,00* | *118.910.000,00* | *(100.000,00)* | *99,92%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0003* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *119.010.000,00* | *118.910.000,00* | *(100.000,00)* | *99,92%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.010.000,00 | 118.910.000,00 | (100.000,00) | 99,92% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | | | *PUSKESMAS HUTABAGINDA* | *1.189.960.000,00* | *1.137.279.581,00* | *(52.680.419,00)* | *95,57%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *1.063.030.000,00* | *1.010.349.581,00* | *(52.680.419,00)* | *95,04%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *1.051.030.000,00* | *1.001.349.581,00* | *(49.680.419,00)* | *95,27%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *44.100.000,00* | *44.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *98.170.000,00* | *98.170.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.170.000,00 | 98.170.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *9.000.000,00* | *9.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *6.400.000,00* | *28.540.000,00* | *22.140.000,00* | *445,94%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.400.000,00 | 28.540.000,00 | 22.140.000,00 | 445,94% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *2.700.000,00* | *2.700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *296.480.000,00* | *291.320.000,00* | *(5.160.000,00)* | *98,26%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 296.480.000,00 | 291.320.000,00 | (5.160.000,00) | 98,26% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *10.090.000,00* | *10.090.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.090.000,00 | 10.090.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *32.320.000,00* | *32.320.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.320.000,00 | 32.320.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *122.180.000,00* | *122.180.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 122.180.000,00 | 122.180.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *268.500.000,00* | *223.979.581,00* | *(44.520.419,00)* | *83,42%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 189.000.000,00 | 167.128.455,00 | (21.871.545,00) | 88,43% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.500.000,00 | 56.851.126,00 | (22.648.874,00) | 71,51% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0034* | | *Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | *15.690.000,00* | *15.690.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0034 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.080.000,00* | *1.080.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *22.140.000,00* | *0,00* | *(22.140.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.140.000,00 | 0,00 | (22.140.000,00) | 0,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.440.000,00* | *1.440.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *7.140.000,00* | *7.140.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *113.600.000,00* | *113.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.600.000,00 | 113.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *126.930.000,00* | *126.930.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *126.930.000,00* | *126.930.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0004* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *126.930.000,00* | *126.930.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.930.000,00 | 126.930.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | | | *PUSKESMAS JANJI ANGKOLA* | *929.873.000,00* | *910.014.390,00* | *(19.858.610,00)* | *97,86%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *824.993.000,00* | *805.134.390,00* | *(19.858.610,00)* | *97,59%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *812.993.000,00* | *796.134.390,00* | *(16.858.610,00)* | *97,93%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *36.740.000,00* | *36.740.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.740.000,00 | 36.740.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *71.220.000,00* | *71.220.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.220.000,00 | 71.220.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *7.800.000,00* | *7.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *6.100.000,00* | *6.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *3.900.000,00* | *3.900.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *242.874.000,00* | *242.874.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 242.874.000,00 | 242.874.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *10.230.000,00* | *10.230.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *24.204.000,00* | *23.554.000,00* | *(650.000,00)* | *97,31%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.204.000,00 | 23.554.000,00 | (650.000,00) | 97,31% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *93.630.000,00* | *93.630.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.630.000,00 | 93.630.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *211.527.000,00* | *195.318.390,00* | *(16.208.610,00)* | *92,34%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 150.000.000,00 | 161.391.390,00 | 11.391.390,00 | 107,59% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.527.000,00 | 33.927.000,00 | (27.600.000,00) | 55,14% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.680.000,00* | *1.680.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *13.200.000,00* | *13.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *4.008.000,00* | *4.008.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.008.000,00 | 4.008.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *84.280.000,00* | *84.280.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.280.000,00 | 84.280.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *104.880.000,00* | *104.880.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *104.880.000,00* | *104.880.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0005* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *104.880.000,00* | *104.880.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.880.000,00 | 104.880.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | | | *PUSKESMAS LUMBAN SINAGA* | *1.015.380.000,00* | *1.005.060.684,00* | *(10.319.316,00)* | *98,98%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *911.960.000,00* | *901.640.684,00* | *(10.319.316,00)* | *98,87%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *899.960.000,00* | *892.640.684,00* | *(7.319.316,00)* | *99,19%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *67.900.000,00* | *67.855.000,00* | *(45.000,00)* | *99,93%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.900.000,00 | 67.855.000,00 | (45.000,00) | 99,93% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *40.920.000,00* | *40.320.000,00* | *(600.000,00)* | *98,53%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.920.000,00 | 40.320.000,00 | (600.000,00) | 98,53% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *7.250.000,00* | *7.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *9.000.000,00* | *8.980.000,00* | *(20.000,00)* | *99,78%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 8.980.000,00 | (20.000,00) | 99,78% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *3.600.000,00* | *3.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *272.270.000,00* | *272.245.000,00* | *(25.000,00)* | *99,99%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 272.270.000,00 | 272.245.000,00 | (25.000,00) | 99,99% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *5.000.000,00* | *4.960.000,00* | *(40.000,00)* | *99,20%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.960.000,00 | (40.000,00) | 99,20% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *15.850.000,00* | *15.090.000,00* | *(760.000,00)* | *95,21%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.850.000,00 | 15.090.000,00 | (760.000,00) | 95,21% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *119.920.000,00* | *119.825.000,00* | *(95.000,00)* | *99,92%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.920.000,00 | 119.825.000,00 | (95.000,00) | 99,92% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *231.180.000,00* | *225.460.684,00* | *(5.719.316,00)* | *97,53%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 160.000.000,00 | 189.640.684,00 | 29.640.684,00 | 118,53% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.180.000,00 | 35.820.000,00 | (35.360.000,00) | 50,32% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.440.000,00* | *1.440.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *15.000.000,00* | *14.985.000,00* | *(15.000,00)* | *99,90%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.985.000,00 | (15.000,00) | 99,90% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *2.240.000,00* | *2.240.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *4.860.000,00* | *4.860.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *103.530.000,00* | *103.530.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.530.000,00 | 103.530.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *103.420.000,00* | *103.420.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *103.420.000,00* | *103.420.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0006* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *103.420.000,00* | *103.420.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.420.000,00 | 103.420.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | | | *PUSKESMAS MUARA* | *1.049.563.000,00* | *1.034.700.830,00* | *(14.862.170,00)* | *98,58%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *954.508.000,00* | *939.645.830,00* | *(14.862.170,00)* | *98,44%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *942.508.000,00* | *930.645.830,00* | *(11.862.170,00)* | *98,74%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *40.125.000,00* | *40.125.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.125.000,00 | 40.125.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *81.450.000,00* | *81.450.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.450.000,00 | 81.450.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *14.940.000,00* | *14.940.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.940.000,00 | 14.940.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *7.000.000,00* | *7.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *1.800.000,00* | *1.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *279.658.000,00* | *279.658.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 279.658.000,00 | 279.658.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *13.330.000,00* | *13.330.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.330.000,00 | 13.330.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *34.095.000,00* | *34.095.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.095.000,00 | 34.095.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *124.495.000,00* | *124.495.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.495.000,00 | 124.495.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *238.600.000,00* | *226.737.830,00* | *(11.862.170,00)* | *95,03%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 170.000.000,00 | 169.797.210,00 | (202.790,00) | 99,88% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.600.000,00 | 56.940.620,00 | (11.659.380,00) | 83,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.800.000,00* | *1.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *13.020.000,00* | *13.020.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.020.000,00 | 13.020.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *2.400.000,00* | *2.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *6.420.000,00* | *6.420.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *83.375.000,00* | *83.375.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.375.000,00 | 83.375.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *95.055.000,00* | *95.055.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *95.055.000,00* | *95.055.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0007* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *95.055.000,00* | *95.055.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.055.000,00 | 95.055.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | | | *PUSKESMAS ONAN HASANG* | *1.014.180.000,00* | *1.001.752.433,00* | *(12.427.567,00)* | *98,77%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *926.600.000,00* | *914.172.433,00* | *(12.427.567,00)* | *98,66%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *914.600.000,00* | *905.172.433,00* | *(9.427.567,00)* | *98,97%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *30.400.000,00* | *30.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.400.000,00 | 30.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *96.900.000,00* | *96.900.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.900.000,00 | 96.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *13.600.000,00* | *13.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *5.800.000,00* | *5.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *260.710.000,00* | *260.710.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 260.710.000,00 | 260.710.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *5.500.000,00* | *5.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *23.420.000,00* | *23.420.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *140.100.000,00* | *140.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *231.210.000,00* | *221.782.433,00* | *(9.427.567,00)* | *95,92%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 164.000.000,00 | 154.572.433,00 | (9.427.567,00) | 94,25% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.210.000,00 | 67.210.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *9.600.000,00* | *9.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *8.560.000,00* | *8.560.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *83.000.000,00* | *83.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *87.580.000,00* | *87.580.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *87.580.000,00* | *87.580.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0008* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *87.580.000,00* | *87.580.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.580.000,00 | 87.580.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | | | *PUSKESMAS PANGARIBUAN* | *1.011.890.000,00* | *998.211.604,00* | *(13.678.396,00)* | *98,65%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *937.348.000,00* | *923.669.604,00* | *(13.678.396,00)* | *98,54%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *925.348.000,00* | *914.669.604,00* | *(10.678.396,00)* | *98,85%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *42.480.000,00* | *42.480.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.480.000,00 | 42.480.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *80.040.000,00* | *80.040.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.040.000,00 | 80.040.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *7.200.000,00* | *7.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *3.600.000,00* | *3.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *258.340.000,00* | *258.340.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 258.340.000,00 | 258.340.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *11.050.000,00* | *11.050.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.050.000,00 | 11.050.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *21.348.000,00* | *21.158.000,00* | *(190.000,00)* | *99,11%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.348.000,00 | 21.158.000,00 | (190.000,00) | 99,11% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *126.500.000,00* | *126.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *230.700.000,00* | *220.211.604,00* | *(10.488.396,00)* | *95,45%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 164.000.000,00 | 153.571.604,00 | (10.428.396,00) | 93,64% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.700.000,00 | 66.640.000,00 | (60.000,00) | 99,91% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *27.900.000,00* | *27.900.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.350.000,00* | *1.350.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *3.300.000,00* | *3.300.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *100.340.000,00* | *100.340.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.340.000,00 | 100.340.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *74.542.000,00* | *74.542.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *74.542.000,00* | *74.542.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0009* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *74.542.000,00* | *74.542.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.542.000,00 | 74.542.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | | | *PUSKESMAS PANIARAN* | *865.989.000,00* | *856.703.499,00* | *(9.285.501,00)* | *98,93%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *802.366.000,00* | *793.080.499,00* | *(9.285.501,00)* | *98,84%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *790.366.000,00* | *784.080.499,00* | *(6.285.501,00)* | *99,20%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *61.100.000,00* | *61.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.100.000,00 | 61.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *51.260.000,00* | *50.660.000,00* | *(600.000,00)* | *98,83%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.260.000,00 | 50.660.000,00 | (600.000,00) | 98,83% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *13.200.000,00* | *13.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *10.300.000,00* | *10.300.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *4.590.000,00* | *4.590.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *225.686.000,00* | *225.671.000,00* | *(15.000,00)* | *99,99%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 225.686.000,00 | 225.671.000,00 | (15.000,00) | 99,99% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *7.700.000,00* | *7.700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *26.920.000,00* | *26.425.000,00* | *(495.000,00)* | *98,16%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.920.000,00 | 26.425.000,00 | (495.000,00) | 98,16% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *102.585.000,00* | *102.585.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.585.000,00 | 102.585.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *195.025.000,00* | *189.849.499,00* | *(5.175.501,00)* | *97,35%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 140.000.000,00 | 159.124.499,00 | 19.124.499,00 | 113,66% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.025.000,00 | 30.725.000,00 | (24.300.000,00) | 55,84% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *25.200.000,00* | *25.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *57.600.000,00* | *57.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *63.623.000,00* | *63.623.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *63.623.000,00* | *63.623.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0010* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *63.623.000,00* | *63.623.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.623.000,00 | 63.623.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | | | *PUSKESMAS PARMONANGAN* | *1.118.824.000,00* | *958.381.999,00* | *(160.442.001,00)* | *85,66%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *1.031.494.000,00* | *873.231.999,00* | *(158.262.001,00)* | *84,66%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *1.019.494.000,00* | *864.231.999,00* | *(155.262.001,00)* | *84,77%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *33.660.000,00* | *33.445.000,00* | *(215.000,00)* | *99,36%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.660.000,00 | 33.445.000,00 | (215.000,00) | 99,36% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *73.788.000,00* | *73.548.000,00* | *(240.000,00)* | *99,67%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.788.000,00 | 73.548.000,00 | (240.000,00) | 99,67% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *18.360.000,00* | *18.125.000,00* | *(235.000,00)* | *98,72%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.360.000,00 | 18.125.000,00 | (235.000,00) | 98,72% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *11.500.000,00* | *11.200.000,00* | *(300.000,00)* | *97,39%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.500.000,00 | 11.200.000,00 | (300.000,00) | 97,39% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *1.700.000,00* | *1.660.000,00* | *(40.000,00)* | *97,65%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.660.000,00 | (40.000,00) | 97,65% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *263.194.000,00* | *262.360.500,00* | *(833.500,00)* | *99,68%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 263.194.000,00 | 262.360.500,00 | (833.500,00) | 99,68% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *17.150.000,00* | *17.090.000,00* | *(60.000,00)* | *99,65%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.150.000,00 | 17.090.000,00 | (60.000,00) | 99,65% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *25.912.000,00* | *25.487.000,00* | *(425.000,00)* | *98,36%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.912.000,00 | 25.487.000,00 | (425.000,00) | 98,36% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *124.390.000,00* | *123.700.000,00* | *(690.000,00)* | *99,45%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.390.000,00 | 123.700.000,00 | (690.000,00) | 99,45% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *229.360.000,00* | *190.906.499,00* | *(38.453.501,00)* | *83,23%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 162.000.000,00 | 152.521.499,00 | (9.478.501,00) | 94,15% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.360.000,00 | 38.385.000,00 | (28.975.000,00) | 56,98% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0034* | | *Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | *113.770.000,00* | *0,00* | *(113.770.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0034 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.770.000,00 | 0,00 | (113.770.000,00) | 0,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *2.040.000,00* | *2.040.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *7.200.000,00* | *7.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *5.430.000,00* | *5.430.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *90.440.000,00* | *90.440.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.440.000,00 | 90.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *87.330.000,00* | *85.150.000,00* | *(2.180.000,00)* | *97,50%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *87.330.000,00* | *85.150.000,00* | *(2.180.000,00)* | *97,50%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0011* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *87.330.000,00* | *85.150.000,00* | *(2.180.000,00)* | *97,50%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.330.000,00 | 85.150.000,00 | (2.180.000,00) | 97,50% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | | | *PUSKESMAS PARSINGKAMAN* | *1.048.530.000,00* | *1.016.908.619,00* | *(31.621.381,00)* | *96,98%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *976.770.000,00* | *945.148.619,00* | *(31.621.381,00)* | *96,76%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *964.770.000,00* | *936.148.619,00* | *(28.621.381,00)* | *97,03%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *40.080.000,00* | *40.080.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.080.000,00 | 40.080.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *64.600.000,00* | *64.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.600.000,00 | 64.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *6.900.000,00* | *6.900.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *8.200.000,00* | *8.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *3.900.000,00* | *3.900.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *264.870.000,00* | *264.870.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.870.000,00 | 264.870.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *6.310.000,00* | *6.310.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.310.000,00 | 6.310.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *29.250.000,00* | *29.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.250.000,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *139.830.000,00* | *139.830.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.830.000,00 | 139.830.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0012* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *238.660.000,00* | *210.038.619,00* | *(28.621.381,00)* | *88,01%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 169.000.000,00 | 170.178.619,00 | 1.178.619,00 | 100,70% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.660.000,00 | 39.860.000,00 | (29.800.000,00) | 57,22% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0036 | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0040 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0041 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0044 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0046 | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 125.800.000,00 | 125.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.800.000,00 | 125.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.03.0002 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 71.760.000,00 | 71.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05.2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 71.760.000,00 | 71.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05.2.03.0001 | | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 71.760.000,00 | 71.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.760.000,00 | 71.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | | | PUSKESMAS SARULLA | 1.012.215.000,00 | 1.009.128.099,00 | (3.086.901,00) | 99,70% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 939.431.000,00 | 936.344.099,00 | (3.086.901,00) | 99,67% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 927.431.000,00 | 927.344.099,00 | (86.901,00) | 99,99% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0001 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 43.420.000,00 | 43.420.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.420.000,00 | 43.420.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0002 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 70.484.000,00 | 70.484.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.484.000,00 | 70.484.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0005 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0011 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0012 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0015 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 258.735.000,00 | 258.735.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 258.735.000,00 | 258.735.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0017 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9.970.000,00 | 9.970.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.970.000,00 | 9.970.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0020 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 21.826.000,00 | 21.826.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.826.000,00 | 21.826.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0025 | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 134.160.000,00 | 134.160.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.160.000,00 | 134.160.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0033 | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 228.836.000,00 | 228.749.099,00 | (86.901,00) | 99,96% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 162.000.000,00 | 161.913.099,00 | (86.901,00) | 99,95% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.836.000,00 | 66.836.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0036 | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0040 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 24.180.000,00 | 24.180.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.180.000,00 | 24.180.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0041 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0044 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0046 | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 106.900.000,00 | 106.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.900.000,00 | 106.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.03.0002 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 72.784.000,00 | 72.784.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05.2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 72.784.000,00 | 72.784.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05.2.03.0001 | | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 72.784.000,00 | 72.784.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.784.000,00 | 72.784.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | | | PUSKESMAS SIATAS BARITA | 981.188.000,00 | 948.361.915,00 | (32.826.085,00) | 96,65% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 870.098.000,00 | 837.271.915,00 | (32.826.085,00) | 96,23% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 858.098.000,00 | 828.271.915,00 | (29.826.085,00) | 96,52% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0001 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0002 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 77.640.000,00 | 77.040.000,00 | (600.000,00) | 99,23% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.640.000,00 | 77.040.000,00 | (600.000,00) | 99,23% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0005 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0011 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0012 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0015 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 248.638.000,00 | 248.638.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 248.638.000,00 | 248.638.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0017 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0020 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.630.000,00 | 20.630.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.630.000,00 | 20.630.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0025 | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 85.960.000,00 | 85.390.000,00 | (570.000,00) | 99,34% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.960.000,00 | 85.390.000,00 | (570.000,00) | 99,34% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0033 | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 222.140.000,00 | 195.083.915,00 | (27.056.085,00) | 87,82% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 158.000.000,00 | 158.943.915,00 | 943.915,00 | 100,60% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.140.000,00 | 36.140.000,00 | (28.000.000,00) | 56,35% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0036 | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0040 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0041 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000,00 | 0,00 | (1.600.000,00) | 0,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 0,00 | (1.600.000,00) | 0,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0044 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0046 | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 93.780.000,00 | 93.780.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.780.000,00 | 93.780.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.03.0002 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 111.090.000,00 | 111.090.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05.2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 111.090.000,00 | 111.090.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05.2.03.0001 | | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 111.090.000,00 | 111.090.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.090.000,00 | 111.090.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | | | PUSKESMAS SIBORONGBORONG | 1.078.385.000,00 | 1.070.259.528,00 | (8.125.472,00) | 99,25% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.038.575.000,00 | 1.030.449.528,00 | (8.125.472,00) | 99,22% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.026.575.000,00 | 1.021.449.528,00 | (5.125.472,00) | 99,50% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0001 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0002 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 53.700.000,00 | 53.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.700.000,00 | 53.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0005 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0011 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0012 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0015 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 264.400.000,00 | 264.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.400.000,00 | 264.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0017 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0020 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 22.880.000,00 | 22.880.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.880.000,00 | 22.880.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0025 | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 167.875.000,00 | 167.875.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 167.875.000,00 | 167.875.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0033 | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 242.960.000,00 | 237.834.528,00 | (5.125.472,00) | 97,89% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 172.000.000,00 | 166.874.528,00 | (5.125.472,00) | 97,02% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.960.000,00 | 70.960.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0034 | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 14.620.000,00 | 14.620.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0034 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.620.000,00 | 14.620.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0036 | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0040 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 28.350.000,00 | 28.350.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.350.000,00 | 28.350.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0041 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0044 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0046 | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 104.900.000,00 | 104.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.900.000,00 | 104.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.03.0002 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 39.810.000,00 | 39.810.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0015* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *39.810.000,00* | *39.810.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0015* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *39.810.000,00* | *39.810.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.810.000,00 | 39.810.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | | | *PUSKESMAS SILANGIT* | *874.454.000,00* | *849.987.100,00* | *(24.466.900,00)* | *97,20%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *818.804.000,00* | *794.337.100,00* | *(24.466.900,00)* | *97,01%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *806.804.000,00* | *785.337.100,00* | *(21.466.900,00)* | *97,34%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *35.250.000,00* | *35.246.000,00* | *(4.000,00)* | *99,99%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.250.000,00 | 35.246.000,00 | (4.000,00) | 99,99% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *75.500.000,00* | *74.900.000,00* | *(600.000,00)* | *99,21%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.500.000,00 | 74.900.000,00 | (600.000,00) | 99,21% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *8.100.000,00* | *8.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *14.200.000,00* | *14.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *5.500.000,00* | *5.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *228.434.000,00* | *228.434.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 228.434.000,00 | 228.434.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *14.530.000,00* | *14.530.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *32.630.000,00* | *32.080.000,00* | *(550.000,00)* | *98,31%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.630.000,00 | 32.080.000,00 | (550.000,00) | 98,31% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *112.400.000,00* | *112.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.400.000,00 | 112.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *194.900.000,00* | *174.588.350,00* | *(20.311.650,00)* | *89,58%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 139.000.000,00 | 118.688.350,00 | (20.311.650,00) | 85,39% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.900.000,00 | 55.900.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.980.000,00* | *1.980.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *15.000.000,00* | *15.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *8.880.000,00* | *8.880.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.880.000,00 | 8.880.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *57.900.000,00* | *57.898.750,00* | *(1.250,00)* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.900.000,00 | 57.898.750,00 | (1.250,00) | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *55.650.000,00* | *55.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *55.650.000,00* | *55.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0016* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *55.650.000,00* | *55.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.650.000,00 | 55.650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | | | *PUSKESMAS SIMANGUMBAN* | *921.936.000,00* | *918.196.035,00* | *(3.739.965,00)* | *99,59%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *842.526.000,00* | *838.786.035,00* | *(3.739.965,00)* | *99,56%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *830.526.000,00* | *829.786.035,00* | *(739.965,00)* | *99,91%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *47.360.000,00* | *47.360.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.360.000,00 | 47.360.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *60.520.000,00* | *60.520.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.520.000,00 | 60.520.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *13.200.000,00* | *13.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *13.000.000,00* | *13.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *240.336.000,00* | *240.336.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.336.000,00 | 240.336.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *15.250.000,00* | *15.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *23.520.000,00* | *23.520.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.520.000,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *101.350.000,00* | *101.050.000,00* | *(300.000,00)* | *99,70%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.350.000,00 | 101.050.000,00 | (300.000,00) | 99,70% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *208.880.000,00* | *208.440.035,00* | *(439.965,00)* | *99,79%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 149.000.000,00 | 148.560.035,00 | (439.965,00) | 99,70% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.880.000,00 | 59.880.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.680.000,00* | *1.680.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *15.000.000,00* | *15.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *5.430.000,00* | *5.430.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *77.400.000,00* | *77.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.400.000,00 | 77.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *79.410.000,00* | *79.410.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *79.410.000,00* | *79.410.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0017* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *79.410.000,00* | *79.410.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.410.000,00 | 79.410.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | | | *PUSKESMAS SIPAHUTAR* | *1.107.579.000,00* | *1.092.324.725,00* | *(15.254.275,00)* | *98,62%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *1.046.684.000,00* | *1.031.429.725,00* | *(15.254.275,00)* | *98,54%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *1.034.684.000,00* | *1.022.429.725,00* | *(12.254.275,00)* | *98,82%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *52.680.000,00* | *52.680.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.680.000,00 | 52.680.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *64.800.000,00* | *64.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *13.000.000,00* | *13.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *17.250.000,00* | *17.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *280.402.000,00* | *280.402.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 280.402.000,00 | 280.402.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *7.650.000,00* | *7.650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *28.272.000,00* | *28.272.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.272.000,00 | 28.272.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *154.320.000,00* | *153.870.000,00* | *(450.000,00)* | *99,71%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.320.000,00 | 153.870.000,00 | (450.000,00) | 99,71% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *252.720.000,00* | *240.915.725,00* | *(11.804.275,00)* | *95,33%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 178.000.000,00 | 166.195.725,00 | (11.804.275,00) | 93,37% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.720.000,00 | 74.720.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *24.000.000,00* | *24.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *1.600.000,00* | *1.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *4.290.000,00* | *4.290.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *126.500.000,00* | *126.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *60.895.000,00* | *60.895.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *60.895.000,00* | *60.895.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0018* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *60.895.000,00* | *60.895.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.895.000,00 | 60.895.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | | | *PUSKESMAS SIPULTAK* | *869.428.000,00* | *814.814.800,00* | *(54.613.200,00)* | *93,72%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *802.648.000,00* | *749.554.800,00* | *(53.093.200,00)* | *93,39%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *790.648.000,00* | *740.554.800,00* | *(50.093.200,00)* | *93,66%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *47.460.000,00* | *47.460.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.460.000,00 | 47.460.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *51.960.000,00* | *43.840.000,00* | *(8.120.000,00)* | *84,37%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.960.000,00 | 43.840.000,00 | (8.120.000,00) | 84,37% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *3.360.000,00* | *3.255.000,00* | *(105.000,00)* | *96,88%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.360.000,00 | 3.255.000,00 | (105.000,00) | 96,88% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *14.760.000,00* | *14.760.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.760.000,00 | 14.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *1.320.000,00* | *1.320.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *218.338.000,00* | *218.338.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 218.338.000,00 | 218.338.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *5.725.000,00* | *5.725.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *22.795.000,00* | *20.770.000,00* | *(2.025.000,00)* | *91,12%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.795.000,00 | 20.770.000,00 | (2.025.000,00) | 91,12% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *91.950.000,00* | *91.950.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.950.000,00 | 91.950.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *197.720.000,00* | *158.726.800,00* | *(38.993.200,00)* | *80,28%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 141.000.000,00 | 102.006.800,00 | (38.993.200,00) | 72,35% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.720.000,00 | 56.720.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *600.000,00* | *600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *41.280.000,00* | *41.270.000,00* | *(10.000,00)* | *99,98%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.280.000,00 | 41.270.000,00 | (10.000,00) | 99,98% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *800.000,00* | *0,00* | *(800.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | 0,00 | (800.000,00) | 0,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *12.240.000,00* | *12.200.000,00* | *(40.000,00)* | *99,67%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.240.000,00 | 12.200.000,00 | (40.000,00) | 99,67% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *80.340.000,00* | *80.340.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.340.000,00 | 80.340.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *66.780.000,00* | *65.260.000,00* | *(1.520.000,00)* | *97,72%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *66.780.000,00* | *65.260.000,00* | *(1.520.000,00)* | *97,72%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0019* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *66.780.000,00* | *65.260.000,00* | *(1.520.000,00)* | *97,72%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.780.000,00 | 65.260.000,00 | (1.520.000,00) | 97,72% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | | | *PUSKESMAS SITADATADA* | *879.242.000,00* | *821.316.571,00* | *(57.925.429,00)* | *93,41%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *815.672.000,00* | *757.746.571,00* | *(57.925.429,00)* | *92,90%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *803.672.000,00* | *748.746.571,00* | *(54.925.429,00)* | *93,17%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *51.300.000,00* | *51.300.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.300.000,00 | 51.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *66.084.000,00* | *65.484.000,00* | *(600.000,00)* | *99,09%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.084.000,00 | 65.484.000,00 | (600.000,00) | 99,09% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *5.760.000,00* | *5.760.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *5.500.000,00* | *5.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *2.700.000,00* | *2.700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *224.476.000,00* | *214.608.500,00* | *(9.867.500,00)* | *95,60%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 224.476.000,00 | 214.608.500,00 | (9.867.500,00) | 95,60% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *7.390.000,00* | *7.390.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *23.822.000,00* | *23.372.000,00* | *(450.000,00)* | *98,11%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.822.000,00 | 23.372.000,00 | (450.000,00) | 98,11% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *133.370.000,00* | *133.370.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.370.000,00 | 133.370.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *199.800.000,00* | *159.402.071,00* | *(40.397.929,00)* | *79,78%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 143.000.000,00 | 133.067.071,00 | (9.932.929,00) | 93,05% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.800.000,00 | 26.335.000,00 | (30.465.000,00) | 46,36% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *1.080.000,00* | *1.080.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *10.800.000,00* | *10.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *400.000,00* | *400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *65.190.000,00* | *61.580.000,00* | *(3.610.000,00)* | *94,46%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.190.000,00 | 61.580.000,00 | (3.610.000,00) | 94,46% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *63.570.000,00* | *63.570.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *63.570.000,00* | *63.570.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0020* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *63.570.000,00* | *63.570.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.570.000,00 | 63.570.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | | | *PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN* | *980.824.000,00* | *947.970.701,00* | *(32.853.299,00)* | *96,65%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *903.304.000,00* | *870.450.701,00* | *(32.853.299,00)* | *96,36%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *891.304.000,00* | *861.450.701,00* | *(29.853.299,00)* | *96,65%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* | *23.520.000,00* | *23.520.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.520.000,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* | *103.320.000,00* | *103.320.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.320.000,00 | 103.320.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0005* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar* | *8.640.000,00* | *8.640.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0011* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis* | *13.000.000,00* | *13.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0012* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV* | *2.400.000,00* | *2.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0015* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | *251.471.000,00* | *251.471.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 251.471.000,00 | 251.471.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0017* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | *8.500.000,00* | *8.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0020* | | *Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | *28.680.000,00* | *28.280.000,00* | *(400.000,00)* | *98,61%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0020 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.680.000,00 | 28.280.000,00 | (400.000,00) | 98,61% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0025* | | *Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | *121.970.000,00* | *121.970.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0025 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.970.000,00 | 121.970.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0033* | | *Operasional Pelayanan Puskesmas* | *223.353.000,00* | *193.919.701,00* | *(29.433.299,00)* | *86,82%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 158.000.000,00 | 157.266.701,00 | (733.299,00) | 99,54% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0033 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.353.000,00 | 36.653.000,00 | (28.700.000,00) | 56,08% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0036* | | *Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | *800.000,00* | *800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0036 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0040* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis* | *27.000.000,00* | *27.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0040 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0041* | | *Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)* | *810.000,00* | *810.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0044* | | *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi* | *6.000.000,00* | *5.980.000,00* | *(20.000,00)* | *99,67%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 5.980.000,00 | (20.000,00) | 99,67% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.02.0046* | | *Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak* | *71.840.000,00* | *71.840.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.840.000,00 | 71.840.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.02.2.03.0002* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | *12.000.000,00* | *9.000.000,00* | *(3.000.000,00)* | *75,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | 75,00% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN* | *77.520.000,00* | *77.520.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.05.2.03* | | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *77.520.000,00* | *77.520.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.01.0021* | *1.02.05.2.03.0001* | | *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | *77.520.000,00* | *77.520.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.05.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.520.000,00 | 77.520.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 0,00 | 489.992.295,20 | 489.992.295,20 | 0,00% | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 489.992.295,20 | 489.992.295,20 | 100,00% | |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 | 489.992.295,20 | 489.992.295,20 | 200,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN PUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : RSUD TARUTUNG

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2 | | | | | |
| | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 77.450.000.000,00 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,97 | |
| | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 77.450.000.000,00 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,97 | |
| | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 77.450.000.000,00 | 88.274.307.064,00 | 10.824.307.064,00 | 113,97 | |
| 1.02 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *1.02* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *118.979.589.025,00* | *124.452.786.004,00* | *5.473.196.979,00* | *104,60%* | |
| *1.02* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN* | *118.979.589.025,00* | *124.452.786.004,00* | *5.473.196.979,00* | *104,60%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | | | *RSU DAERAH TARUTUNG* | *118.979.589.025,00* | *124.452.786.004,00* | *5.473.196.979,00* | *104,60%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *40.004.457.025,00* | *34.017.507.181,00* | *(5.986.949.844,00)* | *85,03%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *40.004.457.025,00* | *34.017.507.181,00* | *(5.986.949.844,00)* | *85,03%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *40.004.457.025,00* | *34.017.507.181,00* | *(5.986.949.844,00)* | *85,03%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 40.004.457.025,00 | 34.017.507.181,00 | (5.986.949.844,00) | 85,03% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.02* | | *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT* | *78.975.132.000,00* | *90.435.278.823,00* | *11.460.146.823,00* | *114,51%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.02.2.01* | | *Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *1.525.132.000,00* | *1.513.079.000,00* | *(12.053.000,00)* | *99,21%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.02.2.01.0014* | | *Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | *1.525.132.000,00* | *1.513.079.000,00* | *(12.053.000,00)* | *99,21%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.01.0014 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.525.132.000,00 | 1.513.079.000,00 | (12.053.000,00) | 99,21% | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.02.2.02* | | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *77.450.000.000,00* | *88.922.199.823,00* | *11.472.199.823,00* | *114,81%* | |
| *1.02* | *1.02.0.00.0.00.02.0000* | *1.02.02.2.02.0032* | | *Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | *77.450.000.000,00* | *88.922.199.823,00* | *11.472.199.823,00* | *114,81%* | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.02.0032 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.854.000.000,00 | 4.760.447.345,00 | (1.093.552.655,00) | 81,32% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.02.0032 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.096.000.000,00 | 81.252.485.989,00 | 12.156.485.989,00 | 117,59% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.02.0032 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.500.000.000,00 | 2.606.065.489,00 | 1.106.065.489,00 | 173,74% | |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.02.0032 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.000.000.000,00 | 303.201.000,00 | (696.799.000,00) | 30,32% | |
| | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 0,00 | 1.453.300.175,00 | 1.453.300.175,00 | 0,00% | |
| | | | 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 1.453.300.175,00 | 1.453.300.175,00 | 100,00% | |
| | | | 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 | 1.453.300.175,00 | 1.453.300.175,00 | 200,00% | |
| | | | | **Jumlah** | 118.979.589.025,00 | 124.452.786.004,00 | 5.473.196.979,00 | 104,60% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS PARPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 400.000.000,00 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,13 | |
| | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 400.000.000,00 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,13 | |
| | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 400.000.000,00 | 424.550.000,00 | 24.550.000,00 | 106,13 | |
| 1.03 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *1.03* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *64.334.663.531,00* | *59.276.808.323,00* | *(5.057.855.208,00)* | *92,14%* | |
| *1.03* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* | *64.334.663.531,00* | *59.276.808.323,00* | *(5.057.855.208,00)* | *92,14%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG* | *64.334.663.531,00* | *59.276.808.323,00* | *(5.057.855.208,00)* | *92,14%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *9.232.901.638,00* | *8.955.095.961,00* | *(277.805.677,00)* | *96,99%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *41.000.100,00* | *40.326.600,00* | *(673.500,00)* | *98,36%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *12.000.100,00* | *11.717.300,00* | *(282.800,00)* | *97,64%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.100,00 | 11.717.300,00 | (282.800,00) | 97,64% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *5.000.000,00* | *4.815.700,00* | *(184.300,00)* | *96,31%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.815.700,00 | (184.300,00) | 96,31% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *24.000.000,00* | *23.793.600,00* | *(206.400,00)* | *99,14%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.793.600,00 | (206.400,00) | 99,14% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *7.552.513.953,00* | *7.293.924.368,00* | *(258.589.585,00)* | *96,58%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *7.464.368.953,00* | *7.206.112.168,00* | *(258.256.785,00)* | *96,54%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.464.368.953,00 | 7.206.112.168,00 | (258.256.785,00) | 96,54% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *78.145.200,00* | *78.145.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 78.145.200,00 | 78.145.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.999.700,00* | *4.826.000,00* | *(173.700,00)* | *96,53%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.700,00 | 4.826.000,00 | (173.700,00) | 96,53% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.02.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *5.000.100,00* | *4.841.000,00* | *(159.100,00)* | *96,82%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.100,00 | 4.841.000,00 | (159.100,00) | 96,82% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.03* | | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | *4.999.625,00* | *4.731.700,00* | *(267.925,00)* | *94,64%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.03.0006* | | *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *4.999.625,00* | *4.731.700,00* | *(267.925,00)* | *94,64%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.03.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.625,00 | 4.731.700,00 | (267.925,00) | 94,64% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *457.999.125,00* | *454.174.982,00* | *(3.824.143,00)* | *99,17%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *5.000.400,00* | *4.997.500,00* | *(2.900,00)* | *99,94%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.400,00 | 4.997.500,00 | (2.900,00) | 99,94% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *49.998.925,00* | *48.476.740,00* | *(1.522.185,00)* | *96,96%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.998.925,00 | 48.476.740,00 | (1.522.185,00) | 96,96% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *15.000.000,00* | *14.995.000,00* | *(5.000,00)* | *99,97%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.995.000,00 | (5.000,00) | 99,97% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *15.000.000,00* | *14.998.000,00* | *(2.000,00)* | *99,99%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.998.000,00 | (2.000,00) | 99,99% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *14.999.800,00* | *13.909.800,00* | *(1.090.000,00)* | *92,73%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.999.800,00 | 13.909.800,00 | (1.090.000,00) | 92,73% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0008* | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *8.000.000,00* | *7.995.000,00* | *(5.000,00)* | *99,94%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 7.995.000,00 | (5.000,00) | 99,94% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *350.000.000,00* | *348.802.942,00* | *(1.197.058,00)* | *99,66%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000,00 | 348.802.942,00 | (1.197.058,00) | 99,66% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *126.271.914,00* | *116.161.271,00* | *(10.110.643,00)* | *91,99%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *15.999.000,00* | *13.192.000,00* | *(2.807.000,00)* | *82,46%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.999.000,00 | 13.192.000,00 | (2.807.000,00) | 82,46% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *49.653.594,00* | *42.417.271,00* | *(7.236.323,00)* | *85,43%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.653.594,00 | 42.417.271,00 | (7.236.323,00) | 85,43% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *60.619.320,00* | *60.552.000,00* | *(67.320,00)* | *99,89%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.619.320,00 | 60.552.000,00 | (67.320,00) | 99,89% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *1.050.116.921,00* | *1.045.777.040,00* | *(4.339.881,00)* | *99,59%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *175.077.721,00* | *174.067.428,00* | *(1.010.293,00)* | *99,42%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 175.077.721,00 | 174.067.428,00 | (1.010.293,00) | 99,42% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.09.0003* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar* | *855.070.000,00* | *851.781.612,00* | *(3.288.388,00)* | *99,62%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 855.070.000,00 | 851.781.612,00 | (3.288.388,00) | 99,62% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *14.969.200,00* | *14.945.000,00* | *(24.200,00)* | *99,84%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.969.200,00 | 14.945.000,00 | (24.200,00) | 99,84% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.01.2.09.0011* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *5.000.000,00* | *4.983.000,00* | *(17.000,00)* | *99,66%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.983.000,00 | (17.000,00) | 99,66% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.02* | | *PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)* | *10.797.325.000,00* | *9.251.502.842,00* | *(1.545.822.158,00)* | *85,68%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.02.2.02* | | *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | *10.797.325.000,00* | *9.251.502.842,00* | *(1.545.822.158,00)* | *85,68%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.02.2.02.0014* | | *Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan* | *10.431.175.000,00* | *8.898.114.742,00* | *(1.533.060.258,00)* | *85,30%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0014 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.125.000,00 | 99.900.000,00 | (225.000,00) | 99,78% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0014 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 10.331.050.000,00 | 8.798.214.742,00 | (1.532.835.258,00) | 85,16% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.02.2.02.0021* | | *Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan* | *129.500.000,00* | *125.527.400,00* | *(3.972.600,00)* | *96,93%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0021 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.760.000,00 | 125.527.400,00 | (3.232.600,00) | 97,49% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0021 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 740.000,00 | 0,00 | (740.000,00) | 0,00% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.02.2.02.0035* | | *Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa* | *236.650.000,00* | *227.860.700,00* | *(8.789.300,00)* | *96,29%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0035 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.203.700,00 | 6.207.300,00 | (996.400,00) | 86,17% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0035 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 229.446.300,00 | 221.653.400,00 | (7.792.900,00) | 96,60% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN* | *44.284.436.893,00* | *41.050.644.820,00* | *(3.233.792.073,00)* | *92,70%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01* | | *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota* | *44.284.436.893,00* | *41.050.644.820,00* | *(3.233.792.073,00)* | *92,70%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0029* | | *Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan* | *1.682.398.250,00* | *1.669.751.235,00* | *(12.647.015,00)* | *99,25%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0029 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.513.000,00 | 142.423.335,00 | (89.665,00) | 99,94% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0029 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.539.885.250,00 | 1.527.327.900,00 | (12.557.350,00) | 99,18% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0032* | | *Pembangunan Jalan* | *1.347.382.972,00* | *1.195.422.048,00* | *(151.960.924,00)* | *88,72%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0032 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 677.089.589,00 | 673.214.700,00 | (3.874.889,00) | 99,43% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0032 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 670.293.383,00 | 522.207.348,00 | (148.086.035,00) | 77,91% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0033* | | *Rekonstruksi Jalan* | *37.547.226.000,00* | *35.608.181.183,00* | *(1.939.044.817,00)* | *94,84%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0033 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 37.547.226.000,00 | 35.608.181.183,00 | (1.939.044.817,00) | 94,84% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0039* | | *Rehabilitasi Jembatan* | *200.000.000,00* | *198.406.354,00* | *(1.593.646,00)* | *99,20%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0039 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 200.000.000,00 | 198.406.354,00 | (1.593.646,00) | 99,20% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0040* | | *Pembangunan Jembatan* | *800.000.000,00* | *799.543.200,00* | *(456.800,00)* | *99,94%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0040 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 800.000.000,00 | 799.543.200,00 | (456.800,00) | 99,94% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0043* | | *Survey Kondisi Jalan/Jembatan* | *589.950.000,00* | *578.619.300,00* | *(11.330.700,00)* | *98,08%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0043 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 589.950.000,00 | 578.619.300,00 | (11.330.700,00) | 98,08% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0044* | | *Rehabilitasi Jalan* | *1.742.983.920,00* | *627.609.000,00* | *(1.115.374.920,00)* | *36,01%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0044 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 167.983.920,00 | 167.389.200,00 | (594.720,00) | 99,65% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0044 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.575.000.000,00 | 460.219.800,00 | (1.114.780.200,00) | 29,22% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.10.2.01.0046* | | *Pemeliharaan Rutin Jalan* | *374.495.750,00* | *373.112.500,00* | *(1.383.250,00)* | *99,63%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0046 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 359.505.750,00 | 358.348.600,00 | (1.157.150,00) | 99,68% | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0046 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 14.990.000,00 | 14.763.900,00 | (226.100,00) | 98,49% | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.12* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG* | *20.000.000,00* | *19.564.700,00* | *(435.300,00)* | *97,82%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.12.2.04* | | *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | *20.000.000,00* | *19.564.700,00* | *(435.300,00)* | *97,82%* | |
| *1.03* | *1.03.0.00.0.00.01.0000* | *1.03.12.2.04.0004* | | *Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | *20.000.000,00* | *19.564.700,00* | *(435.300,00)* | *97,82%* | |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.12.2.04.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.564.700,00 | (435.300,00) | 97,82% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN**
**BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUAROAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *1.03* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *36.664.374.682,00* | *36.204.997.377,35* | *(459.377.304,65)* | *98,75%* | |
| *1.03* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* | *24.806.698.720,00* | *24.510.266.624,47* | *(296.432.095,53)* | *98,81%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | | | *DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN* | *24.806.698.720,00* | *24.510.266.624,47* | *(296.432.095,53)* | *98,81%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.03* | | *PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM* | *15.319.937.000,00* | *15.137.086.570,47* | *(182.850.429,53)* | *98,81%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.03.2.01* | | *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota* | *15.319.937.000,00* | *15.137.086.570,47* | *(182.850.429,53)* | *98,81%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.03.2.01.0028* | | *Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | *10.269.937.000,00* | *10.089.035.000,47* | *(180.901.999,53)* | *98,24%* | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03.2.01.0028 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 97.920.000,00 | 97.900.000,00 | (20.000,00) | 99,98% | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03.2.01.0028 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.172.017.000,00 | 9.991.135.000,47 | (180.881.999,53) | 98,22% | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.03.2.01.0032* | | *Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | *5.050.000.000,00* | *5.048.051.570,00* | *(1.948.430,00)* | *99,96%* | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03.2.01.0032 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.050.000.000,00 | 5.048.051.570,00 | (1.948.430,00) | 99,96% | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.05* | | *PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH* | *8.062.400.000,00* | *8.050.142.244,00* | *(12.257.756,00)* | *99,85%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.05.2.01* | | *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *8.062.400.000,00* | *8.050.142.244,00* | *(12.257.756,00)* | *99,85%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.05.2.01.0039* | | *Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat* | *7.912.400.000,00* | *7.911.159.500,00* | *(1.240.500,00)* | *99,98%* | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05.2.01.0039 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.912.400.000,00 | 7.911.159.500,00 | (1.240.500,00) | 99,98% | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.05.2.01.0041* | | *Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | *150.000.000,00* | *138.982.744,00* | *(11.017.256,00)* | *92,66%* | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05.2.01.0041 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 15.610.000,00 | 15.610.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05.2.01.0041 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.390.000,00 | 123.372.744,00 | (11.017.256,00) | 91,80% | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.08* | | *PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG* | *1.424.361.720,00* | *1.323.037.810,00* | *(101.323.910,00)* | *92,89%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.08.2.01* | | *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* | *1.424.361.720,00* | *1.323.037.810,00* | *(101.323.910,00)* | *92,89%* | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.08.2.01.0021* | | *Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | *1.304.361.720,00* | *1.205.191.910,00* | *(99.169.810,00)* | *92,40%* | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08.2.01.0021 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.216.571.220,00 | 1.118.134.000,00 | (98.437.220,00) | 91,91% | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08.2.01.0021 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 87.790.500,00 | 87.057.910,00 | (732.590,00) | 99,17% | |
| *1.03* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.03.08.2.01.0023* | | *Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | *120.000.000,00* | *117.845.900,00* | *(2.154.100,00)* | *98,20%* | |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08.2.01.0023 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 117.845.900,00 | (2.154.100,00) | 98,20% | |
| *1.04* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN* | *11.857.675.962,00* | *11.694.730.752,88* | *(162.945.209,12)* | *98,63%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | | | *DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN* | *11.857.675.962,00* | *11.694.730.752,88* | *(162.945.209,12)* | *98,63%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *9.973.748.382,00* | *9.830.056.252,00* | *(143.692.130,00)* | *98,56%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *15.588.000,00* | *12.357.200,00* | *(3.230.800,00)* | *79,27%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *10.588.000,00* | *8.534.400,00* | *(2.053.600,00)* | *80,60%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.588.000,00 | 8.534.400,00 | (2.053.600,00) | 80,60% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *5.000.000,00* | *3.822.800,00* | *(1.177.200,00)* | *76,46%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 3.822.800,00 | (1.177.200,00) | 76,46% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *3.350.956.768,00* | *3.245.321.723,00* | *(105.635.045,00)* | *96,85%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *3.281.179.468,00* | *3.176.531.623,00* | *(104.647.845,00)* | *96,81%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.281.179.468,00 | 3.176.531.623,00 | (104.647.845,00) | 96,81% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *53.935.200,00* | *53.935.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 53.935.200,00 | 53.935.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *15.842.100,00* | *14.854.900,00* | *(987.200,00)* | *93,77%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.842.100,00 | 14.854.900,00 | (987.200,00) | 93,77% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *244.165.575,00* | *234.983.172,00* | *(9.182.403,00)* | *96,24%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *13.708.600,00* | *13.675.000,00* | *(33.600,00)* | *99,75%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.708.600,00 | 13.675.000,00 | (33.600,00) | 99,75% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *40.546.375,00* | *33.423.500,00* | *(7.122.875,00)* | *82,43%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.546.375,00 | 33.423.500,00 | (7.122.875,00) | 82,43% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *22.700.000,00* | *22.660.000,00* | *(40.000,00)* | *99,82%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.700.000,00 | 22.660.000,00 | (40.000,00) | 99,82% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *28.152.600,00* | *27.739.800,00* | *(412.800,00)* | *98,53%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.152.600,00 | 27.739.800,00 | (412.800,00) | 98,53% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *139.058.000,00* | *137.484.872,00* | *(1.573.128,00)* | *98,87%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.058.000,00 | 137.484.872,00 | (1.573.128,00) | 98,87% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *6.330.564.639,00* | *6.308.806.347,00* | *(21.758.292,00)* | *99,66%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *4.950.000,00* | *4.950.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *6.246.760.647,00* | *6.243.856.347,00* | *(2.904.300,00)* | *99,95%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.246.760.647,00 | 6.243.856.347,00 | (2.904.300,00) | 99,95% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *78.853.992,00* | *60.000.000,00* | *(18.853.992,00)* | *76,09%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.853.992,00 | 60.000.000,00 | (18.853.992,00) | 76,09% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *32.473.400,00* | *28.587.810,00* | *(3.885.590,00)* | *88,03%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *32.473.400,00* | *28.587.810,00* | *(3.885.590,00)* | *88,03%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.473.400,00 | 28.587.810,00 | (3.885.590,00) | 88,03% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.02* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN* | *125.070.000,00* | *118.458.000,00* | *(6.612.000,00)* | *94,71%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.02.2.01* | | *Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | *35.070.000,00* | *33.208.000,00* | *(1.862.000,00)* | *94,69%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.02.2.01.0004* | | *Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana* | *35.070.000,00* | *33.208.000,00* | *(1.862.000,00)* | *94,69%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.070.000,00 | 33.208.000,00 | (1.862.000,00) | 94,69% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.02.2.03* | | *Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | *90.000.000,00* | *85.250.000,00* | *(4.750.000,00)* | *94,72%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.02.2.03.0001* | | *Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana* | *90.000.000,00* | *85.250.000,00* | *(4.750.000,00)* | *94,72%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02.2.03.0001 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 90.000.000,00 | 85.250.000,00 | (4.750.000,00) | 94,72% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.03* | | *PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN* | *64.955.000,00* | *62.113.300,00* | *(2.841.700,00)* | *95,63%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.03.2.03* | | *Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* | *64.955.000,00* | *62.113.300,00* | *(2.841.700,00)* | *95,63%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.03.2.03.0003* | | *Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU* | *64.955.000,00* | *62.113.300,00* | *(2.841.700,00)* | *95,63%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.03.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.955.000,00 | 62.113.300,00 | (2.841.700,00) | 95,63% | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.05* | | *PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)* | *1.693.902.580,00* | *1.684.103.200,88* | *(9.799.379,12)* | *99,42%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.05.2.01* | | *Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan* | *1.693.902.580,00* | *1.684.103.200,88* | *(9.799.379,12)* | *99,42%* | |
| *1.04* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *1.04.05.2.01.0002* | | *Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian* | *1.693.902.580,00* | *1.684.103.200,88* | *(9.799.379,12)* | *99,42%* | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.05.2.01.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 26.100.000,00 | 26.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.05.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.802.580,00 | 81.053.200,00 | (6.749.380,00) | 92,31% | |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.05.2.01.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.580.000.000,00 | 1.576.950.000,88 | (3.049.999,12) | 99,81% | |
| *2* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *209.761.810,00* | *194.440.500,00* | *(15.321.310,00)* | *92,70%* | |
| *2.10* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN* | *209.761.810,00* | *194.440.500,00* | *(15.321.310,00)* | *92,70%* | |
| *2.10* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | | | *DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN* | *209.761.810,00* | *194.440.500,00* | *(15.321.310,00)* | *92,70%* | |
| *2.10* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *2.10.10* | | *PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH* | *209.761.810,00* | *194.440.500,00* | *(15.321.310,00)* | *92,70%* | |
| *2.10* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *2.10.10.2.01* | | *Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota* | *209.761.810,00* | *194.440.500,00* | *(15.321.310,00)* | *92,70%* | |
| *2.10* | *1.04.2.10.1.03.01.0000* | *2.10.10.2.01.0003* | | *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota* | *209.761.810,00* | *194.440.500,00* | *(15.321.310,00)* | *92,70%* | |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 2.10.10.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.761.750,00 | 30.440.500,00 | (15.321.250,00) | 66,52% | |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 2.10.10.2.01.0003 | 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | (60,00) | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.05* | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *1.05* | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 16.693.310.712,00 | 16.340.153.958,00 | (353.156.754,00) | 97,88% | |
| *1.05* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT* | *16.693.310.712,00* | *16.340.153.958,00* | *(353.156.754,00)* | *97,88%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | | | *SATUAN POLISI PAMONG PRAJA* | *16.693.310.712,00* | *16.340.153.958,00* | *(353.156.754,00)* | *97,88%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *9.707.867.562,00* | *9.370.713.158,00* | *(337.154.404,00)* | *96,53%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *39.492.900,00* | *39.492.900,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *2.000.900,00* | *2.000.900,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.900,00 | 2.000.900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.500.000,00* | *2.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *30.992.000,00* | *30.992.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.992.000,00 | 30.992.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *5.412.974.156,00* | *5.114.768.741,00* | *(298.205.415,00)* | *94,49%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *5.360.234.956,00* | *5.062.029.541,00* | *(298.205.415,00)* | *94,44%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.360.234.956,00 | 5.062.029.541,00 | (298.205.415,00) | 94,44% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *50.239.200,00* | *50.239.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.239.200,00 | 50.239.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.500.000,00* | *2.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.05* | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *200.000.000,00* | *196.144.000,00* | *(3.856.000,00)* | *98,07%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.05.0002* | | *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya* | *200.000.000,00* | *196.144.000,00* | *(3.856.000,00)* | *98,07%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.05.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 196.144.000,00 | (3.856.000,00) | 98,07% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *82.343.550,00* | *78.737.427,00* | *(3.606.123,00)* | *95,62%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *3.000.000,00* | *2.894.700,00* | *(105.300,00)* | *96,49%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.894.700,00 | (105.300,00) | 96,49% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *11.162.950,00* | *9.641.300,00* | *(1.521.650,00)* | *86,37%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.162.950,00 | 9.641.300,00 | (1.521.650,00) | 86,37% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *3.085.000,00* | *3.085.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.581.000,00 | 2.581.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0003 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 504.000,00 | 504.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *1.765.600,00* | *1.765.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.765.600,00 | 1.765.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *63.330.000,00* | *61.350.827,00* | *(1.979.173,00)* | *96,87%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.330.000,00 | 61.350.827,00 | (1.979.173,00) | 96,87% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *3.802.106.356,00* | *3.774.325.084,00* | *(27.781.272,00)* | *99,27%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.330.000,00* | *1.330.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *27.000.000,00* | *14.947.481,00* | *(12.052.519,00)* | *55,36%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.000.000,00 | 14.947.481,00 | (12.052.519,00) | 55,36% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *3.773.776.356,00* | *3.758.047.603,00* | *(15.728.753,00)* | *99,58%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.773.776.356,00 | 3.758.047.603,00 | (15.728.753,00) | 99,58% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *170.950.600,00* | *167.245.006,00* | *(3.705.594,00)* | *97,83%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *170.950.600,00* | *167.245.006,00* | *(3.705.594,00)* | *97,83%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.950.600,00 | 167.245.006,00 | (3.705.594,00) | 97,83% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02* | | *PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *6.775.443.150,00* | *6.759.440.800,00* | *(16.002.350,00)* | *99,76%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02.2.01* | | *Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | *6.500.119.150,00* | *6.493.019.350,00* | *(7.099.800,00)* | *99,89%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02.2.01.0015* | | *Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | *6.500.119.150,00* | *6.493.019.350,00* | *(7.099.800,00)* | *99,89%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.01.0015 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.119.150,00 | 1.493.019.350,00 | (7.099.800,00) | 99,53% | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.01.0015 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02.2.02* | | *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota* | *275.324.000,00* | *266.421.450,00* | *(8.902.550,00)* | *96,77%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02.2.02.0010* | | *Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | *60.000.000,00* | *59.414.800,00* | *(585.200,00)* | *99,02%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 59.414.800,00 | (585.200,00) | 99,02% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02.2.02.0011* | | *Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah* | *165.324.000,00* | *158.381.500,00* | *(6.942.500,00)* | *95,80%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 165.324.000,00 | 158.381.500,00 | (6.942.500,00) | 95,80% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.02.2.02.0012* | | *Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | *50.000.000,00* | *48.625.150,00* | *(1.374.850,00)* | *97,25%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 48.625.150,00 | (1.374.850,00) | 97,25% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.04* | | *PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN* | *210.000.000,00* | *210.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.04.2.01* | | *Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *210.000.000,00* | *210.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.01.0000* | *1.05.04.2.01.0002* | | *Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *210.000.000,00* | *210.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.04.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIES TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *1.05* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.543.899.998,00* | *3.337.297.876,00* | *(206.602.122,00)* | *94,17%* | |
| *1.05* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT* | *3.543.899.998,00* | *3.337.297.876,00* | *(206.602.122,00)* | *94,17%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | | | *BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH* | *3.543.899.998,00* | *3.337.297.876,00* | *(206.602.122,00)* | *94,17%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.302.807.998,00* | *3.103.492.826,00* | *(199.315.172,00)* | *93,97%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *29.479.325,00* | *28.738.600,00* | *(740.725,00)* | *97,49%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *4.772.050,00* | *4.572.100,00* | *(199.950,00)* | *95,81%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.772.050,00 | 4.572.100,00 | (199.950,00) | 95,81% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.246.475,00* | *4.132.500,00* | *(113.975,00)* | *97,32%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.246.475,00 | 4.132.500,00 | (113.975,00) | 97,32% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *20.460.800,00* | *20.034.000,00* | *(426.800,00)* | *97,91%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.460.800,00 | 20.034.000,00 | (426.800,00) | 97,91% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.617.242.092,00* | *2.437.373.126,00* | *(179.868.966,00)* | *93,13%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.571.394.892,00* | *2.391.653.526,00* | *(179.741.366,00)* | *93,01%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.571.394.892,00 | 2.391.653.526,00 | (179.741.366,00) | 93,01% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *41.347.200,00* | *41.347.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 41.347.200,00 | 41.347.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.500.000,00* | *4.372.400,00* | *(127.600,00)* | *97,16%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | 4.372.400,00 | (127.600,00) | 97,16% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *205.747.000,00* | *202.929.800,00* | *(2.817.200,00)* | *98,63%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *9.601.500,00* | *9.540.400,00* | *(61.100,00)* | *99,36%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.601.500,00 | 9.540.400,00 | (61.100,00) | 99,36% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *14.999.300,00* | *12.971.100,00* | *(2.028.200,00)* | *86,48%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.999.300,00 | 12.971.100,00 | (2.028.200,00) | 86,48% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *5.235.000,00* | *4.980.400,00* | *(254.600,00)* | *95,14%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.235.000,00 | 4.980.400,00 | (254.600,00) | 95,14% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *16.631.200,00* | *16.589.000,00* | *(42.200,00)* | *99,75%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.631.200,00 | 16.589.000,00 | (42.200,00) | 99,75% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *16.989.000,00* | *16.940.000,00* | *(49.000,00)* | *99,71%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.989.000,00 | 16.940.000,00 | (49.000,00) | 99,71% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *142.291.000,00* | *141.908.900,00* | *(382.100,00)* | *99,73%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.291.000,00 | 141.908.900,00 | (382.100,00) | 99,73% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *251.818.056,00* | *241.545.535,00* | *(10.272.521,00)* | *95,92%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *32.199.000,00* | *22.142.225,00* | *(10.056.775,00)* | *68,77%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.199.000,00 | 22.142.225,00 | (10.056.775,00) | 68,77% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *218.419.056,00* | *218.203.310,00* | *(215.746,00)* | *99,90%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 218.419.056,00 | 218.203.310,00 | (215.746,00) | 99,90% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *198.521.525,00* | *192.905.765,00* | *(5.615.760,00)* | *97,17%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *162.227.100,00* | *157.041.165,00* | *(5.185.935,00)* | *96,80%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 162.227.100,00 | 157.041.165,00 | (5.185.935,00) | 96,80% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *21.200.725,00* | *21.120.900,00* | *(79.825,00)* | *99,62%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.200.725,00 | 21.120.900,00 | (79.825,00) | 99,62% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.01.2.09.0011* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *15.093.700,00* | *14.743.700,00* | *(350.000,00)* | *97,68%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.093.700,00 | 14.743.700,00 | (350.000,00) | 97,68% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03* | | *PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA* | *241.092.000,00* | *233.805.050,00* | *(7.286.950,00)* | *96,98%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.02* | | *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | *75.000.000,00* | *73.272.300,00* | *(1.727.700,00)* | *97,70%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.02.0006* | | *Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan* | *75.000.000,00* | *73.272.300,00* | *(1.727.700,00)* | *97,70%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.02.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000,00 | 73.272.300,00 | (1.727.700,00) | 97,70% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.03* | | *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | *143.692.000,00* | *138.538.200,00* | *(5.153.800,00)* | *96,41%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.03.0002* | | *Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota* | *82.000.000,00* | *80.217.200,00* | *(1.782.800,00)* | *97,83%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.000.000,00 | 80.217.200,00 | (1.782.800,00) | 97,83% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.03.0003* | | *Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota* | *4.000.000,00* | *629.000,00* | *(3.371.000,00)* | *15,73%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 629.000,00 | (3.371.000,00) | 15,73% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.03.0009* | | *Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota* | *57.692.000,00* | *57.692.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.346.000,00 | 51.346.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0009 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.346.000,00 | 6.346.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.04* | | *Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | *22.400.000,00* | *21.994.550,00* | *(405.450,00)* | *98,19%* | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.04.0002* | | *Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota* | *20.000.000,00* | *19.815.150,00* | *(184.850,00)* | *99,08%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.04.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.815.150,00 | (184.850,00) | 99,08% | |
| *1.05* | *1.05.0.00.0.00.04.0000* | *1.05.03.2.04.0004* | | *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan* | *2.400.000,00* | *2.179.400,00* | *(220.600,00)* | *90,81%* | |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.04.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.179.400,00 | (220.600,00) | 90,81% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : DINAS SOSIAL

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.076.417.235,00* | *2.812.247.731,00* | *(264.169.504,00)* | *91,41%* | |
| *1.06* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL* | *3.076.417.235,00* | *2.812.247.731,00* | *(264.169.504,00)* | *91,41%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS SOSIAL* | *3.076.417.235,00* | *2.812.247.731,00* | *(264.169.504,00)* | *91,41%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.721.475.135,00* | *2.516.711.461,00* | *(204.763.674,00)* | *92,48%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *30.999.700,00* | *30.161.300,00* | *(838.400,00)* | *97,30%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *5.999.800,00* | *5.790.100,00* | *(209.700,00)* | *96,50%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.999.800,00 | 5.790.100,00 | (209.700,00) | 96,50% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.999.900,00* | *4.473.200,00* | *(526.700,00)* | *89,47%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.900,00 | 4.473.200,00 | (526.700,00) | 89,47% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *20.000.000,00* | *19.898.000,00* | *(102.000,00)* | *99,49%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.898.000,00 | (102.000,00) | 99,49% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.246.782.119,00* | *2.059.499.730,00* | *(187.282.389,00)* | *91,66%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.202.190.869,00* | *2.015.806.330,00* | *(186.384.539,00)* | *91,54%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.202.190.869,00 | 2.015.806.330,00 | (186.384.539,00) | 91,54% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *39.591.600,00* | *39.591.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 39.591.600,00 | 39.591.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.999.650,00* | *4.101.800,00* | *(897.850,00)* | *82,04%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.650,00 | 4.101.800,00 | (897.850,00) | 82,04% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *211.964.300,00* | *207.485.797,00* | *(4.478.503,00)* | *97,89%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *4.991.800,00* | *4.991.000,00* | *(800,00)* | *99,98%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.991.800,00 | 4.991.000,00 | (800,00) | 99,98% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *24.984.500,00* | *21.325.500,00* | *(3.659.000,00)* | *85,35%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.984.500,00 | 21.325.500,00 | (3.659.000,00) | 85,35% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *30.000.000,00* | *29.921.000,00* | *(79.000,00)* | *99,74%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 29.921.000,00 | (79.000,00) | 99,74% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *20.000.000,00* | *19.999.800,00* | *(200,00)* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.999.800,00 | (200,00) | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06.0008* | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *9.999.000,00* | *9.999.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *121.989.000,00* | *121.249.497,00* | *(739.503,00)* | *99,39%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.989.000,00 | 121.249.497,00 | (739.503,00) | 99,39% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *18.986.100,00* | *18.986.000,00* | *(100,00)* | *100,00%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.07.0010* | | *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *18.986.100,00* | *18.986.000,00* | *(100,00)* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.07.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.260.100,00 | 4.260.000,00 | (100,00) | 100,00% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.07.0010 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.726.000,00 | 14.726.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *171.159.216,00* | *162.580.823,00* | *(8.578.393,00)* | *94,99%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *31.748.100,00* | *23.750.075,00* | *(7.998.025,00)* | *74,81%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.748.100,00 | 23.750.075,00 | (7.998.025,00) | 74,81% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *139.411.116,00* | *138.830.748,00* | *(580.368,00)* | *99,58%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.411.116,00 | 138.830.748,00 | (580.368,00) | 99,58% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *41.583.700,00* | *37.997.811,00* | *(3.585.889,00)* | *91,38%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *36.541.700,00* | *32.997.811,00* | *(3.543.889,00)* | *90,30%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.541.700,00 | 32.997.811,00 | (3.543.889,00) | 90,30% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *5.042.000,00* | *5.000.000,00* | *(42.000,00)* | *99,17%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.042.000,00 | 5.000.000,00 | (42.000,00) | 99,17% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.02* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL* | *42.544.000,00* | *42.413.800,00* | *(130.200,00)* | *99,69%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.02.2.03* | | *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota* | *42.544.000,00* | *42.413.800,00* | *(130.200,00)* | *99,69%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.02.2.03.0002* | | *Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota* | *24.994.000,00* | *24.993.800,00* | *(200,00)* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.994.000,00 | 4.993.800,00 | (200,00) | 100,00% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03.0002 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.02.2.03.0004* | | *Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | *17.550.000,00* | *17.420.000,00* | *(130.000,00)* | *99,26%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.550.000,00 | 7.420.000,00 | (130.000,00) | 98,28% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03.0004 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04* | | *PROGRAM REHABILITASI SOSIAL* | *169.276.000,00* | *112.805.770,00* | *(56.470.230,00)* | *66,64%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01* | | *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* | *110.991.000,00* | *71.634.400,00* | *(39.356.600,00)* | *64,54%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0001* | | *Penyediaan Permakanan* | *2.950.000,00* | *2.940.000,00* | *(10.000,00)* | *99,66%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | 1.440.000,00 | (10.000,00) | 99,31% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0001 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0002* | | *Penyediaan Sandang* | *24.410.000,00* | *3.000.000,00* | *(21.410.000,00)* | *12,29%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.410.000,00 | 0,00 | (9.410.000,00) | 0,00% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0002 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | (12.000.000,00) | 20,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0003* | | *Penyediaan Alat Bantu* | *23.850.000,00* | *19.190.000,00* | *(4.660.000,00)* | *80,46%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.850.000,00 | 940.000,00 | (2.910.000,00) | 24,42% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0003 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 20.000.000,00 | 18.250.000,00 | (1.750.000,00) | 91,25% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0004* | | *Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga* | *3.120.000,00* | *1.400.000,00* | *(1.720.000,00)* | *44,87%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.120.000,00 | 1.400.000,00 | (1.720.000,00) | 44,87% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0005* | | *Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial* | *24.035.650,00* | *20.118.900,00* | *(3.916.750,00)* | *83,70%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.835.650,00 | 4.218.900,00 | (3.616.750,00) | 53,84% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0005 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 16.200.000,00 | 15.900.000,00 | (300.000,00) | 98,15% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0006* | | *Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat* | *20.365.350,00* | *19.795.500,00* | *(569.850,00)* | *97,20%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.865.350,00 | 6.295.500,00 | (569.850,00) | 91,70% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0006 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0008* | | *Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar* | *2.940.000,00* | *2.360.000,00* | *(580.000,00)* | *80,27%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.940.000,00 | 2.360.000,00 | (580.000,00) | 80,27% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0011* | | *Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga* | *4.760.000,00* | *2.830.000,00* | *(1.930.000,00)* | *59,45%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.760.000,00 | 2.830.000,00 | (1.930.000,00) | 59,45% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.01.0012* | | *Pemberian Layanan Rujukan* | *4.560.000,00* | *0,00* | *(4.560.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.560.000,00 | 0,00 | (4.560.000,00) | 0,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02* | | *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial* | *58.285.000,00* | *41.171.370,00* | *(17.113.630,00)* | *70,64%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0002* | | *Pemberian Layanan Kedaruratan* | *4.200.000,00* | *360.000,00* | *(3.840.000,00)* | *8,57%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | 360.000,00 | (3.840.000,00) | 8,57% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0003* | | *Penyediaan Permakanan* | *3.985.000,00* | *3.955.000,00* | *(30.000,00)* | *99,25%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.985.000,00 | 1.955.000,00 | (30.000,00) | 98,49% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0003 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0004* | | *Penyediaan Sandang* | *8.640.000,00* | *8.605.000,00* | *(35.000,00)* | *99,59%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.640.000,00 | 2.605.000,00 | (35.000,00) | 98,67% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0004 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0005* | | *Penyediaan Alat Bantu* | *13.960.000,00* | *11.020.000,00* | *(2.940.000,00)* | *78,94%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.960.000,00 | 1.270.000,00 | (2.690.000,00) | 32,07% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0005 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 10.000.000,00 | 9.750.000,00 | (250.000,00) | 97,50% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0010* | | *Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar* | *3.920.000,00* | *2.000.000,00* | *(1.920.000,00)* | *51,02%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.920.000,00 | 2.000.000,00 | (1.920.000,00) | 51,02% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0011* | | *Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga* | *4.200.000,00* | *880.000,00* | *(3.320.000,00)* | *20,95%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | 880.000,00 | (3.320.000,00) | 20,95% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0012* | | *Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga* | *3.200.000,00* | *0,00* | *(3.200.000,00)* | *0,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | 0,00 | (3.200.000,00) | 0,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.04.2.02.0013* | | *Pemberian Layanan Rujukan* | *16.180.000,00* | *14.351.370,00* | *(1.828.630,00)* | *88,70%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.180.000,00 | 14.351.370,00 | (1.828.630,00) | 88,70% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.05* | | *PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL* | *58.944.700,00* | *58.244.700,00* | *(700.000,00)* | *98,81%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.05.2.01* | | *Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar* | *1.000.000,00* | *700.000,00* | *(300.000,00)* | *70,00%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.05.2.01.0001* | | *Penjangkauan Anak-Anak Terlantar* | *1.000.000,00* | *700.000,00* | *(300.000,00)* | *70,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 200.000,00 | (300.000,00) | 40,00% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.01.0001 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.05.2.02* | | *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | *57.944.700,00* | *57.544.700,00* | *(400.000,00)* | *99,31%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.05.2.02.0002* | | *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | *15.000.000,00* | *14.600.000,00* | *(400.000,00)* | *97,33%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.600.000,00 | (400.000,00) | 97,33% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.05.2.02.0003* | | *Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga* | *42.944.700,00* | *42.944.700,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.02.0003 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 42.944.700,00 | 42.944.700,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.06* | | *PROGRAM PENANGANAN BENCANA* | *56.000.000,00* | *54.010.000,00* | *(1.990.000,00)* | *96,45%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.06.2.01* | | *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota* | *44.000.000,00* | *42.185.500,00* | *(1.814.500,00)* | *95,88%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.06.2.01.0001* | | *Penyediaan Makanan* | *44.000.000,00* | *42.185.500,00* | *(1.814.500,00)* | *95,88%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | 12.285.500,00 | (1.714.500,00) | 87,75% | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.01.0001 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 30.000.000,00 | 29.900.000,00 | (100.000,00) | 99,67% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.06.2.02* | | *Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota* | *12.000.000,00* | *11.824.500,00* | *(175.500,00)* | *98,54%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.06.2.02.0002* | | *Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana* | *12.000.000,00* | *11.824.500,00* | *(175.500,00)* | *98,54%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.824.500,00 | (175.500,00) | 98,54% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.07* | | *PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN* | *28.177.400,00* | *28.062.000,00* | *(115.400,00)* | *99,59%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.07.2.01* | | *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | *28.177.400,00* | *28.062.000,00* | *(115.400,00)* | *99,59%* | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.07.2.01.0001* | | *Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | *22.177.400,00* | *22.062.000,00* | *(115.400,00)* | *99,48%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.07.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.177.400,00 | 22.062.000,00 | (115.400,00) | 99,48% | |
| *1.06* | *1.06.0.00.0.00.01.0000* | *1.06.07.2.01.0002* | | *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.07.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TANIAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : DINAS KETENAGAKERJAAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 160.000.000,00 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,87 | |
| | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 160.000.000,00 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,87 | |
| | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 160.000.000,00 | 94.204.260,00 | (65.795.740,00) | 58,87 | |
| *2.07* | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.07* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.472.593.537,00* | *2.518.590.398,00* | *(954.003.139,00)* | *72,53%* | |
| *2.07* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA* | *3.472.593.537,00* | *2.518.590.398,00* | *(954.003.139,00)* | *72,53%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | | | *DINAS KETENAGAKERJAAN* | *3.472.593.537,00* | *2.518.590.398,00* | *(954.003.139,00)* | *72,53%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.980.894.187,00* | *2.235.460.051,00* | *(745.434.136,00)* | *74,99%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *6.420.900,00* | *5.768.100,00* | *(652.800,00)* | *89,83%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *4.420.900,00* | *4.004.450,00* | *(416.450,00)* | *90,58%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.420.900,00 | 4.004.450,00 | (416.450,00) | 90,58% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.000.000,00* | *1.763.650,00* | *(236.350,00)* | *88,18%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.763.650,00 | (236.350,00) | 88,18% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.633.863.887,00* | *1.906.497.053,00* | *(727.366.834,00)* | *72,38%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.589.432.487,00* | *1.862.595.403,00* | *(726.837.084,00)* | *71,93%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.589.432.487,00 | 1.862.595.403,00 | (726.837.084,00) | 71,93% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *42.431.200,00* | *42.049.400,00* | *(381.800,00)* | *99,10%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 41.347.200,00 | 41.347.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.084.000,00 | 702.200,00 | (381.800,00) | 64,78% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.000.200,00* | *1.852.250,00* | *(147.950,00)* | *92,60%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.200,00 | 1.852.250,00 | (147.950,00) | 92,60% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *142.767.000,00* | *138.906.832,00* | *(3.860.168,00)* | *97,30%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.529.100,00* | *2.509.000,00* | *(20.100,00)* | *99,21%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.529.100,00 | 2.509.000,00 | (20.100,00) | 99,21% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *23.529.700,00* | *19.760.900,00* | *(3.768.800,00)* | *83,98%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.529.700,00 | 19.760.900,00 | (3.768.800,00) | 83,98% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *4.808.000,00* | *4.750.000,00* | *(58.000,00)* | *98,79%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.808.000,00 | 4.750.000,00 | (58.000,00) | 98,79% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *16.242.200,00* | *16.242.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.242.200,00 | 16.242.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *95.658.000,00* | *95.644.732,00* | *(13.268,00)* | *99,99%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.658.000,00 | 95.644.732,00 | (13.268,00) | 99,99% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *157.643.600,00* | *150.409.666,00* | *(7.233.934,00)* | *95,41%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *495.000,00* | *(5.000,00)* | *99,00%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 495.000,00 | (5.000,00) | 99,00% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *48.150.000,00* | *40.921.066,00* | *(7.228.934,00)* | *84,99%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.150.000,00 | 40.921.066,00 | (7.228.934,00) | 84,99% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *108.993.600,00* | *108.993.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.993.600,00 | 108.993.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *40.198.800,00* | *33.878.400,00* | *(6.320.400,00)* | *84,28%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *35.317.300,00* | *29.378.400,00* | *(5.938.900,00)* | *83,18%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.317.300,00 | 29.378.400,00 | (5.938.900,00) | 83,18% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *4.881.500,00* | *4.500.000,00* | *(381.500,00)* | *92,18%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.881.500,00 | 4.500.000,00 | (381.500,00) | 92,18% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.03* | | *PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA* | *169.999.800,00* | *168.499.100,00* | *(1.500.700,00)* | *99,12%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.03.2.01* | | *Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi* | *148.844.800,00* | *148.025.800,00* | *(819.000,00)* | *99,45%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.03.2.01.0001* | | *Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi* | *148.844.800,00* | *148.025.800,00* | *(819.000,00)* | *99,45%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 148.844.800,00 | 148.025.800,00 | (819.000,00) | 99,45% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.03.2.02* | | *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta* | *21.155.000,00* | *20.473.300,00* | *(681.700,00)* | *96,78%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.03.2.02.0001* | | *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta* | *21.155.000,00* | *20.473.300,00* | *(681.700,00)* | *96,78%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.155.000,00 | 20.473.300,00 | (681.700,00) | 96,78% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.04* | | *PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA* | *40.000.000,00* | *38.222.937,00* | *(1.777.063,00)* | *95,56%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.04.2.01* | | *Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota* | *40.000.000,00* | *38.222.937,00* | *(1.777.063,00)* | *95,56%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.04.2.01.0002* | | *Pelayanan antar Kerja* | *20.000.000,00* | *19.335.468,00* | *(664.532,00)* | *96,68%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.04.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.335.468,00 | (664.532,00) | 96,68% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.04.2.01.0005* | | *Perluasan Kesempatan Kerja* | *20.000.000,00* | *18.887.469,00* | *(1.112.531,00)* | *94,44%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.04.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 18.887.469,00 | (1.112.531,00) | 94,44% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.05* | | *PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL* | *281.699.550,00* | *76.408.310,00* | *(205.291.240,00)* | *27,12%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.05.2.01* | | *Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | *35.649.625,00* | *35.400.700,00* | *(248.925,00)* | *99,30%* | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.05.2.01.0001* | | *Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan* | *35.649.625,00* | *35.400.700,00* | *(248.925,00)* | *99,30%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.649.625,00 | 35.400.700,00 | (248.925,00) | 99,30% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.05.2.02* | | *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota* | *246.049.925,00* | *41.007.610,00* | *(205.042.315,00)* | *16,67%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.05.2.02.0001* | | *Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | *24.449.925,00* | *23.541.810,00* | *(908.115,00)* | *96,29%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.449.925,00 | 23.541.810,00 | (908.115,00) | 96,29% | |
| *2.07* | *2.07.3.32.0.00.01.0000* | *2.07.05.2.02.0005* | | *Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | *221.600.000,00* | *17.465.800,00* | *(204.134.200,00)* | *7,88%* | |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.600.000,00 | 17.465.800,00 | (204.134.200,00) | 7,88% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 60.000.000,00 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,08 | |
| | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 60.000.000,00 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,08 | |
| | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 60.000.000,00 | 42.053.000,00 | (17.947.000,00) | 70,08 | |
| 2.09 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.0* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN* | *4.963.707.513,00* | *4.676.360.331,00* | *(287.347.182,00)* | *94,21%* | |
| *2.0* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN* | *4.963.707.513,00* | *4.676.360.331,00* | *(287.347.182,00)* | *94,21%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | | | *DINAS KETAHANAN PANGAN* | *4.963.707.513,00* | *4.676.360.331,00* | *(287.347.182,00)* | *94,21%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH* | *4.583.707.513,00* | *4.301.979.831,00* | *(281.727.682,00)* | *93,85%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat* | *18.708.000,00* | *15.960.000,00* | *(2.748.000,00)* | *85,31%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *1.908.000,00* | *1.730.000,00* | *(178.000,00)* | *90,67%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.908.000,00 | 1.730.000,00 | (178.000,00) | 90,67% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *1.700.000,00* | *1.557.800,00* | *(142.200,00)* | *91,64%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.557.800,00 | (142.200,00) | 91,64% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01.0003* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | *1.700.000,00* | *1.557.800,00* | *(142.200,00)* | *91,64%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.557.800,00 | (142.200,00) | 91,64% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *1.720.000,00* | *1.511.900,00* | *(208.100,00)* | *87,90%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.720.000,00 | 1.511.900,00 | (208.100,00) | 87,90% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan* | *1.480.000,00* | *1.373.000,00* | *(107.000,00)* | *92,77%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.480.000,00 | 1.373.000,00 | (107.000,00) | 92,77% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *10.200.000,00* | *8.229.500,00* | *(1.970.500,00)* | *80,68%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.200.000,00 | 8.229.500,00 | (1.970.500,00) | 80,68% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *3.834.696.037,00* | *3.649.633.340,00* | *(185.062.697,00)* | *95,17%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *3.775.001.437,00* | *3.590.073.440,00* | *(184.927.997,00)* | *95,10%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.775.001.437,00 | 3.590.073.440,00 | (184.927.997,00) | 95,10% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi* | *56.605.200,00* | *56.605.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 56.605.200,00 | 56.605.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun* | *3.089.400,00* | *2.954.700,00* | *(134.700,00)* | *95,64%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.089.400,00 | 2.954.700,00 | (134.700,00) | 95,64% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *70.732.600,00* | *67.093.600,00* | *(3.639.000,00)* | *94,86%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan* | *1.848.700,00* | *1.836.000,00* | *(12.700,00)* | *99,31%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.848.700,00 | 1.836.000,00 | (12.700,00) | 99,31% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *11.336.900,00* | *9.516.600,00* | *(1.820.300,00)* | *83,94%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.336.900,00 | 9.516.600,00 | (1.820.300,00) | 83,94% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *4.000.000,00* | *4.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *7.432.000,00* | *7.432.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.432.000,00 | 7.432.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *46.115.000,00* | *44.309.000,00* | *(1.806.000,00)* | *96,08%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.115.000,00 | 44.309.000,00 | (1.806.000,00) | 96,08% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *543.942.876,00* | *455.825.967,00* | *(88.116.909,00)* | *83,80%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *400.000,00* | *400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *35.300.000,00* | *22.314.313,00* | *(12.985.687,00)* | *63,21%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.300.000,00 | 22.314.313,00 | (12.985.687,00) | 63,21% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *508.242.876,00* | *433.111.654,00* | *(75.131.222,00)* | *85,22%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 508.242.876,00 | 433.111.654,00 | (75.131.222,00) | 85,22% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan* | *115.628.000,00* | *113.466.924,00* | *(2.161.076,00)* | *98,13%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan* | *110.628.000,00* | *108.484.424,00* | *(2.143.576,00)* | *98,06%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.628.000,00 | 108.484.424,00 | (2.143.576,00) | 98,06% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung* | *3.000.000,00* | *2.982.500,00* | *(17.500,00)* | *99,42%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.982.500,00 | (17.500,00) | 99,42% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03* | | *PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN* | *320.000.000,00* | *314.826.700,00* | *(5.173.300,00)* | *98,38%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.01* | | *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan* | *65.000.000,00* | *63.986.100,00* | *(1.013.900,00)* | *98,44%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.01.0010* | | *Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan* | *30.000.000,00* | *29.267.600,00* | *(732.400,00)* | *97,56%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 29.267.600,00 | (732.400,00) | 97,56% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.01.0012* | | *Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan* | *15.000.000,00* | *14.834.100,00* | *(165.900,00)* | *98,89%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.834.100,00 | (165.900,00) | 98,89% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.01.0016* | | *Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)* | *20.000.000,00* | *19.884.400,00* | *(115.600,00)* | *99,42%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01.0016 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.884.400,00 | (115.600,00) | 99,42% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.02* | | *Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan* | *20.000.000,00* | *16.407.300,00* | *(3.592.700,00)* | *82,04%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.02.0003* | | *Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | *20.000.000,00* | *16.407.300,00* | *(3.592.700,00)* | *82,04%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 16.407.300,00 | (3.592.700,00) | 82,04% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.04* | | *Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan* | *235.000.000,00* | *234.433.300,00* | *(566.700,00)* | *99,76%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.04.0002* | | *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman* | *160.000.000,00* | *159.868.600,00* | *(131.400,00)* | *99,92%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.04.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.000.000,00 | 159.868.600,00 | (131.400,00) | 99,92% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.03.2.04.0003* | | *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi* | *75.000.000,00* | *74.564.700,00* | *(435.300,00)* | *99,42%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.04.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000,00 | 74.564.700,00 | (435.300,00) | 99,42% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.04* | | *PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN* | *50.000.000,00* | *49.774.400,00* | *(225.600,00)* | *99,55%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.04.2.02* | | *Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan* | *50.000.000,00* | *49.774.400,00* | *(225.600,00)* | *99,55%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.04.2.02.0002* | | *Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran* | *50.000.000,00* | *49.774.400,00* | *(225.600,00)* | *99,55%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.04.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 49.774.400,00 | (225.600,00) | 99,55% | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.05* | | *PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN* | *10.000.000,00* | *9.779.400,00* | *(220.600,00)* | *97,79%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.05.2.01* | | *Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah* | *10.000.000,00* | *9.779.400,00* | *(220.600,00)* | *97,79%* | |
| *2.0* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *2.09.05.2.01.0004* | | *Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah* | *10.000.000,00* | *9.779.400,00* | *(220.600,00)* | *97,79%* | |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.05.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.779.400,00 | (220.600,00) | 97,79% | |
| *3* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN* | *2.765.193.648,00* | *2.719.134.115,00* | *(46.059.533,00)* | *98,33%* | |
| *3.2* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN* | *795.193.648,00* | *790.877.400,00* | *(4.316.248,00)* | *99,46%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | | | *DINAS KETAHANAN PANGAN* | *795.193.648,00* | *790.877.400,00* | *(4.316.248,00)* | *99,46%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.25.04* | | *PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA* | *795.193.648,00* | *790.877.400,00* | *(4.316.248,00)* | *99,46%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.25.04.2.04* | | *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan* | *795.193.648,00* | *790.877.400,00* | *(4.316.248,00)* | *99,46%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.25.04.2.04.0003* | | *Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam* | *50.000.000,00* | *50.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.25.04.2.04.0005* | | *Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | *510.000.000,00* | *507.244.000,00* | *(2.756.000,00)* | *99,46%* | |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 510.000.000,00 | 507.244.000,00 | (2.756.000,00) | 99,46% | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.25.04.2.04.0006* | | *Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan* | *235.193.648,00* | *233.633.400,00* | *(1.560.248,00)* | *99,34%* | |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 235.193.648,00 | 233.633.400,00 | (1.560.248,00) | 99,34% | |
| *3.2* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN* | *1.970.000.000,00* | *1.928.256.715,00* | *(41.743.285,00)* | *97,88%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | | | *DINAS KETAHANAN PANGAN* | *1.970.000.000,00* | *1.928.256.715,00* | *(41.743.285,00)* | *97,88%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.02* | | *PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA* | *250.000.000,00* | *246.968.200,00* | *(3.031.800,00)* | *98,79%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.02.2.06* | | *Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang* | *250.000.000,00* | *246.968.200,00* | *(3.031.800,00)* | *98,79%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.02.2.06.0003* | | *Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah* | *250.000.000,00* | *246.968.200,00* | *(3.031.800,00)* | *98,79%* | |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.02.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000,00 | 246.968.200,00 | (3.031.800,00) | 98,79% | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.03* | | *PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA* | *1.600.000.000,00* | *1.565.977.765,00* | *(34.022.235,00)* | *97,87%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.03.2.02* | | *Pembangunan Prasarana Pertanian* | *1.600.000.000,00* | *1.565.977.765,00* | *(34.022.235,00)* | *97,87%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.03.2.02.0009* | | *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana* | *1.600.000.000,00* | *1.565.977.765,00* | *(34.022.235,00)* | *97,87%* | |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.03.2.02.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000.000,00 | 1.565.977.765,00 | (34.022.235,00) | 97,87% | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.04* | | *PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN* | *120.000.000,00* | *115.310.750,00* | *(4.689.250,00)* | *96,09%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.04.2.01* | | *Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan* | *100.000.000,00* | *97.208.850,00* | *(2.791.150,00)* | *97,21%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.04.2.01.0003* | | *Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan* | *50.000.000,00* | *48.283.800,00* | *(1.716.200,00)* | *96,57%* | |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 48.283.800,00 | (1.716.200,00) | 96,57% | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.04.2.01.0008* | | *Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam* | *50.000.000,00* | *48.925.050,00* | *(1.074.950,00)* | *97,85%* | |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 48.925.050,00 | (1.074.950,00) | 97,85% | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.04.2.03* | | *Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik* | *20.000.000,00* | *18.101.900,00* | *(1.898.100,00)* | *90,51%* | |
| *3.2* | *2.09.3.25.3.27.01.0000* | *3.27.04.2.03.0002* | | *Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | *20.000.000,00* | *18.101.900,00* | *(1.898.100,00)* | *90,51%* | |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 18.101.900,00 | (1.898.100,00) | 90,51% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 250.000.000,00 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,97 | |
| | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 250.000.000,00 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,97 | |
| | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 250.000.000,00 | 287.440.900,00 | 37.440.900,00 | 114,97 | |
| 2.11 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.11* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *9.961.346.240,00* | *9.788.028.988,24* | *(173.317.251,76)* | *98,26%* | |
| *2.11* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP* | *9.961.346.240,00* | *9.788.028.988,24* | *(173.317.251,76)* | *98,26%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS LINGKUNGAN HIDUP* | *9.961.346.240,00* | *9.788.028.988,24* | *(173.317.251,76)* | *98,26%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *7.237.755.765,00* | *7.103.287.563,00* | *(134.468.202,00)* | *98,14%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *44.815.200,00* | *42.918.700,00* | *(1.896.500,00)* | *95,77%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *8.354.600,00* | *7.377.900,00* | *(976.700,00)* | *88,31%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.354.600,00 | 7.377.900,00 | (976.700,00) | 88,31% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *3.969.600,00* | *3.576.800,00* | *(392.800,00)* | *90,10%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.969.600,00 | 3.576.800,00 | (392.800,00) | 90,10% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *32.491.000,00* | *31.964.000,00* | *(527.000,00)* | *98,38%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.491.000,00 | 31.964.000,00 | (527.000,00) | 98,38% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.751.608.728,00* | *2.661.635.608,00* | *(89.973.120,00)* | *96,73%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.669.759.428,00* | *2.597.950.208,00* | *(71.809.220,00)* | *97,31%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.669.759.428,00 | 2.597.950.208,00 | (71.809.220,00) | 97,31% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *76.849.200,00* | *59.479.200,00* | *(17.370.000,00)* | *77,40%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 76.849.200,00 | 59.479.200,00 | (17.370.000,00) | 77,40% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.000.100,00* | *4.206.200,00* | *(793.900,00)* | *84,12%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.100,00 | 4.206.200,00 | (793.900,00) | 84,12% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.05* | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *61.875.000,00* | *61.750.000,00* | *(125.000,00)* | *99,80%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.05.0002* | | *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya* | *61.875.000,00* | *61.750.000,00* | *(125.000,00)* | *99,80%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.05.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.875.000,00 | 61.750.000,00 | (125.000,00) | 99,80% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *264.289.550,00* | *250.147.538,00* | *(14.142.012,00)* | *94,65%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *4.980.600,00* | *4.956.200,00* | *(24.400,00)* | *99,51%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.980.600,00 | 4.956.200,00 | (24.400,00) | 99,51% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *59.899.050,00* | *52.898.700,00* | *(7.000.350,00)* | *88,31%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.899.050,00 | 52.898.700,00 | (7.000.350,00) | 88,31% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *42.874.900,00* | *40.870.000,00* | *(2.004.900,00)* | *95,32%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.529.000,00 | 40.525.000,00 | (2.004.000,00) | 95,29% | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0003 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 345.900,00 | 345.000,00 | (900,00) | 99,74% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *20.074.000,00* | *16.719.700,00* | *(3.354.300,00)* | *83,29%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.074.000,00 | 16.719.700,00 | (3.354.300,00) | 83,29% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *136.461.000,00* | *134.702.938,00* | *(1.758.062,00)* | *98,71%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.461.000,00 | 134.702.938,00 | (1.758.062,00) | 98,71% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *2.864.630.487,00* | *2.860.109.150,00* | *(4.521.337,00)* | *99,84%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *25.100.000,00* | *20.583.063,00* | *(4.516.937,00)* | *82,00%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.100.000,00 | 20.583.063,00 | (4.516.937,00) | 82,00% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *2.837.530.487,00* | *2.837.526.087,00* | *(4.400,00)* | *100,00%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.837.530.487,00 | 2.837.526.087,00 | (4.400,00) | 100,00% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *1.250.536.800,00* | *1.226.726.567,00* | *(23.810.233,00)* | *98,10%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *57.280.650,00* | *55.208.696,00* | *(2.071.954,00)* | *96,38%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.280.650,00 | 55.208.696,00 | (2.071.954,00) | 96,38% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *1.158.451.050,00* | *1.137.890.941,00* | *(20.560.109,00)* | *98,23%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.158.451.050,00 | 1.137.890.941,00 | (20.560.109,00) | 98,23% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.09.0007* | | *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya* | *20.003.200,00* | *18.928.130,00* | *(1.075.070,00)* | *94,63%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.003.200,00 | 18.928.130,00 | (1.075.070,00) | 94,63% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *9.965.700,00* | *9.878.800,00* | *(86.900,00)* | *99,13%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.965.700,00 | 9.878.800,00 | (86.900,00) | 99,13% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *4.836.200,00* | *4.820.000,00* | *(16.200,00)* | *99,67%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.836.200,00 | 4.820.000,00 | (16.200,00) | 99,67% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.03* | | *PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP* | *1.530.982.000,00* | *1.519.544.100,00* | *(11.437.900,00)* | *99,25%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.03.2.01* | | *Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota* | *29.999.250,00* | *29.594.000,00* | *(405.250,00)* | *98,65%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.03.2.01.0001* | | *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | *29.999.250,00* | *29.594.000,00* | *(405.250,00)* | *98,65%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.999.250,00 | 29.594.000,00 | (405.250,00) | 98,65% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.03.2.02* | | *Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota* | *1.500.982.750,00* | *1.489.950.100,00* | *(11.032.650,00)* | *99,26%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.03.2.02.0001* | | *Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat* | *20.554.350,00* | *16.305.600,00* | *(4.248.750,00)* | *79,33%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.554.350,00 | 16.305.600,00 | (4.248.750,00) | 79,33% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.03.2.02.0003* | | *Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* | *1.480.428.400,00* | *1.473.644.500,00* | *(6.783.900,00)* | *99,54%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.993.400,00 | 28.644.500,00 | (348.900,00) | 98,80% | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.02.0003 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.451.435.000,00 | 1.445.000.000,00 | (6.435.000,00) | 99,56% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.05* | | *PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)* | *31.550.900,00* | *31.023.100,00* | *(527.800,00)* | *98,33%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.05.2.01* | | *Penyimpanan sementara Limbah B3* | *31.550.900,00* | *31.023.100,00* | *(527.800,00)* | *98,33%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.05.2.01.0002* | | *Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3* | *31.550.900,00* | *31.023.100,00* | *(527.800,00)* | *98,33%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.05.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.550.900,00 | 31.023.100,00 | (527.800,00) | 98,33% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)* | *54.131.200,00* | *51.327.200,00* | *(2.804.000,00)* | *94,82%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.06.2.01* | | *Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | *54.131.200,00* | *51.327.200,00* | *(2.804.000,00)* | *94,82%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.06.2.01.0001* | | *Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH* | *21.655.000,00* | *19.829.100,00* | *(1.825.900,00)* | *91,57%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.06.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.655.000,00 | 19.829.100,00 | (1.825.900,00) | 91,57% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.06.2.01.0005* | | *Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* | *32.476.200,00* | *31.498.100,00* | *(978.100,00)* | *96,99%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.476.200,00 | 31.498.100,00 | (978.100,00) | 96,99% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.08* | | *PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT* | *12.152.475,00* | *8.278.800,00* | *(3.873.675,00)* | *68,12%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.08.2.01* | | *Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *12.152.475,00* | *8.278.800,00* | *(3.873.675,00)* | *68,12%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.08.2.01.0003* | | *Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup* | *12.152.475,00* | *8.278.800,00* | *(3.873.675,00)* | *68,12%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.08.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.152.475,00 | 8.278.800,00 | (3.873.675,00) | 68,12% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.10* | | *PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP* | *25.448.375,00* | *24.630.800,00* | *(817.575,00)* | *96,79%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.10.2.01* | | *Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota* | *25.448.375,00* | *24.630.800,00* | *(817.575,00)* | *96,79%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.10.2.01.0004* | | *Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota* | *25.448.375,00* | *24.630.800,00* | *(817.575,00)* | *96,79%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.10.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.448.375,00 | 24.630.800,00 | (817.575,00) | 96,79% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.11* | | *PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN* | *1.069.325.525,00* | *1.049.937.425,24* | *(19.388.099,76)* | *98,19%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.11.2.01* | | *Pengelolaan Sampah* | *1.069.325.525,00* | *1.049.937.425,24* | *(19.388.099,76)* | *98,19%* | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.11.2.01.0007* | | *Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota* | *1.044.000.000,00* | *1.025.501.225,24* | *(18.498.774,76)* | *98,23%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11.2.01.0007 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 184.000.000,00 | 183.400.000,00 | (600.000,00) | 99,67% | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11.2.01.0007 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 860.000.000,00 | 842.101.225,24 | (17.898.774,76) | 97,92% | |
| *2.11* | *2.11.0.00.0.00.01.0000* | *2.11.11.2.01.0017* | | *Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | *25.325.525,00* | *24.436.200,00* | *(889.325,00)* | *96,49%* | |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11.2.01.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.325.525,00 | 24.436.200,00 | (889.325,00) | 96,49% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.12* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.656.608.145,00* | *3.560.227.160,00* | *(96.380.985,00)* | *97,36%* | |
| *2.12* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL* | *3.656.608.145,00* | *3.560.227.160,00* | *(96.380.985,00)* | *97,36%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL* | *3.656.608.145,00* | *3.560.227.160,00* | *(96.380.985,00)* | *97,36%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.062.867.545,00* | *2.968.440.591,00* | *(94.426.954,00)* | *96,92%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *15.380.900,00* | *15.249.900,00* | *(131.000,00)* | *99,15%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *2.899.800,00* | *2.883.900,00* | *(15.900,00)* | *99,45%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.899.800,00 | 2.883.900,00 | (15.900,00) | 99,45% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.481.100,00* | *2.405.000,00* | *(76.100,00)* | *96,93%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.481.100,00 | 2.405.000,00 | (76.100,00) | 96,93% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *10.000.000,00* | *9.961.000,00* | *(39.000,00)* | *99,61%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.961.000,00 | (39.000,00) | 99,61% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.550.775.866,00* | *2.483.086.651,00* | *(67.689.215,00)* | *97,35%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.497.400.866,00* | *2.430.403.651,00* | *(66.997.215,00)* | *97,32%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.497.400.866,00 | 2.430.403.651,00 | (66.997.215,00) | 97,32% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *50.875.200,00* | *50.195.200,00* | *(680.000,00)* | *98,66%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.875.200,00 | 50.195.200,00 | (680.000,00) | 98,66% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.499.800,00* | *2.487.800,00* | *(12.000,00)* | *99,52%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.499.800,00 | 2.487.800,00 | (12.000,00) | 99,52% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *181.821.125,00* | *181.523.621,00* | *(297.504,00)* | *99,84%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *999.400,00* | *988.600,00* | *(10.800,00)* | *98,92%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 999.400,00 | 988.600,00 | (10.800,00) | 98,92% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *34.998.725,00* | *34.815.750,00* | *(182.975,00)* | *99,48%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.998.725,00 | 34.815.750,00 | (182.975,00) | 99,48% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *2.000.000,00* | *1.995.000,00* | *(5.000,00)* | *99,75%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.995.000,00 | (5.000,00) | 99,75% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *10.012.000,00* | *10.012.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.012.000,00 | 10.012.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *133.811.000,00* | *133.712.271,00* | *(98.729,00)* | *99,93%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.811.000,00 | 133.712.271,00 | (98.729,00) | 99,93% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *64.445.000,00* | *64.109.214,00* | *(335.786,00)* | *99,48%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *64.445.000,00* | *64.109.214,00* | *(335.786,00)* | *99,48%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.07.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.695.000,00 | 11.609.214,00 | (85.786,00) | 99,27% | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.750.000,00 | 52.500.000,00 | (250.000,00) | 99,53% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *146.112.704,00* | *144.468.979,00* | *(1.643.725,00)* | *98,88%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *145.612.704,00* | *143.968.979,00* | *(1.643.725,00)* | *98,87%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 145.612.704,00 | 143.968.979,00 | (1.643.725,00) | 98,87% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *104.331.950,00* | *80.002.226,00* | *(24.329.724,00)* | *76,68%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *50.010.550,00* | *48.591.426,00* | *(1.419.124,00)* | *97,16%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.010.550,00 | 48.591.426,00 | (1.419.124,00) | 97,16% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *54.321.400,00* | *31.410.800,00* | *(22.910.600,00)* | *57,82%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.321.400,00 | 31.410.800,00 | (22.910.600,00) | 57,82% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.02* | | *PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK* | *552.981.300,00* | *551.068.069,00* | *(1.913.231,00)* | *99,65%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.02.2.01* | | *Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | *41.740.000,00* | *41.680.000,00* | *(60.000,00)* | *99,86%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.02.2.01.0005* | | *Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | *41.740.000,00* | *41.680.000,00* | *(60.000,00)* | *99,86%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.740.000,00 | 41.680.000,00 | (60.000,00) | 99,86% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.02.2.03* | | *Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | *511.241.300,00* | *509.388.069,00* | *(1.853.231,00)* | *99,64%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.02.2.03.0003* | | *Fasilitasi Pendaftaran Penduduk* | *511.241.300,00* | *509.388.069,00* | *(1.853.231,00)* | *99,64%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 511.241.300,00 | 509.388.069,00 | (1.853.231,00) | 99,64% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.03* | | *PROGRAM PENCATATAN SIPIL* | *27.099.000,00* | *27.089.000,00* | *(10.000,00)* | *99,96%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.03.2.01* | | *Pelayanan Pencatatan Sipil* | *20.569.000,00* | *20.569.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.03.2.01.0001* | | *Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | *14.886.000,00* | *14.886.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.886.000,00 | 14.886.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.03.2.01.0002* | | *Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil* | *5.683.000,00* | *5.683.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.683.000,00 | 5.683.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.03.2.02* | | *Penyelenggaraan Pencatatan Sipil* | *6.530.000,00* | *6.520.000,00* | *(10.000,00)* | *99,85%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.03.2.02.0004* | | *Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* | *6.530.000,00* | *6.520.000,00* | *(10.000,00)* | *99,85%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.530.000,00 | 6.520.000,00 | (10.000,00) | 99,85% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.04* | | *PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN* | *12.054.400,00* | *12.033.600,00* | *(20.800,00)* | *99,83%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.04.2.01* | | *Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan* | *12.054.400,00* | *12.033.600,00* | *(20.800,00)* | *99,83%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.04.2.01.0001* | | *Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan* | *11.989.600,00* | *11.969.600,00* | *(20.000,00)* | *99,83%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.989.600,00 | 11.969.600,00 | (20.000,00) | 99,83% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.04.2.01.0002* | | *Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | *64.800,00* | *64.000,00* | *(800,00)* | *98,77%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.04.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.800,00 | 64.000,00 | (800,00) | 98,77% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.05* | | *PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN* | *1.605.900,00* | *1.595.900,00* | *(10.000,00)* | *99,38%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.05.2.01* | | *Penyusunan Profil Kependudukan* | *1.605.900,00* | *1.595.900,00* | *(10.000,00)* | *99,38%* | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.05.2.01.0001* | | *Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota* | *65.900,00* | *55.900,00* | *(10.000,00)* | *84,83%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.05.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.900,00 | 55.900,00 | (10.000,00) | 84,83% | |
| *2.12* | *2.12.0.00.0.00.01.0000* | *2.12.05.2.01.0002* | | *Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain* | *1.540.000,00* | *1.540.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.05.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.13* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.597.556.853,00* | *3.443.612.337,00* | *(153.944.516,00)* | *95,72%* | |
| *2.13* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA* | *3.597.556.853,00* | *3.443.612.337,00* | *(153.944.516,00)* | *95,72%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA* | *3.597.556.853,00* | *3.443.612.337,00* | *(153.944.516,00)* | *95,72%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.364.157.328,00* | *3.218.436.232,00* | *(145.721.096,00)* | *95,67%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *3.993.425,00* | *3.938.000,00* | *(55.425,00)* | *98,61%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *1.993.425,00* | *1.947.000,00* | *(46.425,00)* | *97,67%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.993.425,00 | 1.947.000,00 | (46.425,00) | 97,67% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *2.000.000,00* | *1.991.000,00* | *(9.000,00)* | *99,55%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.991.000,00 | (9.000,00) | 99,55% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.983.338.223,00* | *2.888.916.416,00* | *(94.421.807,00)* | *96,84%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.938.338.823,00* | *2.843.917.016,00* | *(94.421.807,00)* | *96,79%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.938.338.823,00 | 2.843.917.016,00 | (94.421.807,00) | 96,79% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *42.999.600,00* | *42.999.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 42.999.600,00 | 42.999.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *1.999.800,00* | *1.999.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *77.295.800,00* | *74.682.836,00* | *(2.612.964,00)* | *96,62%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.044.100,00* | *1.998.434,00* | *(45.666,00)* | *97,77%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.044.100,00 | 1.998.434,00 | (45.666,00) | 97,77% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *10.000.000,00* | *8.108.400,00* | *(1.891.600,00)* | *81,08%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 8.108.400,00 | (1.891.600,00) | 81,08% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *2.098.400,00* | *1.998.400,00* | *(100.000,00)* | *95,23%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.098.400,00 | 1.998.400,00 | (100.000,00) | 95,23% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.085.800,00* | *5.085.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.085.800,00 | 5.085.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *58.067.500,00* | *57.491.802,00* | *(575.698,00)* | *99,01%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.067.500,00 | 57.491.802,00 | (575.698,00) | 99,01% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *31.000.000,00* | *29.550.002,00* | *(1.449.998,00)* | *95,32%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *31.000.000,00* | *29.550.002,00* | *(1.449.998,00)* | *95,32%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.000.000,00 | 29.550.002,00 | (1.449.998,00) | 95,32% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *206.987.200,00* | *165.544.981,00* | *(41.442.219,00)* | *79,98%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *32.000.000,00* | *25.830.581,00* | *(6.169.419,00)* | *80,72%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.000.000,00 | 25.830.581,00 | (6.169.419,00) | 80,72% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *174.487.200,00* | *139.214.400,00* | *(35.272.800,00)* | *79,78%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.487.200,00 | 139.214.400,00 | (35.272.800,00) | 79,78% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *61.542.680,00* | *55.803.997,00* | *(5.738.683,00)* | *90,68%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *59.542.680,00* | *54.043.497,00* | *(5.499.183,00)* | *90,76%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.542.680,00 | 54.043.497,00 | (5.499.183,00) | 90,76% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *2.000.000,00* | *1.760.500,00* | *(239.500,00)* | *88,03%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.760.500,00 | (239.500,00) | 88,03% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04* | | *PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA* | *85.899.625,00* | *80.756.550,00* | *(5.143.075,00)* | *94,01%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04.2.01* | | *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | *85.899.625,00* | *80.756.550,00* | *(5.143.075,00)* | *94,01%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04.2.01.0001* | | *Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | *20.990.000,00* | *20.637.500,00* | *(352.500,00)* | *98,32%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.990.000,00 | 20.637.500,00 | (352.500,00) | 98,32% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04.2.01.0004* | | *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | *28.500.000,00* | *27.843.750,00* | *(656.250,00)* | *97,70%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.500.000,00 | 27.843.750,00 | (656.250,00) | 97,70% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04.2.01.0008* | | *Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | *26.899.900,00* | *25.987.600,00* | *(912.300,00)* | *96,61%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.899.900,00 | 25.987.600,00 | (912.300,00) | 96,61% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04.2.01.0011* | | *Fasilitasi Penyusunan Profil Desa* | *7.009.725,00* | *3.911.500,00* | *(3.098.225,00)* | *55,80%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.009.725,00 | 3.911.500,00 | (3.098.225,00) | 55,80% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.04.2.01.0013* | | *Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | *2.500.000,00* | *2.376.200,00* | *(123.800,00)* | *95,05%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.376.200,00 | (123.800,00) | 95,05% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.05* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT* | *147.499.900,00* | *144.419.555,00* | *(3.080.345,00)* | *97,91%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.05.2.01* | | *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *147.499.900,00* | *144.419.555,00* | *(3.080.345,00)* | *97,91%* | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.05.2.01.0002* | | *Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | *25.000.000,00* | *25.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0002 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.05.2.01.0003* | | *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | *19.892.000,00* | *19.238.700,00* | *(653.300,00)* | *96,72%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.892.000,00 | 19.238.700,00 | (653.300,00) | 96,72% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.05.2.01.0004* | | *Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | *97.918.400,00* | *95.934.855,00* | *(1.983.545,00)* | *97,97%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.918.400,00 | 95.934.855,00 | (1.983.545,00) | 97,97% | |
| *2.13* | *2.13.0.00.0.00.01.0000* | *2.13.05.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | *4.689.500,00* | *4.246.000,00* | *(443.500,00)* | *90,54%* | |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.689.500,00 | 4.246.000,00 | (443.500,00) | 90,54% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JUNIUS TARIGAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *12.210.230.241,00* | *11.800.671.703,00* | *(409.558.538,00)* | *96,65%* | |
| *2.08* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK* | *480.000.000,00* | *455.052.504,00* | *(24.947.496,00)* | *94,80%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | | | *DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK* | *480.000.000,00* | *455.052.504,00* | *(24.947.496,00)* | *94,80%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.02* | | *PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN* | *142.420.700,00* | *132.006.600,00* | *(10.414.100,00)* | *92,69%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.02.2.02* | | *Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota* | *40.000.000,00* | *40.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.02.2.02.0001* | | *Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi* | *40.000.000,00* | *40.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02.2.02.0001 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.02.2.03* | | *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | *102.420.700,00* | *92.006.600,00* | *(10.414.100,00)* | *89,83%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.02.2.03.0003* | | *Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | *102.420.700,00* | *92.006.600,00* | *(10.414.100,00)* | *89,83%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.420.700,00 | 92.006.600,00 | (10.414.100,00) | 89,83% | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.03* | | *PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN* | *71.835.800,00* | *62.520.304,00* | *(9.315.496,00)* | *87,03%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.03.2.01* | | *Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | *71.835.800,00* | *62.520.304,00* | *(9.315.496,00)* | *87,03%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.03.2.01.0002* | | *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | *71.835.800,00* | *62.520.304,00* | *(9.315.496,00)* | *87,03%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.03.2.01.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | 1.874.404,00 | (3.025.596,00) | 38,25% | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.935.800,00 | 60.645.900,00 | (6.289.900,00) | 90,60% | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.04* | | *PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA* | *75.743.500,00* | *73.015.800,00* | *(2.727.700,00)* | *96,40%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.04.2.01* | | *Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *75.743.500,00* | *73.015.800,00* | *(2.727.700,00)* | *96,40%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.04.2.01.0003* | | *Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | *75.743.500,00* | *73.015.800,00* | *(2.727.700,00)* | *96,40%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.04.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.743.500,00 | 73.015.800,00 | (2.727.700,00) | 96,40% | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.06* | | *PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)* | *100.000.000,00* | *99.627.900,00* | *(372.100,00)* | *99,63%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.06.2.01* | | *Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | *100.000.000,00* | *99.627.900,00* | *(372.100,00)* | *99,63%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.06.2.01.0001* | | *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | *50.000.000,00* | *49.672.400,00* | *(327.600,00)* | *99,34%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.06.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 49.672.400,00 | (327.600,00) | 99,34% | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.06.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | *50.000.000,00* | *49.955.500,00* | *(44.500,00)* | *99,91%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.06.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 49.955.500,00 | (44.500,00) | 99,91% | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.07* | | *PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK* | *90.000.000,00* | *87.881.900,00* | *(2.118.100,00)* | *97,65%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.07.2.01* | | *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | *90.000.000,00* | *87.881.900,00* | *(2.118.100,00)* | *97,65%* | |
| *2.08* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.08.07.2.01.0004* | | *Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | *90.000.000,00* | *87.881.900,00* | *(2.118.100,00)* | *97,65%* | |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.07.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000,00 | 87.881.900,00 | (2.118.100,00) | 97,65% | |
| *2.14* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA* | *11.730.230.241,00* | *11.345.619.199,00* | *(384.611.042,00)* | *96,72%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | | | *DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK* | *11.730.230.241,00* | *11.345.619.199,00* | *(384.611.042,00)* | *96,72%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *5.180.326.091,00* | *5.050.851.353,00* | *(129.474.738,00)* | *97,50%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *14.346.000,00* | *14.346.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *9.346.000,00* | *9.346.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.346.000,00 | 9.346.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *4.648.694.841,00* | *4.534.562.573,00* | *(114.132.268,00)* | *97,54%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *4.582.299.241,00* | *4.468.166.973,00* | *(114.132.268,00)* | *97,51%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.582.299.241,00 | 4.468.166.973,00 | (114.132.268,00) | 97,51% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *61.395.600,00* | *61.395.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 61.395.600,00 | 61.395.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *187.486.300,00* | *186.853.100,00* | *(633.200,00)* | *99,66%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.171.700,00* | *2.171.000,00* | *(700,00)* | *99,97%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.171.700,00 | 2.171.000,00 | (700,00) | 99,97% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *19.987.000,00* | *19.574.300,00* | *(412.700,00)* | *97,94%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.987.000,00 | 19.574.300,00 | (412.700,00) | 97,94% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *7.724.800,00* | *7.724.400,00* | *(400,00)* | *99,99%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.724.800,00 | 7.724.400,00 | (400,00) | 99,99% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *10.064.800,00* | *10.064.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.064.800,00 | 10.064.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *4.995.000,00* | *4.995.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *142.543.000,00* | *142.323.600,00* | *(219.400,00)* | *99,85%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.543.000,00 | 142.323.600,00 | (219.400,00) | 99,85% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *27.505.200,00* | *26.700.000,00* | *(805.200,00)* | *97,07%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *27.505.200,00* | *26.700.000,00* | *(805.200,00)* | *97,07%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.505.200,00 | 26.700.000,00 | (805.200,00) | 97,07% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *204.483.400,00* | *198.937.680,00* | *(5.545.720,00)* | *97,29%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *4.000.000,00* | *4.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *26.999.400,00* | *22.162.400,00* | *(4.837.000,00)* | *82,08%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.999.400,00 | 22.162.400,00 | (4.837.000,00) | 82,08% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *173.484.000,00* | *172.775.280,00* | *(708.720,00)* | *99,59%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 173.484.000,00 | 172.775.280,00 | (708.720,00) | 99,59% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *97.810.350,00* | *89.452.000,00* | *(8.358.350,00)* | *91,45%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *97.810.350,00* | *89.452.000,00* | *(8.358.350,00)* | *91,45%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.810.350,00 | 89.452.000,00 | (8.358.350,00) | 91,45% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.02* | | *PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK* | *349.999.900,00* | *347.740.881,00* | *(2.259.019,00)* | *99,35%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.02.2.01* | | *Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk* | *349.999.900,00* | *347.740.881,00* | *(2.259.019,00)* | *99,35%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.02.2.01.0023* | | *Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana* | *349.999.900,00* | *347.740.881,00* | *(2.259.019,00)* | *99,35%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.02.2.01.0023 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 349.999.900,00 | 347.740.881,00 | (2.259.019,00) | 99,35% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.03* | | *PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)* | *3.828.112.550,00* | *3.642.550.668,00* | *(185.561.882,00)* | *95,15%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.03.2.01* | | *Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal* | *1.064.225.550,00* | *963.270.718,00* | *(100.954.832,00)* | *90,51%* | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.03.2.01.0010* | | *Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana* | *739.241.000,00* | *647.799.474,00* | *(91.441.526,00)* | *87,63%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 739.241.000,00 | 647.799.474,00 | (91.441.526,00) | 87,63% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.03.2.01.0011* | | *Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | *224.985.000,00* | *224.916.000,00* | *(69.000,00)* | *99,97%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 224.985.000,00 | 224.916.000,00 | (69.000,00) | 99,97% | |
| *2.14* | *2.14.2.08.0.00.01.0000* | *2.14.03.2.01.0013* | | *Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal* | *99.999.550,00* | *90.555.244,00* | *(9.444.306,00)* | *90,56%* | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.999.550,00 | 90.555.244,00 | (9.444.306,00) | 90,56% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 1.117.200.000,00 | 1.078.024.650,00 | (39.175.350,00) | 96,49% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.02.0004 | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.117.200.000,00 | 1.078.024.650,00 | (39.175.350,00) | 96,49% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.02.0004 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 48.840.000,00 | 48.840.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.068.360.000,00 | 1.029.184.650,00 | (39.175.350,00) | 96,33% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.312.440.000,00 | 1.282.175.300,00 | (30.264.700,00) | 97,69% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0001 | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 16.770.000,00 | 16.770.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.770.000,00 | 16.770.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0003 | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 157.935.000,00 | 148.468.300,00 | (9.466.700,00) | 94,01% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.935.000,00 | 148.468.300,00 | (9.466.700,00) | 94,01% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0008 | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 157.035.000,00 | 157.035.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.035.000,00 | 157.035.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0011 | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 964.100.000,00 | 958.380.000,00 | (5.720.000,00) | 99,41% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 964.100.000,00 | 958.380.000,00 | (5.720.000,00) | 99,41% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0013 | | Peningkatan Kesertaan KB Pria | 16.600.000,00 | 1.522.000,00 | (15.078.000,00) | 9,17% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.600.000,00 | 1.522.000,00 | (15.078.000,00) | 9,17% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 334.247.000,00 | 319.080.000,00 | (15.167.000,00) | 95,46% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.04.0006 | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 334.247.000,00 | 319.080.000,00 | (15.167.000,00) | 95,46% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.04.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 334.247.000,00 | 319.080.000,00 | (15.167.000,00) | 95,46% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.371.791.700,00 | 2.304.476.297,00 | (67.315.403,00) | 97,16% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2.371.791.700,00 | 2.304.476.297,00 | (67.315.403,00) | 97,16% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0017 | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 79.993.000,00 | 79.984.500,00 | (8.500,00) | 99,99% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.993.000,00 | 79.984.500,00 | (8.500,00) | 99,99% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0019 | | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 100.000.700,00 | 96.829.000,00 | (3.171.700,00) | 96,83% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0019 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.700,00 | 96.829.000,00 | (3.171.700,00) | 96,83% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0024 | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 2.076.600.000,00 | 2.012.504.797,00 | (64.095.203,00) | 96,91% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0024 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0024 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.068.140.000,00 | 2.004.044.797,00 | (64.095.203,00) | 96,90% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0028 | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 115.198.000,00 | 115.158.000,00 | (40.000,00) | 99,97% | |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0028 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.198.000,00 | 115.158.000,00 | (40.000,00) | 99,97% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TAMPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 340.000.000,00 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 | |
| | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 340.000.000,00 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 | |
| | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 340.000.000,00 | 41.316.858,00 | (298.683.142,00) | 12,15 | |
| *2.15* | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.15* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *4.560.650.769,00* | *4.396.662.343,00* | *(163.988.426,00)* | *96,40%* | |
| *2.15* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN* | *4.560.650.769,00* | *4.396.662.343,00* | *(163.988.426,00)* | *96,40%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS PERHUBUNGAN* | *4.560.650.769,00* | *4.396.662.343,00* | *(163.988.426,00)* | *96,40%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *4.309.371.769,00* | *4.159.860.843,00* | *(149.510.926,00)* | *96,53%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *17.494.400,00* | *16.922.000,00* | *(572.400,00)* | *96,73%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *7.497.000,00* | *7.302.000,00* | *(195.000,00)* | *97,40%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.497.000,00 | 7.302.000,00 | (195.000,00) | 97,40% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.998.200,00* | *4.711.000,00* | *(287.200,00)* | *94,25%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.998.200,00 | 4.711.000,00 | (287.200,00) | 94,25% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *4.999.200,00* | *4.909.000,00* | *(90.200,00)* | *98,20%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.200,00 | 4.909.000,00 | (90.200,00) | 98,20% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *3.753.833.725,00* | *3.664.757.271,00* | *(89.076.454,00)* | *97,63%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *3.698.082.225,00* | *3.609.021.071,00* | *(89.061.154,00)* | *97,59%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.698.082.225,00 | 3.609.021.071,00 | (89.061.154,00) | 97,59% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *50.755.200,00* | *50.755.200,00* | - | *100,00%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.755.200,00 | 50.755.200,00 | - | 100,00% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.996.300,00* | *4.981.000,00* | *(15.300,00)* | *99,69%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.996.300,00 | 4.981.000,00 | (15.300,00) | 99,69% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *95.219.156,00* | *87.818.301,00* | *(7.400.855,00)* | *92,23%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *3.485.800,00* | *3.485.800,00* | - | *100,00%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.485.800,00 | 3.485.800,00 | - | 100,00% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *18.989.350,00* | *15.912.500,00* | *(3.076.850,00)* | *83,80%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.989.350,00 | 15.912.500,00 | (3.076.850,00) | 83,80% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *2.076.000,00* | *2.076.000,00* | - | *100,00%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | - | 100,00% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *11.717.406,00* | *11.339.500,00* | *(377.906,00)* | *96,77%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.717.406,00 | 11.339.500,00 | (377.906,00) | 96,77% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *3.710.600,00* | *2.423.000,00* | *(1.287.600,00)* | *65,30%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.710.600,00 | 2.423.000,00 | (1.287.600,00) | 65,30% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *55.240.000,00* | *52.581.501,00* | *(2.658.499,00)* | *95,19%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.240.000,00 | 52.581.501,00 | (2.658.499,00) | 95,19% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *383.061.688,00* | *336.125.485,00* | *(46.936.203,00)* | *87,75%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | - | *100,00%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 100,00% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *58.820.400,00* | *38.255.640,00* | *(20.564.760,00)* | *65,04%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.820.400,00 | 38.255.640,00 | (20.564.760,00) | 65,04% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *323.241.288,00* | *296.869.845,00* | *(26.371.443,00)* | *91,84%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 323.241.288,00 | 296.869.845,00 | (26.371.443,00) | 91,84% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *59.762.800,00* | *54.237.786,00* | *(5.525.014,00)* | *90,76%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *56.841.800,00* | *51.316.786,00* | *(5.525.014,00)* | *90,28%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.841.800,00 | 51.316.786,00 | (5.525.014,00) | 90,28% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *2.921.000,00* | *2.921.000,00* | - | *100,00%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.921.000,00 | 2.921.000,00 | - | 100,00% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)* | *243.799.000,00* | *231.338.200,00* | *(12.460.800,00)* | *94,89%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.01* | | *Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | *25.000.000,00* | *20.205.000,00* | *(4.795.000,00)* | *80,82%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.01.0004* | | *Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota* | *25.000.000,00* | *20.205.000,00* | *(4.795.000,00)* | *80,82%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 20.205.000,00 | (4.795.000,00) | 80,82% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.03* | | *Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C* | *8.790.000,00* | *3.863.200,00* | *(4.926.800,00)* | *43,95%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.03.0006* | | *Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C* | *8.790.000,00* | *3.863.200,00* | *(4.926.800,00)* | *43,95%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.03.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.790.000,00 | 3.863.200,00 | (4.926.800,00) | 43,95% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.05* | | *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | *40.000.000,00* | *39.965.000,00* | *(35.000,00)* | *99,91%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.05.0007* | | *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | *40.000.000,00* | *39.965.000,00* | *(35.000,00)* | *99,91%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.05.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.965.000,00 | (35.000,00) | 99,91% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.06* | | *Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | *170.009.000,00* | *167.305.000,00* | *(2.704.000,00)* | *98,41%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.02.2.06.0017* | | *Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | *170.009.000,00* | *167.305.000,00* | *(2.704.000,00)* | *98,41%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.06.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.009.000,00 | 167.305.000,00 | (2.704.000,00) | 98,41% | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.03* | | *PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN* | *7.480.000,00* | *5.463.300,00* | *(2.016.700,00)* | *73,04%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.03.2.13* | | *Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau* | *7.480.000,00* | *5.463.300,00* | *(2.016.700,00)* | *73,04%* | |
| *2.15* | *2.15.0.00.0.00.01.0000* | *2.15.03.2.13.0003* | | *Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau* | *7.480.000,00* | *5.463.300,00* | *(2.016.700,00)* | *73,04%* | |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.03.2.13.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.480.000,00 | 5.463.300,00 | (2.016.700,00) | 73,04% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.16* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.892.234.591,00* | *3.736.417.327,00* | *(155.817.264,00)* | *96,00%* | |
| *2.16* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA* | *3.822.298.541,00* | *3.669.439.527,00* | *(152.859.014,00)* | *96,00%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | | | *DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA* | *3.822.298.541,00* | *3.669.439.527,00* | *(152.859.014,00)* | *96,00%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.431.505.716,00* | *3.287.296.637,00* | *(144.209.079,00)* | *95,80%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *26.963.050,00* | *26.024.000,00* | *(939.050,00)* | *96,52%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *14.382.050,00* | *13.522.000,00* | *(860.050,00)* | *94,02%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.382.050,00 | 13.522.000,00 | (860.050,00) | 94,02% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.181.000,00* | *2.104.000,00* | *(77.000,00)* | *96,47%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.181.000,00 | 2.104.000,00 | (77.000,00) | 96,47% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *10.400.000,00* | *10.398.000,00* | *(2.000,00)* | *99,98%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.400.000,00 | 10.398.000,00 | (2.000,00) | 99,98% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.535.572.741,00* | *2.432.039.272,00* | *(103.533.469,00)* | *95,92%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.498.646.341,00* | *2.395.202.872,00* | *(103.443.469,00)* | *95,86%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.498.646.341,00 | 2.395.202.872,00 | (103.443.469,00) | 95,86% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *34.274.400,00* | *34.274.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 34.274.400,00 | 34.274.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.652.000,00* | *2.562.000,00* | *(90.000,00)* | *96,61%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.652.000,00 | 2.562.000,00 | (90.000,00) | 96,61% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *128.379.475,00* | *127.093.628,00* | *(1.285.847,00)* | *99,00%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.103.800,00* | *2.065.200,00* | *(38.600,00)* | *98,17%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.103.800,00 | 2.065.200,00 | (38.600,00) | 98,17% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *7.089.875,00* | *5.913.200,00* | *(1.176.675,00)* | *83,40%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.089.875,00 | 5.913.200,00 | (1.176.675,00) | 83,40% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *3.024.000,00* | *3.000.000,00* | *(24.000,00)* | *99,21%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.024.000,00 | 3.000.000,00 | (24.000,00) | 99,21% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *9.238.800,00* | *9.236.400,00* | *(2.400,00)* | *99,97%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.238.800,00 | 9.236.400,00 | (2.400,00) | 99,97% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *3.593.000,00* | *3.587.000,00* | *(6.000,00)* | *99,83%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.593.000,00 | 3.587.000,00 | (6.000,00) | 99,83% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *103.330.000,00* | *103.291.828,00* | *(38.172,00)* | *99,96%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.330.000,00 | 103.291.828,00 | (38.172,00) | 99,96% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *679.037.700,00* | *641.555.962,00* | *(37.481.738,00)* | *94,48%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *572.875.300,00* | *543.019.878,00* | *(29.855.422,00)* | *94,79%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.590.000,00 | 4.910.000,00 | (680.000,00) | 87,84% | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 567.285.300,00 | 538.109.878,00 | (29.175.422,00) | 94,86% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *104.162.400,00* | *96.536.084,00* | *(7.626.316,00)* | *92,68%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.162.400,00 | 96.536.084,00 | (7.626.316,00) | 92,68% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *61.552.750,00* | *60.583.775,00* | *(968.975,00)* | *98,43%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *61.552.750,00* | *60.583.775,00* | *(968.975,00)* | *98,43%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.552.750,00 | 60.583.775,00 | (968.975,00) | 98,43% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.02* | | *PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK* | *350.537.500,00* | *347.303.800,00* | *(3.233.700,00)* | *99,08%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.02.2.01* | | *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | *350.537.500,00* | *347.303.800,00* | *(3.233.700,00)* | *99,08%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.02.2.01.0004* | | *Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* | *29.967.500,00* | *29.380.200,00* | *(587.300,00)* | *98,04%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.967.500,00 | 29.380.200,00 | (587.300,00) | 98,04% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.02.2.01.0005* | | *Pengelolaan Media Komunikasi Publik* | *250.520.000,00* | *248.930.200,00* | *(1.589.800,00)* | *99,37%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.520.000,00 | 248.930.200,00 | (1.589.800,00) | 99,37% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.02.2.01.0006* | | *Pelayanan Informasi Publik* | *20.050.000,00* | *18.993.400,00* | *(1.056.600,00)* | *94,73%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.050.000,00 | 18.993.400,00 | (1.056.600,00) | 94,73% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.02.2.01.0008* | | *Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan* | *50.000.000,00* | *50.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0008 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.03* | | *PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA* | *40.255.325,00* | *34.839.090,00* | *(5.416.235,00)* | *86,55%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.03.2.01* | | *Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | *15.005.100,00* | *13.343.190,00* | *(1.661.910,00)* | *88,92%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.03.2.01.0002* | | *Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | *15.005.100,00* | *13.343.190,00* | *(1.661.910,00)* | *88,92%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.005.100,00 | 13.343.190,00 | (1.661.910,00) | 88,92% | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.03.2.02* | | *Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | *25.250.225,00* | *21.495.900,00* | *(3.754.325,00)* | *85,13%* | |
| *2.16* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.16.03.2.02.0009* | | *Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas* | *25.250.225,00* | *21.495.900,00* | *(3.754.325,00)* | *85,13%* | |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03.2.02.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.250.225,00 | 21.495.900,00 | (3.754.325,00) | 85,13% | |
| *2.20* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK* | *69.936.050,00* | *66.977.800,00* | *(2.958.250,00)* | *95,77%* | |
| *2.20* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | | | *DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA* | *69.936.050,00* | *66.977.800,00* | *(2.958.250,00)* | *95,77%* | |
| *2.20* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.20.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL* | *69.936.050,00* | *66.977.800,00* | *(2.958.250,00)* | *95,77%* | |
| *2.20* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.20.02.2.01* | | *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | *69.936.050,00* | *66.977.800,00* | *(2.958.250,00)* | *95,77%* | |
| *2.20* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.20.02.2.01.0001* | | *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral* | *38.212.050,00* | *37.949.800,00* | *(262.250,00)* | *99,31%* | |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.20.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.212.050,00 | 37.949.800,00 | (262.250,00) | 99,31% | |
| *2.20* | *2.16.2.20.2.21.01.0000* | *2.20.02.2.01.0004* | | *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral* | *31.724.000,00* | *29.028.000,00* | *(2.696.000,00)* | *91,50%* | |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.20.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.724.000,00 | 29.028.000,00 | (2.696.000,00) | 91,50% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUN TAMBAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.280.000.000,00 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,68 | |
| | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.280.000.000,00 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,68 | |
| | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.280.000.000,00 | 1.122.422.093,00 | (157.577.907,00) | 87,68 | |
| 2.17 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.17* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *8.305.748.708,00* | *7.789.402.496,00* | *(516.346.212,00)* | *93,78%* | |
| *2.17* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH* | *8.305.748.708,00* | *7.789.402.496,00* | *(516.346.212,00)* | *93,78%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | | | *DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN* | *8.305.748.708,00* | *7.789.402.496,00* | *(516.346.212,00)* | *93,78%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *7.157.632.708,00* | *6.651.585.155,00* | *(506.047.553,00)* | *92,93%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *9.999.900,00* | *9.825.800,00* | *(174.100,00)* | *98,26%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *4.999.900,00* | *4.825.800,00* | *(174.100,00)* | *96,52%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.900,00 | 4.825.800,00 | (174.100,00) | 96,52% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *5.650.112.040,00* | *5.211.630.695,00* | *(438.481.345,00)* | *92,24%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *5.591.506.440,00* | *5.153.241.295,00* | *(438.265.145,00)* | *92,16%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.591.506.440,00 | 5.153.241.295,00 | (438.265.145,00) | 92,16% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *53.605.600,00* | *53.605.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 53.605.600,00 | 53.605.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.000.000,00* | *4.783.800,00* | *(216.200,00)* | *95,68%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.783.800,00 | (216.200,00) | 95,68% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.03* | | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | *1.980.000,00* | *1.980.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.03.0005* | | *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *1.980.000,00* | *1.980.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.03.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.04* | | *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah* | *5.000.000,00* | *4.980.000,00* | *(20.000,00)* | *99,60%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.04.0007* | | *Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | *5.000.000,00* | *4.980.000,00* | *(20.000,00)* | *99,60%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.04.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.980.000,00 | (20.000,00) | 99,60% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *168.918.900,00* | *164.186.150,00* | *(4.732.750,00)* | *97,20%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *5.363.300,00* | *4.982.600,00* | *(380.700,00)* | *92,90%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.363.300,00 | 4.982.600,00 | (380.700,00) | 92,90% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *14.604.600,00* | *13.714.600,00* | *(890.000,00)* | *93,91%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.604.600,00 | 13.714.600,00 | (890.000,00) | 93,91% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *10.137.800,00* | *10.137.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.137.800,00 | 10.137.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *54.273.200,00* | *54.164.200,00* | *(109.000,00)* | *99,80%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.273.200,00 | 54.164.200,00 | (109.000,00) | 99,80% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *84.540.000,00* | *81.186.950,00* | *(3.353.050,00)* | *96,03%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.540.000,00 | 81.186.950,00 | (3.353.050,00) | 96,03% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *1.276.466.868,00* | *1.220.183.988,00* | *(56.282.880,00)* | *95,59%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.250.000,00* | *1.250.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *25.420.000,00* | *11.378.700,00* | *(14.041.300,00)* | *44,76%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.420.000,00 | 11.378.700,00 | (14.041.300,00) | 44,76% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *1.249.796.868,00* | *1.207.555.288,00* | *(42.241.580,00)* | *96,62%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.249.796.868,00 | 1.207.555.288,00 | (42.241.580,00) | 96,62% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *45.155.000,00* | *38.798.522,00* | *(6.356.478,00)* | *85,92%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *34.908.400,00* | *28.798.522,00* | *(6.109.878,00)* | *82,50%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.908.400,00 | 28.798.522,00 | (6.109.878,00) | 82,50% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *5.231.200,00* | *5.000.000,00* | *(231.200,00)* | *95,58%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.231.200,00 | 5.000.000,00 | (231.200,00) | 95,58% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *5.015.400,00* | *5.000.000,00* | *(15.400,00)* | *99,69%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.015.400,00 | 5.000.000,00 | (15.400,00) | 99,69% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.04* | | *PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI* | *25.000.000,00* | *19.743.500,00* | *(5.256.500,00)* | *78,97%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.04.2.01* | | *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | *25.000.000,00* | *19.743.500,00* | *(5.256.500,00)* | *78,97%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.04.2.01.0001* | | *Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota* | *25.000.000,00* | *19.743.500,00* | *(5.256.500,00)* | *78,97%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 19.743.500,00 | (5.256.500,00) | 78,97% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.05* | | *PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN* | *231.068.500,00* | *231.068.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.05.2.01* | | *Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *231.068.500,00* | *231.068.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.05.2.01.0001* | | *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi* | *231.068.500,00* | *231.068.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.05.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.068.500,00 | 231.068.500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.07* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)* | *346.551.500,00* | *344.126.184,00* | *(2.425.316,00)* | *99,30%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.07.2.01* | | *Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* | *346.551.500,00* | *344.126.184,00* | *(2.425.316,00)* | *99,30%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.07.2.01.0004* | | *Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro* | *346.551.500,00* | *344.126.184,00* | *(2.425.316,00)* | *99,30%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.07.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 346.551.500,00 | 344.126.184,00 | (2.425.316,00) | 99,30% | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.08* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM* | *545.496.000,00* | *542.879.157,00* | *(2.616.843,00)* | *99,52%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.08.2.01* | | *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil* | *545.496.000,00* | *542.879.157,00* | *(2.616.843,00)* | *99,52%* | |
| *2.17* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *2.17.08.2.01.0006* | | *Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi* | *545.496.000,00* | *542.879.157,00* | *(2.616.843,00)* | *99,52%* | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.08.2.01.0006 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.08.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 542.116.000,00 | 539.499.157,00 | (2.616.843,00) | 99,52% | |
| *3* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN* | *323.024.250,00* | *311.243.100,00* | *(11.781.150,00)* | *96,35%* | |
| *3.30* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN* | *183.024.300,00* | *172.121.000,00* | *(10.903.300,00)* | *94,04%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | | | *DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN* | *183.024.300,00* | *172.121.000,00* | *(10.903.300,00)* | *94,04%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.03* | | *PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN* | *66.699.850,00* | *59.769.700,00* | *(6.930.150,00)* | *89,61%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.03.2.01* | | *Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | *66.699.850,00* | *59.769.700,00* | *(6.930.150,00)* | *89,61%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.03.2.01.0002* | | *Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | *66.699.850,00* | *59.769.700,00* | *(6.930.150,00)* | *89,61%* | |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.699.850,00 | 59.769.700,00 | (6.930.150,00) | 89,61% | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04* | | *PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING* | *116.324.450,00* | *112.351.300,00* | *(3.973.150,00)* | *96,58%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04.2.01* | | *Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota* | *9.999.700,00* | *9.576.400,00* | *(423.300,00)* | *95,77%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04.2.01.0001* | | *Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | *9.999.700,00* | *9.576.400,00* | *(423.300,00)* | *95,77%* | |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.700,00 | 9.576.400,00 | (423.300,00) | 95,77% | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04.2.02* | | *Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota* | *56.374.900,00* | *54.677.400,00* | *(1.697.500,00)* | *96,99%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04.2.02.0001* | | *Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | *56.374.900,00* | *54.677.400,00* | *(1.697.500,00)* | *96,99%* | |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.374.900,00 | 54.677.400,00 | (1.697.500,00) | 96,99% | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04.2.03* | | *Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *49.949.850,00* | *48.097.500,00* | *(1.852.350,00)* | *96,29%* | |
| *3.30* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.30.04.2.03.0003* | | *Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi* | *49.949.850,00* | *48.097.500,00* | *(1.852.350,00)* | *96,29%* | |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.949.850,00 | 48.097.500,00 | (1.852.350,00) | 96,29% | |
| *3.31* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN* | *139.999.950,00* | *139.122.100,00* | *(877.850,00)* | *99,37%* | |
| *3.31* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | | | *DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN* | *139.999.950,00* | *139.122.100,00* | *(877.850,00)* | *99,37%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3.31* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.31.02* | | *PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI* | *139.999.950,00* | *139.122.100,00* | *(877.850,00)* | *99,37%* | |
| *3.31* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.31.02.2.01* | | *Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota* | *139.999.950,00* | *139.122.100,00* | *(877.850,00)* | *99,37%* | |
| *3.31* | *2.17.3.30.3.31.03.0000* | *3.31.02.2.01.0005* | | *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | *139.999.950,00* | *139.122.100,00* | *(877.850,00)* | *99,37%* | |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.31.02.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.999.950,00 | 39.122.100,00 | (877.850,00) | 97,81% | |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.31.02.2.01.0005 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 3.000.000.000,00 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 | |
| | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.000.000.000,00 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 | |
| | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.000.000.000,00 | 2.510.704.563,00 | (489.295.437,00) | 83,69 | |
| 2.18 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.18* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.398.135.281,00* | *3.204.509.564,00* | *(193.625.717,00)* | *94,30%* | |
| *2.18* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL* | *3.398.135.281,00* | *3.204.509.564,00* | *(193.625.717,00)* | *94,30%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU* | *3.398.135.281,00* | *3.204.509.564,00* | *(193.625.717,00)* | *94,30%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.666.949.381,00* | *2.571.636.214,00* | *(95.313.167,00)* | *96,43%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *14.500.000,00* | *14.018.900,00* | *(481.100,00)* | *96,68%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *2.500.000,00* | *2.270.200,00* | *(229.800,00)* | *90,81%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.270.200,00 | (229.800,00) | 90,81% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.000.000,00* | *1.748.700,00* | *(251.300,00)* | *87,44%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.748.700,00 | (251.300,00) | 87,44% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.308.440.565,00* | *2.249.182.984,00* | *(59.257.581,00)* | *97,43%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.252.353.365,00* | *2.194.707.784,00* | *(57.645.581,00)* | *97,44%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.252.353.365,00 | 2.194.707.784,00 | (57.645.581,00) | 97,44% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *50.587.200,00* | *50.587.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.587.200,00 | 50.587.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *3.000.000,00* | *2.894.800,00* | *(105.200,00)* | *96,49%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.894.800,00 | (105.200,00) | 96,49% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.02.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *2.500.000,00* | *993.200,00* | *(1.506.800,00)* | *39,73%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 993.200,00 | (1.506.800,00) | 39,73% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *149.840.800,00* | *146.495.258,00* | *(3.345.542,00)* | *97,77%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.502.600,00* | *2.501.800,00* | *(800,00)* | *99,97%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.502.600,00 | 2.501.800,00 | (800,00) | 99,97% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *17.997.200,00* | *16.430.500,00* | *(1.566.700,00)* | *91,29%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.997.200,00 | 16.430.500,00 | (1.566.700,00) | 91,29% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *3.950.000,00* | *2.379.600,00* | *(1.570.400,00)* | *60,24%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.950.000,00 | 2.379.600,00 | (1.570.400,00) | 60,24% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *7.506.000,00* | *7.500.000,00* | *(6.000,00)* | *99,92%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.506.000,00 | 7.500.000,00 | (6.000,00) | 99,92% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *117.885.000,00* | *117.683.358,00* | *(201.642,00)* | *99,83%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.885.000,00 | 117.683.358,00 | (201.642,00) | 99,83% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *118.430.716,00* | *90.108.126,00* | *(28.322.590,00)* | *76,09%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *44.019.600,00* | *28.383.610,00* | *(15.635.990,00)* | *64,48%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.019.600,00 | 28.383.610,00 | (15.635.990,00) | 64,48% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *73.411.116,00* | *60.724.516,00* | *(12.686.600,00)* | *82,72%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.411.116,00 | 60.724.516,00 | (12.686.600,00) | 82,72% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *75.737.300,00* | *71.830.946,00* | *(3.906.354,00)* | *94,84%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *69.277.300,00* | *65.405.146,00* | *(3.872.154,00)* | *94,41%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.277.300,00 | 65.405.146,00 | (3.872.154,00) | 94,41% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *6.460.000,00* | *6.425.800,00* | *(34.200,00)* | *99,47%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.460.000,00 | 6.425.800,00 | (34.200,00) | 99,47% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.02* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL* | *24.175.000,00* | *23.823.650,00* | *(351.350,00)* | *98,55%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.02.2.01* | | *Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *6.205.000,00* | *5.971.000,00* | *(234.000,00)* | *96,23%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.02.2.01.0001* | | *Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | *6.205.000,00* | *5.971.000,00* | *(234.000,00)* | *96,23%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.205.000,00 | 5.971.000,00 | (234.000,00) | 96,23% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.02.2.02* | | *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | *17.970.000,00* | *17.852.650,00* | *(117.350,00)* | *99,35%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.02.2.02.0004* | | *Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | *17.970.000,00* | *17.852.650,00* | *(117.350,00)* | *99,35%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.970.000,00 | 17.852.650,00 | (117.350,00) | 99,35% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.03* | | *PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL* | *7.030.000,00* | *901.300,00* | *(6.128.700,00)* | *12,82%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.03.2.01* | | *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *7.030.000,00* | *901.300,00* | *(6.128.700,00)* | *12,82%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.03.2.01.0002* | | *Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota* | *7.030.000,00* | *901.300,00* | *(6.128.700,00)* | *12,82%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.030.000,00 | 901.300,00 | (6.128.700,00) | 12,82% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.04* | | *PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL* | *59.999.900,00* | *45.028.600,00* | *(14.971.300,00)* | *75,05%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.04.2.01* | | *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota* | *59.999.900,00* | *45.028.600,00* | *(14.971.300,00)* | *75,05%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.04.2.01.0006* | | *Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | *55.000.000,00* | *42.098.600,00* | *(12.901.400,00)* | *76,54%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.000.000,00 | 42.098.600,00 | (12.901.400,00) | 76,54% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.04.2.01.0007* | | *Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko* | *1.999.900,00* | *0,00* | *(1.999.900,00)* | *0,00%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.999.900,00 | 0,00 | (1.999.900,00) | 0,00% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.04.2.01.0008* | | *Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko* | *3.000.000,00* | *2.930.000,00* | *(70.000,00)* | *97,67%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.930.000,00 | (70.000,00) | 97,67% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.05* | | *PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL* | *569.981.000,00* | *493.235.300,00* | *(76.745.700,00)* | *86,54%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.05.2.01* | | *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *569.981.000,00* | *493.235.300,00* | *(76.745.700,00)* | *86,54%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.05.2.01.0004* | | *Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | *85.497.000,00* | *49.272.100,00* | *(36.224.900,00)* | *57,63%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.497.000,00 | 49.272.100,00 | (36.224.900,00) | 57,63% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.05.2.01.0005* | | *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha* | *313.491.000,00* | *293.316.000,00* | *(20.175.000,00)* | *93,56%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 313.491.000,00 | 293.316.000,00 | (20.175.000,00) | 93,56% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.05.2.01.0006* | | *Pengawasan Penanaman Modal* | *170.993.000,00* | *150.647.200,00* | *(20.345.800,00)* | *88,10%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.993.000,00 | 150.647.200,00 | (20.345.800,00) | 88,10% | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.06* | | *PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL* | *70.000.000,00* | *69.884.500,00* | *(115.500,00)* | *99,84%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.06.2.01* | | *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *70.000.000,00* | *69.884.500,00* | *(115.500,00)* | *99,84%* | |
| *2.18* | *2.18.0.00.0.00.01.0000* | *2.18.06.2.01.0002* | | *Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik* | *70.000.000,00* | *69.884.500,00* | *(115.500,00)* | *99,84%* | |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.06.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000,00 | 69.884.500,00 | (115.500,00) | 99,84% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 40.000.000,00 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 | |
| | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 40.000.000,00 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 | |
| | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 40.000.000,00 | 53.300.000,00 | 13.300.000,00 | 133,25 | |
| 2.19 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.19* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.344.338.761,00* | *3.091.300.500,00* | *(253.038.261,00)* | *92,43%* | |
| *2.19* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA* | *3.344.338.761,00* | *3.091.300.500,00* | *(253.038.261,00)* | *92,43%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA* | *3.344.338.761,00* | *3.091.300.500,00* | *(253.038.261,00)* | *92,43%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.504.338.761,00* | *2.361.575.600,00* | *(142.763.161,00)* | *94,30%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *26.810.350,00* | *25.565.600,00* | *(1.244.750,00)* | *95,36%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *2.259.000,00* | *2.232.600,00* | *(26.400,00)* | *98,83%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.259.000,00 | 2.232.600,00 | (26.400,00) | 98,83% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *1.936.150,00* | *1.298.000,00* | *(638.150,00)* | *67,04%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.936.150,00 | 1.298.000,00 | (638.150,00) | 67,04% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *1.645.300,00* | *1.608.800,00* | *(36.500,00)* | *97,78%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.645.300,00 | 1.608.800,00 | (36.500,00) | 97,78% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.655.900,00* | *2.619.200,00* | *(36.700,00)* | *98,62%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.655.900,00 | 2.619.200,00 | (36.700,00) | 98,62% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *18.314.000,00* | *17.807.000,00* | *(507.000,00)* | *97,23%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.314.000,00 | 17.807.000,00 | (507.000,00) | 97,23% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.069.874.095,00* | *1.971.120.242,00* | *(98.753.853,00)* | *95,23%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.016.577.545,00* | *1.918.401.242,00* | *(98.176.303,00)* | *95,13%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.016.577.545,00 | 1.918.401.242,00 | (98.176.303,00) | 95,13% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *50.587.200,00* | *50.026.200,00* | *(561.000,00)* | *98,89%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.587.200,00 | 50.026.200,00 | (561.000,00) | 98,89% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.02.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *2.709.350,00* | *2.692.800,00* | *(16.550,00)* | *99,39%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.709.350,00 | 2.692.800,00 | (16.550,00) | 99,39% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *180.419.400,00* | *178.132.213,00* | *(2.287.187,00)* | *98,73%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *9.058.900,00* | *9.058.900,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.058.900,00 | 9.058.900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *10.866.900,00* | *9.879.200,00* | *(987.700,00)* | *90,91%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.866.900,00 | 9.879.200,00 | (987.700,00) | 90,91% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *9.427.800,00* | *9.120.000,00* | *(307.800,00)* | *96,74%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.427.800,00 | 9.120.000,00 | (307.800,00) | 96,74% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *11.066.800,00* | *11.007.000,00* | *(59.800,00)* | *99,46%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.066.800,00 | 11.007.000,00 | (59.800,00) | 99,46% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *139.999.000,00* | *139.067.113,00* | *(931.887,00)* | *99,33%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.999.000,00 | 139.067.113,00 | (931.887,00) | 99,33% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *185.811.116,00* | *146.859.645,00* | *(38.951.471,00)* | *79,04%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *57.900.000,00* | *31.699.453,00* | *(26.200.547,00)* | *54,75%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.900.000,00 | 31.699.453,00 | (26.200.547,00) | 54,75% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *127.411.116,00* | *114.660.192,00* | *(12.750.924,00)* | *89,99%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 127.411.116,00 | 114.660.192,00 | (12.750.924,00) | 89,99% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *41.423.800,00* | *39.897.900,00* | *(1.525.900,00)* | *96,32%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *29.584.100,00* | *28.131.600,00* | *(1.452.500,00)* | *95,09%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.584.100,00 | 28.131.600,00 | (1.452.500,00) | 95,09% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *5.728.300,00* | *5.654.900,00* | *(73.400,00)* | *98,72%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.728.300,00 | 5.654.900,00 | (73.400,00) | 98,72% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *6.111.400,00* | *6.111.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.111.400,00 | 6.111.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.02* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN* | *70.000.000,00* | *0,00* | *(70.000.000,00)* | *0,00%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.02.2.02* | | *Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *70.000.000,00* | *0,00* | *(70.000.000,00)* | *0,00%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.02.2.02.0002* | | *Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota* | *70.000.000,00* | *0,00* | *(70.000.000,00)* | *0,00%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.02.2.02.0002 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 70.000.000,00 | 0,00 | (70.000.000,00) | 0,00% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN* | *770.000.000,00* | *729.724.900,00* | *(40.275.100,00)* | *94,77%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03.2.01* | | *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *380.000.000,00* | *345.155.200,00* | *(34.844.800,00)* | *90,83%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03.2.01.0003* | | *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota* | *380.000.000,00* | *345.155.200,00* | *(34.844.800,00)* | *90,83%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.01.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 376.900.000,00 | 342.055.200,00 | (34.844.800,00) | 90,75% | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03.2.03* | | *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi* | *140.000.000,00* | *134.569.700,00* | *(5.430.300,00)* | *96,12%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03.2.03.0001* | | *Seleksi Atlet Daerah* | *140.000.000,00* | *134.569.700,00* | *(5.430.300,00)* | *96,12%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000,00 | 134.569.700,00 | (5.430.300,00) | 96,12% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03.2.04* | | *Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga* | *250.000.000,00* | *250.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *2.19* | *2.19.0.00.0.00.01.0000* | *2.19.03.2.04.0002* | | *Pengembangan Organisasi Keolahragaan* | *250.000.000,00* | *250.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.04.0002 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *2.23* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR* | *3.440.905.014,00* | *3.219.347.914,86* | *(221.557.099,14)* | *93,56%* | |
| *2.23* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN* | *3.420.905.014,00* | *3.201.536.814,86* | *(219.368.199,14)* | *93,59%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | | | *DINAS PERPUSTAKAAN* | *3.420.905.014,00* | *3.201.536.814,86* | *(219.368.199,14)* | *93,59%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.170.834.189,00* | *2.989.437.323,00* | *(181.396.866,00)* | *94,28%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *14.263.100,00* | *12.993.100,00* | *(1.270.000,00)* | *91,10%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *2.499.700,00* | *2.063.000,00* | *(436.700,00)* | *82,53%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.499.700,00 | 2.063.000,00 | (436.700,00) | 82,53% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *1.843.900,00* | *1.630.600,00* | *(213.300,00)* | *88,43%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.843.900,00 | 1.630.600,00 | (213.300,00) | 88,43% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.644.500,00* | *2.073.000,00* | *(571.500,00)* | *78,39%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.644.500,00 | 2.073.000,00 | (571.500,00) | 78,39% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *7.275.000,00* | *7.226.500,00* | *(48.500,00)* | *99,33%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.275.000,00 | 7.226.500,00 | (48.500,00) | 99,33% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.792.549.371,00* | *2.640.733.116,00* | *(151.816.255,00)* | *94,56%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.757.686.771,00* | *2.606.142.516,00* | *(151.544.255,00)* | *94,50%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.757.686.771,00 | 2.606.142.516,00 | (151.544.255,00) | 94,50% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *32.859.600,00* | *32.859.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 32.859.600,00 | 32.859.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.003.000,00* | *1.731.000,00* | *(272.000,00)* | *86,42%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.003.000,00 | 1.731.000,00 | (272.000,00) | 86,42% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *80.120.250,00* | *73.748.015,00* | *(6.372.235,00)* | *92,05%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *1.888.800,00* | *1.888.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.888.800,00 | 1.888.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *16.519.150,00* | *11.421.900,00* | *(5.097.250,00)* | *69,14%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.519.150,00 | 11.421.900,00 | (5.097.250,00) | 69,14% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *4.991.000,00* | *4.991.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.991.000,00 | 4.991.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.436.800,00* | *5.436.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.436.800,00 | 5.436.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *3.905.500,00* | *3.172.975,00* | *(732.525,00)* | *81,24%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.905.500,00 | 3.172.975,00 | (732.525,00) | 81,24% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *47.379.000,00* | *46.836.540,00* | *(542.460,00)* | *98,86%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.379.000,00 | 46.836.540,00 | (542.460,00) | 98,86% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *254.194.268,00* | *234.962.549,00* | *(19.231.719,00)* | *92,43%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *150.000,00* | *150.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *25.026.800,00* | *20.723.350,00* | *(4.303.450,00)* | *82,80%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.026.800,00 | 20.723.350,00 | (4.303.450,00) | 82,80% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *229.017.468,00* | *214.089.199,00* | *(14.928.269,00)* | *93,48%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 229.017.468,00 | 214.089.199,00 | (14.928.269,00) | 93,48% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *29.707.200,00* | *27.000.543,00* | *(2.706.657,00)* | *90,89%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *28.786.200,00* | *26.079.543,00* | *(2.706.657,00)* | *90,60%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.786.200,00 | 26.079.543,00 | (2.706.657,00) | 90,60% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *921.000,00* | *921.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 921.000,00 | 921.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02* | | *PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN* | *250.070.825,00* | *212.099.491,86* | *(37.971.333,14)* | *84,82%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02.2.01* | | *Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *247.070.825,00* | *210.699.491,86* | *(36.371.333,14)* | *85,28%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02.2.01.0001* | | *Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik* | *50.334.200,00* | *44.389.010,86* | *(5.945.189,14)* | *88,19%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000,00 | 1.500.000,00 | (4.200.000,00) | 26,32% | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0001 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.734.200,00 | 0,00 | (1.734.200,00) | 0,00% | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0001 | 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | (10.989,14) | 99,97% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02.2.01.0002* | | *Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *152.440.225,00* | *122.606.051,00* | *(29.834.174,00)* | *80,43%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 143.240.225,00 | 113.406.051,00 | (29.834.174,00) | 79,17% | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0002 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02.2.01.0009* | | *Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka* | *44.296.400,00* | *43.704.430,00* | *(591.970,00)* | *98,66%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0009 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.721.400,00 | 8.145.000,00 | (576.400,00) | 93,39% | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0009 | 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 33.885.000,00 | 33.869.430,00 | (15.570,00) | 99,95% | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02.2.02* | | *Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *3.000.000,00* | *1.400.000,00* | *(1.600.000,00)* | *46,67%* | |
| *2.23* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.23.02.2.02.0001* | | *Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat* | *3.000.000,00* | *1.400.000,00* | *(1.600.000,00)* | *46,67%* | |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 1.400.000,00 | (1.600.000,00) | 46,67% | |
| *2.24* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN* | *20.000.000,00* | *17.811.100,00* | *(2.188.900,00)* | *89,06%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.24* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | | | *DINAS PERPUSTAKAAN* | *20.000.000,00* | *17.811.100,00* | *(2.188.900,00)* | *89,06%* | |
| *2.24* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.24.02* | | *PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP* | *20.000.000,00* | *17.811.100,00* | *(2.188.900,00)* | *89,06%* | |
| *2.24* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.24.02.2.01* | | *Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota* | *20.000.000,00* | *17.811.100,00* | *(2.188.900,00)* | *89,06%* | |
| *2.24* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.24.02.2.01.0001* | | *Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis* | *17.471.125,00* | *15.417.100,00* | *(2.054.025,00)* | *88,24%* | |
| *2.24* | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.24.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.471.125,00 | 15.417.100,00 | (2.054.025,00) | 88,24% | |
| *2.24* | *2.23.2.24.0.00.01.0000* | *2.24.02.2.01.0003* | | *Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | *2.528.875,00* | *2.394.000,00* | *(134.875,00)* | *94,67%* | |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.24.02.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.528.875,00 | 2.394.000,00 | (134.875,00) | 94,67% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

IGNIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : DINAS PARIWISATA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.156.600.000,00 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 9,65 | |
| | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.156.600.000,00 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 9,65 | |
| | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.156.600.000,00 | 343.030.963,00 | (813.569.037,00) | 9,65 | |
| 3.26 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *3.26* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN* | *14.738.235.372,00* | *13.491.623.929,00* | *(1.246.611.443,00)* | *91,54%* | |
| *3.26* | | | | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA* | *14.738.235.372,00* | *13.491.623.929,00* | *(1.246.611.443,00)* | *91,54%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | | | *DINAS PARIWISATA* | *14.738.235.372,00* | *13.491.623.929,00* | *(1.246.611.443,00)* | *91,54%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *4.904.513.947,00* | *4.640.652.913,00* | *(263.861.034,00)* | *94,62%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *51.272.650,00* | *50.075.400,00* | *(1.197.250,00)* | *97,66%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *5.761.000,00* | *5.281.500,00* | *(479.500,00)* | *91,68%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.761.000,00 | 5.281.500,00 | (479.500,00) | 91,68% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *4.989.500,00* | *4.784.000,00* | *(205.500,00)* | *95,88%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.989.500,00 | 4.784.000,00 | (205.500,00) | 95,88% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0003* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | *4.543.500,00* | *4.528.000,00* | *(15.500,00)* | *99,66%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.543.500,00 | 4.528.000,00 | (15.500,00) | 99,66% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *4.528.500,00* | *4.365.000,00* | *(163.500,00)* | *96,39%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.528.500,00 | 4.365.000,00 | (163.500,00) | 96,39% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD* | *4.747.450,00* | *4.653.900,00* | *(93.550,00)* | *98,03%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.747.450,00 | 4.653.900,00 | (93.550,00) | 98,03% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *5.029.200,00* | *4.794.000,00* | *(235.200,00)* | *95,32%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.029.200,00 | 4.794.000,00 | (235.200,00) | 95,32% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *21.673.500,00* | *21.669.000,00* | *(4.500,00)* | *99,98%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.673.500,00 | 21.669.000,00 | (4.500,00) | 99,98% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *3.738.806.613,00* | *3.491.775.964,00* | *(247.030.649,00)* | *93,39%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *3.671.752.413,00* | *3.424.999.764,00* | *(246.752.649,00)* | *93,28%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.671.752.413,00 | 3.424.999.764,00 | (246.752.649,00) | 93,28% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *61.975.200,00* | *61.975.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 61.975.200,00 | 61.975.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.079.000,00* | *4.801.000,00* | *(278.000,00)* | *94,53%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.079.000,00 | 4.801.000,00 | (278.000,00) | 94,53% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.03* | | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | *3.803.500,00* | *3.580.000,00* | *(223.500,00)* | *94,12%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.03.0005* | | *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *3.803.500,00* | *3.580.000,00* | *(223.500,00)* | *94,12%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.03.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.803.500,00 | 3.580.000,00 | (223.500,00) | 94,12% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *394.172.120,00* | *388.825.449,00* | *(5.346.671,00)* | *98,64%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *24.913.000,00* | *24.900.900,00* | *(12.100,00)* | *99,95%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.913.000,00 | 24.900.900,00 | (12.100,00) | 99,95% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *28.976.250,00* | *23.725.250,00* | *(5.251.000,00)* | *81,88%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.976.250,00 | 23.725.250,00 | (5.251.000,00) | 81,88% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *68.368.000,00* | *68.368.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.368.000,00 | 68.368.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *28.519.870,00* | *28.519.600,00* | *(270,00)* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.519.870,00 | 28.519.600,00 | (270,00) | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *243.395.000,00* | *243.311.699,00* | *(83.301,00)* | *99,97%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.395.000,00 | 243.311.699,00 | (83.301,00) | 99,97% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *635.829.364,00* | *625.766.400,00* | *(10.062.964,00)* | *98,42%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *64.098.800,00* | *57.734.640,00* | *(6.364.160,00)* | *90,07%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.098.800,00 | 57.734.640,00 | (6.364.160,00) | 90,07% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *571.730.564,00* | *568.031.760,00* | *(3.698.804,00)* | *99,35%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 571.730.564,00 | 568.031.760,00 | (3.698.804,00) | 99,35% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *80.629.700,00* | *80.629.700,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *50.292.500,00* | *50.292.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.292.500,00 | 50.292.500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *15.177.200,00* | *15.177.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.177.200,00 | 15.177.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *15.160.000,00* | *15.160.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.160.000,00 | 15.160.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02* | | *PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA* | *8.495.356.000,00* | *7.568.532.623,00* | *(926.823.377,00)* | *89,09%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02.2.01* | | *Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota* | *515.000.000,00* | *512.820.000,00* | *(2.180.000,00)* | *99,58%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02.2.01.0009* | | *Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota* | *515.000.000,00* | *512.820.000,00* | *(2.180.000,00)* | *99,58%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 515.000.000,00 | 512.820.000,00 | (2.180.000,00) | 99,58% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02.2.02* | | *Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | *27.590.000,00* | *27.590.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02.2.02.0004* | | *Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | *27.590.000,00* | *27.590.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.02.0004 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 27.590.000,00 | 27.590.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02.2.03* | | *Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | *7.952.766.000,00* | *7.028.122.623,00* | *(924.643.377,00)* | *88,37%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.02.2.03.0004* | | *Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | *7.952.766.000,00* | *7.028.122.623,00* | *(924.643.377,00)* | *88,37%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03.0004 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 20.440.000,00 | 20.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 345.522.400,00 | 340.570.550,00 | (4.951.850,00) | 98,57% | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03.0004 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 464.965.400,00 | 440.363.318,00 | (24.602.082,00) | 94,71% | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03.0004 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.771.838.200,00 | 2.673.489.389,00 | (98.348.811,00) | 96,45% | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03.0004 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.350.000.000,00 | 3.553.259.366,00 | (796.740.634,00) | 81,68% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.03* | | *PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA* | *39.195.825,00* | *39.165.225,00* | *(30.600,00)* | *99,92%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.03.2.01* | | *Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | *39.195.825,00* | *39.165.225,00* | *(30.600,00)* | *99,92%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.03.2.01.0007 | | *Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | *39.195.825,00* | *39.165.225,00* | *(30.600,00)* | *99,92%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.03.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.195.825,00 | 39.165.225,00 | (30.600,00) | 99,92% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.04* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* | *21.624.000,00* | *20.278.200,00* | *(1.345.800,00)* | *93,78%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.04.2.02* | | *Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif* | *21.624.000,00* | *20.278.200,00* | *(1.345.800,00)* | *93,78%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.04.2.02.0002* | | *Pengembangan Pendidikan* | *21.624.000,00* | *20.278.200,00* | *(1.345.800,00)* | *93,78%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.04.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.624.000,00 | 20.278.200,00 | (1.345.800,00) | 93,78% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.05* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF* | *1.277.545.600,00* | *1.222.994.968,00* | *(54.550.632,00)* | *95,73%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.05.2.01* | | *Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar* | *1.277.545.600,00* | *1.222.994.968,00* | *(54.550.632,00)* | *95,73%* | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.05.2.01.0008* | | *Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI* | *775.196.500,00* | *741.122.500,00* | *(34.074.000,00)* | *95,60%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 770.267.900,00 | 736.193.900,00 | (34.074.000,00) | 95,58% | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05.2.01.0008 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.928.600,00 | 4.928.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *3.26* | *3.26.0.00.0.00.01.0000* | *3.26.05.2.01.0009* | | *Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata* | *502.349.100,00* | *481.872.468,00* | *(20.476.632,00)* | *95,92%* | |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 502.349.100,00 | 481.872.468,00 | (20.476.632,00) | 95,92% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : DINAS PERTANIAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 384.000.000,00 | 343.030.963,00 | (210.299.360,00) | 45,23 | |
| | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 384.000.000,00 | 343.030.963,00 | (210.299.360,00) | 45,23 | |
| | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 164.000.000,00 | 69.823.000,00 | (94.177.000,00) | 42,57 | |
| | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 220.000.000,00 | 103.877.640,00 | (116.122.360,00) | 47,21 | |
| 3.27 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 3.27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 33.275.909.106,00 | 31.804.338.449,10 | (1.471.570.656,90) | 95,58% | |
| 3.27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 33.275.909.106,00 | 31.804.338.449,10 | (1.471.570.656,90) | 95,58% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | | DINAS PERTANIAN | 33.275.909.106,00 | 31.804.338.449,10 | (1.471.570.656,90) | 95,58% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.988.335.597,00 | 16.950.847.007,00 | (1.037.488.590,00) | 94,23% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 101.003.900,00 | 96.613.400,00 | (4.390.500,00) | 95,65% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31.000.900,00 | 29.627.200,00 | (1.373.700,00) | 95,57% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.000.900,00 | 29.627.200,00 | (1.373.700,00) | 95,57% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | 4.565.000,00 | (435.000,00) | 91,30% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.565.000,00 | (435.000,00) | 91,30% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.003.000,00 | 62.421.200,00 | (2.581.800,00) | 96,03% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.003.000,00 | 62.421.200,00 | (2.581.800,00) | 96,03% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.636.901.085,00 | 14.645.377.865,00 | (991.523.220,00) | 93,66% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.495.891.885,00 | 14.504.891.265,00 | (991.000.620,00) | 93,60% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 15.495.891.885,00 | 14.504.891.265,00 | (991.000.620,00) | 93,60% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 136.009.200,00 | 136.009.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 136.009.200,00 | 136.009.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | 4.477.400,00 | (522.600,00) | 89,55% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.477.400,00 | (522.600,00) | 89,55% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7.000.000,00 | 6.943.700,00 | (56.300,00) | 99,20% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.03.0005 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.000.000,00 | 6.943.700,00 | (56.300,00) | 99,20% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.03.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 6.943.700,00 | (56.300,00) | 99,20% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 309.149.880,00 | 288.102.163,00 | (21.047.717,00) | 93,19% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 4.994.200,00 | (5.800,00) | 99,88% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.994.200,00 | (5.800,00) | 99,88% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.000.500,00 | 48.738.500,00 | (6.262.000,00) | 88,61% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.000.500,00 | 48.738.500,00 | (6.262.000,00) | 88,61% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000,00 | 1.997.000,00 | (3.000,00) | 99,85% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.997.000,00 | (3.000,00) | 99,85% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.813.200,00 | 35.812.800,00 | (400,00) | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.813.200,00 | 35.812.800,00 | (400,00) | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 211.336.180,00 | 196.559.663,00 | (14.776.517,00) | 93,01% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 211.336.180,00 | 196.559.663,00 | (14.776.517,00) | 93,01% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14.000.000,00 | 13.980.000,00 | (20.000,00) | 99,86% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.000.000,00 | 13.980.000,00 | (20.000,00) | 99,86% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.000.000,00 | 13.980.000,00 | (20.000,00) | 99,86% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.349.692.632,00 | 1.332.537.320,00 | (17.155.312,00) | 98,73% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.705.700,00 | 32.462.228,00 | (7.243.472,00) | 81,76% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.705.700,00 | 32.462.228,00 | (7.243.472,00) | 81,76% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.306.986.932,00 | 1.297.075.092,00 | (9.911.840,00) | 99,24% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.306.986.932,00 | 1.297.075.092,00 | (9.911.840,00) | 99,24% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 570.588.100,00 | 567.292.559,00 | (3.295.541,00) | 99,42% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.588.100,00 | 58.312.831,00 | (2.275.269,00) | 96,24% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.588.100,00 | 58.312.831,00 | (2.275.269,00) | 96,24% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0003 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 500.000.000,00 | 498.979.728,00 | (1.020.272,00) | 99,80% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000,00 | 498.979.728,00 | (1.020.272,00) | 99,80% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.256.647.509,00 | 3.179.714.242,00 | (76.933.267,00) | 97,64% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 2.356.647.509,00 | 2.302.279.542,00 | (54.367.967,00) | 97,69% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0001 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1.840.647.509,00 | 1.797.637.742,00 | (43.009.767,00) | 97,66% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.840.647.509,00 | 1.797.637.742,00 | (43.009.767,00) | 97,66% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0002 | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 176.000.000,00 | 173.316.700,00 | (2.683.300,00) | 98,48% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 176.000.000,00 | 173.316.700,00 | (2.683.300,00) | 98,48% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0008 | | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 340.000.000,00 | 331.325.100,00 | (8.674.900,00) | 97,45% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 340.000.000,00 | 331.325.100,00 | (8.674.900,00) | 97,45% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 900.000.000,00 | 877.434.700,00 | (22.565.300,00) | 97,49% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.02.0003 | | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 900.000.000,00 | 877.434.700,00 | (22.565.300,00) | 97,49% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000,00 | 877.434.700,00 | (22.565.300,00) | 97,49% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 10.598.826.000,00 | 10.304.266.630,10 | (294.559.369,90) | 97,22% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | 710.000.000,00 | 423.315.430,00 | (286.684.570,00) | 59,62% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01.0003 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 425.000.000,00 | 138.382.700,00 | (286.617.300,00) | 32,56% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 425.000.000,00 | 138.382.700,00 | (286.617.300,00) | 32,56% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01.0005 | | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 285.000.000,00 | 284.932.730,00 | (67.270,00) | 99,98% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 285.000.000,00 | 284.932.730,00 | (67.270,00) | 99,98% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 9.888.826.000,00 | 9.880.951.200,10 | (7.874.799,90) | 99,92% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0003 | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 3.800.000.000,00 | 3.799.845.000,10 | (154.999,90) | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.800.000.000,00 | 3.799.845.000,10 | (154.999,90) | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0004 | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0008 | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 50.000.000,00 | 48.445.000,00 | (1.555.000,00) | 96,89% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0008 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000,00 | 48.445.000,00 | (1.555.000,00) | 96,89% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0009 | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0010 | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 5.298.826.000,00 | 5.292.661.200,00 | (6.164.800,00) | 99,88% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.298.826.000,00 | 5.292.661.200,00 | (6.164.800,00) | 99,88% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 305.000.000,00 | 299.141.120,00 | (5.858.880,00) | 98,08% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05.2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 305.000.000,00 | 299.141.120,00 | (5.858.880,00) | 98,08% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05.2.01.0001 | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 305.000.000,00 | 299.141.120,00 | (5.858.880,00) | 98,08% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 305.000.000,00 | 299.141.120,00 | (5.858.880,00) | 98,08% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06 | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 60.000.000,00 | 59.341.150,00 | (658.850,00) | 98,90% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06.2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 60.000.000,00 | 59.341.150,00 | (658.850,00) | 98,90% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06.2.01.0005 | | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | 60.000.000,00 | 59.341.150,00 | (658.850,00) | 98,90% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 59.341.150,00 | (658.850,00) | 98,90% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.067.100.000,00 | 1.011.028.300,00 | (56.071.700,00) | 94,75% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 1.067.100.000,00 | 1.011.028.300,00 | (56.071.700,00) | 94,75% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0001 | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 617.100.000,00 | 579.210.900,00 | (37.889.100,00) | 93,86% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 617.100.000,00 | 579.210.900,00 | (37.889.100,00) | 93,86% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0002 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 440.000.000,00 | 422.522.600,00 | (17.477.400,00) | 96,03% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 440.000.000,00 | 422.522.600,00 | (17.477.400,00) | 96,03% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0003 | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 10.000.000,00 | 9.294.800,00 | (705.200,00) | 92,95% | |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0003 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 9.294.800,00 | (705.200,00) | 92,95% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUSTARUDAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 700.000.000,00 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 | |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 700.000.000,00 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 | |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 700.000.000,00 | 192.109.003,00 | (507.890.997,00) | 27,44 | |
| 4.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *4.01* | | | | *UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN* | *27.445.588.098,00* | *26.251.306.390,00* | *(1.194.281.708,00)* | *95,65%* | |
| *4.01* | | | | *SEKRETARIAT DAERAH* | *27.445.588.098,00* | *26.251.306.390,00* | *(1.194.281.708,00)* | *95,65%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | | | *SEKRETARIAT DAERAH* | *27.445.588.098,00* | *26.251.306.390,00* | *(1.194.281.708,00)* | *95,65%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *23.422.112.198,00* | *22.276.251.637,00* | *(1.145.860.561,00)* | *95,11%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *72.752.750,00* | *70.605.450,00* | *(2.147.300,00)* | *97,05%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *6.324.000,00* | *6.113.500,00* | *(210.500,00)* | *96,67%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.324.000,00 | 6.113.500,00 | (210.500,00) | 96,67% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *5.000.000,00* | *4.769.100,00* | *(230.900,00)* | *95,38%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.769.100,00 | (230.900,00) | 95,38% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *5.000.000,00* | *4.618.000,00* | *(382.000,00)* | *92,36%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.618.000,00 | (382.000,00) | 92,36% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD* | *5.000.000,00* | *4.807.450,00* | *(192.550,00)* | *96,15%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.807.450,00 | (192.550,00) | 96,15% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *5.000.000,00* | *4.543.400,00* | *(456.600,00)* | *90,87%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.543.400,00 | (456.600,00) | 90,87% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *46.428.750,00* | *45.754.000,00* | *(674.750,00)* | *98,55%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.428.750,00 | 45.754.000,00 | (674.750,00) | 98,55% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *12.661.180.398,00* | *11.625.636.369,00* | *(1.035.544.029,00)* | *91,82%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *12.483.310.698,00* | *11.453.616.619,00* | *(1.029.694.079,00)* | *91,75%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.483.310.698,00 | 11.453.616.619,00 | (1.029.694.079,00) | 91,75% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *156.684.000,00* | *151.753.000,00* | *(4.931.000,00)* | *96,85%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 156.684.000,00 | 151.753.000,00 | (4.931.000,00) | 96,85% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.000.000,00* | *4.599.600,00* | *(400.400,00)* | *91,99%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.599.600,00 | (400.400,00) | 91,99% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.02.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *16.185.700,00* | *15.667.150,00* | *(518.550,00)* | *96,80%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.185.700,00 | 15.667.150,00 | (518.550,00) | 96,80% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.03* | | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | *33.928.800,00* | *32.911.900,00* | *(1.016.900,00)* | *97,00%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.03.0006* | | *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *33.928.800,00* | *32.911.900,00* | *(1.016.900,00)* | *97,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.03.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.928.800,00 | 32.911.900,00 | (1.016.900,00) | 97,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *3.285.000.000,00* | *3.271.991.228,00* | *(13.008.772,00)* | *99,60%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *80.000.000,00* | *79.997.700,00* | *(2.300,00)* | *100,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 79.997.700,00 | (2.300,00) | 100,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *200.000.000,00* | *199.989.400,00* | *(10.600,00)* | *99,99%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 199.989.400,00 | (10.600,00) | 99,99% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *80.000.000,00* | *79.994.000,00* | *(6.000,00)* | *99,99%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 79.994.000,00 | (6.000,00) | 99,99% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.06.0008* | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *1.605.000.000,00* | *1.603.537.000,00* | *(1.463.000,00)* | *99,91%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.605.000.000,00 | 1.603.537.000,00 | (1.463.000,00) | 99,91% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *1.320.000.000,00* | *1.308.473.128,00* | *(11.526.872,00)* | *99,13%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.320.000.000,00 | 1.308.473.128,00 | (11.526.872,00) | 99,13% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *221.623.999,00* | *211.850.000,00* | *(9.773.999,00)* | *95,59%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.07.0005* | | *Pengadaan Mebel* | *157.000.000,00* | *152.900.000,00* | *(4.100.000,00)* | *97,39%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.07.0005 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 157.000.000,00 | 152.900.000,00 | (4.100.000,00) | 97,39% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *64.623.999,00* | *58.950.000,00* | *(5.673.999,00)* | *91,22%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.07.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 9.500.000,00 | (2.500.000,00) | 79,17% | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.623.999,00 | 49.450.000,00 | (3.173.999,00) | 93,97% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *2.764.196.004,00* | *2.744.021.541,00* | *(20.174.463,00)* | *99,27%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *761.117.189,00* | *754.758.468,00* | *(6.358.721,00)* | *99,16%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 761.117.189,00 | 754.758.468,00 | (6.358.721,00) | 99,16% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.08.0003* | | *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *239.999.347,00* | *237.685.297,00* | *(2.314.050,00)* | *99,04%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 239.999.347,00 | 237.685.297,00 | (2.314.050,00) | 99,04% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *1.753.079.468,00* | *1.741.577.776,00* | *(11.501.692,00)* | *99,34%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.753.079.468,00 | 1.741.577.776,00 | (11.501.692,00) | 99,34% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *365.478.507,00* | *363.757.257,00* | *(1.721.250,00)* | *99,53%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *345.478.507,00* | *344.517.257,00* | *(961.250,00)* | *99,72%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 345.478.507,00 | 344.517.257,00 | (961.250,00) | 99,72% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *20.000.000,00* | *19.240.000,00* | *(760.000,00)* | *96,20%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.240.000,00 | (760.000,00) | 96,20% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.11* | | *Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | *501.323.399,00* | *501.323.399,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.11.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | *501.323.399,00* | *501.323.399,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.11.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 501.323.399,00 | 501.323.399,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.12* | | *Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah* | *3.241.459.141,00* | *3.190.655.485,00* | *(50.803.656,00)* | *98,43%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.12.0001* | | *Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah* | *2.459.085.341,00* | *2.428.074.196,00* | *(31.011.145,00)* | *98,74%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.12.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.459.085.341,00 | 2.428.074.196,00 | (31.011.145,00) | 98,74% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.12.0002* | | *Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah* | *782.373.800,00* | *762.581.289,00* | *(19.792.511,00)* | *97,47%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.12.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 782.373.800,00 | 762.581.289,00 | (19.792.511,00) | 97,47% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.13* | | *Penataan Organisasi* | *142.511.750,00* | *131.642.698,00* | *(10.869.052,00)* | *92,37%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.13.0001* | | *Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | *50.858.600,00* | *40.467.400,00* | *(10.391.200,00)* | *79,57%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.858.600,00 | 40.467.400,00 | (10.391.200,00) | 79,57% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.13.0002* | | *Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | *49.146.150,00* | *49.086.500,00* | *(59.650,00)* | *99,88%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.146.150,00 | 49.086.500,00 | (59.650,00) | 99,88% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.13.0003* | | *Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | *42.507.000,00* | *42.088.798,00* | *(418.202,00)* | *99,02%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.507.000,00 | 42.088.798,00 | (418.202,00) | 99,02% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.14* | | *Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan* | *132.657.450,00* | *131.856.310,00* | *(801.140,00)* | *99,40%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.14.0001* | | *Fasilitasi Keprotokolan* | *90.942.100,00* | *90.455.510,00* | *(486.590,00)* | *99,46%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.942.100,00 | 90.455.510,00 | (486.590,00) | 99,46% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.14.0002* | | *Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | *32.668.150,00* | *32.353.600,00* | *(314.550,00)* | *99,04%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.668.150,00 | 32.353.600,00 | (314.550,00) | 99,04% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.01.2.14.0003* | | *Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | *9.047.200,00* | *9.047.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.047.200,00 | 9.047.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02* | | *PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT* | *3.372.760.575,00* | *3.329.129.589,00* | *(43.630.986,00)* | *98,71%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.01* | | *Administrasi Tata Pemerintahan* | *511.325.500,00* | *506.630.799,00* | *(4.694.701,00)* | *99,08%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.01.0001* | | *Penataan Administrasi Pemerintahan* | *89.483.000,00* | *88.280.132,00* | *(1.202.868,00)* | *98,66%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.483.000,00 | 88.280.132,00 | (1.202.868,00) | 98,66% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.01.0003* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | *421.842.500,00* | *418.350.667,00* | *(3.491.833,00)* | *99,17%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 421.842.500,00 | 418.350.667,00 | (3.491.833,00) | 99,17% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.02* | | *Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat* | *2.101.294.950,00* | *2.068.575.347,00* | *(32.719.603,00)* | *98,44%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.02.0001* | | *Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | *651.295.100,00* | *637.601.700,00* | *(13.693.400,00)* | *97,90%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 651.295.100,00 | 637.601.700,00 | (13.693.400,00) | 97,90% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.02.0002* | | *Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial* | *1.320.000.000,00* | *1.305.000.000,00* | *(15.000.000,00)* | *98,86%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0002 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 760.000.000,00 | 760.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0002 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 560.000.000,00 | 545.000.000,00 | (15.000.000,00) | 97,32% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat* | *129.999.850,00* | *125.973.647,00* | *(4.026.203,00)* | *96,90%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.999.850,00 | 125.973.647,00 | (4.026.203,00) | 96,90% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.03* | | *Fasilitasi dan Koordinasi Hukum* | *760.140.125,00* | *753.923.443,00* | *(6.216.682,00)* | *99,18%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.03.0001* | | *Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah* | *336.875.875,00* | *333.511.513,00* | *(3.364.362,00)* | *99,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 336.875.875,00 | 333.511.513,00 | (3.364.362,00) | 99,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.03.0002* | | *Fasilitasi Bantuan Hukum* | *359.855.750,00* | *357.635.916,00* | *(2.219.834,00)* | *99,38%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 359.855.750,00 | 357.635.916,00 | (2.219.834,00) | 99,38% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.02.2.03.0003* | | *Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum* | *63.408.500,00* | *62.776.014,00* | *(632.486,00)* | *99,00%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.408.500,00 | 62.776.014,00 | (632.486,00) | 99,00% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03* | | *PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN* | *650.715.325,00* | *645.925.164,00* | *(4.790.161,00)* | *99,26%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.01* | | *Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian* | *145.293.500,00* | *142.454.376,00* | *(2.839.124,00)* | *98,05%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.01.0001* | | *Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | *47.783.550,00* | *47.058.200,00* | *(725.350,00)* | *98,48%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.783.550,00 | 47.058.200,00 | (725.350,00) | 98,48% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.01.0002* | | *Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | *97.509.950,00* | *95.396.176,00* | *(2.113.774,00)* | *97,83%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.509.950,00 | 95.396.176,00 | (2.113.774,00) | 97,83% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.02* | | *Pelaksanaan Administrasi Pembangunan* | *204.999.725,00* | *204.215.488,00* | *(784.237,00)* | *99,62%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.02.0001* | | *Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan* | *65.000.000,00* | *64.967.000,00* | *(33.000,00)* | *99,95%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.500.000,00 | 51.467.000,00 | (33.000,00) | 99,94% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.02.0002* | | *Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | *84.999.725,00* | *84.255.400,00* | *(744.325,00)* | *99,12%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.999.725,00 | 84.255.400,00 | (744.325,00) | 99,12% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.02.0003* | | *Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | *55.000.000,00* | *54.993.088,00* | *(6.912,00)* | *99,99%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.500.000,00 | 41.493.088,00 | (6.912,00) | 99,98% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.03* | | *Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | *300.422.100,00* | *299.255.300,00* | *(1.166.800,00)* | *99,61%* | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.03.0001* | | *Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | *168.099.750,00* | *167.351.800,00* | *(747.950,00)* | *99,56%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 129.880.000,00 | 129.860.000,00 | (20.000,00) | 99,98% | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.219.750,00 | 37.491.800,00 | (727.950,00) | 98,10% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.03.0002* | | *Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | *123.246.400,00* | *122.896.000,00* | *(350.400,00)* | *99,72%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.878.000,00 | 113.546.000,00 | (332.000,00) | 99,71% | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0002 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.368.400,00 | 9.350.000,00 | (18.400,00) | 99,80% | |
| *4.01* | *4.01.5.02.0.00.01.0000* | *4.01.03.2.03.0003* | | *Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | *9.075.950,00* | *9.007.500,00* | *(68.450,00)* | *99,25%* | |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.075.950,00 | 9.007.500,00 | (68.450,00) | 99,25% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *4.02* | | | | *UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN* | *42.670.413.012,00* | *40.875.877.594,00* | *(1.794.535.418,00)* | *95,79%* | |
| *4.02* | | | | *SEKRETARIAT DPRD* | *42.670.413.012,00* | *40.875.877.594,00* | *(1.794.535.418,00)* | *95,79%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | | | *SEKRETARIAT DPRD* | *42.670.413.012,00* | *40.875.877.594,00* | *(1.794.535.418,00)* | *95,79%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *26.585.295.912,00* | *25.849.516.418,00* | *(735.779.494,00)* | *97,23%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *213.326.000,00* | *212.648.000,00* | *(678.000,00)* | *99,68%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *4.920.000,00* | *4.920.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *4.560.000,00* | *4.523.000,00* | *(37.000,00)* | *99,19%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.560.000,00 | 4.523.000,00 | (37.000,00) | 99,19% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.296.000,00* | *3.755.000,00* | *(541.000,00)* | *87,41%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.296.000,00 | 3.755.000,00 | (541.000,00) | 87,41% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *199.550.000,00* | *199.450.000,00* | *(100.000,00)* | *99,95%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.550.000,00 | 199.450.000,00 | (100.000,00) | 99,95% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.843.601.089,00* | *2.742.237.216,00* | *(101.363.873,00)* | *96,44%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.741.775.889,00* | *2.653.175.616,00* | *(88.600.273,00)* | *96,77%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.741.775.889,00 | 2.653.175.616,00 | (88.600.273,00) | 96,77% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *97.249.200,00* | *84.515.600,00* | *(12.733.600,00)* | *86,91%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 88.249.200,00 | 75.515.600,00 | (12.733.600,00) | 85,57% | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.576.000,00* | *4.546.000,00* | *(30.000,00)* | *99,34%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.576.000,00 | 4.546.000,00 | (30.000,00) | 99,34% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.05* | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *133.612.000,00* | *115.087.000,00* | *(18.525.000,00)* | *86,14%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.05.0011* | | *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | *133.612.000,00* | *115.087.000,00* | *(18.525.000,00)* | *86,14%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.05.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.612.000,00 | 115.087.000,00 | (18.525.000,00) | 86,14% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *962.782.575,00* | *900.024.341,00* | *(62.758.234,00)* | *93,48%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *19.786.600,00* | *19.786.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.786.600,00 | 19.786.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *85.616.375,00* | *74.309.250,00* | *(11.307.125,00)* | *86,79%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.616.375,00 | 74.309.250,00 | (11.307.125,00) | 86,79% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *54.377.600,00* | *49.463.600,00* | *(4.914.000,00)* | *90,96%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.377.600,00 | 49.463.600,00 | (4.914.000,00) | 90,96% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *79.772.000,00* | *78.314.300,00* | *(1.457.700,00)* | *98,17%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.772.000,00 | 78.314.300,00 | (1.457.700,00) | 98,17% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06.0008* | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *78.000.000,00* | *36.007.000,00* | *(41.993.000,00)* | *46,16%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.000.000,00 | 36.007.000,00 | (41.993.000,00) | 46,16% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *645.230.000,00* | *642.143.591,00* | *(3.086.409,00)* | *99,52%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 645.230.000,00 | 642.143.591,00 | (3.086.409,00) | 99,52% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *56.410.000,00* | *56.315.000,00* | *(95.000,00)* | *99,83%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *56.410.000,00* | *56.315.000,00* | *(95.000,00)* | *99,83%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 56.410.000,00 | 56.315.000,00 | (95.000,00) | 99,83% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *601.331.736,00* | *523.214.171,00* | *(78.117.565,00)* | *87,01%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *11.730.000,00* | *10.884.000,00* | *(846.000,00)* | *92,79%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.730.000,00 | 10.884.000,00 | (846.000,00) | 92,79% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *60.296.400,00* | *52.728.781,00* | *(7.567.619,00)* | *87,45%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.296.400,00 | 52.728.781,00 | (7.567.619,00) | 87,45% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *529.305.336,00* | *459.601.390,00* | *(69.703.946,00)* | *86,83%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 529.305.336,00 | 459.601.390,00 | (69.703.946,00) | 86,83% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *421.550.200,00* | *415.823.863,00* | *(5.726.337,00)* | *98,64%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *354.718.000,00* | *352.256.663,00* | *(2.461.337,00)* | *99,31%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 354.718.000,00 | 352.256.663,00 | (2.461.337,00) | 99,31% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *44.311.900,00* | *44.096.900,00* | *(215.000,00)* | *99,51%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.311.900,00 | 44.096.900,00 | (215.000,00) | 99,51% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *22.520.300,00* | *19.470.300,00* | *(3.050.000,00)* | *86,46%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.520.300,00 | 19.470.300,00 | (3.050.000,00) | 86,46% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.15* | | *Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | *14.566.791.912,00* | *14.375.764.739,00* | *(191.027.173,00)* | *98,69%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.15.0001* | | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD* | *13.671.401.912,00* | *13.535.043.929,00* | *(136.357.983,00)* | *99,00%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.671.401.912,00 | 13.535.043.929,00 | (136.357.983,00) | 99,00% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.15.0002* | | *Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD* | *341.170.000,00* | *317.687.000,00* | *(23.483.000,00)* | *93,12%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 341.170.000,00 | 317.687.000,00 | (23.483.000,00) | 93,12% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.15.0003* | | *Pelaksanaan Medical Check Up DPRD* | *554.220.000,00* | *523.033.810,00* | *(31.186.190,00)* | *94,37%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 554.220.000,00 | 523.033.810,00 | (31.186.190,00) | 94,37% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.16* | | *Layanan Administrasi DPRD* | *6.785.890.400,00* | *6.508.402.088,00* | *(277.488.312,00)* | *95,91%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.16.0003* | | *Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | *5.184.085.000,00* | *5.183.983.060,00* | *(101.940,00)* | *100,00%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.16.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.184.085.000,00 | 5.183.983.060,00 | (101.940,00) | 100,00% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.01.2.16.0004* | | *Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD* | *1.601.805.400,00* | *1.324.419.028,00* | *(277.386.372,00)* | *82,68%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.16.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.583.865.400,00 | 1.306.549.028,00 | (277.316.372,00) | 82,49% | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.16.0004 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.940.000,00 | 17.870.000,00 | (70.000,00) | 99,61% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02* | | *PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD* | *16.085.117.100,00* | *15.026.361.176,00* | *(1.058.755.924,00)* | *93,42%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.01* | | *Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD* | *650.000.000,00* | *473.428.058,00* | *(176.571.942,00)* | *72,84%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.01.0002* | | *Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | *650.000.000,00* | *473.428.058,00* | *(176.571.942,00)* | *72,84%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000,00 | 473.428.058,00 | (176.571.942,00) | 72,84% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.02* | | *Pembahasan Kebijakan Anggaran* | *700.000.000,00* | *692.875.000,00* | *(7.125.000,00)* | *98,98%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.02.0003* | | *Pembahasan APBD* | *700.000.000,00* | *692.875.000,00* | *(7.125.000,00)* | *98,98%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000,00 | 692.875.000,00 | (7.125.000,00) | 98,98% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.03* | | *Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan* | *106.560.000,00* | *104.542.000,00* | *(2.018.000,00)* | *98,11%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.03.0007* | | *Pengawasan Penggunaan Anggaran* | *106.560.000,00* | *104.542.000,00* | *(2.018.000,00)* | *98,11%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.03.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.560.000,00 | 104.542.000,00 | (2.018.000,00) | 98,11% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.04* | | *Peningkatan Kapasitas DPRD* | *1.522.899.400,00* | *1.070.816.357,00* | *(452.083.043,00)* | *70,31%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.04.0001* | | *Orientasi DPRD* | *501.934.000,00* | *347.935.000,00* | *(153.999.000,00)* | *69,32%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 501.934.000,00 | 347.935.000,00 | (153.999.000,00) | 69,32% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.04.0002* | | *Pendalaman Tugas DPRD* | *681.035.000,00* | *407.314.841,00* | *(273.720.159,00)* | *59,81%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 681.035.000,00 | 407.314.841,00 | (273.720.159,00) | 59,81% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.04.0005* | | *Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi* | *240.029.925,00* | *227.741.516,00* | *(12.288.409,00)* | *94,88%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.029.925,00 | 227.741.516,00 | (12.288.409,00) | 94,88% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.04.0008* | | *Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | *99.900.475,00* | *87.825.000,00* | *(12.075.475,00)* | *87,91%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.900.475,00 | 87.825.000,00 | (12.075.475,00) | 87,91% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.05* | | *Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | *2.680.973.500,00* | *2.356.161.250,00* | *(324.812.250,00)* | *87,88%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.05.0001* | | *Kunjungan Kerja dalam Daerah* | *120.000.000,00* | *92.715.000,00* | *(27.285.000,00)* | *77,26%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.05.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 92.715.000,00 | (27.285.000,00) | 77,26% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.05.0003* | | *Pelaksanaan Reses* | *2.560.973.500,00* | *2.263.446.250,00* | *(297.527.250,00)* | *88,38%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.05.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.560.973.500,00 | 2.263.446.250,00 | (297.527.250,00) | 88,38% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.06* | | *Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD* | *202.295.000,00* | *131.321.600,00* | *(70.973.400,00)* | *64,92%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.06.0002* | | *Pengawasan Kode Etik DPRD* | *202.295.000,00* | *131.321.600,00* | *(70.973.400,00)* | *64,92%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 202.295.000,00 | 131.321.600,00 | (70.973.400,00) | 64,92% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.08* | | *Fasilitasi Tugas DPRD* | *10.222.389.200,00* | *10.197.216.911,00* | *(25.172.289,00)* | *99,75%* | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.08.0001* | | *Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | *9.176.906.000,00* | *9.173.062.044,00* | *(3.843.956,00)* | *99,96%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.176.906.000,00 | 9.173.062.044,00 | (3.843.956,00) | 99,96% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.08.0003* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | *700.000.000,00* | *697.845.667,00* | *(2.154.333,00)* | *99,69%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000,00 | 697.845.667,00 | (2.154.333,00) | 99,69% | |
| *4.02* | *4.02.0.00.0.00.01.0000* | *4.02.02.2.08.0004* | | *Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | *345.483.200,00* | *326.309.200,00* | *(19.174.000,00)* | *94,45%* | |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 345.483.200,00 | 326.309.200,00 | (19.174.000,00) | 94,45% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : NSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5.453.613.576,00 | 5.111.404.949,00 | (342.208.627,00) | 93,73% | |
| 5.01 | | | | PERENCANAAN | 5.413.758.576,00 | 5.079.511.449,00 | (334.247.127,00) | 93,83% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.413.758.576,00 | 5.079.511.449,00 | (334.247.127,00) | 93,83% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.382.596.401,00 | 4.086.156.458,00 | (296.439.943,00) | 93,24% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.537.600,00 | 5.943.200,00 | (3.594.400,00) | 62,31% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.040.000,00 | 1.663.500,00 | (1.376.500,00) | 54,72% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.040.000,00 | 1.663.500,00 | (1.376.500,00) | 54,72% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.004.600,00 | 29.700,00 | (1.974.900,00) | 1,48% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.004.600,00 | 29.700,00 | (1.974.900,00) | 1,48% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.493.000,00 | 4.250.000,00 | (243.000,00) | 94,59% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.493.000,00 | 4.250.000,00 | (243.000,00) | 94,59% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.928.697.935,00 | 3.677.104.764,00 | (251.593.171,00) | 93,60% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.874.718.535,00 | 3.625.076.664,00 | (249.641.871,00) | 93,56% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.874.718.535,00 | 3.625.076.664,00 | (249.641.871,00) | 93,56% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.979.200,00 | 51.979.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 51.979.200,00 | 51.979.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.200,00 | 48.900,00 | (1.951.300,00) | 2,44% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.200,00 | 48.900,00 | (1.951.300,00) | 2,44% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 189.104.500,00 | 178.502.677,00 | (10.601.823,00) | 94,39% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.096.900,00 | 3.094.000,00 | (2.900,00) | 99,91% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.096.900,00 | 3.094.000,00 | (2.900,00) | 99,91% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.938.700,00 | 10.572.700,00 | (3.366.000,00) | 75,85% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.938.700,00 | 10.572.700,00 | (3.366.000,00) | 75,85% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.897.000,00 | 2.745.000,00 | (152.000,00) | 94,75% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.897.000,00 | 2.745.000,00 | (152.000,00) | 94,75% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.089.200,00 | 9.066.100,00 | (3.023.100,00) | 74,99% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.089.200,00 | 9.066.100,00 | (3.023.100,00) | 74,99% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.956.700,00 | 9.959.000,00 | (997.700,00) | 90,89% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.956.700,00 | 9.959.000,00 | (997.700,00) | 90,89% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.126.000,00 | 143.065.877,00 | (3.060.123,00) | 97,91% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 146.126.000,00 | 143.065.877,00 | (3.060.123,00) | 97,91% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 221.604.716,00 | 193.946.232,00 | (27.658.484,00) | 87,52% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.088.000,00 | 1.817.500,00 | (270.500,00) | 87,05% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.088.000,00 | 1.817.500,00 | (270.500,00) | 87,05% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.105.600,00 | 41.456.800,00 | (8.648.800,00) | 82,74% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.105.600,00 | 41.456.800,00 | (8.648.800,00) | 82,74% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 169.411.116,00 | 150.671.932,00 | (18.739.184,00) | 88,94% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.411.116,00 | 150.671.932,00 | (18.739.184,00) | 88,94% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 33.651.650,00 | 30.659.585,00 | (2.992.065,00) | 91,11% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30.763.350,00 | 27.946.822,00 | (2.816.528,00) | 90,84% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.763.350,00 | 27.946.822,00 | (2.816.528,00) | 90,84% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.888.300,00 | 2.712.763,00 | (175.537,00) | 93,92% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.888.300,00 | 2.712.763,00 | (175.537,00) | 93,92% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02 | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 759.334.400,00 | 737.486.191,00 | (21.848.209,00) | 97,12% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 673.603.400,00 | 654.928.583,00 | (18.674.817,00) | 97,23% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0003 | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 28.924.200,00 | 26.361.200,00 | (2.563.000,00) | 91,14% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.924.200,00 | 26.361.200,00 | (2.563.000,00) | 91,14% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0004 | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 24.834.400,00 | 23.743.800,00 | (1.090.600,00) | 95,61% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.834.400,00 | 23.743.800,00 | (1.090.600,00) | 95,61% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0005 | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 197.655.800,00 | 190.390.183,00 | (7.265.617,00) | 96,32% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.655.800,00 | 190.390.183,00 | (7.265.617,00) | 96,32% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0007 | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 422.189.000,00 | 414.433.400,00 | (7.755.600,00) | 98,16% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 422.189.000,00 | 414.433.400,00 | (7.755.600,00) | 98,16% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.811.000,00 | 998.350,00 | (812.650,00) | 55,13% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.02.0001 | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.811.000,00 | 998.350,00 | (812.650,00) | 55,13% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.811.000,00 | 998.350,00 | (812.650,00) | 55,13% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 47.920.000,00 | 45.559.258,00 | (2.360.742,00) | 95,07% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03.0001 | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 37.920.000,00 | 37.704.458,00 | (215.542,00) | 99,43% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.920.000,00 | 37.704.458,00 | (215.542,00) | 99,43% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03.0003 | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 10.000.000,00 | 7.854.800,00 | (2.145.200,00) | 78,55% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 7.854.800,00 | (2.145.200,00) | 78,55% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.04 | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.04.0002 | | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.04.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03* | | *PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH* | *271.827.775,00* | *255.868.800,00* | *(15.958.975,00)* | *94,13%* | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01* | | *Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | *100.000.000,00* | *89.217.250,00* | *(10.782.750,00)* | *89,22%* | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01.0001* | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | *8.000.000,00* | *7.297.000,00* | *(703.000,00)* | *91,21%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 7.297.000,00 | (703.000,00) | 91,21% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01.0002* | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | *14.000.000,00* | *8.725.500,00* | *(5.274.500,00)* | *62,33%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | 8.725.500,00 | (5.274.500,00) | 62,33% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01.0003* | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | *8.000.000,00* | *6.822.800,00* | *(1.177.200,00)* | *85,29%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 6.822.800,00 | (1.177.200,00) | 85,29% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01.0005* | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | *30.000.000,00* | *29.085.000,00* | *(915.000,00)* | *96,95%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 29.085.000,00 | (915.000,00) | 96,95% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01.0006* | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | *30.000.000,00* | *27.755.500,00* | *(2.244.500,00)* | *92,52%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 27.755.500,00 | (2.244.500,00) | 92,52% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.01.0007* | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | *10.000.000,00* | *9.531.450,00* | *(468.550,00)* | *95,31%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.531.450,00 | (468.550,00) | 95,31% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.02* | | *Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* | *80.000.000,00* | *76.179.950,00* | *(3.820.050,00)* | *95,22%* | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.02.0001* | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | *44.320.200,00* | *41.920.900,00* | *(2.399.300,00)* | *94,59%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.320.200,00 | 41.920.900,00 | (2.399.300,00) | 94,59% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.02.0002* | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | *23.494.000,00* | *22.205.300,00* | *(1.288.700,00)* | *94,51%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.494.000,00 | 22.205.300,00 | (1.288.700,00) | 94,51% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | *12.185.800,00* | *12.053.750,00* | *(132.050,00)* | *98,92%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.185.800,00 | 12.053.750,00 | (132.050,00) | 98,92% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.03* | | *Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* | *91.827.775,00* | *90.471.600,00* | *(1.356.175,00)* | *98,52%* | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.03.0001* | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | *28.240.000,00* | *27.620.600,00* | *(619.400,00)* | *97,81%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.240.000,00 | 27.620.600,00 | (619.400,00) | 97,81% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.03.0002* | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | *14.949.900,00* | *14.862.400,00* | *(87.500,00)* | *99,41%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.949.900,00 | 14.862.400,00 | (87.500,00) | 99,41% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.03.0003* | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | *5.646.125,00* | *5.605.600,00* | *(40.525,00)* | *99,28%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.646.125,00 | 5.605.600,00 | (40.525,00) | 99,28% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.03.0005* | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | *28.078.000,00* | *27.823.900,00* | *(254.100,00)* | *99,10%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.078.000,00 | 27.823.900,00 | (254.100,00) | 99,10% | |
| *5.01* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.01.03.2.03.0006* | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | *14.913.750,00* | *14.559.100,00* | *(354.650,00)* | *97,62%* | |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.913.750,00 | 14.559.100,00 | (354.650,00) | 97,62% | |
| *5.05* | | | | *PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN* | *39.855.000,00* | *31.893.500,00* | *(7.961.500,00)* | *80,02%* | |
| *5.05* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | | | *BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH* | *39.855.000,00* | *31.893.500,00* | *(7.961.500,00)* | *80,02%* | |
| *5.05* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.05.02* | | *PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH* | *39.855.000,00* | *31.893.500,00* | *(7.961.500,00)* | *80,02%* | |
| *5.05* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.05.02.2.04* | | *Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | *39.855.000,00* | *31.893.500,00* | *(7.961.500,00)* | *80,02%* | |
| *5.05* | *5.01.5.05.0.00.01.0000* | *5.05.02.2.04.0003* | | *Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* | *39.855.000,00* | *31.893.500,00* | *(7.961.500,00)* | *80,02%* | |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.05.02.2.04.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.855.000,00 | 31.893.500,00 | (7.961.500,00) | 80,02% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *5.02* | | | | *UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN* | *288.384.067.508,00* | *271.924.529.582,90* | *(16.459.537.925,10)* | *94,29%* | |
| *5.02* | | | | *KEUANGAN* | *288.384.067.508,00* | *271.924.529.582,90* | *(16.459.537.925,10)* | *94,29%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | | | *BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH* | *288.384.067.508,00* | *271.924.529.582,90* | *(16.459.537.925,10)* | *94,29%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *6.565.517.342,00* | *5.633.735.668,00* | *(931.781.674,00)* | *85,81%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *196.553.000,00* | *193.175.300,00* | *(3.377.700,00)* | *98,28%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *196.553.000,00* | *193.175.300,00* | *(3.377.700,00)* | *98,28%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.553.000,00 | 193.175.300,00 | (3.377.700,00) | 98,28% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *5.076.608.832,00* | *4.211.396.031,00* | *(865.212.801,00)* | *82,96%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *4.617.476.132,00* | *3.754.102.631,00* | *(863.373.501,00)* | *81,30%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.617.476.132,00 | 3.754.102.631,00 | (863.373.501,00) | 81,30% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *453.133.200,00* | *451.600.200,00* | *(1.533.000,00)* | *99,66%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 453.133.200,00 | 451.600.200,00 | (1.533.000,00) | 99,66% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.999.500,00* | *5.693.200,00* | *(306.300,00)* | *94,89%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.999.500,00 | 5.693.200,00 | (306.300,00) | 94,89% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *591.902.005,00* | *568.587.543,00* | *(23.314.462,00)* | *96,06%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *27.811.300,00* | *27.811.300,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.811.300,00 | 27.811.300,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *81.839.925,00* | *67.237.600,00* | *(14.602.325,00)* | *82,16%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.839.925,00 | 67.237.600,00 | (14.602.325,00) | 82,16% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *33.568.680,00* | *33.568.680,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.568.680,00 | 33.568.680,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *121.268.300,00* | *121.253.100,00* | *(15.200,00)* | *99,99%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.268.300,00 | 121.253.100,00 | (15.200,00) | 99,99% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *14.050.800,00* | *6.360.000,00* | *(7.690.800,00)* | *45,26%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.050.800,00 | 6.360.000,00 | (7.690.800,00) | 45,26% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *313.363.000,00* | *312.356.863,00* | *(1.006.137,00)* | *99,68%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 313.363.000,00 | 312.356.863,00 | (1.006.137,00) | 99,68% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *29.843.000,00* | *26.470.000,00* | *(3.373.000,00)* | *88,70%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *29.843.000,00* | *26.470.000,00* | *(3.373.000,00)* | *88,70%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.07.0006 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.573.000,00 | 20.200.000,00 | (3.373.000,00) | 85,69% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *356.988.976,00* | *332.372.576,00* | *(24.616.400,00)* | *93,10%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *4.565.600,00* | *2.805.000,00* | *(1.760.600,00)* | *61,44%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.565.600,00 | 2.805.000,00 | (1.760.600,00) | 61,44% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *62.436.176,00* | *49.753.176,00* | *(12.683.000,00)* | *79,69%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.436.176,00 | 49.753.176,00 | (12.683.000,00) | 79,69% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *289.987.200,00* | *279.814.400,00* | *(10.172.800,00)* | *96,49%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 289.987.200,00 | 279.814.400,00 | (10.172.800,00) | 96,49% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *313.621.529,00* | *301.734.218,00* | *(11.887.311,00)* | *96,21%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *183.331.300,00* | *180.959.554,00* | *(2.371.746,00)* | *98,71%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 183.331.300,00 | 180.959.554,00 | (2.371.746,00) | 98,71% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *85.225.829,00* | *82.324.664,00* | *(2.901.165,00)* | *96,60%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.225.829,00 | 82.324.664,00 | (2.901.165,00) | 96,60% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *45.064.400,00* | *38.450.000,00* | *(6.614.400,00)* | *85,32%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.064.400,00 | 38.450.000,00 | (6.614.400,00) | 85,32% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02* | | *PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH* | *281.522.636.391,00* | *266.056.390.028,00* | *(15.466.246.363,00)* | *94,51%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01* | | *Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* | *1.297.227.000,00* | *1.279.506.190,00* | *(17.720.810,00)* | *98,63%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0001* | | *Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS* | *141.135.000,00* | *139.588.500,00* | *(1.546.500,00)* | *98,90%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 141.135.000,00 | 139.588.500,00 | (1.546.500,00) | 98,90% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | *155.604.000,00* | *151.824.990,00* | *(3.779.010,00)* | *97,57%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 155.604.000,00 | 151.824.990,00 | (3.779.010,00) | 97,57% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0003* | | *Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD* | *50.000.000,00* | *47.391.600,00* | *(2.608.400,00)* | *94,78%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 47.391.600,00 | (2.608.400,00) | 94,78% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0006* | | *Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD* | *50.000.000,00* | *46.998.600,00* | *(3.001.400,00)* | *94,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 46.998.600,00 | (3.001.400,00) | 94,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | *370.630.000,00* | *367.330.100,00* | *(3.299.900,00)* | *99,11%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 370.630.000,00 | 367.330.100,00 | (3.299.900,00) | 99,11% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0008* | | *Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | *375.058.000,00* | *371.956.500,00* | *(3.101.500,00)* | *99,17%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 375.058.000,00 | 371.956.500,00 | (3.101.500,00) | 99,17% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0009* | | *Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | *144.800.000,00* | *144.527.100,00* | *(272.900,00)* | *99,81%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.800.000,00 | 144.527.100,00 | (272.900,00) | 99,81% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.01.0011* | | *Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | *10.000.000,00* | *9.888.800,00* | *(111.200,00)* | *98,89%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.888.800,00 | (111.200,00) | 98,89% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.02* | | *Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah* | *151.211.720,00* | *147.145.200,00* | *(4.066.520,00)* | *97,31%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.02.0001* | | *Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | *10.010.520,00* | *8.079.000,00* | *(1.931.520,00)* | *80,71%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.010.520,00 | 8.079.000,00 | (1.931.520,00) | 80,71% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.02.0003* | | *Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | *40.000.000,00* | *39.438.600,00* | *(561.400,00)* | *98,60%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.438.600,00 | (561.400,00) | 98,60% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.02.0011* | | *Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | *101.201.200,00* | *99.627.600,00* | *(1.573.600,00)* | *98,45%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.201.200,00 | 99.627.600,00 | (1.573.600,00) | 98,45% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.03* | | *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | *220.116.500,00* | *207.425.300,00* | *(12.691.200,00)* | *94,23%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.03.0003* | | *Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | *30.117.000,00* | *19.320.200,00* | *(10.796.800,00)* | *64,15%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.117.000,00 | 19.320.200,00 | (10.796.800,00) | 64,15% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.03.0004* | | *Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* | *64.999.800,00* | *63.704.700,00* | *(1.295.100,00)* | *98,01%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.999.800,00 | 63.704.700,00 | (1.295.100,00) | 98,01% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.03.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | *124.999.700,00* | *124.400.400,00* | *(599.300,00)* | *99,52%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.999.700,00 | 124.400.400,00 | (599.300,00) | 99,52% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.04* | | *Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | *279.744.122.171,00* | *264.312.585.216,00* | *(15.431.536.955,00)* | *94,48%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.04.0004* | | *Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah* | *3.096.653.900,00* | *2.207.835.420,00* | *(888.818.480,00)* | *71,30%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04.0004 | 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | (888.818.480,00) | 71,30% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.04.0008* | | *Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | *273.116.310.900,00* | *258.649.802.576,00* | *(14.466.508.324,00)* | *94,70%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04.0008 | 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | (14.466.508.324,00) | 94,70% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.04.0009* | | *Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | *3.531.157.371,00* | *3.454.947.220,00* | *(76.210.151,00)* | *97,84%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04.0009 | 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | (76.210.151,00) | 97,84% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.05* | | *Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah* | *109.959.000,00* | *109.728.122,00* | *(230.878,00)* | *99,79%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.02.2.05.0002* | | *Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | *109.959.000,00* | *109.728.122,00* | *(230.878,00)* | *99,79%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.05.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.959.000,00 | 109.728.122,00 | (230.878,00) | 99,79% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03* | | *PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH* | *295.913.775,00* | *234.403.886,90* | *(61.509.888,10)* | *79,21%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01* | | *Pengelolaan Barang Milik Daerah* | *295.913.775,00* | *234.403.886,90* | *(61.509.888,10)* | *79,21%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01.0005* | | *Penatausahaan Barang Milik Daerah* | *37.499.900,00* | *18.900.600,00* | *(18.599.300,00)* | *50,40%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.499.900,00 | 18.900.600,00 | (18.599.300,00) | 50,40% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01.0007* | | *Pengamanan Barang Milik Daerah* | *67.978.050,00* | *67.216.108,90* | *(761.941,10)* | *98,88%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.978.050,00 | 67.216.108,90 | (761.941,10) | 98,88% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01.0009* | | *Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | *14.997.950,00* | *13.954.600,00* | *(1.043.350,00)* | *93,04%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.997.950,00 | 13.954.600,00 | (1.043.350,00) | 93,04% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01.0010* | | *Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | *79.278.000,00* | *71.308.000,00* | *(7.970.000,00)* | *89,95%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.278.000,00 | 71.308.000,00 | (7.970.000,00) | 89,95% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01.0012* | | *Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | *58.159.900,00* | *29.229.928,00* | *(28.929.972,00)* | *50,26%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0012 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.159.900,00 | 29.229.928,00 | (28.929.972,00) | 50,26% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.02.0000* | *5.02.03.2.01.0013* | | *Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | *37.999.975,00* | *33.794.650,00* | *(4.205.325,00)* | *88,93%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.999.975,00 | 33.794.650,00 | (4.205.325,00) | 88,93% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TAHPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.393.061.972.890,00 | 1.329.823.566.175,62 | (63.238.406.714,38) | 95,46 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 55.019.448.834,00 | 39.594.865.305,62 | (15.424.583.528,38) | 71,96 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.1.01 | Pajak Daerah | 30.050.000.000,00 | 27.663.738.746,01 | (2.386.261.253,99) | 92,05 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.211.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | (4.760.356.992,00) | 63,96 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.757.581.535,00 | 3.479.616.252,61 | (8.277.965.282,39) | 29,59 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.324.579.290.597,00 | 1.281.410.622.741,00 | (43.168.667.856,00) | 96,74 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.235.542.689.000,00 | 1.235.714.217.108,00 | 171.528.108,00 | 100,01 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 89.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | (43.340.195.964,00) | 51,32 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | (4.645.155.330,00) | 65,49 | |
| | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | (4.645.155.330,00) | 65,49 | |
| *5.02* | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *5.02* | | | | *UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN* | *4.993.064.126,00* | *4.709.170.602,00* | *(283.893.524,00)* | *94,31%* | |
| *5.02* | | | | *KEUANGAN* | *4.993.064.126,00* | *4.709.170.602,00* | *(283.893.524,00)* | *94,31%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | | | *BADAN PENDAPATAN DAERAH* | *4.993.064.126,00* | *4.709.170.602,00* | *(283.893.524,00)* | *94,31%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *4.191.064.126,00* | *3.925.279.947,00* | *(265.784.179,00)* | *93,66%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *8.475.000,00* | *8.423.000,00* | *(52.000,00)* | *99,39%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *5.475.000,00* | *5.423.000,00* | *(52.000,00)* | *99,05%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.475.000,00 | 5.423.000,00 | (52.000,00) | 99,05% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *3.534.542.394,00* | *3.376.183.581,00* | *(158.358.813,00)* | *95,52%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *3.403.035.594,00* | *3.244.676.781,00* | *(158.358.813,00)* | *95,35%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.403.035.594,00 | 3.244.676.781,00 | (158.358.813,00) | 95,35% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *131.506.800,00* | *131.506.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 131.506.800,00 | 131.506.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.04* | | *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah* | *3.000.000,00* | *2.425.000,00* | *(575.000,00)* | *80,83%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.04.0006* | | *Penetapan Wajib Retribusi Daerah* | *3.000.000,00* | *2.425.000,00* | *(575.000,00)* | *80,83%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.04.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.425.000,00 | (575.000,00) | 80,83% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *190.484.800,00* | *183.342.186,00* | *(7.142.614,00)* | *96,25%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *10.475.400,00* | *10.364.000,00* | *(111.400,00)* | *98,94%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.475.400,00 | 10.364.000,00 | (111.400,00) | 98,94% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *28.778.400,00* | *26.021.000,00* | *(2.757.400,00)* | *90,42%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.778.400,00 | 26.021.000,00 | (2.757.400,00) | 90,42% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *10.212.600,00* | *10.212.400,00* | *(200,00)* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.937.600,00 | 9.937.400,00 | (200,00) | 100,00% | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0003 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *15.402.400,00* | *15.402.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.402.400,00 | 15.402.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *125.616.000,00* | *121.342.386,00* | *(4.273.614,00)* | *96,60%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.616.000,00 | 121.342.386,00 | (4.273.614,00) | 96,60% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *5.571.200,00* | *5.571.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.07.0010* | | *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *5.571.200,00* | *5.571.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.07.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.571.200,00 | 5.571.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *373.502.232,00* | *297.040.350,00* | *(76.461.882,00)* | *79,53%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *31.680.000,00* | *22.040.350,00* | *(9.639.650,00)* | *69,57%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.680.000,00 | 22.040.350,00 | (9.639.650,00) | 69,57% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *338.822.232,00* | *272.000.000,00* | *(66.822.232,00)* | *80,28%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 338.822.232,00 | 272.000.000,00 | (66.822.232,00) | 80,28% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *75.488.500,00* | *52.294.630,00* | *(23.193.870,00)* | *69,27%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *39.637.400,00* | *37.651.130,00* | *(1.986.270,00)* | *94,99%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.637.400,00 | 37.651.130,00 | (1.986.270,00) | 94,99% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *21.207.600,00* | *0,00* | *(21.207.600,00)* | *0,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.207.600,00 | 0,00 | (21.207.600,00) | 0,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *14.643.500,00* | *14.643.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.643.500,00 | 12.643.500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0010 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04* | | *PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH* | *802.000.000,00* | *783.890.655,00* | *(18.109.345,00)* | *97,74%* | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01* | | *Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah* | *802.000.000,00* | *783.890.655,00* | *(18.109.345,00)* | *97,74%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0001* | | *Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah* | *33.575.000,00* | *33.116.118,00* | *(458.882,00)* | *98,63%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.575.000,00 | 33.116.118,00 | (458.882,00) | 98,63% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0002* | | *Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah* | *58.483.400,00* | *58.266.787,00* | *(216.613,00)* | *99,63%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.483.400,00 | 58.266.787,00 | (216.613,00) | 99,63% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0003* | | *Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | *26.167.600,00* | *25.035.900,00* | *(1.131.700,00)* | *95,68%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.167.600,00 | 25.035.900,00 | (1.131.700,00) | 95,68% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0004* | | *Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | *40.000.000,00* | *38.564.250,00* | *(1.435.750,00)* | *96,41%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 38.564.250,00 | (1.435.750,00) | 96,41% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0005* | | *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah* | *110.000.000,00* | *107.808.000,00* | *(2.192.000,00)* | *98,01%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000,00 | 107.808.000,00 | (2.192.000,00) | 98,01% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0007* | | *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)* | *60.000.000,00* | *58.534.750,00* | *(1.465.250,00)* | *97,56%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 58.534.750,00 | (1.465.250,00) | 97,56% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0008* | | *Penetapan Wajib Pajak Daerah* | *156.000.000,00* | *154.244.500,00* | *(1.755.500,00)* | *98,87%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 156.000.000,00 | 154.244.500,00 | (1.755.500,00) | 98,87% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0009* | | *Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | *34.814.400,00* | *33.699.200,00* | *(1.115.200,00)* | *96,80%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.814.400,00 | 33.699.200,00 | (1.115.200,00) | 96,80% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0010* | | *Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah* | *32.764.600,00* | *32.144.700,00* | *(619.900,00)* | *98,11%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.764.600,00 | 32.144.700,00 | (619.900,00) | 98,11% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0011* | | *Penagihan Pajak Daerah* | *90.537.200,00* | *88.847.250,00* | *(1.689.950,00)* | *98,13%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.537.200,00 | 88.847.250,00 | (1.689.950,00) | 98,13% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0013* | | *Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah* | *82.685.600,00* | *80.333.300,00* | *(2.352.300,00)* | *97,16%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0013 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.685.600,00 | 80.333.300,00 | (2.352.300,00) | 97,16% | |
| *5.02* | *5.02.0.00.0.00.03.0000* | *5.02.04.2.01.0014* | | *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* | *76.972.200,00* | *73.295.900,00* | *(3.676.300,00)* | *95,22%* | |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0014 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.972.200,00 | 73.295.900,00 | (3.676.300,00) | 95,22% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TAMPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *5.03* | | | | *UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN* | *3.914.049.023,00* | *3.730.197.431,00* | *(183.851.592,00)* | *95,30%* | |
| *5.03* | | | | *KEPEGAWAIAN* | *3.881.538.123,00* | *3.698.452.531,00* | *(183.085.592,00)* | *95,28%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | | | *BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA* | *3.881.538.123,00* | *3.698.452.531,00* | *(183.085.592,00)* | *95,28%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.440.909.973,00* | *3.299.170.715,00* | *(141.739.258,00)* | *95,88%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *15.997.700,00* | *14.998.400,00* | *(999.300,00)* | *93,75%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *4.999.900,00* | *4.604.400,00* | *(395.500,00)* | *92,09%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.900,00 | 4.604.400,00 | (395.500,00) | 92,09% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.999.800,00* | *4.396.000,00* | *(603.800,00)* | *87,92%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.800,00 | 4.396.000,00 | (603.800,00) | 87,92% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *5.998.000,00* | *5.998.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.692.964.984,00* | *2.594.225.440,00* | *(98.739.544,00)* | *96,33%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.642.209.834,00* | *2.543.964.640,00* | *(98.245.194,00)* | *96,28%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.642.209.834,00 | 2.543.964.640,00 | (98.245.194,00) | 96,28% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *44.755.200,00* | *44.755.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 44.755.200,00 | 44.755.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.999.950,00* | *4.602.400,00* | *(397.550,00)* | *92,05%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.950,00 | 4.602.400,00 | (397.550,00) | 92,05% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.02.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *1.000.000,00* | *903.200,00* | *(96.800,00)* | *90,32%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 903.200,00 | (96.800,00) | 90,32% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.03* | | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | *3.000.100,00* | *2.813.100,00* | *(187.000,00)* | *93,77%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.03.0006* | | *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *3.000.100,00* | *2.813.100,00* | *(187.000,00)* | *93,77%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.03.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.100,00 | 2.813.100,00 | (187.000,00) | 93,77% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *183.480.925,00* | *162.812.800,00* | *(20.668.125,00)* | *88,74%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *7.429.300,00* | *7.428.000,00* | *(1.300,00)* | *99,98%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.429.300,00 | 7.428.000,00 | (1.300,00) | 99,98% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *37.167.825,00* | *28.934.800,00* | *(8.233.025,00)* | *77,85%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.167.825,00 | 28.934.800,00 | (8.233.025,00) | 77,85% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *12.324.400,00* | *12.322.000,00* | *(2.400,00)* | *99,98%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.324.400,00 | 12.322.000,00 | (2.400,00) | 99,98% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *22.386.400,00* | *22.386.200,00* | *(200,00)* | *100,00%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.386.400,00 | 22.386.200,00 | (200,00) | 100,00% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06.0008* | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *3.970.000,00* | *2.992.000,00* | *(978.000,00)* | *75,37%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.970.000,00 | 2.992.000,00 | (978.000,00) | 75,37% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *100.203.000,00* | *88.749.800,00* | *(11.453.200,00)* | *88,57%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.203.000,00 | 88.749.800,00 | (11.453.200,00) | 88,57% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *412.510.000,00* | *406.845.000,00* | *(5.665.000,00)* | *98,63%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *412.510.000,00* | *406.845.000,00* | *(5.665.000,00)* | *98,63%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.07.0006 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 411.100.000,00 | 405.435.000,00 | (5.665.000,00) | 98,62% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *85.924.764,00* | *80.038.449,00* | *(5.886.315,00)* | *93,15%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *700.000,00* | *700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *30.620.000,00* | *24.971.232,00* | *(5.648.768,00)* | *81,55%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.620.000,00 | 24.971.232,00 | (5.648.768,00) | 81,55% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *54.367.217,00* | *(237.547,00)* | *99,56%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 54.367.217,00 | (237.547,00) | 99,56% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *47.031.500,00* | *37.437.526,00* | *(9.593.974,00)* | *79,60%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *34.655.100,00* | *33.252.526,00* | *(1.402.574,00)* | *95,95%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.655.100,00 | 33.252.526,00 | (1.402.574,00) | 95,95% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *9.477.800,00* | *2.000.000,00* | *(7.477.800,00)* | *21,10%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.477.800,00 | 2.000.000,00 | (7.477.800,00) | 21,10% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *2.898.600,00* | *2.185.000,00* | *(713.600,00)* | *75,38%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09.0009 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.898.600,00 | 2.185.000,00 | (713.600,00) | 75,38% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02* | | *PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH* | *440.628.150,00* | *399.281.816,00* | *(41.346.334,00)* | *90,62%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01* | | *Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN* | *107.907.775,00* | *94.319.440,00* | *(13.588.335,00)* | *87,41%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01.0002* | | *Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | *9.999.800,00* | *8.760.200,00* | *(1.239.600,00)* | *87,60%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.800,00 | 8.760.200,00 | (1.239.600,00) | 87,60% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01.0003* | | *Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | *29.998.600,00* | *29.088.340,00* | *(910.260,00)* | *96,97%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.998.600,00 | 29.088.340,00 | (910.260,00) | 96,97% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01.0006* | | *Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | *9.609.900,00* | *8.183.000,00* | *(1.426.900,00)* | *85,15%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.609.900,00 | 8.183.000,00 | (1.426.900,00) | 85,15% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01.0008* | | *Fasilitasi Lembaga Profesi ASN* | *39.999.700,00* | *39.459.200,00* | *(540.500,00)* | *98,65%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.700,00 | 9.459.200,00 | (540.500,00) | 94,59% | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0008 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01.0010* | | *Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | *8.300.000,00* | *7.805.000,00* | *(495.000,00)* | *94,04%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.300.000,00 | 7.805.000,00 | (495.000,00) | 94,04% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.01.0011* | | *Pengelolaan Data Kepegawaian* | *9.999.775,00* | *1.023.700,00* | *(8.976.075,00)* | *10,24%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.775,00 | 1.023.700,00 | (8.976.075,00) | 10,24% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.02* | | *Mutasi dan Promosi ASN* | *37.389.850,00* | *35.649.476,00* | *(1.740.374,00)* | *95,35%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.02.0001* | | *Pengelolaan Mutasi ASN* | *9.975.300,00* | *9.548.376,00* | *(426.924,00)* | *95,72%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.975.300,00 | 9.548.376,00 | (426.924,00) | 95,72% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.02.0002* | | *Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | *20.000.100,00* | *19.225.300,00* | *(774.800,00)* | *96,13%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.100,00 | 19.225.300,00 | (774.800,00) | 96,13% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.02.0003* | | *Pengelolaan Promosi ASN* | *7.414.450,00* | *6.875.800,00* | *(538.650,00)* | *92,74%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.414.450,00 | 6.875.800,00 | (538.650,00) | 92,74% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.03* | | *Pengembangan Kompetensi ASN* | *231.708.225,00* | *216.850.600,00* | *(14.857.625,00)* | *93,59%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.03.0001* | | *Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN* | *78.319.125,00* | *67.145.600,00* | *(11.173.525,00)* | *85,73%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.319.125,00 | 67.145.600,00 | (11.173.525,00) | 85,73% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.03.0004* | | *Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN* | *72.900.400,00* | *72.505.000,00* | *(395.400,00)* | *99,46%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.900.400,00 | 72.505.000,00 | (395.400,00) | 99,46% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.03.0006* | | *Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN* | *80.488.700,00* | *77.200.000,00* | *(3.288.700,00)* | *95,91%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.488.700,00 | 77.200.000,00 | (3.288.700,00) | 95,91% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.04* | | *Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | *63.622.300,00* | *52.462.300,00* | *(11.160.000,00)* | *82,46%* | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.04.0002* | | *Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | *35.622.050,00* | *32.204.100,00* | *(3.417.950,00)* | *90,40%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.04.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.622.050,00 | 32.204.100,00 | (3.417.950,00) | 90,40% | |
| *5.03* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.03.02.2.04.0008* | | *Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | *28.000.250,00* | *20.258.200,00* | *(7.742.050,00)* | *72,35%* | |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.04.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.250,00 | 20.258.200,00 | (7.742.050,00) | 72,35% | |
| *5.04* | | | | *PENDIDIKAN DAN PELATIHAN* | *32.510.900,00* | *31.744.900,00* | *(766.000,00)* | *97,64%* | |
| *5.04* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | | | *BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA* | *32.510.900,00* | *31.744.900,00* | *(766.000,00)* | *97,64%* | |
| *5.04* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.04.02* | | *PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA* | *32.510.900,00* | *31.744.900,00* | *(766.000,00)* | *97,64%* | |
| *5.04* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.04.02.2.02* | | *Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional* | *32.510.900,00* | *31.744.900,00* | *(766.000,00)* | *97,64%* | |
| *5.04* | *5.03.5.04.0.00.01.0000* | *5.04.02.2.02.0007* | | *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | *32.510.900,00* | *31.744.900,00* | *(766.000,00)* | *97,64%* | |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.04.02.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.510.900,00 | 31.744.900,00 | (766.000,00) | 97,64% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *6.01* | | | | *UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN* | *9.562.169.225,00* | *9.185.744.917,00* | *(376.424.308,00)* | *96,06%* | |
| *6.01* | | | | *INSPEKTORAT DAERAH* | *9.562.169.225,00* | *9.185.744.917,00* | *(376.424.308,00)* | *96,06%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | | | *INSPEKTORAT* | *9.562.169.225,00* | *9.185.744.917,00* | *(376.424.308,00)* | *96,06%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *7.811.565.225,00* | *7.489.780.717,00* | *(321.784.508,00)* | *95,88%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *6.191.894.825,00* | *5.955.364.343,00* | *(236.530.482,00)* | *96,18%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *6.138.341.225,00* | *5.901.810.743,00* | *(236.530.482,00)* | *96,15%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.138.341.225,00 | 5.901.810.743,00 | (236.530.482,00) | 96,15% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *53.553.600,00* | *53.553.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 53.553.600,00 | 53.553.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.05* | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *448.668.000,00* | *400.098.332,00* | *(48.569.668,00)* | *89,17%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.05.0009* | | *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* | *448.668.000,00* | *400.098.332,00* | *(48.569.668,00)* | *89,17%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.05.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 448.668.000,00 | 400.098.332,00 | (48.569.668,00) | 89,17% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *600.274.800,00* | *587.513.166,00* | *(12.761.634,00)* | *97,87%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *5.968.900,00* | *5.968.900,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.968.900,00 | 5.968.900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *75.695.300,00* | *72.580.700,00* | *(3.114.600,00)* | *95,89%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.695.300,00 | 72.580.700,00 | (3.114.600,00) | 95,89% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *15.069.000,00* | *15.069.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.069.000,00 | 15.069.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *58.691.600,00* | *50.234.400,00* | *(8.457.200,00)* | *85,59%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.691.600,00 | 50.234.400,00 | (8.457.200,00) | 85,59% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *18.360.000,00* | *17.290.000,00* | *(1.070.000,00)* | *94,17%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.360.000,00 | 17.290.000,00 | (1.070.000,00) | 94,17% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *426.490.000,00* | *426.370.166,00* | *(119.834,00)* | *99,97%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 426.490.000,00 | 426.370.166,00 | (119.834,00) | 99,97% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *122.696.800,00* | *120.024.517,00* | *(2.672.283,00)* | *97,82%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *63.200.000,00* | *60.527.717,00* | *(2.672.283,00)* | *95,77%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.200.000,00 | 60.527.717,00 | (2.672.283,00) | 95,77% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.496.800,00* | *54.496.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 54.496.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *448.030.800,00* | *426.780.359,00* | *(21.250.441,00)* | *95,26%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *101.366.800,00* | *98.930.775,00* | *(2.436.025,00)* | *97,60%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.366.800,00 | 98.930.775,00 | (2.436.025,00) | 97,60% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *294.822.000,00* | *290.960.834,00* | *(3.861.166,00)* | *98,69%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 294.822.000,00 | 290.960.834,00 | (3.861.166,00) | 98,69% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *44.500.000,00* | *31.188.750,00* | *(13.311.250,00)* | *70,09%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.500.000,00 | 31.188.750,00 | (13.311.250,00) | 70,09% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.01.2.09.0011* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *7.342.000,00* | *5.700.000,00* | *(1.642.000,00)* | *77,64%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.342.000,00 | 5.700.000,00 | (1.642.000,00) | 77,64% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN* | *1.494.630.000,00* | *1.457.979.300,00* | *(36.650.700,00)* | *97,55%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.01* | | *Penyelenggaraan Pengawasan Internal* | *414.630.000,00* | *414.624.300,00* | *(5.700,00)* | *100,00%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.01.0001* | | *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | *59.960.000,00* | *59.960.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.960.000,00 | 59.960.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.01.0002* | | *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | *63.545.000,00* | *63.545.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.545.000,00 | 63.545.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.01.0005* | | *Pengawasan Desa* | *141.125.000,00* | *141.125.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 141.125.000,00 | 141.125.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.01.0007* | | *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | *150.000.000,00* | *149.994.300,00* | *(5.700,00)* | *100,00%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 149.994.300,00 | (5.700,00) | 100,00% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.02* | | *Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | *1.080.000.000,00* | *1.043.355.000,00* | *(36.645.000,00)* | *96,61%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.02.2.02.0002* | | *Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | *1.080.000.000,00* | *1.043.355.000,00* | *(36.645.000,00)* | *96,61%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.080.000.000,00 | 1.043.355.000,00 | (36.645.000,00) | 96,61% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.03* | | *PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI* | *255.974.000,00* | *237.984.900,00* | *(17.989.100,00)* | *92,97%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.03.2.02* | | *Pendampingan dan Asistensi* | *255.974.000,00* | *237.984.900,00* | *(17.989.100,00)* | *92,97%* | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.03.2.02.0001* | | *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | *5.974.000,00* | *5.961.800,00* | *(12.200,00)* | *99,80%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.974.000,00 | 5.961.800,00 | (12.200,00) | 99,80% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.03.2.02.0002* | | *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | *100.000.000,00* | *99.970.400,00* | *(29.600,00)* | *99,97%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 99.970.400,00 | (29.600,00) | 99,97% | |
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.03.2.02.0003* | | *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | *50.000.000,00* | *45.541.300,00* | *(4.458.700,00)* | *91,08%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 45.541.300,00 | (4.458.700,00) | 91,08% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6.01* | *6.01.0.00.0.00.01.0000* | *6.01.03.2.02.0004* | | *Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | *100.000.000,00* | *86.511.400,00* | *(13.488.600,00)* | *86,51%* | |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 86.511.400,00 | (13.488.600,00) | 86,51% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 519.295.687,00 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 | |
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 519.295.687,00 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 | |
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 519.295.687,00 | 51.724.622,03 | (467.571.064,97) | 9,96 | |
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *8.127.441.690,00* | *7.895.565.873,46* | *(231.875.816,54)* | *97,15%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *8.127.441.690,00* | *7.895.565.873,46* | *(231.875.816,54)* | *97,15%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN TARUTUNG* | *6.641.514.703,00* | *6.483.899.800,00* | *(157.614.903,00)* | *97,63%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *6.574.313.303,00* | *6.420.006.600,00* | *(154.306.703,00)* | *97,65%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *39.662.600,00* | *38.790.400,00* | *(872.200,00)* | *97,80%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.831.600,00* | *1.979.400,00* | *(852.200,00)* | *69,90%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.831.600,00 | 1.979.400,00 | (852.200,00) | 69,90% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *36.831.000,00* | *36.811.000,00* | *(20.000,00)* | *99,95%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.831.000,00 | 36.811.000,00 | (20.000,00) | 99,95% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *6.233.572.751,00* | *6.116.809.178,00* | *(116.763.573,00)* | *98,13%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *6.188.766.951,00* | *6.072.102.578,00* | *(116.664.373,00)* | *98,11%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.188.766.951,00 | 6.072.102.578,00 | (116.664.373,00) | 98,11% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *41.775.600,00* | *41.775.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 41.775.600,00 | 41.775.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *3.030.200,00* | *2.931.000,00* | *(99.200,00)* | *96,73%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.030.200,00 | 2.931.000,00 | (99.200,00) | 96,73% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *133.248.050,00* | *119.586.800,00* | *(13.661.250,00)* | *89,75%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *8.834.100,00* | *8.826.500,00* | *(7.600,00)* | *99,91%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.834.100,00 | 8.826.500,00 | (7.600,00) | 99,91% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *48.102.550,00* | *34.670.500,00* | *(13.432.050,00)* | *72,08%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.102.550,00 | 34.670.500,00 | (13.432.050,00) | 72,08% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *16.330.000,00* | *16.209.400,00* | *(120.600,00)* | *99,26%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.330.000,00 | 16.209.400,00 | (120.600,00) | 99,26% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *36.371.400,00* | *36.371.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.371.400,00 | 36.371.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *23.610.000,00* | *23.509.000,00* | *(101.000,00)* | *99,57%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.610.000,00 | 23.509.000,00 | (101.000,00) | 99,57% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *84.520.752,00* | *62.788.737,00* | *(21.732.015,00)* | *74,29%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *860.000,00* | *860.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *46.854.400,00* | *25.928.737,00* | *(20.925.663,00)* | *55,34%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.854.400,00 | 25.928.737,00 | (20.925.663,00) | 55,34% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *36.806.352,00* | *36.000.000,00* | *(806.352,00)* | *97,81%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.806.352,00 | 36.000.000,00 | (806.352,00) | 97,81% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *83.309.150,00* | *82.031.485,00* | *(1.277.665,00)* | *98,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.09.0002* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | *61.837.350,00* | *60.628.485,00* | *(1.208.865,00)* | *98,05%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.09.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.837.350,00 | 60.628.485,00 | (1.208.865,00) | 98,05% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *21.471.800,00* | *21.403.000,00* | *(68.800,00)* | *99,68%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.471.800,00 | 21.403.000,00 | (68.800,00) | 99,68% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *8.765.000,00* | *7.970.500,00* | *(794.500,00)* | *90,94%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *8.765.000,00* | *7.970.500,00* | *(794.500,00)* | *90,94%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *8.765.000,00* | *7.970.500,00* | *(794.500,00)* | *90,94%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.765.000,00 | 7.970.500,00 | (794.500,00) | 90,94% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *21.837.800,00* | *21.752.600,00* | *(85.200,00)* | *99,61%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *21.837.800,00* | *21.752.600,00* | *(85.200,00)* | *99,61%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *21.837.800,00* | *21.752.600,00* | *(85.200,00)* | *99,61%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.837.800,00 | 21.752.600,00 | (85.200,00) | 99,61% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *4.999.700,00* | *4.861.500,00* | *(138.200,00)* | *97,24%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.04.2.02* | | *Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | *4.999.700,00* | *4.861.500,00* | *(138.200,00)* | *97,24%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.04.2.02.0001* | | *Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | *4.999.700,00* | *4.861.500,00* | *(138.200,00)* | *97,24%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.04.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.700,00 | 4.861.500,00 | (138.200,00) | 97,24% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *26.599.850,00* | *25.925.800,00* | *(674.050,00)* | *97,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *26.599.850,00* | *25.925.800,00* | *(674.050,00)* | *97,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.05.2.01.0002* | | *Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | *4.999.850,00* | *4.325.800,00* | *(674.050,00)* | *86,52%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.05.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.850,00 | 4.325.800,00 | (674.050,00) | 86,52% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *4.999.050,00* | *3.382.800,00* | *(1.616.250,00)* | *67,67%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *4.999.050,00* | *3.382.800,00* | *(1.616.250,00)* | *67,67%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0000* | *7.01.06.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *4.999.050,00* | *3.382.800,00* | *(1.616.250,00)* | *67,67%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.050,00 | 3.382.800,00 | (1.616.250,00) | 67,67% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0001* | | | *KELURAHAN HUTATORUAN V* | *200.000.000,00* | *190.963.100,00* | *(9.036.900,00)* | *95,48%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0001* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *200.000.000,00* | *190.963.100,00* | *(9.036.900,00)* | *95,48%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0001* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *200.000.000,00* | *190.963.100,00* | *(9.036.900,00)* | *95,48%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0001* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *5.000.000,00* | *4.767.500,00* | *(232.500,00)* | *95,35%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.767.500,00 | (232.500,00) | 95,35% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0001* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *101.069.600,00* | *96.972.000,00* | *(4.097.600,00)* | *95,95%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.710.000,00 | 0,00 | (3.710.000,00) | 0,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.359.600,00 | 96.972.000,00 | (387.600,00) | 99,60% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0001* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *93.930.400,00* | *89.223.600,00* | *(4.706.800,00)* | *94,99%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.548.000,00 | 10.548.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.382.400,00 | 78.675.600,00 | (4.706.800,00) | 94,36% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0002* | | | *KELURAHAN HUTATORUAN VI* | *191.592.550,00* | *176.630.014,00* | *(14.962.536,00)* | *92,19%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0002* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *191.592.550,00* | *176.630.014,00* | *(14.962.536,00)* | *92,19%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0002* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *191.592.550,00* | *176.630.014,00* | *(14.962.536,00)* | *92,19%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0002* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *5.007.550,00* | *4.811.025,00* | *(196.525,00)* | *96,08%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.007.550,00 | 4.811.025,00 | (196.525,00) | 96,08% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0002* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *85.117.400,00* | *82.835.000,00* | *(2.282.400,00)* | *97,32%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.780.000,00 | 2.730.000,00 | (2.050.000,00) | 57,11% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.337.400,00 | 80.105.000,00 | (232.400,00) | 99,71% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0002* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *101.467.600,00* | *88.983.989,00* | *(12.483.611,00)* | *87,70%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.548.000,00 | 10.548.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.919.600,00 | 78.435.989,00 | (12.483.611,00) | 86,27% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0003* | | | *KELURAHAN HUTATORUAN VII* | *292.350.262,00* | *281.389.225,00* | *(10.961.037,00)* | *96,25%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0003* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *292.350.262,00* | *281.389.225,00* | *(10.961.037,00)* | *96,25%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0003* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *292.350.262,00* | *281.389.225,00* | *(10.961.037,00)* | *96,25%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0003* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *5.000.000,00* | *3.908.400,00* | *(1.091.600,00)* | *78,17%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 3.908.400,00 | (1.091.600,00) | 78,17% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0003* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *170.750.062,00* | *167.398.700,00* | *(3.351.362,00)* | *98,04%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.253.256,00 | 7.268.700,00 | (2.984.556,00) | 70,89% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 155.096.806,00 | 154.730.000,00 | (366.806,00) | 99,76% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0003* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *116.600.200,00* | *110.082.125,00* | *(6.518.075,00)* | *94,41%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 25.548.000,00 | 25.548.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.052.200,00 | 84.534.125,00 | (6.518.075,00) | 92,84% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0004* | | | *KELURAHAN HUTATORUAN IX* | *202.009.535,00* | *175.305.161,00* | *(26.704.374,00)* | *86,78%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0004* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *202.009.535,00* | *175.305.161,00* | *(26.704.374,00)* | *86,78%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0004* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *202.009.535,00* | *175.305.161,00* | *(26.704.374,00)* | *86,78%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0004* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *4.999.635,00* | *4.427.500,00* | *(572.135,00)* | *88,56%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.635,00 | 4.427.500,00 | (572.135,00) | 88,56% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0004* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *98.301.800,00* | *95.980.100,00* | *(2.321.700,00)* | *97,64%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.690.000,00 | 1.010.000,00 | (680.000,00) | 59,76% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.505.800,00 | 2.040.100,00 | (1.465.700,00) | 58,19% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 93.106.000,00 | 92.930.000,00 | (176.000,00) | 99,81% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0004* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *98.708.100,00* | *74.897.561,00* | *(23.810.539,00)* | *75,88%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 14.298.000,00 | 14.298.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.410.100,00 | 60.599.561,00 | (23.810.539,00) | 71,79% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0005* | | | *KELURAHAN HUTATORUAN X* | *199.970.325,00* | *195.582.430,00* | *(4.387.895,00)* | *97,81%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0005* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *199.970.325,00* | *195.582.430,00* | *(4.387.895,00)* | *97,81%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0005* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *199.970.325,00* | *195.582.430,00* | *(4.387.895,00)* | *97,81%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0005* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *4.979.000,00* | *4.835.500,00* | *(143.500,00)* | *97,12%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.979.000,00 | 4.835.500,00 | (143.500,00) | 97,12% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0005* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *78.285.100,00* | *77.765.700,00* | *(519.400,00)* | *99,34%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.410.600,00 | 3.140.000,00 | (270.600,00) | 92,07% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.434.500,00 | 1.355.700,00 | (78.800,00) | 94,51% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 73.440.000,00 | 73.270.000,00 | (170.000,00) | 99,77% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0005* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *116.706.225,00* | *112.981.230,00* | *(3.724.995,00)* | *96,81%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.548.000,00 | 10.548.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.158.225,00 | 102.433.230,00 | (3.724.995,00) | 96,49% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0006* | | | *KELURAHAN HUTATORUAN XI* | *200.005.865,00* | *198.741.615,46* | *(1.264.249,54)* | *99,37%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0006* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *200.005.865,00* | *198.741.615,46* | *(1.264.249,54)* | *99,37%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0006* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *200.005.865,00* | *198.741.615,46* | *(1.264.249,54)* | *99,37%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0006* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0006* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *100.000.000,00* | *99.834.715,46* | *(165.284,54)* | *99,83%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 100.000.000,00 | 99.834.715,46 | (165.284,54) | 99,83% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0006* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *95.005.865,00* | *93.906.900,00* | *(1.098.965,00)* | *98,84%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.357.865,00 | 80.258.900,00 | (1.098.965,00) | 98,65% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0007* | | | *KELURAHAN PARTALI TORUAN* | *199.998.450,00* | *193.054.528,00* | *(6.943.922,00)* | *96,53%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0007* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *199.998.450,00* | *193.054.528,00* | *(6.943.922,00)* | *96,53%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0007* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *199.998.450,00* | *193.054.528,00* | *(6.943.922,00)* | *96,53%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0007* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *4.999.700,00* | *3.437.600,00* | *(1.562.100,00)* | *68,76%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.700,00 | 3.437.600,00 | (1.562.100,00) | 68,76% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0007* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *81.999.800,00* | *79.599.950,00* | *(2.399.850,00)* | *97,07%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.341.800,00 | 3.089.950,00 | (2.251.850,00) | 57,84% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 72.948.000,00 | 72.800.000,00 | (148.000,00) | 99,80% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.01.0007* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *112.998.950,00* | *110.016.978,00* | *(2.981.972,00)* | *97,36%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 24.792.000,00 | 24.792.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.206.950,00 | 85.224.978,00 | (2.981.972,00) | 96,62% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TAHIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *2.336.161.542,00* | *1.789.117.501,00* | *(547.044.041,00)* | *76,58%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *2.336.161.542,00* | *1.789.117.501,00* | *(547.044.041,00)* | *76,58%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA* | *2.336.161.542,00* | *1.789.117.501,00* | *(547.044.041,00)* | *76,58%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.277.835.042,00* | *1.743.235.501,00* | *(534.599.541,00)* | *76,53%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *32.553.050,00* | *31.864.000,00* | *(689.050,00)* | *97,88%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *1.703.050,00* | *1.619.500,00* | *(83.550,00)* | *95,09%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.703.050,00 | 1.619.500,00 | (83.550,00) | 95,09% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *1.410.000,00* | *1.299.500,00* | *(110.500,00)* | *92,16%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.410.000,00 | 1.299.500,00 | (110.500,00) | 92,16% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *840.000,00* | *720.000,00* | *(120.000,00)* | *85,71%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 840.000,00 | 720.000,00 | (120.000,00) | 85,71% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *28.600.000,00* | *28.225.000,00* | *(375.000,00)* | *98,69%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.600.000,00 | 28.225.000,00 | (375.000,00) | 98,69% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.051.260.828,00* | *1.548.723.691,00* | *(502.537.137,00)* | *75,50%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.013.969.228,00* | *1.514.521.791,00* | *(499.447.437,00)* | *75,20%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.013.969.228,00 | 1.514.521.791,00 | (499.447.437,00) | 75,20% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *36.087.600,00* | *33.839.900,00* | *(2.247.700,00)* | *93,77%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 35.439.600,00 | 33.339.600,00 | (2.100.000,00) | 94,07% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 648.000,00 | 500.300,00 | (147.700,00) | 77,21% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *1.204.000,00* | *362.000,00* | *(842.000,00)* | *30,07%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.204.000,00 | 362.000,00 | (842.000,00) | 30,07% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *51.249.600,00* | *43.498.700,00* | *(7.750.900,00)* | *84,88%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *24.697.400,00* | *19.012.400,00* | *(5.685.000,00)* | *76,98%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.697.400,00 | 19.012.400,00 | (5.685.000,00) | 76,98% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *3.272.200,00* | *3.260.600,00* | *(11.600,00)* | *99,65%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.272.200,00 | 3.260.600,00 | (11.600,00) | 99,65% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *6.870.000,00* | *4.905.700,00* | *(1.964.300,00)* | *71,41%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.870.000,00 | 4.905.700,00 | (1.964.300,00) | 71,41% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *16.410.000,00* | *16.320.000,00* | *(90.000,00)* | *99,45%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.410.000,00 | 16.320.000,00 | (90.000,00) | 99,45% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *19.736.700,00* | *19.400.000,00* | *(336.700,00)* | *98,29%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *19.736.700,00* | *19.400.000,00* | *(336.700,00)* | *98,29%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.736.700,00 | 19.400.000,00 | (336.700,00) | 98,29% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *85.604.764,00* | *66.328.225,00* | *(19.276.539,00)* | *77,48%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.000.000,00* | *980.000,00* | *(20.000,00)* | *98,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 980.000,00 | (20.000,00) | 98,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *30.000.000,00* | *15.944.178,00* | *(14.055.822,00)* | *53,15%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 15.944.178,00 | (14.055.822,00) | 53,15% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *49.404.047,00* | *(5.200.717,00)* | *90,48%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 49.404.047,00 | (5.200.717,00) | 90,48% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *37.430.100,00* | *33.420.885,00* | *(4.009.215,00)* | *89,29%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *35.127.600,00* | *31.118.385,00* | *(4.009.215,00)* | *88,59%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.127.600,00 | 31.118.385,00 | (4.009.215,00) | 88,59% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.01.2.09.0011* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *2.302.500,00* | *2.302.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.09.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.302.500,00 | 2.302.500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *11.609.000,00* | *5.283.000,00* | *(6.326.000,00)* | *45,51%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *11.609.000,00* | *5.283.000,00* | *(6.326.000,00)* | *45,51%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *1.397.000,00* | *1.363.000,00* | *(34.000,00)* | *97,57%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.397.000,00 | 1.363.000,00 | (34.000,00) | 97,57% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.02.2.01.0002* | | *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *10.212.000,00* | *3.920.000,00* | *(6.292.000,00)* | *38,39%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.02.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.212.000,00 | 3.920.000,00 | (6.292.000,00) | 38,39% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *20.110.000,00* | *15.663.000,00* | *(4.447.000,00)* | *77,89%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *20.110.000,00* | *15.663.000,00* | *(4.447.000,00)* | *77,89%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *17.660.000,00* | *13.248.000,00* | *(4.412.000,00)* | *75,02%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.660.000,00 | 13.248.000,00 | (4.412.000,00) | 75,02% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.03.2.01.0003* | | *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | *2.450.000,00* | *2.415.000,00* | *(35.000,00)* | *98,57%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.450.000,00 | 2.415.000,00 | (35.000,00) | 98,57% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *1.400.000,00* | *0,00* | *(1.400.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *1.400.000,00* | *0,00* | *(1.400.000,00)* | *0,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *1.400.000,00* | *0,00* | *(1.400.000,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000,00 | 0,00 | (1.400.000,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *3.607.500,00* | *3.336.000,00* | *(271.500,00)* | *92,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *3.607.500,00* | *3.336.000,00* | *(271.500,00)* | *92,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.06.2.01.0002* | | *Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | *1.360.000,00* | *1.320.000,00* | *(40.000,00)* | *97,06%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.06.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.360.000,00 | 1.320.000,00 | (40.000,00) | 97,06% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.02.0000* | *7.01.06.2.01.0011* | | *Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *2.247.500,00* | *2.016.000,00* | *(231.500,00)* | *89,70%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.06.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.247.500,00 | 2.016.000,00 | (231.500,00) | 89,70% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.376.687.050,00* | *1.294.372.491,00* | *(82.314.559,00)* | *94,02%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.376.687.050,00* | *1.294.372.491,00* | *(82.314.559,00)* | *94,02%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING* | *1.376.687.050,00* | *1.294.372.491,00* | *(82.314.559,00)* | *94,02%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.301.659.050,00* | *1.227.279.491,00* | *(74.379.559,00)* | *94,29%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *81.770.000,00* | *69.784.000,00* | *(11.986.000,00)* | *85,34%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *39.650.000,00* | *34.580.000,00* | *(5.070.000,00)* | *87,21%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.650.000,00 | 34.580.000,00 | (5.070.000,00) | 87,21% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *42.120.000,00* | *35.204.000,00* | *(6.916.000,00)* | *83,58%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.120.000,00 | 35.204.000,00 | (6.916.000,00) | 83,58% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.098.590.086,00* | *1.061.293.486,00* | *(37.296.600,00)* | *96,61%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.069.782.886,00* | *1.032.486.286,00* | *(37.296.600,00)* | *96,51%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.069.782.886,00 | 1.032.486.286,00 | (37.296.600,00) | 96,51% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *28.807.200,00* | *28.807.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 28.807.200,00 | 28.807.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *29.358.700,00* | *26.917.200,00* | *(2.441.500,00)* | *91,68%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *13.045.500,00* | *10.615.000,00* | *(2.430.500,00)* | *81,37%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.045.500,00 | 10.615.000,00 | (2.430.500,00) | 81,37% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *10.940.000,00* | *10.929.000,00* | *(11.000,00)* | *99,90%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.940.000,00 | 10.929.000,00 | (11.000,00) | 99,90% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.373.200,00* | *5.373.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.373.200,00 | 5.373.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *78.703.864,00* | *61.141.305,00* | *(17.562.559,00)* | *77,69%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *800.000,00* | *800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *23.299.100,00* | *5.835.861,00* | *(17.463.239,00)* | *25,05%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.299.100,00 | 5.835.861,00 | (17.463.239,00) | 25,05% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *54.505.444,00* | *(99.320,00)* | *99,82%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 54.505.444,00 | (99.320,00) | 99,82% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *13.236.400,00* | *8.143.500,00* | *(5.092.900,00)* | *61,52%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *13.236.400,00* | *8.143.500,00* | *(5.092.900,00)* | *61,52%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.236.400,00 | 8.143.500,00 | (5.092.900,00) | 61,52% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *30.708.000,00* | *28.491.000,00* | *(2.217.000,00)* | *92,78%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *30.708.000,00* | *28.491.000,00* | *(2.217.000,00)* | *92,78%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *30.708.000,00* | *28.491.000,00* | *(2.217.000,00)* | *92,78%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.708.000,00 | 28.491.000,00 | (2.217.000,00) | 92,78% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *10.400.000,00* | *7.760.000,00* | *(2.640.000,00)* | *74,62%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *10.400.000,00* | *7.760.000,00* | *(2.640.000,00)* | *74,62%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.03.2.01.0003* | | *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | *10.400.000,00* | *7.760.000,00* | *(2.640.000,00)* | *74,62%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.400.000,00 | 7.760.000,00 | (2.640.000,00) | 74,62% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *3.010.000,00* | *0,00* | *(3.010.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *3.010.000,00* | *0,00* | *(3.010.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *3.010.000,00* | *0,00* | *(3.010.000,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.010.000,00 | 0,00 | (3.010.000,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *9.310.000,00* | *9.242.000,00* | *(68.000,00)* | *99,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *9.310.000,00* | *9.242.000,00* | *(68.000,00)* | *99,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.03.0000* | *7.01.06.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *9.310.000,00* | *9.242.000,00* | *(68.000,00)* | *99,27%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.310.000,00 | 9.242.000,00 | (68.000,00) | 99,27% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *2.287.945.461,00* | *2.159.363.003,00* | *(128.582.458,00)* | *94,38%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *2.287.945.461,00* | *2.159.363.003,00* | *(128.582.458,00)* | *94,38%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON* | *2.087.942.161,00* | *1.966.895.903,00* | *(121.046.258,00)* | *94,20%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.034.005.236,00* | *1.919.929.363,00* | *(114.075.873,00)* | *94,39%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *4.300.750,00* | *2.043.300,00* | *(2.257.450,00)* | *47,51%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *1.941.550,00* | *783.300,00* | *(1.158.250,00)* | *40,34%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.941.550,00 | 783.300,00 | (1.158.250,00) | 40,34% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.01.0003* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | *480.000,00* | *240.000,00* | *(240.000,00)* | *50,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 480.000,00 | 240.000,00 | (240.000,00) | 50,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *775.900,00* | *720.000,00* | *(55.900,00)* | *92,80%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 775.900,00 | 720.000,00 | (55.900,00) | 92,80% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *1.103.300,00* | *300.000,00* | *(803.300,00)* | *27,19%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.103.300,00 | 300.000,00 | (803.300,00) | 27,19% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.834.251.811,00* | *1.762.702.822,00* | *(71.548.989,00)* | *96,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.798.461.511,00* | *1.727.295.622,00* | *(71.165.889,00)* | *96,04%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.798.461.511,00 | 1.727.295.622,00 | (71.165.889,00) | 96,04% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *34.327.200,00* | *34.327.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 30.727.200,00 | 30.727.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *1.463.100,00* | *1.080.000,00* | *(383.100,00)* | *73,82%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.463.100,00 | 1.080.000,00 | (383.100,00) | 73,82% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *67.811.275,00* | *46.103.445,00* | *(21.707.830,00)* | *67,99%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.195.800,00* | *2.195.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.195.800,00 | 2.195.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *11.140.000,00* | *10.275.045,00* | *(864.955,00)* | *92,24%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.140.000,00 | 10.275.045,00 | (864.955,00) | 92,24% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *10.410.175,00* | *2.198.800,00* | *(8.211.375,00)* | *21,12%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.348.175,00 | 136.800,00 | (8.211.375,00) | 1,64% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0004* | | *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* | *11.360.000,00* | *7.872.500,00* | *(3.487.500,00)* | *69,30%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.360.000,00 | 7.872.500,00 | (3.487.500,00) | 69,30% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *3.216.800,00* | *3.216.300,00* | *(500,00)* | *99,98%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.216.800,00 | 3.216.300,00 | (500,00) | 99,98% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *3.658.500,00* | *2.350.000,00* | *(1.308.500,00)* | *64,23%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.658.500,00 | 2.350.000,00 | (1.308.500,00) | 64,23% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *25.830.000,00* | *17.995.000,00* | *(7.835.000,00)* | *69,67%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.830.000,00 | 17.995.000,00 | (7.835.000,00) | 69,67% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *5.900.200,00* | *0,00* | *(5.900.200,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *5.900.200,00* | *0,00* | *(5.900.200,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.900.200,00 | 0,00 | (5.900.200,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *82.958.600,00* | *73.209.796,00* | *(9.748.804,00)* | *88,25%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.500.000,00* | *940.000,00* | *(560.000,00)* | *62,67%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 940.000,00 | (560.000,00) | 62,67% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *26.961.800,00* | *18.269.796,00* | *(8.692.004,00)* | *67,76%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.961.800,00 | 18.269.796,00 | (8.692.004,00) | 67,76% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.496.800,00* | *54.000.000,00* | *(496.800,00)* | *99,09%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 54.000.000,00 | (496.800,00) | 99,09% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *38.782.600,00* | *35.870.000,00* | *(2.912.600,00)* | *92,49%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *26.703.000,00* | *23.895.000,00* | *(2.808.000,00)* | *89,48%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.703.000,00 | 23.895.000,00 | (2.808.000,00) | 89,48% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *12.079.600,00* | *11.975.000,00* | *(104.600,00)* | *99,13%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.079.600,00 | 11.975.000,00 | (104.600,00) | 99,13% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *53.936.925,00* | *46.966.540,00* | *(6.970.385,00)* | *87,08%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *53.936.925,00* | *46.966.540,00* | *(6.970.385,00)* | *87,08%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *53.936.925,00* | *46.966.540,00* | *(6.970.385,00)* | *87,08%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.936.925,00 | 46.966.540,00 | (6.970.385,00) | 87,08% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0001* | | | *KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN* | *200.003.300,00* | *192.467.100,00* | *(7.536.200,00)* | *96,23%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0001* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *200.003.300,00* | *192.467.100,00* | *(7.536.200,00)* | *96,23%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0001* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *200.003.300,00* | *192.467.100,00* | *(7.536.200,00)* | *96,23%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0001* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *125.939.500,00* | *124.267.100,00* | *(1.672.400,00)* | *98,67%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.482.000,00 | 11.482.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.607.500,00 | 10.185.100,00 | (1.422.400,00) | 87,75% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 102.850.000,00 | 102.600.000,00 | (250.000,00) | 99,76% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.04.0001* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *74.063.800,00* | *68.200.000,00* | *(5.863.800,00)* | *92,08%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.063.800,00 | 68.200.000,00 | (5.863.800,00) | 92,08% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *2.852.367.575,00* | *2.764.236.727,00* | *(88.130.848,00)* | *96,91%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *2.852.367.575,00* | *2.764.236.727,00* | *(88.130.848,00)* | *96,91%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU* | *2.652.367.975,00* | *2.575.705.527,00* | *(76.662.448,00)* | *97,11%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.583.419.975,00* | *2.506.757.527,00* | *(76.662.448,00)* | *97,03%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *36.855.000,00* | *36.698.000,00* | *(157.000,00)* | *99,57%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *3.150.000,00* | *3.002.000,00* | *(148.000,00)* | *95,30%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.150.000,00 | 3.002.000,00 | (148.000,00) | 95,30% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *33.705.000,00* | *33.696.000,00* | *(9.000,00)* | *99,97%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.705.000,00 | 33.696.000,00 | (9.000,00) | 99,97% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.377.437.061,00* | *2.310.115.577,00* | *(67.321.484,00)* | *97,17%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.346.331.861,00* | *2.279.158.377,00* | *(67.173.484,00)* | *97,14%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.346.331.861,00 | 2.279.158.377,00 | (67.173.484,00) | 97,14% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *27.955.200,00* | *27.955.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 27.955.200,00 | 27.955.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *3.150.000,00* | *3.002.000,00* | *(148.000,00)* | *95,30%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.150.000,00 | 3.002.000,00 | (148.000,00) | 95,30% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.05* | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *15.076.000,00* | *15.028.000,00* | *(48.000,00)* | *99,68%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.05.0005* | | *Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | *15.076.000,00* | *15.028.000,00* | *(48.000,00)* | *99,68%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.05.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.076.000,00 | 15.028.000,00 | (48.000,00) | 99,68% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *37.597.150,00* | *32.601.700,00* | *(4.995.450,00)* | *86,71%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *1.991.400,00* | *1.985.500,00* | *(5.900,00)* | *99,70%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.991.400,00 | 1.985.500,00 | (5.900,00) | 99,70% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *15.286.750,00* | *13.175.000,00* | *(2.111.750,00)* | *86,19%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.286.750,00 | 13.175.000,00 | (2.111.750,00) | 86,19% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *2.312.000,00* | *2.310.000,00* | *(2.000,00)* | *99,91%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.312.000,00 | 2.310.000,00 | (2.000,00) | 99,91% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *1.762.000,00* | *1.761.200,00* | *(800,00)* | *99,95%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.762.000,00 | 1.761.200,00 | (800,00) | 99,95% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *16.245.000,00* | *13.370.000,00* | *(2.875.000,00)* | *82,30%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.245.000,00 | 13.370.000,00 | (2.875.000,00) | 82,30% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *79.304.764,00* | *77.030.200,00* | *(2.274.564,00)* | *97,13%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.000.000,00* | *750.000,00* | *(250.000,00)* | *75,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 750.000,00 | (250.000,00) | 75,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *23.700.000,00* | *22.280.200,00* | *(1.419.800,00)* | *94,01%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.700.000,00 | 22.280.200,00 | (1.419.800,00) | 94,01% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *54.000.000,00* | *(604.764,00)* | *98,89%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 54.000.000,00 | (604.764,00) | 98,89% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *37.150.000,00* | *35.284.050,00* | *(1.865.950,00)* | *94,98%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *37.150.000,00* | *35.284.050,00* | *(1.865.950,00)* | *94,98%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.150.000,00 | 35.284.050,00 | (1.865.950,00) | 94,98% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *47.348.000,00* | *47.348.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *47.348.000,00* | *47.348.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *47.348.000,00* | *47.348.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.348.000,00 | 47.348.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0001* | | | *KELURAHAN ONAN HASANG* | *199.999.600,00* | *188.531.200,00* | *(11.468.400,00)* | *94,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0001* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *199.999.600,00* | *188.531.200,00* | *(11.468.400,00)* | *94,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0001* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *199.999.600,00* | *188.531.200,00* | *(11.468.400,00)* | *94,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0001* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *132.934.800,00* | *132.678.400,00* | *(256.400,00)* | *99,81%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.584.800,00 | 128.328.400,00 | (256.400,00) | 99,80% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.05.0001* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *67.064.800,00* | *55.852.800,00* | *(11.212.000,00)* | *83,28%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.548.000,00 | 10.548.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.516.800,00 | 45.304.800,00 | (11.212.000,00) | 80,16% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *2.239.078.755,00* | *2.196.074.844,00* | *(43.003.911,00)* | *98,08%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *2.239.078.755,00* | *2.196.074.844,00* | *(43.003.911,00)* | *98,08%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE* | *2.035.155.441,00* | *1.993.490.144,00* | *(41.665.297,00)* | *97,95%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.956.323.441,00* | *1.915.493.944,00* | *(40.829.497,00)* | *97,91%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *28.350.000,00* | *28.349.000,00* | *(1.000,00)* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *28.350.000,00* | *28.349.000,00* | *(1.000,00)* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.350.000,00 | 28.349.000,00 | (1.000,00) | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.774.330.477,00* | *1.735.707.254,00* | *(38.623.223,00)* | *97,82%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.723.695.177,00* | *1.685.071.954,00* | *(38.623.223,00)* | *97,76%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.723.695.177,00 | 1.685.071.954,00 | (38.623.223,00) | 97,76% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *47.247.600,00* | *47.247.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 47.247.600,00 | 47.247.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *3.387.700,00* | *3.387.700,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.387.700,00 | 3.387.700,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *40.829.700,00* | *38.984.400,00* | *(1.845.300,00)* | *95,48%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *3.026.500,00* | *3.016.200,00* | *(10.300,00)* | *99,66%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.026.500,00 | 3.016.200,00 | (10.300,00) | 99,66% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *12.236.000,00* | *11.027.000,00* | *(1.209.000,00)* | *90,12%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.236.000,00 | 11.027.000,00 | (1.209.000,00) | 90,12% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *2.352.000,00* | *2.347.000,00* | *(5.000,00)* | *99,79%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.352.000,00 | 2.347.000,00 | (5.000,00) | 99,79% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *3.755.200,00* | *3.755.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.755.200,00 | 3.755.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *19.460.000,00* | *18.839.000,00* | *(621.000,00)* | *96,81%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.460.000,00 | 18.839.000,00 | (621.000,00) | 96,81% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *69.524.764,00* | *69.177.640,00* | *(347.124,00)* | *99,50%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *14.420.000,00* | *14.183.312,00* | *(236.688,00)* | *98,36%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.420.000,00 | 14.183.312,00 | (236.688,00) | 98,36% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *54.494.328,00* | *(110.436,00)* | *99,80%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 54.494.328,00 | (110.436,00) | 99,80% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *43.288.500,00* | *43.275.650,00* | *(12.850,00)* | *99,97%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *43.288.500,00* | *43.275.650,00* | *(12.850,00)* | *99,97%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.288.500,00 | 43.275.650,00 | (12.850,00) | 99,97% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *54.382.000,00* | *53.546.200,00* | *(835.800,00)* | *98,46%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *54.382.000,00* | *53.546.200,00* | *(835.800,00)* | *98,46%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *54.382.000,00* | *53.546.200,00* | *(835.800,00)* | *98,46%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.382.000,00 | 53.546.200,00 | (835.800,00) | 98,46% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *2.850.000,00* | *2.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *2.850.000,00* | *2.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0000* | *7.01.06.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *2.850.000,00* | *2.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | | | *KELURAHAN PASAR SARULLA* | *203.923.314,00* | *202.584.700,00* | *(1.338.614,00)* | *99,34%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.923.500,00* | *3.540.000,00* | *(383.500,00)* | *90,23%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *3.923.500,00* | *3.540.000,00* | *(383.500,00)* | *90,23%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *3.923.500,00* | *3.540.000,00* | *(383.500,00)* | *90,23%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.923.500,00 | 3.540.000,00 | (383.500,00) | 90,23% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *199.999.814,00* | *199.044.700,00* | *(955.114,00)* | *99,52%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *199.999.814,00* | *199.044.700,00* | *(955.114,00)* | *99,52%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *107.160.200,00* | *106.862.100,00* | *(298.100,00)* | *99,72%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.602.700,00 | 9.542.100,00 | (60.600,00) | 99,37% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 94.987.500,00 | 94.750.000,00 | (237.500,00) | 99,75% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.06.0001* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *92.839.614,00* | *92.182.600,00* | *(657.014,00)* | *99,29%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.839.614,00 | 80.182.600,00 | (657.014,00) | 99,19% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN PURBATUA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.208.808.221,00* | *1.149.357.030,00* | *(59.451.191,00)* | *95,08%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.208.808.221,00* | *1.149.357.030,00* | *(59.451.191,00)* | *95,08%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN PURBATUA* | *1.208.808.221,00* | *1.149.357.030,00* | *(59.451.191,00)* | *95,08%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.134.838.221,00* | *1.076.825.030,00* | *(58.013.191,00)* | *94,89%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *745.400,00* | *732.000,00* | *(13.400,00)* | *98,20%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *745.400,00* | *732.000,00* | *(13.400,00)* | *98,20%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 745.400,00 | 732.000,00 | (13.400,00) | 98,20% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *944.946.332,00* | *923.123.480,00* | *(21.822.852,00)* | *97,69%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *904.071.932,00* | *882.356.280,00* | *(21.715.652,00)* | *97,60%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 904.071.932,00 | 882.356.280,00 | (21.715.652,00) | 97,60% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *38.235.600,00* | *38.235.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 38.235.600,00 | 38.235.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.638.800,00* | *2.531.600,00* | *(107.200,00)* | *95,94%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.638.800,00 | 2.531.600,00 | (107.200,00) | 95,94% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *58.601.025,00* | *57.529.500,00* | *(1.071.525,00)* | *98,17%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.538.200,00* | *2.538.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.538.200,00 | 2.538.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *4.957.600,00* | *4.953.800,00* | *(3.800,00)* | *99,92%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.957.600,00 | 4.953.800,00 | (3.800,00) | 99,92% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.06.0004* | | *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* | *21.985.000,00* | *21.985.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.985.000,00 | 21.985.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *13.199.300,00* | *13.199.200,00* | *(100,00)* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.199.300,00 | 13.199.200,00 | (100,00) | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.06.0007* | | *Penyediaan Bahan/Material* | *15.920.925,00* | *14.853.300,00* | *(1.067.625,00)* | *93,29%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.920.925,00 | 14.853.300,00 | (1.067.625,00) | 93,29% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *20.164.400,00* | *0,00* | *(20.164.400,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *20.164.400,00* | *0,00* | *(20.164.400,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.164.400,00 | 0,00 | (20.164.400,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *62.236.364,00* | *47.339.000,00* | *(14.897.364,00)* | *76,06%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *700.000,00* | *700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *6.931.600,00* | *4.639.000,00* | *(2.292.600,00)* | *66,93%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.931.600,00 | 4.639.000,00 | (2.292.600,00) | 66,93% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *42.000.000,00* | *(12.604.764,00)* | *76,92%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 42.000.000,00 | (12.604.764,00) | 76,92% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *48.144.700,00* | *48.101.050,00* | *(43.650,00)* | *99,91%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *36.416.700,00* | *36.411.350,00* | *(5.350,00)* | *99,99%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.416.700,00 | 36.411.350,00 | (5.350,00) | 99,99% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *2.007.700,00* | *2.007.700,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.007.700,00 | 2.007.700,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *4.147.000,00* | *4.114.000,00* | *(33.000,00)* | *99,20%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.147.000,00 | 4.114.000,00 | (33.000,00) | 99,20% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.01.2.09.0011* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *5.573.300,00* | *5.568.000,00* | *(5.300,00)* | *99,90%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.573.300,00 | 5.568.000,00 | (5.300,00) | 99,90% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *40.520.000,00* | *39.082.000,00* | *(1.438.000,00)* | *96,45%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *40.520.000,00* | *39.082.000,00* | *(1.438.000,00)* | *96,45%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *40.520.000,00* | *39.082.000,00* | *(1.438.000,00)* | *96,45%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.520.000,00 | 39.082.000,00 | (1.438.000,00) | 96,45% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *11.850.000,00* | *11.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *11.850.000,00* | *11.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *11.850.000,00* | *11.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.07.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.158.164.913,00* | *1.122.522.647,00* | *(35.642.266,00)* | *96,92%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.158.164.913,00* | *1.122.522.647,00* | *(35.642.266,00)* | *96,92%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN* | *1.158.164.913,00* | *1.122.522.647,00* | *(35.642.266,00)* | *96,92%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.064.442.363,00* | *1.036.147.147,00* | *(28.295.216,00)* | *97,34%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *20.983.330,00* | *19.890.600,00* | *(1.092.730,00)* | *94,79%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.152.530,00* | *1.676.500,00* | *(476.030,00)* | *77,89%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.152.530,00 | 1.676.500,00 | (476.030,00) | 77,89% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *18.830.800,00* | *18.214.100,00* | *(616.700,00)* | *96,73%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.830.800,00 | 18.214.100,00 | (616.700,00) | 96,73% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *882.300.100,00* | *859.235.220,00* | *(23.064.880,00)* | *97,39%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *845.051.500,00* | *822.237.620,00* | *(22.813.880,00)* | *97,30%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 845.051.500,00 | 822.237.620,00 | (22.813.880,00) | 97,30% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *33.075.600,00* | *33.075.600,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 33.075.600,00 | 33.075.600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.173.000,00* | *3.922.000,00* | *(251.000,00)* | *93,99%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.173.000,00 | 3.922.000,00 | (251.000,00) | 93,99% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *34.919.075,00* | *32.339.400,00* | *(2.579.675,00)* | *92,61%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *1.869.800,00* | *1.858.400,00* | *(11.400,00)* | *99,39%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.869.800,00 | 1.858.400,00 | (11.400,00) | 99,39% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *11.283.675,00* | *10.138.000,00* | *(1.145.675,00)* | *89,85%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.283.675,00 | 10.138.000,00 | (1.145.675,00) | 89,85% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *8.582.000,00* | *8.582.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.582.000,00 | 8.582.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.623.600,00* | *5.461.000,00* | *(162.600,00)* | *97,11%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.623.600,00 | 5.461.000,00 | (162.600,00) | 97,11% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *7.560.000,00* | *6.300.000,00* | *(1.260.000,00)* | *83,33%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.560.000,00 | 6.300.000,00 | (1.260.000,00) | 83,33% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *73.298.000,00* | *71.882.143,00* | *(1.415.857,00)* | *98,07%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *700.000,00* | *700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *18.101.200,00* | *16.827.086,00* | *(1.274.114,00)* | *92,96%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.101.200,00 | 16.827.086,00 | (1.274.114,00) | 92,96% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.496.800,00* | *54.355.057,00* | *(141.743,00)* | *99,74%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 54.355.057,00 | (141.743,00) | 99,74% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *52.941.858,00* | *52.799.784,00* | *(142.074,00)* | *99,73%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *45.263.958,00* | *45.121.884,00* | *(142.074,00)* | *99,69%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.263.958,00 | 45.121.884,00 | (142.074,00) | 99,69% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *3.191.700,00* | *3.191.700,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.191.700,00 | 3.191.700,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *4.486.200,00* | *4.486.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.486.200,00 | 4.486.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *19.344.000,00* | *17.766.000,00* | *(1.578.000,00)* | *91,84%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *19.344.000,00* | *17.766.000,00* | *(1.578.000,00)* | *91,84%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *19.344.000,00* | *17.766.000,00* | *(1.578.000,00)* | *91,84%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.344.000,00 | 17.766.000,00 | (1.578.000,00) | 91,84% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *13.539.750,00* | *13.325.500,00* | *(214.250,00)* | *98,42%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *13.539.750,00* | *13.325.500,00* | *(214.250,00)* | *98,42%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *13.539.750,00* | *13.325.500,00* | *(214.250,00)* | *98,42%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.539.750,00 | 13.325.500,00 | (214.250,00) | 98,42% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *11.474.000,00* | *8.080.000,00* | *(3.394.000,00)* | *70,42%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *11.474.000,00* | *8.080.000,00* | *(3.394.000,00)* | *70,42%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *11.474.000,00* | *8.080.000,00* | *(3.394.000,00)* | *70,42%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.474.000,00 | 8.080.000,00 | (3.394.000,00) | 70,42% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *34.696.800,00* | *34.281.000,00* | *(415.800,00)* | *98,80%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *34.696.800,00* | *34.281.000,00* | *(415.800,00)* | *98,80%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *34.696.800,00* | *34.281.000,00* | *(415.800,00)* | *98,80%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.696.800,00 | 34.281.000,00 | (415.800,00) | 98,80% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *14.668.000,00* | *12.923.000,00* | *(1.745.000,00)* | *88,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *14.668.000,00* | *12.923.000,00* | *(1.745.000,00)* | *88,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.08.0000* | *7.01.06.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *14.668.000,00* | *12.923.000,00* | *(1.745.000,00)* | *88,10%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.668.000,00 | 12.923.000,00 | (1.745.000,00) | 88,10% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.674.560,00 | 0,00 | (2.674.560,00) | - | |
| | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.674.560,00 | 0,00 | (2.674.560,00) | - | |
| | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 2.674.560,00 | 0,00 | (2.674.560,00) | - | |
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *2.141.612.433,00* | *2.030.177.874,00* | *(111.434.559,00)* | *94,80%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *2.141.612.433,00* | *2.030.177.874,00* | *(111.434.559,00)* | *94,80%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR* | *2.141.612.433,00* | *2.030.177.874,00* | *(111.434.559,00)* | *94,80%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.048.361.683,00* | *1.974.207.374,00* | *(74.154.309,00)* | *96,38%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *4.804.000,00* | *4.520.800,00* | *(283.200,00)* | *94,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.01.0003* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | *650.000,00* | *650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *650.000,00* | *650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.01.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD* | *650.000,00* | *650.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *1.489.000,00* | *1.205.800,00* | *(283.200,00)* | *80,98%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.489.000,00 | 1.205.800,00 | (283.200,00) | 80,98% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *1.365.000,00* | *1.365.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.858.879.633,00* | *1.801.841.077,00* | *(57.038.556,00)* | *96,93%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.817.822.483,00* | *1.767.072.277,00* | *(50.750.206,00)* | *97,21%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.817.822.483,00 | 1.767.072.277,00 | (50.750.206,00) | 97,21% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *36.979.200,00* | *30.727.200,00* | *(6.252.000,00)* | *83,09%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 36.979.200,00 | 30.727.200,00 | (6.252.000,00) | 83,09% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.377.950,00* | *2.341.600,00* | *(36.350,00)* | *98,47%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.377.950,00 | 2.341.600,00 | (36.350,00) | 98,47% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.02.0007* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *1.700.000,00* | *1.700.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *49.701.050,00* | *45.833.300,00* | *(3.867.750,00)* | *92,22%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *2.646.100,00* | *2.646.100,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.646.100,00 | 2.646.100,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *26.058.950,00* | *24.455.200,00* | *(1.603.750,00)* | *93,85%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.058.950,00 | 24.455.200,00 | (1.603.750,00) | 93,85% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *14.190.000,00* | *14.190.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.190.000,00 | 14.190.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *4.058.000,00* | *4.058.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.058.000,00 | 4.058.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *648.000,00* | *484.000,00* | *(164.000,00)* | *74,69%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 648.000,00 | 484.000,00 | (164.000,00) | 74,69% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *2.100.000,00* | *0,00* | *(2.100.000,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | 0,00 | (2.100.000,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *8.450.000,00* | *8.400.000,00* | *(50.000,00)* | *99,41%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *8.450.000,00* | *8.400.000,00* | *(50.000,00)* | *99,41%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.450.000,00 | 8.400.000,00 | (50.000,00) | 99,41% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *85.695.100,00* | *73.763.827,00* | *(11.931.273,00)* | *86,08%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *29.698.300,00* | *17.767.027,00* | *(11.931.273,00)* | *59,83%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.698.300,00 | 17.767.027,00 | (11.931.273,00) | 59,83% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.496.800,00* | *54.496.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 54.496.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *40.831.900,00* | *39.848.370,00* | *(983.530,00)* | *97,59%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *35.497.500,00* | *34.513.970,00* | *(983.530,00)* | *97,23%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.497.500,00 | 34.513.970,00 | (983.530,00) | 97,23% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *4.334.400,00* | *4.334.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.334.400,00 | 4.334.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *20.351.750,00* | *6.136.500,00* | *(14.215.250,00)* | *30,15%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *20.351.750,00* | *6.136.500,00* | *(14.215.250,00)* | *30,15%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *20.351.750,00* | *6.136.500,00* | *(14.215.250,00)* | *30,15%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.351.750,00 | 6.136.500,00 | (14.215.250,00) | 30,15% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *21.025.000,00* | *18.000.000,00* | *(3.025.000,00)* | *85,61%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *21.025.000,00* | *18.000.000,00* | *(3.025.000,00)* | *85,61%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *17.100.000,00* | *17.100.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.03.2.01.0003* | | *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | *3.925.000,00* | *900.000,00* | *(3.025.000,00)* | *22,93%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.925.000,00 | 900.000,00 | (3.025.000,00) | 22,93% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *15.924.000,00* | *6.224.000,00* | *(9.700.000,00)* | *39,09%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *15.924.000,00* | *6.224.000,00* | *(9.700.000,00)* | *39,09%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *15.924.000,00* | *6.224.000,00* | *(9.700.000,00)* | *39,09%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.924.000,00 | 6.224.000,00 | (9.700.000,00) | 39,09% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *31.250.000,00* | *24.460.000,00* | *(6.790.000,00)* | *78,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *31.250.000,00* | *24.460.000,00* | *(6.790.000,00)* | *78,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *31.250.000,00* | *24.460.000,00* | *(6.790.000,00)* | *78,27%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.250.000,00 | 24.460.000,00 | (6.790.000,00) | 78,27% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *4.700.000,00* | *1.150.000,00* | *(3.550.000,00)* | *24,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *4.700.000,00* | *1.150.000,00* | *(3.550.000,00)* | *24,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.09.0000* | *7.01.06.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *4.700.000,00* | *1.150.000,00* | *(3.550.000,00)* | *24,47%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.700.000,00 | 1.150.000,00 | (3.550.000,00) | 24,47% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

IOPHUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7.01* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.597.008.386,00* | *1.551.995.433,00* | *(45.012.953,00)* | *97,18%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.597.008.386,00* | *1.551.995.433,00* | *(45.012.953,00)* | *97,18%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN* | *1.597.008.386,00* | *1.551.995.433,00* | *(45.012.953,00)* | *97,18%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.505.288.386,00* | *1.460.446.433,00* | *(44.841.953,00)* | *97,02%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *33.739.600,00* | *29.557.400,00* | *(4.182.200,00)* | *87,60%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.01.0001* | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *6.000.000,00* | *5.977.400,00* | *(22.600,00)* | *99,62%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 5.977.400,00 | (22.600,00) | 99,62% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.299.600,00* | *1.900.000,00* | *(399.600,00)* | *82,62%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.299.600,00 | 1.900.000,00 | (399.600,00) | 82,62% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *25.440.000,00* | *21.680.000,00* | *(3.760.000,00)* | *85,22%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.440.000,00 | 21.680.000,00 | (3.760.000,00) | 85,22% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.312.985.372,00* | *1.278.307.213,00* | *(34.678.159,00)* | *97,36%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.287.484.572,00* | *1.252.806.413,00* | *(34.678.159,00)* | *97,31%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.287.484.572,00 | 1.252.806.413,00 | (34.678.159,00) | 97,31% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *25.436.400,00* | *25.436.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 25.436.400,00 | 25.436.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *64.400,00* | *64.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *44.798.650,00* | *44.347.350,00* | *(451.300,00)* | *98,99%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *3.128.600,00* | *3.127.600,00* | *(1.000,00)* | *99,97%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.128.600,00 | 3.127.600,00 | (1.000,00) | 99,97% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *2.256.650,00* | *1.933.350,00* | *(323.300,00)* | *85,67%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.256.650,00 | 1.933.350,00 | (323.300,00) | 85,67% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *6.294.000,00* | *6.292.000,00* | *(2.000,00)* | *99,97%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.294.000,00 | 6.292.000,00 | (2.000,00) | 99,97% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.239.400,00* | *5.239.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.239.400,00 | 5.239.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *27.880.000,00* | *27.755.000,00* | *(125.000,00)* | *99,55%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.880.000,00 | 27.755.000,00 | (125.000,00) | 99,55% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *82.524.764,00* | *81.895.000,00* | *(629.764,00)* | *99,24%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *25.920.000,00* | *25.895.000,00* | *(25.000,00)* | *99,90%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.920.000,00 | 25.895.000,00 | (25.000,00) | 99,90% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *54.000.000,00* | *(604.764,00)* | *98,89%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 54.000.000,00 | (604.764,00) | 98,89% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *31.240.000,00* | *26.339.470,00* | *(4.900.530,00)* | *84,31%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *31.240.000,00* | *26.339.470,00* | *(4.900.530,00)* | *84,31%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.240.000,00 | 26.339.470,00 | (4.900.530,00) | 84,31% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *64.340.000,00* | *64.215.000,00* | *(125.000,00)* | *99,81%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *58.800.000,00* | *58.675.000,00* | *(125.000,00)* | *99,79%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *58.800.000,00* | *58.675.000,00* | *(125.000,00)* | *99,79%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.800.000,00 | 58.675.000,00 | (125.000,00) | 99,79% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.02.2.02* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan* | *5.540.000,00* | *5.540.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.02.2.02.0001* | | *Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | *5.540.000,00* | *5.540.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *10.400.000,00* | *10.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *10.400.000,00* | *10.400.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.03.2.01.0002* | | *Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | *5.200.000,00* | *5.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.03.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.03.2.01.0003* | | *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | *5.200.000,00* | *5.200.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *4.800.000,00* | *4.784.000,00* | *(16.000,00)* | *99,67%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *4.800.000,00* | *4.784.000,00* | *(16.000,00)* | *99,67%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.04.2.01.0002* | | *Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | *4.800.000,00* | *4.784.000,00* | *(16.000,00)* | *99,67%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.04.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.784.000,00 | (16.000,00) | 99,67% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *8.960.000,00* | *8.950.000,00* | *(10.000,00)* | *99,89%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *8.960.000,00* | *8.950.000,00* | *(10.000,00)* | *99,89%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *8.960.000,00* | *8.950.000,00* | *(10.000,00)* | *99,89%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.960.000,00 | 8.950.000,00 | (10.000,00) | 99,89% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *3.220.000,00* | *3.200.000,00* | *(20.000,00)* | *99,38%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *3.220.000,00* | *3.200.000,00* | *(20.000,00)* | *99,38%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.10.0000* | *7.01.06.2.01.0017* | | *Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | *3.220.000,00* | *3.200.000,00* | *(20.000,00)* | *99,38%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.06.2.01.0017 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.220.000,00 | 3.200.000,00 | (20.000,00) | 99,38% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN GAROGA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.729.563.399,00* | *1.657.367.257,00* | *(72.196.142,00)* | *95,83%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.729.563.399,00* | *1.657.367.257,00* | *(72.196.142,00)* | *95,83%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN GAROGA* | *1.729.563.399,00* | *1.657.367.257,00* | *(72.196.142,00)* | *95,83%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.588.043.399,00* | *1.532.572.257,00* | *(55.471.142,00)* | *96,51%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *2.940.000,00* | *2.940.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *2.940.000,00* | *2.940.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.319.532.709,00* | *1.287.160.654,00* | *(32.372.055,00)* | *97,55%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.287.405.509,00* | *1.255.033.454,00* | *(32.372.055,00)* | *97,49%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.287.405.509,00 | 1.255.033.454,00 | (32.372.055,00) | 97,49% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *29.767.200,00* | *29.767.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 29.767.200,00 | 29.767.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2.360.000,00* | *2.360.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *115.111.150,00* | *108.332.100,00* | *(6.779.050,00)* | *94,11%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *3.469.800,00* | *3.469.800,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.469.800,00 | 3.469.800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *10.823.750,00* | *9.949.500,00* | *(874.250,00)* | *91,92%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.823.750,00 | 9.949.500,00 | (874.250,00) | 91,92% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *6.150.200,00* | *6.144.200,00* | *(6.000,00)* | *99,90%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.150.200,00 | 6.144.200,00 | (6.000,00) | 99,90% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *9.234.400,00* | *9.022.600,00* | *(211.800,00)* | *97,71%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.234.400,00 | 9.022.600,00 | (211.800,00) | 97,71% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *85.433.000,00* | *79.746.000,00* | *(5.687.000,00)* | *93,34%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.433.000,00 | 79.746.000,00 | (5.687.000,00) | 93,34% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *69.392.040,00* | *67.443.633,00* | *(1.948.407,00)* | *97,19%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.500.000,00* | *1.100.000,00* | *(400.000,00)* | *73,33%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.100.000,00 | (400.000,00) | 73,33% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *13.018.500,00* | *11.811.089,00* | *(1.207.411,00)* | *90,73%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.018.500,00 | 11.811.089,00 | (1.207.411,00) | 90,73% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.873.540,00* | *54.532.544,00* | *(340.996,00)* | *99,38%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.873.540,00 | 54.532.544,00 | (340.996,00) | 99,38% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *81.067.500,00* | *66.695.870,00* | *(14.371.630,00)* | *82,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *69.438.000,00* | *55.066.370,00* | *(14.371.630,00)* | *79,30%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.438.000,00 | 55.066.370,00 | (14.371.630,00) | 79,30% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *11.629.500,00* | *11.629.500,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.629.500,00 | 11.629.500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *44.970.000,00* | *43.910.000,00* | *(1.060.000,00)* | *97,64%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *44.970.000,00* | *43.910.000,00* | *(1.060.000,00)* | *97,64%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *44.970.000,00* | *43.910.000,00* | *(1.060.000,00)* | *97,64%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.970.000,00 | 43.910.000,00 | (1.060.000,00) | 97,64% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *15.000.000,00* | *14.565.000,00* | *(435.000,00)* | *97,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *15.000.000,00* | *14.565.000,00* | *(435.000,00)* | *97,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *9.000.000,00* | *8.565.000,00* | *(435.000,00)* | *95,17%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 8.565.000,00 | (435.000,00) | 95,17% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.03.2.01.0003* | | *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *12.000.000,00* | *8.800.000,00* | *(3.200.000,00)* | *73,33%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.04.2.02* | | *Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | *12.000.000,00* | *8.800.000,00* | *(3.200.000,00)* | *73,33%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.04.2.02.0001* | | *Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | *12.000.000,00* | *8.800.000,00* | *(3.200.000,00)* | *73,33%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.04.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 8.800.000,00 | (3.200.000,00) | 73,33% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *43.120.000,00* | *40.275.000,00* | *(2.845.000,00)* | *93,40%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *43.120.000,00* | *40.275.000,00* | *(2.845.000,00)* | *93,40%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *43.120.000,00* | *40.275.000,00* | *(2.845.000,00)* | *93,40%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.120.000,00 | 40.275.000,00 | (2.845.000,00) | 93,40% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *26.430.000,00* | *17.245.000,00* | *(9.185.000,00)* | *65,25%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *26.430.000,00* | *17.245.000,00* | *(9.185.000,00)* | *65,25%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.06.2.01.0011* | | *Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *15.420.000,00* | *9.880.000,00* | *(5.540.000,00)* | *64,07%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.06.2.01.0011 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.420.000,00 | 9.880.000,00 | (5.540.000,00) | 64,07% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.11.0000* | *7.01.06.2.01.0016* | | *Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | *11.010.000,00* | *7.365.000,00* | *(3.645.000,00)* | *66,89%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.06.2.01.0016 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.010.000,00 | 7.365.000,00 | (3.645.000,00) | 66,89% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 601.690.000,00 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,63 | |
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 601.690.000,00 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,63 | |
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 601.690.000,00 | 148.246.052,75 | (453.443.947,25) | 24,63 | |
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *3.581.540.466,00* | *3.425.725.430,00* | *(155.815.036,00)* | *95,65%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *3.581.540.466,00* | *3.425.725.430,00* | *(155.815.036,00)* | *95,65%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG* | *3.381.540.466,00* | *3.249.616.192,00* | *(131.924.274,00)* | *96,10%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *3.289.286.766,00* | *3.170.858.992,00* | *(118.427.774,00)* | *96,40%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *18.274.000,00* | *9.388.000,00* | *(8.886.000,00)* | *51,37%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *624.000,00* | *390.000,00* | *(234.000,00)* | *62,50%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 624.000,00 | 390.000,00 | (234.000,00) | 62,50% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *17.650.000,00* | *8.998.000,00* | *(8.652.000,00)* | *50,98%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.650.000,00 | 8.998.000,00 | (8.652.000,00) | 50,98% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *3.043.842.501,00* | *2.982.493.507,00* | *(61.348.994,00)* | *97,98%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *3.003.743.301,00* | *2.942.469.307,00* | *(61.273.994,00)* | *97,96%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.003.743.301,00 | 2.942.469.307,00 | (61.273.994,00) | 97,96% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *38.695.200,00* | *38.695.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 38.695.200,00 | 38.695.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *1.404.000,00* | *1.329.000,00* | *(75.000,00)* | *94,66%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.404.000,00 | 1.329.000,00 | (75.000,00) | 94,66% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *89.564.450,00* | *73.118.800,00* | *(16.445.650,00)* | *81,64%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *1.532.000,00* | *539.000,00* | *(993.000,00)* | *35,18%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.532.000,00 | 539.000,00 | (993.000,00) | 35,18% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *20.085.450,00* | *18.180.000,00* | *(1.905.450,00)* | *90,51%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.405.450,00 | 17.500.000,00 | (1.905.450,00) | 90,18% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *6.005.000,00* | *3.118.000,00* | *(2.887.000,00)* | *51,92%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.005.000,00 | 3.118.000,00 | (2.887.000,00) | 51,92% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.762.000,00* | *5.236.800,00* | *(525.200,00)* | *90,89%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.762.000,00 | 5.236.800,00 | (525.200,00) | 90,89% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *56.180.000,00* | *46.045.000,00* | *(10.135.000,00)* | *81,96%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.180.000,00 | 46.045.000,00 | (10.135.000,00) | 81,96% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *16.560.000,00* | *16.560.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *16.560.000,00* | *16.560.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.560.000,00 | 16.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *83.758.515,00* | *57.905.600,00* | *(25.852.915,00)* | *69,13%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *470.000,00* | *(30.000,00)* | *94,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 470.000,00 | (30.000,00) | 94,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *28.761.715,00* | *15.035.400,00* | *(13.726.315,00)* | *52,28%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.761.715,00 | 15.035.400,00 | (13.726.315,00) | 52,28% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.496.800,00* | *42.400.200,00* | *(12.096.600,00)* | *77,80%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 42.400.200,00 | (12.096.600,00) | 77,80% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *37.287.300,00* | *31.393.085,00* | *(5.894.215,00)* | *84,19%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *33.180.900,00* | *28.381.085,00* | *(4.799.815,00)* | *85,53%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.180.900,00 | 28.381.085,00 | (4.799.815,00) | 85,53% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *3.094.400,00* | *2.000.000,00* | *(1.094.400,00)* | *64,63%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.094.400,00 | 2.000.000,00 | (1.094.400,00) | 64,63% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *1.012.000,00* | *1.012.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *44.386.500,00* | *33.500.000,00* | *(10.886.500,00)* | *75,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *44.386.500,00* | *33.500.000,00* | *(10.886.500,00)* | *75,47%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *44.386.500,00* | *33.500.000,00* | *(10.886.500,00)* | *75,47%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.386.500,00 | 33.500.000,00 | (10.886.500,00) | 75,47% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *17.497.200,00* | *16.457.200,00* | *(1.040.000,00)* | *94,06%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *17.497.200,00* | *16.457.200,00* | *(1.040.000,00)* | *94,06%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *17.497.200,00* | *16.457.200,00* | *(1.040.000,00)* | *94,06%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.497.200,00 | 16.457.200,00 | (1.040.000,00) | 94,06% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *500.000,00* | *0,00* | *(500.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *500.000,00* | *0,00* | *(500.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *500.000,00* | *0,00* | *(500.000,00)* | *0,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *28.800.000,00* | *28.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *28.800.000,00* | *28.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *28.800.000,00* | *28.800.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.06* | | *PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA* | *1.070.000,00* | *0,00* | *(1.070.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.06.2.01* | | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | *1.070.000,00* | *0,00* | *(1.070.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0000* | *7.01.06.2.01.0005* | | *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *1.070.000,00* | *0,00* | *(1.070.000,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.070.000,00 | 0,00 | (1.070.000,00) | 0,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0001* | | | *KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG* | *200.000.000,00* | *176.109.238,00* | *(23.890.762,00)* | *88,05%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0001* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *200.000.000,00* | *176.109.238,00* | *(23.890.762,00)* | *88,05%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0001* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *200.000.000,00* | *176.109.238,00* | *(23.890.762,00)* | *88,05%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0001* | *7.01.03.2.02.0002* | | *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | *88.255.700,00* | *88.050.650,00* | *(205.050,00)* | *99,77%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.885.700,00 | 85.680.650,00 | (205.050,00) | 99,76% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.12.0001* | *7.01.03.2.02.0003* | | *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | *111.744.300,00* | *88.058.588,00* | *(23.685.712,00)* | *78,80%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.792.000,00 | 9.792.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.952.300,00 | 78.266.588,00 | (23.685.712,00) | 76,77% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN PAGARAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.582.291.946,00* | *1.536.670.903,00* | *(45.621.043,00)* | *97,12%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.582.291.946,00* | *1.536.670.903,00* | *(45.621.043,00)* | *97,12%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN PAGARAN* | *1.582.291.946,00* | *1.536.670.903,00* | *(45.621.043,00)* | *97,12%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.518.413.046,00* | *1.476.347.403,00* | *(42.065.643,00)* | *97,23%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *18.682.500,00* | *18.655.000,00* | *(27.500,00)* | *99,85%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *18.682.500,00* | *18.655.000,00* | *(27.500,00)* | *99,85%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.682.500,00 | 18.655.000,00 | (27.500,00) | 99,85% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.307.862.996,00* | *1.272.918.519,00* | *(34.944.477,00)* | *97,33%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.277.410.796,00* | *1.242.856.119,00* | *(34.554.677,00)* | *97,29%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.277.410.796,00 | 1.242.856.119,00 | (34.554.677,00) | 97,29% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *29.672.400,00* | *29.672.400,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 29.672.400,00 | 29.672.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *779.800,00* | *390.000,00* | *(389.800,00)* | *50,01%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 779.800,00 | 390.000,00 | (389.800,00) | 50,01% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *51.297.850,00* | *50.419.200,00* | *(878.650,00)* | *98,29%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *1.446.900,00* | *1.446.900,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.446.900,00 | 1.446.900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *13.146.550,00* | *12.268.200,00* | *(878.350,00)* | *93,32%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.146.550,00 | 12.268.200,00 | (878.350,00) | 93,32% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *7.854.400,00* | *7.854.100,00* | *(300,00)* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.854.400,00 | 7.854.100,00 | (300,00) | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *28.850.000,00* | *28.850.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.850.000,00 | 28.850.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *22.000.000,00* | *21.660.000,00* | *(340.000,00)* | *98,45%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.07.0010* | | *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *22.000.000,00* | *21.660.000,00* | *(340.000,00)* | *98,45%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.07.0010 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.000.000,00 | 21.660.000,00 | (340.000,00) | 98,45% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *72.309.200,00* | *68.359.684,00* | *(3.949.516,00)* | *94,54%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *500.000,00* | *500.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *17.312.400,00* | *13.466.000,00* | *(3.846.400,00)* | *77,78%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.312.400,00 | 13.466.000,00 | (3.846.400,00) | 77,78% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.496.800,00* | *54.393.684,00* | *(103.116,00)* | *99,81%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 54.393.684,00 | (103.116,00) | 99,81% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *46.260.500,00* | *44.335.000,00* | *(1.925.500,00)* | *95,84%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *38.225.000,00* | *36.347.000,00* | *(1.878.000,00)* | *95,09%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.225.000,00 | 36.347.000,00 | (1.878.000,00) | 95,09% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *3.447.500,00* | *3.400.000,00* | *(47.500,00)* | *98,62%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.447.500,00 | 3.400.000,00 | (47.500,00) | 98,62% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.01.2.09.0010* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | *4.588.000,00* | *4.588.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09.0010 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.588.000,00 | 4.588.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *17.987.500,00* | *17.879.500,00* | *(108.000,00)* | *99,40%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *17.987.500,00* | *17.879.500,00* | *(108.000,00)* | *99,40%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *17.987.500,00* | *17.879.500,00* | *(108.000,00)* | *99,40%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.987.500,00 | 17.879.500,00 | (108.000,00) | 99,40% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *20.509.400,00* | *19.203.000,00* | *(1.306.400,00)* | *93,63%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.03.2.02* | | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *20.509.400,00* | *19.203.000,00* | *(1.306.400,00)* | *93,63%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.03.2.02.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | *20.509.400,00* | *19.203.000,00* | *(1.306.400,00)* | *93,63%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.03.2.02.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.509.400,00 | 19.203.000,00 | (1.306.400,00) | 93,63% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *1.641.000,00* | *1.641.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *1.641.000,00* | *1.641.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *1.641.000,00* | *1.641.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.641.000,00 | 1.641.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *23.741.000,00* | *21.600.000,00* | *(2.141.000,00)* | *90,98%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *23.741.000,00* | *21.600.000,00* | *(2.141.000,00)* | *90,98%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.05.2.01.0002* | | *Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | *2.141.000,00* | *0,00* | *(2.141.000,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.05.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.141.000,00 | 0,00 | (2.141.000,00) | 0,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.13.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 1.232.457.895,00 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46% | |
| 7.01 | | | | KECAMATAN | 1.232.457.895,00 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | | | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 1.232.457.895,00 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.155.932.895,00 | 1.093.241.450,00 | (62.691.445,00) | 94,58% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.990.000,00 | 29.000.000,00 | (1.990.000,00) | 93,58% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.990.000,00 | 29.000.000,00 | (1.990.000,00) | 93,58% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.990.000,00 | 29.000.000,00 | (1.990.000,00) | 93,58% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 957.067.395,00 | 905.750.210,00 | (51.317.185,00) | 94,64% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 929.842.995,00 | 878.525.810,00 | (51.317.185,00) | 94,48% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 929.842.995,00 | 878.525.810,00 | (51.317.185,00) | 94,48% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 27.224.400,00 | 27.224.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 27.224.400,00 | 27.224.400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 18.061.800,00 | 17.936.500,00 | (125.300,00) | 99,31% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.836.800,00 | 5.836.500,00 | (300,00) | 99,99% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.836.800,00 | 5.836.500,00 | (300,00) | 99,99% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 11.205.000,00 | 11.080.000,00 | (125.000,00) | 98,88% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.205.000,00 | 11.080.000,00 | (125.000,00) | 98,88% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.185.700,00 | 85.041.700,00 | (8.144.000,00) | 91,26% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.979.100,00 | 3.720.000,00 | (1.259.100,00) | 74,71% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.979.100,00 | 3.720.000,00 | (1.259.100,00) | 74,71% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33.009.800,00 | 26.621.700,00 | (6.388.100,00) | 80,65% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.009.800,00 | 26.621.700,00 | (6.388.100,00) | 80,65% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800,00 | 54.000.000,00 | (496.800,00) | 99,09% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.496.800,00 | 54.000.000,00 | (496.800,00) | 99,09% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 56.628.000,00 | 55.513.040,00 | (1.114.960,00) | 98,03% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.621.200,00 | 40.623.740,00 | (997.460,00) | 97,60% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.621.200,00 | 40.623.740,00 | (997.460,00) | 97,60% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.006.800,00 | 14.889.300,00 | (117.500,00) | 99,22% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.006.800,00 | 14.889.300,00 | (117.500,00) | 99,22% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 31.952.800,00 | 30.982.800,00 | (970.000,00) | 96,96% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02.2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 31.952.800,00 | 30.982.800,00 | (970.000,00) | 96,96% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 31.952.800,00 | 30.982.800,00 | (970.000,00) | 96,96% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.952.800,00 | 30.982.800,00 | (970.000,00) | 96,96% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 22.972.200,00 | 18.355.000,00 | (4.617.200,00) | 79,90% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03.2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 22.972.200,00 | 18.355.000,00 | (4.617.200,00) | 79,90% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 22.972.200,00 | 18.355.000,00 | (4.617.200,00) | 79,90% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.972.200,00 | 18.355.000,00 | (4.617.200,00) | 79,90% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05.2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KANTOR KECAMATAN MUARA

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | - | |
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | - | |
| | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | - | |
| 7.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *7* | | | | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *1.896.347.309,00* | *1.669.580.640,00* | *(226.766.669,00)* | *88,04%* | |
| *7.01* | | | | *KECAMATAN* | *1.896.347.309,00* | *1.669.580.640,00* | *(226.766.669,00)* | *88,04%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | | | *KANTOR KECAMATAN MUARA* | *1.896.347.309,00* | *1.669.580.640,00* | *(226.766.669,00)* | *88,04%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *1.790.208.329,00* | *1.595.308.240,00* | *(194.900.089,00)* | *89,11%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *20.618.900,00* | *16.342.600,00* | *(4.276.300,00)* | *79,26%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *3.623.900,00* | *1.374.600,00* | *(2.249.300,00)* | *37,93%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.623.900,00 | 1.374.600,00 | (2.249.300,00) | 37,93% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *16.995.000,00* | *14.968.000,00* | *(2.027.000,00)* | *88,07%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.995.000,00 | 14.968.000,00 | (2.027.000,00) | 88,07% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *1.598.979.490,00* | *1.473.957.949,00* | *(125.021.541,00)* | *92,18%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *1.560.959.990,00* | *1.437.558.349,00* | *(123.401.641,00)* | *92,09%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.560.959.990,00 | 1.437.558.349,00 | (123.401.641,00) | 92,09% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *32.767.200,00* | *32.767.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 32.767.200,00 | 32.767.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *5.252.300,00* | *3.632.400,00* | *(1.619.900,00)* | *69,16%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.252.300,00 | 3.632.400,00 | (1.619.900,00) | 69,16% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *68.425.575,00* | *48.084.700,00* | *(20.340.875,00)* | *70,27%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *6.497.100,00* | *4.531.000,00* | *(1.966.100,00)* | *69,74%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.497.100,00 | 4.531.000,00 | (1.966.100,00) | 69,74% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *12.739.775,00* | *11.371.500,00* | *(1.368.275,00)* | *89,26%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.739.775,00 | 11.371.500,00 | (1.368.275,00) | 89,26% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *4.110.900,00* | *3.014.600,00* | *(1.096.300,00)* | *73,33%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.110.900,00 | 3.014.600,00 | (1.096.300,00) | 73,33% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *2.384.200,00* | *1.782.600,00* | *(601.600,00)* | *74,77%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.384.200,00 | 1.782.600,00 | (601.600,00) | 74,77% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06.0006* | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | *1.998.600,00* | *1.500.000,00* | *(498.600,00)* | *75,05%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.998.600,00 | 1.500.000,00 | (498.600,00) | 75,05% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *40.695.000,00* | *25.885.000,00* | *(14.810.000,00)* | *63,61%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.695.000,00 | 25.885.000,00 | (14.810.000,00) | 63,61% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *71.119.364,00* | *36.197.940,00* | *(34.921.424,00)* | *50,90%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *1.250.000,00* | *1.200.000,00* | *(50.000,00)* | *96,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | 1.200.000,00 | (50.000,00) | 96,00% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *15.264.600,00* | *4.977.640,00* | *(10.286.960,00)* | *32,61%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.264.600,00 | 4.977.640,00 | (10.286.960,00) | 32,61% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *30.020.300,00* | *(24.584.464,00)* | *54,98%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 30.020.300,00 | (24.584.464,00) | 54,98% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *31.065.000,00* | *20.725.051,00* | *(10.339.949,00)* | *66,72%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *31.065.000,00* | *20.725.051,00* | *(10.339.949,00)* | *66,72%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.065.000,00 | 20.725.051,00 | (10.339.949,00) | 66,72% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.02* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK* | *63.550.000,00* | *39.142.000,00* | *(24.408.000,00)* | *61,59%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.02.2.01* | | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *63.550.000,00* | *39.142.000,00* | *(24.408.000,00)* | *61,59%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.02.2.01.0001* | | *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | *63.550.000,00* | *39.142.000,00* | *(24.408.000,00)* | *61,59%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.550.000,00 | 39.142.000,00 | (24.408.000,00) | 61,59% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.03* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN* | *15.988.980,00* | *13.530.400,00* | *(2.458.580,00)* | *84,62%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.03.2.01* | | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | *15.988.980,00* | *13.530.400,00* | *(2.458.580,00)* | *84,62%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.03.2.01.0001* | | *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | *15.988.980,00* | *13.530.400,00* | *(2.458.580,00)* | *84,62%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.988.980,00 | 13.530.400,00 | (2.458.580,00) | 84,62% | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.04* | | *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM* | *5.000.000,00* | *0,00* | *(5.000.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.04.2.01* | | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *5.000.000,00* | *0,00* | *(5.000.000,00)* | *0,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.04.2.01.0001* | | *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | *5.000.000,00* | *0,00* | *(5.000.000,00)* | *0,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | 0,00% | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.05* | | *PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.05.2.01* | | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| *7.01* | *7.01.0.00.0.00.15.0000* | *7.01.05.2.01.0008* | | *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | *21.600.000,00* | *21.600.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KAB. TAPANULI UTARA**

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | | | 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| *8.01* | | | | *UNSUR PEMERINTAHAN UMUM* | *59.024.885.615,00* | *58.907.847.831,00* | *(117.037.784,00)* | *99,80%* | |
| *8.01* | | | | *KESATUAN BANGSA DAN POLITIK* | *59.024.885.615,00* | *58.907.847.831,00* | *(117.037.784,00)* | *99,80%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | | | *BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK* | *59.024.885.615,00* | *58.907.847.831,00* | *(117.037.784,00)* | *99,80%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01* | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *2.851.226.946,00* | *2.764.184.464,00* | *(87.042.482,00)* | *96,95%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.01* | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *30.920.000,00* | *30.906.000,00* | *(14.000,00)* | *99,95%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.01.0002* | | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *2.540.000,00* | *2.540.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.01.0004* | | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | *2.540.000,00* | *2.540.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.01.0006* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *4.000.000,00* | *4.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.01.0007* | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *21.840.000,00* | *21.826.000,00* | *(14.000,00)* | *99,94%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0007 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.840.000,00 | 21.826.000,00 | (14.000,00) | 99,94% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.02* | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.530.103.382,00* | *2.457.859.195,00* | *(72.244.187,00)* | *97,14%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.02.0001* | | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | *2.474.400.182,00* | *2.402.155.995,00* | *(72.244.187,00)* | *97,08%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02.0001 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.474.400.182,00 | 2.402.155.995,00 | (72.244.187,00) | 97,08% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.02.0003* | | *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | *51.703.200,00* | *51.703.200,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02.0003 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 51.703.200,00 | 51.703.200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.02.0005* | | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *4.000.000,00* | *4.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.06* | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *148.549.000,00* | *148.035.663,00* | *(513.337,00)* | *99,65%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.06.0001* | | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | *3.768.900,00* | *3.768.900,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.768.900,00 | 3.768.900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.06.0002* | | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | *25.246.600,00* | *24.762.850,00* | *(483.750,00)* | *98,08%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.246.600,00 | 24.762.850,00 | (483.750,00) | 98,08% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.06.0003* | | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | *5.120.000,00* | *5.120.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.06.0005* | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | *5.968.500,00* | *5.968.100,00* | *(400,00)* | *99,99%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.968.500,00 | 5.968.100,00 | (400,00) | 99,99% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.06.0009* | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *108.445.000,00* | *108.415.813,00* | *(29.187,00)* | *99,97%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.445.000,00 | 108.415.813,00 | (29.187,00) | 99,97% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.07* | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *15.787.200,00* | *15.600.000,00* | *(187.200,00)* | *98,81%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.07.0006* | | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *15.787.200,00* | *15.600.000,00* | *(187.200,00)* | *98,81%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.07.0006 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.787.200,00 | 15.600.000,00 | (187.200,00) | 98,81% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *96.094.364,00* | *83.884.371,00* | *(12.209.993,00)* | *87,29%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.08.0001* | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.08.0002* | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | *39.489.600,00* | *27.351.787,00* | *(12.137.813,00)* | *69,26%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08.0002 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.489.600,00 | 27.351.787,00 | (12.137.813,00) | 69,26% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.08.0004* | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | *54.604.764,00* | *54.532.584,00* | *(72.180,00)* | *99,87%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.604.764,00 | 54.532.584,00 | (72.180,00) | 99,87% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *29.773.000,00* | *27.899.235,00* | *(1.873.765,00)* | *93,71%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.09.0001* | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | *19.769.000,00* | *17.924.535,00* | *(1.844.465,00)* | *90,67%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09.0001 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.769.000,00 | 17.924.535,00 | (1.844.465,00) | 90,67% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.09.0006* | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | *5.033.700,00* | *5.029.900,00* | *(3.800,00)* | *99,92%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.033.700,00 | 5.029.900,00 | (3.800,00) | 99,92% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.01.2.09.0009* | | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | *4.970.300,00* | *4.944.800,00* | *(25.500,00)* | *99,49%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09.0009 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.970.300,00 | 4.944.800,00 | (25.500,00) | 99,49% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.02* | | *PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN* | *466.865.600,00* | *440.201.500,00* | *(26.664.100,00)* | *94,29%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.02.2.01* | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | *466.865.600,00* | *440.201.500,00* | *(26.664.100,00)* | *94,29%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.02.2.01.0003* | | *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | *300.000.000,00* | *297.431.900,00* | *(2.568.100,00)* | *99,14%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.02.2.01.0003 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000,00 | 297.431.900,00 | (2.568.100,00) | 99,14% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.02.2.01.0004* | | *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | *166.865.600,00* | *142.769.600,00* | *(24.096.000,00)* | *85,56%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.02.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 166.865.600,00 | 142.769.600,00 | (24.096.000,00) | 85,56% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.03* | | *PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK* | *55.369.658.069,00* | *55.369.658.067,00* | *(2,00)* | *100,00%* | |

| Kode | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Bertambah/ (Berkurang) | % | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.03.2.01* | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik* | *55.369.658.069,00* | *55.369.658.067,00* | *(2,00)* | *100,00%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.03.2.01.0002* | | *Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | *55.369.658.069,00* | *55.369.658.067,00* | *(2,00)* | *100,00%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.03.2.01.0002 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 55.369.658.069,00 | 55.369.658.067,00 | (2,00) | 100,00% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.04* | | *PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN* | *33.135.000,00* | *32.995.000,00* | *(140.000,00)* | *99,58%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.04.2.01* | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | *33.135.000,00* | *32.995.000,00* | *(140.000,00)* | *99,58%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.04.2.01.0005* | | *Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | *33.135.000,00* | *32.995.000,00* | *(140.000,00)* | *99,58%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.04.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.135.000,00 | 32.995.000,00 | (140.000,00) | 99,58% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.06* | | *PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL* | *304.000.000,00* | *300.808.800,00* | *(3.191.200,00)* | *98,95%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.06.2.01* | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | *304.000.000,00* | *300.808.800,00* | *(3.191.200,00)* | *98,95%* | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.06.2.01.0004* | | *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | *36.300.000,00* | *35.360.000,00* | *(940.000,00)* | *97,41%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01.0004 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.300.000,00 | 35.360.000,00 | (940.000,00) | 97,41% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.06.2.01.0005* | | *Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | *63.700.000,00* | *63.448.800,00* | *(251.200,00)* | *99,61%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01.0005 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.700.000,00 | 63.448.800,00 | (251.200,00) | 99,61% | |
| *8.01* | *8.01.0.00.0.00.02.0000* | *8.01.06.2.01.0006* | | *Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | *204.000.000,00* | *202.000.000,00* | *(2.000.000,00)* | *99,02%* | |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01.0006 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 204.000.000,00 | 202.000.000,00 | (2.000.000,00) | 99,02% | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran I.4 Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KAB. TAPANULI UTARA**
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 758.609.803.948 | 723.861.108.900,47 | 90.910.483.473 | 88.019.047.999,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 415.430.223.287 | 384.347.918.749,00 | 27.523.171.040 | 30.230.283.472,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 415.430.223.287 | 384.347.918.749,00 | 27.523.171.040 | 30.230.283.472,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 355.940.802.854 | 327.450.013.570,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.132.400 | 34.418.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.142.600 | 5.088.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.999.800 | 4.340.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.990.000 | 24.990.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 354.721.410.054 | 326.286.602.829,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 354.503.935.254 | 326.077.113.629,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 217.474.800 | 209.489.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 488.144.950 | 469.188.374,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.982.100 | 4.890.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 188.206.850 | 169.998.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000 | 9.971.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 95.000.000 | 94.590.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.000.000 | 35.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 154.956.000 | 154.738.174,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 501.749.700 | 493.074.780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250.000 | 250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103.500.000 | 94.954.280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.999.700 | 19.870.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 378.000.000 | 378.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 194.365.750 | 166.729.187,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 194.365.750 | 166.729.187,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 59.489.420.433 | 56.897.905.179,00 | 27.523.171.040 | 30.230.283.472,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 32.094.313.908 | 30.819.033.650,00 | 15.162.324.040 | 16.868.298.471,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 23.986.000 | 12.130.000,00 | 480.000.000 | 480.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2.860.000 | 2.860.000,00 | 420.000.000 | 420.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2.970.000 | 2.970.000,00 | 283.000.000 | 283.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 820.000 | 820.000,00 | 78.750.000 | 77.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 42.773.000 | 2.100.000,00 | 800.000.000 | 799.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.686.981.248 | 1.580.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 149.999.900 | 138.190.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 29.911.762.760 | 28.860.654.268,00 | 9.262.251.040 | 10.971.587.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 40.050.000 | 30.194.000,00 | 960.000.000 | 960.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.540.000 | 1.540.000,00 | 95.823.000 | 95.823.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 230.571.000 | 187.174.482,00 | 2.782.500.000 | 2.780.588.246,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 19.685.522.000 | 18.821.715.540,00 | 12.360.847.000 | 13.361.985.000,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.540.000 | 1.540.000,00 | 185.000.000 | 185.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 12.311.000 | 7.633.000,00 | 520.000.000 | 520.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | 7.993.000 | 5.410.000,00 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 289.666.000 | 284.580.650,00 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0 | 0,00 | 180.000.000 | 180.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 3.080.000 | 3.080.000,00 | 716.815.000 | 716.815.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.540.000 | 1.540.000,00 | 191.294.000 | 191.294.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | 0 | 0,00 | 100.000.000 | 98.670.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 540.000 | 540.000,00 | 170.775.000 | 170.519.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 19.358.852.000 | 18.507.393.890,00 | 6.053.988.000 | 7.057.212.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0044 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | 0 | 0,00 | 173.245.000 | 173.245.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | 0 | 0,00 | 49.730.000 | 49.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 10.000.000 | 9.998.000,00 | 190.000.000 | 189.500.000,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0 | 0,00 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 7.015.904.525 | 6.595.275.989,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 1.853.950.000 | 1.630.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 189.999.800 | 145.565.264,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4.921.954.925 | 4.770.205.825,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 49.999.800 | 48.704.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 693.680.000 | 661.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 693.680.000 | 661.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 274.054.861.936 | 271.956.405.924,00 | 8.199.365.000 | 7.374.043.489,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS KESEHATAN | 138.310.527.911 | 131.798.140.598,00 | 4.174.233.000 | 2.951.698.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 94.415.146.182 | 89.700.415.834,00 | 3.301.905.000 | 2.853.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 236.005.000 | 228.424.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 75.000.000 | 69.570.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 3.808.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 157.005.000 | 155.045.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 93.040.573.824 | 88.435.653.602,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 92.778.049.424 | 88.177.129.232,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 258.524.400 | 258.524.370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 260.000.000 | 250.530.253,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.000.000 | 58.643.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000 | 15.476.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 170.000.000 | 166.411.153,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14.407.500 | 14.387.500,00 | 3.301.905.000 | 2.853.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14.407.500 | 14.387.500,00 | 3.301.905.000 | 2.853.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 549.604.858 | 463.773.842,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 140.000.000 | 60.870.784,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 409.604.858 | 402.903.058,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 314.555.000 | 307.646.137,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 314.555.000 | 307.646.137,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 41.640.637.779 | 40.061.694.034,00 | 872.328.000 | 98.698.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 6.487.639.500 | 6.375.453.408,00 | 871.280.000 | 97.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 10.000.000 | 9.969.600,00 | 871.280.000 | 97.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 99.867.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 6.212.472.500 | 6.211.907.558,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 165.300.000 | 153.576.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 35.037.812.279 | 33.574.133.826,00 | 1.048.000 | 1.048.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 299.485.916 | 72.546.053,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 514.006.534 | 502.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 150.000.000 | 143.271.490,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 663.119.600 | 655.167.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 43.142.800 | 42.423.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 575.249.750 | 566.676.830,00 | 1.048.000 | 1.048.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 485.310.700 | 480.297.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 92.220.000 | 88.970.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 40.258.000 | 38.848.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 987.590.000 | 539.369.928,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 30.234.384.979 | 29.728.117.180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 144.988.000 | 73.536.295,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 23.904.000 | 23.904.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 358.814.000 | 342.119.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 28.500.000 | 28.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 24.282.900 | 21.111.050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 372.555.100 | 226.626.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 115.186.000 | 112.106.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 115.186.000 | 112.106.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.898.900.950 | 1.762.861.730,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 173.342.000 | 172.006.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 173.342.000 | 172.006.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.725.558.950 | 1.590.855.730,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.725.558.950 | 1.590.855.730,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 316.329.000 | 239.205.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 63.730.000 | 53.263.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 63.730.000 | 53.263.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 85.387.000 | 70.928.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 85.387.000 | 70.928.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 167.212.000 | 115.013.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 167.212.000 | 115.013.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 39.514.000 | 33.964.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 39.514.000 | 33.964.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 39.514.000 | 33.964.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | | PUSKESMAS AEK RAJA | 868.928.000 | 832.559.110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 813.278.000 | 776.909.110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 801.278.000 | 767.909.110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 34.000.000 | 34.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 59.650.000 | 59.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 11.560.000 | 11.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.600.000 | 13.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 5.100.000 | 5.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 226.308.000 | 226.308.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 19.870.000 | 19.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 30.610.000 | 30.610.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 106.650.000 | 106.590.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 194.980.000 | 161.731.110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.680.000 | 1.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 15.000.000 | 14.975.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 7.710.000 | 7.675.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 72.960.000 | 72.960.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 55.650.000 | 55.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 55.650.000 | 55.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 55.650.000 | 55.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | | PUSKESMAS BUTAR | 870.283.000 | 830.219.191,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 778.033.000 | 737.969.191,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 766.033.000 | 728.969.191,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 24.920.000 | 24.920.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 42.800.000 | 42.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 14.350.000 | 14.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 10.300.000 | 10.300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 100.000 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 233.102.000 | 233.102.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10.870.000 | 10.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 26.290.000 | 25.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 89.485.000 | 87.275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 196.900.000 | 162.776.191,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 210.000 | 210.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 19.530.000 | 19.530.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 7.140.000 | 7.140.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 89.936.000 | 89.936.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 92.250.000 | 92.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 92.250.000 | 92.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 92.250.000 | 92.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | | PUSKESMAS GAROGA | 1.101.226.000 | 1.073.673.397,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 982.216.000 | 954.763.397,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 970.216.000 | 945.763.397,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 148.850.000 | 148.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 37.260.000 | 37.260.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 19.140.000 | 19.140.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9.600.000 | 9.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.840.000 | 3.640.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 302.226.000 | 301.826.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5.000.000 | 4.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 19.760.000 | 19.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 124.440.000 | 123.975.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 251.220.000 | 228.072.397,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.560.000 | 1.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 2.560.000 | 2.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.860.000 | 4.860.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 23.700.000 | 23.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 119.010.000 | 118.910.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 119.010.000 | 118.910.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 119.010.000 | 118.910.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | | PUSKESMAS HUTABAGINDA | 1.189.960.000 | 1.137.279.581,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.063.030.000 | 1.010.349.581,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.051.030.000 | 1.001.349.581,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 44.100.000 | 44.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 98.170.000 | 98.170.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 6.400.000 | 28.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 296.480.000 | 291.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10.090.000 | 10.090.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 32.320.000 | 32.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 122.180.000 | 122.180.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 268.500.000 | 223.979.581,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 15.690.000 | 15.690.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 22.140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.440.000 | 1.440.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 7.140.000 | 7.140.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 113.600.000 | 113.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 126.930.000 | 126.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 126.930.000 | 126.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 126.930.000 | 126.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | | PUSKESMAS JANJI ANGKOLA | 929.873.000 | 910.014.390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 824.993.000 | 805.134.390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 812.993.000 | 796.134.390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 36.740.000 | 36.740.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 71.220.000 | 71.220.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 7.800.000 | 7.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 6.100.000 | 6.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.900.000 | 3.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 242.874.000 | 242.874.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10.230.000 | 10.230.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 24.204.000 | 23.554.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 93.630.000 | 93.630.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 211.527.000 | 195.318.390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.680.000 | 1.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 13.200.000 | 13.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.008.000 | 4.008.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 84.280.000 | 84.280.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 104.880.000 | 104.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 104.880.000 | 104.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 104.880.000 | 104.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | | PUSKESMAS LUMBAN SINAGA | 1.015.380.000 | 1.005.060.684,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 911.960.000 | 901.640.684,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 899.960.000 | 892.640.684,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 67.900.000 | 67.855.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 40.920.000 | 40.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 7.250.000 | 7.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9.000.000 | 8.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.600.000 | 3.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 272.270.000 | 272.245.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5.000.000 | 4.960.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 15.850.000 | 15.090.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 119.920.000 | 119.825.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 231.180.000 | 225.460.684,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.440.000 | 1.440.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 15.000.000 | 14.985.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 2.240.000 | 2.240.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.860.000 | 4.860.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 103.530.000 | 103.530.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 103.420.000 | 103.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 103.420.000 | 103.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 103.420.000 | 103.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | | PUSKESMAS MUARA | 1.049.563.000 | 1.034.700.830,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 954.508.000 | 939.645.830,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 942.508.000 | 930.645.830,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 40.125.000 | 40.125.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 81.450.000 | 81.450.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 14.940.000 | 14.940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 279.658.000 | 279.658.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 13.330.000 | 13.330.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 34.095.000 | 34.095.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 124.495.000 | 124.495.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 238.600.000 | 226.737.830,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 13.020.000 | 13.020.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 2.400.000 | 2.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6.420.000 | 6.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 83.375.000 | 83.375.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 95.055.000 | 95.055.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 95.055.000 | 95.055.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 95.055.000 | 95.055.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | | PUSKESMAS ONAN HASANG | 1.014.180.000 | 1.001.752.433,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 926.600.000 | 914.172.433,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 914.600.000 | 905.172.433,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 30.400.000 | 30.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 96.900.000 | 96.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 13.600.000 | 13.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 5.800.000 | 5.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 260.710.000 | 260.710.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5.500.000 | 5.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 23.420.000 | 23.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 140.100.000 | 140.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 231.210.000 | 221.782.433,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 9.600.000 | 9.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8.560.000 | 8.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 83.000.000 | 83.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 87.580.000 | 87.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 87.580.000 | 87.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 87.580.000 | 87.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | | PUSKESMAS PANGARIBUAN | 1.011.890.000 | 998.211.604,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 937.348.000 | 923.669.604,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 925.348.000 | 914.669.604,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 42.480.000 | 42.480.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 80.040.000 | 80.040.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 7.200.000 | 7.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.600.000 | 3.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 258.340.000 | 258.340.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 11.050.000 | 11.050.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 21.348.000 | 21.158.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 126.500.000 | 126.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 230.700.000 | 220.211.604,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 27.900.000 | 27.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.350.000 | 1.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 3.300.000 | 3.300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 100.340.000 | 100.340.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 74.542.000 | 74.542.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 74.542.000 | 74.542.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 74.542.000 | 74.542.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | | PUSKESMAS PANIARAN | 865.989.000 | 856.703.499,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 802.366.000 | 793.080.499,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 790.366.000 | 784.080.499,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 61.100.000 | 61.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 51.260.000 | 50.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 13.200.000 | 13.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 10.300.000 | 10.300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 4.590.000 | 4.590.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 225.686.000 | 225.671.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 7.700.000 | 7.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 26.920.000 | 26.425.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 102.585.000 | 102.585.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 195.025.000 | 189.849.499,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 25.200.000 | 25.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 57.600.000 | 57.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 63.623.000 | 63.623.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 63.623.000 | 63.623.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 63.623.000 | 63.623.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | | PUSKESMAS PARMONANGAN | 1.118.824.000 | 958.381.999,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.031.494.000 | 873.231.999,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.019.494.000 | 864.231.999,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 33.660.000 | 33.445.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 73.788.000 | 73.548.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 18.360.000 | 18.125.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 11.500.000 | 11.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 1.700.000 | 1.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 263.194.000 | 262.360.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 17.150.000 | 17.090.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 25.912.000 | 25.487.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 124.390.000 | 123.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 229.360.000 | 190.906.499,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 113.770.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2.040.000 | 2.040.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 7.200.000 | 7.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5.430.000 | 5.430.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 90.440.000 | 90.440.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 87.330.000 | 85.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 87.330.000 | 85.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 87.330.000 | 85.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | | PUSKESMAS PARSINGKAMAN | 1.048.530.000 | 1.016.908.619,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 976.770.000 | 945.148.619,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 964.770.000 | 936.148.619,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 40.080.000 | 40.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 64.600.000 | 64.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 8.200.000 | 8.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.900.000 | 3.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 264.870.000 | 264.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6.310.000 | 6.310.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 29.250.000 | 29.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 139.830.000 | 139.830.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 238.660.000 | 210.038.619,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.560.000 | 1.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 27.300.000 | 27.300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 2.080.000 | 2.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5.430.000 | 5.430.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 125.800.000 | 125.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 71.760.000 | 71.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 71.760.000 | 71.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 71.760.000 | 71.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | | PUSKESMAS SARULLA | 1.012.215.000 | 1.009.128.099,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 939.431.000 | 936.344.099,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 927.431.000 | 927.344.099,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 43.420.000 | 43.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 70.484.000 | 70.484.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 9.200.000 | 9.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 8.800.000 | 8.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 3.120.000 | 3.120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 258.735.000 | 258.735.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9.970.000 | 9.970.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 21.826.000 | 21.826.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 134.160.000 | 134.160.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 228.836.000 | 228.749.099,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 24.180.000 | 24.180.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.170.000 | 1.170.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5.430.000 | 5.430.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 106.900.000 | 106.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 72.784.000 | 72.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 72.784.000 | 72.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 72.784.000 | 72.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | | PUSKESMAS SIATAS BARITA | 981.188.000 | 948.361.915,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 870.098.000 | 837.271.915,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 858.098.000 | 828.271.915,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 41.400.000 | 41.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 77.640.000 | 77.040.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 11.100.000 | 11.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000 | 13.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 248.638.000 | 248.638.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9.730.000 | 9.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.630.000 | 20.630.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 85.960.000 | 85.390.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 222.140.000 | 195.083.915,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 18.000.000 | 18.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.280.000 | 4.280.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 93.780.000 | 93.780.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 111.090.000 | 111.090.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 111.090.000 | 111.090.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 111.090.000 | 111.090.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | | PUSKESMAS SIBORONGBORONG | 1.078.385.000 | 1.070.259.528,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.038.575.000 | 1.030.449.528,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.026.575.000 | 1.021.449.528,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 73.200.000 | 73.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 53.700.000 | 53.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 11.850.000 | 11.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 4.590.000 | 4.590.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 264.400.000 | 264.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8.500.000 | 8.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 22.880.000 | 22.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 167.875.000 | 167.875.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 242.960.000 | 237.834.528,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 14.620.000 | 14.620.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 28.350.000 | 28.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 4.400.000 | 4.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 3.150.000 | 3.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 104.900.000 | 104.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 39.810.000 | 39.810.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 39.810.000 | 39.810.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 39.810.000 | 39.810.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | | PUSKESMAS SILANGIT | 874.454.000 | 849.987.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 818.804.000 | 794.337.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 806.804.000 | 785.337.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 35.250.000 | 35.246.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 75.500.000 | 74.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 14.200.000 | 14.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 5.500.000 | 5.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 228.434.000 | 228.434.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 14.530.000 | 14.530.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 32.630.000 | 32.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 112.400.000 | 112.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 194.900.000 | 174.588.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8.880.000 | 8.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 57.900.000 | 57.898.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 55.650.000 | 55.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 55.650.000 | 55.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 55.650.000 | 55.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | | PUSKESMAS SIMANGUMBAN | 921.936.000 | 918.196.035,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 842.526.000 | 838.786.035,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 830.526.000 | 829.786.035,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 47.360.000 | 47.360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 60.520.000 | 60.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 13.200.000 | 13.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000 | 13.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 240.336.000 | 240.336.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 15.250.000 | 15.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 23.520.000 | 23.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 101.350.000 | 101.050.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 208.880.000 | 208.440.035,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.680.000 | 1.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5.430.000 | 5.430.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 77.400.000 | 77.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 79.410.000 | 79.410.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 79.410.000 | 79.410.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 79.410.000 | 79.410.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | | PUSKESMAS SIPAHUTAR | 1.107.579.000 | 1.092.324.725,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.046.684.000 | 1.031.429.725,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.034.684.000 | 1.022.429.725,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 52.680.000 | 52.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 64.800.000 | 64.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000 | 13.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17.250.000 | 17.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 280.402.000 | 280.402.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 7.650.000 | 7.650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 28.272.000 | 28.272.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 154.320.000 | 153.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 252.720.000 | 240.915.725,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 24.000.000 | 24.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.290.000 | 4.290.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 126.500.000 | 126.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 60.895.000 | 60.895.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 60.895.000 | 60.895.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 60.895.000 | 60.895.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | | PUSKESMAS SIPULTAK | 869.428.000 | 814.814.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 802.648.000 | 749.554.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 790.648.000 | 740.554.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 47.460.000 | 47.460.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 51.960.000 | 43.840.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 3.360.000 | 3.255.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 14.760.000 | 14.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 1.320.000 | 1.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 218.338.000 | 218.338.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5.725.000 | 5.725.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 22.795.000 | 20.770.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 91.950.000 | 91.950.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 197.720.000 | 158.726.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 600.000 | 600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 41.280.000 | 41.270.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 800.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 12.240.000 | 12.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 80.340.000 | 80.340.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 66.780.000 | 65.260.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 66.780.000 | 65.260.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 66.780.000 | 65.260.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | | PUSKESMAS SITADATADA | 879.242.000 | 821.316.571,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 815.672.000 | 757.746.571,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 803.672.000 | 748.746.571,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 51.300.000 | 51.300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 66.084.000 | 65.484.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 5.760.000 | 5.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 5.500.000 | 5.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 224.476.000 | 214.608.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 7.390.000 | 7.390.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 23.822.000 | 23.372.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 133.370.000 | 133.370.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 199.800.000 | 159.402.071,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 10.800.000 | 10.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 400.000 | 400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 65.190.000 | 61.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 63.570.000 | 63.570.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 63.570.000 | 63.570.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 63.570.000 | 63.570.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | | PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN | 980.824.000 | 947.970.701,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 903.304.000 | 870.450.701,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 891.304.000 | 861.450.701,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 23.520.000 | 23.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 103.320.000 | 103.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 8.640.000 | 8.640.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000 | 13.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 2.400.000 | 2.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 251.471.000 | 251.471.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8.500.000 | 8.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 28.680.000 | 28.280.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 121.970.000 | 121.970.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 223.353.000 | 193.919.701,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 800.000 | 800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 27.000.000 | 27.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 810.000 | 810.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6.000.000 | 5.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 71.840.000 | 71.840.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000 | 9.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 77.520.000 | 77.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 77.520.000 | 77.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 77.520.000 | 77.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | | RSU DAERAH TARUTUNG | 114.954.457.025 | 120.030.440.515,00 | 4.025.132.000 | 4.422.345.489,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.004.457.025 | 34.017.507.181,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 40.004.457.025 | 34.017.507.181,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 40.004.457.025 | 34.017.507.181,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 74.950.000.000 | 86.012.933.334,00 | 4.025.132.000 | 4.422.345.489,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0,00 | 1.525.132.000 | 1.513.079.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0 | 0,00 | 1.525.132.000 | 1.513.079.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 74.950.000.000 | 86.012.933.334,00 | 2.500.000.000 | 2.909.266.489,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 74.950.000.000 | 86.012.933.334,00 | 2.500.000.000 | 2.909.266.489,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 35.554.990.818 | 34.970.879.910,47 | 53.586.371.433 | 48.816.195.037,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 10.836.082.598 | 10.547.671.196,00 | 53.498.580.933 | 48.729.137.127,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.232.901.638 | 8.955.095.961,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 41.000.100 | 40.326.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.100 | 11.717.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 4.815.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.000.000 | 23.793.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.552.513.953 | 7.293.924.368,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.464.368.953 | 7.206.112.168,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 78.145.200 | 78.145.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.700 | 4.826.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.000.100 | 4.841.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4.999.625 | 4.731.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.999.625 | 4.731.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 457.999.125 | 454.174.982,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.400 | 4.997.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.998.925 | 48.476.740,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000 | 14.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000 | 14.998.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.999.800 | 13.909.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.000.000 | 7.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350.000.000 | 348.802.942,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 126.271.914 | 116.161.271,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.999.000 | 13.192.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49.653.594 | 42.417.271,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60.619.320 | 60.552.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.050.116.921 | 1.045.777.040,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 175.077.721 | 174.067.428,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 855.070.000 | 851.781.612,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.969.200 | 14.945.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.000.000 | 4.983.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 236.088.700 | 231.634.700,00 | 10.561.236.300 | 9.019.868.142,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 236.088.700 | 231.634.700,00 | 10.561.236.300 | 9.019.868.142,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 100.125.000 | 99.900.000,00 | 10.331.050.000 | 8.798.214.742,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 128.760.000 | 125.527.400,00 | 740.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 7.203.700 | 6.207.300,00 | 229.446.300 | 221.653.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.347.092.260 | 1.341.375.835,00 | 42.937.344.633 | 39.709.268.985,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 1.347.092.260 | 1.341.375.835,00 | 42.937.344.633 | 39.709.268.985,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 142.513.000 | 142.423.335,00 | 1.539.885.250 | 1.527.327.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | 677.089.589 | 673.214.700,00 | 670.293.383 | 522.207.348,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | 0 | 0,00 | 37.547.226.000 | 35.608.181.183,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | 0 | 0,00 | 200.000.000 | 198.406.354,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | 0 | 0,00 | 800.000.000 | 799.543.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 0 | 0,00 | 589.950.000 | 578.619.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | 167.983.920 | 167.389.200,00 | 1.575.000.000 | 460.219.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 359.505.750 | 358.348.600,00 | 14.990.000 | 14.763.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 20.000.000 | 19.564.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 19.564.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 20.000.000 | 19.564.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 24.718.908.220 | 24.423.208.714,47 | 87.790.500 | 87.057.910,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 15.319.937.000 | 15.137.086.570,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 15.319.937.000 | 15.137.086.570,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 10.269.937.000 | 10.089.035.000,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 5.050.000.000 | 5.048.051.570,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 8.062.400.000 | 8.050.142.244,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8.062.400.000 | 8.050.142.244,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 7.912.400.000 | 7.911.159.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 150.000.000 | 138.982.744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1.336.571.220 | 1.235.979.900,00 | 87.790.500 | 87.057.910,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 1.336.571.220 | 1.235.979.900,00 | 87.790.500 | 87.057.910,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1.216.571.220 | 1.118.134.000,00 | 87.790.500 | 87.057.910,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.03 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 120.000.000 | 117.845.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10.277.675.962 | 10.117.780.752,00 | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10.277.675.962 | 10.117.780.752,00 | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.973.748.382 | 9.830.056.252,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.588.000 | 12.357.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.588.000 | 8.534.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 3.822.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.350.956.768 | 3.245.321.723,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.281.179.468 | 3.176.531.623,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 53.935.200 | 53.935.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.842.100 | 14.854.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 244.165.575 | 234.983.172,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.708.600 | 13.675.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40.546.375 | 33.423.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.700.000 | 22.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.152.600 | 27.739.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139.058.000 | 137.484.872,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.330.564.639 | 6.308.806.347,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.950.000 | 4.950.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.246.760.647 | 6.243.856.347,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.853.992 | 60.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32.473.400 | 28.587.810,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32.473.400 | 28.587.810,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 125.070.000 | 118.458.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 35.070.000 | 33.208.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | 35.070.000 | 33.208.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 90.000.000 | 85.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 90.000.000 | 85.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 64.955.000 | 62.113.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 64.955.000 | 62.113.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 64.955.000 | 62.113.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 113.902.580 | 107.153.200,00 | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 113.902.580 | 107.153.200,00 | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.04 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 113.902.580 | 107.153.200,00 | 1.580.000.000 | 1.576.950.000,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 20.230.360.710 | 19.670.601.834,00 | 6.850.000 | 6.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16.692.806.712 | 16.339.649.958,00 | 504.000 | 504.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.707.363.562 | 9.370.209.158,00 | 504.000 | 504.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.492.900 | 39.492.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.000.900 | 2.000.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.992.000 | 30.992.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.412.974.156 | 5.114.768.741,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.360.234.956 | 5.062.029.541,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.239.200 | 50.239.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 200.000.000 | 196.144.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 200.000.000 | 196.144.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 81.839.550 | 78.233.427,00 | 504.000 | 504.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | 2.894.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.162.950 | 9.641.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.581.000 | 2.581.000,00 | 504.000 | 504.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.765.600 | 1.765.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 63.330.000 | 61.350.827,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.802.106.356 | 3.774.325.084,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.330.000 | 1.330.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 27.000.000 | 14.947.481,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.773.776.356 | 3.758.047.603,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 170.950.600 | 167.245.006,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 170.950.600 | 167.245.006,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 6.775.443.150 | 6.759.440.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6.500.119.150 | 6.493.019.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 6.500.119.150 | 6.493.019.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 275.324.000 | 266.421.450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 60.000.000 | 59.414.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 165.324.000 | 158.381.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 50.000.000 | 48.625.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 210.000.000 | 210.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 210.000.000 | 210.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 210.000.000 | 210.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.537.553.998 | 3.330.951.876,00 | 6.346.000 | 6.346.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.302.807.998 | 3.103.492.826,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.479.325 | 28.738.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.772.050 | 4.572.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.246.475 | 4.132.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.460.800 | 20.034.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.617.242.092 | 2.437.373.126,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.571.394.892 | 2.391.653.526,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 41.347.200 | 41.347.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.500.000 | 4.372.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 205.747.000 | 202.929.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.601.500 | 9.540.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.999.300 | 12.971.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.235.000 | 4.980.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.631.200 | 16.589.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.989.000 | 16.940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142.291.000 | 141.908.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 251.818.056 | 241.545.535,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.199.000 | 22.142.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 218.419.056 | 218.203.310,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 198.521.525 | 192.905.765,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 162.227.100 | 157.041.165,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.200.725 | 21.120.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.093.700 | 14.743.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 234.746.000 | 227.459.050,00 | 6.346.000 | 6.346.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 75.000.000 | 73.272.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 75.000.000 | 73.272.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 137.346.000 | 132.192.200,00 | 6.346.000 | 6.346.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 82.000.000 | 80.217.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 4.000.000 | 629.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 51.346.000 | 51.346.000,00 | 6.346.000 | 6.346.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 22.400.000 | 21.994.550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.04.0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 19.815.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | 2.400.000 | 2.179.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 3.061.691.235 | 2.797.521.731,00 | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS SOSIAL | 3.061.691.235 | 2.797.521.731,00 | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.706.749.135 | 2.501.985.461,00 | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.999.700 | 30.161.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.999.800 | 5.790.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.999.900 | 4.473.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 19.898.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.246.782.119 | 2.059.499.730,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.202.190.869 | 2.015.806.330,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.591.600 | 39.591.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.650 | 4.101.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 211.964.300 | 207.485.797,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.991.800 | 4.991.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.984.500 | 21.325.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.000.000 | 29.921.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000 | 19.999.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.999.000 | 9.999.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 121.989.000 | 121.249.497,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.260.100 | 4.260.000,00 | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.260.100 | 4.260.000,00 | 14.726.000 | 14.726.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 171.159.216 | 162.580.823,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.748.100 | 23.750.075,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 139.411.116 | 138.830.748,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 41.583.700 | 37.997.811,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.541.700 | 32.997.811,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.042.000 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 42.544.000 | 42.413.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 42.544.000 | 42.413.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 24.994.000 | 24.993.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 17.550.000 | 17.420.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 169.276.000 | 112.805.770,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 110.991.000 | 71.634.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 2.950.000 | 2.940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | 24.410.000 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | 23.850.000 | 19.190.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 3.120.000 | 1.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 24.035.650 | 20.118.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 20.365.350 | 19.795.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 2.940.000 | 2.360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 4.760.000 | 2.830.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | 4.560.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 58.285.000 | 41.171.370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 4.200.000 | 360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | 3.985.000 | 3.955.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang | 8.640.000 | 8.605.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | 13.960.000 | 11.020.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 3.920.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 4.200.000 | 880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 3.200.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | 16.180.000 | 14.351.370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 58.944.700 | 58.244.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 1.000.000 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | 1.000.000 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 57.944.700 | 57.544.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 14.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 42.944.700 | 42.944.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 56.000.000 | 54.010.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 44.000.000 | 42.185.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 44.000.000 | 42.185.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 12.000.000 | 11.824.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 12.000.000 | 11.824.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 28.177.400 | 28.062.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 28.177.400 | 28.062.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 22.177.400 | 22.062.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 62.286.752.103 | 58.721.442.494,00 | 2.857.065.360 | 2.827.864.668,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 3.472.593.537 | 2.518.590.398,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 3.472.593.537 | 2.518.590.398,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.980.894.187 | 2.235.460.051,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.420.900 | 5.768.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.420.900 | 4.004.450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 1.763.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.633.863.887 | 1.906.497.053,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.589.432.487 | 1.862.595.403,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42.431.200 | 42.049.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.200 | 1.852.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 142.767.000 | 138.906.832,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.529.100 | 2.509.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.529.700 | 19.760.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.808.000 | 4.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.242.200 | 16.242.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.658.000 | 95.644.732,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 157.643.600 | 150.409.666,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 495.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.150.000 | 40.921.066,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.993.600 | 108.993.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.198.800 | 33.878.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.317.300 | 29.378.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.881.500 | 4.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 169.999.800 | 168.499.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 148.844.800 | 148.025.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 148.844.800 | 148.025.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 21.155.000 | 20.473.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 21.155.000 | 20.473.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 40.000.000 | 38.222.937,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 38.222.937,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | 20.000.000 | 19.335.468,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 20.000.000 | 18.887.469,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 281.699.550 | 76.408.310,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 35.649.625 | 35.400.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 35.649.625 | 35.400.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 246.049.925 | 41.007.610,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 24.449.925 | 23.541.810,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 221.600.000 | 17.465.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 480.000.000 | 455.052.504,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 480.000.000 | 455.052.504,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 142.420.700 | 132.006.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 102.420.700 | 92.006.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 102.420.700 | 92.006.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 71.835.800 | 62.520.304,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 71.835.800 | 62.520.304,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 71.835.800 | 62.520.304,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 75.743.500 | 73.015.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 75.743.500 | 73.015.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 75.743.500 | 73.015.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 100.000.000 | 99.627.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 99.627.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.672.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.955.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 90.000.000 | 87.881.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 90.000.000 | 87.881.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 90.000.000 | 87.881.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 4.963.707.513 | 4.676.360.331,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.963.707.513 | 4.676.360.331,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.583.707.513 | 4.301.979.831,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.708.000 | 15.960.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.908.000 | 1.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.700.000 | 1.557.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.700.000 | 1.557.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.720.000 | 1.511.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.480.000 | 1.373.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.200.000 | 8.229.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.834.696.037 | 3.649.633.340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.775.001.437 | 3.590.073.440,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 56.605.200 | 56.605.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.089.400 | 2.954.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 70.732.600 | 67.093.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.848.700 | 1.836.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.336.900 | 9.516.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.432.000 | 7.432.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 46.115.000 | 44.309.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 543.942.876 | 455.825.967,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400.000 | 400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.300.000 | 22.314.313,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 508.242.876 | 433.111.654,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115.628.000 | 113.466.924,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 110.628.000 | 108.484.424,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | 2.982.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 320.000.000 | 314.826.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 65.000.000 | 63.986.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | 30.000.000 | 29.267.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 14.834.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 20.000.000 | 19.884.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 16.407.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 16.407.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 235.000.000 | 234.433.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 160.000.000 | 159.868.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 75.000.000 | 74.564.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 50.000.000 | 49.774.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.774.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.774.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 10.000.000 | 9.779.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 9.779.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 9.779.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.10 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 45.761.750 | 30.440.500,00 | 164.000.060 | 164.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 45.761.750 | 30.440.500,00 | 164.000.060 | 164.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 45.761.750 | 30.440.500,00 | 164.000.060 | 164.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 45.761.750 | 30.440.500,00 | 164.000.060 | 164.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.10 | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 45.761.750 | 30.440.500,00 | 164.000.060 | 164.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 7.465.565.340 | 7.317.182.763,00 | 2.495.780.900 | 2.470.846.225,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7.465.565.340 | 7.317.182.763,00 | 2.495.780.900 | 2.470.846.225,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.237.409.865 | 7.102.942.563,00 | 345.900 | 345.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.815.200 | 42.918.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.354.600 | 7.377.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.969.600 | 3.576.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.491.000 | 31.964.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.751.608.728 | 2.661.635.608,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.669.759.428 | 2.597.950.208,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 76.849.200 | 59.479.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.100 | 4.206.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 61.875.000 | 61.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 61.875.000 | 61.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 263.943.650 | 249.802.538,00 | 345.900 | 345.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.980.600 | 4.956.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 59.899.050 | 52.898.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 42.529.000 | 40.525.000,00 | 345.900 | 345.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.074.000 | 16.719.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.461.000 | 134.702.938,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.864.630.487 | 2.860.109.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.100.000 | 20.583.063,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.837.530.487 | 2.837.526.087,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.536.800 | 1.226.726.567,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.280.650 | 55.208.696,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.158.451.050 | 1.137.890.941,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 20.003.200 | 18.928.130,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.965.700 | 9.878.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.836.200 | 4.820.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 79.547.000 | 74.544.100,00 | 1.451.435.000 | 1.445.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 29.999.250 | 29.594.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 29.999.250 | 29.594.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 49.547.750 | 44.950.100,00 | 1.451.435.000 | 1.445.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 20.554.350 | 16.305.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 28.993.400 | 28.644.500,00 | 1.451.435.000 | 1.445.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 31.550.900 | 31.023.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | 31.550.900 | 31.023.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 31.550.900 | 31.023.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 54.131.200 | 51.327.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 54.131.200 | 51.327.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 21.655.000 | 19.829.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 32.476.200 | 31.498.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 12.152.475 | 8.278.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12.152.475 | 8.278.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 12.152.475 | 8.278.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 25.448.375 | 24.630.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 25.448.375 | 24.630.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 25.448.375 | 24.630.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 25.325.525 | 24.436.200,00 | 1.044.000.000 | 1.025.501.225,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | 25.325.525 | 24.436.200,00 | 1.044.000.000 | 1.025.501.225,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 0 | 0,00 | 1.044.000.000 | 1.025.501.225,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 25.325.525 | 24.436.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.603.858.145 | 3.507.727.160,00 | 52.750.000 | 52.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.603.858.145 | 3.507.727.160,00 | 52.750.000 | 52.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.010.117.545 | 2.915.940.591,00 | 52.750.000 | 52.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.380.900 | 15.249.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.899.800 | 2.883.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.481.100 | 2.405.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 9.961.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.550.775.866 | 2.483.086.651,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.497.400.866 | 2.430.403.651,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.875.200 | 50.195.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.499.800 | 2.487.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 181.821.125 | 181.523.621,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 999.400 | 988.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.998.725 | 34.815.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000 | 1.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.012.000 | 10.012.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 133.811.000 | 133.712.271,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.695.000 | 11.609.214,00 | 52.750.000 | 52.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.695.000 | 11.609.214,00 | 52.750.000 | 52.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 146.112.704 | 144.468.979,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 145.612.704 | 143.968.979,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 104.331.950 | 80.002.226,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.010.550 | 48.591.426,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.321.400 | 31.410.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 552.981.300 | 551.068.069,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 41.740.000 | 41.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 41.740.000 | 41.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 511.241.300 | 509.388.069,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 511.241.300 | 509.388.069,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 27.099.000 | 27.089.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 20.569.000 | 20.569.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 14.886.000 | 14.886.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 5.683.000 | 5.683.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 6.530.000 | 6.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 6.530.000 | 6.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 12.054.400 | 12.033.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 12.054.400 | 12.033.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 11.989.600 | 11.969.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 64.800 | 64.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 1.605.900 | 1.595.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | 1.605.900 | 1.595.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 65.900 | 55.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 1.540.000 | 1.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.566.556.853 | 3.414.062.335,00 | 31.000.000 | 29.550.002,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.566.556.853 | 3.414.062.335,00 | 31.000.000 | 29.550.002,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.333.157.328 | 3.188.886.230,00 | 31.000.000 | 29.550.002,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.993.425 | 3.938.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.993.425 | 1.947.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 1.991.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.983.338.223 | 2.888.916.416,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.938.338.823 | 2.843.917.016,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42.999.600 | 42.999.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.999.800 | 1.999.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 77.295.800 | 74.682.836,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.044.100 | 1.998.434,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | 8.108.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.098.400 | 1.998.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.085.800 | 5.085.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58.067.500 | 57.491.802,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 31.000.000 | 29.550.002,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 31.000.000 | 29.550.002,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 206.987.200 | 165.544.981,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.000.000 | 25.830.581,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 174.487.200 | 139.214.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 61.542.680 | 55.803.997,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 59.542.680 | 54.043.497,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.000.000 | 1.760.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 85.899.625 | 80.756.550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 85.899.625 | 80.756.550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 20.990.000 | 20.637.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 28.500.000 | 27.843.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 26.899.900 | 25.987.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 7.009.725 | 3.911.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 2.500.000 | 2.376.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 147.499.900 | 144.419.555,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 147.499.900 | 144.419.555,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 19.892.000 | 19.238.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 97.918.400 | 95.934.855,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 4.689.500 | 4.246.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 11.702.725.041 | 11.318.919.199,00 | 27.505.200 | 26.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 11.702.725.041 | 11.318.919.199,00 | 27.505.200 | 26.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.152.820.891 | 5.024.151.353,00 | 27.505.200 | 26.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.346.000 | 14.346.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.346.000 | 9.346.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.648.694.841 | 4.534.562.573,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.582.299.241 | 4.468.166.973,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 61.395.600 | 61.395.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 187.486.300 | 186.853.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.171.700 | 2.171.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.987.000 | 19.574.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.724.800 | 7.724.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.064.800 | 10.064.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.995.000 | 4.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142.543.000 | 142.323.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 27.505.200 | 26.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 27.505.200 | 26.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 204.483.400 | 198.937.680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.999.400 | 22.162.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 173.484.000 | 172.775.280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.810.350 | 89.452.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 97.810.350 | 89.452.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 349.999.900 | 347.740.881,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 349.999.900 | 347.740.881,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | 349.999.900 | 347.740.881,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 3.828.112.550 | 3.642.550.668,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.064.225.550 | 963.270.718,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 739.241.000 | 647.799.474,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 224.985.000 | 224.916.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 99.999.550 | 90.555.244,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 1.117.200.000 | 1.078.024.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.117.200.000 | 1.078.024.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.312.440.000 | 1.282.175.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 16.770.000 | 16.770.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 157.935.000 | 148.468.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 157.035.000 | 157.035.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 964.100.000 | 958.380.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | 16.600.000 | 1.522.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 334.247.000 | 319.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 334.247.000 | 319.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.371.791.700 | 2.304.476.297,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2.371.791.700 | 2.304.476.297,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 79.993.000 | 79.984.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 100.000.700 | 96.829.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 2.076.600.000 | 2.012.504.797,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 115.198.000 | 115.158.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 4.560.650.769 | 4.396.662.343,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PERHUBUNGAN | 4.560.650.769 | 4.396.662.343,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.309.371.769 | 4.159.860.843,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.494.400 | 16.922.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.497.000 | 7.302.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.998.200 | 4.711.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.999.200 | 4.909.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.753.833.725 | 3.664.757.271,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.698.082.225 | 3.609.021.071,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.755.200 | 50.755.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.996.300 | 4.981.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 95.219.156 | 87.818.301,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.485.800 | 3.485.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.989.350 | 15.912.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.076.000 | 2.076.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.717.406 | 11.339.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.710.600 | 2.423.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.240.000 | 52.581.501,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 383.061.688 | 336.125.485,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 58.820.400 | 38.255.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 323.241.288 | 296.869.845,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 59.762.800 | 54.237.786,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 56.841.800 | 51.316.786,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.921.000 | 2.921.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 243.799.000 | 231.338.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 20.205.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 20.205.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 8.790.000 | 3.863.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | 8.790.000 | 3.863.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 40.000.000 | 39.965.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 40.000.000 | 39.965.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 170.009.000 | 167.305.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 170.009.000 | 167.305.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 7.480.000 | 5.463.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 7.480.000 | 5.463.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | 7.480.000 | 5.463.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.822.298.541 | 3.669.439.527,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.822.298.541 | 3.669.439.527,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.431.505.716 | 3.287.296.637,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.963.050 | 26.024.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.382.050 | 13.522.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.181.000 | 2.104.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.400.000 | 10.398.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.535.572.741 | 2.432.039.272,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.498.646.341 | 2.395.202.872,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.274.400 | 34.274.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.652.000 | 2.562.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 128.379.475 | 127.093.628,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.103.800 | 2.065.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.089.875 | 5.913.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.024.000 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.238.800 | 9.236.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.593.000 | 3.587.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 103.330.000 | 103.291.828,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 679.037.700 | 641.555.962,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 572.875.300 | 543.019.878,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 104.162.400 | 96.536.084,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 61.552.750 | 60.583.775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.552.750 | 60.583.775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 350.537.500 | 347.303.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 350.537.500 | 347.303.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 29.967.500 | 29.380.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 250.520.000 | 248.930.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | 20.050.000 | 18.993.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.02.2.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 40.255.325 | 34.839.090,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 15.005.100 | 13.343.190,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 15.005.100 | 13.343.190,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 25.250.225 | 21.495.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.16.03.2.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 25.250.225 | 21.495.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 8.305.748.708 | 7.789.402.496,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 8.305.748.708 | 7.789.402.496,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.157.632.708 | 6.651.585.155,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.999.900 | 9.825.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.999.900 | 4.825.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.650.112.040 | 5.211.630.695,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.591.506.440 | 5.153.241.295,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 53.605.600 | 53.605.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 4.783.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 4.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 5.000.000 | 4.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 168.918.900 | 164.186.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.363.300 | 4.982.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.604.600 | 13.714.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.137.800 | 10.137.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 54.273.200 | 54.164.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84.540.000 | 81.186.950,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.276.466.868 | 1.220.183.988,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.420.000 | 11.378.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.249.796.868 | 1.207.555.288,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45.155.000 | 38.798.522,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34.908.400 | 28.798.522,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.231.200 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.015.400 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 25.000.000 | 19.743.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 19.743.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 19.743.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 231.068.500 | 231.068.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 231.068.500 | 231.068.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 231.068.500 | 231.068.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 346.551.500 | 344.126.184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 346.551.500 | 344.126.184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 346.551.500 | 344.126.184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 545.496.000 | 542.879.157,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 545.496.000 | 542.879.157,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.17 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 545.496.000 | 542.879.157,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 3.398.135.281 | 3.204.509.564,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.398.135.281 | 3.204.509.564,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.666.949.381 | 2.571.636.214,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.500.000 | 14.018.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000 | 2.270.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 1.748.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.308.440.565 | 2.249.182.984,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.252.353.365 | 2.194.707.784,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.587.200 | 50.587.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000 | 2.894.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.500.000 | 993.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 149.840.800 | 146.495.258,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.502.600 | 2.501.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.997.200 | 16.430.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.950.000 | 2.379.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.506.000 | 7.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 117.885.000 | 117.683.358,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 118.430.716 | 90.108.126,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.019.600 | 28.383.610,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 73.411.116 | 60.724.516,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75.737.300 | 71.830.946,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.277.300 | 65.405.146,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.460.000 | 6.425.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 24.175.000 | 23.823.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 6.205.000 | 5.971.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 6.205.000 | 5.971.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 17.970.000 | 17.852.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 17.970.000 | 17.852.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 7.030.000 | 901.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 7.030.000 | 901.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 7.030.000 | 901.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 59.999.900 | 45.028.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 59.999.900 | 45.028.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 55.000.000 | 42.098.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | 1.999.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | 3.000.000 | 2.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 569.981.000 | 493.235.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 569.981.000 | 493.235.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 85.497.000 | 49.272.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 313.491.000 | 293.316.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 170.993.000 | 150.647.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 70.000.000 | 69.884.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 69.884.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 70.000.000 | 69.884.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3.344.338.761 | 3.091.300.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3.344.338.761 | 3.091.300.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.504.338.761 | 2.361.575.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.810.350 | 25.565.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.259.000 | 2.232.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.936.150 | 1.298.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.645.300 | 1.608.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.655.900 | 2.619.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.314.000 | 17.807.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.069.874.095 | 1.971.120.242,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.016.577.545 | 1.918.401.242,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.587.200 | 50.026.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.709.350 | 2.692.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 180.419.400 | 178.132.213,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.058.900 | 9.058.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.866.900 | 9.879.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.427.800 | 9.120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.066.800 | 11.007.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139.999.000 | 139.067.113,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 185.811.116 | 146.859.645,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.900.000 | 31.699.453,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 127.411.116 | 114.660.192,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 41.423.800 | 39.897.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.584.100 | 28.131.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.728.300 | 5.654.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.111.400 | 6.111.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 70.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 770.000.000 | 729.724.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 380.000.000 | 345.155.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 380.000.000 | 345.155.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 140.000.000 | 134.569.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah | 140.000.000 | 134.569.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 250.000.000 | 250.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 250.000.000 | 250.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 69.936.050 | 66.977.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 69.936.050 | 66.977.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 69.936.050 | 66.977.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 69.936.050 | 66.977.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 38.212.050 | 37.949.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2.20.02.2.01.0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 31.724.000 | 29.028.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 130.000.000 | 129.735.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 130.000.000 | 129.735.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 130.000.000 | 129.735.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 130.000.000 | 129.735.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 80.000.000 | 79.735.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3.334.875.814 | 3.117.268.374,00 | 86.029.200 | 84.268.440,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | DINAS PERPUSTAKAAN | 3.334.875.814 | 3.117.268.374,00 | 86.029.200 | 84.268.440,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.170.834.189 | 2.989.437.323,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.263.100 | 12.993.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.499.700 | 2.063.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.843.900 | 1.630.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.644.500 | 2.073.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.275.000 | 7.226.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.792.549.371 | 2.640.733.116,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.757.686.771 | 2.606.142.516,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 32.859.600 | 32.859.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.003.000 | 1.731.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 80.120.250 | 73.748.015,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.888.800 | 1.888.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.519.150 | 11.421.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.991.000 | 4.991.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.436.800 | 5.436.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.905.500 | 3.172.975,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 47.379.000 | 46.836.540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 254.194.268 | 234.962.549,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 150.000 | 150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.026.800 | 20.723.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 229.017.468 | 214.089.199,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29.707.200 | 27.000.543,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.786.200 | 26.079.543,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 921.000 | 921.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 164.041.625 | 127.831.051,00 | 86.029.200 | 84.268.440,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 161.041.625 | 126.431.051,00 | 86.029.200 | 84.268.440,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 7.390.000 | 3.190.000,00 | 42.944.200 | 41.199.010,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 143.240.225 | 113.406.051,00 | 9.200.000 | 9.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 10.411.400 | 9.835.000,00 | 33.885.000 | 33.869.430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3.000.000 | 1.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.23.02.2.02.0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 3.000.000 | 1.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.24 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 20.000.000 | 17.811.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | DINAS PERPUSTAKAAN | 20.000.000 | 17.811.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 20.000.000 | 17.811.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 17.811.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 17.471.125 | 15.417.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.528.875 | 2.394.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 43.436.630.176 | 41.582.579.120,10 | 7.665.732.200 | 6.743.760.473,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 795.193.648 | 790.877.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 795.193.648 | 790.877.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 795.193.648 | 790.877.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 795.193.648 | 790.877.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 510.000.000 | 507.244.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.25.04.2.04.0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 235.193.648 | 233.633.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 7.146.503.172 | 6.819.583.256,00 | 7.591.732.200 | 6.672.040.673,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PARIWISATA | 7.146.503.172 | 6.819.583.256,00 | 7.591.732.200 | 6.672.040.673,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.904.513.947 | 4.640.652.913,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51.272.650 | 50.075.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.761.000 | 5.281.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.989.500 | 4.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.543.500 | 4.528.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.528.500 | 4.365.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.747.450 | 4.653.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.029.200 | 4.794.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.673.500 | 21.669.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.738.806.613 | 3.491.775.964,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.671.752.413 | 3.424.999.764,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 61.975.200 | 61.975.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.079.000 | 4.801.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3.803.500 | 3.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.803.500 | 3.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 394.172.120 | 388.825.449,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.913.000 | 24.900.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.976.250 | 23.725.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 68.368.000 | 68.368.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.519.870 | 28.519.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 243.395.000 | 243.311.699,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 635.829.364 | 625.766.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 64.098.800 | 57.734.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 571.730.564 | 568.031.760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.629.700 | 80.629.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.292.500 | 50.292.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.177.200 | 15.177.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.160.000 | 15.160.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 908.552.400 | 901.420.550,00 | 7.586.803.600 | 6.667.112.073,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 515.000.000 | 512.820.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | 515.000.000 | 512.820.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 27.590.000 | 27.590.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 27.590.000 | 27.590.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 365.962.400 | 361.010.550,00 | 7.586.803.600 | 6.667.112.073,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 365.962.400 | 361.010.550,00 | 7.586.803.600 | 6.667.112.073,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 39.195.825 | 39.165.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 39.195.825 | 39.165.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 39.195.825 | 39.165.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 21.624.000 | 20.278.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 21.624.000 | 20.278.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.04.2.02.0002 | Pengembangan Pendidikan | 21.624.000 | 20.278.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1.272.617.000 | 1.218.066.368,00 | 4.928.600 | 4.928.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 1.272.617.000 | 1.218.066.368,00 | 4.928.600 | 4.928.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | 770.267.900 | 736.193.900,00 | 4.928.600 | 4.928.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 502.349.100 | 481.872.468,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 35.171.909.106 | 33.660.875.364,10 | 74.000.000 | 71.719.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.970.000.000 | 1.928.256.715,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 250.000.000 | 246.968.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 250.000.000 | 246.968.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 250.000.000 | 246.968.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1.600.000.000 | 1.565.977.765,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | 1.600.000.000 | 1.565.977.765,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1.600.000.000 | 1.565.977.765,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 120.000.000 | 115.310.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 97.208.850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 50.000.000 | 48.283.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 48.925.050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 18.101.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 20.000.000 | 18.101.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | | DINAS PERTANIAN | 33.201.909.106 | 31.732.618.649,10 | 74.000.000 | 71.719.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.974.335.597 | 16.936.867.007,00 | 14.000.000 | 13.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 101.003.900 | 96.613.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31.000.900 | 29.627.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 4.565.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.003.000 | 62.421.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.636.901.085 | 14.645.377.865,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.495.891.885 | 14.504.891.265,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 136.009.200 | 136.009.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 4.477.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7.000.000 | 6.943.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.000.000 | 6.943.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 309.149.880 | 288.102.163,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 | 4.994.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.000.500 | 48.738.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000 | 1.997.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.813.200 | 35.812.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 211.336.180 | 196.559.663,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 14.000.000 | 13.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 14.000.000 | 13.980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.349.692.632 | 1.332.537.320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.705.700 | 32.462.228,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.306.986.932 | 1.297.075.092,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 570.588.100 | 567.292.559,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.588.100 | 58.312.831,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 500.000.000 | 498.979.728,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.256.647.509 | 3.179.714.242,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 2.356.647.509 | 2.302.279.542,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1.840.647.509 | 1.797.637.742,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 176.000.000 | 173.316.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 340.000.000 | 331.325.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 900.000.000 | 877.434.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 900.000.000 | 877.434.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 10.548.826.000 | 10.255.821.630,10 | 50.000.000 | 48.445.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | 710.000.000 | 423.315.430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 425.000.000 | 138.382.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 285.000.000 | 284.932.730,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | 9.838.826.000 | 9.832.506.200,10 | 50.000.000 | 48.445.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 3.800.000.000 | 3.799.845.000,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 240.000.000 | 240.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 0 | 0,00 | 50.000.000 | 48.445.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 500.000.000 | 500.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 5.298.826.000 | 5.292.661.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 305.000.000 | 299.141.120,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 305.000.000 | 299.141.120,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 305.000.000 | 299.141.120,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 60.000.000 | 59.341.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 59.341.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | 60.000.000 | 59.341.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.057.100.000 | 1.001.733.500,00 | 10.000.000 | 9.294.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 1.057.100.000 | 1.001.733.500,00 | 10.000.000 | 9.294.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 617.100.000 | 579.210.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 440.000.000 | 422.522.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 0 | 0,00 | 10.000.000 | 9.294.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 183.024.300 | 172.121.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 183.024.300 | 172.121.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 66.699.850 | 59.769.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 66.699.850 | 59.769.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 66.699.850 | 59.769.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 116.324.450 | 112.351.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 9.999.700 | 9.576.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 9.999.700 | 9.576.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 56.374.900 | 54.677.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 56.374.900 | 54.677.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 49.949.850 | 48.097.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.30 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 49.949.850 | 48.097.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.31 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 139.999.950 | 139.122.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 139.999.950 | 139.122.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 139.999.950 | 139.122.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 139.999.950 | 139.122.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.31 | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 139.999.950 | 139.122.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 69.822.658.711 | 66.841.298.984,00 | 293.342.399 | 285.885.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | | | SEKRETARIAT DAERAH | 27.226.595.699 | 26.039.606.390,00 | 218.992.399 | 211.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | | SEKRETARIAT DAERAH | 27.226.595.699 | 26.039.606.390,00 | 218.992.399 | 211.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.212.488.199 | 22.073.901.637,00 | 209.623.999 | 202.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 72.752.750 | 70.605.450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.324.000 | 6.113.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000 | 4.769.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000 | 4.618.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.000.000 | 4.807.450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 4.543.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.428.750 | 45.754.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.661.180.398 | 11.625.636.369,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.483.310.698 | 11.453.616.619,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 156.684.000 | 151.753.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 4.599.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 16.185.700 | 15.667.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 33.928.800 | 32.911.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 33.928.800 | 32.911.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.285.000.000 | 3.271.991.228,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 80.000.000 | 79.997.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 200.000.000 | 199.989.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 80.000.000 | 79.994.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.605.000.000 | 1.603.537.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.320.000.000 | 1.308.473.128,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12.000.000 | 9.500.000,00 | 209.623.999 | 202.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 0 | 0,00 | 157.000.000 | 152.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.000.000 | 9.500.000,00 | 52.623.999 | 49.450.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.764.196.004 | 2.744.021.541,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 761.117.189 | 754.758.468,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 239.999.347 | 237.685.297,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.753.079.468 | 1.741.577.776,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 365.478.507 | 363.757.257,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 345.478.507 | 344.517.257,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000 | 19.240.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 501.323.399 | 501.323.399,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 501.323.399 | 501.323.399,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 3.241.459.141 | 3.190.655.485,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.459.085.341 | 2.428.074.196,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 782.373.800 | 762.581.289,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | 142.511.750 | 131.642.698,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 50.858.600 | 40.467.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 49.146.150 | 49.086.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 42.507.000 | 42.088.798,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 132.657.450 | 131.856.310,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 90.942.100 | 90.455.510,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 32.668.150 | 32.353.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 9.047.200 | 9.047.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 3.372.760.575 | 3.329.129.589,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | 511.325.500 | 506.630.799,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 89.483.000 | 88.280.132,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 421.842.500 | 418.350.667,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 2.101.294.950 | 2.068.575.347,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 651.295.100 | 637.601.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 1.320.000.000 | 1.305.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 129.999.850 | 125.973.647,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 760.140.125 | 753.923.443,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 336.875.875 | 333.511.513,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 359.855.750 | 357.635.916,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 63.408.500 | 62.776.014,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 641.346.925 | 636.575.164,00 | 9.368.400 | 9.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 145.293.500 | 142.454.376,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 47.783.550 | 47.058.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 97.509.950 | 95.396.176,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 204.999.725 | 204.215.488,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 65.000.000 | 64.967.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 84.999.725 | 84.255.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 55.000.000 | 54.993.088,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 291.053.700 | 289.905.300,00 | 9.368.400 | 9.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 168.099.750 | 167.351.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 113.878.000 | 113.546.000,00 | 9.368.400 | 9.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.01 | 4.01.5.02.0.00.01.0000 | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 9.075.950 | 9.007.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | | | SEKRETARIAT DPRD | 42.596.063.012 | 40.801.692.594,00 | 74.350.000 | 74.185.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | | SEKRETARIAT DPRD | 42.596.063.012 | 40.801.692.594,00 | 74.350.000 | 74.185.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.510.945.912 | 25.775.331.418,00 | 74.350.000 | 74.185.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 213.326.000 | 212.648.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.920.000 | 4.920.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.560.000 | 4.523.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.296.000 | 3.755.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 199.550.000 | 199.450.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.843.601.089 | 2.742.237.216,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.741.775.889 | 2.653.175.616,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 97.249.200 | 84.515.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.576.000 | 4.546.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 133.612.000 | 115.087.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 133.612.000 | 115.087.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 962.782.575 | 900.024.341,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.786.600 | 19.786.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.616.375 | 74.309.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 54.377.600 | 49.463.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 79.772.000 | 78.314.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 78.000.000 | 36.007.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 645.230.000 | 642.143.591,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 56.410.000 | 56.315.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 56.410.000 | 56.315.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 601.331.736 | 523.214.171,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.730.000 | 10.884.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.296.400 | 52.728.781,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 529.305.336 | 459.601.390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 421.550.200 | 415.823.863,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 354.718.000 | 352.256.663,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 44.311.900 | 44.096.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.520.300 | 19.470.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 14.566.791.912 | 14.375.764.739,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 13.671.401.912 | 13.535.043.929,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 341.170.000 | 317.687.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 554.220.000 | 523.033.810,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | 6.767.950.400 | 6.490.532.088,00 | 17.940.000 | 17.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 5.184.085.000 | 5.183.983.060,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1.583.865.400 | 1.306.549.028,00 | 17.940.000 | 17.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 16.085.117.100 | 15.026.361.176,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 650.000.000 | 473.428.058,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 650.000.000 | 473.428.058,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 700.000.000 | 692.875.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 700.000.000 | 692.875.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 106.560.000 | 104.542.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 106.560.000 | 104.542.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1.522.899.400 | 1.070.816.357,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | 501.934.000 | 347.935.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 681.035.000 | 407.314.841,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 240.029.925 | 227.741.516,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 99.900.475 | 87.825.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 2.680.973.500 | 2.356.161.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 120.000.000 | 92.715.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 2.560.973.500 | 2.263.446.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 202.295.000 | 131.321.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 202.295.000 | 131.321.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | 10.222.389.200 | 10.197.216.911,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 9.176.906.000 | 9.173.062.044,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 700.000.000 | 697.845.667,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 345.483.200 | 326.309.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 25.657.479.362 | 22.940.457.768,90 | 439.846.600 | 430.095.000,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |
| 5.01 | | | PERENCANAAN | 5.413.758.576 | 5.079.511.449,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.413.758.576 | 5.079.511.449,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.382.596.401 | 4.086.156.458,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.537.600 | 5.943.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.040.000 | 1.663.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.004.600 | 29.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.493.000 | 4.250.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.928.697.935 | 3.677.104.764,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.874.718.535 | 3.625.076.664,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.979.200 | 51.979.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.200 | 48.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 189.104.500 | 178.502.677,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.096.900 | 3.094.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.938.700 | 10.572.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.897.000 | 2.745.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.089.200 | 9.066.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.956.700 | 9.959.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.126.000 | 143.065.877,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 221.604.716 | 193.946.232,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.088.000 | 1.817.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.105.600 | 41.456.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 169.411.116 | 150.671.932,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 33.651.650 | 30.659.585,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30.763.350 | 27.946.822,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.888.300 | 2.712.763,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 759.334.400 | 737.486.191,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 673.603.400 | 654.928.583,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 28.924.200 | 26.361.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 24.834.400 | 23.743.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 197.655.800 | 190.390.183,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 422.189.000 | 414.433.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.811.000 | 998.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.811.000 | 998.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 47.920.000 | 45.559.258,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 37.920.000 | 37.704.458,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 10.000.000 | 7.854.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 36.000.000 | 36.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 36.000.000 | 36.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 271.827.775 | 255.868.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100.000.000 | 89.217.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 8.000.000 | 7.297.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 14.000.000 | 8.725.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 8.000.000 | 6.822.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30.000.000 | 29.085.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 30.000.000 | 27.755.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 10.000.000 | 9.531.450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 80.000.000 | 76.179.950,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 44.320.200 | 41.920.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 23.494.000 | 22.205.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 12.185.800 | 12.053.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 91.827.775 | 90.471.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 28.240.000 | 27.620.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 14.949.900 | 14.862.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 5.646.125 | 5.605.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 28.078.000 | 27.823.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 14.913.750 | 14.559.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | | | KEUANGAN | 16.703.815.363 | 14.506.475.388,90 | 25.848.000 | 22.475.000,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 11.713.026.237 | 9.799.579.786,90 | 23.573.000 | 20.200.000,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.541.944.342 | 5.613.535.668,00 | 23.573.000 | 20.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 196.553.000 | 193.175.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 196.553.000 | 193.175.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.076.608.832 | 4.211.396.031,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.617.476.132 | 3.754.102.631,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 453.133.200 | 451.600.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.999.500 | 5.693.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 591.902.005 | 568.587.543,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 27.811.300 | 27.811.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 81.839.925 | 67.237.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 33.568.680 | 33.568.680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 121.268.300 | 121.253.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.050.800 | 6.360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 313.363.000 | 312.356.863,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6.270.000 | 6.270.000,00 | 23.573.000 | 20.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.270.000 | 6.270.000,00 | 23.573.000 | 20.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 356.988.976 | 332.372.576,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.565.600 | 2.805.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.436.176 | 49.753.176,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 289.987.200 | 279.814.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 313.621.529 | 301.734.218,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 183.331.300 | 180.959.554,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 85.225.829 | 82.324.664,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 45.064.400 | 38.450.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 4.875.168.120 | 3.951.640.232,00 | 0 | 0,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.297.227.000 | 1.279.506.190,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 141.135.000 | 139.588.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 155.604.000 | 151.824.990,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 50.000.000 | 47.391.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 50.000.000 | 46.998.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 370.630.000 | 367.330.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 375.058.000 | 371.956.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 144.800.000 | 144.527.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 10.000.000 | 9.888.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 151.211.720 | 147.145.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 10.010.520 | 8.079.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 40.000.000 | 39.438.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 101.201.200 | 99.627.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 220.116.500 | 207.425.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 30.117.000 | 19.320.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 64.999.800 | 63.704.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 124.999.700 | 124.400.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3.096.653.900 | 2.207.835.420,00 | 0 | 0,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 3.096.653.900 | 2.207.835.420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 109.959.000 | 109.728.122,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 109.959.000 | 109.728.122,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 295.913.775 | 234.403.886,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 295.913.775 | 234.403.886,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 37.499.900 | 18.900.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 67.978.050 | 67.216.108,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 14.997.950 | 13.954.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 79.278.000 | 71.308.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 58.159.900 | 29.229.928,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 37.999.975 | 33.794.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4.990.789.126 | 4.706.895.602,00 | 2.275.000 | 2.275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.188.789.126 | 3.923.004.947,00 | 2.275.000 | 2.275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.475.000 | 8.423.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.475.000 | 5.423.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.534.542.394 | 3.376.183.581,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.403.035.594 | 3.244.676.781,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 131.506.800 | 131.506.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 2.425.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | 3.000.000 | 2.425.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 190.209.800 | 183.067.186,00 | 275.000 | 275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.475.400 | 10.364.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.778.400 | 26.021.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.937.600 | 9.937.400,00 | 275.000 | 275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.402.400 | 15.402.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.616.000 | 121.342.386,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5.571.200 | 5.571.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.571.200 | 5.571.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 373.502.232 | 297.040.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.680.000 | 22.040.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 338.822.232 | 272.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73.488.500 | 50.294.630,00 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.637.400 | 37.651.130,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.207.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.643.500 | 12.643.500,00 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 802.000.000 | 783.890.655,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 802.000.000 | 783.890.655,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 33.575.000 | 33.116.118,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 58.483.400 | 58.266.787,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 26.167.600 | 25.035.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 40.000.000 | 38.564.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 110.000.000 | 107.808.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 60.000.000 | 58.534.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 156.000.000 | 154.244.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 34.814.400 | 33.699.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 32.764.600 | 32.144.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | 90.537.200 | 88.847.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 82.685.600 | 80.333.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 76.972.200 | 73.295.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | | | KEPEGAWAIAN | 3.467.539.523 | 3.290.832.531,00 | 413.998.600 | 407.620.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.467.539.523 | 3.290.832.531,00 | 413.998.600 | 407.620.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.026.911.373 | 2.891.550.715,00 | 413.998.600 | 407.620.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.997.700 | 14.998.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.999.900 | 4.604.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.999.800 | 4.396.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.998.000 | 5.998.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.692.964.984 | 2.594.225.440,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.642.209.834 | 2.543.964.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 44.755.200 | 44.755.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.950 | 4.602.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.000.000 | 903.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3.000.100 | 2.813.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.000.100 | 2.813.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 183.480.925 | 162.812.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.429.300 | 7.428.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.167.825 | 28.934.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.324.400 | 12.322.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.386.400 | 22.386.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.970.000 | 2.992.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.203.000 | 88.749.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.410.000 | 1.410.000,00 | 411.100.000 | 405.435.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.410.000 | 1.410.000,00 | 411.100.000 | 405.435.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85.924.764 | 80.038.449,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.620.000 | 24.971.232,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 54.367.217,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 44.132.900 | 35.252.526,00 | 2.898.600 | 2.185.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.655.100 | 33.252.526,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.477.800 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0,00 | 2.898.600 | 2.185.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 440.628.150 | 399.281.816,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 107.907.775 | 94.319.440,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 9.999.800 | 8.760.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 29.998.600 | 29.088.340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 9.609.900 | 8.183.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 39.999.700 | 39.459.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 8.300.000 | 7.805.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 9.999.775 | 1.023.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | 37.389.850 | 35.649.476,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 9.975.300 | 9.548.376,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 20.000.100 | 19.225.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 7.414.450 | 6.875.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | 231.708.225 | 216.850.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 78.319.125 | 67.145.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 72.900.400 | 72.505.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | 80.488.700 | 77.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 63.622.300 | 52.462.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 35.622.050 | 32.204.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 28.000.250 | 20.258.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.04 | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 32.510.900 | 31.744.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32.510.900 | 31.744.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32.510.900 | 31.744.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 32.510.900 | 31.744.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 32.510.900 | 31.744.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.05 | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 39.855.000 | 31.893.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 39.855.000 | 31.893.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 39.855.000 | 31.893.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 39.855.000 | 31.893.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 39.855.000 | 31.893.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | | | INSPEKTORAT DAERAH | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | | INSPEKTORAT | 9.562.169.225 | 9.185.744.917,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.811.565.225 | 7.489.780.717,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.191.894.825 | 5.955.364.343,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.138.341.225 | 5.901.810.743,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 53.553.600 | 53.553.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 448.668.000 | 400.098.332,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 448.668.000 | 400.098.332,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 600.274.800 | 587.513.166,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.968.900 | 5.968.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 75.695.300 | 72.580.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.069.000 | 15.069.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.691.600 | 50.234.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 18.360.000 | 17.290.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 426.490.000 | 426.370.166,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 122.696.800 | 120.024.517,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63.200.000 | 60.527.717,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.496.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 448.030.800 | 426.780.359,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 101.366.800 | 98.930.775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 294.822.000 | 290.960.834,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 44.500.000 | 31.188.750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.342.000 | 5.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.494.630.000 | 1.457.979.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 414.630.000 | 414.624.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 59.960.000 | 59.960.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 63.545.000 | 63.545.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | 141.125.000 | 141.125.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 150.000.000 | 149.994.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.080.000.000 | 1.043.355.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.080.000.000 | 1.043.355.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 255.974.000 | 237.984.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 255.974.000 | 237.984.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 5.974.000 | 5.961.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 100.000.000 | 99.970.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 50.000.000 | 45.541.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100.000.000 | 86.511.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 34.553.889.260 | 32.649.235.388,00 | 793.587.781 | 757.071.515,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | | | KECAMATAN | 34.553.889.260 | 32.649.235.388,00 | 793.587.781 | 757.071.515,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 6.641.514.703 | 6.483.899.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.574.313.303 | 6.420.006.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.662.600 | 38.790.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.831.600 | 1.979.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.831.000 | 36.811.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.233.572.751 | 6.116.809.178,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.188.766.951 | 6.072.102.578,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 41.775.600 | 41.775.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.030.200 | 2.931.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 133.248.050 | 119.586.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.834.100 | 8.826.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 48.102.550 | 34.670.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.330.000 | 16.209.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36.371.400 | 36.371.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 23.610.000 | 23.509.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 84.520.752 | 62.788.737,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 860.000 | 860.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46.854.400 | 25.928.737,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 36.806.352 | 36.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.309.150 | 82.031.485,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 61.837.350 | 60.628.485,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.471.800 | 21.403.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 8.765.000 | 7.970.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 8.765.000 | 7.970.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 8.765.000 | 7.970.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 21.837.800 | 21.752.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 21.837.800 | 21.752.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 21.837.800 | 21.752.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.999.700 | 4.861.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 4.999.700 | 4.861.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4.999.700 | 4.861.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 26.599.850 | 25.925.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 26.599.850 | 25.925.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 4.999.850 | 4.325.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 4.999.050 | 3.382.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 4.999.050 | 3.382.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4.999.050 | 3.382.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | | KELURAHAN HUTATORUAN V | 200.000.000 | 190.963.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 200.000.000 | 190.963.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 200.000.000 | 190.963.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.000.000 | 4.767.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 101.069.600 | 96.972.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 93.930.400 | 89.223.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | | KELURAHAN HUTATORUAN VI | 191.592.550 | 176.630.014,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 191.592.550 | 176.630.014,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 191.592.550 | 176.630.014,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.007.550 | 4.811.025,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 85.117.400 | 82.835.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 101.467.600 | 88.983.989,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | | KELURAHAN HUTATORUAN VII | 137.253.456 | 126.659.225,00 | 155.096.806 | 154.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 137.253.456 | 126.659.225,00 | 155.096.806 | 154.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 137.253.456 | 126.659.225,00 | 155.096.806 | 154.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.000.000 | 3.908.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 15.653.256 | 12.668.700,00 | 155.096.806 | 154.730.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116.600.200 | 110.082.125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | | KELURAHAN HUTATORUAN IX | 108.903.535 | 82.375.161,00 | 93.106.000 | 92.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 108.903.535 | 82.375.161,00 | 93.106.000 | 92.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 108.903.535 | 82.375.161,00 | 93.106.000 | 92.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4.999.635 | 4.427.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 5.195.800 | 3.050.100,00 | 93.106.000 | 92.930.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 98.708.100 | 74.897.561,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | | KELURAHAN HUTATORUAN X | 126.530.325 | 122.312.430,00 | 73.440.000 | 73.270.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 126.530.325 | 122.312.430,00 | 73.440.000 | 73.270.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 126.530.325 | 122.312.430,00 | 73.440.000 | 73.270.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4.979.000 | 4.835.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.845.100 | 4.495.700,00 | 73.440.000 | 73.270.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116.706.225 | 112.981.230,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | | KELURAHAN HUTATORUAN XI | 100.005.865 | 98.906.900,00 | 100.000.000 | 99.834.715,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 100.005.865 | 98.906.900,00 | 100.000.000 | 99.834.715,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100.005.865 | 98.906.900,00 | 100.000.000 | 99.834.715,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 0 | 0,00 | 100.000.000 | 99.834.715,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 95.005.865 | 93.906.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | | KELURAHAN PARTALI TORUAN | 127.050.450 | 120.254.528,00 | 72.948.000 | 72.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 127.050.450 | 120.254.528,00 | 72.948.000 | 72.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 127.050.450 | 120.254.528,00 | 72.948.000 | 72.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4.999.700 | 3.437.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 9.051.800 | 6.799.950,00 | 72.948.000 | 72.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 112.998.950 | 110.016.978,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 2.316.424.842 | 1.769.717.501,00 | 19.736.700 | 19.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.258.098.342 | 1.723.835.501,00 | 19.736.700 | 19.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.553.050 | 31.864.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.703.050 | 1.619.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.410.000 | 1.299.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 840.000 | 720.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.600.000 | 28.225.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.051.260.828 | 1.548.723.691,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.013.969.228 | 1.514.521.791,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.087.600 | 33.839.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.204.000 | 362.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 51.249.600 | 43.498.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.697.400 | 19.012.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.272.200 | 3.260.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.870.000 | 4.905.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16.410.000 | 16.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 19.736.700 | 19.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 19.736.700 | 19.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85.604.764 | 66.328.225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 980.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | 15.944.178,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 49.404.047,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.430.100 | 33.420.885,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.127.600 | 31.118.385,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.302.500 | 2.302.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 11.609.000 | 5.283.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 11.609.000 | 5.283.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1.397.000 | 1.363.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.212.000 | 3.920.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 20.110.000 | 15.663.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 20.110.000 | 15.663.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.660.000 | 13.248.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2.450.000 | 2.415.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.400.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.400.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1.400.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 3.607.500 | 3.336.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3.607.500 | 3.336.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1.360.000 | 1.320.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.247.500 | 2.016.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 1.376.687.050 | 1.294.372.491,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.301.659.050 | 1.227.279.491,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 81.770.000 | 69.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 39.650.000 | 34.580.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 42.120.000 | 35.204.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.098.590.086 | 1.061.293.486,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.069.782.886 | 1.032.486.286,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 28.807.200 | 28.807.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 29.358.700 | 26.917.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.045.500 | 10.615.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.940.000 | 10.929.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.373.200 | 5.373.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 78.703.864 | 61.141.305,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 800.000 | 800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.299.100 | 5.835.861,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 54.505.444,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 13.236.400 | 8.143.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 13.236.400 | 8.143.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.708.000 | 28.491.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 30.708.000 | 28.491.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 30.708.000 | 28.491.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 10.400.000 | 7.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 10.400.000 | 7.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10.400.000 | 7.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.010.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.010.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3.010.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 9.310.000 | 9.242.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 9.310.000 | 9.242.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 9.310.000 | 9.242.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 2.073.693.786 | 1.966.759.103,00 | 14.248.375 | 136.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.019.756.861 | 1.919.792.563,00 | 14.248.375 | 136.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.300.750 | 2.043.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.941.550 | 783.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 480.000 | 240.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 775.900 | 720.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.103.300 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.834.251.811 | 1.762.702.822,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.798.461.511 | 1.727.295.622,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.327.200 | 34.327.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.463.100 | 1.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 59.463.100 | 45.966.645,00 | 8.348.175 | 136.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.195.800 | 2.195.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.140.000 | 10.275.045,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.062.000 | 2.062.000,00 | 8.348.175 | 136.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.360.000 | 7.872.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.216.800 | 3.216.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.658.500 | 2.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.830.000 | 17.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 5.900.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 5.900.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82.958.600 | 73.209.796,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.961.800 | 18.269.796,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 38.782.600 | 35.870.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26.703.000 | 23.895.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12.079.600 | 11.975.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 53.936.925 | 46.966.540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 53.936.925 | 46.966.540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 53.936.925 | 46.966.540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | | KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN | 97.153.300 | 89.867.100,00 | 102.850.000 | 102.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 97.153.300 | 89.867.100,00 | 102.850.000 | 102.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 97.153.300 | 89.867.100,00 | 102.850.000 | 102.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 23.089.500 | 21.667.100,00 | 102.850.000 | 102.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 74.063.800 | 68.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 2.652.367.975 | 2.575.705.527,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.583.419.975 | 2.506.757.527,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.855.000 | 36.698.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.150.000 | 3.002.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.705.000 | 33.696.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.377.437.061 | 2.310.115.577,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.346.331.861 | 2.279.158.377,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 27.955.200 | 27.955.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.150.000 | 3.002.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 15.076.000 | 15.028.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 15.076.000 | 15.028.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 37.597.150 | 32.601.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.991.400 | 1.985.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.286.750 | 13.175.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.312.000 | 2.310.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.762.000 | 1.761.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16.245.000 | 13.370.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 79.304.764 | 77.030.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.700.000 | 22.280.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 54.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.150.000 | 35.284.050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.150.000 | 35.284.050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 47.348.000 | 47.348.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 47.348.000 | 47.348.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 47.348.000 | 47.348.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | | KELURAHAN ONAN HASANG | 199.999.600 | 188.531.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 199.999.600 | 188.531.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 199.999.600 | 188.531.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 132.934.800 | 132.678.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 67.064.800 | 55.852.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 2.035.155.441 | 1.993.490.144,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.956.323.441 | 1.915.493.944,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.350.000 | 28.349.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.350.000 | 28.349.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.774.330.477 | 1.735.707.254,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.723.695.177 | 1.685.071.954,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 47.247.600 | 47.247.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.387.700 | 3.387.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 40.829.700 | 38.984.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.026.500 | 3.016.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.236.000 | 11.027.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.352.000 | 2.347.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.755.200 | 3.755.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.460.000 | 18.839.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 69.524.764 | 69.177.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 14.420.000 | 14.183.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 54.494.328,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 43.288.500 | 43.275.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 43.288.500 | 43.275.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 54.382.000 | 53.546.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 54.382.000 | 53.546.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 54.382.000 | 53.546.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 2.850.000 | 2.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2.850.000 | 2.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.850.000 | 2.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | | KELURAHAN PASAR SARULLA | 108.935.814 | 107.834.700,00 | 94.987.500 | 94.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.923.500 | 3.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.923.500 | 3.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.923.500 | 3.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 105.012.314 | 104.294.700,00 | 94.987.500 | 94.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 105.012.314 | 104.294.700,00 | 94.987.500 | 94.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 12.172.700 | 12.112.100,00 | 94.987.500 | 94.750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 92.839.614 | 92.182.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 1.188.643.821 | 1.149.357.030,00 | 20.164.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.114.673.821 | 1.076.825.030,00 | 20.164.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 745.400 | 732.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 745.400 | 732.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 944.946.332 | 923.123.480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 904.071.932 | 882.356.280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 38.235.600 | 38.235.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.638.800 | 2.531.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 58.601.025 | 57.529.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.538.200 | 2.538.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.957.600 | 4.953.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.985.000 | 21.985.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.199.300 | 13.199.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 15.920.925 | 14.853.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 20.164.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 20.164.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62.236.364 | 47.339.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.931.600 | 4.639.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 42.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48.144.700 | 48.101.050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.416.700 | 36.411.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.007.700 | 2.007.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.147.000 | 4.114.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.573.300 | 5.568.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.520.000 | 39.082.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 40.520.000 | 39.082.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 40.520.000 | 39.082.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 11.850.000 | 11.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 11.850.000 | 11.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 11.850.000 | 11.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 1.158.164.913 | 1.122.522.647,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.064.442.363 | 1.036.147.147,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.983.330 | 19.890.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.152.530 | 1.676.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.830.800 | 18.214.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 882.300.100 | 859.235.220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 845.051.500 | 822.237.620,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 33.075.600 | 33.075.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.173.000 | 3.922.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 34.919.075 | 32.339.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.869.800 | 1.858.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.283.675 | 10.138.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.582.000 | 8.582.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.623.600 | 5.461.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.560.000 | 6.300.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73.298.000 | 71.882.143,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.101.200 | 16.827.086,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.355.057,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 52.941.858 | 52.799.784,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.263.958 | 45.121.884,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.191.700 | 3.191.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.486.200 | 4.486.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 19.344.000 | 17.766.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 19.344.000 | 17.766.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 19.344.000 | 17.766.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 13.539.750 | 13.325.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 13.539.750 | 13.325.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 13.539.750 | 13.325.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.474.000 | 8.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.474.000 | 8.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 11.474.000 | 8.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 34.696.800 | 34.281.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 34.696.800 | 34.281.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 34.696.800 | 34.281.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14.668.000 | 12.923.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 14.668.000 | 12.923.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.668.000 | 12.923.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.133.162.433 | 2.021.777.874,00 | 8.450.000 | 8.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.039.911.683 | 1.965.807.374,00 | 8.450.000 | 8.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.804.000 | 4.520.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 650.000 | 650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 650.000 | 650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 650.000 | 650.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.489.000 | 1.205.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.365.000 | 1.365.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.858.879.633 | 1.801.841.077,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.817.822.483 | 1.767.072.277,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.979.200 | 30.727.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.377.950 | 2.341.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 49.701.050 | 45.833.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.646.100 | 2.646.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.058.950 | 24.455.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.190.000 | 14.190.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.058.000 | 4.058.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 648.000 | 484.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 8.450.000 | 8.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 8.450.000 | 8.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85.695.100 | 73.763.827,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.698.300 | 17.767.027,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.496.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.831.900 | 39.848.370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.497.500 | 34.513.970,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.334.400 | 4.334.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.351.750 | 6.136.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 20.351.750 | 6.136.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.351.750 | 6.136.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 21.025.000 | 18.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 21.025.000 | 18.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.100.000 | 17.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3.925.000 | 900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 15.924.000 | 6.224.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15.924.000 | 6.224.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15.924.000 | 6.224.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 31.250.000 | 24.460.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 31.250.000 | 24.460.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 31.250.000 | 24.460.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 4.700.000 | 1.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 4.700.000 | 1.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4.700.000 | 1.150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 1.597.008.386 | 1.551.995.433,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.505.288.386 | 1.460.446.433,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.739.600 | 29.557.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.000.000 | 5.977.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.299.600 | 1.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.440.000 | 21.680.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.312.985.372 | 1.278.307.213,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.287.484.572 | 1.252.806.413,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 25.436.400 | 25.436.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 64.400 | 64.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 44.798.650 | 44.347.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.128.600 | 3.127.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.256.650 | 1.933.350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.294.000 | 6.292.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.239.400 | 5.239.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 27.880.000 | 27.755.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82.524.764 | 81.895.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.920.000 | 25.895.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 54.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.240.000 | 26.339.470,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.240.000 | 26.339.470,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 64.340.000 | 64.215.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 58.800.000 | 58.675.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 58.800.000 | 58.675.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 5.540.000 | 5.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 5.540.000 | 5.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 10.400.000 | 10.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 10.400.000 | 10.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 5.200.000 | 5.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5.200.000 | 5.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.800.000 | 4.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.800.000 | 4.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4.800.000 | 4.784.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 8.960.000 | 8.950.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.960.000 | 8.950.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.960.000 | 8.950.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 3.220.000 | 3.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3.220.000 | 3.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3.220.000 | 3.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 1.729.563.399 | 1.657.367.257,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.588.043.399 | 1.532.572.257,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.940.000 | 2.940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.940.000 | 2.940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.319.532.709 | 1.287.160.654,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.287.405.509 | 1.255.033.454,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 29.767.200 | 29.767.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.360.000 | 2.360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 115.111.150 | 108.332.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.469.800 | 3.469.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.823.750 | 9.949.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.150.200 | 6.144.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.234.400 | 9.022.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85.433.000 | 79.746.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 69.392.040 | 67.443.633,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 1.100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13.018.500 | 11.811.089,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.873.540 | 54.532.544,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 81.067.500 | 66.695.870,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.438.000 | 55.066.370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 11.629.500 | 11.629.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 44.970.000 | 43.910.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 44.970.000 | 43.910.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 44.970.000 | 43.910.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 15.000.000 | 14.565.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 15.000.000 | 14.565.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 9.000.000 | 8.565.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 12.000.000 | 8.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12.000.000 | 8.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12.000.000 | 8.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 43.120.000 | 40.275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 43.120.000 | 40.275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 43.120.000 | 40.275.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 26.430.000 | 17.245.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 26.430.000 | 17.245.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15.420.000 | 9.880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11.010.000 | 7.365.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 3.364.980.466 | 3.233.056.192,00 | 16.560.000 | 16.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.272.726.766 | 3.154.298.992,00 | 16.560.000 | 16.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.274.000 | 9.388.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 624.000 | 390.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.650.000 | 8.998.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.043.842.501 | 2.982.493.507,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.003.743.301 | 2.942.469.307,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 38.695.200 | 38.695.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.404.000 | 1.329.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.564.450 | 73.118.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.532.000 | 539.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.085.450 | 18.180.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.005.000 | 3.118.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.762.000 | 5.236.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 56.180.000 | 46.045.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 16.560.000 | 16.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 16.560.000 | 16.560.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.758.515 | 57.905.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 470.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.761.715 | 15.035.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 42.400.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.287.300 | 31.393.085,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.180.900 | 28.381.085,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.094.400 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.012.000 | 1.012.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 44.386.500 | 33.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 44.386.500 | 33.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 44.386.500 | 33.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 17.497.200 | 16.457.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 17.497.200 | 16.457.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.497.200 | 16.457.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 28.800.000 | 28.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 28.800.000 | 28.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.800.000 | 28.800.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.070.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.070.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.070.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | | KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG | 200.000.000 | 176.109.238,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 200.000.000 | 176.109.238,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 200.000.000 | 176.109.238,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 88.255.700 | 88.050.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 111.744.300 | 88.058.588,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 1.560.291.946 | 1.515.010.903,00 | 22.000.000 | 21.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.496.413.046 | 1.454.687.403,00 | 22.000.000 | 21.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.682.500 | 18.655.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.682.500 | 18.655.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.307.862.996 | 1.272.918.519,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.277.410.796 | 1.242.856.119,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 29.672.400 | 29.672.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 779.800 | 390.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 51.297.850 | 50.419.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.446.900 | 1.446.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.146.550 | 12.268.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.854.400 | 7.854.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 28.850.000 | 28.850.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 22.000.000 | 21.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0,00 | 22.000.000 | 21.660.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72.309.200 | 68.359.684,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 17.312.400 | 13.466.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.393.684,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.260.500 | 44.335.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.225.000 | 36.347.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.447.500 | 3.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.588.000 | 4.588.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 17.987.500 | 17.879.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 17.987.500 | 17.879.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 17.987.500 | 17.879.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 20.509.400 | 19.203.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 20.509.400 | 19.203.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 20.509.400 | 19.203.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.641.000 | 1.641.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.641.000 | 1.641.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1.641.000 | 1.641.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 23.741.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 23.741.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 2.141.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 1.232.457.895 | 1.164.179.250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.155.932.895 | 1.093.241.450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.990.000 | 29.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.990.000 | 29.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 957.067.395 | 905.750.210,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 929.842.995 | 878.525.810,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 27.224.400 | 27.224.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 18.061.800 | 17.936.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.020.000 | 1.020.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.836.800 | 5.836.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 11.205.000 | 11.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.185.700 | 85.041.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.979.100 | 3.720.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33.009.800 | 26.621.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 56.628.000 | 55.513.040,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.621.200 | 40.623.740,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.006.800 | 14.889.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 31.952.800 | 30.982.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 31.952.800 | 30.982.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 31.952.800 | 30.982.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 22.972.200 | 18.355.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 22.972.200 | 18.355.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 22.972.200 | 18.355.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 1.896.347.309 | 1.669.580.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.790.208.329 | 1.595.308.240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.618.900 | 16.342.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.623.900 | 1.374.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.995.000 | 14.968.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.598.979.490 | 1.473.957.949,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.560.959.990 | 1.437.558.349,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 32.767.200 | 32.767.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.252.300 | 3.632.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 68.425.575 | 48.084.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.497.100 | 4.531.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.739.775 | 11.371.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.110.900 | 3.014.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.384.200 | 1.782.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.998.600 | 1.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.695.000 | 25.885.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 71.119.364 | 36.197.940,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.250.000 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.264.600 | 4.977.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 30.020.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.065.000 | 20.725.051,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.065.000 | 20.725.051,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 63.550.000 | 39.142.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 63.550.000 | 39.142.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 63.550.000 | 39.142.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 15.988.980 | 13.530.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 15.988.980 | 13.530.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 15.988.980 | 13.530.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000 | 21.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 59.009.098.415 | 58.892.247.831,00 | 15.787.200 | 15.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 59.009.098.415 | 58.892.247.831,00 | 15.787.200 | 15.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 59.009.098.415 | 58.892.247.831,00 | 15.787.200 | 15.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.835.439.746 | 2.748.584.464,00 | 15.787.200 | 15.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.920.000 | 30.906.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.540.000 | 2.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.540.000 | 2.540.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.840.000 | 21.826.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.530.103.382 | 2.457.859.195,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.474.400.182 | 2.402.155.995,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.703.200 | 51.703.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 148.549.000 | 148.035.663,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.768.900 | 3.768.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.246.600 | 24.762.850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.120.000 | 5.120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.968.500 | 5.968.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 108.445.000 | 108.415.813,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0,00 | 15.787.200 | 15.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0,00 | 15.787.200 | 15.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96.094.364 | 83.884.371,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.489.600 | 27.351.787,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.764 | 54.532.584,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29.773.000 | 27.899.235,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.769.000 | 17.924.535,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.033.700 | 5.029.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Kode | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Operasi | | Modal | | Tak Terduga | | Transfer | |
| | | | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.970.300 | 4.944.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 466.865.600 | 440.201.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 466.865.600 | 440.201.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 300.000.000 | 297.431.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 166.865.600 | 142.769.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 55.369.658.069 | 55.369.658.067,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 55.369.658.069 | 55.369.658.067,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 55.369.658.069 | 55.369.658.067,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 33.135.000 | 32.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 33.135.000 | 32.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 33.135.000 | 32.995.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 304.000.000 | 300.808.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 304.000.000 | 300.808.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36.300.000 | 35.360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 63.700.000 | 63.448.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.01 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 204.000.000 | 202.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | Jumlah | 1.062.938.481.200 | 1.014.674.115.403,47 | 102.975.845.013 | 99.079.324.655,00 | 3.531.157.371 | 3.454.947.220,00 | 273.116.310.900 | 258.649.802.576,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JOHNY MARPAUNG PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran II Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAH Kab. Tapanuli Utara**
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**
**PERIODE TAHUN 1 Januari 2024 DAN 31 Desember 2024**

**(Dalam Rupiah)**

| URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| SISA ANGGARAN LEBIH AWAL | 18.272.950.856,00 | 63.081.575.953,87 |
| PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH | 18.264.856.637,87 | 63.076.262.956,00 |
| SUBTOTAL (1-2) | 8.094.218,13 | 5.312.997,87 |
| SiLPA/(SiKPA) | 10.404.650.909,86 | 18.272.950.856,00 |
| SUBTOTAL (3+4) | 10.412.745.127,98 | 18.278.263.853,87 |
| KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA | ( 8094218.13 ) | ( 5312997.87 ) |
| LAIN-LAIN | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7) | 10.404.650.909,86 | 18.272.950.856,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran III Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA**
**LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)**
**TAHUN ANGGARAN 2024**
**1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

**Dalam Rupiah**

| ode Rekenin | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | | | |
| **7** | **PENDAPATAN** | **1.296.265.579.561,53** | **1.215.064.466.924,00** | **81.201.112.637,53** | **6,68** |
| **7.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO** | **136.070.840.715,53** | **137.675.954.732,00** | **(1.605.114.016,47)** | **(1,17)** |
| 7.1.01 | Pajak Daerah-LO | 29.926.455.596,76 | 29.585.342.286,00 | 341.113.310,76 | 1,15 |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO | 93.867.166.523,78 | 5.433.466.911,00 | 88.433.699.612,78 | 1.627,57 |
| 7.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 8.451.510.307,00 | 8.139.637.407,00 | 311.872.900,00 | 3,83 |
| 7.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 3.825.708.287,99 | 94.517.508.128,00 | (90.691.799.840,01) | (95,95) |
| | **JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO** | **136.070.840.715,53** | **137.675.954.732,00** | **(1.605.114.016,47)** | **(1,17)** |
| | | | | | |
| **7.2** | **PENDAPATAN TRANSFER-LO** | **1.122.369.538.601,00** | **1.053.305.816.323,00** | **69.063.722.278,00** | **6,56** |
| 7.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 1.029.888.888.029,00 | 998.593.456.950,00 | 31.295.431.079,00 | 3,13 |
| | | | | | |
| | **PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | **1.029.888.888.029,00** | **998.593.456.950,00** | **31.295.431.079,00** | **3,13** |
| | | | | | |
| **7.2.02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO** | **92.480.650.572,00** | **54.712.359.373,00** | **37.768.291.199,00** | **69,03** |
| | **JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO** | **92.480.650.572,00** | **54.712.359.373,00** | **37.768.291.199,00** | **69,03** |
| | **TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO** | **1.122.369.538.601,00** | **1.053.305.816.323,00** | **69.063.722.278,00** | **6,56** |
| | | | | | |
| **7.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO** | **37.825.200.245,00** | **24.082.695.869,00** | **13.742.504.376,00** | **57,06** |
| 7.3.01 | Pendapatan Hibah-LO | 24.429.163.443,00 | 11.481.323.995,00 | 12.947.839.448,00 | 112,77 |
| 7.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undanga | 13.396.036.802,00 | 12.601.371.874,00 | 794.664.928,00 | 6,31 |
| | **JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO** | **37.825.200.245,00** | **24.082.695.869,00** | **13.742.504.376,00** | **57,06** |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.296.265.579.561,53** | **1.215.064.466.924,00** | **81.201.112.637,53** | **6,68** |
| | | | | | |
| **8** | **BEBAN** | **1.282.134.240.898,07** | **1.162.194.274.304,02** | **119.939.966.594,05** | **10,32** |
| **8.1** | **BEBAN OPERASI** | **1.061.196.938.883,63** | **926.268.239.596,02** | **134.928.699.287,61** | **14,57** |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 662.968.891.974,39 | 550.533.578.451,00 | 112.435.313.523,39 | 20,42 |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 315.285.022.969,27 | 348.458.939.996,02 | (33.173.917.026,75) | (9,52) |
| 8.1.03 | Beban Bunga | 2.207.835.420,00 | 3.096.653.900,00 | (888.818.480,00) | (28,70) |
| 8.1.05 | Beban Hibah | 71.974.027.092,00 | 19.735.718.872,00 | 52.238.308.220,00 | 264,69 |
| 8.1.06 | Beban Bantuan Sosial | 773.494.700,00 | 2.805.100.000,00 | (2.031.605.300,00) | (72,43) |
| 8.1.07 | Beban Penyisihan Piutang | 7.987.666.727,97 | 1.638.248.377,00 | 6.349.418.350,97 | 387,57 |
| | **JUMLAH BEBAN OPERASI** | **1.061.196.938.883,63** | **926.268.239.596,02** | **134.928.699.287,61** | **14,57** |
| | | | | | |
| **8.1.08** | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **146.728.282.634,44** | **157.371.965.160,00** | **(10.643.682.525,56)** | **(6,76)** |
| | **JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **146.728.282.634,44** | **157.371.965.160,00** | **(10.643.682.525,56)** | **(6,76)** |
| | | | | | |
| **8.3** | **BEBAN TRANSFER** | **73.107.902.160,00** | **66.739.612.238,00** | **6.368.289.922,00** | **9,54** |
| 8.3.02 | Beban Bantuan Keuangan | 73.107.902.160,00 | 66.739.612.238,00 | 6.368.289.922,00 | 9,54 |
| | **JUMLAH BEBAN TRANSFER** | **73.107.902.160,00** | **66.739.612.238,00** | **6.368.289.922,00** | **9,54** |
| | | | | | |
| **8.2** | **BEBAN TIDAK TERDUGA** | **1.101.117.220,00** | **11.814.457.310,00** | **(10.713.340.090,00)** | **(90,68)** |
| 8.2.01 | Beban Tidak Terduga | 1.101.117.220,00 | 11.814.457.310,00 | (10.713.340.090,00) | (90,68) |
| | **JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA** | **1.101.117.220,00** | **11.814.457.310,00** | **(10.713.340.090,00)** | **(90,68)** |
| | **JUMLAH BEBAN** | **1.282.134.240.898,07** | **1.162.194.274.304,02** | **119.939.966.594,05** | **10,32** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI** | **14.131.338.663,46** | **52.870.192.619,98** | **(38.738.853.956,52)** | **(73,27)** |
| | | | | | |
| **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | | | |
| **7.4** | **SURPLUS NON OPERASIONAL-LO** | **1.002.247.748,00** | **0,00** | **1.002.247.748,00** | **100,00** |
| 7.4.01 | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 340.713.000,00 | 0,00 | 340.713.000,00 | 100,00 |
| 7.4.03 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 661.534.748,00 | 0,00 | 661.534.748,00 | 100,00 |
| | **JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO** | **1.002.247.748,00** | **0,00** | **1.002.247.748,00** | **100,00** |
| | | | | | |
| **8.4** | **DEFISIT NON OPERASIONAL-LO** | **1.034.204.925,00** | **3.108.238.903,00** | **(2.074.033.978,00)** | **(66,73)** |
| 8.4.03 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 1.034.204.925,00 | 3.108.238.903,00 | (2.074.033.978,00) | (66,73) |
| | **JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO** | **1.034.204.925,00** | **3.108.238.903,00** | **(2.074.033.978,00)** | **(66,73)** |
| | **JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | **(31.957.177,00)** | **(3.108.238.903,00)** | **3.076.281.726,00** | **(98,97)** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA** | **14.099.381.486,46** | **49.761.953.716,98** | **(35.662.572.230,52)** | **(71,67)** |
| | | | | | |
| **POS LUAR BIASA** | | | | | |
| **8.5** | **BEBAN LUAR BIASA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **JUMLAH BEBAN LUAR BIASA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT-LO** | **14.099.381.486,46** | **49.761.953.716,98** | **(35.662.572.230,52)** | **(71,67)** |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran IV Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024

Nomor : 02 Tahun 2025

**PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA KONSOLIDASI**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EKUITAS AWAL | 2.331.755.925.727,85 | 2.271.169.554.344,78 |
| SURPLUS / (DEFISIT) - LO | 14.099.381.486,46 | 49.761.953.716,98 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | (4.519.787,40) | 0,00 |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN | (74.130.355.941,74) | 10.824.417.666,09 |
| EKUITAS AKHIR | 2.271.720.431.485,17 | 2.331.755.925.727,85 |

BUPATI TAPANULI UTARA,

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran V Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024

Nomor : 02 Tahun 2025

Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA Neraca (KONSOLIDASI)**
**TAHUN ANGGARAN 2024**
**1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**
**Dalam Rupiah**

| Kode | Uraian | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ASET** | **2.584.660.729.547,97** | **2.665.044.882.484,85** |
| **1,1** | **ASET LANCAR** | **92.603.510.716,18** | **66.221.202.656,74** |
| 1.1.01 | Kas dan Setara Kas | 10.683.462.109,98 | 18.272.950.856,00 |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 8.344.192.908,86 | 15.209.157.712,87 |
| 1.1.01.02 | Kas di Bendahara Penerimaan | 49.129.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 103.468.162,00 | 567.854,00 |
| 1.1.01.04 | Kas di BLUD | 805.407.416,00 | 1.453.300.175,00 |
| 1.1.01.05 | Kas Dana BOS | 439.505.723,80 | 1.117.116.850,93 |
| 1.1.01.06 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 50.024.510,20 | 492.808.263,20 |
| 1.1.01.07 | Kas Lainnya | 229.682.200,12 | 0,00 |
| 1.1.01.11 | Kas Dana BOK Puskesmas | 662.052.189,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | Piutang Pajak Daerah | 15.882.122.971,00 | 13.623.888.653,00 |
| 1.1.03.06 | Piutang Pajak Hotel | 25.315.200,00 | 29.495.200,00 |
| 1.1.03.07 | Piutang Pajak Restoran | 300.134.037,00 | 307.972.037,00 |
| 1.1.03.08 | Piutang Pajak Hiburan | 18.561.200,00 | 18.561.200,00 |
| 1.1.03.14 | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 20.394.100,00 | 391.314.100,00 |
| 1.1.03.15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 15.517.718.434,00 | 12.876.546.116,00 |
| 1.1.04 | Piutang Retribusi Daerah | 978.590.264,13 | 945.529.619,13 |
| 1.1.04.02 | Piutang Retribusi Jasa Usaha | 978.590.264,13 | 945.529.619,13 |
| 1.1.06 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 22.377.142.553,59 | 18.442.759.526,21 |
| 1.1.06.06 | Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 3.522.788.739,00 | 0,00 |
| 1.1.06.08 | Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 3.284.209.047,59 | 3.155.588.690,00 |
| 1.1.06.16 | Piutang Pendapatan BLUD | 15.570.144.767,00 | 15.287.170.836,21 |
| 1.1.07 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 10.014.381.000,00 |
| 1.1.07.01 | Piutang Dana Perimbangan | 0,00 | 10.014.381.000,00 |
| 1.1.08 | Piutang Transfer Antar Daerah | 46.784.244.939,00 | 0,00 |
| 1.1.08.01 | Piutang Bagi Hasil | 44.788.103.939,00 | 0,00 |
| 1.1.08.02 | Piutang Bantuan Keuangan | 1.996.141.000,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Penyisihan Piutang | (20.605.304.985,32) | (9.094.849.518,35) |
| 1.1.10.01 | Penyisihan Piutang Pendapatan | (20.605.304.985,32) | (9.094.849.518,35) |
| 1.1.12 | Persediaan | 16.503.252.863,80 | 14.016.542.520,75 |
| 1.1.12.01 | Barang Pakai Habis | 16.503.252.863,80 | 14.016.542.520,75 |
| | **JUMLAH ASET LANCAR** | **92.603.510.716,18** | **66.221.202.656,74** |
| | | | |
| **1,2** | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **76.323.268.075,00** | **81.583.119.536,00** |
| 1.2.01 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 3.522.788.739,00 |
| 1.2.01.05 | Dana Bergulir | 0,00 | 3.522.788.739,00 |
| | **JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN** | **0,00** | **3.522.788.739,00** |
| 1.2.02 | Investasi Jangka Panjang Permanen | 76.323.268.075,00 | 78.060.330.797,00 |
| 1.2.02.01 | Penyertaan Modal | 76.323.268.075,00 | 78.060.330.797,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **JUMLAH INVESTASI PERMANEN** | **76.323.268.075,00** | **78.060.330.797,00** |
| | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **76.323.268.075,00** | **81.583.119.536,00** |
| | | | |
| **1,3** | **ASET TETAP** | **2.407.335.274.480,14** | **2.442.321.546.910,11** |
| 1.3.01 | Tanah | 851.271.193.314,00 | 851.001.890.764,00 |
| 1.3.01.01 | Tanah | 851.271.193.314,00 | 851.001.890.764,00 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 454.304.118.366,00 | 444.847.733.816,11 |
| 1.3.02.01 | Alat Besar | 30.912.637.852,00 | 30.990.987.852,00 |
| 1.3.02.02 | Alat Angkutan | 85.401.698.689,60 | 86.101.403.163,60 |
| 1.3.02.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 3.649.944.383,00 | 2.067.428.283,00 |
| 1.3.02.04 | Alat Pertanian | 12.845.732.302,00 | 12.829.179.306,00 |
| 1.3.02.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 99.864.967.266,87 | 97.295.451.624,66 |
| 1.3.02.06 | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 9.263.326.697,00 | 6.762.059.059,00 |
| 1.3.02.07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 107.115.306.060,00 | 105.830.335.233,00 |
| 1.3.02.08 | Alat Laboratorium | 19.766.752.985,00 | 19.535.642.221,00 |
| 1.3.02.09 | Alat Persenjataan | 701.899.064,00 | 708.203.064,00 |
| 1.3.02.10 | Komputer | 80.700.904.496,69 | 78.974.489.921,69 |
| 1.3.02.13 | Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| 1.3.02.15 | Alat Keselamatan Kerja | 835.568.872,00 | 744.923.372,00 |
| 1.3.02.16 | Alat Peraga | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 1.3.02.17 | Peralatan Proses/Produksi | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.3.02.18 | Rambu-rambu | 2.514.513.885,84 | 2.290.549.904,16 |
| 1.3.02.19 | Peralatan Olahraga | 674.365.812,00 | 662.080.812,00 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 816.892.322.252,55 | 803.302.454.380,00 |
| 1.3.03.01 | Bangunan Gedung | 780.328.484.174,82 | 766.738.616.302,27 |
| 1.3.03.02 | Monumen | 1.809.819.247,00 | 1.809.819.247,00 |
| 1.3.03.04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 34.754.018.830,73 | 34.754.018.830,73 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.866.176.536.837,11 | 1.794.716.461.553,00 |
| 1.3.04.01 | Jalan dan Jembatan | 1.545.759.993.193,15 | 1.485.664.723.859,80 |
| 1.3.04.02 | Bangunan Air | 291.662.973.831,03 | 280.401.102.595,73 |
| 1.3.04.03 | Instalasi | 18.626.442.576,47 | 18.626.442.576,47 |
| 1.3.04.04 | Jaringan | 10.127.127.236,46 | 10.024.192.521,00 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 31.075.123.196,00 | 23.063.611.668,00 |
| 1.3.05.01 | Bahan Perpustakaan | 24.347.147.197,00 | 16.324.288.738,00 |
| 1.3.05.02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 5.547.184.478,00 | 5.558.531.409,00 |
| 1.3.05.07 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 1.180.791.521,00 | 1.180.791.521,00 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (1.612.384.019.485,52) | (1.474.610.605.271,00) |
| 1.3.07.01 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (359.895.872.089,23) | (324.643.756.708,81) |
| 1.3.07.02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (212.471.862.926,01) | (196.556.442.740,35) |
| 1.3.07.03 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (1.033.833.013.364,86) | (947.778.926.059,77) |
| 1.3.07.04 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (6.183.271.105,42) | (5.631.479.762,07) |
| | **JUMLAH ASET TETAP** | **2.407.335.274.480,14** | **2.442.321.546.910,11** |
| | | | |
| | **JUMLAH DANA CADANGAN** | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| **1,5** | **ASET LAINNYA** | **8.398.676.276,65** | **74.919.013.382,00** |
| 1.5.03 | Aset Tidak Berwujud | 2.289.011.614,86 | 2.247.812.604,00 |
| 1.5.03.01 | Aset Tidak Berwujud | 2.289.011.614,86 | 2.247.812.604,00 |
| 1.5.04 | Aset Lain-lain | 73.677.358.567,17 | 64.229.535.801,00 |
| 1.5.04.01 | Aset Lain-lain | 73.677.358.567,17 | 64.229.535.801,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.5.05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.736.290.832,36) | (1.572.716.023,00) |
| 1.5.05.01 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.736.290.832,36) | (1.572.716.023,00) |
| 1.5.06 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (69.150.157.073,02) | 0,00 |
| 1.5.06.01 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (69.150.157.073,02) | 0,00 |
| 1.5.08 | Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 3.318.754.000,00 | 10.014.381.000,00 |
| 1.5.08.01 | Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 3.318.754.000,00 | 10.014.381.000,00 |
| | **JUMLAH ASET LAINNYA** | **8.398.676.276,65** | **74.919.013.382,00** |
| | | | |
| | **JUMLAH PROPERTI INVESTASI** | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| | **JUMLAH ASET** | **2.584.660.729.547,97** | **2.665.044.882.484,85** |
| | | | |
| **2** | **KEWAJIBAN** | **312.940.298.062,80** | **333.288.956.757,00** |
| **2,1** | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **134.693.386.548,80** | **85.887.281.605,00** |
| 2.1.01 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 9.943.018,92 | 0,00 |
| 2.1.01.06 | Utang PPN Pusat | 9.943.018,92 | 0,00 |
| 2.1.02 | Utang Bunga | 1.305.522.106,00 | 3.096.653.900,00 |
| 2.1.02.01 | Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat | 1.305.522.106,00 | 3.096.653.900,00 |
| 2.1.04 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 69.154.763.638,00 | 69.282.056.597,00 |
| 2.1.04.03 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 69.154.763.638,00 | 69.282.056.597,00 |
| 2.1.05 | Pendapatan Diterima Dimuka | 261.738.734,25 | 266.221.267,00 |
| 2.1.05.05 | Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah | 261.738.734,25 | 266.221.267,00 |
| 2.1.06 | Utang Belanja | 63.961.419.051,63 | 13.242.349.841,00 |
| 2.1.06.01 | Utang Belanja Pegawai | 33.616.909.277,00 | 461.992.677,00 |
| 2.1.06.02 | Utang Belanja Barang dan Jasa | 14.775.975.539,00 | 12.755.225.164,00 |
| 2.1.06.07 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 25.132.000,00 |
| 2.1.06.08 | Utang Belanja Modal Gedung dan | 84.341.451,63 | 0,00 |
| 2.1.06.09 | Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.896.141.000,00 | 0,00 |
| 2.1.06.13 | Utang Belanja Bantuan Keuangan | 13.588.051.784,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **134.693.386.548,80** | **85.887.281.605,00** |
| | | | |
| **2,2** | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **178.246.911.514,00** | **247.401.675.152,00** |
| 2.2.01 | Utang kepada Pemerintah Pusat | 178.246.911.514,00 | 247.401.675.152,00 |
| 2.2.01.01 | Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri | 178.246.911.514,00 | 247.401.675.152,00 |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **178.246.911.514,00** | **247.401.675.152,00** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **312.940.298.062,80** | **333.288.956.757,00** |
| | | | |
| **3** | **EKUITAS** | **2.271.720.431.485,17** | **2.331.755.925.727,85** |
| **3,1** | **EKUITAS** | **2.271.720.431.485,17** | **2.331.755.925.727,85** |
| 3.1.01 | Ekuitas | 2.271.720.431.485,17 | 2.331.755.925.727,85 |
| 3.1.01.01 | Ekuitas | 2.257.621.049.998,71 | 2.331.755.925.727,85 |
| 3.1.01.02 | Surplus/Defisit-LO | 14.099.381.486,46 | 0,00 |
| | **JUMLAH EKUITAS** | **2.271.720.431.485,17** | **2.331.755.925.727,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **2.584.660.729.547,97** | **2.665.044.882.484,85** |

BUPATI TAPANULI UTARA,

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran VI Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024

Nomor : 02 Tahun 2025

Tanggal : 08 September 2025

# PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

| Uraian | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | 27.663.738.746,01 | 27.612.663.867,00 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | 93.784.976.878,78 | 5.536.938.005,00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.451.510.307,00 | 8.139.637.407,00 |
| Penerimaan Lain - lain PAD yang sah | 3.199.750.792,61 | 92.367.439.640,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil | 64.628.799.000,00 | 61.985.236.033,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | 681.275.700.613,00 | 627.696.920.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | 92.466.086.003,00 | 103.496.236.437,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 191.517.992.520,00 | 184.576.216.480,00 |
| Penerimaan Dana Insentif | 0,00 | 10.824.467.000,00 |
| Penerimaan Dana Desa | 199.129.952.200,00 | 198.733.682.000,00 |
| Penerimaan Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | 0,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi | 45.696.405.633,00 | 53.068.727.947,00 |
| Penerimaan Bantuan Keuangan | 0,00 | 1.643.631.426,00 |
| Penerimaan Hibah | 8.818.078.129,00 | 11.481.323.995,00 |
| Penerimaan dari Pendapatan Lainnya | 13.396.036.802,00 | 12.601.371.874,00 |
| | | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi** | 1.436.896.297.624,40 | 1.399.764.492.111,00 |
| | | |
| **ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI** | | |
| Pembayaran Pegawai | 621.410.779.418,00 | 550.561.006.379,00 |
| Pembayaran Barang dan Jasa | 318.291.641.973,47 | 351.521.956.695,00 |
| Pembayaran Bunga | 2.207.835.420,00 | 3.096.653.900,00 |
| Pembayaran Belanja Hibah | 71.990.363.892,00 | 19.735.718.872,00 |
| Pembayaran Belanja Bantuan Sosial | 773.494.700,00 | 2.805.100.000,00 |
| Pembayaran Tak Terduga | 3.454.947.220,00 | 11.814.457.310,00 |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa | 258.649.802.576,00 | 265.473.294.238,00 |
| | | |
| **Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi** | 1.276.778.865.199,47 | 1.205.008.187.394,00 |
| | | |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi** | 160.117.432.424,93 | 194.756.304.717,00 |
| | | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 340.713.000,00 | 1.025.967.500,00 |
| Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 165.971.100,00 |
| Penjualan Aset Lain-Lain | 43.030.100,00 | 0,00 |
| | | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi** | 383.743.100,00 | 1.191.938.600,00 |
| | | |
| **ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI** | | |
| Perolehan Tanah | 164.000.000,00 | 0,00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | 26.958.423.144,00 | 44.530.761.080,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | 14.949.241.861,74 | 31.062.611.625,00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 56.854.991.209,34 | 92.684.156.254,00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | 111.469.430,00 | 64.676.900,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | 41.199.010,86 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| | | |
| **Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi** | 99.079.324.655,94 | 171.342.205.859,00 |
| | | |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi** | (98.695.581.555,94) | (170.150.267.259,00) |
| | | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan** | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | 69.282.056.597,00 | 69.409.349.558,00 |
| **Uraian** | **2024** | **2023** |
| | | |
| **Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan** | 69.282.056.597,00 | 69.409.349.558,00 |

| Uraian | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | | |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan** | (69.282.056.597,00) | (69.409.349.558,00) |
| | | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS** | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 72.837.615.432,45 | 0,00 |
| | | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris** | 72.837.615.432,45 | 0,00 |
| | | |
| **ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS** | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 72.827.672.413,53 | 0,00 |
| | | |
| **Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris** | 72.827.672.413,53 | 0,00 |
| | | |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris** | 9.943.018,92 | 0,00 |
| | | |
| **Kenaikan/Penurunan Kas** | (7.850.262.709,09) | (44.803.312.100,00) |
| **Saldo Awal Kas** | 18.272.950.856,00 | 63.081.575.953,87 |
| **Koreksi SiLPA** | (8.094.218,13) | (5.312.997,87) |
| **Saldo Awal Kas Setelah Koreksi** | 18.264.856.637,87 | 63.076.262.956,00 |
| **Saldo Akhir Kas** | 10.414.593.928,78 | 18.272.950.856,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

# BAB I
# PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, laporan operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan berikut penggunaannya yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain :

1. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ; dan
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5 Tambahan lembaran negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Bab:

**Bab I PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Perubahan APB dan Penjelasannya

2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

**Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

**Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4. Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK)

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

6.2. Letak Geografis

6.3. Visi dan Misi

6.4. Organisasi dan Personalia

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

**Bab VII PENUTUP**

# BAB II

# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena sangat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, asumsi-asumsi dasar indikator Makro Ekonomi Pembangunan yang digunakan sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 1 Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara**

| No | Uraian | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk (jiwa) | 318.424 | 323.102 | 326.993 |
| 2 | PDRB Harga Berlaku (Rp milyar) | 9.645,63 | 10.489,69 | 11.226,93 |
| 3 | PDRB Harga Konstan (Rp milyar) Tahun dasar 2010 | 6.315,72 | 6.615,95 | 6.931,24 |
| 4 | PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta) | 30.291,80 | 32.465,60 | 34.493,55 |
| 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,25 | 4,75 | 4.77 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,93 | 8,54 | 8,21 |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 1,07 | 1,03 | 1,21 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) | 76,43 | 76,86 | 77,48 |
| 9 | Gini Rasio (%) | 0,2420 | 0,2620 | 0,2420 |

*Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara.*

### a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dari Tahun ke Tahun mengalami pertumbuhan relatif tidak begitu tinggi. Jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 318.424 jiwa, Tahun 2023 sebanyak 323.102 jiwa dan pada Tahun 2024 sebanyak 326.996 jiwa atau bertambah sebanyak 3.849 jiwa atau naik 1,21% sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2 Kondisi Pertumbuhan Penduduk**

| Uraian | Kondisi Tahunan | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Jumlah Penduduk | 318.424 | 323.102 | 326.993 |
| - Luas Wilayah | 3.793,71 km² | 3.793,71 km² | 3.793,71 km² |
| - Kepadatan Penduduk | 84 jiwa/ km² | 85 jiwa/ km² | 86 jiwa/ km² |

*Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara*

### b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi

dalam periode tertentu. Hal tersebut dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara setiap Tahunnya menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini dapat dilihat PDRB ADHB pada Tahun 2022 sebesar 9.645,63 milyar/rupiah, Tahun 2023 sebesar 10.489,69 milyar/rupiah, dan Tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 11.226,93 milyar/rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara menurut jenis lapangan usaha ekonomi ADHB setiap Tahunnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 3 PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Jenis Lapangan Usaha Ekonomi ADHB (Milyar Rupiah)**

| No | Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha | 2022 | 2023 (*) | 2024 (**) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4.331,58 | 4.737,43 | 5.058,48 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6,85 | 7,48 | 7,85 |
| 3 | Industri Pengolahan | 216,9 | 230,83 | 246,19 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,85 | 9,3 | 9,43 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9,18 | 9,82 | 10,21 |
| 6 | Konstruksi | 1.373,59 | 1.483,14 | 1.566,27 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.522,75 | 1.668,84 | 1.837,17 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 469,97 | 538,14 | 538,14 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 226,05 | 246,98 | 277,64 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 75,52 | 77,44 | 83,30 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 151,49 | 160,2 | 168,43 |
| 12 | Real Estat | 217,34 | 230,46 | 242,33 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 29,25 | 30,76 | 33,45 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 783,6 | 821,07 | 892,62 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 144,9 | 153,89 | 164,70 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 65,61 | 70,84 | 76,17 |
| 17 | Jasa Lainnya | 12,2 | 13,07 | 14,55 |
| | **Total PDRB (ADHB)** | **9.645,63** | **10.489,69** | **11.226,93** |

*Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara*

### c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 sebesar Rp32.465.599,10 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi Rp34.493.551,85 mengalami peningkatan sebesar Rp2.027.952,75.

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 2. 4 Perkembangan Pendapatan Perkapita**

| No | Uraian | Satuan | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 323.102 | 326.993 |
| 2 | PDRB Perkapita | | | |
| | - PDRB Perkapita harga berlaku | Rp. | 32.465.599,10 | 34.493.551,85 |
| | - PDRB Perkapita harga Konstan | Rp. | 20.476.351,12 | 21.196.906,36 |

*Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.*

**d. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan Tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 mencapai 4,77 persen, sedangkan Tahun 2023 sebesar 4,75 persen. Pertumbuhan PDRB positif, diikuti dengan pertumbuhan positif pada masing-masing lapangan usaha.

**e. Tingkat Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah seluruh dunia di semua negara. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya mengurangi angka kemiskinan. Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 8,93 persen, pada Tahun 2023 menurun menjadi sebesar 8,54 persen dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 8,21 persen.

**f. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2022 sebesar 1,07 persen dan pada Tahun 2023 menurun menjadi sebesar 1,03 persen dan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,21 persen atau naik 0,18 poin persen. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah :

1. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan Angkatan Kerja dengan lapangan kerja yang tersedia;
2. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sehingga sulit untuk mencari pekerjaan ataupun berwirausaha;
3. Terjadinya PHK atau kontrak kerja yang telah berakhir;
4. Berhenti bekerja atas kemauan sendiri (resign) karena faktor tertentu.

**g. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapanuli Utara Tahun 2024 mencapai 77,48 persen, meningkat 0,62 poin (0,81 persen) dibandingkan Tahun sebelumnya (76,86). Selama 2022–2024, IPM Tapanuli Utara mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Apabila dibandingkan nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional pada Tahun 2022 - 2024, maka capaian nilai IPM masih lebih tinggi, namun masih perlu upaya serius Terutama dalam meningkatkan pemerataan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan sehingga angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup meningkat.

Peningkatan IPM didukung oleh semua peningkatan komponen seperti perlunya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah untuk mengejar angka minimal wajib belajar 12 Tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMA. Kemudian komponen Harapan Lama Sekolah juga perlu ditingkatkan agar generasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengenyam pendidikan yang lebih lama sehingga dapat membuka pintu peluang yang lebih besar lagi serta dapat membantu mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih baik untuk kesejahteraan. Dan komponen usia harapan hidup, apabila usia harapan hidup semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula peluang masyarakat untuk berumur panjang sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

**h. Gini Rasio**

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara dari Tahun ke Tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan Gini Ratio dibandingkan Tahun 2022, yaitu dari angka 0,242 menjadi 0,262. Faktor yang menyebabkan gini ratio meningkat adalah karena berubahnya distribusi pengeluaran pada kelompok-kelompok ekonomi di Tapanuli Utara. Jika gini ratio meningkat, artinya masyarakat dengan ekonomi terbawah, peningkatan pengeluarannya lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas. Gini ratio meningkat dapat terjadi dikarenakan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat semakin baik terutama di kelompok ekonomi menengah dan tinggi.

Sedangkan pada Tahun 2024, Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 yaitu dari angka 0,262 menjadi 0,242. Dengan menurunnya gini rasio dapat menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan semakin merata, kesenjangan sosial semakin mengecil, akses dan kesempatan Pembangunan semakin merata.

**i. Pemenuhan Belanja *Mandatori Spending***.

**1. Fungsi Pendidikan.**

Jumlah alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan pada APBD murni yaitu sebesar Rp483.789.202.602,00 atau dengan rasio 32,71% sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp449.868.638.102,00 dengan rasio 31,19% dan realisasi sebesar Rp421.018.586.235,00 atau 93,59% dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi alokasi anggoran untuk fungsi pendidikan. Perhitungan alokasi dan realisasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan**

| No. | Komponen Perhitungan | Murni (Rp) | Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **a. Belanja pada Dinas Pendidikan:** | **475.723.007.871,00** | **443.083.394.327,00** | **414.707.937.821,00** | **93,60** |
| | 1) Belanja Operasi: | 445.635.984.283,00 | 415.560.223.287,00 | 384.477.654.349,00 | 92,52 |
| | a. belanja pegawai; | 399.002.135.971,00 | 365.016.870.054,00 | 337.903.372.229,00 | 92,57 |
| | b. belanja barang dan jasa; | 40.989.838.312,00 | 40.174.098.308,00 | 36.238.576.295,00 | 90,20 |
| | c. belanja hibah; | 5.644.010.000,00 | 10.369.254.925,00 | 10.335.705.825,00 | 99,68 |
| | d. belanja bantuan sosial. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Belanja Modal; | 30.087.023.588,00 | 27.523.171.040,00 | 30.230.283.472,00 | 109,84 |
| | | | | | |
| | **b. Belanja di luar Dinas pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:** | **8.066.194.731,00** | **6.785.243.775,00** | **6.310.648.414,00** | **93,01** |
| | 1) Belanja Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Belanja bantuan keuangan… | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Dinas Perpustakaan | 3.805.547.605,00 | 3.440.905.014,00 | 3.219.347.914,00 | 93,56 |
| | 4) Dinas Pemuda dan olah Raga | 4.260.647.126,00 | 3.344.338.761,00 | 3.091.300.500,00 | 92,43 |
| | | | | | |
| **2** | **Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)** | **483.789.202.602,00** | **449.868.638.102,00** | **421.018.586.235,00** | **93,59** |
| **3** | **Total Belanja Daerah** | **1.479.139.183.733,00** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** |
| | **Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%** | **32,71** | **31,19** | **30,60** | |

## 2. Fungsi Kesehatan.

Jumlah Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan pada APBD Murni sebesar Rp292.133.099.917,00 dengan rasio 32,33% dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp294.464.457.177,00 dengan rasio 30,54% dan realisasi sebesar Rp291.131.121.116,00 atau 98,87% dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan. Perhitungan alokasi dan realisasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan**

| No. | Komponen Perhitungan | Murni (Rp) | Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **a. Belanja pada Dinas Kesehatan:** | **160.206.448.369,00** | **163.274.637.911,00** | **154.877.663.409,00** | **94,86** |
| | 1) Belanja Operasi: | 155.813.906.869,00 | 159.100.404.911,00 | 151.925.965.409,00 | 95,49 |
| | a. belanja pegawai; | 91.186.700.311,00 | 96.361.573.824,00 | 91.676.075.917,00 | 95,14 |
| | b. belanja barang dan jasa; | 64.627.206.558,00 | 62.738.831.087,00 | 60.249.889.492,00 | 96,03 |
| | c. belanja hibah; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. belanja bantuan sosial. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Belanja Modal; | 4.392.541.500,00 | 4.174.233.000,00 | 2.951.698.000,00 | 70,71 |
| | **b. Belanja di luar Dinas** | **131.926.651.548,00** | **131.189.819.266,00** | **136.253.457.707,00** | **103,86** |

| No. | Komponen Perhitungan | Murni (Rp) | Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:** | | | | |
| | 1) Belanja Transfer: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Belanja bantuan keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) RSUD | 119.608.723.806,00 | 118.979.589.025,00 | 124.452.786.004,00 | 104,60 |
| | 4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 12.317.927.742,00 | 12.210.230.241,00 | 11.800.671.703,00 | 96,65 |
| | | | | | |
| **2** | **Anggaran Kesehatan (a+b)** | **292.133.099.917,00** | **294.464.457.177,00** | **291.131.121.116,00** | **98,87** |
| **3** | **Total Belanja Daerah** | **1.479.139.183.733,00** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** |
| **4** | **Gaji ASN** | **575.497.388.907,00** | **478.237.133.859** | **457.180.855.720,00** | **95,60** |
| **5** | **Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)** | **903.641.794.826,00** | **964.324.660.625,00** | **918.677.334.135,41** | **95,27** |
| | **Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%** | **32,33** | **30,54** | **31,69** | **103,78** |

### 3. Fungsi Pengawasan.

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.562.169.225,00 atau 0,66% dari total belanja daerah sebesar Rp1.442.561.794.484,00 ***(belum memenuhi)*** dengan realisasi sebesar Rp9.185.744.917,00 atau 96,06% dari target yang ditetapkan.

### 4. Fungsi Infrastruktur

Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp178.426.839.907,00 atau 26,77% dari jumlah Dana Transfer Umum (DTU) yang diperhitungkan sebesar Rp666.569.898.100,00 ***(belum memenuhi).*** Perhitungan Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur sebagaimana berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Belanja Daerah | : Rp | 1.471.559.667.117,00 |
| 2 | Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: | : Rp | 265.428.271.000,00 |
| | a) Belanja bagi hasil | : Rp | 0,00 |
| | b) Belanja Bantuan keuangan | : Rp | 265.428.271.000,00 |
| 3 | Alokasi belanja yang diperhitungkan ( 3 = 1 -2 ) | : Rp | 1.206.131.396.117,00 |
| 4 | Alokasi minimum belanja Infrastruktur (40% x 3 ) | : Rp | 482.452.558.446,80 |
| 5 | Anggaran Infrastruktur | : Rp | 178.426.839.907,00 |
| 6 | Rasio Infrastruktur | : | 14,79% |

## 5. Alokasi Anggaran Penanganan Inflasi

Alokasi anggaran untuk penanganan inflasi Tahun 2024 sebesar Rp1.778.668.248,00 dan realisasi sebesar Rp1.734.108.930,00 atau mencapai 97,49% dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 2. 7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Inflasi**

| No. | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 285.000.000,00 | 284.932.730,00 | 99,98% |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 9.999.700,00 | 9.576.400,00 | 95,77% |
| 3 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 56.374.900,00 | 54.677.400,00 | 96,99% |
| 4 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | 14.834.100,00 | 98,89% |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 617.100.000,00 | 579.210.900,00 | 93,86% |
| 6 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| 8 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 510.000.000,00 | 507.244.000,00 | 99,46% |
| 9 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 235.193.648,00 | 233.633.400,00 | 99,34% |
| **Total** | | **1.778.668.248,00** | **1.734.108.930,00** | **97,49%** |

## 6. Mandatory Alokasi Dana Desa (ADD)

Anggaran untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp73.292.475.900,00 dan realisasi sebesar Rp59.519.850.376,00 atau mencapai 81,21%. Rincian perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 2. 8 Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2024**

| NO. | URAIAN | TA 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MURNI | P-APBD | REALISASI |
| 1 | DAU | 677.223.717.000,00 | 677.223.717.000,00 | 681.275.700.613,00 |
| 2 | DBH | 54.433.714.000,00 | 64.448.095.000,00 | 64.628.799.000,00 |
| 3 | DBH CHT | (1.809.438.000,00) | (1.809.438.000,00) | (1.990.142.000,00) |
| 4 | DBH SAWIT | 0,00 | (6.937.615.000,00) | (6.937.615.000,00) |
| | **Jumlah** | **729.847.993.000,00** | **732.924.759.000,00** | **736.976.742.000,00** |
| **I** | **ALOKASI ADD (10% DARI DAU + DBH - DBH CHT - DBH SAWIT)** | **72.984.799.300,00** | **73.292.475.900,00** | |
| **II** | **BELANJA ADD PADA APBD** | **73.165.743.100,00** | **73.292.475.900,00** | **59.519.850.376,00** |
| **III** | **PERSENTASE ADD** | **10,02%** | **10,00%** | **8,08%** |

## 2.2. Perubahan APBD dan Penjelasannya

Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2024 baik dari segi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 9 Perubahan APBD TA 2024**

| No | Uraian | APBD TA 2024 | P-APBD TA 2024 | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan | 1.507.515.377.464,00 | 1.493.599.771.268,00 | (13.915.606.196,00) |
| 2. | Belanja | 1.479.139.183.733,00 | 1.442.561.794.484,00 | (36.577.389.249,00) |
| 3. | Surplus/(Defisit) | 28.376.193.731,00 | 51.037.976.784,00 | 22.661.783.053,00 |
| 4. | Pembiayaan: | | | |
| | a. Penerimaan | 40.934.733.910,00 | 18.272.950.857,00 | (22.661.783.053,00) |
| | b. Pengeluaran | 69.310.927.641,00 | 69.310.927.641,00 | 0,00 |
| 5. | Pembiayaan netto | (28.376.193.731,00) | (51.037.976.784,00) | (22.661.783.053,00) |
| 6. | SiLPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.*

1) Perubahan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.915.606.196,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp1.507.515.377.464,00 menjadi sebesar Rp1.493.599.771.268,00 atau turun 0,92%.

Perbandingan anggaran pendapatan daerah dalam APBD TA 2024 dengan rencana pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 10 Perubahan Pendapatan Daerah TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | APBD 2024 | P-APBD 2024 | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **202.083.203.558,00** | **141.556.738.834,00** | **(60.526.464.724,00)** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 35.606.000.000,00 | 30.050.000.000,00 | (5.556.000.000,00) |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 108.281.600.000,00 | 86.317.290.000,00 | (21.964.310.000,00) |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.211.867.299,00 | 13.211.867.299,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang sah | 44.983.736.259,00 | 11.977.581.535,00 | (33.006.154.724,00) |
| **4.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.280.646.611.947,00** | **1.324.579.290.597,00** | **43.932.678.650,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat | 1.220.227.884.000,00 | 1.235.542.689.000,00 | 15.314.805.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 60.418.727.947,00 | 89.036.601.597,00 | 28.617.873.650,00 |
| **4.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **24.785.561.959,00** | **27.463.741.837,00** | **2.678.179.878,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459,00 | 13.463.233.459,00 | 0,00 |
| 4.3.03 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan | 11.322.328.500,00 | 14.000.508.378,00 | 2.678.179.878,00 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.507.515.377.464,00** | **1.493.599.771.268,00** | **(13.915.606.196,00)** |

*Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.*

Target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp13.915.606.196,00 pada perubahan APBD TA 2024, dimana hal ini dilakukan dengan memperhatikan potensi penerimaan daerah yang lebih realistis dan rasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pajak Daerah mengalami pengurangan target sebesar Rp5.556.000.000,00 disebabkan menurunnya potensi penerimaan yang bersumber dari Wajib Pungut atas belanja makanan dan minuman dan pajak mineral bukan logam dan batuan pada APBD TA 2024. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penurunan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu;
2. Retribusi Daerah mengalami pengurangan target sebesar Rp21.964.310.000,00 disebabkan oleh penurunan target penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Tarutung sebagai akibat penyesuaian pendapatan terhadap belanja BLUD RSUD Tarutung dan adanya penyesuaian terhadap potensi retribusi pemanfaatan aset daerah;
3. Lain-Lain PAD Yang Sah berkurang sebesar Rp33.006.154.724,00 disebabkan semakin mengecilnya peluang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperoleh Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah pada RKUD, seiring dengan mekanisme dan persyaratan penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat yang semakin ketat;
4. Pendapatan Transfer mengalami penyesuaian diakibatkan adanya penyesuaian alokasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Utara.

2) Perubahan Belanja Daerah.

Anggaran belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp36.553.599.249,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp1.479.139.183.733,00 menjadi sebesar Rp1.442.561.794.484,00 atau turun sebesar 2,47 %.

Belanja Daerah terdiri dari: belanja operasi sebesar Rp1.062.938.481.200,00, belanja modal sebesar Rp102.975.845.013,00, belanja tidak terduga sebesar Rp3.531.157.371,00 dan belanja transfer sebesar Rp273.116.310.900,00. Untuk lebih jelasnya anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 11 Perubahan Belanja Daerah TA 2024**

| Kode Rek | URAIAN | APBD 2024 | P-APBD 2024 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **1.099.367.046.888,00** | **1.062.938.481.200,00** | **(36.428.565.688,00)** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 701.476.442.407,00 | 669.005.440.000,00 | (32.471.002.407,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 325.933.715.018,00 | 317.934.829.606,00 | (7.998.885.412,00) |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900,00 | 3.096.653.900,00 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 68.011.735.563,00 | 72.093.912.994,00 | 4.082.177.431,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 848.500.000,00 | 807.644.700,00 | (40.855.300,00) |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **107.718.628.745,00** | **102.975.845.013,00** | **(4.742.783.732,00)** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 164.000.060,00 | 164.000.060,00 |

| Kode Rek | URAIAN | APBD 2024 | P-APBD 2024 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.414.451.192,00 | 24.198.460.613,00 | 9.784.009.421,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung | 25.077.513.600,00 | 15.765.583.800,00 | (9.311.929.800,00) |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 56.904.027.734,00 | 62.693.955.540,00 | 5.789.927.806,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.257.636.219,00 | 112.635.000,00 | (11.145.001.219,00) |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 65.000.000,00 | 41.210.000,00 | (23.790.000,00) |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **5.000.000.000,00** | **3.531.157.371,00** | **(1.468.842.629,00)** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 3.531.157.371,00 | (1.468.842.629,00) |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **267.053.508.100,00** | **273.116.310.900,00** | **6.062.802.800,00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 267.053.508.100,00 | 273.116.310.900,00 | 6.062.802.800,00 |
| **Jumlah Belanja** | | **1.479.139.183.733,00** | **1.442.561.794.484,00** | **(36.577.389.249,00)** |

*Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara*

Penurunan belanja daerah pada perubahan APBD TA 2024 merupakan penyesuaian terhadap adanya penurunan target Pendapatan Daerah yang dikoreksi pada perubahan APBD TA 2024 dari semula Rp1.507.515.377.464,00 pada APBD 2024 menjadi Rp1.493.599.771.268,00 atau turun sebesar Rp13.915.606.196,00. Selain penurunan target pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan pun tidak sesuai dengan proyeksi yang dianggarkan pada APBD 2024 dimana terjadi penurunan yakni dari semula dialokasikan Rp40.934.733.910,00 menjadi Rp18.272.950.857,00 atau berkurang sebesar Rp22.661.783.053,00, sehingga total penyesuaian/rasionalisasi belanja yang harus dilakukan adalah sebesar Rp36.577.389.249,00.

3) Perubahan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.661.783.053,00 dari target sebesar Rp40.934.733.910,00 menjadi sebesar Rp18.272.950.857,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp69.310.927.641,00 atau tidak mengalami perubahan yang penggunaannya untuk pembayaran cicilan pokok utang pinjaman PEN Tahun 2020 dan pinjaman PEN Tahun 2021.

## 2.3. Kebijakan Keuangan

APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkannya pada APBD Tahun 2024 hingga semester I, maka perlu dilakukan Perubahan APBD TA 2024 yang disepakati bersama antara Bupati Tapanuli Utara dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun asumsi penyusunan perubahan APBD TA 2024 sebagai berikut:

1. Penyesuaian target penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan mempertimbangkan hasil capaian hingga Semester I Tahun Anggaran 2024;
2. Penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara;
3. Hasil evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan APBD Tahun 2024 terdapat beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian, pergeseran kode belanja dan perubahan output dalam rangka penyesuaian terhadap prioritas dan kapasitas keuangan daerah;
4. Penyesuaian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mempedomani surat Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-12/PK/PK.4/2024 hal Tanggapan Atas Ketidakmampuan Memenuhi 10% Alokasi Dana Desa.

Adapun kebijakan keuangan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 yakni berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025;
- penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sediikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut;
- penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan

retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;

- kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- Pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- ✓ DBH-Kehutanan;
- ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- ✓ DBH-Perikanan.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

(2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

(3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

(2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah;

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Dana darurat;

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan honorarium dengan kebijakan sebagai berikut:

a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

b) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) Tahun.

c) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.

e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambaha

j) penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR). Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah

Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh *(full cost recovery),* Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi

c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan bersifat tidak berulang yang terjadi pada Tahun sebelumnya. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD Tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan

surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam Tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) Tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam Tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan

kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam Tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada Tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap Tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2) Penyertaan Modal Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah

dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.

b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan Daerah pada TA 2024 Realisasi sebesar Rp1.437.280.040.724,40 atau mencapai 96,23% dari anggaran sebesar Rp1.493.599.771.268,00 atau kurang realisasi dari target yang dianggarkan sebesar Rp56.319.730.543,60. Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp133.655.052.931,40 atau mencapai 94,42% dari jumlah anggaran sebesar Rp141.556.738.834,00, Pendapatan Transfer sebesar

Rp1.281.410.872.862,00 atau mencapai 96,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.324.579.290.597,00, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp22.214.114.931,00 atau mencapai 80,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.463.741.837,00.

Belanja Daerah pada TA 2024 realisasi sebesar Rp1.375.858.189.855,41 atau mencapai 95,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.442.561.794.484,00 atau kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp66.703.604.628,59. Realisasi Belanja Daerah TA 2024 terdiri dari Belanja Operasi realisasi sebesar Rp1.014.674.115.403,47 atau mencapai 95,46% dari anggaran sebesar Rp1.062.938.481.200,00. Belanja modal realisasi sebesar Rp99.079.324.655,94 atau mencapai 96,22% dari anggaran sebesar Rp102.975.845.013,00. Belanja Tak Terduga realisasi sebesar Rp3.454.947.220,00 atau mencapai 97,84% dari anggaran sebesar Rp3.531.157.371,00, dan Belanja Transfer realisasi sebesar Rp258.649.802.576,00 atau mencapai 94,70% dari anggaran sebesar Rp273.116.310.900,00.

Penerimaan Pembiayaan di TA 2024 yakni Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp18.264.856.637,87 atau mencapai 99,96% dari anggaran sebesar Rp18.272.950.857,00. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 realisasi sebesar Rp69.282.056.597,00 atau mencapai 99,96% dari anggaran sebesar Rp69.310.927.641,00.

Rincian Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut..

**Tabel 2. 12 Rincian Realisasi APBD TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| **4** | **Pendapatan Daerah** | **1.493.599.771.268,00** | **1.437.280.040.724,40** | **96,23** | **1.400.956.430.711,00** |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 141.556.738.834,00 | 133.655.052.931,40 | 94,42 | 134.848.617.519,00 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.324.579.290.597,00 | 1.281.410.872.862,00 | 96,74 | 1.242.025.117.323,00 |
| 4.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 27.463.741.837,00 | 22.214.114.931,00 | 80,89 | 24.082.695.869,00 |
| **5** | **Belanja Daerah** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| 5.1 | Belanja Operasi | 1.062.938.481.200,00 | 1.014.674.115.403,47 | 95,46 | 927.720.435.846,00 |
| 5.2 | Belanja Modal | 102.975.845.013,00 | 99.079.324.655,94 | 96,22 | 168.342.205.859,00 |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 265.473.294.238,00 |
| **6** | **Pembiayaan Daerah** | **(51.037.976.784,00)** | **(51.017.199.959,13)** | **99,96** | **(9.333.086.602,00)** |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 18.272.950.857,00 | 18.264.856.637,87 | 99,96 | 63.076.262.956,00 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 72.409.349.558,00 |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** | **0,00** | **10.404.650.909,86** | | **18.272.950.856,00** |

# BAB III
# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.437.280.040.724,40 atau 96,23% dari target sebesar Rp1.493.599.771.268,00. Rincian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 1 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| **4** | **Pendapatan Daerah** | **1.493.599.771.268,00** | **1.437.280.040.724,40** | **96,23** | **1.400.956.430.711,00** |
| **4.1** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **141.556.738.834,00** | **133.655.052.931,40** | **94,42** | **134.848.617.519,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 30.050.000.000,00 | 27.663.738.746,01 | 92,06 | 27.612.663.867,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 86.317.290.000,00 | 93.784.976.878,78 | 108,65 | 5.536.938.005,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.211.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 63,97 | 8.139.637.407,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.977.581.535,00 | 3.754.826.999,61 | 31,35 | 93.559.378.240,00 |
| | | | | | |
| **4.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.324.579.290.597,00** | **1.281.410.872.862,00** | **96,74** | **1.242.025.117.323,00** |
| **4.2.01** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **1.235.542.689.000,00** | **1.235.714.467.229,00** | **100,01** | **1.187.312.757.950,00** |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.028.851.584.000,00 | 1.029.717.245.029,00 | 100,08 | 977.754.608.950,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824.467.000,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 199.823.835.000,00 | 199.129.952.200,00 | 99,65 | 198.733.682.000,00 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | 6.867.270.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **4.2.02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **89.036.601.597,00** | **45.696.405.633,00** | **51,32** | **54.712.359.373,00** |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 87.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 52,50 | 53.068.727.947,00 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.631.426,00 |
| | | | | | |
| **4.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |
| | **Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |

*Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.*

### 3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.375.858.189.855,41 atau mencapai 95,38% dari anggaran sebesar Rp1.442.561.794.484,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 2 Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| **5** | **Belanja Daerah** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **1.062.938.481.200,00** | **1.014.674.115.403,47** | **95,46** | **927.720.435.846,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 669.005.440.000,00 | 621.410.779.418,00 | 92,89 | 550.561.006.379,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 317.934.829.606,00 | 318.291.641.973,47 | 100,11 | 351.521.956.695,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 72.093.912.994,00 | 71.990.363.892,00 | 99,86 | 19.735.718.872,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 807.644.700,00 | 773.494.700,00 | 95,77 | 2.805.100.000,00 |
| | | | | | |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **102.975.845.013,00** | **99.079.324.655,94** | **96,22** | **168.342.205.859,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.198.460.613,00 | 26.958.423.144,00 | 111,41 | 44.530.761.080,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.765.583.800,00 | 14.949.241.861,74 | 94,82 | 31.062.611.625,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62.693.955.540,00 | 56.854.991.209,34 | 90,69 | 92.684.156.254,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 64.676.900,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |
| | | | | | |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **3.531.157.371,00** | **3.454.947.220,00** | **97,84** | **11.814.457.310,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| | | | | | |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **273.116.310.900,00** | **258.649.802.576,00** | **94,70** | **265.473.294.238,00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 265.473.294.238,00 |

*Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara*

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2024**

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Selisih | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp | % |
| | **Belanja** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **(66.703.604.628,59)** | **95,38** |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **849.860.049.231,00** | **812.204.332.999,85** | **(37.655.716.231,15)** | **95,57** |
| *1* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN* | *443.083.394.327,00* | *414.707.937.821,50* | *(28.375.456.505,50)* | *93,60* |
| | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 443.083.394.327,00 | 414.707.937.821,50 | (28.375.456.505,50) | 93,60 |
| *2* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN* | *282.254.226.936,00* | *279.330.449.413,00* | *(2.923.777.523,00)* | *98,96* |
| | DINAS KESEHATAN | 163.274.637.911,00 | 154.877.663.409,00 | (8.396.974.502,00) | 94,86 |
| | RSU DAERAH TARUTUNG | 118.979.589.025,00 | 124.452.786.004,00 | 5.473.196.979,00 | 104,60 |
| *3* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* | *101.208.800.023,00* | *95.676.246.200,35* | *(5.532.553.822,65)* | *94,53* |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 64.334.663.531,00 | 59.276.808.323,00 | (5.057.855.208,00) | 92,14 |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 36.874.136.492,00 | 36.399.437.877,35 | (474.698.614,65) | 98,71 |
| *4* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT* | *20.237.210.710,00* | *19.677.451.834,00* | *(559.758.876,00)* | *97,23* |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16.693.310.712,00 | 16.340.153.958,00 | (353.156.754,00) | 97,88 |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.543.899.998,00 | 3.337.297.876,00 | (206.602.122,00) | 94,17 |
| *5* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL* | *3.076.417.235,00* | *2.812.247.731,00* | *(264.169.504,00)* | *91,41* |
| | DINAS SOSIAL | 3.076.417.235,00 | 2.812.247.731,00 | (264.169.504,00) | 91,41 |
| | | | | | |
| **II** | ***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*** | **67.892.273.551,00** | **64.255.508.277,10** | **(3.636.765.273,90)** | **94,64** |
| *1* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA* | *3.472.593.537,00* | *2.518.590.398,00* | *(954.003.139,00)* | *72,53* |
| | DINAS KETENAGAKERJAAN | 3.472.593.537,00 | 2.518.590.398,00 | (954.003.139,00) | 72,53 |
| *2* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK* | *12.210.230.241,00* | *11.800.671.703,00* | *(409.558.538,00)* | *96,65* |
| | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 12.210.230.241,00 | 11.800.671.703,00 | (409.558.538,00) | 96,65 |
| *3* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN* | *7.728.901.161,00* | *7.395.494.446,00* | *(333.406.715,00)* | *95,69* |
| | DINAS KETAHANAN PANGAN | 7.728.901.161,00 | 7.395.494.446,00 | (333.406.715,00) | 95,69 |
| *4* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP* | *9.961.346.240,00* | *9.788.028.988,24* | *(173.317.251,76)* | *98,26* |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9.961.346.240,00 | 9.788.028.988,24 | (173.317.251,76) | 98,26 |
| *5* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL* | *3.656.608.145,00* | *3.560.227.160,00* | *(96.380.985,00)* | *97,36* |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.656.608.145,00 | 3.560.227.160,00 | (96.380.985,00) | 97,36 |
| *6* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA* | *3.597.556.853,00* | *3.443.612.337,00* | *(153.944.516,00)* | *95,72* |
| | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.597.556.853,00 | 3.443.612.337,00 | (153.944.516,00) | 95,72 |
| *7* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN* | *4.560.650.769,00* | *4.396.662.343,00* | *(163.988.426,00)* | *96,40* |
| | DINAS PERHUBUNGAN | 4.560.650.769,00 | 4.396.662.343,00 | (163.988.426,00) | 96,40 |
| *8* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA* | *3.892.234.591,00* | *3.736.417.327,00* | *(155.817.264,00)* | *96,00* |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Selisih | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp | % |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.892.234.591,00 | 3.736.417.327,00 | (155.817.264,00) | 96,00 |
| *9* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH* | *8.628.772.958,00* | *8.100.645.596,00* | *(528.127.362,00)* | *93,88* |
| | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 8.628.772.958,00 | 8.100.645.596,00 | (528.127.362,00) | 93,88 |
| *10* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL* | *3.398.135.281,00* | *3.204.509.564,00* | *(193.625.717,00)* | *94,30* |
| | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.398.135.281,00 | 3.204.509.564,00 | (193.625.717,00) | 94,30 |
| *11* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA* | *3.344.338.761,00* | *3.091.300.500,00* | *(253.038.261,00)* | *92,43* |
| | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3.344.338.761,00 | 3.091.300.500,00 | (253.038.261,00) | 92,43 |
| *12* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN* | *3.440.905.014,00* | *3.219.347.914,86* | *(221.557.099,14)* | *93,56* |
| | DINAS PERPUSTAKAAN | 3.440.905.014,00 | 3.219.347.914,86 | (221.557.099,14) | 93,56 |
| | | | | | |
| **III** | ***URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN*** | **48.014.144.478,00** | **45.295.962.378,10** | **(2.718.182.099,90)** | **94,34** |
| *1* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA* | *14.738.235.372,00* | *13.491.623.929,00* | *(1.246.611.443,00)* | *91,54* |
| | DINAS PARIWISATA | 14.738.235.372,00 | 13.491.623.929,00 | (1.246.611.443,00) | 91,54 |
| *2* | *URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN* | *33.275.909.106,00* | *31.804.338.449,10* | *(1.471.570.656,90)* | *95,58* |
| | DINAS PERTANIAN | 33.275.909.106,00 | 31.804.338.449,10 | (1.471.570.656,90) | 95,58 |
| *3* | *UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN* | *70.116.001.110,00* | *67.127.183.984,00* | *(2.988.817.126,00)* | *95,74* |
| | SEKRETARIAT DAERAH | 27.445.588.098,00 | 26.251.306.390,00 | (1.194.281.708,00) | 95,65 |
| | SEKRETARIAT DPRD | 42.670.413.012,00 | 40.875.877.594,00 | (1.794.535.418,00) | 95,79 |
| *4* | *UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN* | *302.744.794.233,00* | *285.475.302.564,90* | *(17.269.491.668,10)* | *94,30* |
| | PERENCANAAN | 5.453.613.576,00 | 5.111.404.949,00 | (342.208.627,00) | 93,73 |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.453.613.576,00 | 5.111.404.949,00 | (342.208.627,00) | 93,73 |
| *5* | *KEUANGAN* | *293.377.131.634,00* | *276.633.700.184,90* | *(16.743.431.449,10)* | *94,29* |
| | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 288.384.067.508,00 | 271.924.529.582,90 | (16.459.537.925,10) | 94,29 |
| | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4.993.064.126,00 | 4.709.170.602,00 | (283.893.524,00) | 94,31 |
| *6* | *KEPEGAWAIAN* | *3.914.049.023,00* | *3.730.197.431,00* | *(183.851.592,00)* | *95,30* |
| | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.914.049.023,00 | 3.730.197.431,00 | (183.851.592,00) | 95,30 |
| *7* | *UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN* | *9.562.169.225,00* | *9.185.744.917,00* | *(376.424.308,00)* | *96,06* |
| | INSPEKTORAT DAERAH | 9.562.169.225,00 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| | INSPEKTORAT | 9.562.169.225,00 | 9.185.744.917,00 | (376.424.308,00) | 96,06 |
| *8* | *UNSUR KEWILAYAHAN* | *35.347.477.041,00* | *33.406.306.903,46* | *(1.941.170.137,54)* | *94,51* |
| | KECAMATAN | 35.347.477.041,00 | 33.406.306.903,46 | (1.941.170.137,54) | 94,51 |
| | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 1.376.687.050,00 | 1.294.372.491,00 | (82.314.559,00) | 94,02 |
| | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 1.729.563.399,00 | 1.657.367.257,00 | (72.196.142,00) | 95,83 |
| | KANTOR KECAMATAN MUARA | 1.896.347.309,00 | 1.669.580.640,00 | (226.766.669,00) | 88,04 |
| | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 1.582.291.946,00 | 1.536.670.903,00 | (45.621.043,00) | 97,12 |
| | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 2.239.078.755,00 | 2.196.074.844,00 | (43.003.911,00) | 98,08 |
| | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 2.852.367.575,00 | 2.764.236.727,00 | (88.130.848,00) | 96,91 |
| | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 1.597.008.386,00 | 1.551.995.433,00 | (45.012.953,00) | 97,18 |
| | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 1.232.457.895,00 | 1.164.179.250,00 | (68.278.645,00) | 94,46 |
| | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 1.208.808.221,00 | 1.149.357.030,00 | (59.451.191,00) | 95,08 |
| | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 2.336.161.542,00 | 1.789.117.501,00 | (547.044.041,00) | 76,58 |
| | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 3.581.540.466,00 | 3.425.725.430,00 | (155.815.036,00) | 95,65 |
| | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 1.158.164.913,00 | 1.122.522.647,00 | (35.642.266,00) | 96,92 |
| | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.141.612.433,00 | 2.030.177.874,00 | (111.434.559,00) | 94,80 |
| | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 2.287.945.461,00 | 2.159.363.003,00 | (128.582.458,00) | 94,38 |
| | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 8.127.441.690,00 | 7.895.565.873,46 | (231.875.816,54) | 97,15 |
| *9* | *UNSUR PEMERINTAHAN UMUM* | *59.024.885.615,00* | *58.907.847.831,00* | *(117.037.784,00)* | *99,80* |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 59.024.885.615,00 | 58.907.847.831,00 | (117.037.784,00) | 99,80 |
| | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 59.024.885.615,00 | 58.907.847.831,00 | (117.037.784,00) | 99,80 |

### 3.1.3. Realisasi Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp18.264.856.637,87 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp18.272.950.857,00 sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp69.282.056.597,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp69.310.927.641,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 4 Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| **6** | **Pembiayaan Daerah** | **(51.037.976.784,00)** | **(51.017.199.959,13)** | **99,96** | **(9.333.086.602,00)** |
| **6.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **18.272.950.857,00** | **18.264.856.637,87** | **99,96** | **63.076.262.956,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 18.272.950.857,00 | 18.264.856.637,87 | 99,96 | 63.076.262.956,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **6.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **69.310.927.641,00** | **69.282.056.597,00** | **99,96** | **72.409.349.558,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |

## 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

### 3.2.1. Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan kontribusi terbanyak yaitu 89,16%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,30% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,26% dari total pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Dana Perimbangan hanya sebesar 12,98%.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain:

a. Pemutakhiran basis data potensi PAD belum dilaksanakan secara komprehensif karena keterbatasan anggaran, personil dan sarana prasarana;

b. Penetapan target penerimaan pendapatan daerah belum dilaksanakan sesuai dengan potensi PAD yang dimiliki;

c. Penatausahaan pengelolaan pendapatan daerah belum seluruhnya menggunakan sistem elektronik termasuk sistem pembayaran non tunai;

d. Masih ada Perangkat Daerah yang kurang taat dalam penyetoran PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

e. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam hal pelaksanaan penagihan, monitoring dan pengawasan potensi-potensi pendapatan daerah.

### 3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah terkait dengan belanja daerah antara lain:

a. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib mengikat yang cukup besar yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan KDH/ WKDH dan gaji tunjangan DPRD;

b. Penyesuaian program kegiatan berdasarkan sumber dana pembiayaan kegiatan dimaksud;

c. Penyesuaian terhadap pemotongan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaanya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020;

d. Belum semua aparat pengelola keuangan khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) memahami dengan baik mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keterlambatan baik dalam proses pencairan keuangan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan;

e. Adanya hambatan dan kendala yang bersifat teknis maupun administratif yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan;

f. Sebagian besar SKPD masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya;

g. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan belum optimal, sehingga berdampak pada penyelesaian kegiatan yang mengalami kemunduran dari jadwal. Selain itu akan berakibat pada terlambatnya proses penatausahaan dan pelaporan;

h. Kurang optimalnya pemahaman dan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan dan akuntansi pelaporan oleh para pengguna *(user)*;

i. Kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan masih rendah;

j. Dukungan infrastruktur yang belum terukur, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, terutama antar desa/kecamatan;

k. Risiko bencana alam.

### 3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

## 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 bahwa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor antara lain sebagai berikut.

**Tabel 4. 1 Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara**

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | RSU DAERAH TARUTUNG |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 8 | DINAS SOSIAL |
| 9 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 14 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 17 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 19 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 20 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| 21 | DINAS PARIWISATA |
| 22 | DINAS PERTANIAN |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 24 | INSPEKTORAT |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 26 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 27 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 29 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 30 | SEKRETARIAT DPRD |
| 31 | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG |
| 32 | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA |
| 33 | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING |
| 34 | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON |
| 35 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU |
| 36 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE |
| 37 | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN |
| 38 | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR |
| 39 | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN |
| 40 | KANTOR KECAMATAN GAROGA |
| 41 | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG |
| 42 | KANTOR KECAMATAN PAGARAN |
| 43 | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN |
| 44 | KANTOR KECAMATAN MUARA |
| 45 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## 4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan *(matching cost against revenue principle)* tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah Tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

**4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Surplus/Defisit-LRA;
d) Pembiayaan; dan
e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) SAL awal;
b) Penggunaan SAL;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
d) Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya;
e) Lain-lain; dan
f) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara kas;

b) Investasi jangka pendek;

c) Piutang;

d) Persediaan;

e) Investasi jangka panjang;

f) Aset tetap;

g) Aset lainnya;

h) Kewajiban jangka pendek;

i) Kewajiban jangka panjang; dan

j) Ekuitas.

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

d. Laporan Operasional

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga ,dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu Tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan Non Operasional;

e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;

f) Pos Tidak Terduga; dan

g) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

e. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi

(1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

(a) Penerimaan Pajak Daerah;

(b) Penerimaan Retribusi Daerah;

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

(d) Penerimaan Transfer;

(e) Penerimaan Hibah;

(f) Penerimaan Dana Darurat; dan

(g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang dan Jasa;

(c) Belanja Bunga;

(d) Belanja Subsidi;

(e) Belanja Hibah;

(f) Belanja Bantuan Sosial

(g) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan

(h) Belanja Transfer.

b) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap; dan

(b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan Aset Tetap; dan

(b) Perolehan Aset Lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(a) Penerimaan Utang Luar Negeri;

(b) Penerimaan Utang Obligasi;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;

(f) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah;

(g) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

(a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

(b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

(c) Pembentukan Dana Cadangan;

(d) Penyertaan Modal Pemerintah;

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;

(f) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan pemerintah daerah;

(g) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

d) Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir

Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.

d) Kebijakan akuntansi yang penting:

1) Entitas akuntansi/pelaporan;

2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan

5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:

1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan

2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

## 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

1. Kebijakan Akuntansi Aset

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2. Aset Lancar

a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c) Kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah;

(2) Kas di Bendahara Penerimaan;

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)/ FKTP;

(5) Kas Dana BOS; dan

(6) Kas lainnya.

d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

e) Setara kas terdiri dari:

(1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan

(2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:

(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Piutang

1) Definisi Piutang

a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Piutang

a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

(1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

(2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

(2) Jumlah piutang dapat diukur.

3) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

(1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

(2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

(3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)*

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(1) Kualitas Piutang Lancar;

(2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(3) Kualitas Piutang Diragukan; dan

(4) Kualitas Piutang Macet.

i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan

(2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 Tahun;

(b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak kooperatif;

(d) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun;

(b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun;

(b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang diatas 3 Tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*.

k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 Tahun;

(b) Wajib Pajak kooperatif;

(c) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun;

(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun;

(b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

(c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang diatas 3 Tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*.

l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan

(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

(4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

(1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;

(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4) Pemberhentian Pengakuan

a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

(a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

(b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

(c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

(5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.

(7) Dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*

b) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

(b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

(d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

(2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis

piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

c. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

(1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

(2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Klasifikasi persediaan meliputi:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor;
2. Persediaan Barang Cetakan;
3. Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;
4. Persediaan Hewan dan Tanaman;
5. Persediaan Aspal; dan
6. Persediaan Lain-lain.

2) Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui:

(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran Persediaan

a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.

b) Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

(1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

(1) Deviden tunai;

(2) Deviden saham; dan

(3) Bagian laba.

c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya;
2. Metode ekuitas; dan
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

(1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.

(4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran**

| Uraian | Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tidak Melampaui Jatuh Tempo | Jatuh Tempo 0-3 Bulan | Jatuh Tempo 4-9 Bulan | Jatuh Tempo 10-12 Bulan | Jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan |
| Investasi Non Permanen Dana Bergulir | 0% | 20% | 50% | 75% | 100% |

(5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e) Masa manfaat adalah:

(1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Aset Tetap

a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap**

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|---|---|
| Tanah | Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll. |
| Peralatan dan Mesin | Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. |
| Gedung dan Bangunan | Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. |
| Jalan, Jaringan, & Instalasi | Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai |
| Aset Tetap Lainnya | Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.<br>Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.<br>Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan. |

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold.* Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6) Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

8) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

9) Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (s*ubsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (s*ubsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) Bertambah ekonomis/efisien;

(b) Bertambah umur ekonomis;

(c) Bertambah volume; dan/atau

(d) Bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)**

| No. | Aset Tetap | Kondisi | Nilai Kapitalisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | | Tidak dibatasi |
| 2 | Peralatan Mesin | | |
| | Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor | Harga per satuan barang | Rp300.000,00 |
| | Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (over haul) | Selain angkutan darat bermotor beroda dua | Rp5.000.000,00 |
| | Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin *(over haul)* | Angkutan darat bermotor beroda dua | Rp1.000.000,00 |
| | Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor | Harga per satuan barang | Rp500.000,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | | |
| | Rehabilitasi total atau menambah ruang | | Rp10.000.000,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| | Jalan, Jembatan dan jaringan air | | Tidak Dibatasi |
| | Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon | | Rp300.000,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | | |
| | Buku dan kepustakaan | | Tidak dibatasi |
| | Bercorak kesenian /kebudayaan | | Rp300.000,00 |
| | Hewan/ternak/tanaman | Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan | Tidak dibatasi |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | | Tidak dibatasi |

11) Penyusutan

a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan Tahun perolehan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

(1) Nilai residu 0;

(2) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang.

c) Untuk aset yang diperoleh pada Tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun berkenaan.

d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 5 Masa manfaat aset tetap**

| Kodifikasi | | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | | Peralatan dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Alat Besar | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | Alat Angkutan | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | | Alat Bengkel dan Alat Ukur | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | | Alat Pertanian | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | | Alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | |

| Kodifikasi | | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | Peralatan Komunikasi Navigasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | | Alat Kedokteran dan Kesehatan | |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | Alat Kesehatan Umum | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | | Alat Laboratorium | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | Unit-Unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | | Alat Persenjataan | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | Senjata Sinar | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | Alat Khusus Kepolisian | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | | Komputer | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | Komputer Unit | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | | Alat Eksplorasi | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | Alat Eksplorasi Topografi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | Alat Eksplorasi Geofisika | 10 |

| Kodifikasi | | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 12 | | Alat Pengeboran | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | Alat Pengeboran Mesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | Alat Pengeboran Non Mesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | | Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | Sumur | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | Produksi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | Pengolahan Dan Pemurnian | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | | Alat Bantu Eksplorasi | |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | Alat Bantu Eksplorasi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | Alat Bantu Produksi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | | Alat Keselamatan Kerja | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | Alat Deteksi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | Alat Pelindung | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | Alat Sar | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | Alat Kerja Penerbangan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | | Alat Peraga | |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | | Peralatan Proses/Produksi | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | Unit Peralatan Proses/Produksi | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | | Rambu – Rambu | |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 3 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | | Peralatan Olah Raga | |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | Peralatan Olah Raga | 3 |
| 1 | 3 | 3 | | | Gedung dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | Bangunan dan Gedung | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |

| Kodifikasi | | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | | Monumen | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | | Bangunan Menara | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Bangunan Menara / Perambuan | 40 |
| | 3 | 3 | 4 | | Tugu Titik Kontrol/Pasti | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | Tugu / Tanda Batas | 50 |
| 1 | 3 | 4 | | | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | Jalan dan Jembatan | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | Bangunan Air | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | Bangunan Air Bersih/Air Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | | Instalasi | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Instalasi Air Bersih / Air Baku | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | Instalasi Pengaman | 20 |

| Kodifikasi | | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | Instalasi Lain | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | | Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | Jaringan Gas | 30 |
| 1 | 3 | 5 | | | Aset Tetap Lainnya | |
| 1 | 3 | 5 | 2 | | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | Barang Bercorak Kesenian | 4 |

e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.

f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.:

**Tabel 4. 6 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap**

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Alat Besar | | | |
| Alat Besar Darat | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | >65% s.d 100% | 6 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Alat Besar Apung | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| | | >65% s.d 100% | 5 |
| Alat Bantu | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| | | >65% s.d 100% | 5 |
| Alat Angkutan | | | |
| Alat Angkutan Darat Bermotor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 1 |
| Alat Angkutan Apung Bermotor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Alat Angkutan Bermotor Udara | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 6 |
| | | >50% s.d 75% | 9 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| | | >75% s.d 100% | 12 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | |
| Alat Bengkel Bermesin | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Alat Bengkel Tak ber Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 1 |
| Alat Ukur | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Pertanian | | | |
| Alat Pengolahan Pertanian | *Overhaul* | >0% s.d. 20% | 1 |
| | | >20% s.d 40% | 2 |
| | | >40% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | |
| Alat Kantor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Rumah Tangga | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | | | |
| Alat Studio | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Komunikasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Peralatan Pemancar | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d 100% | 5 |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d 100% | 9 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | |
| Alat Kedokteran | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Kesehatan Umum | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat laboratorium | | | |
| Unit Alat laboratorium | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d 100% | 5 |
| Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d 100% | 8 |
| Alat Peraga/Praktek Sekolah | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d 100% | 5 |
| Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d 100% | 8 |
| Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Alat laboratorium | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Lingkungan Hidup | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Peralatan Laboratorium Hidrodinamica | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d 100% | 8 |
| Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Alat Persenjataan | | | |
| Senjata Api | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Persenjataan Non Senjata Api | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 1 |
| Senjata Sinar | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 0 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Alat Khusus Kepolisian | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Komputer | | | |
| Komputer Unit | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Peralatan Komputer | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Alat Eksplorasi | | | |
| Alat Eksplorasi Topografi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Eksplorasi Geofisika | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Alat Pengeboran | | | |
| Alat Pengeboran Mesin | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d 100% | 7 |
| Alat Pengeboran Non Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian | | | |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Sumur | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Produksi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Pengolahan dan Pemurnian | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d 100% | 8 |
| Alat Bantu Explorasi | | | |
| Alat Bantu Explorasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d 100% | 7 |
| Alat Bantu Produksi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d 100% | 7 |
| Alat keselamatan Kerja | | | |
| Alat Deteksi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 3 |
| Alat Pelindung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Alat SAR | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Alat Kerja Penerbangan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Alat Peraga | | | |
| Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d 100% | 6 |
| Peralatan Proses / Produksi | | | |
| Unit Peralatan Proses / Produksi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d 100% | 5 |
| Rambu-rambu | | | |
| Rambu-rambu Lalu lintas Darat | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Udara | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| | | >75% s.d 100% | 4 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Laut | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d 100% | 9 |
| Peralatan Olah Raga | | | |
| Peralatan Olah Raga | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Bangunan Gedung | | | |
| Bangunan Gedung tempat Kerja | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d 100% | 50 |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 35 |
| Monumen | | | |
| Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 35 |
| Bangunan Menara | | | |
| Bangunan Menara Perambuan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| | | >65% s.d 100% | 25 |
| Tugu Titik Kontrol / Prasasti | | | |
| Tugu / Tanda batas | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 35 |
| Jalan dan Jembatan | | | |
| Jalan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 60% | 5 |
| | | >60% s.d 100% | 10 |
| Jembatan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Bangunan Air | | | |
| Bangunan Air Irigasi | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 25 |
| Bangunan Pengairan Pasang Surut | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 25 |
| Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Bangunan Pengaman | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | >65% s.d 100% | 5 |
| Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Bangunan Air Bersih/Air Baku | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 20 |
| Bangunan Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 20 |
| Instalasi | | | |
| Instalasi Air Bersih/Air Baku | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Instalasi Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Instalasi Pengolahan Sampah | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | >65% s.d 100% | 7 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | >65% s.d 100% | 7 |
| Instalasi Pembangkit Listrik | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 25 |
| Instalasi gardu Listrik | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 25 |
| Instalasi Pertahanan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | >65% s.d 100% | 10 |
| Instalasi gas | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 20 |
| Instalasi Pengaman | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | >65% s.d 100% | 5 |
| Instalasi Lain | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | >65% s.d 100% | 5 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Jaringan | | | |
| Jaringan air Minum | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Jaringan Listrik | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 25 |
| Jaringan Telepon | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 5 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Jaringan Gas | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | >65% s.d 100% | 15 |
| Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga | | | |
| Barang Bercorak Kesenian | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| Aset Tetap Dalam Renovasi | | | |
| Peralatan dan Mesin dalam renovasi | *Overhaul* | >0% s.d. 100% | 2 |
| Gedung dan Bangunan dalam renovasi | *Renovasi* | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | >65% s.d 100% | 35 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi/ Overhaul | >0% s.d. 100% | 5 |

12) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

13) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(a) Penambahan;

(b) Pelepasan;

(c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan

(d) Mutasi aset tetap lainnya.

(3) Informasi penyusutan, meliputi:

(a) Nilai penyusutan;

(b) Metode penyusutan yang digunakan;

(c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

(6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

(7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

(8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

(9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan

1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

(1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

(2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

(4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan

(5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d) Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

(1) Asuransi;

(2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

(3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

6. Dana Cadangan

1) Definisi Dana Cadangan

a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran.

b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran Dana Cadangan

a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

7. Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

(4) Aset Tidak Berwujud; dan

(5) Aset Lain-lain.

c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

(1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.

(2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.

(3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

(4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

(5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

(1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

(5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

(8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Aset Lainnya

a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

(1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

(2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

(1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

(2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

(4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

(1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai

bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

(3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

(c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

(1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

(3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

(1) Masa manfaat dan metode amortisasi;

(2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud; dan

(3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

(1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas *(finite life)* yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;

(2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life)* yaitu *Goodwill*.

8. Amortisasi

1) Definisi

a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

2) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir Tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

3) Pengukuran Amortisasi

a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

**Tabel 4. 7 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|
| ASET TIDAK BERWUJUD | |
| Goodwill | Tidak Terbatas |
| Hak Paten atau Hak Cipta | 20 |
| Royalti | 20 |
| Software | 5 |
| Lisensi | 10 |
| Hasil Kajian | 5 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 5 |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | 5 |

4) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.

5) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”.

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:

a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan

b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c) Definisi Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan Iuran BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest)*

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan:

a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.

b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

g. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air pdam, telepon oleh masing- masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

11. Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri

1) Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;

c) Utang Dalam Negeri-obligasi;

d) Utang Pemerintah Pusat;

e) Utang Pemerintah Provinsi; dan

f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

2) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

d. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

e. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

13. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.

2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Pendapatan LRA

1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA Tahun-Tahun anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4) Pendapatan LRA terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah – LRA;

b) Pendapatan Transfer – LRA; dan

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA.

1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;

b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

14. Pendapatan Asli Daerah–LRA (PAD – LRA)

a. Definisi PAD – LRA.

1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b. Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

d. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

15. Pendapatan Transfer–LRA

    a. Definisi Pendapatan Transfer –LRA

    Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

    b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

    1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

    2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

    c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

    Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

    d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

    Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

    a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

    Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.

    Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

    1) Pendapatan Hibah – LRA;

    2) Dana Darurat – LRA; dan

    3) Pendapatan Lainnya – LRA.

    b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

    1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.

    2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

    c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

    d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

    Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

17. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

c. Definisi Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

    a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan

    b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.

d. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

e. Pengukuran Belanja

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

f. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a) Belanja Operasi;

b) Belanja Modal;

c) Belanja Tidak Terduga; dan

d) Belanja Transfer.

2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

18. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pembiayaan

1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Pembiayaan terdiri dari :

a) Penerimaan pembiayaan; dan

b) Pengeluaran pembiayaan.

19. Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi

perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

20. Pengeluaraan Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu Tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

21. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA Tahun-Tahun anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir Tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

4) SAL terdiri dari:

a) Surplus/Defisit – LRA;

b) Pembiayaan Netto;

c) SiLPA/SiKPA (Tahun berkenaan); dan

d) Perubahan SAL.

5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

b. Pengakuan SAL

1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

22. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir Tahun. Apabila

sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir Tahun.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

   a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama Tahun berjalan

      Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

   b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

      Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

      (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

         Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

      (2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

         Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5) Pengukuran Pendapatan-LO

   a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

(1) Penerimaan Pendapatan-LO Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;

(2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

23. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

d. Pengakuan Beban

1) Beban diakui pada:

(a) Saat timbulnya kewajiban;

(b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

(a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

(b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

(c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat

barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

    (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

    (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir Tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

    (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

    (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

    (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan peLaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

    (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Penyajian dan Pengungkapan Beban

1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;

(b) Beban Non Operasional; dan

(c) Beban Tidak Terduga.

2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

(a) Pengeluaran beban Tahun berkenaan;

(b) Pengakuan beban Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/Tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

24. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Defenisi

1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

   a) Kesalahan yang tidak berulang; dan

   b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

   a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

   b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan

koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

    Contoh koreksi kesalahan belanja:

    a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas

        Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

    b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

    c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai Tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

    d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal Tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap Tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai Tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai Tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

(1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

(2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.

15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

1. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

16) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman Tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman Tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang Tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.

17) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan Tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

18) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

19) K o r e k s i kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK Tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

20) K o r e k s i kesalahan diungkapkan pada CaLK.

25. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar

akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

27. Perubahan Estimasi Akuntansi

a. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO Tahun perubahan dan Tahun-Tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

28. Operasi yang tidak dilanjutkan:

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban Tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk Tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu Tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir Tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

2) Fungsi tersebut tetap ada.

3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.

4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

29. Peristiwa Luar Biasa

a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah stermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada Tahun-Tahun lalu. Apabila selama Tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia.

e. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

f. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

g. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

h. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

**4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada**

Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah;
b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah;
c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah;
d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan.

Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu Tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.

# BAB V

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2024. Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi atas jumlah pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit) dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

### 5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.437.280.040.724,40 | Rp1.400.956.430.711,00 |

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.437.280.040.724,40 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp1.493.599.771.268,00 yang terdiri dari:

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp133.655.052.931,40 | Rp134.848.617.519,00 |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.655.052.931,40 atau 94,42% dari target sebesar Rp141.556.738.834,00 atau kurang realisasi sebesar Rp7.901.685.902,60 dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp27.663.738.746,01 | Rp27.612.663.867,00 |

Realisasi pajak daerah sebesar Rp27.663.738.746,01 atau 92,06% dari target sebesar Rp30.050.000.000,00 atau kurang realisasi sebesar Rp2.386.261.253,99 dengan rincian dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 Daftar Rincian Pajak Daerah TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.01** | **Pajak Daerah** | **30.050.000.000,00** | **27.663.738.746,01** | **92,06** | **27.612.663.867,00** |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.917.020,00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259.332.203,00 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.180.000,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 1.000.000.000,00 | 788.145.744,00 | 78,81 | 886.248.536,00 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462.511.569,00 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.444.750,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 200.000.000,00 | 159.604.485,00 | 79,80 | 197.532.800,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 3.500.000.000,00 | 3.245.750.707,81 | 92,74 | 3.834.602.534,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 5.500.000.000,00 | 4.275.385.912,00 | 77,73 | 4.228.251.755,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 5.500.000.000,00 | 5.788.319.950,00 | 105,24 | 4.923.642.700,00 |
| 4.1.01.19 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 14.350.000.000,00 | 13.406.531.947,20 | 93,43 | 0,00 |

### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp93.784.976.878,78 | Rp5.536.938.005,00 |

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp93.784.976.878,78 atau 108,65% dari target sebesar Rp86.317.290.000,00 atau lebih realisasi sebesar Rp7.467.686.878,78 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.2 Daftar Rincian Retribusi Daerah TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.02** | **Retribusi Daerah** | **86.317.290.000,00** | **93.784.976.878,78** | **108,65** | **5.536.938.005,00** |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 79.275.000.000,00 | 89.762.296.464,00 | 113,23 | 2.248.943.300,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.882.290.000,00 | 1.417.771.591,78 | 36,52 | 1.452.448.549,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 3.160.000.000,00 | 2.604.908.823,00 | 82,43 | 1.835.546.156,00 |

Berdasarkan Tabel di atas berikut ini dapat dijelaskan realisasi rincian retribusi daerah sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum realisasi sebesar Rp89.762.296.464,00 dari target Rp79.275.000.000,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 3 Rincian Retribusi Jasa Umum**

| No | Uraian | Realisasi | SKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 129.744.500,00 | Dinas Kesehatan |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 88.274.307.064,00 | RSUD Tarutung |
| 3 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 36.100.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 4 | Retribusi Pelataran | 234.723.000,00 | Dinas Koperindag |

| No | Uraian | Realisasi | SKPD |
|---|---|---|---|
| 5 | Retribusi Los | 465.175.000,00 | Dinas Koperindag |
| 6 | Retribusi Kios | 233.036.000,00 | Dinas Koperindag |
| 7 | Retribusi Pelayanan Persampahan | 273.940.900,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 101.770.000,00 | Dinas Koperindag |
| 8 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 13.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Total** | **89.762.296.464,00** | |

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tarutung lebih rinci disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 4 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tarutung**

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| A | Pendapatan BLUD | 88.274.307.064,00 |
| 1. | Pendapatan BLUD atas layanan kesehatan kepada pasien umum | 7.930.423.196,00 |
| 2. | Klaim kepada BPJS Kesehatan | 80.184.383.348,00 |
| 3. | Pendapatan BLUD Lainnya | 159.500.520,00 |

2. Retribusi Jasa Usaha realisasi sebesar Rp1.417.771.591,78 dari target Rp3.882.290.000,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 5 Rincian Retribusi Jasa Usaha**

| No | Uraian | Realisasi | SKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 12.639.003,00 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 29.303.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 6.240.000,00 | Dinas Pariwisata |
| 3 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 60.130.000,00 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan |
| | | 38.774.000,00 | Dinas Pariwisata |
| | | 3.500.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 4 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 12.750.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 5 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 298.016.963,00 | Dinas Pariwisata |
| 6 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 27.588.093,00 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan |
| | | 424.550.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| | | 53.300.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga |
| | | 1.716.858,00 | Dinas Perhubungan |
| | | 69.823.000,00 | Dinas Pertanian |
| | | 148.246.052,75 | Kantor Kecamatan Siborongborong |
| | | 51.724.622,03 | Kantor Kecamatan Tarutung |
| | | 179.470.000,00 | Sekretariat Daerah |
| | **Total** | **1.417.771.591,78** | |

3. Retribusi Perizinan Tertentu realisasi sebesar Rp2.604.908.823,00 dari target Rp3.160.000.000,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 6 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu**

| No | Uraian | Realisasi | SKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 94.204.260,00 | Dinas Ketenagakerjaan |
| 2 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.510.704.563,00 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | **Total** | **2.604.908.823,00** | |

Daftar rincian masing-masing retribusi tersebut dapat dilihat pada **lampiran 1**.

#### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp8.451.510.307,00 | Rp8.139.637.407,00 |

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.451.510.307,00 atau 63,97% dari target sebesar Rp13.211.867.299,00 dengan rincian dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 7 Daftar Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.03** | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | **13.211.867.299,00** | **8.451.510.307,00** | **63,97** | **8.139.637.407,00** |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 13.211.867.299,00 | 8.451.510.307,00 | 63,97 | 8.139.637.407,00 |

#### 5.1.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp3.754.826.999,61 | Rp93.559.378.240,00 |

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp3.754.826.999,61 atau 31,35% dari target sebesar Rp11.977.581.535,00 atau kurang realisasi sebesar Rp8.222.754.535,39 dengan rincian dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5. 8 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.04** | **Lain-lain PAD yang Sah** | **11.977.581.535,00** | **3.754.826.999,61** | **31,35** | **93.559.378.240,00** |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.061.545.120,00 | 383.743.100,00 | 36,15 | 1.191.938.600,00 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.100.000.000,00 | 512.389.735,00 | 46,58 | 151.467.221,00 |
| 4.1.04.04 | Hasil Kerja Sama Daerah | 220.000.000,00 | 103.877.640,00 | 47,22 | 96.928.793,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 600.000.000,00 | 377.327.454,00 | 62,89 | 378.786.395,00 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 1.143.415.747,00 | 188.803.053,00 | 16,51 | 1.143.415.747,00 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 3.596.859.430,00 | 842.476.529,61 | 23,42 | 1.596.836.727,30 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 4.255.761.238,00 | 1.346.209.488,00 | 31,63 | 2.755.726.140,70 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.244.278.616,00 |

Rincian pendapatan dari pengembalian dapat dilihat pada **lampiran 2.**

### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.281.410.872.862,00 | Rp1.242.025.117.323,00 |

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar acuan penganggaran penerimaan transfer pada APBD 2024. Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.281.410.872.862,00 atau 96,74% dari target sebesar Rp1.324.579.290.597,00 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 9 Realisasi Pendapatan Transfer**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.324.579.290.597,00** | **1.281.410.872.862,00** | **96,74** | **1.242.025.117.323,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.028.851.584.000,00 | 1.029.717.245.029,00 | 100,08% | 977.754.608.950,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA | 206.691.105.000,00 | 205.997.222.200,00 | 99,66% | 209.558.149.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 89.036.601.597,00 | 45.696.405.633,00 | 51,32 | 54.712.359.373,00 |

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.029.717.245.029,00 | Rp977.754.608.950,00 |

Realisasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1.029.717.245.029,00 atau 100,08% dari target sebesar Rp977.754.608.950,00 dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 10 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.01** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA** | **1.028.851.584.000,00** | **1.029.717.245.029,00** | **100,08%** | **977.754.608.950,00** |
| 4.2.01.01 | Dana Bagi Hasil | 64.448.095.000,00 | 64.628.799.000,00 | 100,28% | 61.985.236.033,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Alokasi Umum | 677.223.717.000,00 | 681.275.700.613,00 | 100,60% | 627.696.920.000,00 |
| 4.2.01.03 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 96.683.043.000,00 | 92.466.086.003,00 | 95,64% | 103.496.236.437,00 |
| 4.2.01.04 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 190.496.729.000,00 | 191.346.659.413,00 | 100,45% | 184.576.216.480,00 |

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari:

a) Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp1.029.717.245.029,00 yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp64.628.799.000,00 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp64.448.095.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 11 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 36.960.795.000,00 | 36.960.795.000,00 | 100,00 |
| 2 | DBH PPh Pasal 21 | 8.286.008.000,00 | 7.912.909.000,00 | 95,50 |
| 3 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPSKPDN | 0,00 | 373.099.000,00 | 0,00 |
| 4 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1.809.438.000,00 | 1.990.142.000,00 | 109,99 |
| 5 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 251.303.000,00 | 244.802.000,00 | 97,41 |
| 6 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 0,00 | 5.200.800,00 | 0,00 |
| 7 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 112.622.000,00 | 113.922.200,00 | 101,15 |
| 8 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 8.694.415.000,00 | 1.595.527.000,00 | 18,35 |
| 9 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 0,00 | 7.098.888.000,00 | 0,00 |
| 10 | DBH Sumber Daya Alam | 228.713.000,00 | 228.713.000,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| | (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | | | |
| 11 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.167.186.000,00 | 1.167.186.000,00 | 100,00 |
| 12 | DBH Sawit | 6.937.615.000,00 | 6.937.615.000,00 | 100,00 |
| | **Total** | **64.448.095.000,00** | **64.628.799.000,00** | **100,28** |

2. Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi sebesar Rp681.275.700.613,00 atau 100,60% dari anggaran sebesar Rp677.223.717.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 12 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAU | 525.531.008.000,00 | 538.826.478.000,00 | 102,53 |
| 2 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 2.200.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 37.146.357.000,00 | 27.902.870.613,00 | 75,12 |
| 4 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 64.436.601.000,00 | 64.436.601.000,00 | 100,00 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 31.021.365.000,00 | 31.021.365.000,00 | 100,00 |
| 6 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 16.888.386.000,00 | 16.888.386.000,00 | 100,00 |
| | **Total** | **677.223.717.000,00** | **681.275.700.613,00** | **100,60** |

Pada tahun 2024, terdapat pemotongan DAU secara otomatis sebesar Rp53.201.036.052,00 untuk pembayaran Pokok Pinjaman PEN Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 39/KM.7/2023 Tahun 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari s/d Bulan Desember Tahun 2024.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik realisasi sebesar Rp92.466.086.003,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp96.683.043.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 13 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 5.660.603.000,00 | 5.659.153.000,00 | 99,97 |
| 2 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 6.333.529.000,00 | 6.333.273.000,00 | 100,00 |
| 3 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 871.280.000,00 | 4.340.947.000,00 | 498,23 |
| 4 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 11.388.826.000,00 | 11.381.127.800,00 | 99,93 |
| 5 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 7.930.356.000,00 | 10.962.553.472,00 | 138,24 |
| 6 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 25.127.017.000,00 | 20.810.625.201,00 | 82,82 |
| 7 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | 14.930.517.000,00 | 14.784.764.802,00 | 99,02 |
| 8 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 7.912.400.000,00 | 7.912.400.000,00 | 100,00 |
| 9 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 9.231.175.000,00 | 7.013.439.253,00 | 75,98 |
| 10 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 2.495.435.000,00 | 2.470.502.475,00 | 99,00 |
| 11 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 4.801.905.000,00 | 797.300.000,00 | 16,60 |
| **Total** | | **96.683.043.000,00** | **92.466.086.003,00** | **95,64** |

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp191.346.659.413,00 atau 100,45% dari anggaran sebesar Rp190.496.729.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 14 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 62.030.290.000,00 | 62.028.805.449,00 | 100,00 |
| 2 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 2.445.000.000,00 | 2.445.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 76.497.749.000,00 | 73.626.365.000,00 | 96,25 |
| 4 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 0,00 | 4.323.930.000,00 | 0,00 |
| 5 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 851.648.000,00 | 849.553.000,00 | 99,75 |
| 6 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 4.890.330.000,00 | 4.770.039.475,00 | 97,54 |
| 7 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 693.680.000,00 | 661.880.000,00 | 95,42 |
| 8 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 33.060.730.000,00 | 12.541.988.000,00 | 37,94 |
| 9 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 477.620.000,00 | 477.620.000,00 | 100,00 |
| 10 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan | 1.763.418.000,00 | 1.763.418.000,00 | 100,00 |
| 11 | DAK Non Fisik-Fasilitasi | 569.981.000,00 | 509.993.496,00 | 89,48 |

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| | Penanaman Modal | | | |
| 12 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 6.249.954.000,00 | 6.249.954.000,00 | 100,00 |
| 13 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 100,00 |
| 14 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 316.329.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 0,00 | 20.448.112.993,00 | 0,00 |
| **Total** | | **190.496.729.000,00** | **191.346.659.413,00** | **100,45** |

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp205.997.222.200,00 | Rp 209.558.149.000,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat lainnya-LRA realisasi sebesar Rp205.997.222.200,00 atau 99,66% dari target sebesar Rp206.691.105.000,00. Transfer Pemerintah Pusat lainnya terdiri dari:

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp199.129.952.200,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp199.823.835.000,00 yang dialokasikan kepada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

b) Insentif fiskal realisasi sebesar Rp6.867.270.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp6.867.270.000,00

#### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp45.696.405.633,00 | Rp54.712.359.373,00 |

Pendapatan Transfer Antar Daerah realisasi sebesar Rp45.696.405.633,00 atau 51,32% dari target sebesar Rp89.036.601.597,00. Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sesuai tabel berikut.

**Tabel 5. 15 Realisasi Transfer Antar Daerah**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **89.036.601.597,00** | **45.696.405.633,00** | **51,32** | **54.712.359.373,00** |
| **4.2.02.01.01** | **Pendapatan Bagi Hasil Pajak** | **87.036.601.597,00** | **45.696.405.633,00** | **52,50** | **53.068.727.947,00** |
| 4.2.02.01.01.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 17.503.229.126,00 | 6.172.615.706,00 | 35,27 | 12.786.530.071,00 |
| 4.2.02.01.01.2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11.410.827.710,00 | 5.027.236.960,00 | 44,06 | 7.405.035.637,00 |
| 4.2.02.01.01.3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 28.856.179.264,00 | 11.896.457.190,00 | 41,23 | 14.193.988.722,00 |
| 4.2.02.01.01.4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 1.780.657.346,00 | 890.328.673,00 | 50,00 | 1.000.746.562,00 |
| 4.2.02.01.01.5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.485.708.151,00 | 21.709.767.104,00 | 78,99 | 17.682.426.955,00 |
| **4.2.02.01.02** | **Pendapatan Bantuan Keuangan** | **2.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.643.631.426,00** |
| 4.2.02.02.01.1 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp22.214.114.931,00 | Rp24.082.695.869,00 |

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp22.214.114.931,00 atau sebesar 80,89% dari target sebesar Rp27.463.741.837,00 atau kurang realisasi sebesar Rp5.249.626.906,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 16 Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **27.463.741.837,00** | **22.214.114.931,00** | **80,89** | **24.082.695.869,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.463.233.459,00 | 8.818.078.129,00 | 65,50 | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.000.508.378,00 | 13.396.036.802,00 | 95,68 | 12.601.371.874,00 |

Pendapatan Hibah dari Pemerintah realisasi sebesar Rp8.818.078.129,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2024, sedangkan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp13.396.036.802,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

### 5.1.2. Belanja - LRA

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.375.858.189.855,41 | Rp1.373.350.393.253,00 |

Realisasi belanja yaitu sebesar Rp1.375.858.189.855,41 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp1.442.561.794.484,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp66.703.604.628,59. Realisasi belanja Tahun 2024 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 17 Realisasi Belanja Tahun 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.442.561.794.484,00** | **1.375.858.189.855,41** | **95,38** | **1.373.350.393.253,00** |
| 5.1 | Belanja Operasi | 1.062.938.481.200,00 | 1.014.674.115.403,47 | 95,46 | 927.720.435.846,00 |
| 5.2 | Belanja Modal | 102.975.845.013,00 | 99.079.324.655,94 | 96,22 | 168.342.205.859,00 |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 3.531.157.371,00 | 3.454.947.220,00 | 97,84 | 11.814.457.310,00 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 273.116.310.900,00 | 258.649.802.576,00 | 94,70 | 265.473.294.238,00 |

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.014.674.115.403,47 | Rp927.720.435.846,00 |

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.014.674.115.403,47 atau 95,46% dari anggaran sebesar Rp1.062.938.481.200,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp48.264.365.796,53 dengan rincian dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 18 Realisasi Belanja Operasi**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **1.062.938.481.200,00** | **1.014.674.115.403,47** | **95,46** | **927.720.435.846,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 669.005.440.000,00 | 621.410.779.418,00 | 92,89 | 550.561.006.379,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 317.934.829.606,00 | 318.291.641.973,47 | 100,11 | 351.521.956.695,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.096.653.900,00 | 2.207.835.420,00 | 71,30 | 3.096.653.900,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 72.093.912.994,00 | 71.990.363.892,00 | 99,86 | 19.735.718.872,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 807.644.700,00 | 773.494.700,00 | 95,77 | 2.805.100.000,00 |

##### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp621.410.779.418,00 | Rp550.561.006.379,00 |

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp621.410.779.418,00 atau 92,89% dari anggaran sebesar Rp669.005.440.000,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp47.594.660.582,00. Realisasi belanja pegawai juga termasuk belanja pegawai

yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp11.579.689.400,00 dan Dana BLUD sebesar Rp4.760.447.345,00. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 19 Rincian Belanja Pegawai per Objek**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **669.005.440.000,00** | **621.410.779.418,00** | **92,89** | **550.561.006.379,00** |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 478.237.133.859,00 | 457.180.855.720,00 | 95,60 | 373.039.157.193,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 67.204.147.830,00 | 57.818.593.212,00 | 86,03 | 64.611.679.190,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 93.279.053.000,00 | 76.034.826.413,00 | 81,51 | 76.305.707.892,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 13.560.521.912,00 | 13.442.643.929,00 | 99,13 | 13.286.095.446,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 61.323.399,00 | 61.323.399,00 | 100,00 | 329.771.953,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 550.880.000,00 | 532.400.000,00 | 96,65 | 710.880.000,00 |
| 5.1.01.88 | Belanja Pegawai BOS | 10.258.380.000,00 | 11.579.689.400,00 | 112,88 | 14.169.698.050,00 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 5.854.000.000,00 | 4.760.447.345,00 | 81,32 | 8.108.016.655,00 |

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp318.291.641.973,47 | Rp351.521.956.695,00 |

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp318.291.641.973,47 atau 100,11% dari anggaran sebesar Rp317.934.829.606,00 lebih realisasi sebesar Rp356.812.367,47. Pada realisasi belanja barang dan jasa terdapat belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp30.855.196.458,00, Belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp16.736.117.496,00 dan Dana BLUD sebesar Rp81.252.485.989,00. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 20 Rincian Belanja Barang dan Jasa per Objek**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **317.934.829.606,00** | **318.291.641.973,47** | **100,11** | **351.521.956.695,00** |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 72.605.501.111,00 | 70.372.129.584,47 | 96,92 | 89.697.739.821,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 62.577.497.644,00 | 59.683.262.876,00 | 95,37 | 79.673.618.823,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 2.590.647.200,00 | 2.531.560.577,00 | 97,72 | 4.072.838.763,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 36.823.991.712,00 | 35.435.071.275,00 | 96,23 | 42.870.151.990,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 22.742.623.979,00 | 21.425.817.718,00 | 94,21 | 29.615.095.701,00 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 34.187.050.960,00 | 30.855.196.458,00 | 90,25 | 32.110.810.520,00 |
| 5.1.02.90 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 17.311.517.000,00 | 16.736.117.496,00 | 96,68 | 0,00 |

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 69.096.000.000,00 | 81.252.485.989,00 | 117,59 | 73.481.701.077,00 |

Penjelasan realisasi belanja barang dan jasa sebagaimana di atas sebagai berikut:

1) Belanja barang realisasi sebesar Rp70.372.129.584,47 merupakan belanja barang pakai habis sebesar Rp70.040.379.584,47 dan barang tidak habis pakai sebesar Rp300.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 21 Rincian Belanja Barang Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 439.100.800,00 | 396.708.100,00 | 90,35 |
| 2. | Belanja Bahan-Bahan Kimia. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.664.586.599,00 | 4.571.620.578,00 | 98,01 |
| 4. | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 363.639.000,00 | 353.858.500,00 | 97,31 |
| 5. | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 8.053.000,00 | 8.033.000,00 | 99,75 |
| 6. | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 641.737.000,00 | 638.236.000,00 | 99,45 |
| 7. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 2.228.517.462,00 | 1.880.589.170,00 | 84,39 |
| 8. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 549.052.350,00 | 526.362.380,00 | 95,87 |
| 9. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 40.500.000,00 | 40.305.600,00 | 99,52 |
| 10. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 259.024.900,00 | 247.650.900,00 | 95,61 |
| 11. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.701.252.629,00 | 2.312.270.284,90 | 85,60 |
| 12. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 3.740.250.441,00 | 3.565.635.485,00 | 95,33 |
| 13. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 108.550.000,00 | 105.739.000,00 | 97,41 |
| 14. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 15. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 154.082.900,00 | 153.127.500,00 | 99,38 |
| 16. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 604.184.635,00 | 599.022.834,00 | 99,15 |
| 17. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 254.867.500,00 | 248.644.000,00 | 97,56 |
| 18. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | 262.477.200,00 | 259.658.100,00 | 98,93 |
| 19. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.151.904.360,00 | 1.128.534.400,00 | 97,97 |
| 20. | Belanja Obat-Obatan-Obat | 6.869.097.234,00 | 6.855.191.936,00 | 99,80 |
| 21. | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1.940.600,00 | 1.940.600,00 | 100,00 |
| 22. | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 34.386.984.746,00 | 34.180.041.916,57 | 99,40 |
| 23. | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 24. | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 12.229.012.035,00 | 11.356.587.700,00 | 92,87 |
| 25. | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 95.965.000,00 | 95.963.000,00 | 100,00 |
| 26. | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 39.382.000,00 | 39.382.000,00 | 100,00 |
| 28. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 137.350.000,00 | 135.850.000,00 | 98,91 |

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 30. | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 31. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 43.718.400,00 | 43.091.000,00 | 98,56 |
| 32. | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 63.875.000,00 | 63.700.000,00 | 99,73 |
| 33. | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 13.670.800,00 | 13.220.000,00 | 96,70 |
| 34. | Belanja Pakaian Teknik | 3.322.600,00 | 3.322.600,00 | 100,00 |
| 35. | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | 81.550.000,00 | 81.153.000,00 | 99,51 |
| 36. | Belanja Pakaian KORPRI | 5.730.800,00 | 5.140.000,00 | 89,69 |
| 37. | Belanja Pakaian Adat Daerah | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 100,00 |
| 38. | Belanja Pakaian Olahraga | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 100,00 |
| 39. | Belanja Pakaian Jas/Safari | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 100,00 |
| 40. | Belanja Pipa-Pipa Lainnya | 302.000,00 | 300.000,00 | 99,34 |
| 41. | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 100,00 |
| 42. | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten | 304.019.120,00 | 303.450.000,00 | 99,81 |
| **Total** | | **72.605.501.111,00** | **70.372.129.584,47** | **96,92** |

2) Belanja jasa realisasi sebesar Rp59.683.262.876,00 dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 22 Rincian Belanja Jasa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Jasa Kantor | 41.436.862.098,00 | 39.342.939.276,00 | 94,95 |
| 2. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 16.644.709.570,00 | 16.369.320.753,00 | 98,35 |
| 3. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1.290.671.976,00 | 1.110.952.447,00 | 86,08 |
| 4. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 826.639.000,00 | 754.329.900,00 | 91,25 |
| 5. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 1.484.750.000,00 | 1.449.407.000,00 | 97,62 |
| 6. | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 60.000.000,00 | 59.884.500,00 | 99,81 |
| 7. | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100,00 |
| 8. | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 763.865.000,00 | 526.429.000,00 | 68,92 |
| **Total** | | **62.577.497.644,00** | **59.683.262.876,00** | **95,37** |

3) Belanja pemeliharaan realisasi sebesar Rp2.531.560.577,00 yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan mesin dan gedung bangunan dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 23 Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.540.522.200,00 | 2.494.746.827,00 | 98,20 |
| 2. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 50.125.000,00 | 36.813.750,00 | 73,44 |
| **Total** | | **2.590.647.200,00** | **2.531.560.577,00** | **97,72** |

4) Belanja perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp35.435.071.275,00 yang dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 24 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30.448.310.316,00 | 29.565.591.175,00 | 97,10 |
| 2. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.375.681.396,00 | 5.869.480.100,00 | 92,06 |
| **Total** | | **36.823.991.712,00** | **35.435.071.275,00** | **96,23** |

5) Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp21.425.817.718,00 merupakan belanja yang diberikan kepada pihak lain dengan perincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 25 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 100,00 |
| 2. | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 1.922.253.600,00 | 1.916.966.465,00 | 99,72 |
| 3. | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 19.828.170.379,00 | 18.523.551.253,00 | 93,42 |
| 4. | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 967.700.000,00 | 960.800.000,00 | 99,29 |
| **Total** | | **22.742.623.979,00** | **21.425.817.718,00** | **94,21** |

6) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp34.187.050.960,00 dari target sebesar Rp30.855.196.458,00 atau 90,25% yang merupakan belanja barang dan jasa pada unit sekolah SD Negeri dan SMP Negeri.

7) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp16.736.117.496,00 dari target sebesar Rp17.311.517.000,00 atau 96,68% yang merupakan belanja barang dan jasa pada pada Puskesmas yang bersumber dari Dana BOK Puskesmas DAK Non Fisik.

8) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp81.252.485.989,00 dari target sebesar Rp69.096.000.000,00 atau 117,59% yang merupakan belanja barang dan jasa pada RSU Daerah Tarutung yang bersumber dari Dana BLUD Rumah Sakit.

#### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.207.835.420,00 | Rp3.096.653.900,00 |

Realisasi belanja bunga Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.207.835.420,00 yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero). Pembayaran Bunga Pinjaman PEN didasarkan dengan tagihan dari PT. SMI (Persero) dengan sistem bunga menurun berdasarkan pokok pinjaman. Rincian Pembayaran belanja bunga Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 26 Rincian Pembayaran Belanja Bunga Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TAGIHAN PT. SMI | PEMBAYARAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Januari 2024 | 221.846.776,00 | 221.846.776,00 |
| 2 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Pebruari 2024 | 215.508.295,00 | 215.508.295,00 |
| 3 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Maret 2024 | 195.674.989,00 | 195.674.989,00 |
| 4 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan April 2024 | 202.831.335,00 | 202.831.335,00 |
| 5 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Mei 2024 | 190.154.377,00 | 190.154.377,00 |

| NO | URAIAN | TAGIHAN PT. SMI | PEMBAYARAN |
|---|---|---|---|
| 6 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Juni 2024 | 190.154.375,00 | 190.154.375,00 |
| 7 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN PERIODE BULAN JULI 2024 | 177.886.351,00 | 177.886.351,00 |
| 8 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Agustus 2024 | 177.477.415,00 | 177.477.415,00 |
| 9 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan September 2024 | 171.138.935,00 | 171.138.935,00 |
| 10 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Oktober 2024 | 159.484.312,00 | 159.484.312,00 |
| 11 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Nopember 2024 | 158.461.975,00 | 158.461.975,00 |
| 12 | Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Periode Bulan Desember 2024 | 147.216.285,00 | 147.216.285,00 |
| **Total** | | **2.207.835.420,00** | **2.207.835.420,00** |

#### 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Realisasi belanja subsidi Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Hibah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp71.990.363.892,00 | Rp19.735.718.872,00 |

Realisasi belanja hibah sebesar Rp71.990.363.892,00 atau atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp72.093.912.994,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp103.549.102,00. Realisasi belanja hibah dikelola langsung oleh SKPD pengelola belanja hibah dengan uraian belanja hibah sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 27 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 54.476.486.500,00 | 54.476.486.500,00 | 100,00 |
| 2. | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 6.405.000.000,00 | 6.335.000.000,00 | 98,91 |
| 3. | Belanja Hibah Dana BOS | 4.703.620.000,00 | 4.853.620.000,00 | 103,19 |
| 4. | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 893.171.569,00 | 893.171.567,00 | 100,00 |
| 5. | Belanja Hibah Dana BOSP | 5.615.634.925,00 | 5.432.085.825,00 | 96,73 |
| **Total** | | **72.093.912.994,00** | **71.990.363.892,00** | **99,86** |

Rincian realisasi penggunaan Belanja Hibah dapat dilihat pada **lampiran 4**.

#### 5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp773.494.700,00 | Rp2.805.100.000,00 |

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp773.494.700,00 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp807.644.700,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp34.150.000,00. Rincian realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 28 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 114.700.000,00 | 100.300.000,00 | 87,45 |
| 2. | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga. | 132.944.700,00 | 128.194.700,00 | 96,43 |
| 3. | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 560.000.000,00 | 545.000.000,00 | 97,32 |
| **Total** | | **807.644.700,00** | **773.494.700,00** | **95,77** |

Rincian realisasi penggunaan Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada **lampiran 5**.

### 5.1.2.2 Belanja Modal

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp99.079.324.655,94 | Rp168.342.205.859,00 |

Realisasi belanja modal sebesar Rp99.079.324.655,94 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp102.975.845.013,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp3.896.520.357,06 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 29 Realisasi Belanja Modal TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **102.975.845.013,00** | **99.079.324.655,94** | **96,22** | **168.342.205.859,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 164.000.060,00 | 164.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.198.460.613,00 | 26.958.423.144,00 | 111,41 | 44.530.761.080,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.765.583.800,00 | 14.949.241.861,74 | 94,82 | 31.062.611.625,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62.693.955.540,00 | 56.854.991.209,34 | 90,69 | 92.684.156.254,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 64.676.900,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 41.210.000,00 | 41.199.010,86 | 99,97 | 0,00 |

Rincian realisasi belanja modal per Perangkat Daerah dapat dilihat dalam **lampiran 6**.

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp164.000.000,00 | 0,00 |

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp164.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp164.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk pelepasan tanah Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat. Pelepasan tanah berupa aset tanah untuk jalan di Jalan Dr. Ir. Soekarno (Jalan Lingkar Siborongborong).

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp26.958.423.144,00 | Rp44.530.761.080,00 |

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.958.423.144,00 atau 111,41% dari anggaran sebesar Rp24.198.460.613,00 lebih realisasi sebesar Rp2.759.962.531,00, rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada berikut ini.

**Tabel 5. 30 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **24.198.460.613,00** | **26.958.423.144,00** | **111,41** | **44.530.761.080,00** |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.661.800,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 1.510.118.699,00 | 1.313.225.000,00 | 86,96 | 1.631.701.850,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 1.451.435.000,00 | 1.445.000.000,00 | 99,56 | 484.744.500,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468.800,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.448.927.374,00 | 1.396.312.110,00 | 96,37 | 2.485.755.129,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 105.422.200,00 | 104.160.000,00 | 98,80 | 0,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 2.396.412.000,00 | 1.610.729.000,00 | 67,21 | 17.898.882.981,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 172.275.000,00 | 172.019.000,00 | 99,85 | 49.956.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 197.588.100,00 | 195.300.002,00 | 98,84 | 3.666.871.740,00 |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 100.043.200,00 | 86.813.318,00 | 86,78 | 33.876.000,00 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 15.316.239.040,00 | 18.028.799.225,00 | 117,71 | 14.542.577.739,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.500.000.000,00 | 2.606.065.489,00 | 173,74 | 3.690.264.541,00 |

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp14.949.241.861,74 | Rp31.062.611.625,00 |

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp14.949.241.861,74 atau 94,82% dari anggaran sebesar Rp15.765.583.800,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp816.341.938,26. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 31 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | **15.765.583.800,00** | **14.949.241.861,74** | **94,82** | **31.062.611.625,00** |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 14.765.583.800,00 | 14.646.040.861,74 | 99,19 | 29.696.569.625,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980.000,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 | 303.201.000,00 | 30,32 | 1.318.062.000,00 |

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp56.854.991.209,34 | Rp92.684.156.254,00 |

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp56.854.991.209,34 atau 90,69% dari anggaran sebesar Rp62.693.955.540,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp5.838.964.330,66. Rincian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sesuai tabel berikut.

**Tabel 5. 32 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **62.693.955.540,00** | **56.854.991.209,34** | **90,69** | **92.684.156.254,00** |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 48.198.239.439,00 | 44.171.658.797,88 | 91,65 | 70.295.648.331,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 1.000.000.000,00 | 997.949.554,00 | 99,79 | 11.271.367.374,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 10.756.223.800,00 | 9.214.452.857,46 | 85,67 | 10.468.320.692,00 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 93.106.000,00 | 92.930.000,00 | 99,81 | 340.906.357,00 |
| 5.2.04.03.05 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 2.646.386.301,00 | 2.378.000.000,00 | 89,86 | 0,00 |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.913.500,00 |

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp111.469.430,00 | Rp64.676.900,00 |

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp111.469.430,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp112.635.000,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp1.165.570,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 33 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.05** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **112.635.000,00** | **111.469.430,00** | **98,97** | **64.676.900,00** |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 112.635.000,00 | 111.469.430,00 | 98,97 | 0,00 |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.676.900,00 |

#### 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp41.199.010,86 | Rp0,00 |

Realisasi belanja modal aset lainnya sebesar Rp41.199.010,86 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp41.210.000,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp10.989,14. Belanja modal aset lainnya yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara berupa Belanja Modal Pengadaan *E-book* Perpustakaan Digital.

### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp3.454.947.220,00 | Rp11.814.457.310,00 |

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa misalnya untuk penanggulangan bencana alam, dimana pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Tanggap darurat Bencana Alam yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebesar Rp3.454.947.220,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp3.531.157.371,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp76.210.151,00. Rincian penggunaan belanja tidak terduga dapat dilihat pada **lampiran 7**.

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp258.649.802.576,00 | Rp265.473.294.238,00 |

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Realisasi Belanja Transfer adalah sebesar Rp258.649.802.576,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp273.116.310.900,00, sehingga kurang realisasi sebesar Rp14.466.508.324,00. Belanja transfer terdiri atas Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD realisasi sebesar Rp59.519.850.376,00 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN berdasarkan transfer dari Pusat untuk Tahun 2024 realisasi sebesar Rp199.129.952.200,00. Dana Desa untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah seluruhnya ditransfer oleh Pemerintah Pusat secara langsung ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

### 5.1.3. Pembiayaan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp51.017.199.959,13) | (Rp9.333.086.602,00) |

Pembiayaan netto sebesar (Rp51.017.199.959,13) adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp18.264.856.637,87 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp69.282.056.597,00.

#### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp18.264.856.637,87 | Rp63.076.262.956,00 |

Penerimaan pembiayaan realisasi sebesar Rp18.264.856.637,87 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp18.272.950.857,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp8.094.219,13. Rincian realisasi penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 34 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **18.272.950.857,00** | **18.264.856.637,87** | **99,96** | **63.076.262.956,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 18.272.950.857,00 | 18.264.856.637,87 | 99,96 | 63.076.262.956,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp69.282.056.597,00 | Rp72.409.349.558,00 |

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp69.282.056.597,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp69.310.927.641,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp28.871.044,00. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembayaran cicilan Pinjaman PEN Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp69.282.056.597,00 dengan rincian dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 35 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

| Kode Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **69.310.927.641,00** | **69.282.056.597,00** | **99,96** | **72.409.349.558,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 69.310.927.641,00 | 69.282.056.597,00 | 99,96 | 69.409.349.558,00 |

### 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp10.404.650.909,86 | Rp18.272.950.856,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.404.650.909,86. Hal ini disebabkan adanya surplus APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2024 sebesar Rp61.421.850.868,99 dikurangi dengan pembiayaan netto sebesar (Rp51.017.199.959,13).

## 5.2. Rincian Dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp10.404.650.909,86 | Rp18.272.950.856,00 |

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.404.650.909,86 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 36 Laporan Penggunaan Saldo Awal (LPSAL)**

| No | URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | 18.272.950.856,00 | 63.081.575.953,87 |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 18.264.856.637,87 | 63.076.262.956,00 |
| 3 | **Subtotal (1 - 2)** | **8.094.218,13** | **5.312.997,87** |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Anggaran (SILPA/SiKPA) | 10.404.650.909,86 | 18.272.950.856,00 |

| No | URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 5 | **Subtotal (3 +4)** | **10.412.745.127,99** | **18.278.263.853,87** |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | (8.094.218,13) | (5.312.997,87) |
| 7 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)** | **10.404.650.909,86** | **18.272.950.856,00** |

### 5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp18.272.950.856,00 dan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.264.856.637,87 dimana terdapat selisih sebesar Rp8.094.218,13.

### 5.2.2. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan realisasi surplus APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2024 sebesar Rp61.421.850.868,99 dikurangi dengan pembiayaan netto sebesar (Rp51.017.199.959,13) maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.404.650.909,86.

### 5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar (Rp8.094.218,13) yaitu Koreksi Kas Dana BOS SD sebesar Rp1.299.299,87 Kas Dana BOS PAUD sebesar (Rp6.577.550,00) dan Kas FKTP sebesar (Rp2.815.968,00).

## 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

### 5.3.1. Aset Lancar

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp92.603.510.716,18 | Rp66.221.202.656,74 |

Saldo Aset Lancar senilai Rp92.603.510.716,18 terdiri dari saldo Kas antara lain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas BOK Puskesmas, Kas Lainnya, Setara Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Penyisihan Piutang dan Persediaan.

#### 5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp10.683.462.109,98 | Rp18.272.950.856,00 |

Saldo kas Tahun 2024 sebesar Rp10.683.462.109,98, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5. 37 Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2024**

| NO | URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 8.338.721.467,86 | 15.209.157.712,87 |
| 2 | Kas di Bendahara Penerimaan | 49.129.000,00 | 0,00 |
| 3 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 108.939.603,00 | 567.854,00 |
| 4 | Kas di BLUD | 805.407.416,00 | 1.453.300.175,00 |
| 3 | Kas di Bendahara BOSP | 439.505.723,80 | 1.117.116.850,93 |
| 6 | Kas pada FKTP | 50.024.510,20 | 492.808.263,20 |
| 7 | Kas BOK Puskesmas | 662.052.189,00 | 0,00 |
| 8 | Kas Lainnya | 229.682.200,12 | 0,00 |
| 9 | Setara Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| **Total Kas** | | **10.683.462.109,98** | **18.272.950.856,00** |

#### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp8.338.721.467,86 | Rp15.209.157.712,87 |

Jumlah Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp8.338.721.467,86 yakni Kas saldo giro bank milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Daftar kas di setiap rekening kas daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 38 Daftar Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2024**

| NO | Nama Bank | Saldo 2024 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000266-0 | 8.338.721.467,86 | 15.209.157.712,87 |
| 2 | Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320. 01.02.000001-0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bank BRI Cabang Tarutung AC. 0099.01.000027.30.2 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **8.338.721.467,86** | **15.209.157.712,87** |

Adapun rincian SiLPA mengikat pada Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 39 Rincian SiLPA per 31 Desember 2024**

| NO | Uraian | Sisa Saldo 2024 |
|---|---|---|
| 1 | SiLPA DAU Pendanaan Kelurahan | 124.531.751,00 |
| 2 | SiLPA Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) (DAK Non Fisik) | 22.198.658.820,00 |
| 3 | SiLPA Dana Khusus Guru (TKG) (DAK Non Fisik) | 9.872.404,00 |
| 4 | SiLPA Dana Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) (DAK Non Fisik) | 2.612.000.824,00 |
| 5 | SiLPA DANA BOK (DAK Non Fisik) | 1.310.494.698,00 |
| 6 | SiLPA DANA BOKB (DAK Non Fisik) | 292.550.885,00 |
| 7 | SiLPA DANA FPM (DAK Non Fisik) | 59.987.504,00 |
| 8 | SiLPA DANA KPP (DAK Non Fisik) | 983.308,00 |
| 9 | SiLPA DANA Kepariwisataan (DAK Non Fisik) | 56.524.000,00 |
| **Jumlah** | | **26.665.604.194,00** |

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Rincian SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp26.665.604.194,00 sedangkan SiLPA pada Kasda Tahun 2024 sebesar

Rp8.338.721.467,86 terdapat selisih sebesar Rp18.326.882.726,14 yang penggunaannya diperuntukkan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 40 Rincian Penggunaan SiLPA mengikat Tahun 2024**

| NO | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah | Rp2.207.835.420,00 |
| 2 | Karya Bhakti TNI (TMMD) | Rp800.000.000,00 |
| 3 | Pembayaran Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang dibebankan kepada Pemda | Rp913.156.573,00 |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Rp2.203.618.921,00 |
| 5 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Rp2.638.025.305,00 |
| 6 | Pembayaran kegiatan Bonus produksi | Rp1.685.293.383,00 |
| 7 | Belanja modal atas pembangunan, peningkatan, pengaspalan dan rehabilitasi jalan serta pengadaan dan biaya umum | Rp3.435.918.613,14 |
| 8 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Rp4.443.034.511,00 |
| **Total** | | **Rp18.326.882.726,14** |

Penggunaan belanja sebagaimana pada tabel di atas diakibatkan ketidakcapaian penerimaan daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp67.581.090.688,00 antara lain: Bonus Produksi Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp3.019.035.757,00, Ketidakcapaian PAD sebesar Rp15.540.138.034,00, tidak salur Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp7.127.820.299,00, tidak salur DBH Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp37.660.521.122,00 dan kurang salur DBH-Pusat 2023 sebesar Rp4.233.575.476,00.

#### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp49.129.000,00 | Rp0,00 |

Saldo kas yang ada di bendahara penerimaan SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.129.000,00 yang merupakan kas di Bendahara Penerimaan pada FKTP Puskesmas atas retribusi pelayanan kesehatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Seluruh kas di bendahara penerimaan FKTP Puskesmas telah disetorkan pada Tahun 2025.

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp108.939.603,00 | Rp567.854,00 |

Saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp108.939.603,00. Kas ini merupakan UYHD, yakni :

1. Pengembalian Kurang Setor sisa TU dari Kelurahan Hutatoruan V Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp1.090.000,00 dan telah disetor pada tanggal 20 Januari 2025,
2. Kurang Setor sisa TU dari Kelurahan Pasar Sarulla Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp717.614,00 dan telah disetor pada tanggal 23 Januari 2025; dan
3. Kurang Setor sisa GU Nihil/UP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp107.131.989,00 dan telah disetor pada tanggal 10 Januari 2025.

#### 5.3.1.1.4 Kas di BLUD

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp805.407.416,00 | Rp1.453.300.175,00 |

Saldo kas di BLUD RSU Daerah Tarutung Tahun 2024 adalah sebesar Rp805.407.416,00. Kas ini merupakan selisih antara pendapatan dan belanja pada BLUD RSU Daerah Tarutung ditambah dengan saldo awal. Kas di BLUD dirincikan sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp76.488.433,00;
2. Kas di rekening PT. BRI Tbk AC. 0099-01-001041-30-9 sebesar Rp581.582.309,00; dan
3. Kas di rekening PT. Bank SUMUT No. Rek 320.02.04.003687-9 sebesar Rp147.336.674,00.

#### 5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp439.505.723,80 | Rp1.117.116.850,93 |

Kas Dana BOSP merupakan sisa Kas Dana BOS yang pengelolaannya melalui rekening Dana BOS pada sekolah SD Negeri, SMP Negeri, dan PAUD Negeri di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp439.505.723,80. SiLPA Dana BOSP TA 2024 sebesar Rp268.172.616,00. Selisih antara SiLPA Dana BOSP dengan Kas Dana BOSP sebesar Rp171.333.107,00 karena adanya penerimaan lainnya dan jasa

giro yang belum disetor ke Kas Daerah. Rincian sisa kas di Bendahara BOSP dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. 41 Silpa Dana BOS dan BOP PAUD per 31 Desember 2024**

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| **I** | **Rincian Perhitungan SiLPA Dana BOSP** | |
| | Pendapatan Dana BOSP TA 2024 | 69.905.724.924,00 |
| | Belanja Pengelolaan Dana BOSP TA 2024 | 70.749.390.908,00 |
| | Penggunaan SiLPA Dana BOSP TA 2023 | 1.111.838.600,00 |
| | **SiLPA Dana BOSP TA 2024** | **268.172.616,00** |
| | | |
| **II** | **Rincian Perhitungan Kas Dana BOSP** | |
| **A** | **Kas Bendahara BOSP SD** | |
| 1 | Saldo Awal | 909.542.303,13 |
| 2 | Koreksi Saldo Awal | 1.299.299,87 |
| 3 | Pendapatan Dana BOS | 39.061.095.449,00 |
| 4 | Penerimaan BOS lainnya | 109.605.565,00 |
| 5 | Belanja Dana BOS | (39.751.326.693,00) |
| 6 | Belanja Lain-Lain Dana BOS | (1.092.500,00) |
| **Sisa Dana BOS SD Tahun 2024** | | **329.123.424,00** |
| **B** | **Kas Bendahara BOSP SMP** | |
| 1 | Saldo Awal | 200.830.647,80 |
| 2 | Koreksi Saldo Awal | - |
| 3 | Pendapatan Dana BOS | 25.412.710.000,00 |
| 4 | Penerimaan Lain-Lain BOS | 61.727.542,00 |
| 5 | Belanja Dana BOS | (25.564.605.890,00) |
| 6 | Belanja Lain-Lain Dana BOS | (280.000,00) |
| **Sisa Dana BOS SMP Tahun 2024** | | **110.382.299,80** |
| **C** | **Kas BOP PAUD** | |
| 1 | Saldo Awal | 6.743.900,00 |
| 2 | Koreksi Saldo Awal | (6.577.550,00) |
| 3 | Pendapatan | 4.770.039.475,00 |
| 4 | Belanja | (4.770.205.825,00) |
| **Sisa Dana BOP PAUD Tahun 2024** | | **0,00** |
| **Total Sisa Dana BOS SD + BOS SMP + BOP PAUD** | | **439.505.723,80** |

Pada rekening BOSP sekolah, terdapat jasa giro dan penerimaan lainnya sebesar Rp171.333.107,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan telah disetorkan sebesar Rp126.783.593,00 pada Tahun 2025. Terdapat sisa jasa giro dan penerimaan lainnya sebesar Rp44.549.514,00 yang belum disetorkan.

Rincian terkait dengan penggunaan alokasi dana BOS tingkat SD terdapat pada **lampiran 8,** penggunaan alokasi dana BOS SMP terdapat pada **lampiran 9** dan penyetoran penerimaan lainnya pada **lampiran 10.**

#### 5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp50.024.510,20 | Rp492.808.263,20 |

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan sisa Dana Kapitasi BPJS yang masih berada pada Bendahara Dana JKN sebesar Rp50.024.510,20.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, Realisasi Dana Kapitasi BPJS di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 42 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024**

| No. | FKTP | Saldo Awal | Pendapatan | Belanja | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Aek Raja | 1.826.502,00 | 340.032.940,00 | (341.723.537,00) | 135.905,00 |
| 2 | Puskesmas Butar | 7.583.679,00 | 536.225.108,00 | (543.075.252,00) | 733.535,00 |
| 3 | Puskesmas Garoga | 7.429.871,00 | 677.248.588,00 | (683.065.057,00) | 1.613.402,00 |
| 4 | Puskesmas Hutabaginda | 31.791.853,00 | 1.850.606.830,00 | (1.876.870.440,00) | 5.528.243,00 |
| 5 | Puskesmas Janjiangkola | 3.583.954,00 | 340.896.347,00 | (343.858.607,00) | 621.694,00 |
| 6 | Puskesmas Lumban Sinaga | 6.419.568,00 | 478.163.094,00 | (483.190.981,00) | 1.391.681,00 |
| 7 | Puskesmas Muara | 5.224.217,00 | 540.239.229,00 | (544.339.309,00) | 1.124.137,00 |
| 8 | Puskesmas Onan Hasang | 8.332.650,00 | 604.999.912,00 | (611.852.253,00) | 1.480.309,00 |
| 9 | Puskesmas Pangaribuan | 5.864.273,00 | 619.575.400,00 | (624.327.538,00) | 1.112.135,00 |
| 10 | Puskesmas Paniaran | 4.492.783,20 | 445.125.397,00 | (449.517.375,00) | 100.805,20 |
| 11 | Puskesmas Parmonangan | 4.497.148,00 | 234.228.873,00 | (238.237.552,00) | 488.469,00 |
| 12 | Puskesmas Parsingkaman | 5.201.445,00 | 590.678.322,00 | (595.838.921,00) | 40.846,00 |
| 13 | Puskesmas Sarulla | 5.355.092,00 | 675.998.605,00 | (676.824.784,00) | 4.528.913,00 |
| 14 | Puskesmas Siatas Barita | 5.075.963,00 | 827.357.026,00 | (827.759.950,00) | 4.673.039,00 |
| 15 | Puskesmas Siborongborong | 15.365.100,00 | 1.333.011.247,00 | (1.344.536.692,00) | 3.839.655,00 |
| 16 | Puskesmas Silangit | 4.241.944,00 | 522.080.777,00 | (525.933.833,00) | 388.888,00 |
| 17 | Puskesmas Simangumban | 6.213.192,00 | 348.363.968,00 | (354.367.500,00) | 209.660,00 |
| 18 | Puskesmas Sipahutar | 7.799.059,00 | 1.049.101.148,00 | (1.046.806.349,00) | 10.093.858,00 |
| 19 | Puskesmas Sipultak | 1.448.092,00 | 278.612.708,00 | (274.032.996,00) | 6.027.804,00 |
| 20 | Puskesmas Sitadatada | 4.611.364,00 | 435.037.594,00 | (439.487.962,00) | 160.996,00 |
| 21 | Puskesmas Situmeang Habinsaran | 5.870.539,00 | 668.453.689,00 | (668.593.692,00) | 5.730.536,00 |
| **Jumlah** | | **148.228.288,20** | **13.396.036.802,00** | **(13.494.240.580,00)** | **50.024.510,20** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara*

#### 5.3.1.1.7 Kas BOK Puskesmas

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp662.052.189,00 | Rp0,00 |

Kas BOK Puskesmas merupakan Sisa Dana BOK Puskesmas Kesehatan DAK Non Fisik sebesar Rp662.052.189,00 pada Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kesehatan DAK Non Fisik di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 43 Anggaran dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024**

| No. | FKTP | Saldo Awal (Rp) | Pendapatan (Rp) | Pendapatan Lain-Lain (Rp) | Belanja (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Aek Raja | 4.884.218,00 | 863.951.181,00 | 92.601,00 | (832.559.110,00) | 36.368.890,00 |
| 2 | Puskesmas Butar | 6.907.982,00 | 863.375.018,00 | 0,00 | (830.219.191,00) | 40.063.809,00 |
| 3 | Puskesmas Garoga | 25.884.384,00 | 1.075.341.616,00 | 0,00 | (1.073.673.397,00) | 27.552.603,00 |
| 4 | Puskesmas Hutabaginda | 136.196.039,00 | 1.053.763.961,00 | 0,00 | (1.137.279.581,00) | 52.680.419,00 |
| 5 | Puskesmas Janji Angkola | 8.602.080,00 | 921.270.920,00 | 0,00 | (910.014.390,00) | 19.858.610,00 |
| 6 | Puskesmas Lumban Sinaga | 4.168.735,00 | 1.011.211.265,00 | 0,00 | (1.005.060.684,00) | 10.319.316,00 |
| 7 | Puskesmas Muara | 4.384.643,00 | 1.045.178.357,00 | 0,00 | (1.034.700.830,00) | 14.862.170,00 |
| 8 | Puskesmas Onan Hasang | 0,00 | 1.014.180.000,00 | 0,00 | (1.001.752.433,00) | 12.427.567,00 |
| 9 | Puskesmas Pangaribuan | 0,00 | 1.011.890.000,00 | 0,00 | (998.211.604,00) | 13.678.396,00 |
| 10 | Puskesmas Paniaran | 28.659.960,00 | 837.218.659,00 | 110.381,00 | (856.703.499,00) | 9.285.501,00 |
| 11 | Puskesmas Parmonangan | 9.746.180,00 | 1.109.077.820,00 | 0,00 | (958.381.999,00) | 160.442.001,00 |
| 12 | Puskesmas Parsingkaman | 6.328.290,00 | 1.042.201.710,00 | 0,00 | (1.016.908.619,00) | 31.621.381,00 |
| 13 | Puskesmas Sarulla | 3.000.878,00 | 1.009.214.122,00 | 0,00 | (1.009.128.099,00) | 3.086.901,00 |
| 14 | Puskesmas Siatas Barita | 173.206,00 | 981.014.794,00 | 0,00 | (948.361.915,00) | 32.826.085,00 |
| 15 | Puskesmas Siborongborong | 4.771.905,00 | 1.073.613.095,00 | 0,00 | (1.070.259.528,00) | 8.125.472,00 |
| 16 | Puskesmas Silangit | 7.574.716,00 | 866.879.284,00 | 0,00 | (849.987.100,00) | 24.466.900,00 |
| 17 | Puskesmas Simangumban | 3.447.324,00 | 918.488.676,00 | 0,00 | (918.196.035,00) | 3.739.965,00 |
| 18 | Puskesmas Sipahutar | 59.547,00 | 1.107.519.453,00 | 0,00 | (1.092.324.725,00) | 15.254.275,00 |
| 19 | Puskesmas Sipultak | 26.840.248,00 | 842.540.613,00 | 47.139,00 | (814.814.800,00) | 54.613.200,00 |
| 20 | Puskesmas Sitada-Tada | 57.531.624,00 | 821.710.376,00 | 0,00 | (821.316.571,00) | 57.925.429,00 |
| 21 | Puskesmas Situmeang Habinsaran | 2.602.048,00 | 978.221.952,00 | 0,00 | (947.970.701,00) | 32.853.299,00 |
| **Jumlah** | | **341.764.007,00** | **20.447.862.872,00** | **250.121,00** | **(20.127.824.811,00)** | **662.052.189,00** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara*

#### 5.3.1.1.8 Kas Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp229.682.200,12 | Rp0,00 |

Saldo Kas Lainnya pada 31 Desember 2024 sebesar Rp229.682.200,12 yakni Kas Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas sebesar Rp219.739.181,20 yang merupakan pembayaran klaim dari BPJS atas pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan oleh FKTP dan Kas Lainnya berupa utang pajak PPN Pusat realisasi belanja barang dan jasa BOSP yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.943.018,92 dan telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2025. Rincian Kas dana non Kapitasi pada FKTP terdapat pada **Lampiran 11**.

#### 5.3.1.1.9 Setara Kas Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Saldo Setara Kas Lainnya pada 31 Desember 2024 adalah nihil.

### 5.3.1.2 Piutang Daerah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp86.022.100.727,72 | Rp43.026.558.798,34 |

Piutang Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.022.100.727,72 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 44 Daftar Piutang Daerah TA 2024**

| No. | Nama Piutang | Saldo 2024 | Saldo 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pajak Daerah | 15.882.122.971,00 | 13.623.888.653,00 | 2.258.234.318,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Daerah | 978.590.264,13 | 945.529.619,13 | 33.060.645,00 |
| 3 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 15.570.144.767,00 | 15.287.170.836,21 | 282.973.930,79 |
| 5 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 10.014.381.000,00 | (10.014.381.000,00) |
| 6 | Piutang Transfer Antar Daerah | 46.784.244.939,00 | 0,00 | 46.784.244.939,00 |
| 7 | Piutang Lainnya | 6.806.997.786,59 | 3.155.588.690,00 | 3.651.409.096,59 |
| **Total** | | **86.022.100.727,72** | **43.026.558.798,34** | **42.995.541.929,38** |

Berdasarkan Tabel di atas, penjelasan rincian piutang daerah sebagai berikut:

#### 5.3.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp15.882.122.971,00 | Rp13.623.888.653,00 |

Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp15.882.122.971,00 dengan rincian dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 45 Daftar Piutang Pajak Daerah TA 2024**

| No. | Nama Piutang | Saldo 2024 | Saldo 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pajak Hotel | 25.315.200,00 | 29.495.200,00 | (4.180.000,00) |
| 2 | Piutang Pajak Restoran | 300.134.037,00 | 307.972.037,00 | (7.838.000,00) |
| 3 | Piutang Pajak Hiburan | 18.561.200,00 | 18.561.200,00 | 0,00 |
| 4 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 15.517.718.434,00 | 12.876.546.116,00 | 2.641.172.318,00 |
| 5 | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 20.394.100,00 | 391.314.100,00 | (370.920.000,00) |
| **Jumlah** | | **15.882.122.971,00** | **13.623.888.653,00** | **2.258.234.318,00** |

Keterangan lebih rinci piutang pajak daerah terdapat pada **Lampiran 12.**

#### 5.3.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp978.590.264,13 | Rp945.529.619,13 |

Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp978.590.264,13. Rincian daftar piutang retribusi sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 46 Daftar Piutang Retribusi Daerah TA 2024**

| No. | Nama Piutang | Saldo 2024 | Saldo 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 978.590.264,13 | 945.529.619,13 | 33.060.645,00 |
| **Jumlah** | | **978.590.264,13** | **945.529.619,13** | **33.060.645,00** |

Keterangan lebih rinci pada **Lampiran 13**.

#### 5.3.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 adalah Nihil.

#### 5.3.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp15.570.144.767,00 | Rp15.287.170.836,21 |

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 adalah sebesar Rp15.570.144.767,00 yang merupakan piutang pendapatan BLUD RSU Daerah Tarutung. Adapun rincian piutang pendapatan BLUD RSUD Tarutung sebagaimana pada tabel berikut..

**Tabel 5. 47 Daftar Piutang BLUD RSU Daerah Tarutung Tahun 2024**

| No. | Nama Piutang | Saldo 2024 | Saldo 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang usaha dari jasa layanan umum BPJS Pasien Covid 19 | 7.203.076.200,00 | 7.203.076.200,00 | 0,00 |
| 2 | Piutang usaha dari jasa layanan umum BPJS Kesehatan | 5.422.533.000,00 | 5.651.892.800,00 | (229.359.800,00) |
| 3 | Piutang usaha dari jasa layanan umum BPJS Obat Kronis | 2.684.316.923,00 | 2.054.075.720,00 | 630.241.203,00 |
| 4 | Piutang Pelayanan lainnya | 161.340.144,00 | 116.005.616,21 | 45.334.527,79 |
| 5 | Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS Ambulance | 98.878.500,00 | 262.120.500,00 | (163.242.000,00) |
| **Total** | | **15.570.144.767,00** | **15.287.170.836,21** | **282.973.930,79** |

#### 5.3.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| 0,00 | Rp10.014.381.000,00 |

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah nihil.

#### 5.3.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp46.784.244.939,00 | 0,00 |

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 merupakan piutang transfer dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar Rp7.127.820.299,00, piutang transfer dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar Rp37.660.283.640,00 dan piutang transfer Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar Rp1.996.141.000,00 yang belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rincian Piutang transfer antar daerah sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 48 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024**

| No. | Nama Piutang | Saldo 2024 |
|---|---|---|
| **1** | **Piutang DBH Tahun 2023** | **7.127.820.299,00** |
| | - Piutang Bagi Hasil PKB | 2.194.162.696,00 |
| | - Piutang Bagi Hasil BBNKB | 931.286.838,00 |
| | - Piutang Bagi Hasil PBBKB | 3.969.628.429,00 |
| | - Piutang Bagi Hasil PAP | 32.742.336,00 |
| **2** | **Piutang DBH Tahun 2024** | **37.660.283.640,00** |
| | - Piutang Bagi Hasil PKB | 14.916.204.269,00 |
| | - Piutang Bagi Hasil BBNKB | 8.470.417.896,00 |
| | - Piutang Bagi Hasil PBBKB | 12.966.380.479,00 |
| | - Piutang Bagi Hasil PAP | 1.307.280.996,00 |
| **3** | **Piutang Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024** | **1.996.141.000,00** |
| | - Piutang BKPSU Tahun 2024 | 1.996.141.000,00 |
| **Total Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024** | | **46.784.244.939,00** |

#### 5.3.1.2.7 Piutang Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp6.806.997.786,59 | Rp3.155.588.690,00 |

Saldo Piutang Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.806.997.786,59 yang terdiri dari piutang TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp3.284.209.047,59 dan piutang dana bergulir yang sebelumnya dicatat pada investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp3.522.788.739,00.

Reklasifikasi investasi jangka panjang non permanen ke piutang lainnya dengan memperhatikan bahwa dana bergulir dimaksud telah seluruhnya disalurkan kepada Masyarakat penerima. Adapun rincian piutang dana bergulir yang telah disalurkan ke masyarakat sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 49 Dana Bergulir**

| No. | Tahun Anggaran | Dana Bergulir | Bona Pasogit | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 382.656.220,00 | 500.000.000,00 | 882.656.220,00 |
| 2 | 2003 | 540.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.040.000.000,00 |
| 3 | 2004 | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 |
| 4 | 2005 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| 5 | 2006 | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 6 | 2007 | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 7 | 2008 | 290.000.000,00 | 0,00 | 290.000.000,00 |
| Bunga yang menjadi pokok dana bergulir | | 0,00 | 60.132.519,00 | 60.132.519,00 |
| **Jumlah** | | **2.462.656.220,00** | **1.060.132.519,00** | **3.522.788.739,00** |

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara.*

Rincian piutang TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya dapat dilihat pada **lampiran 14**.

### 5.3.1.3 Penyisihan Piutang

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp20.605.304.985,32) | (Rp9.094.849.518,35) |

Penyisihan piutang daerah Tahun 2024 sebesar (Rp20.605.304.985,32) yang merupakan penyisihan piutang pajak daerah sebesar (Rp8.869.211.859,78), penyisihan piutang retribusi daerah sebesar (Rp887.201.964,34), penyisihan piutang dana bergulir sebesar (Rp3.522.788.739,00) dan penyisihan piutang transfer antar daerah sebesar (Rp7.326.102.422,20). Adapun rincian penyisihan piutang sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 50 Daftar Piutang Pendapatan TA 2024**

| No. | Penyisihan Piutang | Saldo 2024 | Saldo 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel | 25.315.200,00 | 29.495.200,00 | (4.180.000,00) |
| 2 | Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya | 300.134.037,00 | 307.972.037,00 | (7.838.000,00) |
| 3 | Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 18.561.200,00 | 18.561.200 | 0,00 |
| 4 | Penyisihan Piutang PBBP2 | 8.525.201.422,78 | 7.955.341.063,75 | 569.860.359,04 |
| 5 | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah | 887.201.964,34 | 783.480.017,61 | 103.721.946,73 |
| 6 | Penyisihan Piutang Dana Bergulir | 3.522.788.739,00 | 0,00 | 3.522.788.739,00 |
| 7 | Penyisihan Piutang DBH Provsu | 7.316.121.717,20 | 0,00 | 7.316.121.717,20 |
| 8 | Penyisihan Piutang BKPSU | 9.980.705,00 | 0,00 | 9.980.705,00 |
| **Jumlah** | | **20.605.304.985,32** | **9.094.849.518,36** | **11.510.455.466,96** |

Rincian penyisihan piutang daerah Tahun 2024 sebagaimana pada **Lampiran 15**.

#### 5.3.1.4 Beban dibayar dimuka

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Jumlah saldo beban dibayar dimuka pada Tahun 2024 adalah Nihil.

#### 5.3.1.5 Persediaan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp16.503.252.863,80 | Rp14.016.542.520,75 |

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai yang dikelola oleh pengguna barang melalui bendahara barang daerah pada tiap SKPD per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir Tahun sebesar Rp16.503.252.863,80, mengalami kenaikan sebesar Rp2.486.710.343,05 dari Tahun 2023. Rincian persediaan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 51 Rincian Persediaan TA 2024**

| Kode Akun | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12.01.01.1 | Bahan Bangunan dan Konstruksi | 596.627.125,00 | 600.992.125,00 | (4.365.000,00) |
| 1.1.12.01.01.11 | Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 16.860.000,00 | 54.975.000,00 | (38.115.000,00) |
| 1.1.12.01.01.12 | Bahan Lainnya | 2.338.725.276,80 | 1.902.870.320,54 | 435.854.956,26 |
| 1.1.12.01.03.1 | Alat Tulis Kantor | 156.956.485,00 | 507.093.178,00 | (350.136.693,00) |
| 1.1.12.01.03.3 | Bahan Cetak | 722.793.165,00 | 510.688.785,63 | 212.104.379,37 |
| 1.1.12.01.03.4 | Benda Pos | 2.150.000,00 | 2.220.000,00 | (70.000,00) |
| 1.1.12.01.03.6 | Bahan Komputer | 0,00 | 3.237.000,00 | (3.237.000,00) |
| 1.1.12.01.03.7 | Perabot Kantor | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.1.12.01.03.8 | Alat Listrik | 13.095.440,00 | 7.164.150,00 | 5.931.290,00 |
| 1.1.12.01.03.11 | Perlengkapan Pendukung Olahraga | 15.000,00 | 1.120.000,00 | (1.105.000,00) |
| 1.1.12.01.03.12 | Suvenir/Cendera Mata | 0,00 | 149.400.000,00 | (149.400.000,00) |
| 1.1.12.01.03.13 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 75.984.815,00 | 46.840.330,00 | 29.144.485,00 |
| 1.1.12.01.04.1 | Obat | 12.115.427.637,00 | 9.725.610.893,58 | 2.389.816.743,42 |
| 1.1.12.01.04.2 | Obat-obatan Lainnya | 452.700,00 | 40.275.518,00 | (39.822.818,00) |
| 1.1.12.01.05.1 | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 375.162.112,00 | 375.162.112,00 | 0,00 |
| 1.1.12.01.07.2 | Pakan | 88.893.108,00 | 88.893.108,00 | 0,00 |
| **Total** | | **16.503.252.863,80** | **14.016.542.520,75** | **2.486.710.343,05** |

Persediaan dimaksud sudah termasuk dengan persediaan yang bersumber dari BLUD sebesar Rp8.332.546.501,80, persediaan yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp94.654.775. Daftar persediaan per SKPD Tahun 2024 terdapat pada **lampiran 16**.

### 5.3.2. Investasi Jangka Panjang.

Jumlah investasi jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp76.323.268.075,00 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 52 Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2024**

| Uraian | Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 3.522.788.739,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | 76.323.268.075,00 | 78.060.330.797,00 |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **76.323.268.075,00** | **81.583.119.536,00** |

#### 5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp3.522.788.739,00 |

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Terdapat pengurangan sebesar Rp3.522.788.739,00 dari Tahun sebelumnya dimana hal ini disebabkan telah dilakukan reklasifikasi atas investasi jangka panjang dimaksud ke piutang lainnya dengan kriteria macet mengingat dana dimaksud telah diterima oleh Masyarakat, LSM dan Badan Usaha lainnya dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 . Rincian investasi jangka panjang dimaksud yang dilakukan reklasifikasi ke piutang lainnya sebagai berikut.

- Dana Bergulir UKM dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Rp2.462.656.220,00
- Dana Bergulir Bona Pasogit dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tap. Utara dimana penyalurannya melalui PT Bank Sumut Rp1.060.132.519,00

**Jumlah** **Rp3.522.788.739,00**

#### 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp76.323.268.075,00 | Rp78.060.330.797,00 |

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebesar Rp76.323.268.075,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.737.062.722,00 dari Tahun sebelumnya sebesar Rp78.060.330.797,00. Rincian investasi jangka panjang permanen Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 53 Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024**

| NO | URAIAN | KEPEMILIKAN PER 31 DES 2024 | METODE | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDAM Mual Na Tio | 100% | Ekuitas | 33.853.980.071,00 | 33.192.445.323,00 | 661.534.748,00 |
| 2 | Perseroda Pertanian | 100% | Ekuitas | 6.803.398.235,00 | 9.201.995.705,00 | (2.398.597.470,00) |
| 3 | PT Bank Sumut | 1,41% | Beban | 35.665.889.769,00 | 35.665.889.769,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | | | **76.323.268.075,00** | **78.060.330.797,00** | **(1.737.062.722,00)** |

#### 5.3.2.2.1 Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Na Tio.

Jumlah penyertaan modal kepada PDAM Mual Na Tio sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.193.280.528,00.

Kemudian terdapat juga penyertaan modal dari Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp2.814.498.342,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 268/DCKP/2012 Nomor: 6905151/PDAM/2012.

Total akumulasi saldo rugi PDAM Mual Natio hingga 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.815.333.557,00). Pada Tahun 2024 tidak terdapat penyertaan modal kepada PDAM Mual Natio dan sesuai Laporan Keuangan terdapat laba Tahun berjalan sebesar Rp661.534.748,00 sehingga total investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PDAM Mual Natio sebesar Rp33.853.980.071,00.

Laporan Keuangan pada PDAM telah di audit oleh KAP Drs. Syamsul Bahri MM, Ak & Rekan pada tanggal 5 Februari 2025 sesuai dengan Laporan KAP Nomor 00005/2.0658/AU.2/04/0022-2/1/II/2025 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk posisi penyertaan modal pada PDAM Mual Natio sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 54 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio**

| No | Keterangan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Modal Disetor s.d. 31 Desember 2024 | 38.193.280.528,00 |
| 2 | Modal Pemerintah Pusat | 2.814.498.342,00 |
| 3 | Laba (rugi) s.d Tahun 2024 | (7.815.333.557,00) |
| 4 | Penyertaan Modal Tahun 2024 | 0,00 |
| 5 | Laba (rugi) Tahun 2024 | 661.534.748,00 |
| **Jumlah** | | **33.853.980.071,00** |

#### 5.3.2.2.2 Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara dan Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Tapanuli Utara serta Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan

Daerah Pertanian, bahwa pada Tahun 2024 Perusahaan Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara telah digabungkan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian. Atas dasar hal tersebut, maka Laporan Keuangan Perseroan Daerah Pertanian merupakan Laporan Keuangan konsolidasi antara Perusda Pertanian dan Perusda Pertambangan.

Sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2023, jumlah investasi untuk perusahaan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 55 Jumlah Investasi pada Perusahaan Daerah pada Tahun 2023**

| No | Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga | Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan Tahun 2023 | Jumlah modal (investasi) yang dikembalikan | Akumulasi Kerugian sampai Dengan Tahun 2023 | Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan Tahun ini |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | Perusda Pertanian | 15.500.000.000,00 | (3.000.000.000,00) | (3.298.034.295,00) | 9.201.965.705,00 |
| 2 | Perusda Pertambangan | 5.000.000.000,00 | - | (5.472.871.655,00) | - |
| **Jumlah** | | **20.500.000.000,00** | **(3.000.000.000,00)** | **(8.770.905.950,00)** | **9.201.965.705,00** |

Untuk Tahun 2024, Laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat.

Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian, jumlah penyertaan modal hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp20.500.000.000,00 akumulasi kerugian bidang pertanian hingga 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.298.004.295,00), koreksi modal atas penggabungan Perusda Pertambangan sebesar (Rp5.494.371.654,00), koreksi atas laba Tahun sebelumnya untuk Utang Pajak sebesar (Rp870.020.891,00) dan kerugian Tahun 2024 sebesar (Rp1.034.204.925,00) serta terdapat pengembalian penyertaan modal ke kas daerah sebesar (Rp3.000.000.000,00) sehingga nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.803.398.235,00.

Rincian perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 56 Rincian Penyertaan Modal Perseroda Pertanian Tahun 2024**

| No | Keterangan | Nilai |
|---|---|---|
| 1. | Modal Disetor s.d. 31 Desember 2024 | 20.500.000.000,00 |
| 2. | Penyertaan Modal Tahun 2024 | 0,00 |
| 3. | Laba (rugi) Perusda Pertanian s.d Tahun 2023 | (3.298.004.295,00) |
| 4. | Koreksi Perusda Pertambangan s.d Tahun 2023 | (5.494.371.654,00) |
| 5. | Koreksi atas laba Tahun sebelumnya untuk Utang Pajak | (870.020.891,00) |
| 6. | Laba (rugi) Tahun 2024 | (1.034.204.925,00) |
| 7. | Pengembalian Penyertaan Modal ke Kasda | (3.000.000.000,00) |
| **Jumlah** | | **6.803.398.235,00** |

#### 5.3.2.2.3 Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut.

Jumlah penyertaan modal ke PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp35.665.889.769,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.566.589 lembar. Jumlah lembar saham Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diinvestasikan ke dalam saham PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5. 57 Jumlah Lembar Saham Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut**

| No. | Hasil RUPS | % Kepemi-likan | Tanggal | Jumlah Saham (lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No.008/DIR/DPEMTS/SKS/2001 | 0,3 | 28-Jun-01 | 132.017 |
| 2 | No.008/DIR/DTS-TS/SKS/2005 | 0,79 | 21-Mar-05 | 26.632 |
| 3 | No.036/DIR/DTS-TS/SKS/2005 | 0,79 | 21-Mar-05 | 10.000 |
| 4 | No.005/DIR/DTS-TS/SKS/2006 | 3,63 | 24-Mar-06 | 116.919 |
| 5 | No.007/DIR/DTS-TS/SKS/2007 | 0,91 | 14-Feb-07 | 76.001 |
| 6 | No.029/DIR/DTSPPJ/SKS/2007 | 3,18 | 12-Nov-07 | 299.240 |
| 7 | No.005/DIR/DTSPPJ/SKS/2008 | 3,28 | 30-Des-08 | 75.503 |
| 8 | No.006/DIR/DTSPPJ/SKS/2009 | 2,38 | 23-Okt-09 | 60.000 |
| 9 | No.006/DIR/DTSPDJ/SKS/2011 | 1,84 | 28-Mar-11 | 396.688 |
| 10 | No.008/Dir/DTs-PDJ/SKS/2013 | 1,62 | 08-Feb-13 | 349.471 |
| 11 | No. 2767/RC1Z-PN/HRS/2013 | 1,72 | 24-Des-13 | 143.545 |
| 12 | No. 007/SP-SPr/SKS/2017 | 1,60 | 21-Mar-17 | 217.062 |
| 13 | No. 039/SP-SPr/SKS/2017 | 1,69 | 08-Mar-18 | 314.952 |
| 14 | No. 006/Dir/SP-SPr/SKS/2019 | 1,76 | 18-Mar-19 | 348.820 |
| 15 | No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2020 | 1,5 | 24-Peb-20 | 290.098 |
| 16 | No. 001/Dir/SP-SPr/SKS/2021 | 1,45 | 04 Mar-21 | 155.943 |
| 17 | No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2022 | 1,42 | 02-Mar-22 | 253.698 |
| 18 | No. 025/Dir/SP-SPr/SKS/2022 | 1,45 | 30-Ags-22 | 300.000 |
| **Jumlah** | | | | **3.566.589** |

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut telah mencapai Rp35.665.889.769,61. Untuk lebih rinci daftar modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 58 Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut**

| No. | Tahun Anggaran | Penyertaan Modal |
|---|---|---|
| 1 | 2001 | 1.320.170.000,00 |
| 2 | 2005 | 366.320.000,00 |
| 3 | 2006 | 1.169.190.000,00 |
| 4 | 2007 | 3.752.410.000,00 |
| 5 | 2008 | 755.030.000,00 |
| 6 | 2009 | 600.000.000,00 |
| 7 | 2011 | 3.966.880.000,00 |
| 8 | 2012 | 3.494.710.000,00 |

| No. | Tahun Anggaran | Penyertaan Modal |
|---|---|---|
| 9 | 2013 | 1.435.450.000,00 |
| 10 | 2016 | 2.170.620.000,00 |
| 11 | 2017 | 3.149.529.251,00 |
| 12 | 2018 | 3.488.198.234,00 |
| 13 | 2019 | 2.900.981.425,00 |
| 14 | 2020 | 1.559.428.709,00 |
| 15 | 2021 | 2.536.977.814,00 |
| 16 | 2022 | 2.999.994.336,00 |
| | **Jumlah** | **35.665.889.769,00** |

### 5.3.3. Aset Tetap

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.407.335.274.480,14 | Rp2.442.321.546.910,11 |

Saldo aset tetap Tahun 2024 sebesar Rp2.407.335.274.480,14 mencakup saldo awal aset tetap ditambah dengan belanja modal pada Tahun berjalan, mutasi penambahan dan mutasi pengurangan atas aset tetap Tahun 2024. Rekapitulasi aset tetap sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 59 Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2024**

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **ASET TETAP** | **2.407.335.274.480,14** | **2.442.321.546.910,11** | **(34.986.272.429,97)** |
| 1.3.01 | Tanah | 851.271.193.314,00 | 851.001.890.764,00 | 269.302.550,00 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 454.304.118.366,00 | 444.847.733.816,11 | 9.456.384.549,89 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 816.892.322.252,55 | 803.302.454.380,00 | 13.589.867.872,55 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.866.176.536.837,11 | 1.794.716.461.553,00 | 71.460.075.284,11 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 31.075.123.196,00 | 23.063.611.668,00 | 8.011.511.528,00 |
| 1.3.06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (1.612.384.019.485,52) | (1.474.610.605.271,00) | (137.773.414.214,52) |

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap Tahun 2024 sebagaimana pada **Lampiran 17** dan saldo aset tetap per SKPD pada **Lampiran 18**.

Aset Tetap terdiri dari:

#### 5.3.3.1 Tanah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp851.271.193.314,00 | Rp851.001.890.764,00 |

Saldo aset tetap tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp851.271.193.314,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 5. 60 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah**

| Saldo Awal | Penambahan | (Pengurangan) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| 851.001.890.764,00 | 269.302.550,00 | 0,00 | 851.271.193.314,00 |

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 61 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024**

| URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | **851.001.890.764,00** | **851.001.890.764,00** |
| **Mutasi Bertambah** | **269.302.550,00** | **-** |
| - Belanja Modal TA 2024 | 164.000.000,00 | - |
| - Hibah | 105.302.550,00 | - |
| **Mutasi Berkurang** | **0,00** | **-** |
| - Reklasifikasi ke Beban diserahkan ke masyarakat | 0,00 | - |
| **Saldo akhir Per 31 Desember 2024** | **851.271.193.314,00** | **851.001.890.764,00** |

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp269.302.550,00 terdiri dari :
   a. Pengadaan Belanja Modal Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat sebesar Rp164.000.000,00;
   b. Adanya hibah dari pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 62 Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tanah Tahun 2024**

| NO | SKPD | PENGGUNAAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat | Hibah Tanah untuk jalan | 92.282.550,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Hibah Tanah untuk jalan | 5.394.000,00 |
| 3 | Kantor Kecamatan Pahae Julu | Hibah Tanah untuk bangunan air | 7.626.000,00 |
| **Total** | | | **105.302.550,00** |

Rincian aset tetap tanah per SKPD tercantum dalam **lampiran 19.**

I. Aset Tanah Perkara

Terdapat aset tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam sengketa/perkara dan proses hukum yakni Tanah RSUD Tarutung dengan uraian sebagai berikut.

1) Nama Aset : Tanah Bangunan Rumah Sakit
2) Luas : 55.000 m2
3) Tahun Perolehan : 1956
4) Nilai : 7.050.624.000,00

Penjelasan :
Tahun 2020 pihak HKBP melakukan gugatan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan RSUD Tarutung ke Pengadilan Negeri Tarutung, dan keluarlah hasil

putusan N 0, yang artinya tetap dijalankan sesuai sebagaimana sebelumnya yang artinya tetap tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tidak Puas dengan hasil putusan tersebut, kemudian Tahun 2024 pihak HKBP kembali melakukan gugatan kedua kalinya atas kepemilikan tanah dan bangunan RSUD Tarutung ke Pengadilan Negeri Tarutung dan hingga saat ini belum ada putusan karena proses hukumnya masih berlangsung.

II. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan fasilitas penunjang yang disediakan oleh pengembang untuk menunjang fungsi lingkungan hunian agar layak huni dan berkelanjutan. Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan PSU bagi kesejahteraan Masyarakat. Pada Tahun 2024, berdasarkan hasil inventarisasi dan keterangan dari perangkat daerah teknis, diketahui terdapat enam potensi Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dari pengembang yang perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan PSU secara optimal sehingga penyerahan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dapat dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 5. 63 Potensi PSU dari Pengembang**

| No | Pengembang | Luas (m2) | Jenis |
|---|---|---|---|
| 1 | PT TOZAI | 11.308,00 | Tanah untuk Jalan Lingkungan |
| | | 3.084,00 | Tahan untuk Parit/Drainase |
| | | 4.610,00 | Tanah/Lahan Sekolah Dasar |
| 2 | PT TIARA ADIE JAYA | 6.246,00 | Tanah untuk Lahan Terbuka Hijau |
| | | - | Tanah untuk jalan dan drainase |
| 3 | PT. ALGA SEMPURNA MANDIRI | - | Tanah untuk jalan dan drainase |
| | | - | Tanah untuk Lahan Terbuka Hijau |
| 4 | PT. TRISETA BUANA KARSA | - | Tanah untuk jalan dan drainase |
| | | - | Tanah untuk Lahan Terbuka Hijau |
| 5 | PT. BERKAH RISKI HUTAPEA | 2.667,00 | Tanah untuk jalan dan drainase |
| | | - | Tanah untuk Lahan TerbukaHijau |
| 6 | PT. RANTOCIA HOTJAYA | 12.840,00 | Tanah untuk fasos |
| | | 10.904,97 | Tanah untuk jalan |
| | | 1.867,03 | Tanah untuk drainase |

III. ASET TANAH BERSERTIFIKAT DAN TIDAK BERSERTIFIKAT.

Aset tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memiliki sertifikat pada Tahun 2024 sebanyak 523 persil dan yang tidak memiliki sertifikat sebanyak 2.996 persil. Rincian aset tetap tanah yang bersertifikat sebagaimana pada **Lampiran 20** dan aset tetap tanah yang belum bersertifikat sebagaimana pada **Lampiran 21.**

### 5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp454.304.118.366,00 | Rp444.847.733.816,11 |

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp454.304.118.366,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

**Tabel 5. 64 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin**

| Saldo Awal | Penambahan | (Pengurangan) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| 444.847.733.816,11 | 33.756.237.894,00 | (24.299.853.344,11) | 454.304.118.366,00 |

Rekapitulasi mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 65 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

| URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Awal** | **444.847.733.816,11** | **444.847.733.816,11** |
| **Mutasi Bertambah** | **33.756.237.894,00** | **-** |
| - Belanja Modal TA 2024 | 26.958.423.144,00 | - |
| - BOP PAUD Tahun 2024 | 4.677.800,00 | - |
| - Pengadaan JKN Tahun 2024 | 741.404.720,00 | - |
| - Hibah Tahun 2024 | 29.250.000,00 | - |
| - Inventarisasi Tahun sebelumnya sesuai temuan BPK | 828.000.000,00 | - |
| - Reklas dari KIB C ke KIB B | 3.376.230.308,00 | - |
| - Reklas dari KIB D ke KIB B | 887.024.786,00 | - |
| - Reklasifikasi beban barang dan jasa ekstrakompatabel KE KIB B | 28.000.000,00 | |
| - Reklasifikasi beban barang dan jasa (BHP) KE KIB B | 55.735.680,00 | |
| - Mutasi antar SKPD | 847.491.429,00 | - |
| - Koreksi ekuitas | 27,00 | |
| **Mutasi Berkurang** | **(24.299.853.344,11)** | **-** |
| - Reklasifikasi aset ke beban barang dan jasa ekstrakompatabel | 5.966.955.817,00 | - |
| - Reklasifikasi aset ke beban barang dan jasa (BHP) | 33.334.700,00 | - |
| - Reklas aset lainnya/ RB | 8.769.905.420,00 | - |
| - Aset tidak ditemukan 2024 | 8.450.000,00 | - |
| - Reklasifikasi KIB B ke KIB E | 8.189.708.889,00 | - |
| - Penghapusan | 402.995.054,00 | - |
| - Inventarisasi | 74.490.000,00 | - |
| - Mutasi antar SKPD | 847.491.429,00 | - |
| - Koreksi ekuitas | 38,79 | - |
| - Reklas ke aset lain-lain akibat pekerjaan kurang volume | 6.521.996,32 | |
| **Saldo akhir** | **454.304.118.366,00** | **444.847.733.816,11** |

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp33.756.237.894,00 terdiri dari :

a. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.958.423.144,00.

b. Adanya Reklas dari beban hibah BOP PAUD Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.677.800,00;

c. Adanya Reklas dari beban Jasa diserahkan kepada pihak ketiga sumber dana JKN/Kapitasi pada Dinas Kesehatan menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp741.404.720,00;

d. Adanya hibah dari Pemerintah Pusat ke Dinas Kesehatan sebesar Rp29.250.000,00 berupa aset peralatan dan mesin alat pendingin;

e. Adanya Inventarisasi Tahun sebelumnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp30.100.000,00 berupa kendaraan dinas Roda 2 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp797.900.000,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya;

f. Adanya Reklas dari KIB C ke KIB B sebesar Rp3.376.230.308,00 dengan rincian SKPD antara lain sebagai berikut.

**Tabel 5. 66 Rekapitulasi Reklasifikasi Aset KIB C ke KIB B Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Pendidikan | 889.504.058,00 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 2.378.000.000,00 |
| 3. | Dinas Lingkungan Hidup | 108.726.250,00 |
| **Total** | | **3.376.230.308,00** |

g. Adanya reklasifikasi dari KIB D ke KIB B sebesar Rp887.024.786,00 pada Dinas Pariwisata yaitu berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Rambu Tidak Bersuar dan Alat Kantor Lainnya;

h. Adanya reklasifikasi beban barang dan jasa ekstrakompatabel KE KIB B sebesar Rp28.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Peralatan Personal Computer.

i. Adanya reklasifikasi beban barang dan jasa (BHP) KE KIB B dengan rincian setiap SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5. 67 Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang Pakai Habis ke KIB B Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Kantor Kecamatan Sipahutar | 4.800.000,00 |
| 2. | Kantor Kecamatan Pangaribuan | 4.800.000,00 |
| 3. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 38.560.000,00 |
| 4. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 600.000,00 |
| 5. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 5.400.000,00 |
| 6. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1.575.680,00 |
| **Total** | | **55.735.680,00** |

j. Adanya Mutasi antar SKPD sebesar Rp847.491.429,00.

k. Adanya koreksi ekuitas aset peralatan dan mesin sebesar Rp27 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Mutasi berkurang sebesar Rp24.299.853.344,11 terdiri dari ;

a. Reklasifikasi aset ke beban barang dan jasa ekstrakompatabel sebesar Rp5.966.955.817,00 dengan uraian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5. 68 Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban barang dan jasa ekstrakompatabel Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Sekretariat DPRD | 20.053.000,00 |
| 2. | Dinas Pendidikan | 5.877.923.317,00 |
| 3. | Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung | 59.684.700,00 |
| 4. | Dinas Pertanian | 9.294.800,00 |
| **Total** | | **5.966.955.817,00** |

b. Reklasifikasi aset ke belanja barang habis pakai sebesar Rp33.334.700,00 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5. 69 Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban Barang Pakai Habis Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Sekretariat DPRD | 5.116.300,00 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 1.048.000,00 |
| 3. | Dinas Pariwisata | 4.928.600,00 |
| 4. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.346.000,00 |
| 5. | Satuan Polisi Pamong Praja | 504.000,00 |
| 6. | Kantor Kecamatan Sipoholon | 136.800,00 |
| 7. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6.700.000,00 |
| 8. | Dinas Lingkungan Hidup | 345.000,00 |
| 9. | Dinas Pertanian | 935.000,00 |
| 10. | Dinas Perpustakaan | 7.000.000,00 |
| 11. | Badan Pendapatan Daerah | 275.000,00 |
| **Total** | | **33.334.700,00** |

c. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya/Rusak berat sebesar Rp8.769.905.420,00;

d. Adanya aset hilang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp8.450.000,00 berupa Laptop.

e. Adanya reklasifikasi KIB B ke KIB E sebesar Rp8.189.708.889,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu berupa buku, Bahan Kartografi, Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya dan Alat Musik.

f. Adanya penghapusan KIB B sebesar Rp402.995.054,00 pada Sekretariat Daerah yaitu Kendaraan Dinas Bermotor.

g. Adanya inventarisasi KIB B Tahun sebelumnya sebesar Rp74.490.000,00 pada BKAD berupa kendaraan dinas operasional yang telah dimutasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2023.

h. Adanya Mutasi antar SKPD sebesar Rp847.491.429,00;

i. Adanya koreksi ekuitas sebesar Rp38,79 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

j. Adanya reklasifikasi KIB B ke aset lain-lain akibat pekerjaan kurang volume Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp6.521.996,32.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan terhadap Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima (BAST) diketahui terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin antara lain :

1. Terdapat peralatan dan mesin yang masih dikuasai pejabat yang telah mutasi serta belum dikembalikan ke perangkat daerah;
2. Terdapat kendaraan dinas operasional dengan status pinjam pakai tidak didukung dengan Perjanjian Pinjam Pakai;
3. Terdapat satu unit kendaraan dengan status pinjam pakai yang tidak dirawat dan dilakukan perbaikan.

Rincian aset peralatan dan mesin per SKPD tercantum dalam **Lampiran 22** dan Rincian aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai pihak lain pada **Lampiran 23**.

### 5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp816.892.322.252,55 | Rp803.302.454.380,00 |

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp816.892.322.252,55 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 5. 70 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan**

| Saldo Awal | Penambahan | (Pengurangan) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| 803.302.454.380,00 | 15.059.631.863,10 | (1.469.763.990,55) | 816.892.322.252,55 |

Rekapitulasi mutasi gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 71 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024**

| URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Awal** | **803.302.454.380,00** | **803.302.454.380,00** |
| **Mutasi Bertambah** | **15.059.631.863,10** | **-** |
| - Belanja Modal TA 2024 | 14.949.241.861,74 | - |
| - Rehabilitasi yang menambah nilai aset tetap dari Aset Ekstrakompatabel | 110.390.000,00 | - |
| - Koreksi Ekuitas | 1,36 | - |
| **Mutasi Berkurang** | **(1.469.763.990,55)** | **-** |
| - Reklas dari KIB C ke beban habis pakai | 2.747.500,00 | - |
| - Reklasifikasi KIB C ke ekstrakompatabel | 433.682.608,00 | - |
| - Reklasifikasi KIB C ke KIB B | 884.424.243,00 | - |
| - Reklasifikasi KIB C ke KIB D | 73.270.000,00 | - |

| URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|
| - Koreksi ekuitas | 0,05 | - |
| - Reklasifikasi KIB C ke Aset lain-lain atas kelebihan Pembayaran Belanja Modal | 75.639.639,50 | - |
| **Saldo akhir** | **816.892.322.252,55** | **803.302.454.380,00** |

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp15.059.631.863,10 terdiri dari :
   a. Pengadaan belanja modal sebesar Rp14.949.241.861,74.
   b. Adanya Rehabilitasi yang menambah nilai aset tetap dari Aset Ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp110.390.000,00.
   c. Adanya Koreksi Ekuitas sebesar Rp1,36.
2. Mutasi berkurang sebesar Rp1.469.763.990,55 terdiri dari ;
   a. Adanya reklasifikasi dari KIB C ke beban pakai habis sebesar Rp2.747.498,69 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5. 72 Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban Barang Pakai Habis Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Lingkungan Hidup | 562.500,00 |
| 2. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.185.000,00 |
| **Total** | | **2.747.500,00** |

   b. Reklasifikasi ke aset Ektrakompatabel pada Dinas Pariwisata sebesar Rp319.876.543,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp113.806.065,00;
   c. Reklasifikasi KIB C Ke KIB B sebesar Rp884.424.243,00 yakni pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp775.697.993,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp108.726.250,00;
   d. Reklasifikasi KIB C ke KIB D sebesar Rp73.270.000,00 pada Kantor Kecamatan Tarutung.
   e. Koreksi ekuitas sebesar Rp0,05.
   f. Reklasifikasi KIB C ke Aset lain-lain atas kelebihan Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp75.639.639,50 yakni pada Dinas Pariwisata sebesar Rp24.741.645,72 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp50.897.993,78.

Rincian aset tetap gedung dan bangunan per SKPD tercantum dalam **lampiran 24**.

### 5.3.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.866.176.536.837,11 | Rp1.794.716.461.553,00 |

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.866.176.536.837,11 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

**Tabel 5. 73 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| Saldo Awal | Penambahan | (Pengurangan) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| 1.794.716.461.553,00 | 79.423.612.634,46 | (7.963.537.350,35) | 1.866.176.536.837,11 |

Rekapitulasi mutasi jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 74 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024**

| URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Awal** | **1.794.716.461.553,00** | **1.794.716.461.553,00** |
| **Mutasi Bertambah** | **79.423.612.634,46** | **-** |
| - Belanja Modal TA 2024 | 56.854.991.209,34 | - |
| - Belanja dari dana BTT Tahun 2024 | 3.356.488.220,00 | - |
| - Biaya Umum Pengadaan | 48.759.100,00 | - |
| - Hibah | 15.476.532.764,00 | - |
| - Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D | 73.270.000,00 | - |
| - Reklasifikasi dari beban barang ekstrakompatabel ke KIB D | 383.555.000,00 | - |
| - Utang BKPSU 2024 | 1.896.141.000,00 | - |
| - Mutasi Antar SKPD | 1.316.588.240,00 | - |
| - Koreksi | 17.287.101,12 | |
| **Mutasi Berkurang** | **(7.963.537.350,35)** | **-** |
| - Reklasifikasi KIB D ke KIB B | 3.265.024.786,00 | - |
| - Rusak Berat 2024 | 493.798.300,00 | - |
| - Reklasifikasi ke Beban BHP | 829.597.795,00 | - |
| - Mutasi Antar SKPD | 1.275.298.070,00 | - |
| - Reklasifikasi KIB D ke Aset lain-lain atas kelebihan Pembayaran Belanja Modal | 2.082.531.299,35 | |
| - Reklasifikasi KIB D ke Beban Jasa Konsultan | 17.287.100,00 | |
| **Saldo akhir** | **1.866.176.536.837,11** | **1.794.716.461.553,00** |

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp79.423.612.634,46 terdiri dari :
   a. Pengadaan belanja modal sebesar Rp56.854.991.209,34.

b. Adanya pengadaan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.356.488.220,00.

c. Reklasifikasi dari beban yakni Biaya Umum Pengadaan sebesar Rp48.759.100,00.

d. Adanya Hibah Pemerintah Pusat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp15.476.532.764,00.

e. Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D sebesar Rp73.270.000,00 pada Kantor Kecamatan Tarutung.

f. Adanya Reklasifikasi dari beban barang ekstrakompatabel ke KIB D sebesar Rp383.555.000,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5. 75 Rekapitulasi Reklasifikasi dari Barang Pakai Habis ke KIB D Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Kantor Kecamatan Tarutung | 172.555.000,00 |
| 2. | Kantor Kecamatan Pahae Julu | 127.600.000,00 |
| 3. | Kantor Kecamatan Siborongborong | 83.400.000,00 |
| **Total** | | **383.555.000,00** |

g. Adanya utang jangka pendek Utang BKPSU Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.896.141.000,00.

h. Adanya mutasi antar SKPD sebesar Rp1.316.588.240,00.

i. Adanya koreksi ekuitas Tahun sebelumnya sebesar Rp17.287.101,12.

2. Mutasi berkurang sebesar Rp7.963.537.350,35 terdiri dari:

a. Reklasifikasi KIB D ke KIB B sebesar Rp3.265.024.786,00 dengan uraian SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5. 76 Rekapitulasi Reklasifikasi KIB D ke KIB B Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Kesehatan | 2.378.000.000,00 |
| 2. | Dinas Pariwisata | 887.024.786,00 |
| **Total** | | **3.265.024.786,00** |

b. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya (rusak berat) sebesar Rp493.798.300,00 pada Kantor Kecamatan Pahae Jae akibat bencana alam.

c. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp829.597.795,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

d. Mutasi Antar SKPD sebesar Rp 1.275.298.070,00.

e. Reklasifikasi KIB D ke Aset lain-lain atas kelebihan Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp2.082.531.299,35 dengan uraian SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5. 77 Rekapitulasi Reklasifikasi KIB D ke Aset lain-lain Kelebihan Pembayaran Belanja Modal**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2.044.433.320,25 |
| 2. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 21.766.745,61 |
| 3. | Dinas Pariwisata | 16.331.233,49 |
| **Total** | | **2.082.531.299,35** |

f. Reklasifikasi KIB D ke beban Jasa Konsultan kesalahan pencatatan aset sebesar Rp17.287.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tercantum dalam **lampiran 25**.

### 5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp31.075.123.196,00 | Rp23.063.611.668,00 |

Saldo aset tetap lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp31.075.123.196,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 5. 78 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

| Saldo Awal | Penambahan | (Pengurangan) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| 23.063.611.668,00 | 8.311.433.319,00 | (299.921.791,00) | 31.075.123.196,00 |

Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 79 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024**

| URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Awal** | **23.063.611.668,00** | **23.063.611.668,00** |
| **Mutasi Bertambah** | **8.311.433.319,00** | **-** |
| - Belanja Modal TA 2024 | 111.469.430,00 | - |
| - Pengadaan BOP PAUD 2024 | 10.255.000,00 | - |
| - Reklasifikasi dari KIB B | 8.189.708.889,00 | - |
| **Mutasi Berkurang** | **(299.921.791,00)** | **-** |
| - Rusak Berat Tahun 2024 | (231.096.037,00) | - |
| - Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel | (68.825.754,00) | - |
| **Saldo akhir** | **31.075.123.196,00** | **23.063.611.668,00** |

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp8.311.433.319,00 terdiri dari :
   a. Pengadaan Belanja Modal sebesar Rp111.469.430,00.

b. Reklas dari beban hibah Pengadaan BOP PAUD 2024 sebesar Rp10.255.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Adanya reklasifikasi ke KIB B sebesar Rp8.189.708.889,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Mutasi berkurang sebesar Rp299.921.791,00 terdiri dari:

a. Reklasifikasi ke Rusak Berat Tahun 2024 sebesar Rp231.096.037,00 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5. 80 Rekapitulasi Reklasifikasi KIB E ke Aset Rusak Berat Tahun 2024**

| NO | SKPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Pendidikan | 220.050.583,00 |
| 2. | Badan Keuangan dan Aet Daerah | 11.045.454,00 |
| **Total** | | **231.096.037,00** |

b. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa ekstrakompatabel sebesar Rp68.825.754,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp62.478.774,00 dan Dinas Perpustakaan sebesar Rp6.346.980,00.

Rincian nilai aset tetap lainnya per SKPD tercantum dalam **lampiran 26.**

### 5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Tahun 2024 adalah sebesar Rp00.

### 5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp1.612.384.019.485,52) | (Rp1.474.610.605.271,00) |

Saldo akumulasi penyusutan Tahun 2024 adalah sebesar (Rp1.612.384.019.485,52) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 81 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023**

| No | Uraian | Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 | Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 | Penambahan/ Pengurangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan dan Mesin | (359.895.872.089,23) | (324.643.756.708,81) | (35.252.115.380,42) |
| 2 | Gedung dan Bangunan | (212.471.862.926,01) | (196.556.442.740,35) | (15.915.420.185,66) |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | (1.033.833.013.364,86) | (947.778.926.059,77) | (86.054.087.305,09) |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | (6.183.271.105,42) | (5.631.479.762,07) | (551.791.343,35) |
| **Jumlah** | | **(1.612.384.019.485,52)** | **(1.474.610.605.271,00)** | **(137.773.414.214,52)** |

Akumulasi penyusutan Tahun 2024 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya pada Tahun berjalan serta saldo awal akumulasi penyusutan aset Tahun 2023.

Selain aset tetap Tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan di atas, masih terdapat aset ekstrakompatabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya di bawah kapitalisasi yang tidak dicatat pada neraca laporan keuangan dengan rincian berikut.

**Tabel 5. 82 Rekapitulasi Aset Ekstrakompatabel**

| No | SKPD | Jumlah Akhir | | Jumlah Total 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | Baik 2024 | Rusak Berat 2024 | |
| 1 | Sekretariat DPRD | 202.959.364,00 | 5.872.500,00 | 208.831.864,00 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 337.636.811,00 | 1.960.500.067,00 | 2.298.136.878,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 163.639.711,00 | 5.940.000,00 | 169.579.711,00 |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 21.493.780.902,00 | 3.940.029,00 | 21.497.720.931,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 50.034.148,00 | 31.359.191,00 | 81.393.339,00 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 220.194.220,00 | 3.122.276,00 | 223.316.496,00 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 4.671.975.879,00 | 1.072.491.916,00 | 5.744.467.795,00 |
| 8 | Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung | 1.539.818.775,00 | 98.275.644,00 | 1.638.094.419,00 |
| 9 | Dinas Pendidikan | 146.839.039.167,92 | 6.233.156.458,00 | 153.072.195.625,92 |
| 10 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 13.059.200,00 | 0,00 | 13.059.200,00 |
| 11 | Dinas Sosial | 23.064.800,00 | 3.600.000,00 | 26.664.800,00 |
| 12 | Dinas Ketenagakerjaan | 78.343.469,00 | 299.999,00 | 78.643.468,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 18.247.859,00 | 10.215.426,00 | 28.463.285,00 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7.080.000,00 | 1.855.972,00 | 8.935.972,00 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.012.380.264,00 | 15.392.000,00 | 1.027.772.264,00 |
| 16 | Dinas Pertanian | 134.560.075,00 | 114.240.767,00 | 248.800.842,00 |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 466.145.070,00 | 26.491.907,00 | 492.636.977,00 |
| 18 | Inspektorat | 0,00 | 7.973.336,00 | 7.973.336,00 |
| 19 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 41.084.290,00 | 437.160,00 | 41.521.450,00 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 441.360.049,00 | 25.618.896,00 | 466.978.945,00 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 1.986.127.564,00 | 19.247.664,00 | 2.005.375.228,00 |
| 22 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 15.215.635,00 | 449.000,00 | 15.664.635,00 |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja | 133.009.987,00 | 27.084.025,00 | 160.094.012,00 |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 74.005.684,00 | 4.839.480,00 | 78.845.164,00 |
| 25 | Kantor Kecamatan Tarutung | 284.215.500,00 | 5.066.180,00 | 289.281.680,00 |
| 26 | Kantor Kecamatan Adiankoting | 33.701.206,00 | 5.233.985,00 | 38.935.191,00 |
| 27 | Kantor Kecamatan Siatas Barita | 38.930.000,00 | 17.670.000,00 | 56.600.000,00 |
| 28 | Kantor Kecamatan Pahae Julu | 34.446.412,00 | 3.354.000,00 | 37.800.412,00 |
| 29 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | 57.183.220,00 | 2.250.000,00 | 59.433.220,00 |
| 30 | Kantor Kecamatan Purbatua | 29.361.690,00 | 5.929.940,00 | 35.291.630,00 |
| 31 | Kantor Kecamatan Simangumban | 25.100.000,00 | 21.775.775,00 | 46.875.775,00 |
| 32 | Kantor Kecamatan Sipoholon | 12.748.180,00 | 0,00 | 12.748.180,00 |
| 33 | Kantor Kecamatan Parmonangan | 35.081.400,00 | 10.138.745,00 | 45.220.145,00 |
| 34 | Kantor Kecamatan Pagaran | 15.477.106,00 | 769.920,00 | 16.247.026,00 |
| 35 | Kantor Kecamatan Siborong-borong | 90.605.206,00 | 6.095.000,00 | 96.700.206,00 |
| 36 | Kantor Kecamatan Muara | 38.856.911,00 | 650.000,00 | 39.506.911,00 |
| 37 | Kantor Kecamatan Sipahutar | 18.667.206,00 | 9.147.382,00 | 27.814.588,00 |
| 38 | Kantor Kecamatan Pangaribuan | 21.059.232,00 | 2.200.000,00 | 23.259.232,00 |

| No | SKPD | Jumlah Akhir | | Jumlah Total 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | Baik 2024 | Rusak Berat 2024 | |
| 39 | Kantor Kecamatan Garoga | 55.977.206,00 | 17.117.095,00 | 73.094.301,00 |
| 40 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.785.535,00 | 3.115.845,00 | 9.901.380,00 |
| 41 | Dinas Perpustakaan | 1.418.293.078,00 | 11.881.100,00 | 1.430.174.178,00 |
| 42 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 180.745.600,00 | 18.072.109,00 | 198.817.709,00 |
| 43 | Badan Pendapatan Daerah | 4.213.000,00 | 0,00 | 4.213.000,00 |
| 44 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 354.197.972,00 | 3.097.980,00 | 357.295.952,00 |
| 45 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 26.534.398,00 | 40.708.341,00 | 67.242.739,00 |
| **Jumlah** | | **182.744.942.982,92** | **9.856.677.110,00** | **192.601.620.091,92** |

### 5.3.4. Dana Cadangan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Saldo dana cadangan Tahun 2024 adalah Nihil.

### 5.3.5. Aset Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp8.398.676.276,65 | Rp74.919.013.382,00 |

Jumlah saldo aset lainnya Tahun 2024 sebesar Rp8.398.676.276,65 merupakan Aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp2.289.011.614,86, Aset lain-lain sebesar Rp73.677.358.567,17, Akumulasi amortasi tidak berwujud sebesar (Rp1.736.290.832,36), Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp69.150.157.073,02) dan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3.318.754.000,00.

Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

#### 5.3.5.1 Aset Tidak Berwujud

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.289.011.614,86 | Rp2.247.812.604,00 |

Jumlah saldo aset tidak berwujud Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.289.011.614,86, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 83 Saldo Aset Tidak Berwujud**

| No | PERANGKAT DAERAH / URAIAN | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **BKAD** | **363.818.400,00** | **363.818.400,00** | **0,00** |
| 1 | Software Windows | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 2 | Software Database | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Software Aplikasi Sisten Online Payment | 121.120.772,00 | 121.120.772,00 | 0,00 |
| 4 | Software Aplikasi SIP PBB | 198.197.628,00 | 198.197.628,00 | 0,00 |
| **II** | **DINAS PERIZINAN** | **89.280.000,00** | **89.280.000,00** | **0,00** |
| 1 | PIRANTI LUNAK ( SOFTWARE ) | 49.280.000,00 | 49.280.000,00 | 0,00 |
| 2 | WEBSITE | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| **III** | **RSUD TARUTUNG** | **1.221.648.795,00** | **1.221.648.795,00** | **0,00** |
| 1 | SOFTWARE APLIKASI SIMFARS | 40.123.230,00 | 40.123.230,00 | 0,00 |
| 2 | SOFTWARE APLIKASI SIRS | 386.554.244,00 | 386.554.244,00 | 0,00 |
| 3 | Aplikasi Medicine | 33.784.615,00 | 33.784.615,00 | 0,00 |
| 4 | Aplikasi Teleradiologi | 13.363.636,00 | 13.363.636,00 | 0,00 |
| 5 | SIMRS | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | Windows Server 2019 Standard 16 Core OLP NL | 27.603.070,00 | 27.603.070,00 | 0,00 |
| 7 | Software dan API Modul Bridging Ke Sistem BPJS dan Antrian Farmasi Rawat Jalan dan Kiosk | 220.220.000,00 | 220.220.000,00 | 0,00 |
| **IV** | **PERHUBUNGAN** | **114.404.417,00** | **114.404.417,00** | **0,00** |
| 1 | Software Proxid Database Mail | 8.357.340,00 | 8.357.340,00 | 0,00 |
| 2 | Aplikasi SMS Gateway | 25.582.077,00 | 25.582.077,00 | 0,00 |
| 3 | Aplikasi SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara | 80.465.000,00 | 80.465.000,00 | 0,00 |
| **V** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **13.135.602,00** | **13.135.602,00** | **0,00** |
| 1 | Program Aplikasi Rumah Ibadah | 13.135.602,00 | 13.135.602,00 | 0,00 |
| **VI** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | **79.450.000,00** | **79.450.000,00** | **0,00** |
| 1 | Sistem Informasi Adm Kependudukan | 79.450.000,00 | 79.450.000,00 | 0,00 |
| **VII** | **DINAS PMD** | **39.950.000,00** | **39.950.000,00** | **0,00** |
| 1 | Website | 39.950.000,00 | 39.950.000,00 | 0,00 |
| **VIII** | **DINAS PERTANIAN** | **49.918.000,00** | **49.918.000,00** | **0,00** |
| 1 | Website Compane Profile | 49.918.000,00 | 49.918.000,00 | 0,00 |
| **IX** | **BKPSDM** | **74.833.000,00** | **74.833.000,00** | **0,00** |
| 1 | Pembangunan/ Pembuatan WEB SITE BKD | 49.918.000,00 | 49.918.000,00 | 0,00 |
| 2 | Aplikasi SIMPEG PNS | 24.915.000,00 | 24.915.000,00 | 0,00 |
| **X** | **DINAS PENDIDIKAN** | **86.760.000,00** | **86.760.000,00** | **0,00** |
| 1 | SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR | 28.920.000,00 | 28.920.000,00 | 0,00 |
| 2 | SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR | 28.920.000,00 | 28.920.000,00 | 0,00 |
| 3 | SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR | 28.920.000,00 | 28.920.000,00 | 0,00 |
| **XI** | **DINAS PERPUSTAKAAN** | **155.813.400,86** | **114.614.390** | **41.199.010,86** |
| 1 | SOFWARE APLIKASI E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL | 49.937.490,00 | 49.937.490,00 | 0,00 |
| 2 | Software E-Book Perpustakaan Digital / E-Pustaha | 64.676.900,00 | 64.676.900,00 | 0,00 |
| 3 | SOFTWARE E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL / E-PUSTAHA | 41.199.010,86 | 0,00 | 41.199.010,86 |
| | **TOTAL ASET TIDAK BERWUJUD** | **2.289.011.614,86** | **2.247.812.604,00** | **41.199.010,86** |

### 5.3.5.2 Aset Lain-lain

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp73.677.358.567,17 | Rp64.229.535.801,00 |

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.677.358.567,17 dan Tahun 2023 sebesar Rp64.229.535.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.447.822.766,17 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5. 84 Daftar Aset Lain-lain Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aset Rusak Berat | 68.020.656.606,00 | 60.751.104.775,00 | 7.269.551.831,00 |
| 2 | Aset Hilang | 8.450.000,00 | 0,00 | 8.450.000,00 |
| 3 | Aset Tidak Temukan Fisik | 827.859.726,00 | 827.859.726,00 | 0,00 |
| 4 | Aset Lain-Lain Kurang Volume Pekerjaan | 2.169.820.935,17 | 0,00 | 2.169.820.935,17 |
| 5 | Aset Lainnya | 2.650.571.300,00 | 2.650.571.300,00 | 0,00 |
| **Total** | | **73.677.358.567,17** | **64.229.535.801,00** | **9.447.822.766,17** |

Rincian aset lainnya sebagaimana pada **Lampiran 27**.

### 5.3.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp1.736.290.832,36) | (Rp 1.572.716.023,00) |

Jumlah saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 adalah sebesar (Rp1.736.290.832,36). Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 tercantum dalam **Lampiran 28.**

### 5.3.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp69.150.157.073,02) | (Rp0,00) |

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp69.150.157.073,02 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023. Pencatatan akumulasi penyusutan aset lainnya dilakukan pada Tahun 2024 dengan berpedoman pada Buletin Teknis Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, dimana dijelaskan bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Akibat dari reklasifikasi tersebut, maka dilakukan koreksi ekuitas terhadap aset lainnya (rusak berat) yang sebelumnya dicatat sebesar nilai perolehan namun berdasarkan kebijakan akuntansi bahwa pencatatan aset rusak berat diikuti oleh akumulasi penyusutan aset lainnya/rusak berat. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya sebagaimana pada **Lampiran 29**.

#### 5.3.5.5 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp3.318.754.000,00 | Rp10.014.381.000,00 |

Jumlah saldo Dana Bagi Hasil TDF Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.318.754.000,00. Dana Bagi Hasil TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024.

### 5.3.6. Aset Properti

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki aset tetap yang dikategorikan sebagai aset properti yakni menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi yang ditetapkan 23 Januari 2025, sehingga pada LKPD Tahun 2024 aset properti tidak dapat disajikan pada Neraca.

Adapun rincian aset tetap yang menjadi aset properti sebagaimana berikut:

a. Aset yang dimanfaatkan oleh PT. Angkasa Pura yang digunakan untuk Pengembangan Bandara Udara Silangit Siborongborong sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Bandara Silangit Siborongborong dengan PT. Angkasa Pura II Persero sebagai berikut.

**Tabel 5. 85 Rincian Aset Tanah PKS Bandara Udara Silangit**

| No | Nomor Register | Luas | Tahun Pengadaan | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.1.01.003.006.002.01 | 1.036.454,00 | 1960 | Desa Parik Sabungan |
| 2 | 1.3.1.01.003.006.002.02 | 3.000.000,00 | 2015 | Desa Parik Sabungan |

b. Aset tanah yang digunakan oleh pihak penyewa/ Masyarakat untuk Pembangunan kios dan usaha lainnya dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5. 86 Rincian Aset Tanah PKS Bandara Udara Silangit**

| No | Kecamatan | Tanah Sewa (Persil) | |
|---|---|---|---|
| | | Dalam Pekan | Luar Pekan |
| 1 | Kecamatan Tarutung | 3 | 62 |
| 2 | Kecamatan Sipoholon | 5 | - |
| 3 | Kecamatan Pahae Julu | 11 | - |
| 4 | Kecamatan Pahae Jae | 72 | 3 |
| 5 | Kecamatan Simangumban | 14 | - |

| No | Kecamatan | Tanah Sewa (Persil) | |
|---|---|---|---|
| | | Dalam Pekan | Luar Pekan |
| 6 | Kecamatan Sipahutar | 76 | 13 |
| 7 | Kecamatan Garoga | 32 | - |
| 8 | Kecamatan Siborongborong | 143 | 115 |
| 9 | Kecamatan Parmonangan | 9 | - |
| 10 | Kecamatan Muara | 76 | 23 |
| 11 | Kecamatan Pangaribuan | - | 21 |
| **Total** | | **441** | **237** |

Rincian aset tanah yang disewakan kepada pihak ketiga/ Masyarakat sebagaimana pada **Lampiran 30**.

### 5.3.7. Kewajiban

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp312.940.298.062,80 | Rp333.288.956.757,00 |

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp312.940.298.062,80 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 87 Nilai Kewajiban Tahun 2024**

| Uraian | Saldo 2024 | Saldo 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|
| Kewajiban Jangka Pendek | 134.693.386.548,80 | 85.887.281.605,00 | 48.806.104.943,80 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 178.246.911.514,00 | 247.401.675.152,00 | (69.154.763.638,00) |
| **Jumlah Kewajiban** | **312.940.298.062,80** | **333.288.956.757,00** | **(20.348.658.694,20)** |

#### 5.3.7.1 Kewajiban Jangka Pendek

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp134.693.386.548,80 | Rp85.887.281.605,00 |

Saldo kewajiban jangka pendek Tahun 2024 adalah sebesar Rp134.693.386.548,80 dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.3.7.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp9.943.018,92 | Rp0,00 |

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp9.943.018,92 merupakan Utang PPN Pusat atas realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOSP yang belum disetor ke kas negara oleh pihak sekolah per 31 Desember 2024. Seluruh utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2025.

#### 5.3.7.1.2 Utang Bunga

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.305.522.106,00 | Rp3.096.653.900,00 |

Utang Bunga Tahun 2024 sebesar Rp1.305.522.106,00 merupakan utang Bunga pinjaman PEN Tahun 2021 yang akan dibayar pada Tahun 2025 ke PT. SMI (Persero). Berdasarkan akta perjanjian nomor 78 tanggal 17 September 2021, bahwa Pinjaman PEN 2021 wajib membayar bunga sebesar 5,66% (*lima koma enam puluh enam persen*) yang metode pembayarannya dibayarkan setiap bulan. Adapun skema perhitungan utang bunga pinjaman PEN 2021 sebagai berikut.

**Tabel 5. 88 Skema Pembayaran Utang Bunga Pinjaman PEN 2021**

| No | Tahun | Bunga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pinjaman | Pembayaran | Sisa |
| 1 | 2021 | 337.226.338,00 | 337.226.338,00 | 0,00 |
| 2 | 2022 | 3.435.104.579,00 | 3.435.104.579,00 | 0,00 |
| 3 | 2023 | 3.096.653.900,00 | 3.096.653.900,00 | 0,00 |
| 4 | 2024 | 2.207.835.420,00 | 2.207.835.420,00 | 0,00 |
| 5 | 2025 | 1.305.522.106,00 | 0,00 | 1.305.522.106,00 |
| 6 | 2026 | 411.387.506,00 | 0,00 | 411.387.506,00 |
| **Jumlah** | | **10.793.729.849,00** | **9.076.820.237,00** | **1.716.909.612,00** |

#### 5.3.7.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp69.154.763.638,00 | Rp69.282.056.597,00 |

Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp69.154.763.638,00 sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 untuk Tahun 2025 sebesar……..…….. | Rp | 53.201.036.052,00 |
| 2. | Pembayaran pinjaman PEN Tahun 2021 untuk Tahun 2025 sebesar…….... | Rp | 15.605.969.436,00 |
| 3. | Biaya pengelolaan utang PEN Tahun 2020 sebesar… | Rp | 311.669.356,00 |
| 4. | Biaya pengelolaan utang PEN Tahun 2021 sebesar… | Rp | 36.088.794,00 |
| | **Total** | **Rp** | **69.154.763.638,00** |

#### 5.3.7.1.4 Pendapatan Diterima dimuka

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp261.738.734,25 | Rp266.221.267,00 |

Saldo Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp261.738.734,25 merupakan pendapatan dari Pajak Reklame dimana jumlah realisasi Pajak Reklame selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp788.144.654,50 untuk jangka waktu perjanjian selama 1 Tahun. Setelah dilakukan perhitungan, pendapatan yang diterima murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp526.405.920,25 sehingga selisihnya sebesar Rp261.738.734,25 merupakan pendapatan diterima di muka.

#### 5.3.7.1.5 Utang Belanja

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp63.961.419.051,63 | Rp13.242.349.841,00 |

Saldo utang belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp63.961.419.051,63 merupakan utang belanja yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 89 Utang Belanja Tahun 2024**

| NO | SKPD URAIAN | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utang Belanja Modal | 1.980.482.451,63 | 25.132.000,00 | 1.955.350.451,63 |
| 2 | Utang Belanja Pegawai | 33.616.909.277,00 | 461.992.677,00 | 33.154.916.600,00 |
| 3 | Utang Belanja Barang dan Jasa | 278.685.790,00 | 772.500,00 | 277.913.290,00 |
| 4 | Utang Belanja BLUD | 14.497.289.749,00 | 12.754.452.664,00 | 1.742.837.085,00 |
| 5 | Utang Belanja Alokasi Dana Desa | 13.588.051.784,00 | - | 13.588.051.784,00 |
| **Total** | | **63.961.419.051,63** | **13.242.349.841,00** | **50.719.069.210,63** |

Rincian utang belanja per SKPD sebagaimana pada **Lampiran 31**.

Terkait dengan utang belanja Tahun 2024 tersebut, sudah terdapat pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang dirincikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 90 Daftar Utang Belanja yang telah dibayarkan pada Tahun 2025**

| No | SKPD URAIAN | JUMLAH | NOMOR SP2D | TANGGAL SP2D |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | **1.896.141.000,00** | | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partali Julu Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 142.175.000,00 | 12.02/04.0/000016/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 15 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simanungkalit Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 142.090.000,00 | 12.02/04.0/000023/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P4/4/2025 | 23 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sialang Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 165.955.000,00 | 12.02/04.0/000022/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 17 April 2025 |
| | Pembangunan Jalan Aek Rangat Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 142.200.000,00 | 12.02/04.0/000025/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P4/4/2025 | 23 April 2025 |
| | Rekonstruksi Jalan Simangumban - Hopong Kec. Simangumban Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 142.250.000,00 | 12.02/04.0/000026/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P4/4/2025 | 30 April 2025 |
| | Rekonstruksi Jalan Simatemate - Aek Godang Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 142.180.000,00 | 12.02/04.0/000027/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P4/4/2025 | 30 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jalan Hutaginjang - Sitanggor Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 189.635.000,00 | 12.02/04.0/000021/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 17 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jalan Onan Runggu - Silimabahal - Hutagurgur Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 166.005.000,00 | 12.02/04.0/000020/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 17 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jalan Menuju Sigala-gala Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 141.900.000,00 | 12.02/04.0/000024/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P4/4/2025 | 23 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar II Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 142.135.000,00 | 12.02/04.0/000018/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 15 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jalan Rappa - Tumus - Hajoran Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU) | 189.760.000,00 | 12.02/04.0/000017/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 15 April 2025 |
| | Rehabilitasi Jalan Rappa - Batu Arimo - Batas Tapanuli Tengah Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara (BKP- SU) | 189.856.000,00 | 12.02/04.0/000019/LS /1.03.0.00.0.00.01.000 0/P3/4/2025 | 15 April 2025 |
| **2.** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **20.320.930.008,00** | | |
| | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Carry Over Tahun 2024 | 12.267.545.784,00 | 12.02/04.0/000017/LS /1.01.2.22.0.00.01.000 0/P2/3/2025 | 13 Maret 2025 |
| | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK Carry Over Tahun 2024 | 1.700.447.424,00 | 12.02/04.0/000018/LS /1.01.2.22.0.00.01.000 0/P2/3/2025 | 13 Maret 2025 |
| | Pembayaran Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2024 | 5.814.732.000,00 | 12.02/04.0/000026/LS /1.01.2.22.0.00.01.000 0/P2/3/2025 | 27 Maret 2025 |

| No | SKPD URAIAN | JUMLAH | NOMOR SP2D | TANGGAL SP2D |
|---|---|---|---|---|
| | Pembayaran Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan Profesi Guru PPPK Tahun 2024 | 538.204.800,00 | 12.02/04.0/000027/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025 | 27 Maret 2025 |
| **3.** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **13.588.051.784,00** | | |
| | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2024 Untuk 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Desa Dari 15 (Lima Belas) Kecamatan | 13.588.051.784,00 | 12.02/04.0/000007/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/2/2025 | 06 Februari 2025 |
| **Total** | | **35.805.122.792,00** | | |

#### 5.3.7.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2024 adalah Nihil.

### 5.3.7.2 Kewajiban Jangka Panjang

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp178.246.911.514,00 | Rp247.401.675.152,00 |

Saldo Kewajiban jangka panjang Tahun 2024 sebesar Rp178.246.911.514,00 Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 91 Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024**

| NO | URAIAN | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Pembangunan Pusat Pasar Tarutung | 3.986.668.168,00 | 3.986.668.168,00 |
| 2 | Kewajiban Pinjaman PEN 2020 | 159.603.082.645,00 | 212.804.118.697,00 |
| 3 | Kewajiban Pinjaman PEN 2021 | 14.305.466.383,00 | 29.911.435.819,00 |
| 4 | Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2020 | 344.476.567,00 | 656.145.923,00 |
| 5 | Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2021 | 7.217.751,00 | 43.306.545,00 |
| **Total** | | **178.246.911.514,00** | **247.401.675.152,00** |

1. Utang Pembangunan Pusat Pasar Tarutung yang telah rusak total akibat gempa bumi Tahun 1987 sebesar Rp3.986.668.168,00 kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Utang pembangunan Pasar Harungguan Tarutung dari PT Bank Dagang Negara Cabang Sibolga telah diusulkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk dihapuskan sesuai dengan surat permohonan Nomor 900/3833/1999 tanggal 8 Juli 1999 kepada Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Sejak Tahun 1988 utang pokok dan bunga

tidak pernah diangsur. Lokasi Pasar Harungguan Tarutung telah menjadi bangunan perkantoran SKPD. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan permohonan penghapusan kredit investasi sesuai dengan Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 900/1962/Dipenloka.III/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Penghapusan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini.

2. Kewajiban Pinjaman PEN 2020 dengan pinjaman sebesar Rp319.206.190.801,00 dan Kewajiban pinjaman PEN 2021 sebesar Rp70.226.856.862,00. Rincian Kewajiban Pinjaman PEN sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 92 Tabel Pinjaman PEN 2020 dan Pinjaman PEN 2021**

| No | Tahun | Jenis | Kontrak | Pemberi Pinjaman | Masa Jatuh Tempo | Jumlah Pinjaman | Biaya Pengelolaan | Bunga Pinjaman | Provisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Pinjaman PEN 2020 | Akta Perjanjian Nomor 29 | PT. SMI | 96 Bulan | 319.206.190.801,00 | 3.360.152.790,00 | 0,00 | 3.192.061.908,00 |
| 2 | 2021 | Pinjaman PEN 2021 | Akta Perjanjian Nomor 78 | PT. SMI | 60 Bulan | 70.226.856.862,00 | 460.459.687,00 | 10.793.729.849,00 | 702.268.569,00 |
| **Total** | | | | | | **389.433.047.663,00** | **3.820.612.477,00** | **10.793.729.849,00** | **3.894.330.477,00** |

Adapun penjelasan pembayaran Pinjaman PEN adalah sebagai berikut.

- Kewajiban Pinjaman PEN 2020 atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020 dengan pinjaman sebesar Rp319.206.190.801,00 berdasarkan akta perjanjian nomor 29 tanggal 23 Oktober 2020. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 96 Bulan dengan mekanisme pembayaran pokok utang dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum. Adapun skema pembayaran Pinjaman PEN 2020 pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 93 Skema Pembayaran Pinjaman PEN 2020**

| No | Tahun | Pokok | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pinjaman | Pembayaran | Sisa |
| 1 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2022 | 4.433.419.671,00 | 0,00 | 4.433.419.671,00 |
| 4 | 2023 | 53.201.036.052,00 | 53.201.036.052,00 | 0,00 |
| 5 | 2024 | 53.201.036.052,00 | 53.201.036.052,00 | 0,00 |
| 6 | 2025 | 53.201.036.052,00 | 53.201.036.052,00 | 0,00 |
| 7 | 2026 | 53.201.036.052,00 | 0,00 | 53.201.036.052,00 |
| 8 | 2027 | 53.201.036.052,00 | 0,00 | 53.201.036.052,00 |
| 9 | 2028 | 48.767.590.870,00 | 0,00 | 48.767.590.870,00 |
| **Jumlah** | | **319.206.190.801,00** | **159.603.108.156,00** | **159.603.082.645,00** |

Berdasarkan tabel di atas, Pinjaman PEN Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2024 sebesar Rp106.402.072.104,00 kemudian diakui menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan

untuk Tahun 2025 sebesar Rp53.201.036.052,00 sehingga sisa pinjaman PEN Tahun 2020 sebesar Rp159.603.082.645,00;

- Kewajiban Pinjaman PEN 2021 atas Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp70.226.856.862,00 berdasarkan akta perjanjian nomor 78 tanggal 17 September 2021. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan dengan mekanisme pembayaran dilakukan setiap bulan dan dibayarkan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan. Adapun skema pembayaran Pinjaman PEN 2021 pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 94 Skema Pembayaran Pinjaman PEN 2021**

| No | Tahun | Pokok | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pinjaman | Pembayaran | Sisa |
| 1 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2022 | 9.103.482.171,00 | 9.103.482.171,00 | 0,00 |
| 3 | 2023 | 15.605.969.436,00 | 15.605.969.436,00 | 0,00 |
| 4 | 2024 | 15.605.969.436,00 | 15.605.969.436,00 | 0,00 |
| 5 | 2025 | 15.605.969.436,00 | 15.605.969.436,00 | 0,00 |
| 6 | 2026 | 14.305.466.383,00 | 0,00 | 14.305.466.383,00 |
| **Jumlah** | | **70.226.856.862**,00 | **55.921.390.479**,00 | **14.305.466.383**,00 |

Berdasarkan tabel di atas, Pinjaman PEN 2021 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2024 sebesar Rp40.315.421.043,00 kemudian menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2025 sebesar Rp15.605.969.436,00 sehingga sisa pinjaman PEN 2021 sebesar Rp14.305.466.383,00.

- Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 95 Skema Pembayaran Biaya Pengelolaan PEN 2020**

| No | Tahun | Biaya Pengelolaan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pinjaman | Pembayaran | Sisa |
| 1 | 2020 | 604.339.500,00 | 604.339.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2021 | 590.531.453,00 | 590.531.453,00 | 0,00 |
| 3 | 2022 | 590.531.453,00 | 590.531.453,00 | 0,00 |
| 4 | 2023 | 508.513.189,00 | 508.513.189,00 | 0,00 |
| 5 | 2024 | 410.091.272,00 | 410.091.272,00 | 0,00 |
| 6 | 2025 | 311.669.356,00 | 311.669.356,00 | 0,00 |
| 7 | 2026 | 213.247.439,00 | 0,00 | 213.247.439,00 |
| 8 | 2027 | 114.825.522,00 | 0,00 | 114.825.522,00 |
| 9 | 2028 | 16.403.606,00 | 0,00 | 16.403.606,00 |
| **Jumlah** | | **3.360.152.790,00** | **3.015.676.223,00** | **344.476.567,00** |

Berdasarkan tabel di atas, biaya pengelolaan Pinjaman PEN 2020 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2024 sebesar Rp2.704.006.867,00 kemudian menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2025 sebesar Rp311.669.356,00 sehingga sisa biaya pengelolaan pinjaman PEN 2020 sebesar Rp344.476.567,00.

- Kewajiban biaya pengelolaan PEN Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 96 Skema Pembayaran Biaya Pengelolaan PEN 2021**

| No | Tahun | Biaya Pengelolaan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pinjaman | Pembayaran | Sisa |
| 1 | 2021 | 135.660.500,00 | 135.660.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2022 | 122.701.924,00 | 122.701.924,00 | 0,00 |
| 3 | 2023 | 93.830.881,00 | 93.830.881,00 | 0,00 |
| 4 | 2024 | 64.959.837,00 | 64.959.837,00 | 0,00 |
| 5 | 2025 | 36.088.794,00 | 36.088.794,00 | 0,00 |
| 6 | 2026 | 7.217.751,00 | 0,00 | 7.217.751,00 |
| **Jumlah** | | **460.459.687,00** | **453.241.936,00** | **7.217.751,00** |

Berdasarkan tabel di atas, biaya pengelolaan Pinjaman PEN 2021 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2024 sebesar Rp417.153.142,00 kemudian menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2025 sebesar Rp36.088.794,00 sehingga sisa biaya pengelolaan pinjaman PEN 2025 sebesar Rp7.217.751,00.

Total Pinjaman utang PEN Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp389.433.047.663,00 dan telah dibayarkan hingga Tahun 2024 sebesar Rp146.717.493.147,00 serta adanya pengakuan bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan untuk Tahun 2025 sebesar Rp68.807.005.488,00 sehingga kewajiban jangka panjang dana PEN yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp173.908.549.028,00.

### 5.3.8. Ekuitas

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.271.720.431.485,17 | Rp2.331.755.925.727,85 |

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/ dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 2.331.755.925.727,85 |
| Surplus/ (defisit)-LO | 14.099.381.486,46 |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | (74.134.875.729,14) |
| **Ekuitas Akhir** | **2.271.720.431.485,17** |

Surplus/ (defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan

penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

## 5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2024.

### 5.4.1. Pendapatan - LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.296.265.579.561,53 | Rp1.215.064.466.924,00 |

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.296.265.579.561,53 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.215.064.466.924,00 mengalami kenaikan sebesar Rp81.201.112.637,53. Rincian realisasi pendapatan-LO sebagai berikut.

**Tabel 5. 97 Pendapatan – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Pendapatan** | **1.296.265.579.561,53** | **1.215.064.466.924,00** | **81.201.112.637,53** | **6,68** |
| 7.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO | 136.070.840.715,53 | 137.675.954.732,00 | (1.605.114.016,47) | (1,17) |
| 7.2 | Pendapatan Transfer-LO | 1.122.369.538.601,00 | 1.053.305.816.323,00 | 69.063.722.278,00 | 6,56 |
| 7.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 37.825.200.245,00 | 24.082.695.869,00 | 13.742.504.376,00 | 57,06 |

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp136.070.840.715,53 | Rp137.675.954.732,00 |

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp136.070.840.715,53 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.675.954.732,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.605.114.016,47 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 98 Pendapatan Asli Daerah – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.1** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO** | **136.070.840.715,53** | **137.675.954.732,00** | **(1.605.114.016,47)** | **(1,17)** |
| 7.1.01 | Pajak Daerah-LO | 29.926.455.596,76 | 29.585.342.286,00 | 341.113.310,76 | 1,15 |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO | 93.867.166.523,78 | 5.433.466.911,00 | 88.433.699.612,78 | 1.627,57 |
| 7.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 8.451.510.307,00 | 8.139.637.407,00 | 311.872.900,00 | 3,83 |
| 7.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 3.825.708.287,99 | 94.517.508.128,00 | (90.691.799.840,01) | (95,95) |

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp29.926.455.596,76 | Rp29.585.342.286,00 |

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp29.926.455.596,76 dan Tahun 2023 sebesar Rp29.926.455.596,76 mengalami kenaikan sebesar Rp341.113.310,76. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 99 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO**

| No | Uraian | LRA 2024 | Penambah | Pengurang | Pendapatan Pajak Daerah-LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pajak Restoran-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pajak Hiburan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Reklame-LO | 788.534.544,00 | 266.221.267,00 | 261.738.734,25 | 793.017.076,75 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pajak Parkir-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah-LO | 159.604.485,00 | 0,00 | 0.00 | 159.604.485,00 |
| 8 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO | 3.244.930.057,81 | 0,00 | 370.920.000,00 | 2.874.010.057,81 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO | 4.320.046.412,00 | 3.148.412.236,00 | 507.239.918,00 | 6.961.218.730,00 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO | 5.743.659.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743.659.450,00 |
| 11 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 13.406.963.797,20 | 0,00 | 12.018.000,00 | 13.394.945.797,20 |
| **Jumlah** | | **27.663.738.746,01** | **3.414.633.503,00** | **1.151.916.652,25** | **29.926.455.596,76** |

Jika dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp27.663.738.746,01 dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp29.926.455.596,76 terdapat selisih lebih sebesar Rp2.262.716.850,75. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp3.414.633.503,00 yaitu piutang pajak PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp3.148.412.236,00 ditambah pendapatan reklame diterima dimuka sebesar Rp261.738.734,25. Kemudian adanya pengurang pendapatan Pajak Daerah-LO

sebesar Rp1.151.916.652,25 yaitu penerimaan pembayaran piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp370.920.000,00, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp507.239.918,00, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp12.018.000,00 ditambah penerimaan pendapatan reklame diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp266.221.267,00.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp93.867.166.523,78 | Rp5.433.466.911,00 |

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp93.867.166.523,78 dan Tahun 2023 sebesar Rp5.433.466.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp88.433.699.612,78. Kenaikan pendapatan retribusi yang cukup signifikan diakibatkan pencatatan pendapatan BLUD yang sebelumnya pada akun lain-lain PAD yang sah menjadi pendapatan retribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD TA 2024. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 100 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

| No | JENIS RETRIBUSI | LRA 2024 | Penambah | Pengurang | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO | 88.404.051.564,00 | 49.129.000,00 | 0,00 | 88.453.180.564,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO | 36.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar-LO | 932.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932.934.000,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO | 389.210.900,00 | 0,00 | 0,00 | 389.210.900,00 |
| 5 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO | 12.639.003,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639.003,00 |
| 6 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO | 35.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.543.000,00 |
| 7 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO | 102.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.404.000,00 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO | 12.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750.000,00 |
| 9 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO | 298.016.963,00 | 0,00 | 0,00 | 298.016.963,00 |
| 10 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO | 956.418.625,78 | 91.711.268,00 | 58.650.623,00 | 989.479.270,78 |
| 11 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO | 2.510.704.563,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.704.563,00 |
| 12 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO | 94.204.260,00 | 0,00 | 0,00 | 94.204.260,00 |
| **Jumlah** | | **93.784.976.878,78** | **140.840.268,00** | **58.650.623,00** | **93.867.166.523,78** |

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp93.784.976.878,78 dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar

Rp93.867.166.523,78 terdapat selisih lebih sebesar Rp82.189.645,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp140.840.268,00 yaitu pencatatan kas di bendahara penerimaan pelayanan retribusi Kesehatan pada FKTP sebesar Rp49.129.000,00 dan pencatatan piutang retribusi pemanfaatan aset sewa tanah Tahun 2024 sebesar sebesar Rp91.711.268,00. Kemudian adanya pengurang pendapatan retribusi Daerah-LO sebesar Rp58.650.623,00 yaitu penerimaan pembayaran piutang retribusi pemanfaatan aset sewa tanah pada Tahun 2024.

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp8.451.510.307,00 | Rp8.139.637.407,00 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 realisasi sebesar Rp8.451.510.307,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp8.139.637.407,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 311.872.900,00 terdiri dari PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp8.451.510.307,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

#### 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp3.825.708.287,99 | Rp94.517.508.128,00 |

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah–LO Tahun 2024 sebesar Rp3.825.708.287,99 dan Tahun 2023 sebesar Rp94.517.508.128,00 mengalami penurunan sebesar Rp90.691.799.840,01. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah–LO Tahun 2024 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 101 Rincian Lain-lain PAD yang sah – LO**

| No | Uraian | LRA | Penambahan | Pengurangan | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO | 340.713.000,00 | 0,00 | 340.713.000,00 | 0,00 |
| 2 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO | 43.030.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.030.100,00 |
| 3 | Hasil Sewa BMD-LO | 1.543.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543.875,00 |
| 4 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO | 510.845.860,00 | 0,00 | 0,00 | 510.845.860,00 |
| 5 | Hasil Kerja Sama Daerah-LO | 103.877.640,00 | 0,00 | 0,00 | 103.877.640,00 |
| 6 | Jasa Giro pada Kas Daerah-LO | 377.327.454,00 | 0,00 | 0,00 | 377.327.454,00 |

| No | Uraian | LRA | Penambahan | Pengurangan | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO | 0,00 | 128.620.357,59 | 0,00 | 128.620.357,59 |
| 8 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO | 188.803.053,00 | 0,00 | 0,00 | 188.803.053,00 |
| 9 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 842.476.529,61 | 0,00 | 0,00 | 842.476.529,61 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja -LO | 1.346.209.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.209.488,00 |
| 11 | Pendapatan dari BLUD-LO | 0,00 | 675.575.730,79 | 392.601.800,00 | 282.973.930,79 |
| | **Jumlah** | **3.754.826.999,61** | **804.196.088,38** | **733.314.800,00** | **3.825.708.287,99** |

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp3.754.826.999,61 dengan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp3.825.708.287,99 terdapat selisih lebih sebesar Rp70.881.288,38. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Daerah-LO sebesar Rp804.196.088,38 yaitu pencatatan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2024 yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp128.620.357,59 ditambah piutang Pendapatan dari BLUD sebesar Rp675.575.730,79. Kemudian adanya pengurang pendapatan Lain-lain PAD yang Sah -LO sebesar Rp733.314.800,00 yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke surplus penjualan aset peralatan dan mesin sebesar Rp340.713.000,00 dan adanya penerimaan pembayaran piutang Pendapatan dari BLUD pada Tahun 2024 sebesar Rp392.601.800,00.

### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.122.369.538.601,00 | Rp1.053.305.816.323,00 |

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pendapatan transfer-LO Tahun 2024 realisasi sebesar Rp1.122.369.538.601,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.053.305.816.323,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.063.722.278,00 atau naik 6,56%. Rincian pendapatan transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 102 Rincian Pendapatan Transfer – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.2** | **Pendapatan Transfer-LO** | **1.122.369.538.601,00** | **1.053.305.816.323,00** | **69.063.722.278,00** | **6,56** |
| 7.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 1.023.021.618.029,00 | 998.593.456.950,00 | 24.428.161.079,00 | 2,45 |
| 7.2.02 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | 6.867.270.000,00 | 0,00 | 6.867.270.000,00 | 0,00 |
| 7.2.03 | Pendapatan Transfer Antar | 90.484.509.572,00 | 54.712.359.373,00 | 35.772.150.199,00 | 65,38 |

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Daerah-LO | | | | |
| 7.2.04 | Bantuan Keuangan - LO | 1.996.141.000,00 | 0,00 | 1.996.141.000,00 | 0,00 |

#### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.023.021.618.029,00 | Rp998.593.456.950,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.023.021.618.029,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp998.593.456.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.428.161.079,00. Rincian Pendapatan dari Tranfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 103 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO**

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO | 57.933.172.000,00 | 71.999.617.033,00 | (14.066.445.033,00) | (19,54) |
| 7.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO | 681.275.700.613,00 | 627.696.920.000,00 | 53.578.780.613,00 | 8,54 |
| 7.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO | 92.466.086.003,00 | 103.496.236.437,00 | (11.030.150.434,00) | (10,66) |
| 7.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO | 191.346.659.413,00 | 184.576.216.480,00 | 6.770.442.933,00 | 3,67 |
| 7.2.01.01.05 | Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal | 0,00 | 10.824.467.000,00 | (10.824.467.000,00) | 0,00 |
| **7.2.01** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO** | **1.023.021.618.029,00** | **998.593.456.950,00** | **24.428.161.079,00** | **2,45** |

##### 5.4.1.2.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp57.933.172.000,00 | Rp71.999.617.033,00 |

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2024 sebesar Rp57.933.172.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp71.999.617.033,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.066.445.033,00. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 104 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO**

| NO | Uraian | LRA | Penambahan | Pengurangan | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBH PBB-LO | 36.960.795.000,00 | 3.318.754.000,00 | 0,00 | 40.279.549.000,00 |
| 2 | DBH PPh Pasal 21-LO | 7.912.909.000,00 | 0,00 | 1.389.071.000,00 | 6.523.838.000,00 |

| NO | Uraian | LRA | Penambahan | Pengurangan | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN-LO | 373.099.000,00 | 0,00 | 6.612.020.000,00 | (6.238.921.000,00) |
| 4 | DBH CHT-LO | 1.990.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.142.000,00 |
| 5 | DBH SDA Minyak Bumi-LO | 244.802.000,00 | 0,00 | 8.568.000,00 | 236.234.000,00 |
| 6 | DBH SDA Gas Bumi-LO | 5.200.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.800,00 |
| 7 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO | 113.922.200,00 | 0,00 | 37.375.000,00 | 76.547.200,00 |
| 8 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO | 1.595.527.000,00 | 0,00 | 70.167.000,00 | 1.525.360.000,00 |
| 9 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO | 7.098.888.000,00 | 0,00 | 1.897.180.000,00 | 5.201.708.000,00 |
| 10 | DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO | 228.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.713.000,00 |
| 11 | DBH SDA Perikanan-LO | 1.167.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.186.000,00 |
| 12 | DBH Sawit-LO | 6.937.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937.615.000,00 |
| **Jumlah** | | **64.628.799.000,00** | **3.318.754.000,00** | **10.014.381.000,00** | **57.933.172.000,00** |

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA sebesar Rp64.628.799.000,00 dengan realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp57.933.172.000,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp6.695.627.000,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Dana Bagi Hasil-LO yaitu Aset lain-lain berupa Dana Bagi Hasil TDF Tahun 2024 sebesar Rp3.318.754.000,00. Kemudian adanya pengurang Pendapatan Bagi Hasil (DBH)-LO yaitu penerimaan pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Pusat TDF Tahun 2023 sebesar Rp10.014.381.000,00.

#### 5.4.1.2.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp681.275.700.613,00 | Rp627.696.920.000,00 |

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2024 sebesar Rp681.275.700.613,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp627.696.920.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.578.780.613,00. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) secara akrual nilainya sama dengan pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis kas yang disajikan pada LRA.

#### 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp283.812.745.416,00 | Rp288.072.452.917,00 |

Realisasi pendapatan Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 sebesar Rp283.812.745.416,00 dan Tahun 2023 sebesar

Rp288.072.452.917,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.259.707.501,00. Realisasi DAK terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp92.466.086.003,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp191.346.659.413,00.

#### 5.4.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp10.824.467.000,00 |

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)-LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp10.824.467.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO pada Tahun 2024 dicatat pada Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya- LO.

### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp6.867.270.000,00 | Rp0,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2024 realisasi sebesar Rp6.867.270.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang merupakan pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)-LO Tahun 2024.

### 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp90.484.509.572,00 | Rp54.712.359.373,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer antar daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp90.484.509.572,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp54.712.359.373,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.768.291.199,00 yang merupakan Transfer Dana Bagi Hasil. Rincian pendapatan Transfer pemerintah daerah-LO sebagai berikut.

**Tabel 5. 105 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO**

| NO | Uraian | LRA | Penambahan | Pengurangan | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO | 6.172.615.706,00 | 17.110.366.965,00 | 0,00 | 23.282.982.671,00 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO | 5.027.236.960,00 | 9.401.704.734,00 | 0,00 | 14.428.941.694,00 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO | 11.896.457.190,00 | 16.936.008.908,00 | 0,00 | 28.832.466.098,00 |

| NO | Uraian | LRA | Penambahan | Pengurangan | LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO | 890.328.673,00 | 1.340.023.332,00 | 0,00 | 2.230.352.005,00 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO | 21.709.767.104,00 | 0,00 | 0,00 | 21.709.767.104,00 |
| **Jumlah** | | **45.696.405.633,00** | **44.788.103.939,00** | **0,00** | **90.484.509.572,00** |

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil -LRA sebesar Rp45.696.405.633,00 dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp90.484.509.572,00 terdapat selisih sebesar Rp44.788.103.939,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Dana Bagi Hasil-LO yaitu piutang dana bagi hasil Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp44.788.103.939,00.

#### 5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.996.141.000,00 | Rp1.643.631.426,00 |

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.996.141.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.643.631.426,00 mengalami kenaikan sebesar Rp352.509.574,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp0,00 dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp1.996.141.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.996.141.000,00 yang disebabkan adanya pencatatan piutang pendapatan yang bersumber dari Dana BKPSU Tahun 2024 yang belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp37.825.200.245,00 | Rp24.082.695.869,00 |

Lain-lain Pendapatan yang sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp37.795.950.245,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp24.082.695.869,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.742.504.376,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA sebesar Rp22.214.114.931,00 dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO sebesar Rp37.825.200.245,00 maka terdapat selisih sebesar Rp15.611.085.314,00 yang disebabkan adanya pencatatan pendapatan hibah dari pihak ketiga yang dicatat sebagai aset tetap tanah sebesar Rp105.302.550,00, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp29.250.000,00 dan aset Jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp15.476.532.764,00.

### 5.4.2. Beban

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.282.134.240.898,07 | Rp1.162.194.274.304,02 |

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun 2024 sebesar Rp1.282.134.240.898,07 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.162.194.274.304,02 mengalami kenaikan sebesar Rp119.939.966.594,05 atau naik 10,32%. Rincian beban Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 106 Rincian Beban – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.01.01 | Beban Operasi | 1.061.196.938.883,63 | 926.268.239.596,02 | 134.928.699.287,61 | 14,57 |
| 8.1.02.01 | Beban Transfer | 73.107.902.160,00 | 66.739.612.238,00 | 6.368.289.922,00 | 9,54 |
| 8.1.02.02 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 146.728.282.634,44 | 157.371.965.160,00 | (10.643.682.525,56) | (6,76) |
| 8.1.02.03 | Beban Tidak Terduga | 1.101.117.220,00 | 11.814.457.310,00 | (10.713.340.090,00) | (90,68) |
| **Total Beban** | | **1.282.134.240.898,07** | **1.162.194.274.304,02** | **119.939.966.594,05** | **10,32** |

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa adalah sebagai berikut.

### 5.4.3. Beban Operasi

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.061.196.938.883,63 | Rp926.268.239.596,02 |

Realisasi beban operasi Tahun 2024 sebesar Rp1.061.196.938.883,63 dan Tahun 2023 sebesar Rp926.268.239.596,02 mengalami kenaikan sebesar Rp134.928.699.287,61 atau naik 14,57%. Rincian beban operasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 107 Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2024**

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 662.968.891.974,39 | 550.533.578.451,00 | 112.435.313.523,39 | 20,42 |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 315.285.022.969,27 | 348.458.939.996,02 | (33.173.917.026,75) | (9,52) |
| 8.1.03 | Beban Bunga | 2.207.835.420,00 | 3.096.653.900,00 | (888.818.480,00) | (28,70) |
| 8.1.05 | Beban Hibah | 71.974.027.092,00 | 19.735.718.872,00 | 52.238.308.220,00 | 264,69 |
| 8.1.06 | Beban Bantuan Sosial | 773.494.700,00 | 2.805.100.000,00 | (2.031.605.300,00) | (72,43) |
| 8.1.07 | Beban Penyisihan Piutang | 7.987.666.727,97 | 1.638.248.377,00 | 6.349.418.350,97 | 387,57 |
| **Jumlah Beban Operasi** | | **1.061.196.938.883,63** | **926.268.239.596,02** | **134.928.699.287,61** | **14,57** |

#### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai -LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp662.968.891.974,40 | Rp550.533.578.451,00 |

Realisasi Beban Pegawai-Lo Tahun 2024 sebesar Rp662.968.891.974,40 dan Tahun 2023 sebesar Rp550.533.578.451,00 mengalami kenaikan sebesar Rp112.435.313.523,40 atau naik 20,42%. Beban pegawai-LO terdiri sebagai berikut.

**Tabel 5. 108 Rincian Beban Pegawai – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.01** | **Beban Pegawai** | **662.968.891.974,40** | **550.533.578.451,00** | **112.435.313.523,40** | **20,42** |
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 470.520.528.120,00 | 373.039.157.193,00 | 97.481.370.927,00 | 26,13 |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 57.818.593.212,00 | 64.611.679.190,00 | (6.793.085.978,00) | (10,51) |
| 8.1.01.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 104.253.266.569,39 | 76.191.948.160,00 | 28.061.318.409,39 | 36,83 |
| 8.1.01.04 | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 13.442.643.929,00 | 13.286.095.446,00 | 156.548.483,00 | 1,18 |
| 8.1.01.05 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 61.323.399,00 | 416.103.757,00 | (354.780.358,00) | (85,26) |
| 8.1.01.06 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 532.400.000,00 | 710.880.000,00 | (178.480.000,00) | (25,11) |
| 8.1.01.88 | Beban Pegawai BOS | 11.579.689.400,00 | 14.169.698.050,00 | (2.590.008.650,00) | (18,28) |
| 8.1.01.99 | Beban Pegawai BLUD | 4.760.447.345,00 | 8.108.016.655,00 | (3.347.569.310,00) | (41,29) |

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai-LRA sebesar Rp621.410.779.418,00 dengan realisasi beban pegawai-LO sebesar Rp662.968.891.974,39 terdapat selisih lebih sebesar Rp41.558.112.556,39. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan antara lain pencatatan utang beban pegawai Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp18.046.744.200,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru sebesar Rp1.768.500.000,00, Utang Belanja Gaji THR sebesar Rp13.339.672.400,00, reklasifikasi beban uang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat kegiatan yang bersumber dari dana Kapitasi pada Puskesmas sebesar Rp8.146.956.260,39 dan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp258.609.696,00. Kemudian adanya pengurang beban pegawai-LO sebesar Rp2.370.000,00 yaitu reklasifikasi beban pegawai ke Belanja Modal berupa biaya umum.

#### 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp315.285.022.969,27 | Rp348.458.939.996,02 |

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp315.285.022.969,27 dan Tahun 2023 sebesar Rp348.458.939.996,02 mengalami penurunan sebesar Rp33.173.917.026,75. Realisasi beban barang dan jasa terdiri atas realisasi beban barang sebesar Rp91.245.505.894,06, realisasi beban jasa sebesar Rp61.709.679.397,00, realisasi beban pemeliharaan sebesar Rp4.014.095.710,00, realisasi beban perjalanan dinas sebesar Rp35.452.140.075,00, realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.433.790.138,01, realisasi Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp30.760.541.683,00, realisasi Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp0,00 dan realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp74.669.270.072,20 dengan rincian sebagai berikut.

##### 5.4.2.1.2.1 Beban Barang

Realisasi Beban barang pada Tahun 2024 sebesar Rp91.245.505.894,06 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 109 Rincian Beban Barang– LO**

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.02.01** | **Beban Barang** | **91.245.505.894,06** | **86.634.723.122,02** | **4.610.782.772,04** | **5,32** |
| 8.1.02.01.01.0001 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 401.073.100,00 | 731.829.680,00 | (330.756.580,00) | (45,20) |
| 8.1.02.01.01.0002 | Beban Bahan-Bahan Kimia | - | 31.556.740,00 | (31.556.740,00) | (100,00) |
| 8.1.02.01.01.0004 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.033.001.713,60 | 7.426.440.518,00 | (2.393.438.804,40) | (32,23) |
| 8.1.02.01.01.0008 | Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 353.858.500,00 | 304.229.150,00 | 49.629.350,00 | 16,31 |
| 8.1.02.01.01.0010 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 8.033.000,00 | 9.762.400,00 | (1.729.400,00) | (17,71) |
| 8.1.02.01.01.0011 | Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 676.351.000,00 | 1.091.790.550,00 | (415.439.550,00) | (38,05) |
| 8.1.02.01.01.0012 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 3.777.891.446,99 | 3.557.749.879,21 | 220.141.567,78 | 6,19 |
| 8.1.02.01.01.0013 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 526.362.380,00 | 1.343.937.652,00 | (817.575.272,00) | (60,83) |
| 8.1.02.01.01.0014 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 40.305.600,00 | 101.818.140,00 | (61.512.540,00) | (60,41) |
| 8.1.02.01.01.0023 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 247.650.900,00 | 88.022.681,00 | 159.628.219,00 | 181,35 |
| 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.762.630.112,90 | 4.306.211.783,00 | (1.543.581.670,10) | (35,85) |
| 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.426.016.652,63 | 5.294.498.501,00 | (868.481.848,37) | (16,40) |
| 8.1.02.01.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 107.429.000,00 | 171.414.200,00 | (63.985.200,00) | (37,33) |
| 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.237.000,00 | 30.937.000,00 | (24.700.000,00) | (79,84) |

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 498.074.179,00 | 627.914.520,00 | (129.840.341,00) | (20,68) |
| 8.1.02.01.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 643.018.684,00 | 1.426.793.500,00 | (783.774.816,00) | (54,93) |
| 8.1.02.01.01.0032 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 248.644.000,00 | 450.989.300,00 | (202.345.300,00) | (44,87) |
| 8.1.02.01.01.0034 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga | 260.778.100,00 | 428.148.385,00 | (167.370.285,00) | (39,09) |
| 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 149.400.000,00 | (149.400.000,00) | 298.800.000,00 | (200,00) |
| 8.1.02.01.01.0036 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.429.293.282,00 | 2.086.955.870,00 | (657.662.588,00) | (31,51) |
| 8.1.02.01.01.0037 | Beban Obat-Obatan-Obat | 10.991.240.953,73 | (2.371.537.128,19) | 13.362.778.081,92 | (563,46) |
| 8.1.02.01.01.0038 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 41.763.418,00 | 4.870.627.329,00 | (4.828.863.911,00) | (99,14) |
| 8.1.02.01.01.0039 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 34.061.376.916,57 | 27.270.106.143,00 | 6.791.270.773,57 | 24,90 |
| 8.1.02.01.01.0040 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.800.000,00 | 781.760.800,00 | (779.960.800,00) | (99,77) |
| 8.1.02.01.01.0043 | Beban Natura dan Pakan-Natura | 17.701.312.500,00 | 23.301.947.226,00 | (5.600.634.726,00) | (24,04) |
| 8.1.02.01.01.0044 | Beban Natura dan Pakan-Pakan | 95.963.000,00 | 170.875.522,00 | (74.912.522,00) | (43,84) |
| 8.1.02.01.01.0045 | Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | - | 5.440.000,00 | (5.440.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 37.677.000,00 | 1.983.840.081,00 | (1.946.163.081,00) | (98,10) |
| 8.1.02.01.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | - | 368.152.000,00 | (368.152.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.01.01.0058 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 135.850.000,00 | 377.543.100,00 | (241.693.100,00) | (64,02) |
| 8.1.02.01.01.0062 | Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | - | - |
| 8.1.02.01.01.0063 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 43.091.000,00 | 179.618.400,00 | (136.527.400,00) | (76,01) |
| 8.1.02.01.01.0064 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 70.046.000,00 | 48.125.000,00 | 21.921.000,00 | 45,55 |
| 8.1.02.01.01.0065 | Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 13.220.000,00 | 42.728.400,00 | (29.508.400,00) | (69,06) |
| 8.1.02.01.01.0069 | Beban Pakaian Teknik | 3.322.600,00 | 16.105.200,00 | (12.782.600,00) | (79,37) |
| 8.1.02.01.01.0070 | Beban Pakaian Pelatihan Kerja | 81.153.000,00 | 33.000.000,00 | 48.153.000,00 | 145,92 |
| 8.1.02.01.01.0073 | Beban Pakaian KORPRI | 5.140.000,00 | 19.948.800,00 | (14.808.800,00) | (74,23) |
| 8.1.02.01.01.0074 | Beban Pakaian Adat Daerah | 51.000.000,00 | 101.000.000,00 | (50.000.000,00) | (49,50) |
| 8.1.02.01.01.0076 | Beban Pakaian Olahraga | 39.000.000,00 | 26.000.000,00 | 13.000.000,00 | 50,00 |
| 8.1.02.01.01.0078 | Beban Pakaian Jas/Safari | 23.000.000,00 | 28.000.000,00 | (5.000.000,00) | (17,86) |
| 8.1.02.01.02.0013 | Beban Pipa-Pipa Lainnya | 300.000,00 | 7.841.800,00 | (7.541.800,00) | (96,17) |
| 8.1.02.01.04.0117 | Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah | 5.717.108.316,00 | - | 5.717.108.316,00 | 100,00 |

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | |
| 8.1.02.01.04.0237 | Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 31.704.942,00 | - | 31.704.942,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.04.0248 | Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum | 105.351.236,00 | - | 105.351.236,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.04.0510 | Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | (110.390.001,36) | - | (110.390.001,36) | - |
| 8.1.02.01.04.0539 | Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 428.554.608,00 | - | 428.554.608,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.04.0710 | Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum | 68.871.754,00 | - | 68.871.754,00 | 100,00 |

#### 5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp61.709.679.397,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 110 Rincian Beban Jasa – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.02.02** | **Beban Jasa** | **61.709.679.397,00** | **79.673.618.823,00** | **(17.963.939.426,00)** | **(22,55)** |
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor | 40.319.710.902,00 | 58.270.425.337,00 | (17.950.714.435,00) | (30,81) |
| 8.1.02.02.02 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 16.369.320.753,00 | 13.391.153.629,00 | 2.978.167.124,00 | 22,24 |
| 8.1.02.02.04 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 1.120.952.447,00 | 1.807.758.825,00 | (686.806.378,00) | (37,99) |
| 8.1.02.02.05 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 754.329.900,00 | 1.960.136.399,00 | (1.205.806.499,00) | (61,52) |
| 8.1.02.02.09 | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 2.296.291.895,00 | 1.919.981.680,00 | 376.310.215,00 | 19,60 |
| 8.1.02.02.10 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 59.884.500,00 | 725.859.450,00 | (665.974.950,00) | (91,75) |
| 8.1.02.02.12 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 70.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 | 16,67 |
| 8.1.02.02.13 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 719.189.000,00 | 1.538.303.503,00 | (819.114.503,00) | (53,25) |

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa-LRA sebesar Rp59.683.262.876,00 dengan realisasi beban jasa-LO sebesarRp61.709.679.397,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp2.056.667.121,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan yaitu reklasifikasi dari belanja modal ke beban jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp846.884.895,00, penambahan utang belanja jasa kantor sebesar Rp278.685.790,00, reklasifikasi dari beban uang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat sumber dana JKN pada

Puskesmas sebesar Rp434.136.436,00 dan reklasifikasi beban barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp496.960.000,00. Kemudian adanya mutasi pengurang yaitu reklasifikasi beban jasa ke belanja modal (biaya umum) pengadaan sebesar Rp30.250.600,00.

#### 5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 sebesar Rp4.014.095.710,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 111 Rincian Beban Pemeliharaan – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.02.03** | **Beban Pemeliharaan** | **4.014.095.710,00** | **4.072.838.763,00** | **(58.743.053,00)** | **(1,44)** |
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.100.630.373,00 | 3.761.641.621,00 | (661.011.248,00) | (17,57) |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 913.465.337,00 | 311.197.142,00 | 602.268.195,00 | 193,53 |

Jika dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp2.531.560.577,00 dengan realisasi beban pemeliharaan-LO sebesar Rp4.014.095.710,00 terdapat selisih sebesar Rp1.482.535.133,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan yaitu reklasifikasi dari belanja modal ke beban jasa pemeliharaan sebesar Rp16.933.000,00 dan reklasifikasi beban uang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat sumber dana JKN sebesar Rp1.465.602.133,00.

#### 5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 sebesar Rp35.452.140.075,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 112 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.02.04** | **Beban Perjalanan Dinas** | **35.452.140.075,00** | **42.870.151.990,00** | **(7.418.011.915,00)** | **(17,30)** |
| 8.1.02.04.01.01 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 29.579.820.275,00 | 32.889.208.157,00 | (3.309.387.882,00) | (10,06) |
| 8.1.02.04.01.03 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.872.319.800,00 | 9.881.343.833,00 | (4.009.024.033,00) | (40,57) |
| 8.1.02.04.01.04 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - | 99.600.000,00 | (99.600.000,00) | (100,00) |

Jika dibandingkan realisasi belanja perjalanan dinas-LRA sebesar Rp35.435.071.275,00 dengan realisasi beban perjalanan dinas -LO sebesar Rp35.452.140.075,00 terdapat selisih sebesar Rp17.068.800,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan yaitu reklasifikasi beban uang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat sumber dana JKN sebesar Rp17.068.800,00.

#### 5.4.2.1.2.5 Beban Uang/Jasa Diberikan kepada Pihak ketiga

Realisasi Beban Uang/Jasa Diberikan kepada Pihak ketiga pada Tahun 2024 sebesar Rp17.433.790.138,01 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 113 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.02.05** | **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | **17.433.790.138,01** | **29.615.095.701,00** | **(12.181.305.562,99)** | **(41,13)** |
| 8.1.02.05.01 | Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.941.466.465,00 | 1.371.977.885,00 | 569.488.580,00 | 41,51 |
| 8.1.02.05.02 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 15.492.323.673,01 | 28.243.117.816,00 | (12.750.794.142,99) | (45,15) |

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga-LRA sebesar Rp21.425.817.718,00 dengan realisasi beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga-LO sebesar Rp17.433.790.138,01 terdapat selisih kurang sebesar Rp3.992.027.579,99. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan yaitu reklasifikasi beban barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp9.502.213.000,00. Kemudian adanya pengurangan sebesar Rp13.494.240.579,99 yaitu reklasifikasi dari sumber dana JKN ke aset tetap sebesar Rp741.404.720,00, Reklas ke beban pegawai sebesar Rp8.146.956.260,39, Reklas ke beban barang sebesar Rp2.689.072.230,60, reklas ke beban jasa sebesar Rp434.136.436,00, Reklas ke beban pejalanan dinas sebesar Rp17.068.800,00 dan reklas ke beban pemeliharaan sebesar Rp1.465.602.133,00.

#### 5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS

Realisasi Beban barang dan jasa BOS pada Tahun 2024 sebesar Rp30.760.541.683,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp32.110.810.520,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.350.268.837,00.

Jika dibandingkan realisasi barang dan jasa BOS-LRA sebesar Rp30.855.196.458,00 dengan realisasi beban barang dan jasa BOS-LO sebesar Rp30.760.541.683,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp94.654.775,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi berkurang yaitu adanya persediaan pada Tahun 2024 yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp94.654.775,00.

#### 5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Beban barang dan jasa BLUD pada Tahun 2024 sebesar Rp74.669.270.072,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp73.481.701.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.187.568.995,20.

Jika dibandingkan realisasi barang dan jasa BLUD-LRA sebesar Rp81.252.485.989,00 dengan realisasi beban barang dan jasa BLUD-LO sebesar Rp74.669.270.072,20 terdapat selisih kurang sebesar Rp6.608.713.665,39. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi bertambah yaitu Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp2.647.776.919,00 dan reklasifikasi dari Belanja modal ke beban ekstrakompatabel sebesar Rp6.493.500,00. Kemudian mutasi berkurang yaitu adanya persediaan pada Tahun 2024 yang bersumber dari Dana BLUD sebesar Rp8.332.546.501,80 dan pembayaran utang BLUD Tahun sebelumnya sebesar Rp904.939.834,00.

### 5.4.2.1.3 Beban Bunga

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.207.835.420,00 | Rp3.096.653.900,00 |

Realisasi beban bunga Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.207.835.420,00 merupakan pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero) untuk Tahun 2024.

### 5.4.2.1.4 Beban Hibah

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp71.974.027.092,00 | Rp19.735.718.872,00 |

Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp71.974.027.092,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp19.735.718.872,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.238.308.220,00. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 114 Rincian Beban Hibah**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.05** | **Beban Hibah** | **71.974.027.092,00** | **19.735.718.872,00** | **52.238.308.220,00** | **264,69** |
| 8.1.05.01 | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 54.476.486.500,00 | 2.391.160.000,00 | 52.085.326.500,00 | 2.178,25 |
| 8.1.05.02 | Beban Hibah kepada | 0,00 | 75.000.000,00 | (75.000.000,00) | (100,00) |

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintah Daerah Lainnya | | | | |
| 8.1.05.05 | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 6.335.000.000,00 | 16.398.319.809,00 | (10.063.319.809,00) | (61,37) |
| 8.1.05.06 | Beban Hibah Dana BOS | 4.853.620.000,00 | 0,00 | 4.853.620.000,00 | 100,00 |
| 8.1.05.07 | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 893.171.567,00 | 871.239.063,00 | 21.932.504,00 | 2,52 |
| 8.1.05.08 | Beban Hibah Dana BOSP | 5.415.749.025,00 | 0,00 | 5.415.749.025,00 | 100,00 |

Jika dibandingkan realisasi belanja hibah-LRA sebesar Rp71.990.363.892,00 dengan realisasi beban hibah-LO sebesar Rp71.974.027.092,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp16.336.800,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi berkurang yaitu reklasifikasi dari beban hibah PAUD ke belanja modal sebesar Rp16.336.800,00.

#### 5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp773.494.700,00 | Rp2.805.100.000,00 |

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp773.494.700,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.805.100.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.031.605.300,00. Beban bantuan social merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Rincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 115 Rincian Beban Bantuan Sosial**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.06** | **Beban Bantuan Sosial** | **773.494.700,00** | **2.805.100.000,00** | **(2.031.605.300,00)** | **(72,43)** |
| 8.1.06.01 | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu | 100.300.000,00 | 330.200.000,00 | (229.900.000,00) | (69,62) |
| 8.1.06.02 | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga | 128.194.700,00 | 364.900.000,00 | (236.705.300,00) | (64,87) |
| 8.1.06.03 | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat | 545.000.000,00 | 2.110.000.000,00 | (1.565.000.000,00) | (74,17) |

#### 5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp7.987.666.727,97 | Rp1.638.248.377,00 |

Beban penyisihan piutang Tahun 2024 sebesar Rp 7.987.666.727,97 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.638.248.377,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.349.418.350,97. Rincian Beban penyisihan piutang Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5. 116 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.07** | **Beban Penyisihan Piutang** | **7.987.666.727,97** | **1.638.248.377,00** | **6.349.418.350,97** | **387,57** |
| 8.1.07.01.06 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel | - | (9.356.000,00) | 9.356.000,00 | (100,00) |
| 8.1.07.01.07 | Beban Penyisihan Pajak Restoran | - | (6.800.000,00) | 6.800.000,00 | (100,00) |
| 8.1.07.01.15 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 569.860.359,04 | 1.711.167.760,35 | (1.141.307.401,31) | (66,70) |
| 8.1.07.01.19 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | (12.018.000,00) | - | (12.018.000,00) | - |
| 8.1.07.04.13 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan | 103.721.946,73 | (56.763.383,35) | 160.485.330,08 | (282,73) |
| 8.1.07.06.01 | Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil | 7.316.121.717,20 | - | 7.316.121.717,20 | 100,00 |
| 8.1.07.06.02 | Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan | 9.980.705,00 | - | 9.980.705,00 | 100,00 |

#### 5.4.2.1.7 Beban Lain-lain

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Beban lain-lain Tahun 2024 adalah Nihil.

### 5.4.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp146.728.282.634,44 | Rp157.371.965.160,00 |

Realisasi Beban Penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp146.728.282.634,44 dan Tahun 2023 sebesar Rp157.371.965.160,00 mengalami

penurunan sebesar Rp10.643.682.525,56. Rincian beban penyusutan dan amortasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 117 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

| Kode Rek | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.08** | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **146.728.282.634,44** | **157.371.965.160,00** | **(10.643.682.525,56)** | **(6,76)** |
| 8.1.08.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 44.020.115.432,14 | 48.365.586.869,00 | (4.345.471.436,86) | (8,98) |
| 8.1.08.02 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 15.915.420.184,99 | 15.589.131.229,00 | 326.288.955,99 | 2,09 |
| 8.1.08.03 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 86.118.494.321,51 | 92.807.216.740,00 | (6.688.722.418,49) | (7,21) |
| 8.1.08.04 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 510.677.886,95 | 440.788.737,00 | 69.889.149,95 | 15,86 |
| 8.1.08.06 | Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 163.574.808,85 | 169.241.585,00 | (5.666.776,15) | (3,35) |

### 5.4.5. Beban Transfer

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp73.107.902.160,00 | Rp66.739.612.238,00 |

Realisasi Beban transfer Tahun 2024 sebesar Rp73.107.902.160,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp66.739.612.238,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.368.289.922,00. Rincian beban Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 118 Rincian Beban Transfer – LO**

| Kode Rek | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.01.01 | Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.02.05 | Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 73.107.902.160,00 | 66.739.612.238,00 | 6.368.289.922,00 | 9,54 |
| **8.3** | **Beban Transfer** | **73.107.902.160,00** | **66.739.612.238,00** | **6.368.289.922,00** | **9,54** |

Jika dibandingkan realisasi Belanja Transfer- LRA sebesar Rp258.649.802.576,00 dengan realisasi beban Transfer-LO sebesar Rp73.107.902.160,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp185.541.900.416,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi bertambah yakni pencatatan utang belanja alokasi dana desa Tahun 2024 sebesar Rp13.588.051.784,00 dan mutasi berkurang yakni realisasi dan entitas pelaporan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat secara langsung dikelola oleh Desa sehingga tidak dilakukan pencatatan pada Beban transfer sebesar Rp199.129.952.200,00.

### 5.4.6. Beban Tidak Terduga

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp1.101.117.220,00 | Rp11.814.457.310,00 |

Beban tidak terduga Tahun 2024 sebesar Rp1.101.117.220,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp11.814.457.310,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.713.340.090,00. Jika dibandingkan realisasi Belanja Tidak Terduga- LRA sebesar Rp3.454.947.220,00 dengan realisasi beban Tidak Terduga-LO sebesar Rp1.101.117.220,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp2.353.830.000,00 yang diakibatkan adanya mutasi kurang pencatatan aset tetap yang bersumber dari Dana Tidak Terduga.

### 5.4.7. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasi

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp14.131.338.663,46 | Rp52.870.192.619,98 |

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasi Tahun 2024 sebesar Rp14.131.338.663,46 yang merupakan selisih dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.296.265.579.561,53 dengan Beban sebesar Rp1.282.134.240.898,07 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 119 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO**

| No | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan-LO | 1.296.265.579.561,53 | 1.215.064.466.924,00 | 81.201.112.637,53 | 6,68% |
| 2 | Beban- LO | 1.282.134.240.898,07 | 1.162.194.274.304,02 | 119.939.966.594,05 | 10,32 |
| **Surplus/ Defisit dari Operasi** | | **14.131.338.663,46** | **52.870.192.619,98** | **(38.738.853.956,52)** | **(73,27)** |

### 5.4.8. Kegiatan Non Operasional

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp31.957.177,00) | (Rp3.108.238.903,00) |

Realisasi kegiatan non operasional Tahun 2024 sebesar (Rp31.957.177,00) dan Tahun 2023 sebesar (Rp3.108.238.903,00) mengalami kenaikan sebesar Rp3.076.281.726,00 yang terdiri dari surplus non operasional sebesar Rp1.002.247.748,00 dan defisit non operasional sebesar (Rp.1.034.204.925,00) dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 5. 120 Kegiatan Non Operasional Tahun 2024**

| No | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **SURPLUS NON OPERASIONAL** | **1.002.247.748,00** | **0,00** | **1.002.247.748,00** |
| | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar | 340.713.000,00 | 0,00 | 340.713.000,00 |
| | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 661.534.748,00 | - | 661.534.748,00 |
| **2** | **DEFISIT NON OPERASIONAL** | **(1.034.204.925,00)** | **(3.108.238.903,00)** | **2.074.033.978,00** |
| | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | (1.034.204.925,00) | (3.108.238.903,00) | 2.074.033.978,00 |
| | **Jumlah** | **(31.957.177,00)** | **(3.108.238.903,00)** | **3.076.281.726,00** |

### 5.4.9. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14.131.338.663,46, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional adalah (Rp31.957.177,00) sehingga surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp14.099.381.486,46.

### 5.4.10. Pos Luar Biasa

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Pos luar biasa Tahun 2024 sebesar Rp0,00

### 5.4.11. Surplus/ Defisit-LO.

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp14.099.381.486,46 | Rp49.761.953.716,98 |

Surplus/defisit-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.099.381.486,46 dan Tahun 2023 sebesar Rp49.761.953.716,98 mengalami penurunan sebesar (Rp35.662.572.230,52).

## 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo

akhir kas selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp7.850.262.709,09 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5. 121 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2024**

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arus kas bersih dari aktivitas operasi | 160.117.432.424,93 | 194.756.304.717,00 |
| 2 | Arus kas bersih dari aktivitas investasi | (98.695.581.555,94) | (170.150.267.259,00) |
| 3 | Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | (69.282.056.597,00) | (69.409.349.558,00) |
| 4 | Arus kas bersih dari aktivitas transistoris | 9.943.018,92 | 0,00 |
| | **Jumlah kenaikan/ (Penurunan) Kas** | **(7.850.262.709,09)** | **(44.803.312.100,00)** |

### 5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp160.117.432.424,93 | Rp194.756.304.717,00 |

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2024 sebesar Rp160.117.432.424,93 dan Tahun 2023 sebesar Rp194.756.304.717,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.638.872.292,07. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 122 Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi**

| No. | Uraian | Per 31 Des 2024 | Per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| **I** | **Arus Kas Masuk** | | |
| 1 | Penerimaan Pajak Daerah | 27.663.738.746,01 | 27.612.663.867,00 |
| 2 | Penerimaan Retribusi Daerah | 93.784.976.878,78 | 5.536.938.005,00 |
| 3 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.451.510.307,00 | 8.139.637.407,00 |
| 4 | Penerimaan Lain - lain PAD yang sah | 3.028.417.685,61 | 92.367.439.640,00 |
| 5 | Penerimaan Dana Bagi Hasil | 64.628.799.000,00 | 61.985.236.033,00 |
| 6 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 681.275.700.613,00 | 627.696.920.000,00 |
| 7 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | 92.466.086.003,00 | 103.496.236.437,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 191.689.325.627,00 | 184.576.216.480,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Insentif | - | 10.824.467.000,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Desa | 199.129.952.200,00 | 198.733.682.000,00 |
| 11 | Penerimaan Insentif Fiskal | 6.867.270.000,00 | - |
| 12 | Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi | 45.696.405.633,00 | 53.068.727.947,00 |
| 13 | Penerimaan Bantuan Keuangan | - | 1.643.631.426,00 |
| 14 | Penerimaan Hibah | 8.818.078.129,00 | 11.481.323.995,00 |
| 15 | Penerimaan dari Pendapatan Lainnya | 13.396.036.802,00 | 12.601.371.874,00 |
| | **Jumlah Arus Kas Masuk** | **1.436.896.297.624,40** | **1.399.764.492.111,00** |
| **II** | **Arus Kas keluar** | | |
| 1 | Pembayaran Pegawai | 621.410.779.418,00 | 550.561.006.379,00 |
| 2 | Pembayaran Barang dan Jasa | 318.291.641.973,47 | 351.521.956.695,00 |
| 3 | Pembayaran Bunga | 2.207.835.420,00 | 3.096.653.900,00 |
| 4 | Pembayaran Belanja Hibah | 71.990.363.892,00 | 19.735.718.872,00 |
| 5 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial | 773.494.700,00 | 2.812.730.000,00 |

| No. | Uraian | Per 31 Des 2024 | Per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| 6 | Pembayaran Tak Terduga | 3.454.947.220,00 | 11.814.457.310,00 |
| 7 | Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa | 258.649.802.576,00 | 265.473.294.238,00 |
| | **Jumlah Arus Kas Keluar** | **1.276.778.865.199,47** | **1.205.008.187.394,00** |
| | **Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi** | **160.117.432.424,93** | **194.756.304.717,00** |

### 5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp98.695.581.555,94) | (Rp170.150.267.259,00) |

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2024 sebesar (Rp98.695.581.555,94) dan Tahun 2023 sebesar (Rp170.150.267.259,00) mengalami kenaikan sebesar Rp 71.454.685.703,06. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah dari penjualan aset daerah, setelah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk belanja modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik. Perincian atas aktivitas investasi Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5. 123 Arus Kas dari Aktifitas Investasi**

| No. | Uraian | Per 31 Des 2024 | Per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| **I** | **Arus Kas Masuk** | | |
| 1 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 340.713.000,00 | 1.025.967.500,00 |
| 2 | Penjualan Aset Lainnya | - | 165.971.100,00 |
| 3 | Penjualan Aset Lain-Lain | 43.030.100,00 | - |
| | **Jumlah Arus Kas masuk** | **383.743.100,00** | **1.191.938.600,00** |
| **II** | **Arus Kas Keluar:** | | |
| 1 | Perolehan Tanah | 164.000.000,00 | - |
| 2 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 26.958.423.144,00 | 44.530.761.080,00 |
| 3 | Perolehan Gedung dan Bangunan | 14.949.241.861,74 | 31.062.611.625,00 |
| 4 | Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 56.854.991.209,34 | 92.684.156.254,00 |
| 5 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 111.469.430,00 | 64.676.900,00 |
| 6 | Perolehan Aset Lainnya | 41.199.010,86 | - |
| 7 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | - | 3.000.000.000,00 |
| | **Jumlah Arus Kas Keluar** | **99.079.324.655,94** | **171.342.205.859,00** |
| | **Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(98.695.581.555,94)** | **(170.150.267.259,00)** |

### 5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp69.282.056.597,00) | (Rp69.409.349.558,00) |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sebesar (Rp69.282.056.597,00) dan Tahun 2023 sebesar (Rp69.409.349.558,00) mengalami kenaikan sebesar

Rp127.292.961,00. Arus kas bersih aktivitas pendanaan merupakan jumlah arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 124 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaa**

| No. | Uraian | Per 31 Des 2024 | Per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Arus Kas Masuk** | | |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | **Jumlah arus kas masuk** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Arus Kas Keluar** | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 69.282.056.597,00 | 69.409.349.558,00 |
| | **Jumlah arus kas keluar** | **69.282.056.597,00** | **69.409.349.558,00** |
| | **Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(69.282.056.597,00)** | **(69.409.349.558,00)** |

### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp9.943.018,92 | Rp0,00 |

Saldo Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp9.943.018,92 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 125 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

| No. | Uraian | Per 31 Des 2024 | Per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Arus Kas Masuk** | | |
| | a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 72.837.615.432,45 | 0,00 |
| **2** | **Arus Kas Keluar** | | |
| | a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 72.827.672.413,53 | 0,00 |
| | **Jumlah Arus Kas Bersih** | **9.943.018,92** | **0,00** |

Saldo Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 sebesar Rp9.943.018,92. Pengelolaan PFK oleh BUD yaitu berasal dari pemungutan dan penyetoran pajak seluruh SKPD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Rincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5. 126 Rincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2024**

| No | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuran Wajib Pegawai | 46.718.421.719,23 | 46.718.421.719,23 | 0,00 |
| 2 | Pajak Penghasilan Ps 21 | 13.974.466.377,68 | 13.974.466.377,68 | 0,00 |
| 3 | Pajak Penghasilan Ps 22 | 433.632.081,15 | 433.632.081,15 | 0,00 |
| 4 | Pajak Penghasilan Ps 23 | 120.385.508,50 | 120.385.508,50 | 0,00 |
| 5 | Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 | 1.404.777.145,00 | 1.404.777.145,00 | 0,00 |
| 6 | Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) | 10.184.636.850,89 | 10.174.693.831,97 | 9.943.018,92 |
| **Jumlah** | | **72.837.615.432,45** | **72.827.672.413,53** | **9.943.018,92** |

### 5.5.5. Saldo Akhir Kas

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp10.683.462.109,98 | Rp18.272.950.856,00 |

Saldo akhir kas Tahun 2024 sebesar Rp10.683.462.109,98 dan Tahun 2023 sebesar Rp18.272.950.856,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.589.488.746,02. Saldo akhir kas merupakan saldo akhir kas di BUD, kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOK Puskesmas, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, Kas di Bendahara Penerimaan dan Setara Kas seperti dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5. 127 Saldo Akhir Kas**

| No. | Uraian | Per 31 Des 2024 | Per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenaikan/ (Penurunan) Kas | **(7.850.262.709,09)** | **(44.803.312.100,00)** |
| 2 | Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan | **18.272.950.856,00** | **63.081.575.953,87** |
| 3 | Koreksi Silpa | (8.094.218,13) | (5.312.997,87) |
| 4 | Saldo Awal Kas Setelah Koreksi | 18.264.856.637,87 | 63.076.262.956,00 |
| 5 | Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS | 10.414.593.928,78 | 18.272.950.856,00 |
| | Kas RKUD | 8.338.721.467,86 | 15.209.157.712,87 |
| | Kas di BLUD | 805.407.416,00 | 1.453.300.175,00 |
| | Kas di Bendahara FKTP | 50.024.510,20 | 492.808.263,20 |
| | Kas di Bendahara BOK Puskesmas | 662.052.189,00 | - |
| | Kas di Bendahara BOS | 439.505.723,80 | 1.117.116.850,93 |
| | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 108.939.603,00 | 567.854,00 |
| | Kas Lainnya | 229.682.200,12 | - |
| | Kas di Bendahara Penerimaan | 49.129.000,00 | - |
| | Setara Kas | - | - |
| | **Saldo Akhir Kas** | **10.683.462.109,98** | **18.272.950.856,00** |

## 5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun berjalan dibandingkan dengan Tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 128 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023**

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ekuitas Awal | 2.331.755.925.727,85 | 2.271.169.554.344,78 |
| 2. | Surplus/ Defisit-LO | 14.099.381.486,46 | 49.761.953.716,98 |
| 3. | RK PPKD | (949.422.190.552,01) | (0,00) |
| 4. | RK SKPD | 949.422.190.552,01 | 0,00 |
| 5. | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | | |
| | Koreksi Nilai Persediaan | (4.519.787,40) | 0,00 |
| | Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| | Koreksi Ekuitas Lainnya | (74.130.355.941,74) | 10.824.417.666,09 |
| **Ekuitas Akhir** | | **2.271.720.431.485,17** | **2.331.755.925.727,85** |

### 5.6.1. Ekuitas Awal

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.331.755.925.727,85 | Rp2.271.169.554.344,78 |

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.331.755.925.727,85 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas awal Tahun 2024 lebih besar sebesar Rp60.586.371.383,07 atau 2,67% dibandingkan saldo ekuitas awal Tahun 2023.

### 5.6.2. Surplus/Defisit –LO

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp14.238.897.309,19 | Rp49.761.953.716,98 |

Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.099.381.486,46 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar (Rp35.662.572.230,52) atau turun 71,67%.

### 5.6.3. RK PPKD

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp949.422.190.552,01) | (Rp0,00) |

RK PPKD (Rekening Koran PPKD) dan RK SKPD (Rekening Koran SKPD) adalah rekening timbal balik yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah untuk mencatat transaksi antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Saldo RK PPKD Tahun 2024 sebesar (Rp949.422.190.552,01).

### 5.6.4. RK SKPD

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp949.422.190.552,01 | 0,00 |

Saldo RK SKPD Tahun 2024 sebesar Rp949.422.190.552,01.

### 5.6.5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| (Rp74.134.875.729,14) | Rp10.824.417.666,09 |

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebesar (Rp74.134.875.729,14) dan Tahun 2023 sebesar Rp10.824.417.666,09 dan mengalami penurunan sebesar (Rp84.959.293.395,23). Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar diantaranya yaitu adanya koreksi kesalahan perhitungan pencatatan Tahun sebelumnya serta koreksi ekuitas atas kebijakan pencatatan akumulasi penyusutan aset lain-lain/ rusak berat sesuai dengan Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang mengakibatkan adanya penurunan ekuitas pada Tahun 2024.

### 5.6.6. Ekuitas Akhir

| Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|---|---|
| Rp2.271.720.431.485,17 | Rp2.331.755.925.727,85 |

Saldo ekuitas akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.271.720.431.485,17 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.331.755.925.727,85 mengalami penurunan sebesar Rp60.035.494.242,68 atau 2,57%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp2.331.755.925.727,85 ditambah surplus/ defisit-LO sebesar Rp14.099.381.486,46 dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp74.134.875.729,14.

# BAB VI
# PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## 6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara dan pemekerannya dibentuk berdasarkan Undang-undang:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

## 6.2. Letak Geografis




Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, 1°20'00" - 2°41'00" Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur dengan luas wilayah 3.800,31 km² (sudah termasuk perairan Danau Toba yang berada di Kecamatan Muara seluas 6,60 km2). Kabupaten Tapanuli Utara dikelilingi oleh lima kabupaten, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administratif, Kabupaten Tapanuli Utara terbagi dalam 15 kecamatan 241 Desa dan 11 Kelurahan. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Garoga dengan luas sekitar 567,58 $Km^2$ atau 14,96 persen dari luas Kabupaten Tapanuli Utara, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas sekitar 79,75 $Km^2$ atau 2,10 persen.

**Tabel 6.1 Luas Wilayah per Kecamatan**

| Kecamatan | Luas (Km2) | Rasio Terhadap Total (%) |
|---|---|---|
| Parmonangan | 257,35 | 6,78 |
| Adiankoting | 502,90 | 13,26 |
| Sipoholon | 189,20 | 4,99 |
| Tarutung | 107,68 | 2,84 |
| Siatas Barita | 92,92 | 2,45 |
| Pahae Julu | 165,90 | 4,37 |
| Pahae Jae | 203,20 | 5,36 |
| Purbatua | 191,80 | 5,06 |
| Simangumban | 150,00 | 3,95 |
| Pangaribuan | 459,25 | 12,10 |
| Garoga | 567,58 | 14,96 |
| Sipahutar | 408,22 | 10,76 |
| Siborongborong | 279,91 | 7,38 |
| Pagaran | 138,05 | 3,64 |
| Muara | 79,75 | 2,10 |
| **Tapanuli Utara** | **3.793,71** | **100,00** |

Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).

## 6.3. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 2 Bidang Urusan Pilihan dan 8 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang meliputi 45 Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), sebagai berikut:

### 6.3.1. Urusan dan Bidang

**Tabel 6.2 Urusan dan Bidang**

| Kode | Urusan dan Bidang |
|---|---|
| **1** | **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** |
| 1 . 01 | Pendidikan |
| 1 . 02 | Kesehatan |
| 1 . 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 . 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 . 05 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| 1 . 06 | Sosial |
| **2** | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** |
| 2 . 01 | Tenaga Kerja |
| 2 . 03 | Pangan |
| 2 . 05 | Lingkungan Hidup |
| 2 . 06 | Administrasi Kependudukan dan Capil |
| 2 . 07 | Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 2 . 08 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 . 09 | Perhubungan |
| 2 . 10 | Komunikasi dan Informatika |

| Kode | Urusan dan Bidang |
|---|---|
| 2 . 11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 . 12 | Penanaman Modal |
| 2 . 13 | Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 . 17 | Perpustakaan |
| **3** | **Urusan Pilihan** |
| 3 . 02 | Pariwisata |
| 3 . 03 | Pertanian |
| **4** | **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang** |
| 4 . 01 | Administrasi Pemerintahan |
| 4 . 02 | Pengawasan |
| 4 . 03 | Perencanaan |
| 4 . 04 | Keuangan |
| 4 . 05 | Kepegawaian |
| 4 . 06 | Sekretariat DPRD |
| 4 . 07 | Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan |
| 4 . 08 | Kesatuan Bangsa dan Politik |

### 6.3.2. Unit Organisasi (SKPD)

**Tabel 6.3 Unit Organisasi (SKPD)**

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 8 | Dinas Sosial |
| 9 | Dinas Ketenagakerjaan |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 15 | Dinas Perhubungan |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 19 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 20 | Dinas Perpustakaan |
| 21 | Dinas Pariwisata |
| 22 | Dinas Pertanian |
| 23 | Sekretariat Daerah |
| 24 | Inspektorat |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 26 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah |
| 28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 29 | Sekretariat DPRD |
| 30 | Kantor Kecamatan Tarutung |
| 31 | Kantor Kecamatan Siatas Barita |
| 32 | Kantor Kecamatan Adiankoting |
| 33 | Kantor Kecamatan Sipoholon |
| 34 | Kantor Kecamatan Pahae Julu |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 35 | Kantor Kecamatan Pahae Jae |
| 36 | Kantor Kecamatan Purbatua |
| 37 | Kantor Kecamatan Simangumban |
| 38 | Kantor Kecamatan Sipahutar |
| 39 | Kantor Kecamatan Pangaribuan |
| 40 | Kantor Kecamatan Garoga |
| 41 | Kantor Kecamatan Siborongborong |
| 42 | Kantor Kecamatan Pagaran |
| 43 | Kantor Kecamatan Parmonangan |
| 44 | Kantor Kecamatan Muara |
| 45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

## 6.4. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

### 1. Penyajian Nilai Jaminan Pemeliharaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat), pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.

b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai 8 program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

### 2. Penyajian Nilai Aset

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan penilaian terhadap aset tetap dalam laporan keuangan Tahun 2024 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan Saldo Awal TA 2024 ditambah nilai perolehan aset tetap pada Tahun Anggaran 2024, penambahan aset tetap juga terjadi dikarenakan adanya reklasifikasi dan inventarisasi aset.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang melibatkan seluruh pengurus barang pengguna SKPD yang akan dilanjutkan pengentrian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada masing-masing SKPD.

Beberapa hal yang menyebabkan pertambahan dan pengurangan nilai aset tetap adalah:

1. Penambahan nilai aset tetap disebabkan adanya:
   a. pengadaan belanja modal aset tetap Tahun Anggaran 2024;

b. mutasi pencatatan antar SKPD;
c. nilai pencatatan rincian aset yang belum tercatat pada buku inventaris aset Tahun Anggaran 2024;
d. Hibah dari pihak ketiga.

2. Pengurangan nilai aset tetap disebabkan adanya:
   a. Koreksi nilai aset tetap atas keadaan fisik yang sebenarnya;
   b. Koreksi nilai aset tetap atas pencatatan berulang;
   c. Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap;
   d. Pengelompokan aset tetap yang rusak berat dicatat menjadi nilai aset lainnya;
   e. Pencatatan mutasi antar SKPD.

**3. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negeri (ASN) per akhir Tahun Anggaran 2024 yaitu PNS sebanyak 4.110 orang dan PPPK sebanyak 2.943 orang dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Golongan IV | = | 934 Orang |
| - | Golongan III | = | 2.600 Orang |
| - | Golongan II | = | 560 Orang |
| - | Golongan I | = | 16 Orang |
| - | PPPK | = | 2.943 Orang |
| - | Jumlah | | 7.053 Orang |

# BAB VII
# PENUTUP

Dari uraian di atas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.437.280.040.724,40 atau 96,23% dari target sebesar Rp1.493.599.771.268,00, kurang realisasi sebesar Rp56.319.730.543,60;
2. Realisasi belanja-LRA sebesar Rp1.375.858.189.855,41 atau 95,38% dari Anggaran sebesar Rp1.442.561.794.484,00 kurang realisasi sebesar Rp66.703.604.628,59;
3. Realisasi Pembiayaan Netto-LRA sebesar (Rp51.017.199.959,13) dari anggaran sebesar (Rp51.037.976.784,00);
4. Jumlah Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.404.650.909,86;
5. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.584.660.729.547,97 dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.665.044.882.484,85 mengalami penurunan sebesar Rp80.384.152.936,88;
6. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.407.335.274.480,14 dibandingkan dengan jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.442.321.546.910,11 mengalami penurunan sebesar Rp34.986.272.429,97;
7. Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp14.099.381.486,46 yang terdiri dari surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp14.099.381.486,46 + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp0,00;
8. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.271.720.431.485,17 yang merupakan (Ekuitas Awal sebesar Rp2.331.755.925.727,85 + surplus LO sebesar Rp14.099.381.486,46 + Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp74.134.875.729,14);
9. Saldo Akhir Kas adalah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Dana BOSP, Kas di Bendahara BOK Puskesmas dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.683.462.109,98;
10. Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar (Rp7.850.262.709,09) sedangkan pada Tahun 2023 penurunan kas sebesar (Rp44.803.312.100,00);

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan juga mengacu kepada Standar Akuntasi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

Tarutung, Mei 2025

**BUPATI TAPANULI UTARA**

**Dr. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si**

Lampiran VIII Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
## DAFTAR PIUTANG DAERAH
### Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | SKPD | Jenis Piutang | Saldo Awal | Penambahan Piutang | Pengurang Piutang | Saldo Akhir Piutang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 10.014.381.000,00 | 0,00 | 10.014.381.000,00 | 0,00 |
| 2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Piutang Pajak Daerah | 13.623.888.653,00 | 3.148.412.236,00 | 890.177.918,00 | 15.882.122.971,00 |
| | | Piutang Retribusi Daerah | 945.529.619,13 | 91.711.268,00 | 58.650.623,00 | 978.590.264,13 |
| | | Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00 | 46.784.244.939,00 | 0,00 | 46.784.244.939,00 |
| 3 | INSPEKTORAT | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 3.155.588.690,00 | 128.620.357,59 | 0,00 | 3.284.209.047,59 |
| 4 | RSU DAERAH TARUTUNG | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 15.287.170.836,21 | 675.575.730,79 | 392.601.800,00 | 15.570.144.767,00 |
| 5 | DINAS KOPERINDAG | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 3.522.788.739,00 | 0,00 | 3.522.788.739,00 |
| | | **Jumlah** | **43.026.558.798,34** | **54.351.353.270,38** | **11.355.811.341,00** | **86.022.100.727,72** |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
# REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
# TAHUN 2024

| NO | JENIS PIUTANG | JUMLAH PIUTANG | JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Piutang Pajak Daerah | 15.882.122.971,00 | 8.869.211.859,00 | 7.012.911.112,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Daerah | 978.590.264,00 | 887.201.964,00 | 91.388.300,00 |
| 3 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 22.377.142.553,00 | 3.522.788.739,00 | 18.854.353.814,00 |
| 4 | Piutang Transfer Antar Daerah | 46.784.244.939,00 | 7.326.102.422,20 | 39.458.142.516,80 |
| **TOTAL** | | **86.022.100.727,00** | **20.605.304.984,20** | **65.416.795.742,80** |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran X Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**

**TAHUN 2024**

| No. | SKPD | JUMLAH DANA BERGULIR | JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISKOPERINDAG | 3.522.788.739,00 | 3.522.788.739,00 | 0,00 |
| | **Jumlah** | **3.522.788.739,00** | **3.522.788.739,00** | **0,00** |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran XI Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah) | Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) | Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah | Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu | Penyertaan Modal Tahun ini | Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini | Sisa modal yang belum disertakan | Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun | Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini | Dikurangi Akumulasi Kerugian sampai Dengan Tahun Ini | Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7+8 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Tahun 2020 | PT. Bank Sumut | - | Saham | 35.665.889.769,00 | 35.665.889.769,00 | - | 35.665.889.769,00 | - | - | - | - | 35.665.889.769,00 |
| 2 | Tahun 2019 | PDAM Mual Natio | - | Non Saham | 41.007.778.870,00 | 41.007.778.870,00 | - | 41.007.778.870,00 | - | 661.534.748,00 | | (7.815.333.547,00) | 33.853.980.071,00 |
| 3 | Tahun 2017 | PERSERODA PERTANIAN | - | Non Saham | 20.500.000.000,00 | 20.500.000.000,00 | - | 20.500.000.000,00 | - | | 3.000.000.000,00 | (10.696.601.765,00) | 6.803.398.235,00 |
| Jumlah | | | | | 97.173.668.639,00 | 97.173.668.639,00 | - | 97.173.668.639,00 | - | 661.534.748,00 | 3.000.000.000,00 | (18.511.935.312,00) | 76.323.268.075,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

DOLOK SARIBAR PASARIBU, SH, MH

Lampiran XII Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

# DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. ASET TETAP TANAH**

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 27.636.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.636.950.000,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 639.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 639.400.000,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 28.002.732.657,00 | 0,00 | 0,00 | 28.002.732.657,00 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 7.814.315.098,00 | 0,00 | 0,00 | 7.814.315.098,00 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 9.104.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.430.000,00 |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.038.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.750.000,00 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 208.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.600.000,00 |
| 10 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 30.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.375.000,00 |
| 11 | Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung | 7.050.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050.624.000,00 |
| 12 | Kantor Kecamatan Tarutung | 6.186.727.836,00 | 0,00 | 0,00 | 6.186.727.836,00 |
| 13 | Kantor Kecamatan Adiankoting | 805.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000.000,00 |
| 14 | Kantor Kecamatan Siatas Barita | 229.331.250,00 | 0,00 | 0,00 | 229.331.250,00 |
| 15 | Kantor Kecamatan Pahae Julu | 1.798.146.140,00 | 7.626.000,00 | 0,00 | 1.805.772.140,00 |
| 16 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | 291.889.450,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889.450,00 |
| 17 | Kantor Kecamatan Purbatua | 129.294.563,00 | 0,00 | 0,00 | 129.294.563,00 |
| 18 | Kantor Kecamatan Simangumban | 105.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600.000,00 |
| 19 | Kantor Kecamatan Sipoholon | 282.401.250,00 | 0,00 | 0,00 | 282.401.250,00 |
| 20 | Kantor Kecamatan Parmonangan | 632.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 632.385.000,00 |
| 21 | Kantor Kecamatan Pagaran | 531.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 531.740.000,00 |
| 22 | Kantor Kecamatan Siborong-borong | 1.559.077.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.077.500,00 |
| 23 | Kantor Kecamatan Muara | 256.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.360.000,00 |
| 24 | Kantor Kecamatan Sipahutar | 907.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 907.850.000,00 |
| 25 | Kantor Kecamatan Pangaribuan | 365.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000.000,00 |
| 26 | Kantor Kecamatan Garoga | 564.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000.000,00 |

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 11.580.009.383,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580.009.383,00 |
| 28 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 39.310.597.903,00 | 256.282.550,00 | 0,00 | 39.566.880.453,00 |
| 29 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 479.632.271.924,00 | 5.394.000,00 | 0,00 | 479.637.665.924,00 |
| 30 | Dinas Lingkungan Hidup | 747.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 747.150.000,00 |
| 31 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 398.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000.000,00 |
| 32 | Dinas Sosial | 333.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.200.000,00 |
| 33 | Dinas Ketenagakerjaan | 4.004.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004.800.000,00 |
| 34 | Dinas Pertanian | 6.002.338.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002.338.160,00 |
| 35 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 4.595.243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.595.243.750,00 |
| 36 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Dinas Perhubungan | 15.069.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.069.930.000,00 |
| 38 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 354.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.200.000,00 |
| 39 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 12.861.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.861.878.000,00 |
| 40 | Badan Keuangan dan Aet Daerah | 179.478.291.900,00 | 0,00 | 0,00 | 179.478.291.900,00 |
| 41 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| **JUMLAH** | | 851.001.890.764,00 | 269.302.550,00 | 0,00 | 851.271.193.314,00 |

**II. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN**

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 38.628.083.561,00 | 211.700.000,00 | 3.468.569.972,00 | 35.371.213.589,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 7.012.872.252,00 | 74.185.000,00 | 25.169.300,00 | 7.061.887.952,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 106.582.480.203,87 | 19.991.870.110,00 | 14.887.661.161,79 | 111.686.689.152,08 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 71.001.546.516,90 | 4.520.252.720,00 | 158.246.338,00 | 75.363.552.898,90 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 2.610.920.400,00 | 1.332.316.704,00 | 11.450.596,32 | 3.931.786.507,68 |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 4.694.920.875,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | 4.747.420.875,00 |
| 7 | Inspektorat | 4.296.266.835,00 | 0,00 | 119.452.072,00 | 4.176.814.763,00 |
| 8 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.889.872.923,00 | 0,00 | 167.314.110,00 | 1.722.558.813,00 |
| 9 | Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa | 1.347.687.022,00 | 29.550.002,00 | 25.325.000,00 | 1.351.912.024,00 |
| 10 | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 523.947.795,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 539.547.795,00 |
| 11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.090.817.259,00 | 270.643.689,00 | 24.283.576,00 | 4.337.177.372,00 |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11.459.139.999,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 11.459.139.999,00 |
| 13 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung | 86.938.432.206,00 | 4.119.144.489,00 | 2.448.103.118,00 | 88.609.473.577,00 |
| 14 | Kantor Kecamatan Tarutung | 1.060.367.417,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.367.417,00 |
| 15 | Kantor Kecamatan Adiankoting | 513.573.547,00 | 0,00 | 81.401.045,00 | 432.172.502,00 |

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kantor Kecamatan Siatas Barita | 386.991.685,00 | 19.400.000,00 | 5.250.000,00 | 401.141.685,00 |
| 17 | Kantor Kecamatan Pahae Julu | 427.864.060,00 | 0,00 | 0,00 | 427.864.060,00 |
| 18 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | 255.632.885,00 | 76.500.000,00 | 54.500.000,00 | 277.632.885,00 |
| 19 | Kantor Kecamatan Purbatua | 411.758.853,00 | 0,00 | 0,00 | 411.758.853,00 |
| 20 | Kantor Kecamatan Simangumban | 318.558.907,00 | 0,00 | 0,00 | 318.558.907,00 |
| 21 | Kantor Kecamatan Sipoholon | 550.277.990,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 550.277.990,00 |
| 22 | Kantor Kecamatan Parmonangan | 442.229.294,00 | 0,00 | 0,00 | 442.229.294,00 |
| 23 | Kantor Kecamatan Pagaran | 480.471.955,00 | 21.660.000,00 | 106.481.629,00 | 395.650.326,00 |
| 24 | Kantor Kecamatan Siborong-borong | 652.100.386,00 | 16.560.000,00 | 75.741.153,00 | 592.919.233,00 |
| 25 | Kantor Kecamatan Muara | 602.626.437,00 | 0,00 | 16.195.895,00 | 586.430.542,00 |
| 26 | Kantor Kecamatan Sipahutar | 382.125.700,00 | 13.200.000,00 | 21.389.038,00 | 373.936.662,00 |
| 27 | Kantor Kecamatan Pangaribuan | 411.527.451,00 | 4.800.000,00 | 33.097.061,00 | 383.230.390,00 |
| 28 | Kantor Kecamatan Garoga | 468.289.594,00 | 0,00 | 70.796.363,00 | 397.493.231,00 |
| 29 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 832.643.489,00 | 0,00 | 8.450.000,00 | 824.193.489,00 |
| 30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2.450.611.687,00 | 125.617.910,00 | 6.700.000,00 | 2.569.529.597,00 |
| 31 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 18.992.038.550,00 | 0,00 | 46.073.320,00 | 18.945.965.230,00 |
| 32 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.290.694.121,00 | 2.093.864.990,00 | 114.345.000,00 | 12.270.214.111,00 |
| 33 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 4.448.075.690,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 4.476.075.690,00 |
| 34 | Dinas Sosial | 1.473.951.391,00 | 14.726.000,00 | 0,00 | 1.488.677.391,00 |
| 35 | Dinas Ketenagakerjaan | 1.679.806.166,00 | 0,00 | 21.372.747,00 | 1.658.433.419,00 |
| 36 | Dinas Pertanian | 20.630.952.384,00 | 71.719.800,00 | 314.947.583,00 | 20.387.724.601,00 |
| 37 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 5.541.245.881,29 | 0,00 | 52.332.941,00 | 5.488.912.940,29 |
| 38 | Dinas Perpustakaan | 2.435.491.312,70 | 9.200.000,00 | 7.000.000,00 | 2.437.691.312,70 |
| 39 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.818.911.374,00 | 0,00 | 81.857.636,00 | 1.737.053.738,00 |
| 40 | Dinas Perhubungan | 6.417.765.727,16 | 0,00 | 89.974.501,00 | 6.327.791.226,16 |
| 41 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6.647.739.635,00 | 27.300.000,00 | 407.429.941,00 | 6.267.609.694,00 |
| 42 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 2.479.609.240,00 | 5.400.000,00 | 96.460.073,00 | 2.388.549.167,00 |
| 43 | Badan Keuangan dan Aet Daerah | 6.519.181.344,00 | 21.775.680,00 | 1.161.718.397,00 | 5.379.238.627,00 |
| 44 | Badan Pendapatan Daerah | 1.808.231.730,19 | 182.675.000,00 | 19.450.554,00 | 1.971.456.176,19 |
| 45 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.939.400.085,00 | 405.435.000,00 | 70.672.423,00 | 2.274.162.662,00 |
| **JUMLAH** | | 444.847.733.816,11 | 33.756.237.894,00 | 24.299.853.344,11 | 454.304.118.366,00 |

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|

**III. ASET TETAP BANGUNAN DAN GEDUNG**

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 39.875.014.407,00 | 0,00 | 0,00 | 39.875.014.407,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 8.424.254.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.424.254.500,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 422.761.348.951,55 | 11.165.385.247,86 | 940.402.051,83 | 432.986.332.147,58 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 113.422.116.660,00 | 0,00 | 0,00 | 113.422.116.660,00 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 30.490.930.217,27 | 2.673.489.390,00 | 344.618.188,72 | 32.819.801.418,55 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2.835.806.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835.806.540,00 |
| 7 | Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa | 646.387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 646.387.500,00 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 744.576.050,00 | 0,00 | 0,00 | 744.576.050,00 |
| 9 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 2.445.448.294,58 | 0,00 | 0,00 | 2.445.448.294,58 |
| 10 | Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung | 42.308.186.407,00 | 303.201.000,00 | 0,00 | 42.611.387.407,00 |
| 11 | Kantor Kecamatan Tarutung | 2.193.021.606,00 | 73.270.000,00 | 73.270.000,00 | 2.193.021.606,00 |
| 12 | Kantor Kecamatan Adiankoting | 905.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 905.200.000,00 |
| 13 | Kantor Kecamatan Siatas Barita | 1.186.866.827,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.866.827,00 |
| 14 | Kantor Kecamatan Pahae Julu | 1.021.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.750.000,00 |
| 15 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | 1.306.151.832,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.151.832,00 |
| 16 | Kantor Kecamatan Purbatua | 613.217.350,00 | 0,00 | 0,00 | 613.217.350,00 |
| 17 | Kantor Kecamatan Simangumban | 671.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 671.560.000,00 |
| 18 | Kantor Kecamatan Sipoholon | 527.766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 527.766.000,00 |
| 19 | Kantor Kecamatan Parmonangan | 769.002.200,00 | 0,00 | 0,00 | 769.002.200,00 |
| 20 | Kantor Kecamatan Pagaran | 932.042.600,00 | 0,00 | 0,00 | 932.042.600,00 |
| 21 | Kantor Kecamatan Siborong-borong | 2.884.167.711,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884.167.711,00 |
| 22 | Kantor Kecamatan Muara | 1.087.830.474,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.830.474,00 |
| 23 | Kantor Kecamatan Sipahutar | 869.634.358,00 | 0,00 | 0,00 | 869.634.358,00 |
| 24 | Kantor Kecamatan Pangaribuan | 1.106.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.015.000,00 |
| 25 | Kantor Kecamatan Garoga | 985.379.134,00 | 0,00 | 0,00 | 985.379.134,00 |
| 26 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 7.649.005.962,00 | 0,00 | 0,00 | 7.649.005.962,00 |
| 27 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 26.513.695.081,00 | 0,00 | 0,00 | 26.513.695.081,00 |
| 28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.165.114.690,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.114.690,00 |
| 29 | Dinas Lingkungan Hidup | 722.942.441,00 | 842.101.225,24 | 109.288.750,00 | 1.455.754.916,24 |
| 30 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 1.668.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.012.000,00 |
| 31 | Dinas Sosial | 878.210.548,00 | 0,00 | 0,00 | 878.210.548,00 |
| 32 | Dinas Ketenagakerjaaan | 2.686.136.409,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.136.409,00 |
| 33 | Dinas Pertanian | 10.800.995.273,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800.995.273,00 |

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 8.389.851.445,00 | 0,00 | 0,00 | 8.389.851.445,00 |
| 35 | Dinas Perpustakaan | 1.810.791.379,31 | 0,00 | 0,00 | 1.810.791.379,31 |
| 36 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.408.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408.158.360,00 |
| 37 | Dinas Perhubungan | 4.156.518.906,56 | 0,00 | 0,00 | 4.156.518.906,56 |
| 38 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4.136.100.290,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136.100.290,00 |
| 39 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 33.286.685.755,00 | 0,00 | 0,00 | 33.286.685.755,00 |
| 40 | Badan Keuangan dan Aet Daerah | 10.245.841.220,73 | 0,00 | 0,00 | 10.245.841.220,73 |
| 41 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.770.720.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 1.770.720.000,00 |
| **JUMLAH** | | 803.302.454.380,00 | 15.059.631.863,10 | 1.469.763.990,55 | 816.892.322.252,55 |

**IV. ASET TETAP JALAN, IRIGASI, JARINGAN**

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 876.014.830,00 | 0,00 | 0,00 | 876.014.830,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 98.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000.000,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 3.186.442.743,73 | 105.100.000,91 | 0,00 | 3.291.542.744,64 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 965.567.744,00 | 2.378.000.000,00 | 2.378.000.000,00 | 965.567.744,00 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 9.065.937.496,03 | 3.553.259.366,00 | 903.356.019,49 | 11.715.840.842,54 |
| 6 | Inspektorat | 36.280.300,00 | 0,00 | 0,00 | 36.280.300,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 29.943.364.226,60 | 3.356.488.220,00 | 1.024.424.965,61 | 32.275.427.480,99 |
| 8 | Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung | 3.630.912.411,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.912.411,00 |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 187.844.758.734,80 | 1.576.950.000,88 | 0,00 | 189.421.708.735,68 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.520.035.127.310,54 | 67.330.586.229,21 | 2.891.318.215,25 | 1.584.474.395.324,50 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 5.226.242.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.226.242.960,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 38.787.616,00 | 0,00 | 0,00 | 38.787.616,00 |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan dan  Perikanan | 51.303.669,00 | 0,00 | 0,00 | 51.303.669,00 |
| 14 | Kantor Kecamatan Tarutung | 14.803.132.354,32 | 710.228.167,46 | 89.839.200,00 | 15.423.521.321,78 |
| 15 | Kantor Kecamatan Sipoholon | 1.824.425.930,02 | 102.600.000,00 | 0,00 | 1.927.025.930,02 |
| 16 | Kantor Kecamatan Pahae Julu | 2.602.524.399,96 | 127.600.000,00 | 0,00 | 2.730.124.399,96 |
| 17 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | 2.102.480.297,00 | 94.750.000,00 | 588.548.300,00 | 1.608.681.997,00 |
| 18 | Kantor Kecamatan Siborongborong | 2.007.331.400,00 | 88.050.650,00 | 88.050.650,00 | 2.007.331.400,00 |
| 19 | Dinas Perhubungan | 5.817.258.848,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817.258.848,00 |
| 20 | Dinas Pertanian | 545.432.754,00 | 0,00 | 0,00 | 545.432.754,00 |
| 21 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 3.867.385.528,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867.385.528,00 |
| 22 | Badan Keuangan dan Aet Daerah | 147.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.750.000,00 |

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | | 1.794.716.461.553,00 | 79.423.612.634,46 | 7.963.537.350,35 | 1.866.176.536.837,11 |

**V. ASET TETAP LAINNYA**

| NO | S K P D | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 630.046.165,00 | 0,00 | 0,00 | 630.046.165,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 17.470.001,00 | 0,00 | 0,00 | 17.470.001,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 20.206.968.906,00 | 8.277.609.889,00 | 282.575.357,00 | 28.202.003.438,00 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 194.248.763,00 | 0,00 | 0,00 | 194.248.763,00 |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 102.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.339.000,00 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.470.000,00 |
| 9 | Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung | 18.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.906.000,00 |
| 10 | Kantor Kecamatan Tarutung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Kantor Kecamatan Garoga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 148.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.445.000,00 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 16 | Dinas Kenagakerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dinas Perpustakaan | 508.160.858,00 | 33.869.430,00 | 6.346.980,00 | 535.683.308,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan | 1.180.791.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.791.521,00 |
| 20 | Badan Keuangan dan Aet Daerah | 36.635.454,00 | 0,00 | 11.045.454,00 | 25.590.000,00 |
| JUMLAH | | 23.063.611.668,00 | 8.311.479.319,00 | 299.967.791,00 | 31.075.123.196,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TAHIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran XIII Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

# REKAPITULASI ASET TETAP

**TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | U R A I A N | SALDO AWAL 2024 (Rp) | PENAMBAHAN (Rp) | PENGURANGAN (Rp) | SALDO AKHIR 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANAH | 851.001.890.764,00 | 269.302.550,00 | 0,00 | 851.271.193.314,00 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 444.847.733.816,11 | 33.756.237.894,00 | 24.299.853.344,11 | 454.304.118.366,00 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 803.302.454.380,00 | 15.059.631.863,10 | 1.469.763.990,55 | 816.892.322.252,55 |
| 4 | JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN | 1.794.716.461.553,00 | 79.423.612.634,46 | 7.963.537.350,35 | 1.866.176.536.837,11 |
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | 23.063.611.668,00 | 8.311.479.319,00 | 299.967.791,00 | 31.075.123.196,00 |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **3.916.932.152.181,11** | **136.820.264.260,56** | **34.033.122.476,01** | **4.019.719.293.965,66** |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran XIV Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR MUTASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | OPD | SALDO AWAL 2024 (Rp) | PENAMBAHAN (Rp.) | PENGURANGAN (Rp.) | SALDO AKHIR 2024 (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NIHIL | | | | |
| JUMLAH | | - | - | - | - |

BUPATI TAPANULI UTARA

JOHNIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran XV Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR ASET LAINNYA**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA SKPD | RUSAK BERAT | HILANG | TIDAK DITEMUKAN FISIK | Aset Lain-Lain Kurang Volume Pekerjaan | Aset Lain-Lain | JUMLAH ASET LAINNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | 4.514.525.566,00 | 0,00 | 356.825.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871.350.966,00 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 968.515.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.515.397,00 |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 7.794.749.087,00 | 0,00 | 55.354.440,00 | 50.897.993,78 | 0,00 | 7.901.001.520,78 |
| 4 | DINAS KESEHATAN | 30.222.730.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.222.730.111,00 |
| 5 | DINAS KETENAGAKERJAAN | 373.090.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.090.360,00 |
| 6 | DINAS PARIWISATA | 1.234.199.213,00 | 0,00 | 87.774.245,00 | 52.722.875,53 | 0,00 | 1.374.696.333,53 |
| 7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 71.451.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.451.067,00 |
| 8 | INSPEKTORAT | 208.120.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.120.810,00 |
| 9 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN | 730.843.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.843.968,00 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | 227.814.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.814.689,00 |
| 11 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 11.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.475.000,00 |
| 12 | BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH | 446.247.690,00 | 0,00 | 0,00 | 21.766.745,61 | 0,00 | 468.014.435,61 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 727.754.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.754.997,00 |
| 14 | DINAS PERPUSTAKAAN | 137.760.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.760.617,00 |
| 15 | RSU DAERAH TARUTUNG | 6.140.652.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140.652.286,00 |
| 16 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 95.211.973,00 | 8.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.661.973,00 |
| 17 | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 219.043.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.043.199,00 |
| 18 | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 141.669.296,00 | 0,00 | 8.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.994.296,00 |
| 19 | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 127.622.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.622.582,00 |
| 20 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 106.952.415,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.302.415,00 |
| 21 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 548.298.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.298.300,00 |
| 22 | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 112.510.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.510.247,00 |
| 23 | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 98.441.695,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.441.695,00 |
| 24 | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 156.635.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.635.482,00 |
| 26 | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 236.462.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.462.559,00 |
| 27 | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 75.741.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.741.153,00 |
| 28 | KANTOR KECAMATAN MUARA | 39.540.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.540.845,00 |
| 29 | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 81.972.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.972.663,00 |
| 30 | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 189.148.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.148.615,00 |
| 31 | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 102.583.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.583.533,00 |
| 32 | DINAS SOSIAL | 169.177.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.177.369,00 |
| 33 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.182.210.181,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.433.320,25 | 0,00 | 4.226.643.501,25 |
| 34 | DINAS PERHUBUNGAN | 1.709.339.551,00 | 0,00 | 24.700.000,00 | 0,00 | 2.650.571.300,00 | 4.384.610.851,00 |
| 35 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 278.962.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.962.945,00 |
| 36 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | 243.985.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.985.159,00 |
| 37 | DINAS PERTANIAN | 1.946.541.421,00 | 0,00 | 17.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.511.421,00 |
| 38 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 134.921.994,00 | 0,00 | 101.020.285,00 | 0,00 | 0,00 | 235.942.279,00 |
| 39 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDA | 734.967.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.967.382,00 |
| 40 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 177.033.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.033.574,00 |
| 41 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.430.169.934,00 | 0,00 | 100.836.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.006.406,00 |
| 42 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1.677.710.676,00 | 0,00 | 53.703.884,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.414.560,00 |
| 43 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19.175.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.175.554,00 |
| 44 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN PERDA | 1.038.015.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.015.468,00 |
| 45 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASI | 136.679.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.679.983,00 |
| JUMLAH | | **68.020.656.606,00** | **8.450.000,00** | **827.859.726,00** | **2.169.820.935,17** | **2.650.571.300,00** | **73.677.358.567,17** |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN, SAG, M.Si, M.Pd, M.H

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR DANA CADANGAN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Tujuan pembentukan dana cadangan | Dasar hukum pembentukan dana cadangan | Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) | Saldo Awal (Rp) | Transfer dari Kas daerah (Rp) | Transfer ke kas daerah (Rp) | Saldo akhir (Rp) | Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **N** | **I** | **H** | | **I** | | **L** | |
| Jumlah | | | | | | | | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | URAIAN | SALDO AWAL | MUTASI TAMBAH | MUTASI KURANG | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1 | Utang Bunga | 3.096.653.900,00 | 1.305.522.106,00 | 3.096.653.900,00 | 1.305.522.106,00 |
| 2 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 69.282.056.597,00 | 69.154.763.638,00 | 69.282.056.597,00 | 69.154.763.638,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima dimuka | 266.221.267,00 | 261.738.734,00 | 266.221.267,00 | 261.738.734,00 |
| 4 | Utang Belanja | 13.242.349.841,00 | 51.649.913.544,00 | 930.844.334,00 | 63.961.419.051,00 |
| 5 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | - | 9.943.018,00 | - | 9.943.018,00 |
| Jumlah | | | | | 134.693.386.547,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | URAIAN | SALDO AWAL | MUTASI TAMBAH | MUTASI KURANG | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1 | Utang Pasar Harungguan Tarutung | 3.986.668.168,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986.668.168,00 |
| 2 | Utang atas Pinjaman Daerah PEN 2020 | 212.804.118.697,00 | 0,00 | 53.201.036.052,00 | 159.603.082.645,00 |
| 3 | Utang atas Pinjaman Daerah PEN 2021 | 29.911.435.819,00 | 0,00 | 15.605.969.436,00 | 14.305.466.383,00 |
| 4 | Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2020 | 656.145.923,00 | 0,00 | 311.669.356,00 | 344.476.567,00 |
| 5 | Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2021 | 43.306.545,00 | 0,00 | 36.088.794,00 | 7.217.751,00 |
| Jumlah | | | | | 178.246.911.514,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran XIX Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMAPI AKHIR TAHUN**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | KODE KEGIATAN | JUDUL KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN TA n-1 | REALISASI TAHUN n-1 | Jumlah Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **N I H I L** | | | | |
| Jumlah | | | | | |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | BUMD/Perusahaan Daerah Tahun | Sumber | Status | Aset Lancar | Aset Tidak Lancar | Aset Lainnya | Total Aset | Kewajiban Jangka Pendek | Kewajiban Jangka Panjang | Total Kewajiban | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | BPYDS | Ekuitas Lainnya | Laba Ditahan | Total Ekuitas | % Saham Daerah | Kepemilikan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | PUD MUAL NATIO | APBD | EKUITAS | Rp13.281.460.224,00 | Rp760.000.000,00 | Rp20.220.367.729,00 | Rp34.261.827.953,00 | Rp71.500.000,00 | Rp162.191.382,00 | Rp233.691.382,00 | Rp41.007.778.870,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | (Rp7.641.177.047,00) | Rp661.534.748,00 | Rp34.028.136.571,00 | 100% | Rp34.028.136.571,00 |
| 2 | PERSERODA PERTANIAN | APBD | EKUITAS | Rp2.677.195.181,00 | Rp9.404.446.388,00 | Rp341.712.991,00 | Rp12.423.354.560,00 | Rp2.619.956.325,00 | Rp0,00 | Rp2.619.956.325,00 | Rp20.500.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | (Rp1.034.204.925,00) | (Rp9.662.396.840,00) | Rp9.803.398.235,00 | 100% | Rp9.803.398.235,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp43.831.534.806,00 |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIGAN PARSAORAN HUTABARAT

Lampiran XX.b Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | BUMD/Perusahaan Daerah Tahun | Sumber | Status | Pendapatan | Beban | Laba (Rugi) Kotor | Pendapatan di luar usaha | Beban di luar usaha | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | PUD MUAL NATIO | APBD | EKUITAS | Rp14.589.346.707,00 | (Rp5.186.189.823,00) | Rp9.403.156.884,00 | Rp118.289.890,00 | (Rp8.859.912.026,00) | Rp661.534.748,00 |
| 2 | PERSERODA PERTANIAN | APBD | EKUITAS | Rp15.746.917.000,00 | (Rp15.122.415.029,00) | Rp624.501.971,00 | (Rp18.984.782,00) | (Rp1.639.722.114,00) | (Rp1.034.204.925,00) |
| | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | (Rp372.670.177,00) |

BUPATI TAPANULI UTARA

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT